PEMERINTAH KOTA MADIUN

PERATURAN WALIKOTA MADIUN
NOMOR 28 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KOTA MADIUN TAHUN 2025



KOTA MADIUN

MADIUN MAJU MENDUNIA

PEMERINTAH KOTA MADIUN

TAHUN 2024

SALINAN

WALI KOTA MADIUN

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALI KOTA MADIUN

NOMOR 28 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MADIUN,

Menimbang : a. bahwa hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota Madiun yang dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 merupakan bahan pembahasan lebih lanjut Tim Anggaran Pemerintah Kota Madiun dan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Madiun tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

13. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
27. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 41 Seri E);
28. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2009 Nomor 3/E);
29. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2009 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2024 Nomor 1/G, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 117);
30. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2016 Nomor 1/C) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2022 Nomor 1/C);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

31. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 40);
32. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2023 Nomor 3/D);
33. Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2024 Nomor 1/G);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA MADIUN TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2025.

Pasal 1

Menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026 dan sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Madiun Tahun 2005-2025 dengan memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya, Rencana Kerja Perangkat Daerah, serta hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota Madiun Tahun 2025 yang dilaksanakan bersama *stakeholders*.

Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara serta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun Tahun Anggaran 2025.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 3 Juli 2024

Pj. WALI KOTA MADIUN,

ttd

EDDY SUPRIYANTO

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 3 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

SOEKO DWI HANDIARTO

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2024 NOMOR 28/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,

Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009

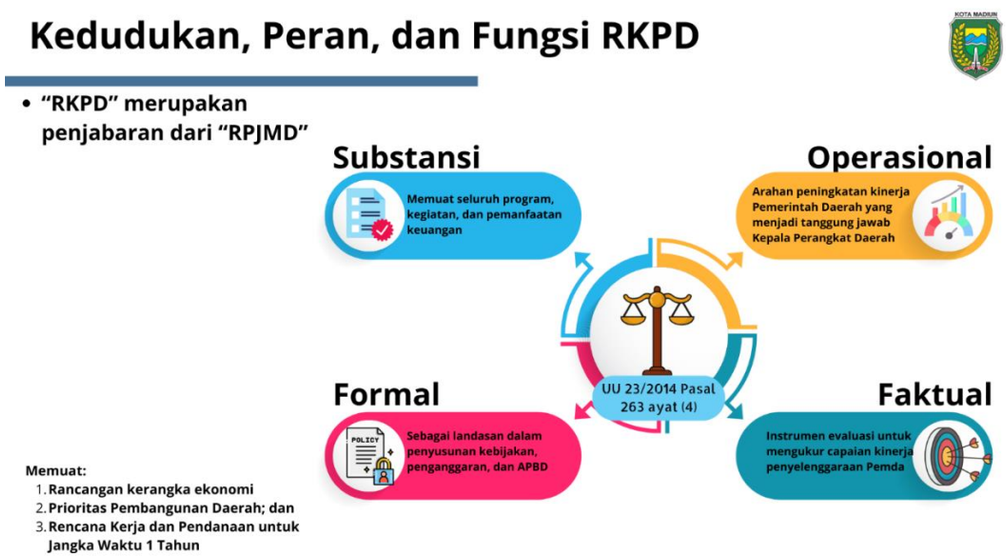
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA MADIUN
NOMOR 28 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dokumen perencanaan pemerintah daerah merupakan suatu kewajiban bagi daerah dan sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Oleh karena itu, setiap pemerintah daerah memiliki kewajiban menyusun rencana pembangunan secara terarah, terpadu, sistematis, dan berkelanjutan. Perencanaan pembangunan daerah yang dimaksud terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) untuk 5 tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) atau tahunan. RKPD memiliki peranan yang sangat penting dalam berjalannya pemerintahan daerah, sebagaimana terlihat pada Gambar 1.1.

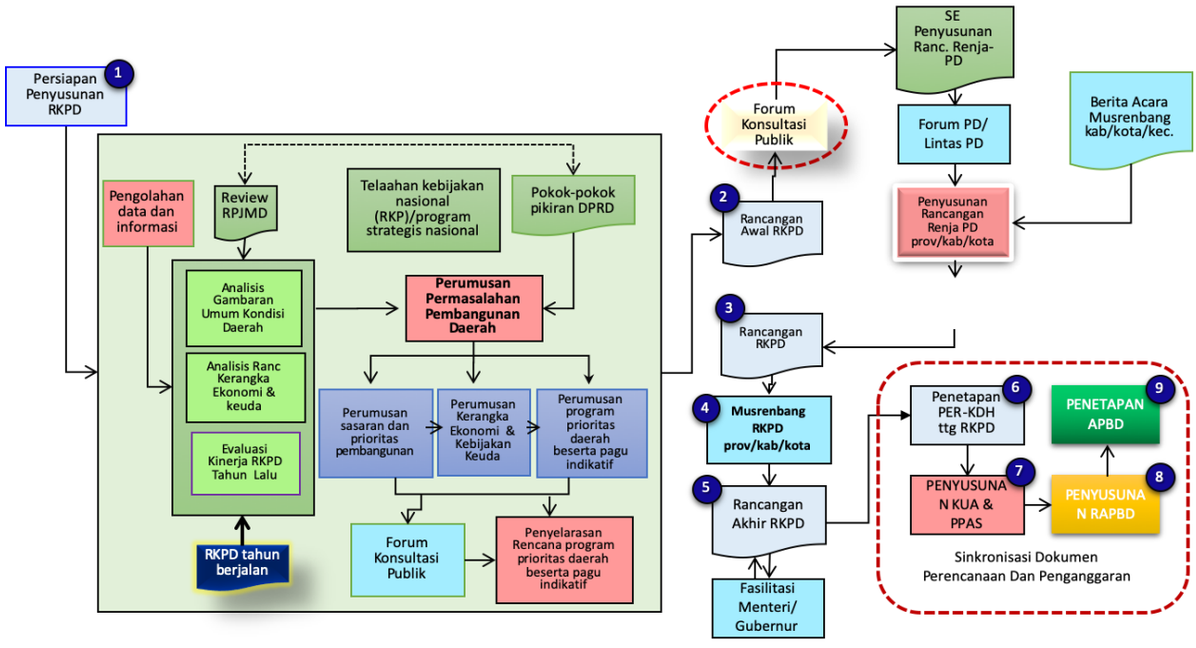


Gambar 1. 1
Kedudukan, Peran dan Fungsi RKPD

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Sesuai dengan gambar di atas, terdapat empat hal terkait kedudukan, peran, dan fungsi RKPD. Pertama, RKPD secara substansial memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun.

Kedua, secara normatif, RKPD menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD). Ketiga, secara operasional, RKPD memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing kepala perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah. Keempat, RKPD secara faktual menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Penyusunan RKPD berpedoman pada arah kebijakan pembangunan nasional, arah kebijakan pembangunan daerah, tahapan dan tata cara penyusunan, tahapan dan tata cara penyusunan perubahan, pengendalian dan evaluasi, serta konsistensi perencanaan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. RKPD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan perencanaan pembangunan sampai penyusunan anggaran.



Sumber: Permendagri 86/2017

Gambar 1. 2 Tahapan Penyusunan RKPD

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Sebagaimana termuat pada Gambar 1.2 di atas, Dokumen RKPD Kota Madiun Tahun 2025 disusun melalui enam tahapan utama sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 16 Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Tahapan penyusunan RKPD meliputi:

1. persiapan penyusunan RKPD;
2. penyusunan rancangan awal RKPD;
3. penyusunan rancangan RKPD;
4. pelaksanaan Musrenbang RKPD Kota;
5. perumusan rancangan akhir RKPD; dan
6. penetapan RKPD.

Sebagaimana gambar di bawah, terdapat 4 (empat) pendekatan yang dilakukan dalam menyusun RKPD Kota Madiun Tahun 2025. Keempat pendekatan tersebut meliputi: (1) pendekatan politik, (2) pendekatan teknokratik, (3) pendekatan partisipatif, serta (4) pendekatan *bottom up* dan *top down*. Pendekatan politik digunakan untuk mengakomodasi program-program pembangunan yang ditawarkan oleh kepala daerah. Pendekatan teknokratik menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah yang dilakukan oleh perencana profesional atau lembaga/unit organisasi. Pendekatan partisipatif mengakomodir masukan pemangku kepentingan melalui pelaksanaan musrenbang. Pendekatan *bottom up dan top down* merupakan merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten, Provinsi, hingga nasional.



Gambar 1. 3
Pendekatan Penyusunan dan Orientasi RKPD Kota Madiun

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Sebagaimana termuat pada Gambar 1.3 di atas, Selain 4 (empat) pendekatan di atas, pendekatan perencanaan pembangunan di Kota Madiun juga berorientasi substantif Holistik-Tematik, Integratif dan Spasial. Pendekatan Holistik-Tematik menekankan pada penanganan yang menyeluruh dan terfokus pada kegiatan yang relevan dengan pencapaian tujuan program prioritas. Dalam pendekatan ini, koordinasi dengan perangkat daerah terkait menjadi suatu fungsi yang krusial. Selanjutnya, perencanaan pembangunan di Kota Madiun mengadopsi pendekatan integratif. Pendekatan integratif mengacu pada keterpaduan seluruh program dan kegiatan yang saling memperkuat dan selaras dalam mencapai sasaran prioritas daerah. Sedangkan pendekatan spasial mengacu pada pertimbangan dimensi keruangan dalam perencanaan, sehingga kegiatan yang direncanakan berdasarkan data dan informasi yang baik serta lokasi yang jelas sehingga memudahkan proses integrasi dan pemantauan kegiatan di lapangan.

Penyusunan RKPD Kota Madiun Tahun 2025 telah melibatkan para pemangku kepentingan dan dilakukan berbasis Sistem Informasi Perangkat Daerah (SIPD). Para pemangku kepentingan berperan serta melalui Forum Konsultasi Publik. Forum ini dilaksanakan guna menghimpun masukan atau harapan para pemangku kepentingan dalam rumusan prioritas dan sasaran pembangunan tahunan, rancangan program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja serta lokasi dan pemangku kepentingan yang relevan sebagai penerima manfaat. Selain itu, keterlibatan *stakeholder* juga dilakukan pada Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Musrenbang secara partisipatif dilakukan mulai dari Musrenbang tingkat kelurahan dan Musrenbang tingkat kecamatan. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghimpun usulan masyarakat dan pemerintahan paling dasar (Kelurahan) berdasarkan prioritas masyarakat. Tujuan dari dilaksanakannya Musrenbang Kecamatan adalah untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan usulan rencana kegiatan pembangunan kelurahan, yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah di wilayah kecamatan, forum Perangkat Daerah (PD) dan selanjutnya diformulasikan melalui forum Musrenbang RKPD di Kota. Berdasar dari usulan-usulan tersebut, diharapkan dari adanya pelaksanaan Musrenbang mampu menjaring aspirasi masyarakat ditingkat dasar dan akan disesuaikan dengan program kegiatan di masing-masing PD sehingga menghasilkan program pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat di tingkat dasar.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

RKPD Tahun 2025 secara praktis merupakan awal pelaksanaan perencanaan pembangunan Kota Madiun, mengacu pada RPD Kota Madiun periode 2025–2026. Selain itu, penyusunan RKPD Kota Madiun Tahun 2025 juga mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 dan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025, RPJPD Kota Madiun 2005-2025, dan rancangan awal RPJPD Kota Madiun 2025-2045. Dalam perumusan dan penyusunan perencanaan tahunan ini, Pemerintah Kota Madiun melibatkan semua *stakeholders* (pemangku kepentingan), mulai dari masyarakat pada tingkat Kelurahan, seluruh PD, LSM, DPRD, lembaga masyarakat, sampai dengan akademisi.

RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Penentuan Prioritas dan Plafon Anggran Sementara (PPAS). Selanjutnya, KUA dan PPAS yang telah disepakati akan digunakan sebagai acuan dalam proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025. Muatan yang terdapat dalam RKPD, antara lain kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum dalam penyusunan RKPD Kota Madiun Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
14. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
23. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan;
24. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
25. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Kekerasan Berbasis Gender dalam Bencana;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
32. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;

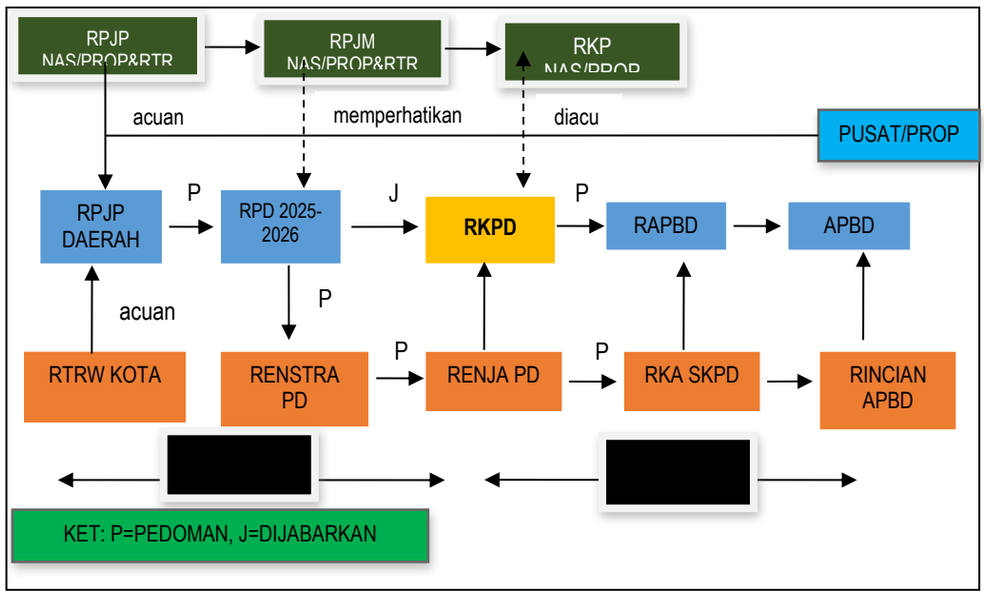
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

33. Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
34. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
35. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
36. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Pada Tahun 2024;
37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender;
38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2023- 2043;
39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 100 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2026;
40. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
41. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tahun 2025;
42. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun Tahun 2005-2025;
43. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 7 Tahun 2022;
44. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
45. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2023-2043;
46. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2024;
47. Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Madiun Tahun 2025-2026;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1.3 Hubungan Antar Dokumen

RKPD Kota Madiun Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan daerah yang terintegrasi dan menjadi satu kesatuan dengan dokumen perencanaan lain baik di tingkat nasional maupun daerah. Dokumen perencanaan dan dan penganggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah antara lain: (1) RPJPD; (2) RPJMD; (3) Renstra-PD; (4) RKPD dan (5) Renja-PD. Sedangkan dokumen di luar Kota Madiun yang terkait dengan dokumen ini antara lain: (1) RPJP Nasional dan Provinsi; (2) RPJM Nasional dan Provinsi; dan (3) RKP Nasional dan Provinsi. Diagram keterkaitan hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1. 4
Keterkaitan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Sebagaimana termuat pada Gambar 1.4 di atas, RKPD Kota Madiun Tahun 2025 memuat rincian dari arah kebijakan pembangunan RPD Kota Madiun 2025-2026. RKPD Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024; Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024; Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2023 tentang RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2024, serta berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Madiun Tahun 2005-2025. Selanjutnya Dokumen RKPD Kota Madiun Tahun 2025 akan menjadi acuan penyusunan Rancangan APBD dan Renja perangkat daerah Tahun 2025 Kota Madiun. Keterkaitan antar dokumen ini penting bagi penyusunan kebijakan daerah yang konsisten demi mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Keterkaitan dokumen sebagaimana Gambar 1.4 merupakan keselarasan yang harus dijaga serta konsistensi dokumen perencanaan, RKPD Kota Madiun yang selaras dan mendukung Prioritas Nasional dalam RKP dan Prioritas Provinsi dalam RKPD Provinsi Jawa Timur, selaras dan konsisten dengan RPJMD Kota Madiun terkait Program serta melihat RPJP Kota Madiun, selain itu juga berpedoman pada RTRW Kota Madiun.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Madiun Tahun 2025 yaitu sebagai pedoman perencanaan bagi semua *stakeholders* (pemangku kepentingan) dalam pembangunan Kota Madiun Tahun 2025. Secara khusus, maksud penyusunan RKPD Tahun 2025 sebagai berikut:

1. menyiapkan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang selaras, terintegrasi dan bersinergi dengan rencana pembangunan nasional yang tertuang dalam dokumen RKP Tahun 2025;
2. meningkatkan koordinasi dan menyamakan persepsi perencanaan pembangunan antar *stakeholder*, sehingga dokumen perencanaan Tahun 2025 memuat kebijakan publik untuk dapat dijadikan acuan seluruh komponen masyarakat Kota Madiun dalam melaksanakan perannya;
3. menyediakan dokumen kebijakan Pemerintah Daerah dan menginformasikan arah pelaksanaan pembangunan Tahun 2025; dan
4. memberikan arah dan sekaligus tolok ukur keberhasilan pembangunan.

Adapun tujuannya yaitu sebagai berikut:

1. menjadi acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025;
2. menjadi pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Madiun dalam menyusun Rancangan dokumen Renja 2025;
3. menjadi pedoman dalam penyusunan KUA, PPAS dan RAPBD Tahun Anggaran 2025; dan
4. terwujudnya keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan untuk mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Madiun Tahun 2025 mengikuti sistematika penulisan Sesuai dengan ketetapan dalam Pasal 79 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab I ini mencakup informasi mengenai latar belakang penyusunan RKPD Kota Madiun, dasar hukum penyusunan RKPD, hubungan keterkaitan RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya, maksud dan tujuan RKPD, dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Dalam Bab II menjabarkan tentang gambaran umum kondisi daerah yang terkait dengan aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah. Selain itu pada bab II ini juga menjelaskan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun 2023 dan realisasi dari Rancangan Perubahan RPJMD dan permasalahan pembangunan.

BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Pada bab III menjelaskan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menjabarkan perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan. Bab ini juga menjelaskan tujuan dan sasaran pembangunan, prioritas pembangunan daerah Tahun 2025, dan program pembangunan daerah Tahun 2025.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bab ini menguraikan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini menjelaskan tentang penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII : PENUTUP

Pada bab penutup dikemukakan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen RKPD, sebagai pedoman bagi semua pihak dalam memfungsikan RKPD sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

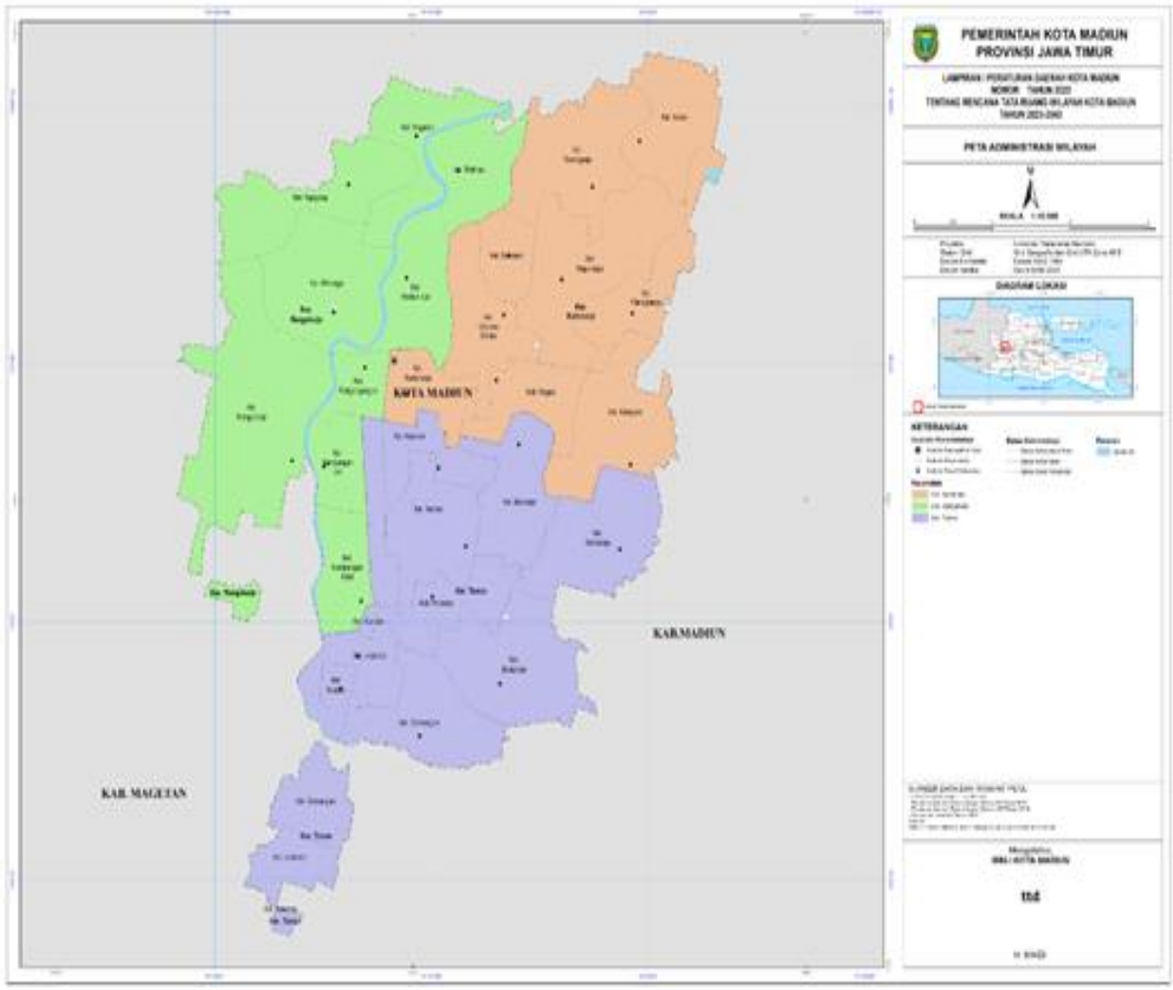
2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah

Pemerintah Kota Madiun dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa. Kota Madiun merupakan salah satu Pemerintahan Kota yang secara administrasi wilayah masuk ke dalam wilayah Provinsi Jawa Timur. Luas wilayah Kota Madiun sebesar 33,23 km^2 yang terbagi dalam 3 (tiga) kecamatan dan 27 (dua puluh tujuh) kelurahan, yaitu Kecamatan Manguharjo dengan luas 10,04 km^2, Kecamatan Taman dengan luas 12,46 km^2 dan Kecamatan Kartoharjo dengan luas 10,73 km^2, masing-masing kecamatan di Kota Madiun terdiri atas 9 (sembilan) kelurahan. Secara geografis, Kota Madiun berada di tengah-tengah Kabupaten Madiun, sehingga wilayah Kota Madiun berbatasan langsung dengan beberapa kecamatan di Kabupaten Madiun dan Magetan, di antaranya:

1. Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun, di sebelah utara;
2. Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, di sebelah selatan;
3. Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun, di sebelah timur; dan
4. Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun dan Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan, di sebelah barat.

Melihat kondisi tersebut di atas maka dapat diketahui batas-batas wilayah pada masing-masing kelurahan beserta zona-zona penggunaan lahan sesuai hasil revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun sebagaimana termuat pada Gambar 2.1 di bawah.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



Sumber: RTRW Kota Madiun Tahun 2023-2043

Gambar 2. 1
Wilayah Administrasi Kota Madiun

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

a. Geografi

1. Posisi Astronomis

Secara astronomis Kota Madiun terletak pada 111 BT–112 BT dan 7 LS–8 LS. Posisi yang strategis menjadikan Kota Madiun sebagai Pusat Kegiatan Wilayah Jawa Timur bagian barat yang memiliki fungsi sebagai pusat pelayanan pemerintahan, perdagangan, jasa, industri, pendidikan dan kesehatan.

2. Kondisi geografis

Berdasarkan aspek geografis, Kota Madiun berada pada ketinggian 63 hingga 67 meter dari permukaan laut. Daratan dengan ketinggian 63 meter dari permukaan air laut terletak di tengah, sedangkan daratan dengan ketinggian 67 meter dari permukaan air laut terletak di sebelah selatan. Rentang temperatur udara di Kota Madiun antara 20℃ hingga 35℃.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

3. Kondisi Topografi

Ditinjau dari kondisi topografi wilayahnya, Kota Madiun terletak di lembah sungai Madiun yaitu sekitar 30 Km di sebelah selatan pertemuan antara sungai Madiun dan Sungai Bengawan Solo dan berada pada ketinggian rata-rata 65 m di atas permukaan laut. Keadaan topografi di Kota Madiun di bagian selatan mempunyai ketinggian 67 m di atas permukaan laut dan di bagian utara 64 m, sedangkan di bagian tengah ketinggiannya 63 m di atas permukaan laut. Perbedaan ketinggian antara bagian wilayah yang satu dengan wilayah yang lainnya sangat kecil dengan kemiringan rata-rata 0-2% atau dapat dikatakan relatif datar. Kondisi tersebut merupakan potensi besar untuk pengembangan fisik kota.

4. Kondisi Geologi

Ditinjau dari aspek geologi, struktur dan karakteristik lahan dan potensi kandungan di Kota Madiun sebagian besar terdiri atas Aluvium dan jenis tanahnya termasuk alluvial yang mempunyai kadar mineral dan organisme yang cukup tinggi hal ini disebabkan jenis tanah tersebut merupakan campuran dari tanah liat dengan pasir halus yang berwarna hitam kelabu dengan daya penahanan air yang cukup baik dan dapat menyerap air. Kedalaman efektif tanah di Kota Madiun sebagian besar mempunyai kedalaman di atas 90 cm dengan kemiringan lahan yang relatif datar maka kondisi lahan di kota ini relatif tidak mengalami erosi.

5. Kondisi Hidrologi

Secara Hidrologi Kota Madiun terdiri atas air tanah dan air permukaan tanah. Sumber air tanah dan air permukaan tanah selain dari dasar tanah dan permukaan tanah juga berasal dari 2 (dua) sungai yang melewati Kota Madiun yaitu Sungai Catur dan Sungai Madiun. Selain itu terdapat pula anak-anak Sungai Madiun yaitu: Sungai Sono dan Sungai Piring yang merupakan saluran irigasi lahan pertanian di wilayah Kota Madiun.

6. Kondisi Klimatologi

Kondisi Klimatologis Kota Madiun dipengaruhi oleh faktor keadaan iklim, kondisi geografis dan perputaran arus udara bahwa musim penghujan di Kota Madiun terjadi antara bulan Desember sampai dengan Mei. Musim kemarau terjadi antara bulan Juni sampai dengan bulan November. Selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir curah hujan yang terjadi di Kota Madiun termasuk kategori menengah yaitu antara 101–300 mm/bulan.

Kondisi tersebut dapat mempengaruhi jumlah air di permukaan tanah dan ketersediaan air di dalam tanah serta sangat potensial untuk kegiatan pertanian.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

7. Penggunaan lahan

Pola penggunaan lahan pada dasarnya dibagi menjadi dua kelompok yaitu kawasan terbangun dan kawasan tidak terbangun. Kawasan terbangun meliputi permukiman dengan fasilitas pendukungnya, sedangkan kawasan tidak terbangun meliputi sawah tegalan/kebun, perkebunan, kolam/empang. Madiun merupakan daerah urban, sehingga dominasi penggunaan lahannya untuk kawasan terbangun yang berkembang pesat pada wilayah Kecamatan Kartoharjo dan Kecamatan Taman. Untuk kawasan tidak terbangun berupa lahan pertanian yang merupakan sawah irigasi teknis sebagian besar berada pada Kecamatan Manguharjo. Sebagai kawasan urban, Kota Madiun pada tahun 2023 memiliki kawasan terbangun seluas 2.100 Ha atau 63,20% dari luas kota. Sedang untuk kawasan yang tidak terbangun meliputi 1.223 Ha atau sekitar 36,80% dari luas kota yang terbagi atas sawah seluas 884 Ha dan lahan pertanian non sawah seluas 339 Ha.

Tabel 2. 1 Penggunaan Lahan di Kota Madiun, 2019-2023

No.	Penggunaan Lahan	Luas Lahan (Ha)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Sawah	892	892	890	884	884
2.	Lahan Pertanian Non Sawah	372	372	359	339	339
1.	Permukiman beserta Fasilitasnya	2.059	2.059	2.074	2.100	2.100
Luas Lahan Keseluruhan		3.323	3.323	3.323	3.323	3.323

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun, 2023

8. Potensi Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah Kota Madiun telah disiapkan beberapa kawasan pengembangan seperti kawasan pengembangan pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, industri, pariwisata, permukiman, dan pengembangan aktivitas lainnya. Pengembangan pertanian Kota Madiun melalui padi dan palawija dengan luas lahan yang dipertahankan seluas 892 Ha yang tersebar di tiga kecamatan diarahkan untuk mendorong terwujudnya kedaulatan pangan. Selanjutnya pengembangan perikanan terfokus pada pengembangan ikan air tawar khususnya ikan lele. Pengembangan sektor peternakan cukup potensial seperti ternak sapi, kerbau, kambing, ayam, dan bebek.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Pemerintah Kota Madiun telah mempersiapkan kawasan pengembangan perkebunan seluas 114 Ha dan kawasan pengembangan industri seluas 22,7 Ha yang tersebar di Kecamatan Manguharjo, Taman, dan Kartoharjo. Selanjutnya perlu adanya perhatian dan pengembangan kawasan pariwisata yang memiliki nilai jual dan layak dipromosikan. Yang perlu diperhatikan dari pengembangan kawasan untuk permukiman yaitu munculnya pemukiman liar dan kepadatan penduduk dimasa mendatang. Terakhir kawasan pengembangan aktivitas lainnya terdiri atas kawasan untuk perdagangan dan jasa seluas 132,70 Ha, jalur perlintasan kereta api seluas 56 km^2, dan kawasan untuk peningkatan pertahanan dan keamanan seluas 39,37 Ha.

9. Wilayah Rawan Bencana

Dari Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) yang diterbitkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada tahun 2019, Kota Madiun termasuk wilayah yang memiliki kelas risiko bencana multi ancaman dalam kategori sedang. Menurut jenis bencana, kelas risiko bencana yang tinggi di Kota Madiun adalah untuk bencana banjir, gempa bumi, kebakaran lahan dan hutan, dan kekeringan.

Hasil analisis kajian risiko bencana Kota Madiun Tahun 2023 didapat beberapa potensi risiko bencana yang mungkin terjadi yaitu:

a) Potensi Bahaya Banjir dengan sebaran:

Tabel 2. 2 Hasil analisis Potensi Bahaya Banjir

No	Kelurahan	Luas (Ha)				Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
1	2	3	4	5	6	7
1	Banjarejo	193,30	-	2,75	196,05	RENDAH
2	Demangan	106,09	48,78	74,5	229,37	RENDAH
3	Josenan	22,36	37,72	84,65	144,73	TINGGI
4	Kejuron	34,71	42,63	84,52	161,86	TINGGI
5	Kuncen	0,12	17,96	24,25	42,33	TINGGI
6	Manisrejo	32,5	98,83	35,31	166,64	SEDANG
7	Mojorejo	27,49	18,53	81,11	127,13	TINGGI
8	Pandean	92,20	39,34	2,60	134,14	RENDAH
9	Taman	87,42	36,68	5,4	129,5	RENDAH
10	Oro-Oro Ombo	-	29,06	58,22	87,28	TINGGI
11	Sukosari	-	7,57	59,74	67,31	TINGGI
12	Klegen	2,01	44,08	40,97	87,06	SEDANG
13	Rejomulyo	-	28,5	182,47	210,97	TINGGI
14	Pilangbango	2,53	27,5	88,31	118,34	TINGGI
15	Tawangrejo	2,57	71,52	83,43	157,62	TINGGI
16	Kanigoro	2,14	68,62	74,94	145,7	TINGGI
17	Kartoharjo	0,10	57,57	23,72	81,39	SEDANG

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2	3	4	5	6	7
18	Kelun	4,81	50,83	74,72	130,36	TINGGI
19	Mangunharjo	36,50	58,39	79,72	174,61	TINGGI
20	Sogaten	45,13	35,29	48,22	128,64	TINGGI
21	Patihan	1,53	50,35	83,78	135,66	TINGGI
22	Ngegong	67,66	39,26	29,28	136,2	RENDAH
23	Winongo	93,12	78,76	40,63	212,51	RENDAH
24	Madiun Lor	-	96,74	40,69	137,43	SEDANG
25	Pangongangan	1,55	36,07	36,41	74,03	TINGGI
26	Nambangan Lor	10,32	40,63	51,99	102,94	TINGGI
27	Nambangan Kidul	10,42	60,08	55,69	126,19	SEDANG
Kota Madiun		876,58	1.221,29	1.548,02	3.645,99	TINGGI

b) Potensi Bahaya Cuaca Ekstrim dengan sebaran:

Tabel 2. 3 Potensi Bahaya Cuaca Ekstrim

No	Kelurahan	Luas (Ha)				Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
1	2	3	4	5	6	7
1	Banjarejo	-	196,06	-	196,06	SEDANG
2	Demangan	-	229,37	-	229,37	SEDANG
3	Josenan	-	144,73	-	144,73	SEDANG
4	Kejuron	-	161,85	-	161,85	SEDANG
5	Kuncen	-	42,34	-	42,34	SEDANG
6	Manisrejo	-	166,64	-	166,64	SEDANG
7	Mojorejo	-	127,14	-	127,14	SEDANG
8	Pandean	-	133,96	-	133,96	SEDANG
9	Taman	-	129,5	-	129,5	SEDANG
10	Oro-Oro Ombo	-	87,28	-	87,28	SEDANG
11	Sukosari	-	67,31	-	67,31	SEDANG
12	Klegen	-	89,58	-	89,58	SEDANG
13	Rejomulyo	-	210,96	-	210,96	SEDANG
14	Pilangbango	-	118,34	-	118,34	SEDANG
15	Tawangrejo	-	157,53	-	157,53	SEDANG
16	Kanigoro	-	175,03	-	175,03	SEDANG
17	Kartoharjo	-	81,4	-	81,4	SEDANG
18	Kelun	-	130,35	-	130,35	SEDANG
19	Mangunharjo	-	174,61	-	174,61	SEDANG
20	Sogaten	-	128,63	-	128,63	SEDANG
21	Patihan	-	135,66	-	135,66	SEDANG
22	Ngegong	-	136,21	-	136,21	SEDANG
23	Winongo	-	212,51	-	212,51	SEDANG
24	Madiun Lor	-	137,43	-	137,43	SEDANG
25	Pangongangan	-	74,03	-	74,03	SEDANG
26	Nambangan Lor	-	103,04	-	103,04	SEDANG
27	Nambangan Kidul	-	126,09	-	126,09	SEDANG
Kota Madiun		-	3.677,58	-	3.677,58	SEDANG

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

c) Potensi Bahaya Gempa Bumi dengan sebaran:

Tabel 2. 4 Potensi Bahaya Gempa Bumi

No	Kelurahan	Luas (Ha)				Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
1	Banjarejo	-	196,05	-	196,05	SEDANG
2	Demangan	-	229,37	-	229,37	SEDANG
3	Josenan	-	144,73	-	144,73	SEDANG
4	Kejuron	-	161,85	-	161,85	SEDANG
5	Kuncen	-	42,34	-	42,34	SEDANG
6	Manisrejo	-	166,64	-	166,64	SEDANG
7	Mojorejo	-	127,14	-	127,14	SEDANG
8	Pandean	-	133,96	-	133,96	SEDANG
9	Taman	-	129,50	-	129,50	SEDANG
10	Oro-Oro Ombo	-	87,28	-	87,28	SEDANG
11	Sukosari	-	67,31	-	67,31	SEDANG
12	Klegen	-	89,58	-	89,58	SEDANG
13	Rejomulyo	-	210,96	-	210,96	SEDANG
14	Pilangbango	-	118,34	-	118,34	SEDANG
15	Tawangrejo	-	157,53	-	157,53	SEDANG
16	Kanigoro	-	175,03	-	175,03	SEDANG
17	Kartoharjo	-	81,40	-	81,40	SEDANG
18	Kelun	-	130,35	-	130,35	SEDANG
19	Mangunharjo	0,56	174,05	-	174,61	SEDANG
20	Sogaten	17,44	111,19	-	128,63	SEDANG
21	Patihan	9	126,66	-	135,66	SEDANG
22	Ngegong	-	136,21	-	136,21	SEDANG
23	Winongo	3,42	209,09	-	212,51	SEDANG
24	Madiun Lor	8,9	128,53	-	137,43	SEDANG
25	Pangongangan	3,63	70,4	-	74,03	SEDANG
26	Nambangan Lor	-	103,04	-	103,04	SEDANG
27	Nambangan Kidul	-	126,09	-	126,09	SEDANG
Kota Madiun		42,95	3.634,62	-	3.677,57	SEDANG

d) Potensi Bahaya Kekeringan dengan sebaran:

Tabel 2. 5 Potensi Bahaya Kekeringan

No	Kelurahan	Luas (Ha)				Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
1	2	3	4	5	6	7
1	Banjarejo	-	-	196,05	196,05	TINGGI
2	Demangan	-	-	229,37	229,37	TINGGI
3	Josenan	-	-	144,73	144,73	TINGGI
4	Kejuron	-	-	161,85	161,85	TINGGI
5	Kuncen	-	-	42,34	42,34	TINGGI
6	Manisrejo	-	-	166,64	166,64	TINGGI
7	Mojorejo	-	-	127,14	127,14	TINGGI
8	Pandean	-	-	133,96	133,96	TINGGI
9	Taman	-	-	129,50	129,50	TINGGI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2	3	4	5	6	7
10	Oro-Oro Ombo	-	-	87,28	87,28	TINGGI
11	Sukosari	-	-	67,31	67,31	TINGGI
12	Klegen	-	-	89,58	89,58	TINGGI
13	Rejomulyo	-	-	210,96	210,96	TINGGI
14	Pilangbango	-	-	118,34	118,34	TINGGI
15	Tawangrejo	-	-	157,53	157,53	TINGGI
16	Kanigoro	-	-	175,03	175,03	TINGGI
17	Kartoharjo	-	-	81,40	81,40	TINGGI
18	Kelun	-	-	130,35	130,35	TINGGI
19	Mangunharjo	-	-	174,61	174,61	TINGGI
20	Sogaten	-	-	128,63	128,63	TINGGI
21	Patihan	-	-	135,66	135,66	TINGGI
22	Ngegong	-	-	136,21	136,21	TINGGI
23	Winongo	-	-	212,51	212,51	TINGGI
24	Madiun Lor	-	-	137,43	137,43	TINGGI
25	Pangongangan	-	-	73,44	73,44	TINGGI
26	Nambangan Lor	-	-	103,04	103,04	TINGGI
27	Nambangan Kidul	-	-	126,09	126,09	TINGGI
Kota Madiun		-	-	3.676,96	3.676,96	TINGGI

e) Potensi Bahaya Epidemi dan Wabah Penyakit dengan sebaran:

Tabel 2. 6 Potensi Bahaya Epidemi dan Wabah Penyakit

No	Kelurahan	Luas (Ha)				Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
1	2	3	4	5	6	7
1	Banjarejo	196,05	-	-	196,05	RENDAH
2	Demangan	229,37	-	-	229,37	RENDAH
3	Josenan	144,73	-	-	144,73	RENDAH
4	Kejuron	161,85	-	-	161,85	RENDAH
5	Kuncen	42,34	-	-	42,34	RENDAH
6	Manisrejo	166,64	-	-	166,64	RENDAH
7	Mojorejo	127,14	-	-	127,14	RENDAH
8	Pandean	122,96	-	-	122,96	RENDAH
9	Taman	129,5	-	-	129,5	RENDAH
10	Oro-Oro Ombo	87,28	-	-	87,28	RENDAH
11	Sukosari	67,31	-	-	67,31	RENDAH
12	Klegen	89,58	-	-	89,58	RENDAH
13	Rejomulyo	210,96	-	-	210,96	RENDAH
14	Pilangbango	118,34	-	-	118,34	RENDAH
15	Tawangrejo	157,53	-	-	157,53	RENDAH
16	Kanigoro	175,03	-	-	175,03	RENDAH
17	Kartoharjo	81,40	-	-	81,40	RENDAH
18	Kelun	130,35	-	-	130,35	RENDAH
19	Mangunharjo	174,61	-	-	174,61	RENDAH
20	Sogaten	128,63	-	-	128,63	RENDAH
21	Patihan	135,66	-	-	135,66	RENDAH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2	3	4	5	6	7
22	Ngegong	136,21	-	-	136,21	RENDAH
23	Winongo	212,51	-	-	212,51	RENDAH
24	Madiun Lor	137,43	-	-	137,43	RENDAH
25	Pangongangan	74,03	-	-	74,03	RENDAH
26	Nambangan Lor	103,04	-	-	103,04	RENDAH
27	Nambangan Kidul	126,09	-	-	126,09	RENDAH
Kota Madiun		3.677,56	-	-	3.677,56	RENDAH

f) Potensi Bahaya Kegagalan Teknologi dengan sebaran:

Tabel 2. 7 Potensi Bahaya Kegagalan Teknologi

No	Kelurahan	Luas (Ha)				Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
1	Banjarejo	196,05	-	-	196,05	RENDAH
2	Demangan	229,37	-	-	229,37	RENDAH
3	Josenan	144,73	-	-	144,73	RENDAH
4	Kejuron	161,85	-	-	161,85	RENDAH
5	Kuncen	42,34	-	-	42,34	RENDAH
6	Manisrejo	166,64	-	-	166,64	RENDAH
7	Mojorejo	127,14	-	-	127,14	RENDAH
8	Pandean	133,96	-	-	133,96	RENDAH
9	Taman	129,50	-	-	129,50	RENDAH
10	Oro-Oro Ombo	87,28	-	-	87,28	RENDAH
11	Sukosari	67,31	-	-	67,31	RENDAH
12	Klegen	89,58	-	-	89,58	RENDAH
13	Rejomulyo	210,96	-	-	210,96	RENDAH
14	Pilangbango	118,34	-	-	118,34	RENDAH
15	Tawangrejo	157,53	-	-	157,53	RENDAH
16	Kanigoro	175,03	-	-	175,03	RENDAH
17	Kartoharjo	81,40	-	-	81,40	RENDAH
18	Kelun	130,35	-	-	130,35	RENDAH
19	Mangunharjo	174,61	-	-	174,61	RENDAH
20	Sogaten	128,63	-	-	128,63	RENDAH
21	Patihan	-	135,66	-	135,66	SEDANG
22	Ngegong	-	136,21	-	136,21	SEDANG
23	Winongo	212,51	-	-	212,51	RENDAH
24	Madiun Lor	-	137,43	-	137,43	SEDANG
25	Pangongangan	74,03	-	-	74,03	RENDAH
26	Nambangan Lor	103,04	-	-	103,04	RENDAH
27	Nambangan Kidul	126,09	-	-	126,09	RENDAH
Kota Madiun		3.268,27	409,3	-	3.677,57	RENDAH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

g) Potensi Bahaya Likuefaksi dengan sebaran:

Tabel 2. 8 Potensi Bahaya Pandemi Likuefaksi

No	Kelurahan	Luas (Ha)				Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
1	Banjarejo	-	196,05	-	196,05	SEDANG
2	Demangan	-	229,37	-	229,37	SEDANG
3	Josenan	-	144,73	-	144,73	SEDANG
4	Kejuron	-	161,85	-	161,85	SEDANG
5	Kuncen	-	42,34	-	42,34	SEDANG
6	Manisrejo	-	166,64	-	166,64	SEDANG
7	Mojorejo	-	127,14	-	127,14	SEDANG
8	Pandean	-	133,96	-	133,96	SEDANG
9	Taman	-	129,50	-	129,50	SEDANG
10	Oro-Oro Ombo	-	87,28	-	87,28	SEDANG
11	Sukosari	-	67,31	-	67,31	SEDANG
12	Klegen	-	89,58	-	89,58	SEDANG
13	Rejomulyo	-	210,96	-	210,96	SEDANG
14	Pilangbango	-	118,34	-	118,34	SEDANG
15	Tawangrejo	-	157,53	-	157,53	SEDANG
16	Kanigoro	-	175,03	-	175,03	SEDANG
17	Kartoharjo	-	81,40	-	81,40	SEDANG
18	Kelun	-	130,35	-	130,35	SEDANG
19	Mangunharjo	-	174,61	-	174,61	SEDANG
20	Sogaten	-	128,63	-	128,63	SEDANG
21	Patihan	-	135,66	-	135,66	SEDANG
22	Ngegong	-	136,21	-	136,21	SEDANG
23	Winongo	-	212,51	-	212,51	SEDANG
24	Madiun Lor	-	137,43	-	137,43	SEDANG
25	Pangongangan	-	74,03	-	74,03	SEDANG
26	Nambangan Lor	-	103,04	-	103,04	SEDANG
27	Nambangan Kidul	-	126,09	-	126,09	SEDANG
Kota Madiun		-	3.677,55	-	3.677,55	SEDANG

b. Demografi

Dari aspek demografi, berdasarkan hasil registrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, total keseluruhan menunjukkan tren penurunan yang cukup drastis dari tahun 2020 yaitu sebesar 209.905 dan pada tahun 2021 sebesar 201.452. Hal ini dapat dikarenakan adanya pandemi Covid-19. Kemudian, pada tahun 2022, jumlah penduduk naik menjadi 201.760. Jumlah penduduk Kota Madiun sampai dengan tahun 2023 sebanyak 202.544 jiwa, yang tersebar di tiga kecamatan diantaranya Kecamatan Kartoharjo 56.036 jiwa, Kecamatan Manguharjo 60.359 jiwa, dan Kecamatan Taman 86.149 jiwa.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

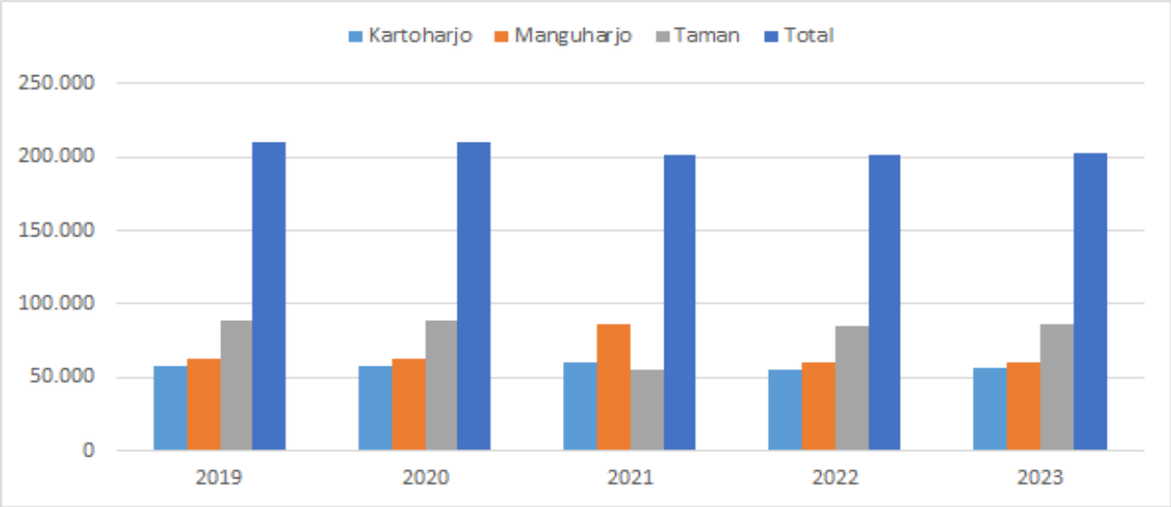
Rincian jumlah penduduk Kota Madiun per kecamatan selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 9 Jumlah Penduduk Kota Madiun Menurut Kecamatan Tahun 2019-2023

No.	Kecamatan	Tahun/Jiwa				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Kartoharjo	57.748	57.668	55.458	55.866	56.036
2	Manguharjo	63.017	62.884	59.988	60.167	60.359
3	Taman	89.350	89.398	86.006	85.727	86.149
	Total	210.115	209.950	201.452	201.760	202.544

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, grafik jumlah penduduk Kota Madiun menurut Kecamatan tahun 2019-2023 dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun

Gambar 2. 2
Jumlah Penduduk Kota Madiun Menurut Kecamatan

Sebagaimana termuat pada Tabel 2.9 dan Gambar 2.2 di atas, Persebaran penduduk di Kota Madiun pada tahun 2019-2023 cenderung merata pada setiap kecamatan. Selama lima tahun terakhir jumlah penduduk dan kepadatan penduduk tertinggi di Kota Madiun berada di Kecamatan Taman, disusul Kecamatan Manguharjo, dan terakhir berada pada Kecamatan Kartoharjo.

Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan sampai tahun 2023 menunjukkan bahwa penduduk Kota Madiun didominasi dengan penduduk berlatar belakang pendidikan terakhir SLTA, yaitu sebesar 71.389 jiwa. Tabel berikut juga memperlihatkan bahwa jumlah penduduk Kota Madiun yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi dari SLTA lebih sedikit, diantaranya tamat D-I/II 573 jiwa; D-III 6.301 jiwa; S-1 22.104 jiwa; S-2 1.546 jiwa, dan S-3 54 jiwa.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

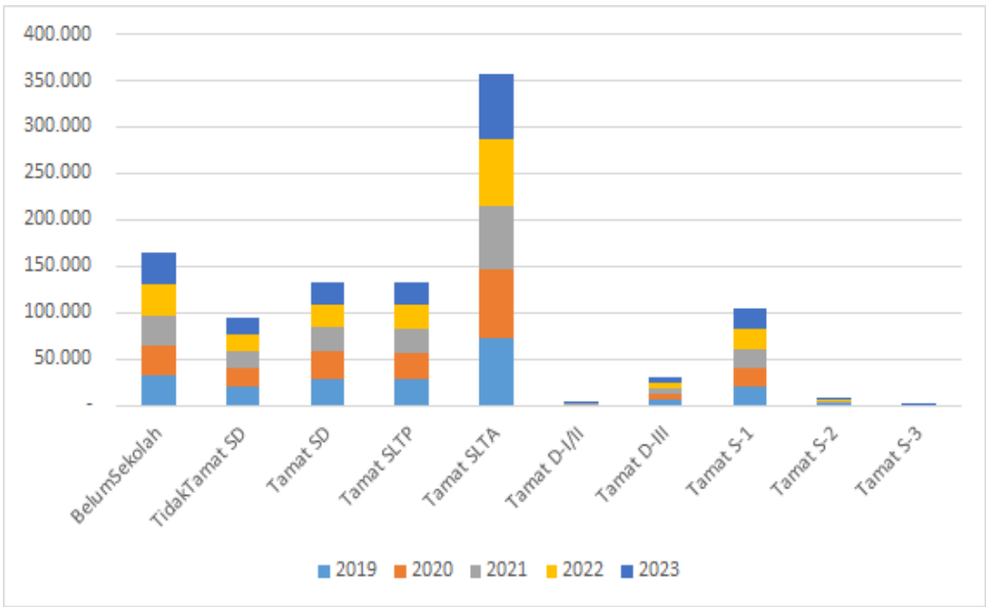
Secara lengkap jumlah penduduk Kota Madiun menurut tingkat pendidikan tahun 2019 - 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2. 10 Jumlah Penduduk Kota Madiun Menurut Tingkat Pendidikan
Tahun 2019 – 2023

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Penduduk Berdasarkan Pendidikan:					
Belum Sekolah;	31.374	32.261	33.177	33.495	33.332
Tidak Tamat SD;	19.887	19.801	18.906	18.483	17.872
Tamat SD;	29.266	28.262	26.006	24.843	24.327
Tamat SLTP;	28.787	28.230	26.027	25.314	25.046
Tamat SLTA;	73.045	73.126	69.421	70.350	71.389
Tamat D-I/II;	498	502	519	553	573
Tamat D-III;	5.761	5.875	5.770	6.033	6.301
Tamat S-1;	20.071	20.442	20.170	21.152	22.104
Tamat S-2;	1.391	1.412	1.415	1.490	1.546
Tamat S-3.	35	39	41	47	54

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun

Adapun grafik jumlah penduduk Kota Madiun menurut tingkat pendidikan tahun 2019-2023 dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun

Gambar 2. 3
Jumlah Penduduk Kota Madiun Menurut Tingkat Pendidikan
Tahun 2019 - 2023

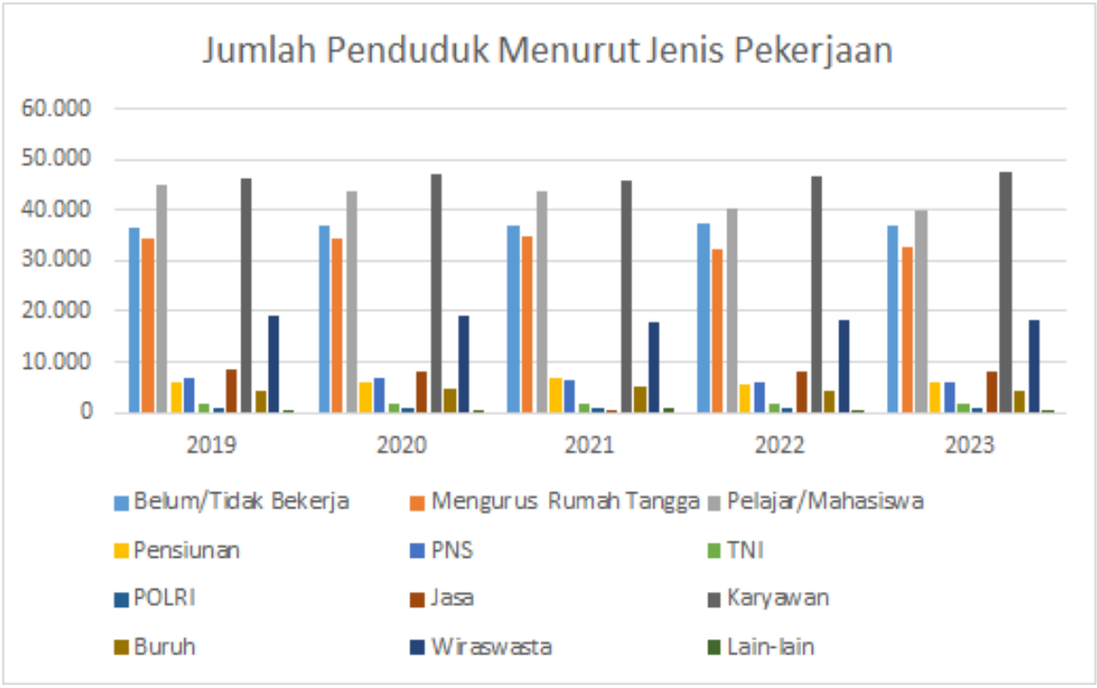
Sebagaimana termuat pada Tabel 2.10 dan Gambar 2.3 di atas, dapat dilihat bahwa selama lima tahun terakhir jumlah penduduk Kota Madiun kategori tamat SLTA terus meningkat. Begitu pula dengan jumlah penduduk kategori tamat D-I/II, tamat D-III, tamat S-1, tamat S-2, Tamat S-3 yang terus mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir. Meskipun demikian, masih sedikit yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi dari SLTA. Berikut grafik Jumlah penduduk Kota Madiun menurut jenis pekerjaan tahun 2019-2023:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Tabel 2. 11 Jumlah Penduduk Kota Madiun Menurut Jenis Pekerjaan Tahun 2019-2023

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan:					
a. Belum/Tidak Bekerja	36.390	37.002	37.048	37.292	37.000
b. Mengurus Rumah Tangga	34.412	34.301	34.746	32.468	32.655
c. Pelajar/Mahasiswa	44.940	43.957	43.771	40.495	40.083
d. Pensiunan	6.095	6.046	6.622	5.611	5.819
e. PNS	6.826	6.711	6.252	6.109	5.945
f. TNI	1.771	1.733	1.583	1.632	1.638
g. POLRI	1.027	1.025	955	958	956
h. Jasa	8.449	8.213	626	8.140	7.959
i. Karyawan	46.311	46.901	46.023	46.745	47.708
j. Buruh	4.390	4.679	5.022	4.083	4.331
k.Wiraswasta	18.994	19.107	17.992	18.223	18.443
l. Lain-lain	510	275	812	4	7

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun

Gambar 2. 4
Jumlah Penduduk Kota Madiun Menurut Jenis Pekerjaan
Tahun 2019 - 2023

Sebagaimana termuat pada Tabel 2.11 dan Gambar 2.4 di atas, terlihat bahwa sebagian besar penduduk di Kota Madiun bekerja pada sebagai karyawan. Jumlah penduduk Kota Madiun yang bekerja menjadi karyawan setiap tahun mengalami peningkatan, hingga pada tahun 2023 berjumlah 47.708 orang. Sebaliknya penduduk yang Mengurus Rumah Tangga sejak tahun 2019-2023 mengalami penurunan. Melihat karakteristik Kota Madiun sebagai kota jasa dan perdagangan, banyak penduduk di Kota Madiun yang memiliki pekerjaan sebagai wiraswasta.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Jumlah penduduk Kota Madiun yang bekerja sebagai wiraswasta juga cukup banyak, yakni sebanyak 18.443 orang hingga tahun 2023 dan penduduk yang bekerja pada sektor jasa sebanyak 7.959 orang. Sementara itu, penduduk yang bekerja pada sektor publik yaitu PNS, TNI/Polri secara keseluruhan pada tahun 2023 berjumlah 8.539 orang.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

a. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

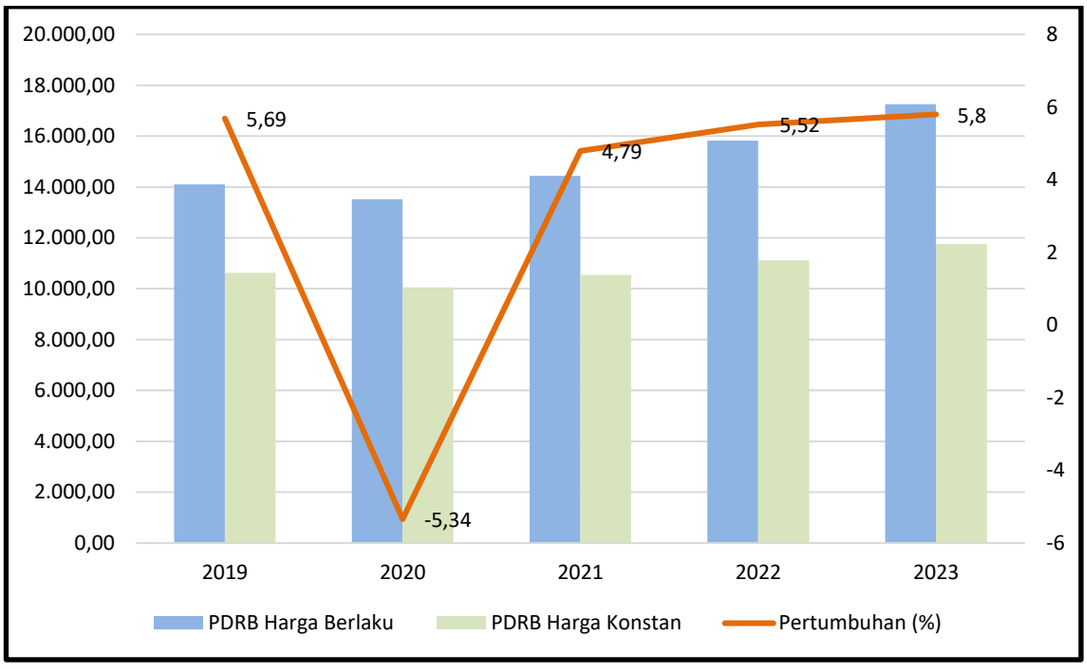
Pertumbuhan ekonomi Kota Madiun mengalami perkembangan yang positif. Hal ini ditandai dengan meningkatnya total nilai PDRB setiap tahunnya baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Madiun Tahun 2019 - 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 12 Pertumbuhan PDRB Kota Madiun Tahun 2019 - 2023 (Rp. Miliar)

Tahun	PDRB		Pertumbuhan (%)
	Harga Berlaku	Harga Konstan	
2019	14.107,33	10.623,07	5,69
2020	13.519,88	10.055,90	-5,34
2021	14.435,42	10.537,69	4,79
2022	15.818,61	11.119,55	5,52
2023	17.256,20	11.764,40	5,80

Sumber : BPS Kota Madiun

Berdasarkan Data BPS Kota Madiun, grafik Pertumbuhan PDRB Kota Madiun Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber : BPS Kota Madiun

Gambar 2. 5
Pertumbuhan PDRB Kota Madiun Tahun 2019 - 2023 (Rp Miliar)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Sebagaimana termuat pada Tabel 2.12 dan Gambar 2.5 di atas, Pertumbuhan PDRB Kota Madiun selama periode 2019-2020 terjadi penurunan yang cukup signifikan, hal ini disebabkan wabah pandemi Covid-19, baik PDRB ADHB maupun PDRB ADHK mengalami fluktuatif. PDRB ADHB Kota Madiun pada tahun 2019 mencapai Rp. 14.107,33 miliar dan mengalami sedikit penurunan pada tahun 2020 sebesar Rp. 13.519,88 miliar. PDRB ADHK Kota Madiun juga menurun dari Rp. 10.623,07 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp. 10.055,90 miliar pada tahun 2020. Pertumbuhan PDRB pada periode tahun 2022-2023 mengalami peningkatan dibanding periode sebelumnya 2019-2021.

Salah satu faktor terjadinya tren peningkatan yaitu seiring dengan semakin membaiknya penanganan pandemi COVID-19 dan mulai terbukanya aktivitas ekonomi. Pada periode tahun 2023 pertumbuhan PDRB sebesar 5,80 persen atau mengalami peningkatan sebesar 0,28 poin dari tahun 2022, dan untuk PDRB ADHB dan ADHK pada periode tahun 2023 berada di posisi 17.256,20 miliar dan 11.764,40 miliar.

b. Fokus Kesejahteraan Sosial

Pengukuran tahapan keluarga sejahtera berguna sebagai indikasi dari aspek kesejahteraan masyarakat. Indikator ini menggambarkan tingkat kesejahteraan suatu keluarga berdasarkan pemenuhan kebutuhan keluarga. Semakin tinggi tingkat kesejahteraan suatu keluarga semakin tinggi pula tingkat kebutuhan keluarga yang dapat dipenuhi. Tingkat pemenuhan kebutuhan keluarga dibagi ke dalam 5 (lima) kategori tahapan yaitu: Pra-sejahtera, KS-I, KS-II, KS-III dan KS-III Plus.

Tabel 2. 13 Total Pra KS, KS-I, KS-II, KS-III, dan KS III Plus
Kota Madiun Tahun 2019 – 2023

KATEGORI	TAHUN									
	2019		2020		2021		2022		2023	
PRA KS	88	0,17%	88	0,16%	105	0,20%	0	0,00%	0	0,00%
KS-I	6.115	11,63%	8.742	15,84%	6.629	12,43%	4.450	8,85%	4.032	7,29%
KS-II	22.001	41,84%	21.822	39,55%	20.168	37,83%	26.414	52,54%	24.391	44,08%
KS-III	19.231	36,57%	19.378	35,12%	18.876	35,41%	17.961	35,73%	25.139	45,43%
KS-III Plus	5151	9,80%	5.145	9,32%	7.532	14,13%	1.450	2,88%	1.768	3,20%
JUMLAH	52.586	100,00%	55.175	100,00%	53.310	100,00%	50.275	100,00%	55.330	100%

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun

Sebagaimana termuat pada Tabel 2.13 di atas, Persentase Pra KS dan KS-1 pada tahun 2020 sebesar 16% atau jumlahnya 8.830 keluarga, sedangkan tahun 2021 jumlahnya 6.734 keluarga mengalami penurunan 2.096 keluarga. Hal ini menunjukkan penurunan kesejahteraan dalam kategori Pra KS dan KS-1 sebanyak 23,74%.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Salah satu faktor menurunnya kesejahteraan keluarga dapat dianalisis karena adanya pandemi Covid-19 yang memberikan efek secara ekonomi yang berdampak pada kondisi sosial masyarakat. Pada tahun 2022 - 2023 jumlah Pra KS di Kota Madiun mencapai 0 keluarga atau 0,00%. Sedangkan, persentase Keluarga Sejahtera II, III dan III Plus mengalami fluktuatif tren naik pada tahun 2019 dari jumlahnya 46.383 dan pada tahun 2023 menjadi 51.298, yang artinya perbaikan ekonomi atau kesejahteraan keluarga mengalami kenaikan sedikit.

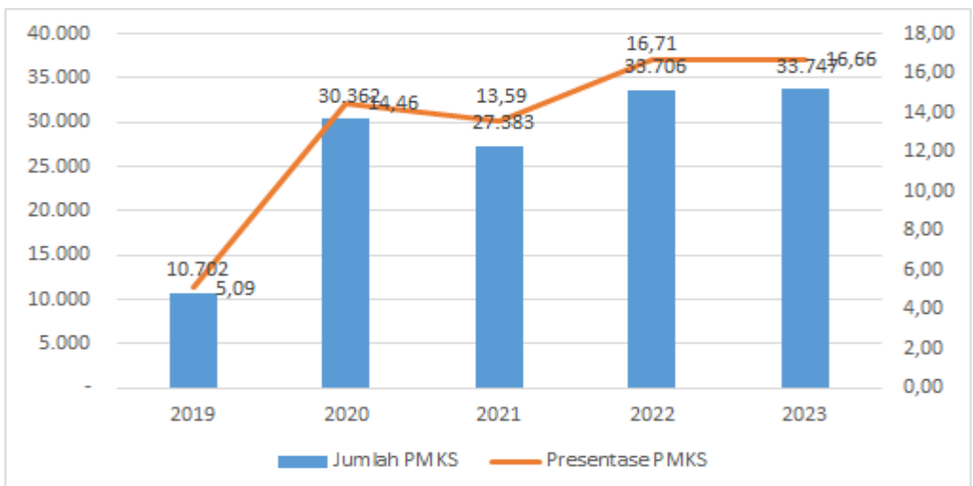
Indikator kesejahteraan sosial lainnya dapat dilihat dengan persentase jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Indikator ini membandingkan jumlah masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial dengan jumlah penduduk Kota Madiun.

Indikator ini juga menunjukan komitmen Pemerintah Kota Madiun dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial di Kota Madiun melalui program-program kegiatan rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial serta pemberdayaan sosial. Jumlah dan Persentase jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut:

Tabel 2. 14 Jumlah PMKS dan Persentase PMKS Kota Madiun
Tahun 2019 – 2023

Tahun	Jumlah PMKS	Persentase PMKS
2019	10.702	5,09
2020	30.362	14,46
2021	27.383	13,59
2022	33.706	16,71
2023	33.747	16,66

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun



Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun

Gambar 2. 6
Persentase PMKS Kota Madiun Tahun 2019 – 2023

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Sebagaimana termuat pada Tabel 2.14 dan Gambar 2.6 di atas, saat ini jumlah PMKS mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, hal ini terjadi karena adanya Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial diketahui bahwa terjadi penambahan PMKS, yang mana jumlah jenis PMKS yang sebelumnya hanya sebanyak 22 jenis, bertambah menjadi 26 jenis PMKS.

Sesuai dengan instruksi pada Peraturan Menteri Sosial tersebut ditindaklanjuti dengan melakukan pendataan dan pengelompokan kembali jenis-jenis PMKS, untuk diperbarui data jumlah PMKS secara keseluruhan. Sehingga pada tabel di atas terlihat ada kenaikan jumlah PMKS.

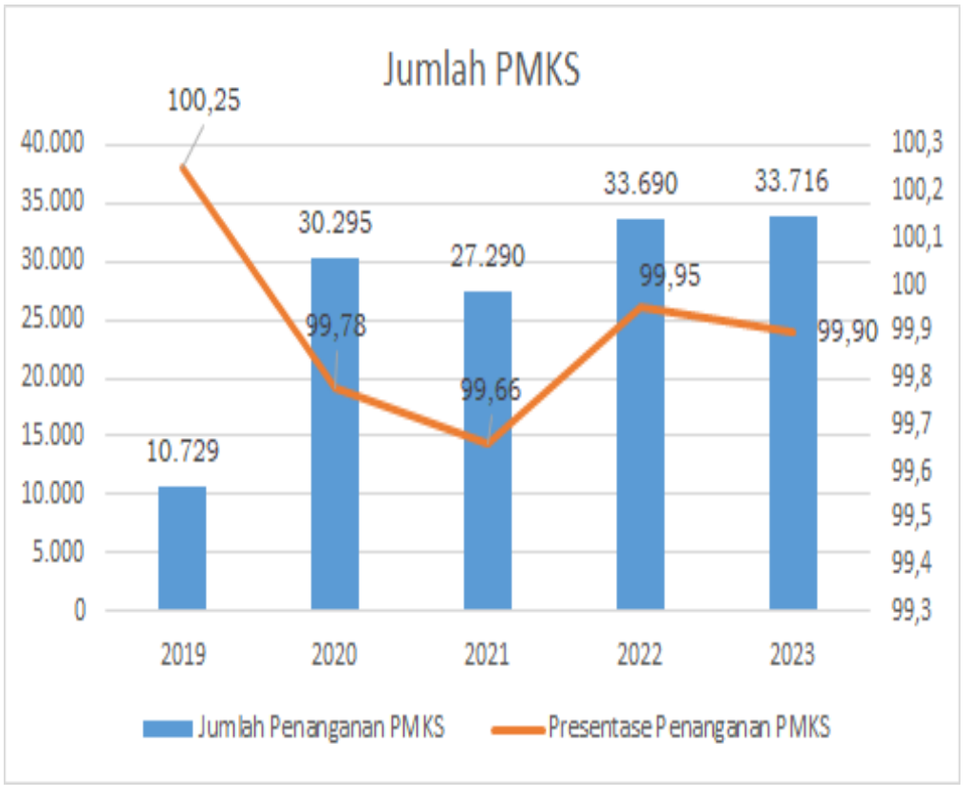
Pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 jumlah PMKS yang terdata mengalami penambahan sebanyak 23.045 orang atau sebesar 11,23% dari jumlah penduduk, akan tetapi jumlah PMKS yang meningkat tersebut diikuti dengan meningkatnya jumlah yang tertangani namun penambahan tersebut terjadi pada PMKS yang bukan merupakan kewenangan daerah yang menyebabkan hal itu tidak bisa tertangani, sehingga capaian tahun 2023 sebesar 99,90% menurun dibandingkan dengan tahun 2023 dengan intervensi program dan kegiatan rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial serta pemberdayaan sosial. Jumlah Penanganan PMKS dan Persentase PMKS dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut:

Tabel 2. 15 Jumlah Penanganan PMKS dan Persentase Penanganan PMKS Kota Madiun Tahun 2019 – 2023

Tahun	Jumlah Penanganan PMKS	Persentase Penanganan PMKS
2019	10.729	100,25
2020	30.295	99,78
2021	27.290	99,66
2022	33.690	99,95
2023	33.716	99,90

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun

Gambar 2. 7 Jumlah PMKS Kota Madiun Tahun 2019-2023

Sebagaimana termuat pada Tabel 2.15 dan Gambar 2.7 di atas, bahwa berdasarkan data dan grafik di atas, pada tahun 2019 seluruh jumlah PMKS yang ada di Kota Madiun berhasil ditangani, bahkan persentase penanganan PMKS mencapai lebih dari 100%. Pada tahun 2020-2023 mengalami peningkatan jumlah PMKS yang cukup signifikan dikarenakan banyak dari masyarakat yang mengajukan sendiri untuk dimasukkan sebagai PMKS dengan berbagai alasan dan latar belakang sehingga realisasi capaian mencapai taraf 99,78 - 99,95%. Pada tahun 2023 jumlah PMKS menjadi sebanyak 33.716 orang dengan penanganan 99,90%.

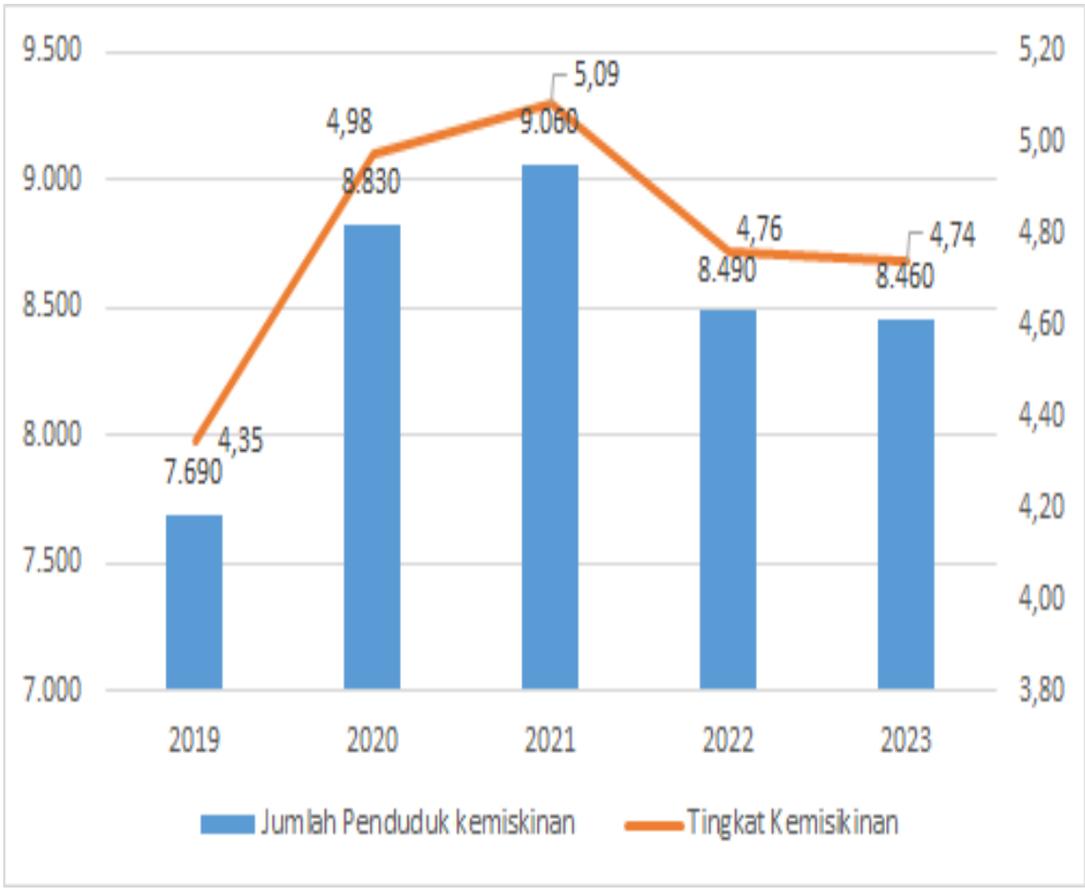
Selanjutnya terdapat tabel dan grafik tingkat kemiskinan Kota Madiun tahun 2019-2023 sebagai berikut:

Tabel 2. 16 Tingkat Kemiskinan Kota Madiun
Tahun 2019 - 2023

Tahun	Jumlah Penduduk kemiskinan	Tingkat Kemiskinan
2019	7.690	4,35
2020	8.830	4,98
2021	9.060	5,09
2022	8.490	4,76
2023	8.460	4,74

Sumber :BPS Kota Madiun

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



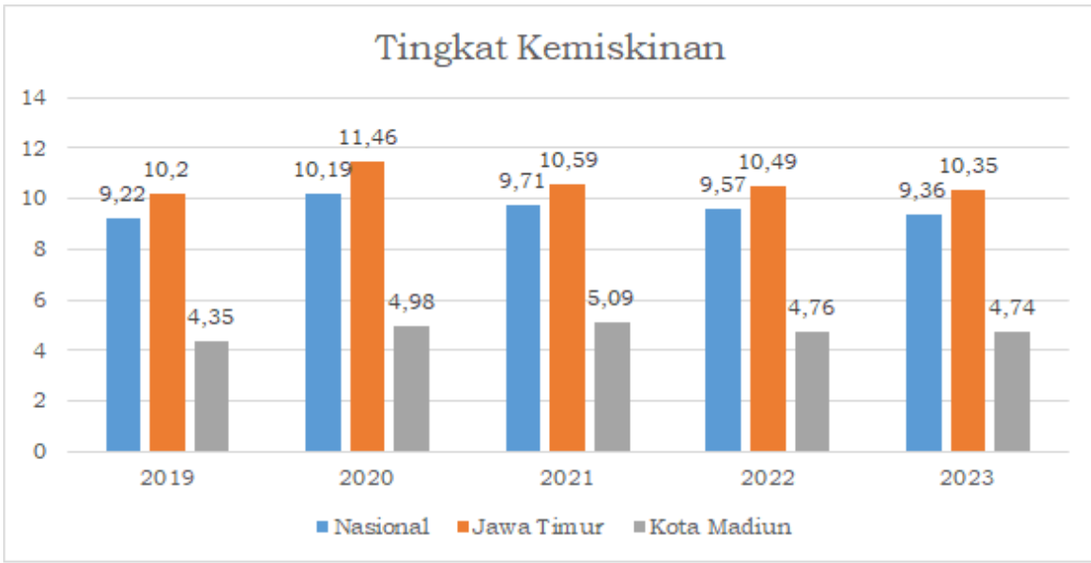
Sumber: BPS Kota Madiun

Gambar 2. 8
Tingkat Kemiskinan Kota Madiun Tahun 2019 - 2023

Sebagaimana termuat pada Tabel 2.16 dan Gambar 2.8 di atas, tingkat Kemiskinan Kota Madiun pada tahun 2019-2023 mengalami tren yang fluktuatif. Pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, tingkat kemiskinan mengalami kenaikan dari 4,35% menjadi 5,09%, dan menunjukkan pola tren menurun dari tahun 2022-2023 menjadi sebesar 4,74%. Hal ini dikarenakan adanya respon yang baik dalam upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi dari adanya dampak pandemi Covid-19.

Kebijakan tersebut akan berhasil apabila dilihat dari kondisi perekonomian yang semakin meningkat. Namun di sisi lain, penurunan kemiskinan masih memerlukan berbagai langkah strategis yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kota Madiun setidaknya melalui program penanganan sosial seperti penyaluran jaring sosial seperti bantuan sembako, bantuan sosial air bersih, penambahan jumlah lowongan pekerjaan, pelatihan UMKM, santunan kematian, asuransi pekerja sektor informal, dan beasiswa mahasiswa.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



Gambar 2. 9 Data Tingkat Kemiskinan Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kota Madiun Tahun 2019-2023

Berdasarkan Gambar 2.9, diketahui bahwa tingkat Kemiskinan Kota Madiun berada di bawah tingkat kemiskinan Nasional dan Provinsi. Hal ini dikarenakan daerah perkotaan cenderung mempunyai luas wilayah yang kecil dari pada daerah pedesaan, sehingga intervensi dalam penyaluran program penanganan sosial lebih tepat sasaran.

c. Fokus Pendidikan

Pada Aspek Kesejahteraan Masyarakat, ada beberapa Indikator Pendidikan yang terdapat pada Fokus Kesejahteraan Sosial, di antaranya adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 17 Indikator Kinerja Pendidikan Fokus Kesejahteraan Sosial Tahun 2019 – 2023

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
I	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT					
A	Fokus Kesejahteraan Sosial					
1	Pendidikan					
1.1	Angka Melek Huruf	97,99	97,93	98,96	98,42	99,14
1.2	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	11,13	11,14	11,37	11,67	11,82
1.3	Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A	143,28	100,85	101,27	131,02	118,60
1.4	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B	170,76	103,62	101,25	114,53	114,90
1.5	Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A	135,45	95,29	95,34	122,11	111,90
1.6	Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Paket B	131,33	85,80	84,88	101,93	102,30
	Pendidikan yang ditamatkan:					
1.7	Angka Harapan Lama Sekolah	14,39	14,40	14,41	14,43	14,44

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Madiun

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Sebagaimana data yang termuat pada Tabel 2.17 di atas, selanjutnya dapat diuraikan pada materi sebagai berikut:

1. Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf adalah penduduk berusia 15 tahun ke atas sampai dengan 59 tahun (sesuai dengan indikator dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nasional) yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya. Perkembangan Angka Melek Huruf diatas usia 15 tahun, pada tahun 2019 adalah 97,99%. Pada tahun 2020 angka melek huruf kembali turun menjadi 97,93%. Meskipun demikian, pada tahun 2021 dan 2022 angka melek huruf naik mencapai 98,96% dan menurun pada tahun 2022 menjadi 98,42%, namun pada tahun 2023 kembali mengalami kenaikan mencapai 99,05%, Secara umum dapat dikatakan bahwa penduduk Kota Madiun yang berumur 15 tahun ke atas dapat membaca dan menulis.

2. Rata-rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah adalah rata – rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk dalam menempuh semua jenis pendidikan formal. Rata-rata lama sekolah pada metode lama menunjukkan jenjang pendidikan yang telah dicapai oleh penduduk umur 15 tahun ke atas.

Pada perhitungan metode baru, rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah yang dihabiskan oleh penduduk berumur 25 tahun atau lebih untuk menempuh suatu jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani. Angka rata-rata lama sekolah di Kota Madiun memiliki tren positif dari tahun 2019-2023. Pada tahun 2019 angka rata-rata lama sekolah adalah sebesar 11,13, pada tahun 2020 meningkat satu basis menjadi 11,14. Kemudian, pada tahun 2021-2023 meningkat 0,45 basis dari 11,37 menjadi 11,82. Dengan nilai rata-rata lama sekolah sebesar 11,43 maka artinya bahwa sebagian besar penduduk Kota Madiun baru mampu menempuh atau menamatkan pendidikan sampai dengan kelas 1 SMA atau putus sekolah pada kelas 2 SMA. Peningkatan rata-rata lama bersekolah ini disebabkan makin sadar akan pentingnya pendidikan dan adanya dukungan dari Pemerintah Kota Madiun yaitu Program Pendidikan Dasar, Peningkatan sarana dan Prasarana Sekolah SD dan SMP dan Program BOS dari Pemerintah Pusat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

3. Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A

Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A adalah rasio jumlah siswa berapapun usianya yang sedang sekolah di tingkat pendidikan SD terhadap jumlah penduduk usia 7-12 tahun. Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A tahun 2019 nilainya mencapai lebih besar dari 100%. Pada tahun 2020 dan 2021, terjadi penurunan APK SD/MI/Paket A dengan nilai 100,85% dan 101,27%. Sampai pada tahun 2022 dan 2023 angka partisipasi kasar SD/MI/Paket A terjadi kenaikan kembali yaitu mencapai lebih dari 100% yaitu di angka 131,02% dan 118,6%.

4. Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B

Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B adalah rasio jumlah siswa berapapun usianya yang sedang sekolah di tingkat pendidikan SMP terhadap jumlah penduduk usia 13-15 tahun. Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B periode tahun 2019 hingga 2021 menunjukkan tren fluktuatif lebih dari 100%. Pada tahun 2019 menunjukkan nilai persentase sebesar 170,76%. Pada tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sehingga angka persentasenya sebesar 103,62%. Lalu kemudian turun kembali pada tahun 2021 menjadi 101,25%. Penurunan APK dari dua tahun berturut-turut ini dapat diindikasikan dari dampak Covid-19 yang menyebabkan timbulnya permasalahan sosial-ekonomi termasuk pada akses pendidikan. Pada tahun 2022, APK mengalami peningkatan persentase menjadi 114,53% dan pada tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 114,90%.

5. Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A

Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A merupakan jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang sedang bersekolah di tingkat SD dibagi dengan jumlah jumlah penduduk usia 7-12 tahun. Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A tahun 2019 yakni sebesar sebesar 135,45%. Untuk tahun 2020 terjadi penurunan sebesar 40,16 poin sehingga persentasenya menjadi 95,29%. Pada tahun 2021 Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A meningkat sedikit menjadi 95,34% dan menjadi 122,11% pada tahun 2022 dan 111,9% pada tahun 2023.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

6. Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Paket B

Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Paket B merupakan jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang sedang bersekolah di tingkat SMP dibagi dengan jumlah penduduk usia 13-15 tahun. Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Paket B sebesar menunjukkan tren penurunan pada tahun 2019 hingga 2021. Pada tahun 2019 sebesar 131,33% kemudian pada tahun 2020 menurun sebesar 45,53 poin sehingga persentasenya menjadi 85,80%, lalu kembali mengalami penurunan pada tahun 2021 sebesar 0,92 poin sehingga menjadi 84,88%. Tahun 2022, Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Paket B meningkat sebesar 17,05 poin dari tahun 2021 sehingga pada tahun 2022 menjadi 101,93% dan pada tahun 2023 juga mengalami peningkatan sebesar 0,37 basis menjadi 102,30%.

7. Angka Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang. Capaian harapan lama sekolah pada tahun 2019 adalah 14,39, pada tahun 2020 dan 2021 capaian angka harapan lama sekolah sebesar 14,40 dan 14,41.

Hal ini menunjukkan bahwa harapan lama sekolah di Kota Madiun sudah mencapai pada jenjang perguruan tinggi. Ini disebabkan karena adanya dukungan dari Pemerintah Kota Madiun dengan Program Bantuan Beasiswa Mahasiswa, sehingga angka harapan lama sekolah pada tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi 14,43 dan pada 2023 disusul kenaikan 0,1 basis menjadi 14,44.

Penyebab tidak tercapainya kinerja bidang pendidikan angka melek huruf disebabkan salah satunya disebabkan karena perpindahan penduduk, data tersebut terlihat dari kenaikan jumlah penduduk dari tahun 2021 ke tahun 2023 data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

d. Fokus Kesehatan

Pengukuran capaian indikator kinerja pembangunan daerah serta perkembangannya pada Bidang Urusan Kesehatan selanjutnya dijabarkan pada materi di bawah ini.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1. Angka Kematian Ibu

Capaian Angka Kematian Ibu pada tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

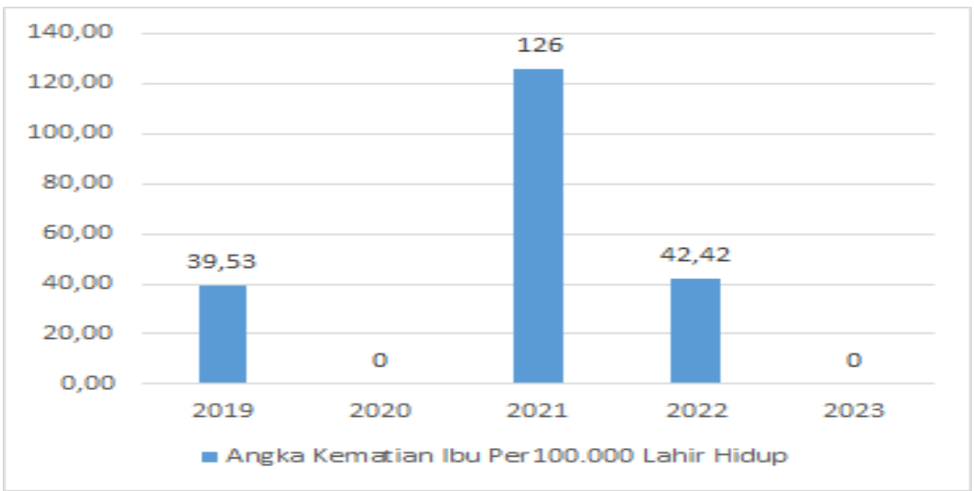
Tabel 2. 18 Angka Kematian Ibu di Kota Madiun Tahun 2019 – 2023

No	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Jumlah Lahir Hidup	2.530	1852	2.382	2.357	2,346
2	Jumlah Kematian Ibu	1	0	3	1	0
3	Angka Kematian Ibu Per 100.000 Lahir Hidup	39,53	0	126	42,42	0

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Madiun

Sebagaimana termuat pada Tabel 2.18 di atas, Angka Kematian Ibu per 100.000 lahir hidup pada tahun 2020 di Kota Madiun tidak tercatat angka kematian ibu. Namun, pada tahun 2019 dan 2022 tercatat angka kematian ibu sebesar 39,53 dan 42,42, artinya terdapat kematian ibu sebanyak 39,53 ibu dari 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2019 dan terdapat kematian ibu sebanyak 42,42 ibu dari 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2022. Secara absolut jumlah kematian ibu tersebut sebanyak 1 orang ibu. Terjadi penurunan angka kematian ibu pada tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022 dari jumlah secara absolut sebanyak 1 orang ibu pada tahun 2022 menjadi 0 orang ibu pada tahun 2023, hal ini menunjukkan bahwa terdapat upaya Pemerintah Kota Madiun untuk bersungguh-sungguh dalam memberikan pelayanan kepada ibu hamil baik melalui pendampingan, pembinaan, dan pelayanan langsung.

Angka Kematian Ibu tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Gambar 2. 10
Tren Angka Kematian Ibu Kota Madiun Tahun 2019–2023

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Sebagaimana termuat pada Gambar 2.10 di atas, upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kematian ibu sebagai berikut:

a. peningkatan pengetahuan tenaga kesehatan (dokter dan bidan) terkait dengan pelayanan kesehatan maternal neonatal;
b. peningkatan pengetahuan lintas sektor tentang kesehatan ibu dan bayi;
c. pemberian makanan tambahan pada ibu hamil, mulai ditemukannya ibu hamil kurang energi kalori hingga masa nifas;
d. memastikan seluruh ibu hamil mendapatkan pelayanan ANC terpadu yaitu 10 T plus skrining Diabetes Melitus, Hipertensi, jantung, hepatitis dan HIV/AIDS di semua fasilitas pelayanan kesehatan baik milik pemerintah maupun swasta;
e. menjalin kerja sama dengan SpOG terkait pelayanan rujukan pada ibu hamil; dan
f. edukasi ke masyarakat untuk menuju persalinan yang aman dan pentingnya pemeriksaan kesehatan di awal masa kehamilan dan menjelang persalinan.

2. Angka Kematian Bayi

Capaian Angka Kematian Bayi pada tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

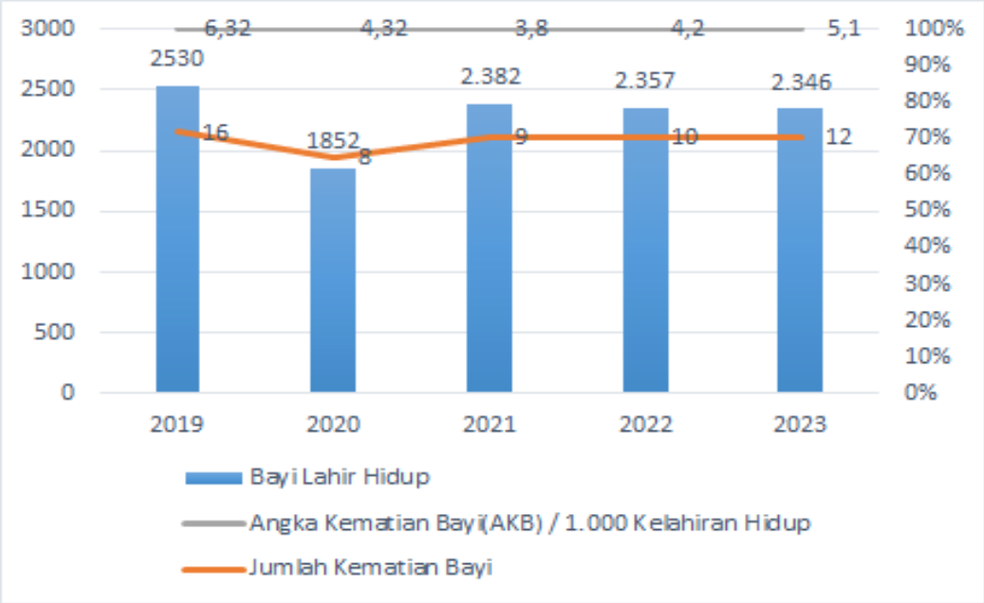
Tabel 2. 19 Angka Kematian Bayi di Kota Madiun Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Bayi Lahir Hidup	2530	1852	2.382	2.357	2.346
2	Jumlah Kematian Bayi	16	8	9	10	12
3	Angka Kematian Bayi (AKB) / 1.000 Kelahiran Hidup	6,32	4,32	3,8	4,2	5,1

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Madiun

Sebagaimana termuat pada Tabel 2.19 di atas, terlihat bahwa Angka Kematian Bayi pada tahun 2019 dan 2020 berjumlah 16 dan 8 bayi, persentase angka kematian bayi dari 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2019 sebesar 6,32 dan pada tahun 2020 sebesar 4,32. Pada tahun 2019 hingga tahun 2021 secara absolut jumlah kematian bayi mengalami penurunan. Pada tahun 2022 dan 2023 sedikit mengalami kenaikan. Tahun 2019 persentase angka kematian bayi sebesar 6,32 dengan jumlah absolut sebanyak 16 kematian bayi dan pada tahun 2023 persentase angka kematian bayi kembali naik menjadi 5,1 dengan jumlah absolut 12 kematian bayi. Adapun tren Angka Kematian Bayi tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada gambar berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Madiun

Gambar 2. 11
Angka Kematian Bayi di Kota Madiun Tahun 2019-2023

Sebagaimana termuat pada Gambar 2.11 di atas, terlihat bahwa Angka Kematian Bayi/1000 kelahiran hidup setelah tahun 2019 mengalami penurunan dan diikuti penurunan jumlah kematian bayi secara absolut hingga 2021. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil untuk mencegah bayi dengan berat badan lahir rendah;
b. peningkatan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (edukasi kontrol sesuai jadwal); dan
c. edukasi ke masyarakat tentang pentingnya pemeriksaan kesehatan bayi.

Upaya yang dilakukan untuk menurunkan Angka Kematian Bayi diantaranya yaitu:

a. peningkatan pengetahuan tenaga kesehatan (dokter dan bidan) terkait dengan pelayanan kesehatan maternal neonatal;
b. peningkatan pengetahuan lintas sektor tentang kesehatan ibu dan bayi;
c. pemberian makanan tambahan pada ibu hamil, mulai ditemukannya ibu hamil kurang energi kalori hingga masa nifas;
d. berkoordinasi dengan Dokter Spesialis Anak terkait pelayanan rujukan bayi dengan kelainan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

e. edukasi ke masyarakat untuk menuju persalinan yang aman dan pentingnya pemeriksaan kesehatan di awal masa kehamilan dan menjelang persalinan sesuai jadwal yang sudah ditentukan.

Adapun perkembangan pencapaian kinerja sasaran yang diukur dengan indikator kinerja sasaran masing-masing.

3. Persentase Balita Gizi Buruk

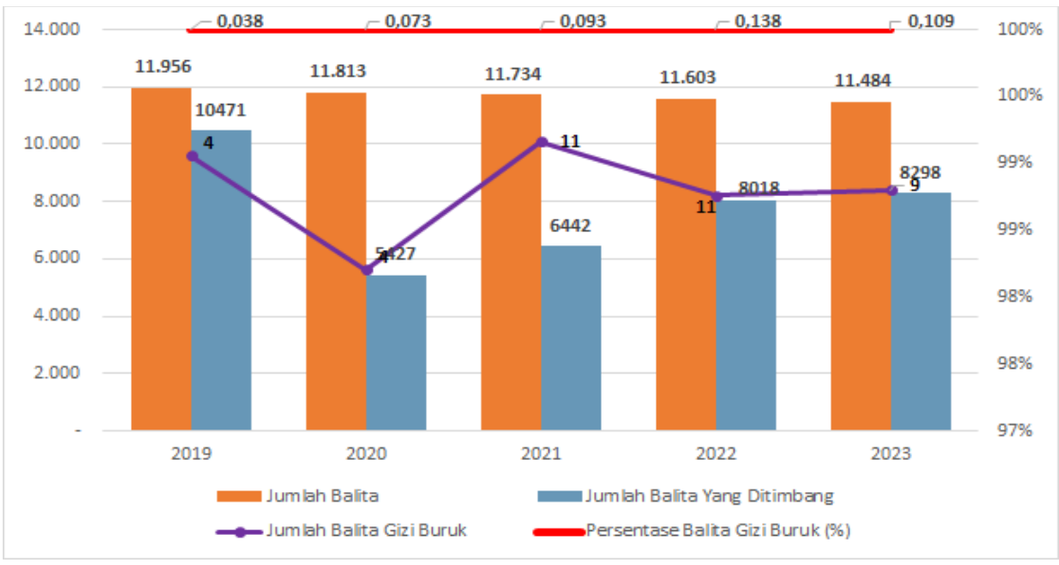
Persentase balita gizi buruk pada tahun 2019 hingga tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 20 Balita Gizi Buruk di Kota Madiun Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Jumlah Balita	11.956	11.813	11.734	11.603	11.484
2	Jumlah Balita Yang Ditimbang	10.471	5.427	6.442	8.018	8.298
3	Jumlah Balita Gizi Buruk	4	4	11	11	9
4	Persentase Balita Gizi Buruk (%)	0,038	0,073	0,093	0,138	0,109

Sumber: Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun

Sebagaimana termuat pada Tabel 2.21 di atas, terlihat bahwa selama tahun 2019-2023 jumlah balita yang menderita gizi buruk dan persentase balita gizi buruk mengalami peningkatan. Namun pada tahun 2023, mulai didapati adanya penurunan dari 11 kasus menjadi 9 kasus. Adapun tren Balita Gizi Buruk tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: *Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun, Tahun 2023.*

Gambar 2. 12
Balita Gizi Buruk di Kota Madiun Tahun 2019-2023

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Sebagaimana termuat pada Gambar 2.12 di atas, terlihat bahwa persentase Balita Gizi Buruk di tahun 2019 sebesar 0,038 dengan jumlah absolut 4 balita gizi buruk, hal ini berlaku pada tahun 2019 sampai dengan 2020. Pada tahun 2021 dan 2022 persentase balita gizi buruk mengalami kenaikan sebesar 0,093 dan 0,138 sehingga jumlah absolut balita gizi buruk menjadi 11 balita. Pada tahun 2023, terjadi penurunan 0,029 basis menjadi 0,109.

Penyebab terjadinya kenaikan persentase balita balita gizi buruk karena adanya bayi lahir dengan Berat Badan Lahir Rendah yang kurang dari 2500 gram sehingga balita tersebut berpotensi tidak maksimal dalam penyerapan nutrisi makanan yang menyebabkan berat badan tidak naik signifikan. Selain itu masih adanya pola asuh dan pola makan yang kurang tepat pada keluarga. Sehingga langkah yang dilakukan untuk menurunkan jumlah balita gizi buruk yaitu:

1. penimbangan balita di Posyandu setiap bulan sebagai deteksi dini terjadinya penyimpangan pertumbuhan sehingga lebih mudah dalam intervensi sebelum menjadi balita gizi buruk;
2. pelaksanaan kelas ibu balita;
3. edukasi kepada masyarakat tentang bayi dengan berat badan lahir rendah dan upaya perbaikan gizi keluarga;
4. pelatihan cara pemberian makanan pada bayi dan anak untuk petugas Puskesmas sehingga bisa memberikan informasi kepada masyarakat;
5. pemberian makanan tambahan dan vitamin bagi balita dengan berat badan di bawah garis merah dan balita tidak naik berat badannya dua kali berturut-turut dalam 2 bulan sampai tuntas; dan
6. pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil mulai ditemukan kekurangan energi kronik sampai dengan masa nifas untuk mencegah kelahiran bayi dengan berat badan lahir rendah.

Data capaian prevalensi gizi kurang di Kota Madiun selalu di bawah target Nasional maupun Provinsi Jawa Timur, Penyebab terdapatnya prevalensi gizi kurang di Kota Madiun ialah faktor ekonomi, sanitasi, pendidikan orang tua, dan perilaku orang tua. Selain itu kemiskinan, ketiadaan pangan, permukiman yang berjejalan, dan ketidakmampuan mengakses fasilitas kesehatan juga termasuk faktor yang mempengaruhi prevalensi gizi kurang selama ini pada tataran nasional. Di Kota Madiun data prevalensi gizi kurang tersaji pada tabel berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Tabel 2. 21 Balita Gizi Buruk di Kota Madiun Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Prevalensi Gizi Kurang	7,1%	9%	8,4%	9%	6,4%

Sumber: Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun

e. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

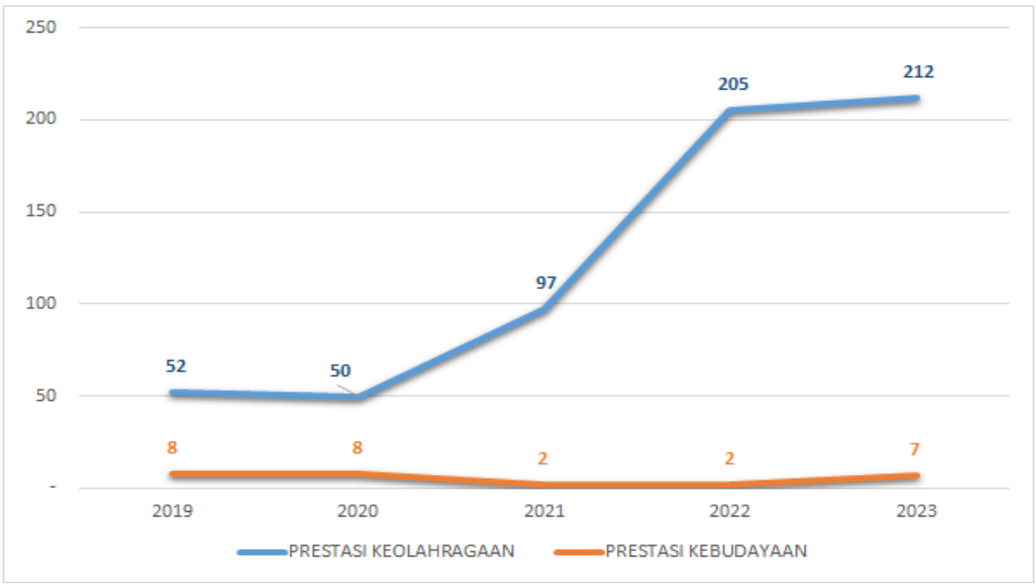
Indikator-indikator pengukur kemajuan seni, budaya dan olahraga diantaranya yaitu keikutsertaan dan prestasi dalam even regional dan nasional, jumlah even/kegiatan budaya, jumlah pembinaan generasi muda, dan jumlah prestasi olahraga. Keikutsertaan dan prestasi dalam even Regional dan Nasional tahun 2022 di bidang olahraga tetap di angka 205 untuk prestasi keolahragaan dan 2 untuk prestasi kebudayaan. Berikut tabel Prestasi Olahraga dan Kebudayaan Kota Madiun Tahun 2019-2023:

Tabel 2. 22 Prestasi Olahraga dan Kebudayaan Kota Madiun Tahun 2019 - 2023

Keterangan	2019	2020	2021	2022	2023
Prestasi Keolahragaan	52	50	97	205	212
Prestasi Kebudayaan	8	8	2	2	7

Sumber: Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Madiun

Sebagaimana termuat pada Tabel 2.23 di atas, jumlah prestasi keolahragaan terus meningkat dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Di sisi lain, hal ini berbanding terbalik dengan prestasi kebudayaan yang menurun dari tahun 2019 sampai tahun 2022 dan meningkat di tahun 2023 yaitu sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut:



sumber: Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Madiun

Gambar 2. 13
Prestasi Olahraga dan Kebudayaan Kota Madiun Tahun 2019 – 2023

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Selama tahun 2023 prestasi keolahragaan mendapatkan sebanyak 212 medali, yang mana seluruh medali tersebut di dapat dari 13 even kejuaraan tingkat nasional dan internasional dengan rincian sebagai berikut:

a. 3 Medali Internasional: 2 Medali Kurash, 1 Medali Karate (Thailand dan Turkmenistan);
b. 4 Medali Popda Jatim XIII di Sidoarjo;
c. 5 Medali Peparda Jatim I di Sidoarjo;
d. 52 Medali Porprov VIII Jatim di Mojokerto, Sidoarjo, Jombang;
e. 5 Medali Kejurprov Senam;
f. 7 Medali Kejuaraan Pacitan Memanah IV-2023;
g. 1 Medali Kejurnas Karate;
h. 1 Medali Kejurprov Jawa Timur Cabor Judo;
i. 1 Medali UIN Walisongo Semarang Cup Cabor Karate;
j. 1 Medali Jogja Open Cabang Olahraga Atletik;
k. 20 Medali Kejurprov Jawa Timur Cabang Olahraga Jujitsu;
l. 5 Medali Kejurprov Jawa Timur Cabang Olahraga Tekwondo;
m. Medali Kejurprov Jawa Timur Cabang Olahraga Balap Sepeda;
n. Medali Kejurprov Jawa Timur Cabang Olahraga Tenis Lapangan;
o. 4 Medali Kejurprov Piala Menpora Cabang Olahraga Pencak Silat;
p. 3 Medali Kejuaraan Open Pencak Silat;
q. 3 Medali Kejurprov Jawa Timur Cabang Olahraga Gulat;
r. 2 Medali POPNAS XVI Cabang Olahraga Sepak Takraw;
s. 1 Medali POMPROV Jatim 2023 Cabang Olahraga Sepak Takraw;
t. 1 Medali Kejurnas Tenis Lapangan di Semarang;
u. 9 Medali Kejuaraan Tinju Amatir se-Jawa Timur Piala Bupati Ngawi;
v. 2 Medali Kejuaraan antar Dojo se-Jawa Timur Tahun 2023 Cabor JUJITSU;
w. 9 Medali Kejurda Atletik se-Jawa Timur Tahun 2023;
x. 3 Medali O2SN Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2023;
y. 1 Medali Kejuaraan UPHIL Kapolres Madiun Kota Tahun 2023;
z. 1 Medali Kejuaraan Barongsai Tradisional Piala Walikota Madiun;
aa. 2 Medali Pencak Silat Malang Championship Tahun 2023;
bb. 1 Medali Pencak Silat Ngawi Championship Tahun 2023;
cc. 10 Medali Cabor Bola Basket (Wilis Basketball Competition Tahun 2023);
dd. 12 Medali Cabor Drumband (Lomba Unjuk Gelar Drumband Parade Senja Kota Madiun Tahun 2023).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Prestasi kebudayaan pada tahun 2022 yaitu mendapatkan sertifikat Warisan Budaya Tak benda Indonesia untuk kegiatan Grebeg Maulud dan makan khas Pecel. Sertifikat tersebut diterbitkan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi pada tahun 2022.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan umum daerah berkaitan dengan kemampuan daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik guna memenuhi kepentingan umum melalui cara-cara yang tepat dan memuaskan pihak yang dilayani. aspek pelayanan daerah terdiri dari pelayananan bidang pendidikan, kesehatan, ketertiban umum serta ketenteraman masyarakat dan perizinan.

a. Pelayanan Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu urusan wajib pelayanan dasar yang anggaranya sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat (4) dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1), sebesar 20 persen dari APBD yang diharapkan dapat mempercepat pengurangan kesenjangan pembangunan dan memperluas pembangunan antar wilayah. Harapan kedepannya dapat menciptakan SDM yang terampil dan cerdas. Untuk mewujudkan hal tersebut Kota Madiun sudah memetakan jumlah sekolah, jumlah tenaga pendidik jenjang pendidikan terendah yaitu PAUD dan TK yang dapat di lihat sebagaimana tabel 2.14 di bawah ini:

Tabel 2. 23 Jumlah Bangunan, Peserta, dan Tenaga Pendidik PAUD Menurut Kecamatan, Tahun 2023

No.	Uraian	Kecamatan		
		Kartoharjo	Manguharjo	Taman
PAUD				
1.	Bangunan PAUD (unit)	131	150	164
2.	Peserta PAUD	577	540	594
3.	Tenaga Pendidik	54	56	70
TK				
1.	Jumlah Siswa (Orang)	1389	1.381	1.810
2.	Jumlah TK Bangunan Baik (Unit)	188	190	272

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Madiun

Sebagaimana termuat pada Tabel 2.23 di atas, data menunjukkan pada tahun 2023 fasilitas pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Madiun dapat dikatakan merata di setiap kecamatan dengan ketersediaan pendidik yang memadai.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Jumlah bangunan PAUD di Kecamatan Kartoharjo sebanyak 131 unit dengan jumlah peserta didik 577 anak, Kecamatan Manguharjo sebanyak 150 unit dengan jumlah peserta didik 540 anak, dan Kecamatan Taman sebanyak 164 unit dengan jumlah peserta didik sebanyak 594 anak.

Jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) untuk wilayah kecamatan Kartoharjo terdapat 188 unit bangunan sekolah dengan jumlah siswa 1.389 anak, untuk kecamatan Manguharjo terdapat 190 unit bangunan sekolah dengan jumlah siswa 1.381 anak, dan untuk kecamatan Taman terdapat 272 unit bangunan dengan jumlah siswa 1.810 anak.

Tabel 2. 24 Jumlah Sekolah Menurut Kecamatan di Kota Madiun, 2023

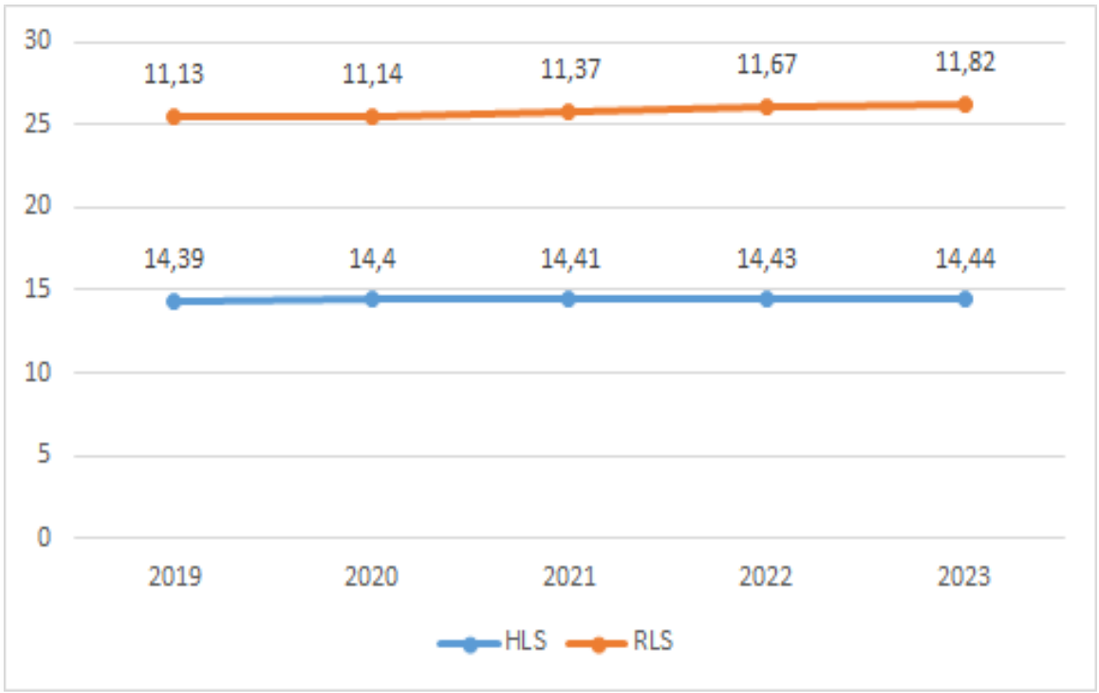
Jenjang Pendidikan	Kecamatan			Jumlah
	Mangunharjo	Taman	Kartoharjo	
Sekolah Dasar (SD)	20	26	22	68
Madrasah Ibtidaiyah (MI)	7	6	3	16
Sekolah Menengah Pertama (SMP)	11	9	3	23
Madrasah Tsanawiyah (MTs)	1	3	0	4
Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan (SMA/SMK)	Kewenangan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi			
Madrasah Aliyah (MA)	Wewenang Kementerian Agama			

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Madiun

Sebagaimana termuat pada Tabel 2.24 di atas, Jumlah sekolah dasar (SD) di Kota Madiun tahun 2023 sebanyak 68 unit dan Madrasah Ibtidaiyah 16 unit. Jumlah sekolah jenjang SMP sebanyak 23 unit dan MTs sebanyak 4 unit. Jumlah sekolah menurut SMA/SMK dan MA bukan merupakan kewenangan Pemerintah Kota Madiun. Berdasarkan data di atas Kecamatan Taman menjadi kecamatan terbanyak yang memiliki jumlah unit sekolah, mengingat jumlah penduduk terbanyak juga terdapat pada Kecamatan Taman.

Kondisi dan jumlah bangunann di beberapa jenjang pendidikan akan mendorong meningkatnya angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah yang merupakan indikator dimensi pengetahuan pada indeks pembangunan manusia, hal ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia di sisi pendidikan perlahan mengalami kemajuan di Kota Madiun, peningkatan tersebut selanjutnya dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



Sumber: BPS Kota Madiun

Gambar 2. 14
Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah
Kota Madiun Tahun 2019-2023

Sebagaimana termuat pada Gambar 2.14 di atas, Angka Harapan Lama Sekolah rata-rata tumbuh sebesar 0,0044 poin per tahun. Meningkatnya angka harapan lama sekolah menjadi sinyal positif bahwa semakin banyak penduduk yang bersekolah. Tahun 2023, Angka Harapan Lama Sekolah di Kota Madiun telah mencapai 14,44 tahun yang berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus D3. Pada periode yang sama, capaian Rata-rata Lama Sekolah di Kota Madiun tumbuh 0,112 poin per tahun. Pertumbuhan yang positif ini juga merupakan modal penting untuk mendukung pembangunan di Kota Madiun. Artinya kualitas sumber daya manusia dari sisi pendidikan yang semakin membaik akan berdampak terhadap peningkatan daya saing sumber daya manusia sebagai pelaku utama pembangunan. Rata-rata Lama Sekolah Kota Madiun tahun 2023 mencapai 11,82 tahun menunjukkan bahwa secara umum rata-rata penduduk Kota Madiun usia 25 tahun ke atas sebagian besar telah mengenyam pendidikan hingga kelas XI (SMA Kelas 2).

Pada Aspek Pelayanan Umum, ada beberapa Indikator Pendidikan yang terdapat Urusan Pemerintah Wajib Pelayanan Dasar, di antaranya sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Tabel 2. 25 Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Urusan Bidang Pendidikan
Tahun 2019 - 2023

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
II	ASPEK PELAYANAN UMUM					
A	Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar					
1	Pendidikan					
1.1	Pendidikan Dasar					
1.1.1	Angka partisipasi sekolah	135,75	113,75	119,83	119,83*	111,9
1.1.2	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah per 10.000 penduduk	1:52	1:56	1:16	1:37	1:42
1.1.3	Rasio guru/murid	1:16	1:16	1:16	1:15	1:13
1.1.4	Rasio guru/murid per kelas rata-rata	1:28	1:24	1:15	1:25	1:15
1.1.5	Angka Partisipasi Murni SD/SMP	135,45	174,89	130	114,99	107,1
1.2	Fasilitas Pendidikan					
1.2.1	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	95,24%	98,48%	97,20%	89%	99,8%
1.2.2	Sekolah pendidikan SMP/Mts	98,68%	92,63%	99,5%	95%	99,7%
1.3	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)					
1.3.1	APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	109%	95,61%	90,04%	198,27%	104,06%
1.4	Angka Putus Sekolah					
1.4.1	Angka putus sekolah SD/MI, SMP/MTs	0	0,7	0	0	0
1.4.2	Rata-rata Angka Putus Sekolah	0	0,7	0	0	0
1.5	Angka Kelulusan					
1.5.1	Angka kelulusan SD/MT, SMP/MTs	100	100	100	100	100
1.5.2	Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs	111,35	100	100	100	100
1.5.3	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/S2/S3.	96,1	96,83	97	99,6	93,3
1.5.4	Rata-rata Angka Kelulusan	100	100	100	100	100
1.6	Manajemen Pelayanan Pendidikan					
1.6.1	Pengolahan database informasi pendidikan, dan evaluasi pelaporan berbasis TIK	100	100	100	100	100
1.6.2	Satuan pendidikan semua jenjang melaksanakan manajemen berbasis sekolah (MBS)	100	100	100	100	100
1.6.3	Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang mengikuti Pelatihan Profesional	1.427	398	1.212	1.200	1.215

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Madiun

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Sebagaimana data yang termuat pada Tabel 2.25 diatas, selanjutnya dapat diuraikan pada materi sebagai berikut:

1. Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar

Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar dapat digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah pendidikan dasar yang telah bersekolah di semua jenjang pendidikan baik jenjang SD/MI, SMP/MTs. Capaian Angka Partisipasi Sekolah pada tahun 2019 sebesar 135,75%. Pada tahun 2020 capaian Angka Partisipasi Sekolah menurun sehingga persentasenya menjadi sebesar 113,75%.

Tahun 2021 capaian Angka Partisipasi Sekolah sebesar 119,83 Secara umum Angka Partisipasi Sekolah ini menunjukkan bahwa semua anak usia sekolah pendidikan dasar di Kota Madiun telah mendapat akses layanan pendidikan di berbagai jenjang pendidikan baik SD/MI maupun SMP/MTs. Hal ini juga disebabkan karena pembangunan pendidikan di Kota Madiun sudah sesuai sasaran yaitu meningkatkan akses dan mutu pendidikan melalui kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan sarana prasarana pendidikan di Kota Madiun. Capaian sementara APS tahun 2022 119,83% dan 2023 sebesar 111,9%.

2. Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah

Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap penduduk usia sekolah adalah untuk mengukur jumlah penduduk sekolah dengan jumlah penduduk usia sekolah. Rasio ini adalah merupakan jumlah sekolah berdasarkan jenjang pendidikan per 10.000 jumlah penduduk usia sekolah. Untuk tahun 2019 capaiannya adalah adalah sebesar 1:52 dan tahun 2020 meningkat secara signifikan menjadi 1:56. Ini menunjukkan bahwa sekolah jenjang pendidikan dasar dan menengah yang ada di Kota Madiun sudah sangat mencukupi. Selain itu, dari tabel 2.16 dapat diketahui juga bahwa rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pada tahun 2021 sebesar 1:16. Pada tahun 2022 rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah sebesar 1:37 dan mengalami kenaikan pada tahun 2023 menjadi 1:42. Capaian ini berarti 1 (satu) lembaga pada jenjang pendidikan dasar menampung 42 siswa per 10.000 penduduk usia sekolah pada tahun 2023.

3. Rasio guru terhadap murid pendidikan dasar

Rasio guru-murid merupakan rasio yang digunakan untukmengukur kemampuan guru dalam menangani siswa. Capaian rasio guru murid pada tahun 2019 hingga tahun 2021 adalah 1:16 dan untuk tahun 2022 adalah 1:15, artinya bahwa satu orang guru menangani 15 siswa. Pada tahun 2023, rasio guru terhadap murid pendidikan dasar mengalami penurunan menjadi 1:13 atau satu orang guru menangani 13 siswa.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang guru yang menyebutkan bahwa untuk SD dan SMP rasio paling sedikit jumlah peserta didik terhadap gurunya adalah berbanding 20 peserta didik.

4. Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata

Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata pada tahun 2019 adalah 1:28 artinya 1 guru menangani 1 kelas/rombel dengan rata-rata siswa sebanyak 28 siswa. Capaian pada tahun 2019 adalah 1:24, tahun 2020 sedikit mengalami penurunan dibanding capaian tahun sebelumnya. Sedangkan pada tahun 2021 capaiannya adalah 1:15 yang artinya 1 guru dapat menangani 1 kelas/rompel dengan rata-rata siswa sebanyak 15 siswa. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar per kelas. Selanjutnya pada tahun 2022 rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata adalah 1:25 dan pada tahun 2023 adalah 1:15.

Dibandingkan dengan tahun 2022 rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata terdapat penurunan yaitu tahun 2023 1 (satu) orang guru menangani 25 anak tetapi pada tahun 2023 satu orang guru menangani 15 anak, hal ini dikarenakan adanya perekrutan guru CPNS guru di Kota Madiun. Sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi, Menteri Pendidikan nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Agama Nomor 05/X/PB/2011 tahun 2011 tentang penataan guru Pegawai Negeri Sipil bahwa rasio minimal jumlah peserta didik terhadap gurunya untuk jenjang pendidikan dasar 1 (satu) mengampu paling sedikit 20 peserta didik/kelas. Akan tetapi pada tahun 2022, rasio guru/murid per kelas rata-rata mengalami peningkatan menjadi 1:25, sehingga 1 orang guru menangani 25 anak.

5. Angka Partisipasi Murni SD/SMP

Angka Partisipasi Murni adalah indikator pendidikan yang digunakan untuk mendeteksi partisipasi penduduk yang bersekolah tepat pada waktunya. APM adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan dari jumlah penduduk di usia yang sama. Angka Partisipasi Murni SD/SMP tahun 2019 yakni sebesar 135,45%. Selanjutnya untuk tahun 2020 ke tahun 2021 Angka Partisipasi Murni turun dari 174,89% menjadi 130% dan menurun 15,11 poin di tahun 2022 menjadi 114,99% dari tahun 2021. Pada tahun 2023, mengalami penurunan menjadi 107,1%. Angka tersebut menunjukkan terdapat sekitar 107,1% anak berusia 7-15 tahun yang bersekolah pada jenjang pendidikan SD/MI di Kota Madiun.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

6. Kondisi sekolah pendidikan dasar kondisi bangunan baik

Kondisi sekolah pendidikan dasar dengan kondisi bangunan baik akan mendorong terciptanya suasana pembelajaran yang kondusif. Capaian kondisi sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik tahun 2019 hingga tahun 2021 persentasenya terus meningkat. Capaian pada tahun 2019 adalah sebesar 95,24%, di tahun 2020 meningkat menjadi 98,48%, dan di tahun 2021 menjadi sebesar 97,20%, akan tetapi pada tahun 2022 ini kondisi sekolah pendidikan dasar kondisi bangunan baik turun menjadi hanya sebesar 89%, hal ini terjadi karena untuk rehab serta pembangunan hanya mengandalkan dana DAK dalam pelaksanaannya. Dan pada tahun 2023 mengalami kenaikan menjadi 99,8%.

Kondisi sekolah pendidikan SMP/MTs dengan kondisi bangunan baik tahun 2019 sebesar 98,68% dan mengalami penurunan sebesar 6,05% sehingga capaiannya menjadi 92,63 pada tahun 2020. Sedangkan pada tahun 2021 kondisi sekolah pendidikan SMP/MTs dengan kondisi bangunan baik mencapai 99,50%. Akan tetapi pada tahun 2022, kondisis sekolah pendidikan dasar kondisi bangunan baik hanya tercapai 95%, yang berarti turun 4,50% dari tahun 2021. Namun kembali naik pada tahun 2023 sebesar 99,70%.

7. Angka Pendidikan Kasar Pendidikan Anak Usia Dini disini adalah Angka Pendidikan Kasar Pendidikan Anak Usia Dini Formal atau Taman Kanak-Kanak.

Angka Pendidikan Kasar Pendidikan Anak Usia Dini pada tahun 2019 adalah sebesar 109%, dan pada tahun 2020 capaian Angka Pendidikan Kasar Pendidikan Anak Usia Dini mengalami penurunan sebesar 13,39 sehingga menjadi 95,61%. Capaian tersebut lebih rendah dibandingkan dua tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 capaian Angka Pendidikan Kasar Pendidikan Anak Usia Dini adalah sebesar 90,04%. Akan tetapi pada tahun 2022 dan 2023 Angka Pendidikan Kasar Pendidikan Anak Usia Dini mengalami peningkatan secara signifikan mencapai 108,23 poin sehingga menjadi 198,27% dan pada 2023 menjadi 104,06%.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

8. Angka putus sekolah pendidikan dasar dan rata-rata angka putus sekolah

Angka putus sekolah dan rata-rata putus sekolah pendidikan dasar pada 2019 adalah 0. Hal ini dapat diartikan bahwa Angka Putus sekolah dan rata-rata putus sekolah di Kota Madiun tidak ada pelajar yang putus sekolah. Hal ini disebabkan karena Masyarakat Kota Madiun sudah menyadari akan pentingnya pendidikan dan karena adanya dukungan anggaran dari pemerintah Kota Madiun melalui Program Pendidikan dasar dan Program BOS dari Pemerintah Pusat. Pada tahun 2020 angka putus sekolah dan rata-rata angka putus sekolah kembali muncul sebesar 0,7%, sedangkan pada tahun 2021, 2022, dan 2023 sebesar 0. Hal tersebut dikarenakan turunnya angka partisipasi sekolah.

9. Angka kelulusan SD/MI, SMP/MTs Melanjutkan (AM)

Angka kelulusan SD/MI, SMP/MTs Melanjutkan (AM) adalah persentase yang menunjukkan jumlah lulusan yang melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Angka kelulusan SD/MI dan SMP/MTs pada tahun 2019 dan tahun 2020 capaiannya adalah 100%. Hal ini disebabkan karena adanya dukungan dari pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Pendidikan dengan mengadakan program dan kegiatan yang ditujukan pada siswa yaitu adanya kegiatan Uji Coba UN bagi siswa SD dan SMP baik yang dilaksanakan di Sekolah maupun dilaksanakan Tingkat Kota.

Angka kelulusan melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs tahun 2019 sebesar 111,35%. Pada tahun 2020 capaian angka kelulusan melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs berhasil mencapai 100%. Sedangkan pada tahun 2021, 2022, dan 2023 capaian angka kelulusan melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs mencapai 100%.

10. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

Kualifikasi pendidikan selain menjadi tuntutan profesi juga merupakan tuntutan yuridis formal bagi tenaga pendidik. Tuntutan tersebut wajib dipenuhi oleh setiap guru agar memiliki legalitas dan dapat menunjukkan kredibilitasnya sebagai agen pembelajaran, sehingga dapat melaksanakan tugas secara profesional.

Guru merupakan aset strategis yang dituntut terus mengalami proses peningkatan pengetahuan dan keterampilan mengajar *(on going formation)* serta memiliki kemampuan untuk melihat ke depan. Itu semua dapat terpenuhi jika guru berusaha meningkatkan kualifikasi pendidikannya. Kualifikasi pendidikan berhubungan erat dengan kinerja guru dalam mengemban peran sebagai agen pembelajaran (*learning agent*).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Sebagai agen pembelajaran guru memiliki peran sentral dan strategis sebagai fasilitator, motivator, pemacu, perekayasa pembelajaran, dan pemberi inspirasi belajar bagi peserta didik. Berdasarkan hal tersebut, selama kurun waktu 5 (lima) tahun, jenjang Pendidikan guru yang ada di Kota Madiun sesuai pada tabel berikut:

Tabel 2. 26 Jumlah Guru berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Kualifikasi	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	SMA	11	0	0	0	0
2	D1	4	0	0	0	0
3	D2	17	0	0	0	0
4	D3	6	19	32	7	50
5	DIV/S1	1.818	1.804	1.956	1.849	2.274
6	S2	116	93	102	125	108

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Madiun

Sebagaimana termuat pada table 2.26 di atas, capaian guru yang memenuhi kualifikasi D-IV/S1 pada tahun 2019 adalah 92,19 % dengan jumlah guru sebanyak 1.818 orang. Pada tahun 2020 capaian guru yang memenuhi kualifikasi meningkat menjadi 94,15%.

Pada tahun 2021 capaian guru yang memenuhi kualifikasi sebesar 93,59%. Capaian ini mengalami penurunan 0,566 poin dibandingkan capaian tahun 2020, namun dari sisi jumlah guru mengalami kenaikan sebanyak 152 orang. Tahun 2022 capaian guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV mencapai 93,33% dengan jumlah guru dengan kualifikasi S1/D-IV sebanyak 1.849 orang. Terjadi penurunan dari sisi capaian dan jumlah guru namun terjadi peningkatan dari sisi kualifikasi pendidikan S2. Peningkatan jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Madiun berusaha meningkatkan kualitas pendidikan melalui perbaikan kualitas guru yang mengajar. Sedangkan pada tahun 2023 capaian guru yang memenuhi kualifikasi sebanyak 2.274 orang dan terjadi penurunan dari sisi kualifikasi pendidikan S2 dari 125 orang di tahun 2022 dan menjadi 108 di tahun 2023.

11. Pengolahan *database* informasi pendidikan dan evaluasi pelaporan berbasis TIK

Pengelolaan *database* informasi pendidikan dan evaluasi pelaporan TIK merupakan pengembangan sistem dan teknologi informasi terpadu yang memuat seluruh data dan informasi pendidikan tingkat kota secara terpadu. Capaian pengolahan data base informasi pendidikan dan evaluasi pelaporan berbasis TIK pada tahun 2019 hingga tahun 2023 adalah 100%. Data dan informasi ini dipergunakan untuk mendukung pengambilan kebijakan pendidikan bagi para pemangku kepentingan dan penyelenggara pendidikan secara tepat, transparan, akuntabel, dan efisien.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Mulai tahun 2013 semua pendataan sudah berbasis internet dan terkoneksi dengan Pusat Data dan Statistik Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia dimana semua bantuan BOS, KIP dan Sertifikasi Guru serta data peserta Ujian Nasional data bersumber pada Data Pokok Pendidikan (DAPODIK). Sejak tahun 2015 hingga saat ini DAPODIK menjadi satu-satunya basis data bagi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dalam menentukan jumlah penerima BOS, Sertifikasi Guru, Program Indonesia Pintar maupun bantuan lain yang bersumber dari dana APBN. Oleh karena itu keakuratan dan ketepatan data dari sekolah merupakan suatu keharusan dan harus di*update* terus menerus.

Data tersebut harus diperbaharui setiap saat dengan sistem online yang terkoneksi langsung dengan *server* Kementerian Pendidikan dan kebudayaan dan di*upload* secara Nasional. Semua sekolah SD dan SMP baik Negeri maupun Swasta di Kota Madiun sudah berbasis web dan terkoneksi dengan Pusat Data Statistik Pendidikan pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia.

12. Sekolah semua jenjang melaksanakan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

Pelaksanaan MBS di sekolah merupakan salah satu persyaratan untuk menjadi sekolah Standar Nasional. Penerapan MBS pada lembaga sekolah SD dan SMP dapat dilihat dari, yaitu:

a. Sekolah memiliki Rencana Kerja Jangka Menengah yang disusun 4 tahunan;
b. Sekolah menyusun Rencana Kerja tahunan dalam bentuk Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah; dan
c. Sekolah memiliki Rencana Jangka Menengah dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah harus didasarkan hasil evaluasi dari sekolah. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah harus disetujui dalam rapat Dewan Pendidikan setelah memperhatikan pertimbangan Komite sekolah dan disahkan oleh SKP Pendidikan Kota.

Sekolah – sekolah di wilayah Kota Madiun memiliki dokumen Rencana Kerja Sekolah dan Evaluasi Diri Sekolah. Dokumen tersebut selalu diperbaharui setiap tahun anggaran dan tahun ajaran. Hal tersebut ditunjukkan dengan capaian satuan pendidikan semua jenjang telah melaksanakan manajemen berbasis sekolah sebesar 100% mulai dari tahun 2019 hingga tahun 2023.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

13. Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang mengikuti pelatihan profesional

Capaian pada tahun 2019 sebanyak 1.427 guru dan sesuai dengan target RPJMD. Peningkatan tersebut disebabkan oleh pengadaan CPNS tahun 2019 sejumlah 76 orang guru. Pada tahun 2020 tenaga pendidik yang mengikuti pelatihan professional menurun sangat drastis yaitu menjadi 398 guru. Sedangkan pada tahun 2021 dan 2022 capaian tenaga pendidik yang mengikuti pelatihan professional mencapai 1.212 orang guru dan 1.200 guru. Pada tahun 2023, capaian tenaga pendidik yang mengikuti pelatihan professional mencapai 12.15 orang guru.

Dalam hal pelayanan Pendidikan dinas Pendidikan juga menerapkan pelayanan dasar yang menjadi kewenangannya sesuai standar pelayanan minimal pada urusan wajib bidang Pendidikan, pada tahun 2022 capaian indikator SPM tersebut sebagaimana tabel di bawah:

Tabel 2. 27 Capaian SPM Bidang Pendidikan, Tahun 2023

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	capaian 2023
1	Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTS)	28.432
2	Pendidikan kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	320
3	Pendidikan anak usia dini	Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	5.395
4	Pendidikan dasar, Kesetaraan dan Anak Usia Dini	Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil asesmen Nasional	Belum Tersedia

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Madiun

Informasi SPM Pendidikan berdasarkan surat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Teknologi Nomor: 5676/MPK.A/PR.07.05/2023 tentang Indikator Kinerja Urusan Pendidikan di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Agar ditambahkan indikator kinerja urusan bidang Pendidikan yang merujuk pada indeks standar pelayanan minimal bidang Pendidikan yaitu:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Tabel 2. 28 Capaian Indeks SPM Bidang Pendidikan, Tahun 2022 dan 2023

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	2022	2023
1	Pendidikan Sekolah Dasar	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional	85.99	89,06
		Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	56,5	72,29
		Iklim keamanan SD	75,13	74,97
		Iklim kebhinekaan SD	61,66	72,73
		Iklim inklusivitas SD	56,8	58,94
2	Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	86,66	92,37
		Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	63,34	73,74
		Iklim keamanan SMP	79,5	73,31
		Iklim kebhinekaan SMP	62,99	70,88
		Iklim inklusivitas SMP	54,3	58,26
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	90,79	91,03
		Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV	Belum tersedia	94,71

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Madiun

b. Pelayanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan adakah salah satu layanan dasar yang wajib disediakan selain pendidikan. Jumlah puskesmas, jumlah rumah sakit, jumlah dokter serta tenaga kesehatan yang memadai dapat meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah terhadap masyarakat. Persebaran jumlah rumah sakit, puskesmas, dokter dan tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

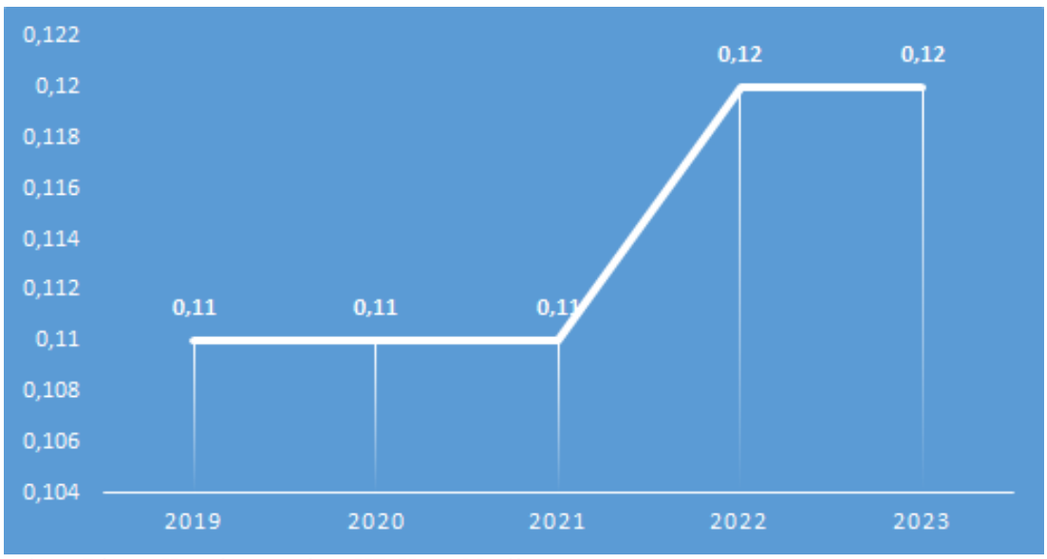
Tabel 2. 29 Rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu per 1.000 Penduduk di Kota Madiun, 2019-2023

Tahun	Rasio Jumlah Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu per 1.000 Penduduk
2019	0,11
2020	0,11
2021	0,11
2022	0,12
2023	0,12

Sumber: Dinas Kesehatan dan KB Kota Madiun

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Sebagaimana termuat pada Tabel 2.29 di atas, selama tahun 2019 hingga tahun 2023, rasio jumlah puskesmas, poliklinik, dan pustu per 1.000 penduduk di Kota Madiun cenderung stabil. Pada tahun 2019 sampai dengan 2020, rasio ini menunjukkan nilai sebesar 0,11. Pada tahun 2021, rasio sedikit mengalami peningkatan sehingga rasio jumlah puskesmas, poliklinik dan putsu stabil di angka 0,35. Akan tetapi pada tahun 2022 dan 2023 kembali mengalami peningkatan di angka 0,12 kembali. Berikut tren rasio Rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu per 1.000 penduduk di Kota Madiun tahun 2019-2023, yaitu sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: Dinas Kesehatan dan KB Kota Madiun

Gambar 2. 15
Rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu per 1.000 Penduduk
di Kota Madiun Tahun 2019-2023

Selanjutnya terdapat tabel rasio dokter dan tenaga medis per jumlah penduduk yang dijabarkan pada tabel di bawah ini, yaitu:

Tabel 2. 30 Rasio Dokter dan Tenaga Kesehatan Lainnya per 100.000 Penduduk di Kota Madiun Tahun 2019-2023

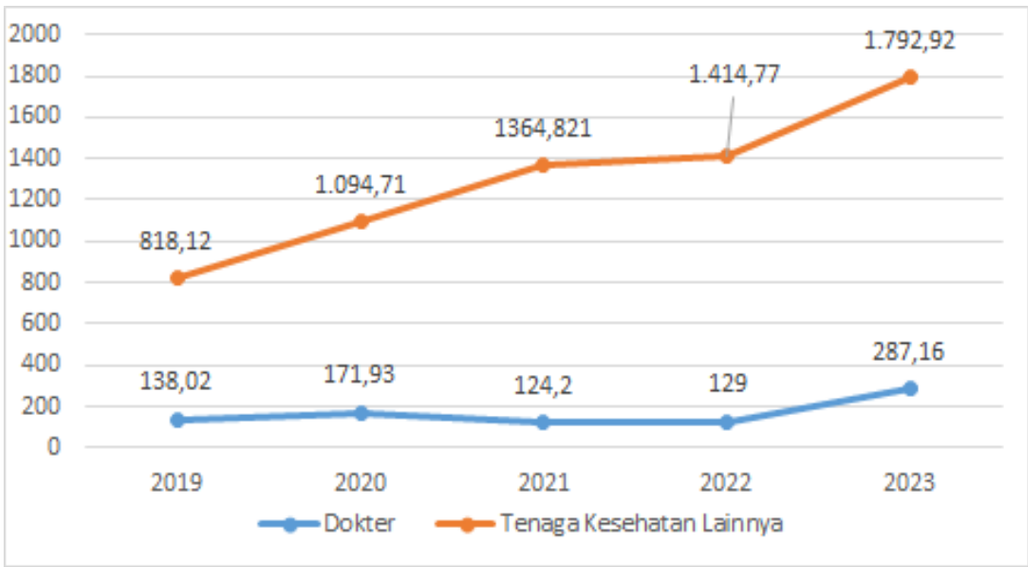
Tahun	Dokter	Tenaga Kesehatan Lainnya
2019	138,02	818,12
2020	171,93	1.094,71
2021	124,2	1.364,82
2022	129	1.414,77
2023	287,16	1.792,92

Sumber: Dunas Kesehatan dan KB Kota Madiun

Sebagaimana termuat pada Tabel 2.30 di atas, rasio dokter dan tenaga medis per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Data di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2019 hingga tahun 2022, rasio dokter per 100.000 penduduk di Kota Madiun berkisar antara 138,02 hingga 129. Rasio tenaga kesehatan pada tahun 2019 hingga tahun 2022 berkisar antara 818,12 hingga 1.414,77 dan mengalami peningkatan pada tahun 2023 menjadi 287,16 untuk rasio dokter dan 1.792,92 untuk rasio tenaga kesehatan lainnya. Namun, secara keseluruhan rasio dokter mengalami fluktuatif dan meningkat jika dibandingkan tahun 2019. Rasio tenaga kesehatan dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren meningkat.



Sumber: Dinas Kesehatan dan KB Kota Madiun

Gambar 2. 16
Rasio Dokter dan Tenaga Kesehatan Lainnya per 100.000 Penduduk
di Kota Madiun Tahun 2019-2023

Sebagaimana yang termuat pada Gambar 2.16 di atas, setelah mengetahui rasio puskesmas dan rasio dokter serta tenaga kesehatan, berikut tabel rasio rumah sakit per 1.000 penduduk di Kota Madiun, yaitu pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 31 Rasio Rumah Sakit per 1.000 Penduduk di Kota Madiun Tahun 2019-2023

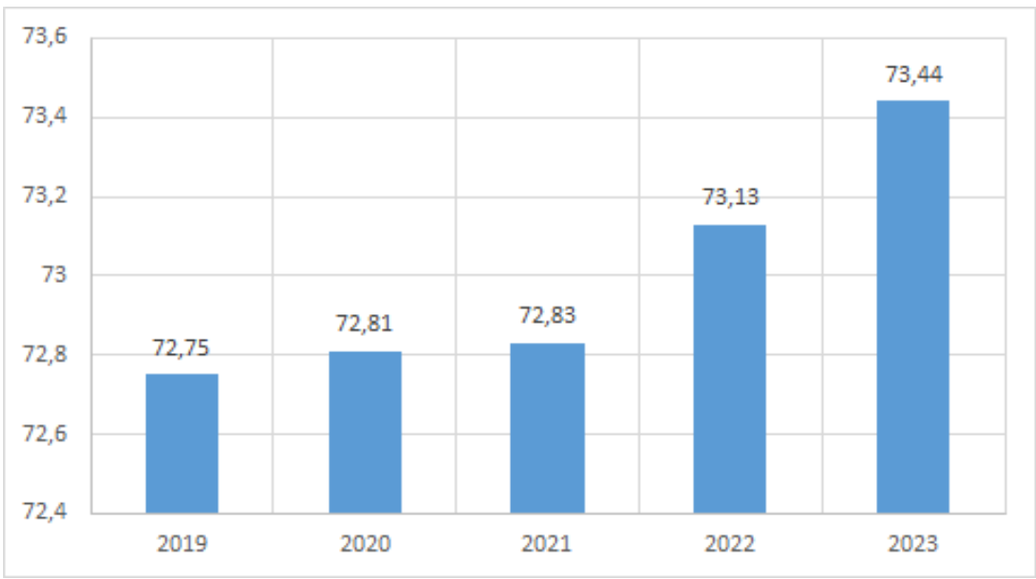
Tahun	Jumlah Rumah Sakit	Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Rumah Sakit Terhadap 1.000 Penduduk
2019	8	210.115	0,0380
2020	8	209.950	0,0380
2021	8	201.452	0,0397
2022	8	201.760	0,0397
2023	9	202.544	0,0444

Sumber: Dinas Kesehatan dan KB Kota Madiun

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Sebagaimana termuat pada Tabel 2.31 di atas, selama tahun 2019 hingga tahun 2023 di Kota Madiun sebanyak 9 rumah sakit masih beroperasi. Adapun rasio rumah sakit per 1.000 penduduk pada tahun 2019 menuju 2020 di Kota Madiun mengalami kondisi yang stagnan pada angka 0,0380. Pada pada tahun 2021 dan 2022 rasio meningkat menjadi sebesar 0,0397. Dan peningkatan terjadi juga pada 2023 dimana rasio rumah sakit per 1.000 penduduk cenderung stabil dan mengalami peningkatan sebesar 0,0047 menjadi 0,0444.

Salah satu aspek kesehatan direpresentasikan oleh Umur Harapan Hidup (UHH). Dimensi umur panjang dan hidup sehat yang direpresentasikan oleh UHH saat lahir. UHH di Kota Madiun terus meningkat dari tahun ke tahun. Kenaikan ini dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Sumber: BPS Kota Madiun

Gambar 2. 17 Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH) Kota Madiun Tahun 2019-2023 (tahun)

Aspek kesehatan juga menangani kasus Kejadian Luar Biasa, Jumlah kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) pada Tahun 2022 sebanyak 1 kasus yang terjadi pada 27 kelurahan, dan 2 Kelurahan di Kota Madiun. Dapat terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 32 Jumlah Kasus KLB di Kota Madiun Tahun 2023

No	Jenis Kasus KLB	Kelurahan Tempat Kejadian	Waktu Kejadian Diketahui
1	Demam Berdarah Dengue (DBD)	2 Kelurahan	14 Mei 2020 – 16 Mei 2022

Sumber: Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Selanjutnya kegiatan yang dilakukan untuk menurunkan angka kejadian KLB di masyarakat, yaitu sebagai berikut:

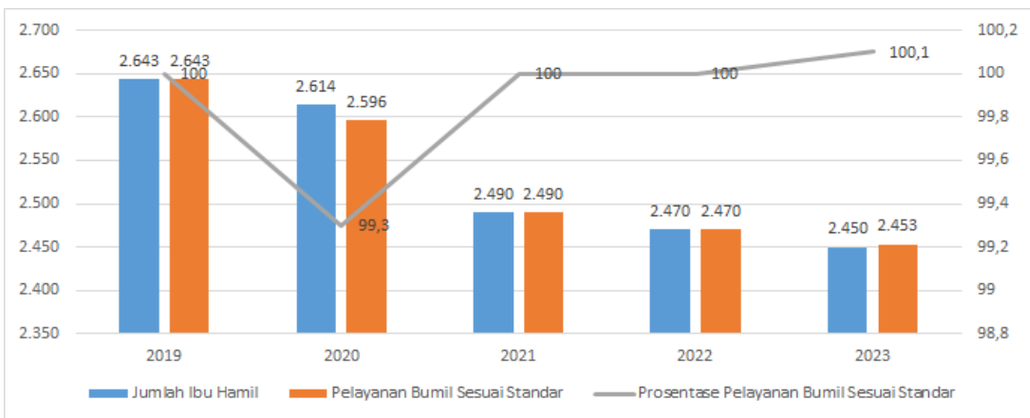
1. meningkatkan cakupan imunisasi untuk mempertahankan kekebalan kelompok sehingga kasus penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi dapat ditekan/menurun;
2. meningkatkan komunikasi informasi dan edukasi kepada seluruh jejaring surveilans epidemiologi; dan
3. meningkatkan surveilans aktif rumah sakit guna kewaspadaan dini dan respon.

Berikutnya yang harus diperhatikan adalah pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar, data pelayanan kesehatan ibu hamil pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut:

Tabel 2. 33 Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar di Kota Madiun Tahun 2019 - 2023

No	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Jumlah Ibu Hamil	2.643	2.614	2.490	2.470	2.450
2	Pelayanan Bumil Sesuai Standar	2.643	2.596	2.490	2.470	2.453
3	Persentase Pelayanan Bumil Sesuai Standar	100	99,3	100	100	100,1

Sumber: Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun



Sumber : Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun

Gambar 2. 18
Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar
di Kota Madiun Tahun 2019 - 2023

Sebagaimana termuat pada Tabel 2.33 dan Gambar 2.18 di atas, terlihat bahwa capaian persentase pelayanan bumil sesuai standar di tahun 2023 sebesar 100%. Pelayanan Ibu hamil sesuai standar sudah mencapai target yang diharapkan yaitu bahwa 100% ibu hamil sudah mendapat pelayanan secara paripurna dengan minimal 4 kali kunjungan dan terlaksananya ANC terpadu di fasilitas pelayanan kesehatan di Kota Madiun.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Indikator ini merupakan salah satu indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan, sehingga dalam pencapaiannya harus melingkupi semua ibu hamil yang ada di Kota Madiun. Sedangkan, Strategi kegiatan yang telah dilakukan untuk mencapai target sebagai berikut:

a. sosialisasi kesehatan bagi calon pengantin;
b. optimalisasi kelas ibu hamil di puskesmas;
c. terjalin kerjasama yang baik dengan SpOG terkait pelayanan ANC terpadu;
d. pendampingan ibu hamil oleh kader kesehatan;
e. edukasi ke masyarakat untuk menuju persalinan yang aman dan pentingnya pemeriksaan selama kehamilan dan setelah persalinan.

Penduduk Kota Madiun harus dapat mengakses pelayanan kesehatan dasar setiap hari melalui Pos Kesehatan Kelurahan, maka peran Kelurahan siaga aktif berstrata puri sangat dibutuhkan. Berikut terdapat data kelurahan siaga pada Tahun 2023:

Tabel 2. 34 Capaian Kelurahan Siaga Aktif Berstrata Puri di Kota Madiun Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Jumlah Desa Siaga	27	27	27	27	27
2	Jumlah Desa Siaga Puri	24	15	16	23	25
3	Persentase Kelurahan Siaga Aktif Puri	88,89	55,55	59,26	85,19	92,59

Sumber: Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun

Sebagaimana termuat pada Tabel 2.34 di atas, jumlah desa siaga puri setiap tahunnya dari tahun 2019-2023 mengalami peningkatan. Sehingga, capaian persentase kelurahan siaga aktif puri juga meningkat. Berikut grafik tren peningkatan capaian kelurahan siaga aktif puri:



Sumber: Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun

Gambar 2. 19
Kelurahan Siaga Aktif Berstrata Puri di Kota Madiun Tahun 2019 - 2023

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Sebagaimana termuat pada Gambar 2.19 di atas, terlihat bahwa cakupan kelurahan siaga aktif di tahun 2023 yaitu sebesar 100% dari 27 kelurahan menjadi kelurahan siaga aktif. Strata kelurahan siaga aktif (Purnama dan Mandiri) Tahun 2022 sebesar 85,19% yaitu sebanyak 23 kelurahan dari 27 kelurahan yang ada di Kota Madiun. Adanya peningkatan 8 kelurahan dibandingkan tahun 2021. Capaian tersebut dikarenakan:

1. peran aktif kader kelurahan siaga aktif dalam upaya menghidupkan kegiatan kelurahan siaga aktif;
2. adanya kegiatan inovasi sangat membantu tercapainya kelurahan siaga berstrata PURI; dan
3. kerjasama lintas sektor dengan OPD terkait menggerakkan pemberdayaan masyarakat terutama Kelurahan Siaga Aktif sebagai induk UKBM di kelurahan.

Rasio jumlah Puskesmas dan Pustu pada tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 35 Rasio Puskesmas dan Pustu di Kota Madiun Tahun 2019 – 2023

No	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Jumlah Puskesmas	6	6	6	6	6
2	Jumlah Pustu	18	18	18	18	18
3	Jumlah Penduduk	210.115	209.950	201.452	201.760	202.544
4	Rasio Jumlah Puskesmas, Poliklinik Dan Pustu Per 1.000 Penduduk	0,11	0,11	0,11	0,12	0,12

Sumber: Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun

Sebagaimana termuat pada Tabel 2.35 di atas, terlihat bahwa dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 tidak ada penambahan jumlah Puskesmas dan Pustu di Kota Madiun. Rasio jumlah Puskesmas dan Pustu per 1.000 penduduk pada tahun 2019 hingga tahun 2020 tidak ada perubahan di kisaran 0,11. Rasio tersebut meningkat pada tahun 2021 - 2023 menjadi 0,35 dan tahun 2022 menjadi 0,119. Pada saat ini di setiap kelurahan di Kota Madiun sudah terdapat pelayanan kesehatan berupa Puskesmas dan rumah sakit sehingga aksesibilitas untuk mendapatkan pelayanan kesehatan cukup mudah. Kota Madiun terdapat 8 (delapan) Rumah Sakit (RS) yaitu 2 (dua) RS Umum milik pemerintah, 1 (satu) RS Paru milik pemerintah, 1 (satu) RS Umum milik TNI AD, 1 (satu) RS Bersalin milik swasta serta 3 (tiga) RS Umum milik swasta, sehingga kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat Kota Madiun sudah terpenuhi:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1. Jumlah Puskesmas Poned

   Puskesmas yang masuk dalam kategori Pelayanan Mampu PONED (Pelayanan Obstetri *Neonatal Emergency* Dasar) terdapat 1 (satu) Puskesmas yaitu Puskesmas Banjarejo.

2. Rasio Rumah Sakit (RS) per 1.000 Penduduk

   Tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, jumlah RS di Kota Madiun sebanyak 8 RS dan 9 RS pada tahun 2023. Rasio RS di Kota Madiun dapat dilihat di tabel berikut ini:

Tabel 2. 36 Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta di Kota Madiun Tahun 2019 - 2023

No	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Rumah Sakit Milik Pemerintah Kota	1	1	1	1	1
2	Rumah Sakit Milik Pemerintah Provinsi	1	1	1	1	1
3	Rumah Sakit Milik TNI/AD	1	1	1	1	1
4	Rumah Sakit Swasta	3	3	3	3	4
5	Rumah Sakit Khusus	2	2	2	2	2
6	Jumlah Rumah Sakit	8	8	8	8	9
7	Jumlah Penduduk	210.115	209.950	201.452	201.760	202.544
8	Rasio Jumlah Rumah Sakit Terhadap 1.000 Penduduk	0,0380	0,0380	0,0397	0,0397	0,04443

Sumber: Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun

Sebagaimana termuat pada Tabel 2.36 di atas, terlihat bahwa tahun 2019 dan 2020 rasio jumlah rumah sakit terhadap 1000 penduduk adalah 0,0380. Pada tahun 2021 dan 2022 rasio jumlah rumah sakit meningkat menjadi 0,0397 dikarenakan adanya penurunan jumlah penduduk. Dan kembali naik pada tahun 2023 sebesar 0,04443.

Adapun perkembangan pencapaian kinerja sasaran pada Aspek Pelayanan Umum yang diukur dengan indikator kinerja sasaran Fokus pada bidang kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Tabel 2. 37 Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah pada Aspek Pelayanan Umum Fokus Bidang Kesehatan Tahun 2019-2023

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	CAPAIAN				
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	2	3	4	5	6	7
II	ASPEK PELAYANAN UMUM					
A	Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar					
1	Kesehatan					
2.1	Rasio Puskesmas dan Pustu per 1.000 penduduk	0,11	0,11	0,11	0,12	0,12
2.2	Jumlah Puskesmas PONED	1	1	1	1	1
2.3	Rasio jumlah rumah sakit per 1.000 penduduk	0,0380	0,0380	0,0397	0,0397	0,0444
2.4	Rasio dokter per 100.000 penduduk	138,02	171,93	116,9	129	287,16
2.5	Rasio tenaga kesehatan lainnya per 100.000 penduduk	818,12	1.094,71	132,83	1.414,77	1.792,92
2.6	Puskesmas berstandar ISO	0	0	0	0	0
2.7	SOP Pelayanan	457	478	0	195	67
2.8	Cakupan masyarakat miskin yang terlayani	100	100	100	100	100
2.9	Cakupan kelurahan siaga aktif	100	100	100	100	100
2.10	Persentase rumah tangga ber-PHBS	68,21	69	69,43	64,88	70,94
2.11	Cakupan kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100	62,96	100	100	100
2.12	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100	100	48	100	100
2.13	Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	39,53	0	126	42,42	0
2.14	Persentase rumah sehat	68,21	69	99,92	88,41	89,25
2.15	Persentase penduduk yang memiliki jaminan pra bayar	100	95,17	113	98,73	100,61
2.16	Jumlah kasus KLB	9	162	2	2	4
2.17	Persentase penanganan penyakit	87,5	100	100	100	83,34
2.18	Persentase kelurahan ber STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)	59,26	40,74	74,1	100	100
2.19	Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	100	100	100	85	100
2.20	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Madiun	81,84	74,94	84,917	86,02	85,98
2.21	Persentase pencapaian kinerja Badan Layanan Umum Daerah	100	100	100	50	100
2.22	Persentase produk makanan olahan Industri Rumah Tangga	85,12	86,63	100	90,72	95

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2	3	4	5	6	7
	Pangan (IRTP) yang dinilai memenuhi syarat					
2.23	Persentase sarana dan prasarana rumah sakit yang sesuai standar	100	100	100	100	100
2.24	Persentase penduduk yang di skrining faktor resiko PTM	104,67	90,25	118,4	110,81	110,62
2.25	Persentase kelurahan siaga aktif berstrata PURI	88,89	55,55	59,26	85,19	92,59
2.26	Jumlah sarana pelayanan kesehatan yang beroperasi sesuai perundangan	408	502	550	252	161
2.27	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	100	100	100	100	100,12
2.28	Persentase TTU dan TPM sehat	85,61	86,32	TTU:95,3 TPM:95,2	TTU:81 TPM: 96,67	TFU: 95,7 TPP: 89,7
2.29	Angka kematian bayi	6,32	4,32	3,8	4,2	5,1
2.30	Angka kesehatan orang dengan resiko terinfeksi kusta	0,3	0,3	0,6	0,1	0,4
2.31	IKM rumah sakit	80,35	80,19	83,39	88,94	89,56
2.32	Capaian pemenuhan SPM Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	78,26	81,52	79,35	88,17	89,13
2.33	Persentase desa ODF	100%	100%	100%	100%	100%

Sebagaimana data yang termuat pada Tabel 2.37 di atas, selanjutnya dapat diuraikan dalam materi sebagai berikut:

1. Rasio Puskesmas dan Pustu per 1.000 penduduk

Salah satu upaya pemerintah untuk menyehatkan masyarakat adalah dengan membangun sarana dan prasarana kesehatan. Ketersediaan sarana pelayanan kesehatan seperti puskesmas dan pustu di masyarakat dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Selama tahun 2019 hingga tahun 2022, rasio jumlah puskesmas dan pustu per 1.000 penduduk di Kota Madiun cenderung stabil. Pada tahun 2019 hingga tahun 2021, rasio berada di angka sebesar 0,11 meningkat sedikit di tahun 2022 - 2023 menjadi 0,12.

2. Jumlah Puskesmas PONED

Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) di Puskesmas berperan dalam menurunkan angka kematian ibu. Ketersediaan tenaga kerja yang kompeten merupakan kunci keberhasilan pelayanan PONED. Selama tahun 2019 hingga tahun 2023 jumlah puskesmas yang menyediakan layanan PONED sebanyak 1 puskesmas.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

3. Rasio rumah sakit per 1.000 penduduk

Selama tahun 2019 hingga tahun 2022 rumah sakit yang beroperasi sebanyak 8 rumah sakit. Rumah sakit tersebut terdiri atas 1 (satu) rumah sakit milik Pemerintah Kota Madiun, 1 (satu) rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur, 1 (satu) rumah sakit milik TNI/AD, 1 (satu) rumah sakit swasta, dan 1 (satu) rumah sakit khusus. Rasio rumah sakit per 1.000 penduduk di Kota Madiun pada tahun 2019 dan 2020 sebesar 0,0380. Sedikit mengalami peningkatan pada tahun 2021 dan 2022 sehingga nilainya mencapai 0,0397. Pada 2023 peningkatan juga terjadi dan nilai rasio rumah sakit per 1.000 penduduk menjadi 0,0444.

4. Rasio dokter per 100.000 penduduk

Rasio dokter per 100.000 penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan per 100.000 jumlah penduduk. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2019 hingga tahun 2020, rasio dokter per 100.000 penduduk di Kota Madiun berkisar antara 136,32 hingga 171,93. Rasio tertinggi terjadi pada tahun 2020. Secara keseluruhan dalam dua tahun terakhir rasio dokter menunjukkan peningkatan dari tahun 2021 ke tahun 2022. Adapun pada tahun 2022, rasio dokter per 100.000 penduduk Kota madiun adalah 129 dan naik pada 2023 menjadi 287,16.

5. Rasio tenaga kesehatan lainnya per 100.000 penduduk

Rasio tenaga kesehatan lainnya per 100.000 penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh tenaga kesehatan lainnya per 100.000 jumlah penduduk. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2019 hingga tahun 2020, rasio tenaga kesehatan lainnya per 100.000 penduduk di Kota Madiun berkisar antara 906,59 hingga 1.094,71. Rasio tenaga kesehatan yang terus meningkat disebabkan adanya pencatatan dan pelaporan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan yang semakin meningkat, serta adanya pembinaan dan pengawasan yang semakin baik. Adapun pada tahun 2022, rasio tenaga kesehatan per 100.000 penduduk Kota Madiun adalah 1.414,77.

6. Puskesmas berstandar ISO

Fungsi utama puskesmas sebagai unit pelayanan masyarakat adalah upaya promotif dan preventif terhadap risiko penyakit di tengah masyarakat yang dilayani. Puskesmas berstandar ISO adalah Puskesmas plus yang dapat menjalankan rawat inap dan rawat jalan secara simultan. Berdasarkan data, sejak tahun 2019 hingga tahun 2023 belum mempunyai puskesmas yang telah mempunyai standar ISO.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

7. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan

Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan dasar dalam melakukan pekerjaan dan sistem penghargaan yang diberikan kepada pegawai untuk menunjang pelayanan. Skor SOP Pelayanan di Kota Madiun tahun 2019 hingga 2020 berkisar antara 444 hingga 478. Angka tersebut menunjukkan peningkatan setiap tahun dan termasuk dalam kriteria yang baik. Sedangkan pada tahun 2021, skor SOP Kota Madiun tercatat sudah mencapai angka 0. Sedangkan pada tahun 2022 skor mencapai 195 dan menurun menjadi 67 pada tahun 2023.

8. Cakupan masyarakat miskin terlayani

Tahun 2019 hingga tahun 2023, di Kota Madiun penanganan masyarakat miskin yang terlayani telah mencapai 100%. Hal ini didukung oleh adanya jaminan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat miskin di Kota Madiun.

9. Cakupan kelurahan siaga aktif

Kelurahan siaga aktif adalah Kelurahan yang penduduknya dapat mengakses dengan mudah pelayanan kesehatan dasar yang memberikan pelayanan setiap hari melalui Pos Kesehatan Kelurahan. Kota Madiun pada tahun 2019 hingga tahun 2022 cakupan kelurahan siaga aktif sebesar 100% yang berarti seluruh Kelurahan aktif beroperasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

10. Persentase rumah tangga ber-PHBS

Rumah Tangga yang menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) akan menciptakan suatu Rumah Tangga Sehat dimana setiap anggota menjadi sehat dan tidak mudah sakit. Sementara pada tahun 2019 meningkat menjadi 68,21% dan pada tahun 2020 sedikit mengalami peningkatan menjadi 69%. Setahun setelahnya pada tahun 2021, Rumah Tangga yang menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Kota Madiun sudah mencapai 69,43% dan sedikit menurun pada tahun 2022 menjadi 64,88% namun pada tahun 2023 terjadi peningkatan menjadi 70,94. Penurunan capaian di tahun 2022 disebabkan adanya perubahan definisi operasional penilaian pada indikator Tidak Merokok. Definisi operasional dari "apabila tidak ada anggota rumah tangga umur 10 tahun keatas yang merokok didalam rumah" menjadi "tidak ada anggota rumah tangga umur 10 tahun ke atas yang merokok".

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

11. Cakupan kelurahan *Universal Child Immunization*

Cakupan kelurahan *Universal Child Immunization* di Kota Madiun, pada tahun 2019 dan 2019 telah mencapai 100%. pada tahun 2020 cakupan kelurahan *Universal Child Immunization* mengalami penurunan sehingga cakupannya hanya sebesar 62,96%. Dengan demikian, diharapkan angka kesakitan, kecacatan dan kematian akibat dari suatu penyakit dapat diminimalisir. Adapun pada tahun 2021 hingga 2023, cakupan kelurahan *Universal Child Immunization* di Kota Madiun kembali mencapai 100%.

12. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD

Penyelesaian dan penanganan DBD diperlukan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Selama tahun 2019 hingga tahun 2020 kota Madiun berhasil menangani kasus DBD dengan persentase mencapai 100%. Hal ini didukung oleh keterlibatan lintas program dan lintas sektor, seperti koordinasi dengan rumah sakit, puskesmas, dan lingkungan dalam melaporkan kasus serta adanya penanganan yang cepat. Pada tahun 2023 penanganan kasus DBD di kota Madiun juga mencapai 100%.

13. Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup

Angka kematian ibu menjadi salah satu indikator mengenai kualitas kesehatan di masyarakat. Tahun 2019 dan tahun 2020 tidak tercatat kasus kematian ibu. Namun, pada tahun 2019 dan tahun 2022 tercatat angka kematian ibu sebesar 39,53 dan 42,42, artinya terdapat 1 kematian ibu dari 100.000 kelahiran hidup. Akan tetapi Pada tahun 2021 terdapat 3 kematian ibu dari 100.000 kelahiran hidup sehingga persentase pada tahun 2021 adalah sebesar 126%. Namun, pada 2023 tercatat tidak ada kematian ibu dari 100.000 kelahiran hidup.

14. Persentase rumah tangga sehat

Rumah tangga sehat akan mampu menciptakan lingkungan yang sehat dan meningkatkan kualitas hidup. Persentase rumah tangga sehat tahun 2019 adalah 68,21% dan pada tahun 2020 sedikit mengalami peningkatan menjadi 69%. Capaian pada tahun 2021 meningkat tajam mencapai 99,92%, akan tetapi menurun menjadi 88,41% pada tahun 2022. Faktor melandasinya pandemi Covid-19 menyebabkan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat menurun. Namun, di tahun 2023, terjadi peningkatan persentase rumah tangga sehat menjadi 89,25%.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

15. Persentase penduduk yang memiliki jaminan prabayar

Persentase penduduk yang memiliki jaminan prabayar Kota Madiun tahun 2019 sebanyak 100%. Pada tahun 2020 terjadi penurunan sebesar 4,73% sehingga menjadi 95,17%. Sebagian besar masyarakat Kota Madiun telah memiliki Jaminan PraBayar. Tahun 2021, persentase penduduk yang memiliki Jaminan PraBayar Kota Madiun telah mencapai 113%, dan menurun menjadi 98,73% pada tahun 2022. Di tahun 2023, terjadi peningkatan kembali pada persentase penduduk yang memiliki jaminan prabayar menjadi 100,61%.

16. Jumlah Kasus KLB

KLB adalah timbulnya kejadian kesakitan dan atau kematian yang bermakna secara epidemiologi pada suatu daerah dalam waktu tertentu dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah. Jumlah kasus KLB di Kota Madiun tahun 2019 adalah 9 kejadian. Pada tahun 2020 jumlah kasus KLB meningkat sangat drastis mengingat pada 2020 terjadi fenomena wabah yang dapat menular yaitu kasus terjadinya virus corona. Adapun berselang setahun saat 2021 hingga 2022 dimana tahun ketiga Covid-19 melanda Indonesia, jumlah KLB di Kota Madiun mencapai 2 kejadian. Selanjutnya, di tahun 2023 jumlah kasus luar biasa meningkat menjadi 4 kejadian.

17. Persentase Penanganan Penyakit

Persentase penanganan penyakit Kota Madiun tahun 2019 adalah 87,5%. Pada tahun 2020-2022 pemerintah berhasil meningkatkan persentase penanganan penyakit menjadi 100%. Adapun di masa tahun ketiga Covid-19 melanda Indonesia, pemerintah Kota Madiun mendapatkan persentase penanganan penyakit sebesar 100%. Namun, pada tahun 2023, diketahui terdapat penurunan persentase penurunan penyakit menjadi 83,34.

18. Persentase kelurahan ber STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)

Masalah kesehatan lingkungan merupakan suatu masalah yang perlu diperhatikan, salah satunya masalah sanitasi yang erat hubungannya dengan timbulnya atau menularnya suatu penyakit. Pada tahun 2019 persentase kelurahan ber STBM Kota Madiun sebesar 59,26%. Sementara pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan pula menjadi 40,74%. Adapun pada tahun 2021, STBM Kota Madiun mencapai 74,1% dan telah mencapai 100% pada Tahun 2022 dan 2023.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

19. Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan

Ketersediaan obat merupakan salah satu komoditi kesehatan yang memiliki peranan penting dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan. Persentase ketersediaan obat dan perbekalan obat di Kota Madiun tahun 2019 hingga 2021 mencapai angka 100%, artinya ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Adapun pada tahun 2022, persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di Kota Madiun hanya mencapai 85% dan di tahun 2023 ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di Kota Madiun meningkat menjadi 100%.

20. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun

Tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh atas pelayanan yang dilakukan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun tahun 2019 sebesar 81,84. Pelayanan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memiliki kategori yang sangat baik dalam dua tahun tersebut. Pada tahun 2020 IKM menurun menjadi 74,94 yang artinya kategori pelayanan menurun menjadi baik. Sehingga kualitas pelayanan harus ditingkatkan. Pada tahun 2021, 2022, dan 2023 tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh atas pelayanan yang dilakukan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun berturut-turut mencapai 84,917; 86,02; dan 85,98.

21. Persentase pencapaian kinerja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Pencapaian Kinerja BLUD kota Madiun tahun 2019 hingga 2021 telah mencapai 100%. Pencapaian Kinerja BLUD kota Madiun terbilang baik hingga saat ini. Adapun pada tahun 2022 pencapaian kinerja BLUD Kota Madiun turun secara signifikan menjadi hanya sebesar 50%. Penyebab dari tidak tercapainya target tersebut adalah tidak tercapainya *Bed Occupancy Rate* (BOR), semakin banyak fasilitas kesehatan rawat inap yang baru kasus covid yang tetap masih ada, meskipun memiliki tren menurun, sehingga ketersediaan fasilitas untuk Covid-19 masih dipersiapkan dan meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Upaya peningkatan: selalu berinovasi terkait layanan yang ada di rumah sakit dan berupaya dalam pemanfaatan TT (Tempat Tidur) dengan melakukan analisa dan evaluasi untuk penyediaan TT. Namun, pada 2023, pencapaian kinerja BLUD Kota Madiun kembali meningkat signifikan menjadi 100%.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

22. Persentase produk makanan lahan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang dinilai

IRTP adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis. Kota Madiun tahun 2019 produk olahan IRTP yang telah berhasil dinilai sebesar 85,12%, dan terus mengalami peningkatan pada tahun 2020 yaitu sebesar 86,63%. Pada tahun 2021 produk olahan IRTP Kota Madiun telah mencapai 100%, akan tetapi kembali menurun menjadi 90,72% pada tahun 2022.

Meskipun capaian tahun 2022 menurun, namun melebihi target dari yang direncanakan sebesar 87,88. Kemudian, capaian pada tahun 2023, meingkat menjadi 95%.

23. Persentase sarana dan prasarana rumah sakit yang sesuai standar

Sarana dan Prasarana rumah sakit merupakan peralatan yang mendukung pelayanan mendasar perawatan kesehatan yang aman. Persentase sarana dan prasarana rumah sakit di Kota Madiun tahun 2019 hingga 2023 telah memenuhi standar dengan capaian sebesar 100%.

24. Persentase penduduk yang di skrining faktor resiko PTM

Penduduk yang di skrining faktor resiko PTM tahun 2019 sebesar 104,67%. Sementara pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 14,42% menjadi 90,25%. Pada tahun 2021 dan tahun 2022 persentase penduduk yang terkena faktor risiko PTM adalah sebesar 118,4% dan 110,81% dan pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 110,62%.

25. Persentase kelurahan siaga aktif berstrata PURI

Persentase kelurahan siaga aktif berstrata PURI tahun 2019 sebesar 88,89%. Ada penambahan 2 (dua) kelurahan yang berstrata PURI pada tahun 2019. Pada tahun 2022, persentase kelurahan siaga aktif berstrata PURI di Kota Madiun sudah mencapai 23 kelurahan yang turun 1 (satu) kelurahan jika dibandingkan dengan tahun 2019 dengan persentase 85,19% dan 92,59 pada tahun 2023.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

26. Jumlah sarana pelayanan kesehatan yang beroperasi sesuai perundangan

Jumlah sarana pelayanan kesehatan yang beroperasi sesuai perundangan dari tahun 2019 hingga tahun 2021 terus meningkat, yaitu berkisar antara 369 hingga 550 sarana. Semakin meningkatnya sarana pelayanan kesehatan diharapkan semakin banyak masyarakat yang terpenuhi haknya dalam mendapat layanan kesehatan. Namun pada Tahun 2022, jumlah sarana pelayanan kesehatan yang beroperasi sesuai perundangan mengalami penurunan hampir 50% hingga mencapai 252 sarana. Namun pada tahun 2023, sarana pelayanan kesehatan yang beroperasi sesuai perundangan sebesar 161 sarana kesehatan.

27. Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar

Pelayanan kesehatan ibu hamil di Kota Madiun tahun 2019 hingga tahun 2023 telah sesuai standar serta mendapatkan persentase sebesar 100%.

28. Persentase TTU dan TPM sehat

Persentase tempat-tempat umum (TTU) dan tempat pengolahan makanan (TPM) sehat mencapai pada tahun 2019 dan 2020 mengalami peningkatan menjadi 85,61% dan 86,32%. Diharapkan tempat-tempat umum yang sering dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melakukan kegiatan serta tempat pengolahan makanan seperti warung makan, toko penjual makanan, dan lokasi jajanan makanan dapat dilakukan pengawasan lebih lanjut agar persentase mengalami peningkatan. Tahun 2021 persentase tempat-tempat umum (TTU) dan tempat pengolahan makanan (TPM) yang sudah dalam kategori sehat di Kota Madiun sudah mencapai 95,3% TTU dan 95,2% TPM. Dan pada tahun 2022 (TTU) turun menjadi 81% akan tetapi (TPM) meningkat menjadi 96,67%. Pada Tahun 2023 untuk TTU telah menggunakan istilah baru TFU (Tempat Fasilitas Umum) dengan capaian 95,7% begitu pula dengan TPM disebut dengan istilah baru TPP (Tepat Pengelolaan Pangan) dengan capaian 2023 mencapai 89,7%.

29. Angka kematian bayi

Kualitas kesehatan ibu, balita, dan bayi baru lahir salah satunya dapat diukur dengan indikator angka kematian bayi. Pada tahun 2019, angka kematian bayi di Kota Madiun menunjukkan nilai sebesar 6,32, selanjutnya pada tahun 2020 kembali menurun sehingga angka kematian bayi menjadi sebesar 4,32. Angka kematian bayi yang terus menurun akan berpengaruh pada angka keberlangsungan hidup bayi. Adapun angka kematian bayi Kota Madiun pada tahun 2021 mencapai 3,8 dan meningkat menjadi 4,2 pada tahun 2022 dan kembali meningkat pada 2023 menjadi 5,1.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

30. Angka kesehatan orang dengan resiko terinfeksi kusta

Penghitungan angka kesehatan orang dengan risiko terinfeksi Kusta menggunakan angka prevalensi kusta per 10.000 penduduk, di Kota Madiun capaiannya cenderung fluktuatif, akan tetapi pada tahun 2022 merupakan capaian terendah diantara periode tahun 2019-2022 yaitu mencapai 0,1 saja. Namun pada tahun 2023, mengalami peningkatan 0,3 basis menjadi 0,4 risiko orang terinfeksi kusta.

31. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Rumah Sakit Umum Daerah

Hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik pada RSUD Kota Madiun mengalami peningkatan setiap tahunnya mulai 83,39 pada tahun 2021, ini terjadi karena RSUD Kota Madiun dalam penerapan pelayanan melakukan beberapa inovasi untuk menunjang kepuasan masyarakat. Capaian IKM pada tahun 2022 meningkat menjadi 88,94 serta kembali meningkat pada tahun 2023 menjadi 89,56.

32. Capaian SPM RSUD

Capaian standar pelayanan minimal pada RSUD Kota Madiun juga cenderung meningkat seiring meningkatnya capaian IKM pada RSUD Kota Madiun. Capaian SPM tahun tahun 2022 telah mencapai 88,17 dan kembali meningkat pada 2023 menjadi 89,13.

33. Persentase Desa Bebas dari Buang Air Besar Sembarangan/*Open Defecation Free* (ODF)

Pemerintah Kota Madiun telah mencanangkan bebas *Open Defecation Free* pada tahun 2014. Program unggulan untuk mendukung pencapaian *Open Defecation Free* adalah program JAMBANISASI (pembangunan jamban untuk masyarakat tidak mampu). Capaian persentase desa *Open Defecation Free* di Kota Madiun pada saat ini mencapai 100%.

Dalam hal pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana juga menerapkan pelayanan dasar yang menjadi kewenangannya sesuai standar pelayanan minimal (SPM) pada urusan wajib bidang Kesehatan, pada tahun 2023 capaian indikator SPM tersebut sebagaimana tabel di bawah:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Tabel 2. 38 Capaian SPM Bidang Kesehatan Kota Madiun, 2023

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian 2023
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	2.453 orang
2	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	2.347 orang
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	2.256 orang
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	9.099 orang
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	31.582 orang
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	126.836 orang
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	31.360 orang
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah orang penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	42.970 orang
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah orang penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	8.425 orang
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	374 orang
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulusis	Jumlah orang terduga tuberculusis yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	5.763 orang
12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	6.664 orang

Sumber: Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun

Informasi SPM Kesehatan, agar ditambahkan indikator kinerja urusan Kesehatan yang merujuk pada indeks standart pelayanan minimal bidang Kesehatan yaitu:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Tabel 2. 39 Capaian Indikator Urusan Kesehatan Kota Madiun Tahun 2023

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian 2023
1	Pelayanan Rumah Sakit	Presentase Rumah Sakit Terakreditasi	100%
2	Pelayanan Puskesmas	Presentase Puskesmas Tersedia Obat Esensial	100%
		Presentase Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan sesuai standar	100%
3	Pelayanan Kesehatan Obesitas	Prevalensi Obesitas pada penduduk usia >18 tahun	21
4	Pelayanan Kesehatan Penderita Malaria	Jumlah Kecamatan yang mencapai eliminasi malaria	3 Kecamatan
5	Pelayanan Kesehatan Penderita HIV	Presentase orang dengan HIV (ODHIV) baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV	75%
6	Pelayanan Kesehatan Balita	Prevalensi Wasting (Kurus dan Sangat Kurus) pada balita	7%

Sumber: Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun

Data capaian pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan khususnya tujuan pembangunan berkelanjutan 3 (tiga) Kehidupan Sehat dan Sejahtera sebagaimana tabel di bawah:

Tabel 2. 40 Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera Tahun 2023

Kode Indikator (1)	Nama Indikator SDGs (2)	Sumber Data (3)	Satuan (4)	2023	
				Target Pencapaian (5)	Realisasi (6)
`1	2	3	4	5	6
3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.					
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	Dinkes, PP dan KB	%	42,18	0
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya: (a) ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih; (b) di fasilitas kesehatan.	Dinkes, PP dan KB	%	100	100,38
3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.					
3.2.1*	(a) Angka Kematian Balita (AKBa); (b) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Dinkes, PP dan KB	%	9,12	4,2
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	Dinkes, PP dan KB	%	4,56	2,1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

`1	2	3	4	5	6
3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.					
3.3.1*	Jumlah infeksi baru HIV per 1000 penduduk tidak terinfeksi.	Dinkes, PP dan KB	%	0,19	0,896
	Jumlah kasus baru HIV		kasus	34	160
	Presentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan Deteksi Dini HIV sesuai standart		%	100	114,34
3.3.2*	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Dinkes, PP dan KB	%	337,7	Tidak ada data
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	Dinkes, PP dan KB	%	< 1	< 1
3.3.3 (a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.	Dinkes, PP dan KB		1	1
3.3.4*	Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk.	Dinkes, PP dan KB	%	< 2% jumlah bumil diperiksa HbsAg	0,67%
	Jumlah kasus hepatitis B		kasus		
3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (a) Filariasis dan (b) Kusta.	Dinkes, PP dan KB	per 100.000 penduduk	<1	0,45
3.3.5 (a)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta.	Dinkes, PP dan KB	Kecamatan	1	1
3.3.5 (b)	Jumlah kabupaten/kota endemis filariasis yang mencapai eliminasi.	Dinkes, PP dan KB	Kecamatan	1	1
3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.					
3.4.1 (a)	Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun.	Dinkes, PP dan KB	Data tidak tersedia karena memerlukan survei		
3.4.1 (b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	Dinkes, PP dan KB	%	47,7	47,7
	Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Dinkes, PP dan KB	%	100	62,03
3.4.1 (c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	Dinkes, PP dan KB	%	tidak ada	21
3.5 Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.					
3.5.1 (a)	Jumlah penyalahguna napza yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi medis.	Dinkes, PP dan KB	kasus		240
3.5.1 (b)	Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi.	Dinkes, PP dan KB	kasus		240
3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥15 tahun dalam satu tahun terakhir.	——	orang		3
3.6 Pada tahun 2020, mengurangi hingga setengah jumlah kematian global dan cedera dari kecelakaan lalu lintas.					
3.6.1*	Angka kematian akibat cedera fatal kecelakaan lalu lintas.	Polres Madiun Kota	orang	26	29

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

`1	2	3	4	5	6
3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.					
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern.	Dinkes, PP dan KB	%	63	76,27
3.7.2*	Angka kelahiran remaja (umur 10-14 tahun; umur 15-19 tahun) per 1000 perempuan di kelompok umur yang sama.	Dinkes, PP dan KB	%	4,6	7,23
3.7.2 (a)	Total Fertility Rate (TFR).	Dinkes, PP dan KB	%	<2,1	1,93
3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.					
3.8.1*	Cakupan pelayanan kesehatan esensial.	Dinkes, PP dan KB	Tidak ada data		
3.8.1 (a)	Unmet Need Pelayanan Kesehatan	Dinkes, PP dan KB	%	7,5	4,74
3.8.2*	Proporsi populasi dengan pengeluaran rumah tangga yang besar untuk kesehatan sebagai bagian dari total pengeluaran rumah tangga atau pendapatan.	BPS	Tidak ada data		
3.8.2 (a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Dinkes, PP dan KB, BPJS	%	99	100,61
3.9 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah.					
3.9.3*	Angka kematian akibat keracunan.	Dinkes, PP dan KB	%	0	0
3.a Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.					
3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	Dinkes, PP dan KB, BPS			
		Dinkes PP dan KB	Tidak Ada Data		
		BPS	%	Tidak ada data	23,29
3.b Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.					
3.b.1*	Proporsi target populasi yang telah memperoleh vaksin program nasional.	Dinkes, PP dan KB			
	Capaian Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)	Dinkes, PP dan KB	%	94,6	98,34
3.b.2*	Total Official Development Assistant (ODA) untuk penelitian medis dan sektor kesehatan dasar.	Dinkes, PP dan KB	Indikator ini tidak ada		
3.b.3*	Proporsi fasilitas kesehatan dengan paket obat esensial yang tersedia dan terjangkau secara berkelanjutan.	Dinkes, PP dan KB	%	100	100

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

`1	2	3	4	5	6
3.c Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.					
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan	Dinkes, PP dan KB	%	11,5	19,34
3.d Memperkuat kapasitas semua negara, khususnya negara berkembang tentang peringatan dini, pengurangan risiko dan manajemen risiko kesehatan nasional dan global.					
3.d.1*	Regulasi kesehatan internasional dan kesiapsiagaan darurat kesehatan.	Dinkes, PP dan KB	SK	1	1

c. Pelayanan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 dilakukan guna mencapai beberapa sasaran pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar. Adapun perkembangan pencapaian Kinerja Pembangunan Daerah diukur dengan indikator kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 41 Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2019 – 2023

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	CAPAIAN				
		TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
1	2	3	4	5	6	7
II	ASPEK PELAYANAN UMUM					
A	Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar					
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman					
4.1	Rasio rumah layak huni	99,95	99,95	99,66	99,58	99,72
4.2	Rasio pemukiman layak huni	100	100	99,66	99,58	99,72
4.3	Indeks Sarana Prasarana Permukiman	85,69	87,12	89,22	90,55	94,05
4.4	Luasan Kawasan Kumuh yang Tertangani (Ha)	0	12,08	31,98	20,43	0,91

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Madiun

Sebagaimana data yang termuat pada Tabel 2.41 di atas, selanjutnya dapat diuraikan dalam materi sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1. Rasio rumah layak huni

Rasio rumah layak huni merupakan rasio perbandingan antara jumlah rumah layak huni dengan jumlah penduduk. Rasio rumah layak huni di Kota Madiun tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 mengalami perkembangan fluktuatif. Semakin tinggi rasio berarti semakin banyak penduduk yang memiliki rumah layak huni. Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) belum mencapai target karena mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 tidak ada program bantuan RTLH. Hal tersebut disebabkan adanya peraturan baru mengenai Hibah dan Bansos sehingga baru tahun 2018 program bantuan RTLH tersebut dilaksanakan. Adanya usulan-usulan baru mengakibatkan jumlah perkembangan rasio menjadi fluktuatif. Adapun perhitungan Rasio Rumah layak Huni pada tahun 2023 sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah rumah layak huni}}{\text{Jumlah seluruh rumah}} \times 100\% = \frac{44.641}{44.831} \times 100\% = 99{,}58\%$$

2. Rasio pemukiman layak huni

Berdasarkan UU No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, definisi dari Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan pedesaan. Mengacu pada hal diatas tentang lingkungan permukiman kumuh bahwa sampai dengan tahun 2022 sudah tertangani semua sehingga ditingkat kelurahan sudah tidak ada lagi Kawasan Permukiman Kumuh atau dengan kata lain tidak ada lagi permukiman tidak layak huni. Adapun perhitungan Rasio permukiman layak huni sebagai berikut:

$$\frac{\text{Luas permukiman layak huni}}{\text{Luas wilayah permukiman}} \times 100 = \frac{44.641}{44.641} \times 100\% = 99{,}58\%$$

3. Indeks Sarana Prasarana Permukiman

Indeks Sarana Prasarana Permukiman adalah indikator yang menjadi tujuan dari dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, penopang indikator ini adalah Indeks Perumahan Permukiman dan Indeks Pengelolaan PSU, RTH, PJU dan Pemakaman. Untuk menghitung Indeks perumahan terdapat 3 (tiga) indikator kunci yaitu Persentase RTH yang dikelola kondisi baik, persentase penerangan jalan yang dikelola, dan persentase peningkatan fasilitas pemakaman.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Selain itu untuk menghitung indeks pengelolaan PSU, RTH, PJU dan Pemakaman terdapat 3 (tiga) indikator kunci yaitu persentase Rumah Layak Huni, Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi dan Cakupan Lingkungan sehat dan aman yang didukung dengan PSU. Capaian Indeks Sarana Prasarana Permukiman pada Tahun 2022 sebesar 90,55% dan meningkat pada 2023 menjadi 94,05% dengan capaian cakupan lingkungan sehat dan aman yang didukung dengan PSU 100% dengan jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU sebanyak 41 perumahan.

Tabel 2. 42 Data Capaian Indeks Sarana Prasarana Permukiman, 2019-2023

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
1	Indeks Sarana Prasarana Permukiman	85,69	87,12	89,22	90,55	94,05

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Madiun

4. Kawasan Kumuh yang Tertangani

Berdasarkan Keputusan Wali Kota Madiun Nomor: 360-401.206/193/2020 tentang Penetapan Lokasi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Madiun, sebagaimana Keputusan tersebut telah ditentukan terdapat sebesar 64,49 Ha untuk lokasi yang perlu peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Selama tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 sudah terealisasi sebesar 63,58 Ha lokasi yang sudah dilakukan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, sesuai dengan Berita Acara capaian pengurangan luasan kumuh tahun 2022 Kota Madiun Provinsi Jawa Timur dengan rincian Tahun 2020 terealisasi sebesar 12,08 Ha, Tahun 2021 terealisasi sebesar 31,98 Ha dan Tahun 2022 terealisasi sebesar 20,43 Ha.

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Daerah Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada Tahun 2023 sebagaimana tabel berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Tabel 2. 43 Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Madiun Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Realisasi 2023
1	Penyediaan & rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kab/Kota	jumlah unit rumah rusak akibat bencana yang akan direhabilitasi, dibangun kembali, dan/atau direlokasi serta rencana jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan akses rumah darurat layak huni sesuai rencana dalam dokumen Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	100%
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota	jumlah Rumah Tangga terkena relokasi program pemerintah daerah, sesuai dengan jumlah rencana Rumah Tangga dalam rencana pemenuhan	100%

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Madiun

d. Pelayanan Sosial

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan untuk:

1. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
2. memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
3. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial; meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
4. meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan
5. meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Tabel 2. 44 Perkembangan Kinerja Pembangunan Daerah Aspek Pelayanan Umum Fokus Pelayanan Sosial Tahun 2019- 2023

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	CAPAIAN				
		TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
II	ASPEK PELAYANAN UMUM					
A	Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar					
6	Sosial					
6.1	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	16	16	16	16	16
6.2	Jumlah Penerima Bantuan	10.612	49.075	52.260	19.094	26.670
6.3	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan social	10.729	30.295	27.290	33.690	33.716
6.4	Persentase PMKS yang tertangani	100,25%	99,78%	99,66%	99,95%	99,90%
6.5	PMKS yang memperoleh bantuan sosial	10.612	49.075	52.260	19.094	26.670
6.6	Angka Kemiskinan	4,35	4,98	5,09	4,76	4,74
6.7	Indeks Gini	0,35	0,39	0,345	0,398	0,416

Sumber: BPS, Dinas Sosial, PP dan PA Kota Madiun

Sebagaimana data yang termuat pada Tabel 2.44 di atas, selanjutnya dapat diuraikan dalam materi sebagai berikut:

1. Sarana Sosial seperti panti asuhan, panti jompo, dan panti rehabilitasi

Data menunjukkan bahwa di Kota Madiun pada tahun 2019 hingga 2023 terdapat 16 lembaga sarana sosial, terdiri dari 15 Panti Asuhan dan 1 (satu) Panti Jompo yang terdaftar sedangkan yang aktif dan menerima bantuan sosial permakanan sebanyak 8 (delapan) lembaga. Jumlah bantuan sosial untuk Panti Asuhan menyesuaikan dengan jumlah masing-masing anak yang diasuh.

2. Jumlah penerima bantuan

Jumlah penerima bantuan di wilayah Kota Madiun pada tahun 2019 sebesar 10.612 orang. Peningkatan tajam jumlah penerima bantuan terjadi pada tahun 2020. Jumlah penerima bantuan pada tahun 2020 mencapai 49.075. Penyebab kenaikan tersebut adalah terdapat tambahan program bantuan dari pemerintah pada masa pandemi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Masing-masing bantuan sosial mempunyai persyaratan khusus dan memerlukan beberapa tahapan agar dapat menerima bantuan. Kecepatan data daerah belum dapat sepenuhnya diakomodir oleh Pemerintah Pusat. Salah satu permasalahan dalam penyaluran bantuan adalah penerima bantuan sudah meninggal dan tidak dapat dialihkan ke ahli waris. Hal ini terjadi pada penerima Bansos Lansia non potensial. Dan pada tahun 2022 jumlah penerima bantuan telah menurun drastis menjadi 19.094 orang. Namun, setelah adanya penurunan drastis tersebut, pada tahun 2023 kembali mengalami kenaikan menjadi 26.670 penerima bantuan.

3. Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial

Jumlah penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial pada tahun 2019 sebesar 10.729. Tahun 2020 sebesar 30.295, dan meningkat sebesar 33.690 pada tahun 2022. Tujuan dari penanganan tersebut adalah terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Sementara dalam faktanya, masih begitu banyak masyarakat yang belum mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, sehingga berdampak pada upaya untuk mencapai hidup layak. susah. Oleh sebab itu, pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan langkah-langkah rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial bagi para PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial), yang dahulu disebut dengan PMKS.
Penanganan PPKS dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar. Jumlah PPKS di Kota Madiun sebanyak 10.702 orang atau sebesar 5,1% dari total jumlah penduduk. Sebanyak 2.536 orang PPKS atau 1,2 % dari jumlah penduduk, memerlukan penanganan khusus sesuai dengan jenis layanan yang dibutuhkan sedangkan PPKS lainnya (Fakir Miskin) sejumlah 3,9% dari jumlah penduduk memerlukan penanganan berupa bantuan sosial dan pemberdayaan sosial sehingga dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga dan meningkatkan kemampuannya dalam meningkatkan pendapatan keluarga, Jumlah penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial pada tahun 2023 sudah tertangani sebesar 33.716.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

4. PMKS yang tertangani

Pada tahun 2019 capaian penanganan mengalami peningkatan yaitu sebesar 0,20 poin dari tahun sebelumnya. Jumlah totalnya mencapai 10.729 orang atau sebesar 100,3%. Sebaliknya, pada tahun 2020 capaian penanganan mengalami penurunan sebesar 0,20 poin dari tahun sebelumnya menjadi sebesar 99,8%. Hal ini memang sangat mungkin dicapai mengingat penanganan masalah sosial memang tidak bisa dibatasi hanya untuk masyarakat Kota Madiun saja. Terdapat pemerlu pelayanan sosial asal luar kota yang berada di Kota Madiun dan memerlukan penanganan khusus sebanyak 150 orang. Warga luar kota tersebut yang memerlukan pelayanan sosial dengan rincian: 92 orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), 20 orang gelandangan/orang terlantar, 5 orang Pengemis, 9 orang Lansia terlantar, 9 orang Anak jalanan dan 5 orang pemulung. Sedangkan pada tahun 2021, 2022, dan 2023 cakupan PMKS yang tertangani berturut-turut sebesar 99,66%; 99,95%; dan 99,90%.

5. PMKS yang memperoleh bantuan sosial

Data PMKS yang memperoleh bantuan sosial tahun 2023 ditampilkan pada tabel di bawah ini, yaitu:

Tabel 2. 45 Rincian PMKS yang Menerima Bantuan Sosial Tahun 2023

JENIS PMKS	SATUAN	JUMLAH	BANTUAN
Lanjut Usia Terlantar/ Non potensial	orang	216	Tunai
Anak Terlantar	orang	51	Tunai (BLTD, BST, PKH)
Fakir Miskin dengan rincian:	orang		
Fakir Miskin KPM BPNT		8.761	APBN
Fakir Miskin KPM PKH		5.399	APBN
Fakir Miskin KPM BPNTD		4.513	APBD
Jumlah		18.940	

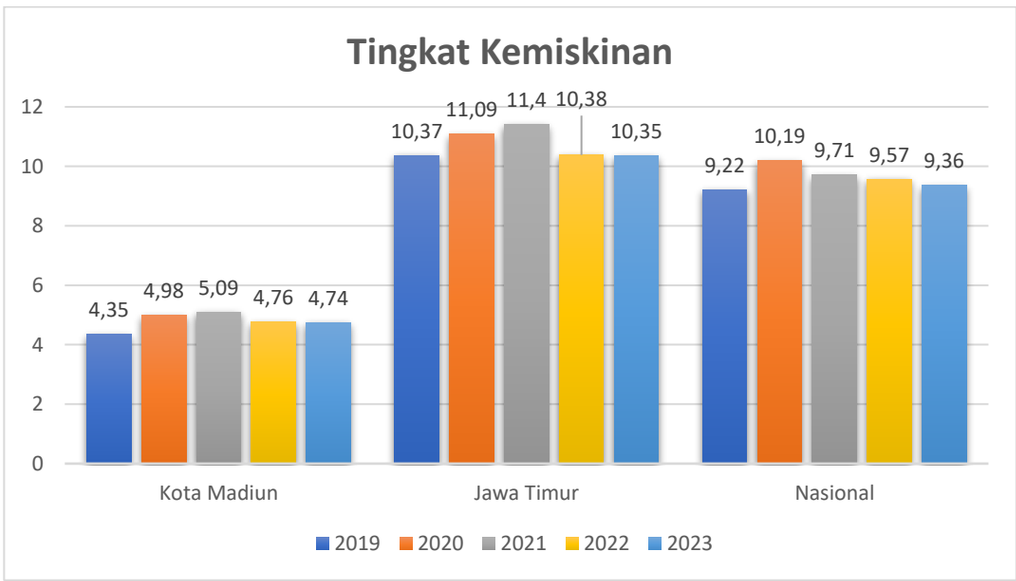
Sumber: Dinas Sosial, PP dan PA Kota Madiun

Sebagaimana termuat pada Tabel 2.45 di atas, pada tahun 2023 jumlah PMKS yang menerima bantuan sosial sebanyak 18.940 orang. Jenis PMKM yang diberi bantuan yaitu lanjut usia terlantar/non potensial berupa bantuan uang tunai sebesar Rp8.212.500,00 per orang. Anak terlantar juga mendapat bantuan berupa permakanan yang mana bantuan tersebut langsung diberikan kepada 14 lembaga kesejahteraan sosial di Kota Madiun dengan total anggaran sebesar Rp1.638.130.000,00. Jumlah penerima bantuan terbanyak yaitu jenis PMKS fakir miskin dengan jumlah 16.645 orang, bantuan yang diterima berasal dari APBN sebanyak 13.752 orang dan dari APBD sebanyak 2.893 orang.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

6. Angka Kemiskinan

Kemiskinan merupakan ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur menurut garis kemiskinan (makanan & bukan makanan). Sesuai data BPS angka kemiskinan Kota Madiun tahun 2021 sebesar 5,09% atau sekitar 9.060 penduduknya berada dibawah garis kemiskinan (Rp514.409,00/jiwa/bln). Tahun 2023 angka kemiskinan kota madiun mengalami penurunan sebesar 0,35 poin atau berada pada 4,74% atau sebanyak 8.490 penduduk miskin. Berbagai bantuan sosial baik dari APBN maupun dari APBD dan pemberdayaan sosial yang diterima masyarakat ditujukan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat demi menurunkan angka kemiskinan di Kota Madiun.

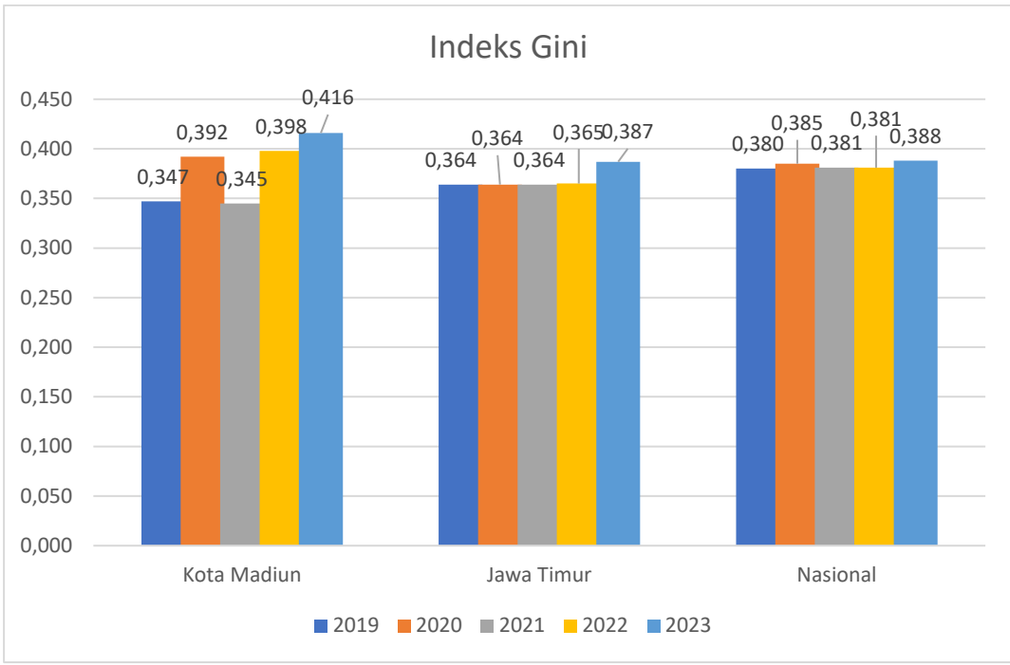


Gambar 2. 20 Perkembangan Angka kemiskinan Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kota Madiun Tahun 2019-2023

7. Indeks Gini

Nilai Gini Ratio atau Indeks Gini menunjukkan kondisi ketimpangan suatu daerah. Indeks Gini berkisar antara 0-1. Semakin tinggi nilai Indeks Gini, semakin tinggi tingkat ketimpangan suatu daerah. Indeks Gini Kota Madiun pada tahun 2019-2021 mengalami fluktuatif tercatat antara angka 0,36 hingga 0,345 dengan demikian termasuk Kota dengan ketimpangan sedang. Indeks Gini Kota Madiun pada tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi sebesar sebesar 0,398 dan pada tahun 2023 juga mengalami kenaikan menjadi 0,416. Nilai tersebut masih dalam batas ketimpangan sedang.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



Gambar 2. 21 Perkembangan Indeks Gini Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kota Madiun Tahun 2019-2023

Perkembangan Indeks Gini di Kota Madiun untuk Tahun 2020 dan 2022 lebih tinggi dari Nasional dan Provinsi Jawa Timur, hanya pada Tahun 2021 dapat menduduki dibawah Nasional dan Provinsi Jawa Timur.

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Daerah Bidang Sosial, yang diampu Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 2. 46 Bidang Sosial Kota Madiun, 2023

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian 2023
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	117
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di luar panti	Jumlah Anak Terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	613
3	Rehabilitasi Sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	251
4	Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara / gelandangan dan Pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	105
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap paska bencana bagi korban bencana Kab/Kota	Jumlah Warga Negara Korban Bencana Kab/Kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	58

Sumber: Dinas Sosial, PP dan PA Kota Madiun

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

e. Pelayanan Tenaga Kerja

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenagakerjaan di Kota Madiun berorientasi untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berdaya saing, berbasis potensi lokal dan pemberdayaan masyarakat. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenagakerjaan tersebut bertujuan untuk penanganan pengangguran dan kemiskinan berbasis pengembangan ekonomi untuk mencapai sasaran menurunnya jumlah pengangguran dan kemiskinan. Pengukuran capaian indikator kinerja pembangunan daerah serta perkembangannya pada aspek tenaga kerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 47 Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Bidang Urusan Tenaga Kerja Tahun 2019 -2023

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	CAPAIAN				
		TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
II	ASPEK PELAYANAN UMUM					
B	Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar					
7	Tenaga Kerja					
7.1	Angka sengketa pengusaha pekerja per tahun	100	100	18	13	14
7.2	Tingkat partisipasi angkatan kerja	66.86%	68,63%	66,87%	66,85%	69,29%
7.3	Pencari kerja yang ditempatkan	85,52	73,04	79,15	91,76	92,43%
7.4	Tingkat pengangguran terbuka	4.01%	8,32%	8,15%	6,39%	5,85%
7.5	Keselamatan dan perlindungan	15.976	23.294	25.218	25.505	28.150
7.6	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	100	100	0	0	0

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kota Madiun

Sebagaimana data yang termuat pada Tabel 2.47 di atas, selanjutnya dapat diuraikan dalam materi sebagai berikut:

1. Angka sengketa pengusaha pekerja per tahun

Indikator ini menunjukkan capaian kinerja penyelesaian sengketa antara pekerja atau buruh dan pengusaha. Dalam era industrialisasi, permasalahan sengketa pekerja dan pengusaha menjadi sebuah isu yang kompleks, sehingga diperlukan institusi dan mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat dan adil. Hubungan Industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan perlu diwujudkan secara optimal sesuai dengan nilai- nilai Pancasila. Pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Tenaga Kerja terus memperkuat peranan mediator hubungan industrial.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Kuatnya peranan mediator dari pemerintah dapat mencegah, meredam dan mempercepat penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara pekerja atau buruh dan pengusaha. Mediator hubungan industrial berperan sebagai ujung tombak dalam membina dan mengembangkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan yang ditandai ketenangan bekerja para pekerja atau buruh dan stabilitas dunia usaha. Dengan peran mediator tersebut, di Kota Madiun perselisihan antara pekerja atau buruh dengan pengusaha dengan jumlah pengaduan sengketa pekerja atau buruh dengan pengusaha di tahun 2019-2020 yang terdaftar pengaduan dan dapat terselesaikan dengan capaian kinerja 100% Penyelesaian pengaduan ini dapat diselesaikan melalui cara mediasi dan perjanjian bersama.

Untuk perbandingan realisasi angka sengketa pengusaha pekerja antara tahun 2019-2020 mengalami kesamaan yaitu 100%. Namun jumlah kasus yang diselesaikan setiap tahun berbeda, pada tahun 2021 dan tahun 2022 terjadi penurunan yang signifikan terhadap angka sengketa pengusaha pekerja per tahun. Dilihat dari data yang ada ternyata angka sengketa hanya mencapai 18% pada tahun 2022 dan 13% pada tahun 2021 dan14% pada tahun 2023 Dengan kata lain penurunan angka sengketa ini dapat sukses dilaksanakan saat terjadi implementasi Hubungan Industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan di suatu perusahaan. Namun pada tahun 2023, terdapat kenaikan.

2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah salah satu indikator ketenagakerjaan yang merupakan perbandingan antara jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. TPAK mengukur besarnya partisipasi angkatan kerja dalam dunia kerja. TPAK dapat digunakan sebagai indikator tingkat kesulitan angkatan kerja untuk mendapatkan pekerjaan.

Angka TPAK yang rendah menunjukkan kecilnya kesempatan kerja yang tersedia bagi penduduk usia kerja. Sebaliknya, angka TPAK yang tinggi menunjukkan besarnya kesempatan kerja yang tersedia. TPAK tahun 2019 sebesar 66,86%. Pada tahun 2020 TPAK mengalami peningkatan dari dua tahun sebelumnya menjadi 68,63%.

Pada tahun 2022 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kota Madiun terealisasi sebesar 66,85%. Hal ini menunjukkan dari 100 orang dari penduduk usia kerja (usia 15 tahun ke atas), terdapat angkatan kerja sebanyak 67 orang yang terdiri atas mereka yang bekerja dan pengangguran. Berarti yang sisanya sebanyak 33 orang adalah bukan angkatan kerja yang terdiri atas usia sekolah, mengurus rumah tangga dan kegiatan lainnya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Perkembangan TPAK di Kota Madiun dalam kurung waktu tahun 2019-2023 mengalami perkembangan fluktuatif naik. Hal ini dikarenakan tersedianya lowongan pekerjaan dan pencari kerja yang telah dilatih melalui pelatihan ketrampilan berbasis kompetensi dan kewirausahaan yang bisa mengembangkan ketrampilan serta menciptakan wirausaha baru.

3. Pencari Kerja yang Ditempatkan

Pencari kerja yang ditempatkan dapat dihitung dengan cara persentase dari jumlah pencari kerja dibandingkan dengan pencari kerja yang terdaftar. Persentase pencari kerja yang ditempatkan tahun 2019 sebesar 13,58 poin menjadi 85,52%. Pada tahun 2020 pencari kerja yang ditempatkan menurun 12,44 poin dan angkanya menjadi sebesar 73,04%. Hal tersebut disebabkan adanya pandemi COVID-19 dan sebagian besar perusahaan atau pemberi kerja tidak melakukan rekruitmen tenaga kerja baru. Pada tahun 2021, jumlah pencari kerja yang ditempatkan adalah sebesar 79,15% dan pada tahun 2023 kembali secara signifikan di posisi lebih dari 90% yaitu 92,43%, hal ini disebabkan pandemi yang sudah dapat penanganan dan teratasi dengan baik sehingga perekonomian perlahan berangsur normal karena perekrutan tenaga kerja baru pada perusahaan.

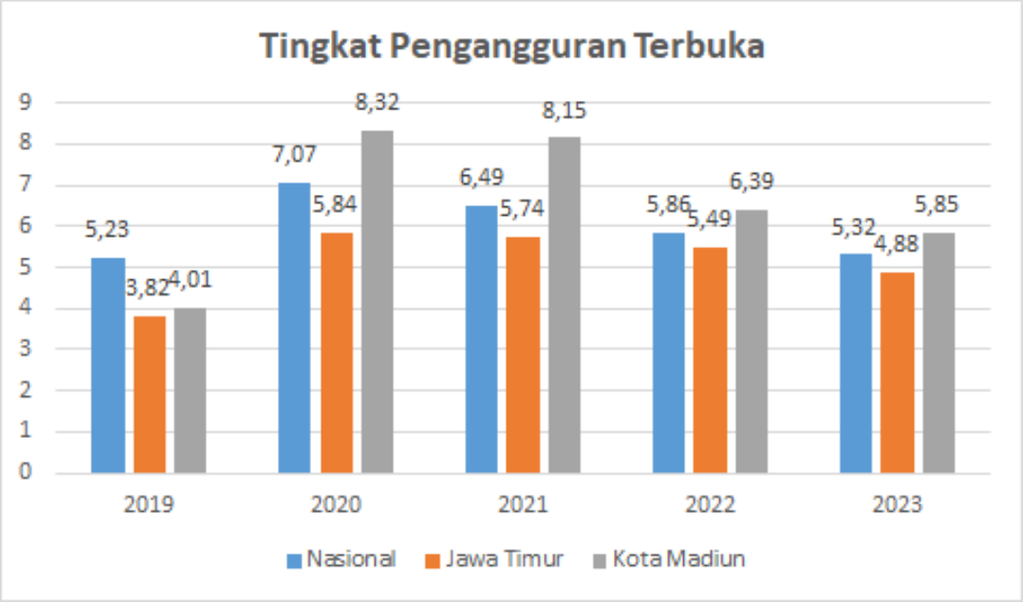
4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pengangguran terbuka atau pengangguran penuh adalah jumlah penduduk usia kerja yang sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan usaha, atau merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, atau sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. TPT merupakan perbandingan antara jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja. Indikator ini berguna sebagai acuan pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru. Selain itu, perkembangannya dapat menunjukkan tingkat keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun. Lebih penting lagi, indikator ini digunakan sebagai bahan evaluasi keberhasilan pembangunan perekonomian, selain angka kemiskinan. TPT Kota Madiun juga merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pengganggguran. TPT pada tahun 2019 berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Madiun adalah sebesar 4,01%. Pada tahun 2020 kembali mengalami peningkatan menjadi 8,32%. Peningkatan TPT tahun 2019 dikarenakan adanya peningkatan jumlah penduduk usia kerja (15 tahun lebih) dan tahun 2020 dikarenakan kondisi pandemi yang berlangsung dan banyak perusahaan yang melakukan pemberhentian kerja.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Pada tahun kedua dan ketiga pandemi Covid-19 di Indonesia. Angka TPT di Kota Madiun mengalami penurunan 0,17 poin di tahun 2021 dan penurunan 1,76 poin di tahun 2022. Data dari BPS untuk TPT Kota Madiun pada tahun 2021 dan 2022 sebesar 8,15% dan 6,39%, penurunan tersebut terus terjadi sampai dengan tahun 2023 yang mencapai 5,85%.

Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka jika dibandingkan dengan Nasional dan Provinsi Jawa Timur, sebelum pandemi covid-19 untuk Kota Madiun berada di Bawah Nasional dan Provinsi Jawa Timur, akan tetapi pada saat dan setelah pandemi covid-19 tingkat pengangguran terbuka terkerek naik menjadi di atas Nasional dan Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2020, Tahun 2021 dan Tahun 2023.



Gambar 2. 22 Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kota Madiun Tahun 2029-2023

5. Keselamatan dan perlindungan tenaga kerja

Sesuai dengan peraturan perundangan ketenagakerjaan, menyatakan bahwa setiap pekerja atau buruh berhak atas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, begitu juga dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja meletakkan prinsip dasar pelaksanaan keselamatan kerja. Setiap perusahaan wajib menaati peraturan tersebut guna memberikan kenyaman dan keamanan bagi pekerja di lingkungan pekerjaannya. Sedangkan bentuk perlindungan tenaga kerja di Indonesia yang wajib dilaksanakan oleh setiap pengusaha atau perusahaan yang mempekerjakan orang untuk bekerja pada perusahaan tersebut harus sangat diperhatikan, yaitu mengenai pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan dimaksud diselenggarakan dalam bentuk jaminan sosial tenaga kerja yang bersifat umum untuk dilaksanakan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Kota Madiun selama tahun 2019 hingga tahun 2022 menunjukkan jumlah pekerja yang telah menerima jaminan sosial tenaga kerja. Jumlah penerima jaminan sosial tenaga kerja mengalami kenaikan mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2022. Pada tahun 2019 jumlah pekerja yang menerima jaminan sosial tenaga kerja sebesar 15.976, tahun 2020 terdapat kenaikan sebanyak 7.318 pekerja yang menerima jaminan sosial tenaga kerja sehingga jumlahnya menjadi 23.294 pekerja, tahun 2022 jumlah penerima jaminan sosial tenaga kerja di Kota Madiun sudah mencapai 25.506 pekerja. Tahun 2023 terdapat kenaikan yang cukup signifikan sebesar 2.644 pekerja yang menerima jaminan sosial tenaga kerja sehingga jumlah penerima menjadi 28.150 pekerja.

6. Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah

Reformasi telah membukakan pemikiran bagi terjadinya perubahan menuju penyelenggaraan Negara yang lebih demokratis, transparan dan memiliki akuntabilitas tinggi serta terwujudnya *good governance*. Perubahan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28 E ayat (3), Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP/16/MEN/2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh, merupakan dasar hukum dalam melaksanakan Organisasi Serikat Pekerja (SP). Dalam konteks Ketenagakerjaan kita menerapkan sistem Hubungan Industrial Pancasila, yang harus dipahami secara mendalam substansi dan implikasinya oleh Pekerja dan Pengusaha.

Pekerja atau buruh, pengusaha dan pemerintah bersama sama menegakkan dan mematuhi undang-undang ketenagakerjaan dengan mengadakan kesepakatan bersama untuk menyelesaikan segala perselisihan yang terjadi dengan berdasarkan perjanjian kerja dan perjanjian bersama (PB). Meskipun sudah adanya PB yang disepakati antara pekerja atau buruh, pengusaha dan pemerintah, namun masih terdapat sengketa antara pekerja atau buruh dan pengusaha. Untuk Kota Madiun jumlah pengaduan sengketa pekerja atau buruh dengan pengusaha di tahun 2019-2020 yang terdaftar dapat terselesaikan semua. Pada tahun 2021 dan 2022, permasalahan perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah ternyata tidak terdapat permasalahan berarti. Hal itu terjadi mengingat penyelesaian masalah yang berjumlah 0, dalam arti lain tidak ada permasalahan mengenai perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah Kota Madiun yang terjadi pada tahun 2021-2023.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

f. Pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mengembangkan nilai-nilai sosial dalam kebijakan publik yang konstruktif dan dinamis sebagai dasar menuju harmonisasi pembangunan untuk mencapai tujuan mengembangkan pengarusutamaan gender dengan sasaran meningkatkannya peran serta perempuan dalam pembangunan dan meningkatnya perlindungan hak-hak anak dan perempuan. Perkembangan pencapaian kinerja sasaran yang diukur dengan indikator kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 48 Perkembangan Kinerja Pembangunan Daerah Bidang PPPA di Kota Madiun Tahun 2019 - 2023

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	CAPAIAN				
		TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
II	ASPEK PELAYANAN UMUM					
B	Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar					
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
8.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan	12,78	12,72	7,83	13,47	11,73
8.2	Rasio kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)	0,017	0,016	0,032	0,00023	0,000204
8.3	Persentase Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	100	100	100	100	100
8.4	Indeks Pemberdayaan Gender	77,07	77,18	76,75	78,03	78,94
8.5	Indeks pembangunan Gender	94,05	94,38	94,42	94,57	95,18

Sumber: BPS, Dinas Sosial, PP dan PA Kota Madiun

Sebagaimana data yang termuat pada Tabel 2.48 di atas, selanjutnya dapat diuraikan dalam materi sebagai berikut:

1. Jumlah persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah

Jumlah realisasi partisipasi perempuan di lembaga pemerintah tahun 2019 hingga tahun 2021 mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Untuk realisasi tahun 2019 sebesar 12,78%, tahun 2020 sebesar 12,72%, dan tahun 2021 sebesar 7,83%. Beberapa alasan yang menyebabkan penurunan adalah pensiun, mutasi, ataupun meninggal dunia. Adapun pada tahun 2022 jumlah realisasi partisipasi perempuan di lembaga pemerintah secara signifikan naik menjadi sebesar 13,47%, hal ini dikarenakan terdapat mutasi masuk dan pengangkatan ASN. Namun, pada tahun 2023, mengalami penurunan menjadi 11,73%.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

2. Rasio kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

Rasio kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan perbandingan jumlah KDRT dengan jumlah rumah tangga. Realisasi tahun 2019 sebesar 0,017. Pada tahun 2020 mengalami penurunan lebih kecil sehingga menjadi 0,016. Rasio KDRT menggambarkan jika semakin tinggi rasio maka kesadaran kaum perempuan untuk melapor apabila terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Adapun pada tahun 2021 jumlah KDRT di Kota Madiun mencapai 0,032 dan pada tahun 2022 turun signifikan menjadi 0,00023 dan pada tahun 2023 mengalami sedikit kenaikan menjadi 0,000204, hal ini dikarenakan edukasi dan pendampingan di dalam keluarga telah berhasil dilakukan lewat kegiatan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

3. Jumlah persentase penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan

Semua laporan pengaduan yang masuk di Pusat Pelayanan Terpadu tidak kekerasan terhadap perempuan dan anak tahun 2019 hingga tahun 2023 didata dan tertangani semuanya, sehingga capaiannya 100%.

4. Jumlah Indek Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indikator yang menunjukkan apakan perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. Nilai IDG Kota Madiun tahun pada tahun 2019 adalah 77,07. Fluktuatif capaian terjadi tahun 2019 sampai dengan 2022. Hal ini mengindikasikan bahwa peranan perempuan dalam pengambilan keputusan di Kota Madiun diukur melalui Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menunjukkan perkembangan yang semakin baik dengan nilai pada tahun 2022 sebesar 78,03.

5. Jumlah Indek Pembangunan Gender (IPG)

Nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Madiun tercatat mengalami peningkatan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022. Pada tahun 2019 nilai IPG sebesar 94,05. Nilai IPG tahun 2020 sebesar 94,38 dan tahun 2021 sebesar 94,42. Hal ini mengindikasikan bahwa ketimpangan antara penduduk laki-laki dan perempuan semakin mengecil, dibuktikan dengan data di lapangan yang di dapat oleh BPS bahwasannya IPG Kota Madiun sudah mencapai 94,57 pada tahun 2022.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

g. Pelayanan Perhubungan

Untuk mengetahui capaian kinerja meningkatnya kualitas pelayanan transportasi dapat dilihat dari perkembangan indikator kinerja sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 2. 49 Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Bidang Perhubungan di Kota Madiun Tahun 2019 – 2023

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	CAPAIAN TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
II	ASPEK PELAYANAN UMUM					
B	Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar					
14	Perhubungan					
14.1	Persentase Jumlah Pemasangan rambu-rambu	104%	94%	100%	100%	100%
14.2	Persentase Sarana dan Fasilitas LLAJ yang berfungsi Baik	100	90	93	98%	98%
14.3	IKM terhadap pelayanan pelayanan angkutan dan lalu lintas	85,08	85,9	85,903	87,289	87,36
14.4	Presentase Perlengkapan Jalan	64%	67%	84%	100%	100%
14.5	Kinerja Angkutan Umum	44%	35%	40%	70%	70%

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Madiun

Sebagaimana data yang termuat pada Tabel 2.49 di atas, selanjutnya dapat diuraikan dalam materi sebagai berikut:

1. Persentase jumlah pemasangan rambu-rambu

Data menyatakan bahwasannya presentase jumlah pemasangan rambu-rambu di Kota Madiun pada tahun 2019 sudah mencapai 104%. kemudian pada tahun 2020 terjadi penurunan hanya tercapai realisasi 94%, akan tetapi dalam kurun waktu 3 tahun sampai tahun 2023 sudah mencapai 100%. Adapun realisasi 2023 diperoleh dari:

$$Persentase = \frac{Jumlah\ rambu\ yang\ terpasang\ tahun\ 2023}{Jumlah\ Kebutuhan\ Rambu}\ x\ 100\%$$

$$Persentase = \frac{2499}{2499}\ x\ 100\%$$

$$Persentase\ = 100\ \%$$

2. Persentase sarana dan fasilitas LLAJ yang berfungsi baik

Persentase sarana dan fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) yang berfungsi baik pada Tahun 2023 adalah 98% sedangkan target pada tahun 2023 adalah 100%. Lebih detailnya sebagaimana yang ditampilkan pada tabel berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Tabel 2. 50 Persentase Sarana dan Fasilitas LLAJ yang berfungsi Baik di Kota Madiun Tahun 2021 – 2022

No	NAMA	2022			2023		
		JUMLAH TOTAL	JUMLAH BAIK	%	JUMLAH TOTAL	JUMLAH BAIK	%
1	TRAFFIC LIGHT	30	30	100	30	30	100
2	HALTE	12	10	83	12	11	91
3	CCTV	25	25	100	25	25	100
4	WARNING LIGHT	65	65	100	69	69	100
JUMLAH		132	130	98	136	135	98

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Madiun

Adapun perhitungan persentase sarana dan fasilitas LLAJ yang berfungsi baik adalah sebagai berikut:

$$Persentase = \frac{Jumlah\ sarpas\ LLAJ\ tahun\ 2023\ yang\ berfungsi\ baik}{Total\ Sarana\ dan\ Fasilitas\ LLAJ}\ x\ 100\%$$

$$Persentase = \frac{130}{132}\ x\ 100\%$$

$$Persentase = 98\ \%$$

Sebagaimana yang ditampilkan pada tabel 2.50 di atas dapat dilihat bahwa persentase sarana dan fasilitas LLAJ yang yang berfungsi baik selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun demikian untuk persentase capaiannya pada tahun 2022 dan 2023 di angka 98%.

3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan angkutan dan lalu lintas

IKM terhadap pelayanan angkutan dan lalu lintas tahun 2019 mencapai 85,08. Tahun 2020 IKM terhadap layanan angkutan dan lalu lintas mencapai 85,9. Sedangkan pada tahun 2021 IKM masyarakat kembali meningkat walau tidak signifikan dengan angka sebesar 85,903 dan pada terjadi peningkatan sebesar 1,457 poin dengan realisasi 87,360 di tahun 2023.

4. Persentase Perlengkapan Jalan

Setiap jalan yang digunakan untuk Lalu Lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan. Jenis perlengkapan jalan yang wajib tersedia berupa: rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat, fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan dan di luar badan jalan, dan penyelenggaraan perlengkapan jalan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Persentase perlengkapan jalan Kota Madiun sebesar 64%, dan terdapat 67% jalan yang belum dilengkapi beberapa fasilitas perlengkapan jalan pada periode tahun 2019 dan 2020. namun pada tahun 2022-2023, persentase perlengkapan jalan di Kota Madiun sudah mencapai 100%. Hal itu berarti semua jalan sudah dilengkapi beberapa fasilitas perlengkapan jalan.

5. Kinerja Angkutan Umum

Adapun kinerja angkutan umum di Kota Madiun pada Tahun 2019 masih mencapai angka 44% dan justru turun menjadi 35% pada tahun 2020. Capaian tersebut menandakan belum optimalnya penggunaan angkutan umum di Kota Madiun. Masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi, hal tersebut menyebabkan minimnya penggunaan angkutan umum. Selain itu pada tahun 2020 terjadi pandemi Covid-19 yang membuat angkutan umum tidak beroperasi secara penuh. Dampak kebijakan untuk angkutan umum gratis khusus Pendidikan membuat kinerja angkutan umum pada tahun 2021 meningkat menjadi 40%, dan pada tahun 2022 sampai dengan 2023 dapat terealisasi secara signifikan mencapai 70% dikarenakan angkutan umum sudah beroperasi secara penuh.

h. Pelayanan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang persentase Penduduk Berakses Air Minum

Data menunjukkan bahwa pada tahun 2019 hingga 2023, sekitar lebih dari 80% penduduk di Kota Madiun telah memiliki akses air minum atau terus meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2019 sebesar 93,30% penduduk dapat mengakses air minum, terus meningkat menjadi 100% pada Tahun 2023.

Tabel 2. 51 Persentase Penduduk Berakses Air Minum di Kota Madiun, Tahun 2019-2023

Tahun	Penduduk Berakses Air Minum
2019	93,30
2020	96,58
2021	98,14
2022	98,17
2023	100

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Drainase merupakan infrastruktur dasar pelayanan pekerjaan umum dan penataan ruang selain jalan, sistem drainase yang baik akan memperlancar aliran air dan juga mencegah terjadinya penumpukan air di permukaan tanah untuk masuk dalam selokan/saluran air. Persentase draine baik yang ada di Kota Madiun dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 52 Persentase drainase dalam kondisi baik, Tahun 2019-2023

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jaringan Sistem Drainase (Km)	80,03	60,72	72,78	72,78	72,776
Panjang Drainase Tersumbat (Km)	7,23	20,24	14,53	13,80	13,346
Persentase Drainase dalam Kondisi Baik	90,90	90,40	80,03	80,06	80,09

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Daerah Bidang Pekerjaan Umum

Tabel 2. 53 Bidang Pekerjaan Umum Kota Madiun, 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Realisasi 2023
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100 %
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	99,8%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun

i. Pelayanan Pertanahan

Salah satu pelayanan urusan pertanahan adalah fasilitasi terkait tanah yang bersengketa di Kota Madiun, pada kurun waktu tahun 2019 sampai dengan 2023 terdapat beberapa kali mediasi terkait konflik masalah pertanahan yang ada di Kota Madiun.

Tabel 2. 54 Data Layanan Pertanahan, Tahun 2019 - 2023

No	Tahun	Jumlah Layanan	Penyelesaian
1	2019	2 layanan	Mediasi dengan kesepakatan
2	2020	0 layanan	-
3	2021	1 layanan	Mediasi dengan kesepakatan
4	2022	5 layanan	Mediasi dengan kesepakatan
5	2023	5 layanan	Mediasi dengan kesepakatan

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Madiun

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

j. Pelayanan kepemudaan dan olah raga

Perkembangan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga Kota Madiun pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sasarannya berikut:

Tabel 2. 55 Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Bidang Kepemudaan dan Olah Raga di Kota Madiun Tahun 2019- 2023

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	CAPAIAN TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
II	ASPEK PELAYANAN UMUM					
B	Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar					
18	Pemuda dan Olahraga					
18.1	Jumlah organisasi pemuda	6	6	5	5	5
18.2	Jumlah kegiatan kepemudaan	3	1	1	1	1
18.3	Gelanggang/ balai remaja (selain milik swasta)	3	3	3	3	3
18.4	Lapangan olahraga	83	83	83	83	83
18.5	Jumlah Organisasi Olah Raga	28	28	28	28	28
18.6	Jumlah Prestasi di Bidang Pemuda dan Olah Raga Tingkat Nasional	7	3	4	6	8
18.7	Jumlah Prestasi Olah Raga Tingkat Regional dan Nasional	52	79	97	205	212
18.8	Jumlah Peserta Olah Raga	19.266	2.015	2.895	7.835	7.965
18.9	Rasio Kondisi Sarpras Olah Raga yang layak	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Budparpora Kota Madiun

Penjelasan untuk masing-masing indikator tersebut yaitu:

1. Jumlah organisasi pemuda

Jumlah organisasi kepemudaan Kota Madiun tahun 2023 sama dengan tahun 2022 antara lain:

a. Anggota KONI;
b. Anggota Perhimpunan Hotel & Restoran Indonesia;
c. OSIS Tingkat SMP dan SMA Kota Madiun;
d. Gugus Pramuka Tingkat SMP Kota Madiun; dan
e. Anggota Dewan Kesenian.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

2. Jumlah kegiatan kepemudaan

Jumlah kegiatan kepemudaan di Kota Madiun dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 sebanyak 1 (satu) kegiatan yaitu Seleksi, Pembinaan, dan Pengiriman Paskibraka.

3. Gelanggang/ balai remaja

Gelanggang/balai remaja di Kota Madiun tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 berjumlah 3 (tiga) gelanggang/balai remaja. Pada tahun 2023 tidak mengalami penambahan gelanggang/balai remaja yang dikelola pemerintah Kota Madiun, yaitu:

a. Lapangan Sepak bola Stadion Wilis Jl. Mastrip Kota Madiun;
b. GOR Basket Jl. Mastrip Kota Madiun;
c. Gedung Kesenian Jl. Ringin Kota Madiun;
d. Lapangan di setiap kelurahan Kota Madiun.

4. Lapangan olah raga

Jumlah lapangan olahraga yang tersebar di Kota Madiun tahun 2019 hingga tahun 2021 tidak mengalami perubahan, hingga saat ini tahun 2023 masih berjumlah 83 lapangan.

5. Jumlah organisasi olahraga

Tahun 2023 jumlah organisasi olahraga tetap sama dengan kondisi 2 (dua) tahun sebelumnya, yaitu terdapat 28 organisasi olahraga.

Tabel 2. 56 Jumlah Organisasi Olahraga di Kota Madiun Tahun 2023

No	Uraian	Jumlah	No	Uraian	Jumlah
1	Bulu Tangkis	3 Klub	15	Angkat Besi	3 Klub
2	Tenis Lapangan	10 Klub	16	Taekwondo	4 Klub
3	Renang	2 Klub	17	Panjat Tebing	2 Klub
4	Atletik	1 Klub	18	Judo	1 Klub
5	Wushu	1 Klub	19	Senam	4 Klub
6	Pencak Silat	11 Klub	20	Balap sepeda	1 Klub
7	Catur	1 Klub	21	Tinju	1 Klub
8	Tenis Meja	1 Klub	22	Menembak	1 Klub
9	Panahan	1 Klub	23	Karate	2 Klub
10	Basket	2 Klub	24	Sepatu Roda	5 Klub
11	Bola Volly	2 Klub	25	Drumband	42 Klub
12	Sepak Bola	23 Klub	26	Bilyard	5 Klub
13	Sepak Takraw	10 Klub	27	Sepak Bola Futsal	12 Klub
14	Gulat	1 Klub	28	KONI	1 Klub

Sumber: Dinas Budparpora Kota Madiun

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

6. Jumlah Prestasi di Bidang Pemuda dan Olahraga Tingkat Nasional

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga telah memberangkatkan para atlet berprestasi untuk mengikuti berbagai pertandingan di tingkat provinsi, nasional maupun internasional pada tahun 2023. Cabang olahraga yang diberangkatkan diantaranya cabang olahraga Kurasih, Angkat Besi, Panahan, Atletik, Judo, Karate, Memanah, Senam, Jujitsu, Balap sepeda, Taekwondo, Barongsai, Bola Basket, Drumband, UPHIL, Sepaktakraw, Tenis Lapangan dan masih banyak lagi cabang olahraga lainnya.

Adapun perolehan medali untuk beberapa even Tingkat Provinsi, nasional dan Internasional yaitu:

a. 3 Medali Internasional: 2 Medali Kurash, 1 Medali Karate (Thailand dan Turkmenistan);
b. 4 Medali Popda Jatim XIII di Sidoarjo;
c. 5 Medali Peparda Jatim I di Sidoarjo;
d. 52 Medali Porprov VIII Jatim di Mojokerto, Sidoarjo, Jombang;
e. 5 Medali Kejurprov Senam;
f. 7 Medali Kejuaraan Pacitan Memanah IV-2023;
g. 1 Medali Kejurnas Karate;
h. 1 Medali Kejurprov Jawa Timur Cabor Judo;
i. 1 Medali UIN Walisongo Semarang Cup Cabor Karate;
j. 1 Medali Jogja Open Cabang Olahraga Atletik;
k. 20 Medali Kejurprov Jawa Timur Cabang Olahraga Jujitsu;
l. 5 Medali Kejurprov Jawa Timur Cabang Olahraga Tekwondo;
m. 2 Medali Kejurprov Jawa Timur Cabang Olahraga Balap Sepeda;
n. 1 Medali Kejurprov Jawa Timur Cabang Olahraga Tenis Lapangan;
o. 4 Medali Kejurprov Piala Menpora Cabang Olahraga Pencak Silat;
p. 3 Medali Kejuaraan Open Pencak Silat;
q. 3 Medali Kejurprov Jawa Timur Cabang Olahraga Gulat;
r. 2 Medali POPNAS XVI Cabang Olahraga Sepak Takraw;
s. 1 Medali POMPROV Jatim 2023 Cabang Olahraga Sepak Takraw;
t. 1 Medali Kejurnas Tenis Lapangan di Semarang;
u. 9 Medali Kejuaraan Tinju Amatir se-Jawa Timur Piala Bupati Ngawi;
v. 2 Medali Kejuaraan antar Dojo se-Jawa Timur Tahun 2023 Cabor JUJITSU;
w. 9 Medali Kejurda Atletik se-Jawa Timur Tahun 2023;
x. 3 Medali O2SN Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2023;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

y. 1 Medali Kejuaraan UPHIL Kapolres Madiun Kota Tahun 2023;
z. 1 Medali Kejuaraan Barongsai Tradisional Piala Walikota Madiun;
aa. 2 Medali Pencak Silat Malang Championship Tahun 2023;
bb. 1 Medali Pencak Silat Ngawi Championship Tahun 2023;
cc. 10 Medali Cabor Bola Basket (Wilis Basketball Competition Tahun 2023);
dd. 12 Medali Cabor Drumband (Lomba Unjuk Gelar Drumband Parade Senja Kota Madiun Tahun 2023).

7. Jumlah prestasi olahraga tingkat regional dan nasional

Prestasi olahraga untuk tahun 2022 di tingkat nasional dan regional sebanyak 205 prestasi. Tahun 2023 jumlah prestasi mengalami peningkatan yang signifikan menjadi sebanyak 212 prestasi.

8. Rasio kondisi sarpras olahraga yang layak

Rasio kondisi sarpras olahraga yang layak Kota Madiun tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 telah mencapai 100%. Adapun kondisi sarpras olahraga di tahun 2023 juga mencapai 100%.

k. Pelayanan Kebudayaan

Bidang urusan kebudayaan menggambarkan seberapa banyak pelestarian kebudayaan yang dikembangkan dan ditampilkan, hal ini tidak lepas dari peranan group kesenian dalam mementaskan sebuah pertunjukan sehingga menarik minat pemirsa sebagai pengunjung untuk ikut berpartisipasi mengembangkan kebudayaan dan kesenian.

Pada tahun 2023 terdapat beberapa kesenian yang telah ditampilkan diantaranya: Reog, Ketoprak, dalang, wayang orang, teater dan sanggar seni, selain itu terdapat juga Campur sari, Keroncong, Group Hadroh, Group Band, dan Karawitan. Untuk kebudayaan sendiri telah ada beberapa yang dipentaskan diantaranya Panembromo, Mocopat, dan Upacara Adat.

l. Pelayanan Perpustakaan

Bidang urusan perpustakaan, merupakan suatu wadah atau tempat yang di dalamnya terdapat bahan pustaka untuk masyarakat yang disusun menurut sistem tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pendidikan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Indikator keberhasilan pelaksanaan bidang urusan perpustakaan, dapat diukur melalui indikator (i) jumlah perpustakaan; (ii) jumlah koleksi buku perpustakaan; dan (iii) jumlah pengunjung perpustakaan. Layanan perpustakaan menyediakan beberapa layanan seperti akses penggunaan platfotm digital guna mengakses e-book, dasis data, dan jurnal online.

Tabel 2. 57 Data Urusan Perpustakaan di Kota Madiun Tahun 2019-2023

No.	Uraian Data	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah Perpustakaan yang dibina/ didampingi (unit)	37	36	36	217	218
2.	Jumlah Koleksi Buku (eksemplar)	51.986	85.518	88.765	90.674	98.396
3.	Jumlah Pengunjung (orang)	81.284	108.211	56.178	94.986	83.682

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun memberikan penyediaan bantuan taman bacaan yang ada di kelurahan. Jumlah perpustakaan masyarakat yang dibina pada tahun 2023 ada sebanyak 218 unit. Adanya perpanjangan jam pelayanan di Perpustakaan Umum pada hari Sabtu dan Minggu dapat meningkatkan tren jumlah pengunjung mulai dari kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, hingga mencapai 108.211 orang pengunjung di tahun 2020. Akan tetapi jumlah pengunjung kembali landai selama kurun waktu 2 tahun terakhir hingga di tahun 2023 menjadi 83.682, Hal ini dikarenakan untuk kunjungan pada aplikasi perpustakaan *online* berkurang.

m. Pelayanan Pangan

Urusan pemerintahan bidang pangan adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Sasaran urusan tersebut adalah terwujudnya stabilitas ketersediaan pangan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka mendukung tujuan dan sasaran RPJMD tersebut, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun menetapkan tujuan dalam rencana strategis yaitu “memberdayakan masyarakat untuk mewujudkan ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pertanian”, dan menetapkan sasaran strategis meningkatnya ketersediaan pangan dan stabilnya produksi hasil pertanian dan perikanan”.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Dengan demikian, penyelenggaran urusan pemerintahan bidang pangan di Kota Madiun berorientasi untuk “memberdayakan masyarakat untuk mewujudkan ketahanan pangan” dengan sasaran “meningkatnya ketersediaan pangan”. Indikator utama dalam mencapai tujuan memberdayakan masyarakat untuk mewujudkan ketahanan pangan tersebut diukur dengan indikator neraca bahan makanan. Sedangkan indikator kinerja utama dalam mencapai sasaran meningkatnya ketersediaan pangan dihitung menggunakan indikator rasio ketersediaan bahan pangan utama (beras). Sedangkan indikator pelaksanaan program di bidang ketahanan pangan dinilai dengan persentase ketersediaan energi dan protein. Adapun perkembangan indikator kinerja pembangunan daerah urusan pemerintahan bidang pangan dapat dilihat di bawah ini:

Tabel 2. 58 Perkembangan Kinerja Pembangunan Daerah Bidang Pangan Kota Madiun Tahun 2019-2023

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	CAPAIAN				
		2019	2020	2021	2022	2023
II	ASPEK PELAYANAN UMUM					
B	Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar					
9	Pangan					
9.1	Regulasi ketahanan pangan	ada	ada	ada	ada	ada
9.2	ketersediaan pangan utama	154,44	138,56	139	217	152
9.3	Ketersediaan Energi dan Protein	138,63	138,63	126,77	126,77*	132,23

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun

Berdasarkan tabel perkembangan tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Regulasi ketahanan pangan

Adapun regulasi bidang ketahanan pangan yang telah disusun sebagai berikut:

a. Keputusan Walikota Madiun Nomor: 501-401.113/67/2017 tanggal 31 Maret 2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Program Bantuan Pangan Non Tunai dan Program Subsidi Pangan Beras Sejahtera Daerah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah Kota Madiun;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

b. Keputusan Walikota Madiun Nomor: 520-401.113/110/2017 tanggal 9 Mei 2017 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kota Madiun;
c. Keputusan Wali Kota Madiun Nomor: 188-401.113/129/2017 tanggal 26 Mei 2017 tentang Pembentukan Tim Pembina Kegiatan Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman Berbasis Sumber Daya Lokal Kota Madiun;
d. Keputusan Wali Kota Madiun Nomor: 188-401.113/126/2017 tanggal 26 Mei 2017 tentang Tim Pembina Kegiatan Rumah Pangan Lestari Kota Madiun;
e. Keputusan Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kota Madiun Nomor: 188-401.113/01/2017 tanggal 24 November 2017 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kota Madiun.

2. Ketersediaan pangan utama

Berdasarkan perhitungan diperoleh rasio ketersediaan pangan utama yaitu 154,44 kg/kapita/tahun yang diperoleh dari pembagian jumlah ketersediaan beras sebesar 20.061 Ton dengan jumlah penduduk 2019 yaitu 210.147 jiwa. Ketersediaan pangan utama Tahun 2019 masih memenuhi target yang ditetapkan yaitu 46,5 kg/kapita/tahun. ketersediaan pangan utama Tahun 2020 mengalami penurunan sekitar 15,88 poin. Adapun pada tahun 2021 ketersediaan bahan pangan utama di Kota Madiun meningkat sedikit di posisi 139 dan meningkat signifikan di tahun 2022 yang berada pada posisi 217 namun mengalami penurunan pada tahun 2023 sebesar 65 basis poin menjadi 152. Lebih lanjut, rencana Kota Madiun di tahun 2025 yaitu meningkatkan ketersediaan pangan utama yang efektif dan efisien untuk mencapai ketahanan pangan nasional, dengan meningkatkan produksi, menurunkan harga pangan dan meningkatkan akses pangan bergizi sesuai dokumen RAD- PG. Hal ini dilakukan dalam rangka mencapai swasembada pangan utama (beras, jagung, kedelai) pada tahun 2025, meningkatkan produktivitas lahan dan hasil panen secara berkelanjutan, memperkuat infrastruktur logistik dan rantai pasokan pangan, meningkatkan akses petani terhadap pupuk, benih, dan teknologi pertanian dan membangun ketahanan pangan di tingkat komunitas.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Dengan adanya rencana tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan baik dari sisi lingkungan, ekonomi, dan sosial. Dari sisi lingkungan diharapkan dapat meningkatkan ketahanan dan kelestarian ekosistem, mengurangi emisi gas rumah kaca, dan meminimalisir limbah, dari sisi ekonomi diharapkan dapat meningkatkan pendapatan petani, menciptakan lapangan kerja baru, dan mendorong pertumbuhan ekonomi pedesaan, sedangkan dari sisi sosial dapat meningkatkan akses terhadap pangan bergizi, menurunkan angka stunting dan kemiskinan, dan memperkuat ketahanan pangan nasional.

3. Jumlah ketersediaan energi dan protein

Jumlah ketersediaan energi per kapita per hari pada tahun 2019 adalah 3.106 Kkal, sedangkan protein 93,14 gram. Standar kecukupan energi dan protein yang ditetapkan oleh Widyakarya Pangan Nasional Pangan dan Gizi dimana acuan yang digunakan saat ini adalah WNPG X tahun 2012, yaitu AKE (angka kecukupan energi) di tingkat ketersediaan sebesar 2400 kkal/kapita/hari dan AKP (angka kecukupan protein) di tingkat ketersediaan sebesar 63 gram/ kapita/hari.

Jika dibandingkan dengan standar tersebut maka ketersediaan energi per kapita per hari tahun 2019 telah melebihi standar (138,63%). Demikian juga dengan ketersediaan protein per kapita per hari tahun 2019 telah melebihi standar (147,84%).

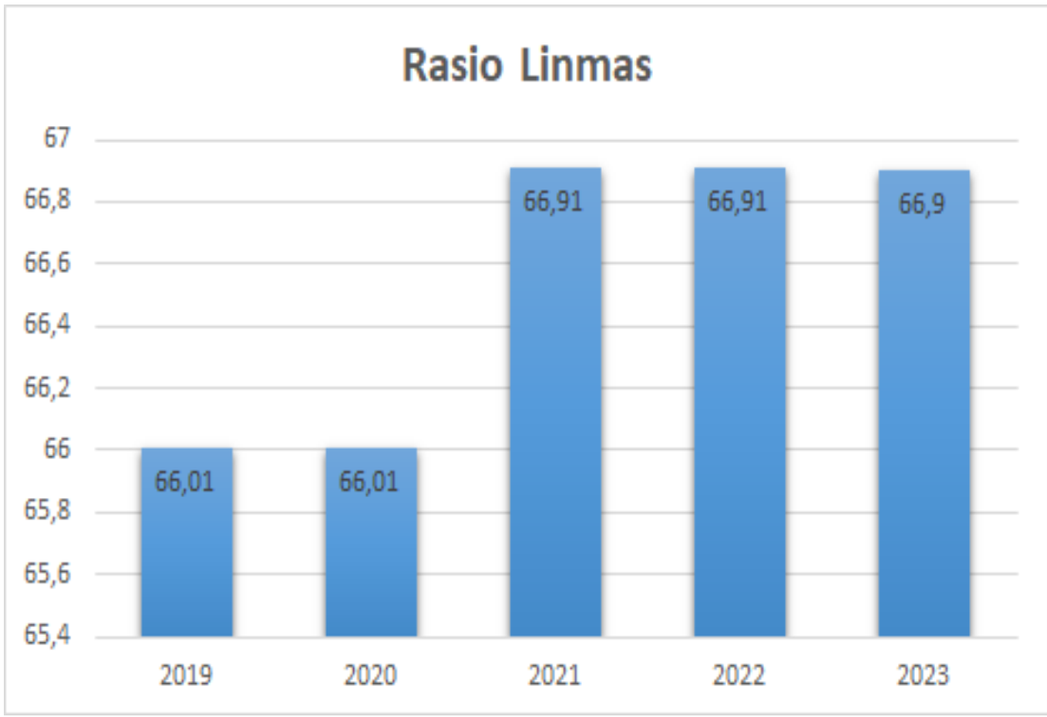
Ketersediaan energi dan protein per kapita per hari untuk tahun 2019 dan tahun 2020 sama yaitu 183,63. Sedangkan untuk tahun 2021 adalah sebesar 126,77% dan tahun 2022-2023 mengalami peningkatan menjadi 132,23%.

n. Pelayanan Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan salah satu urusan wajib pelayanan dasar yang diamanatkan dalam undang-undang, Cakupan petugas satuan polisi pamong praja dan pelindung masyarakat sangat berpengaruh dalam terciptanya suasana tertib dan tentram dalam masyarakat.

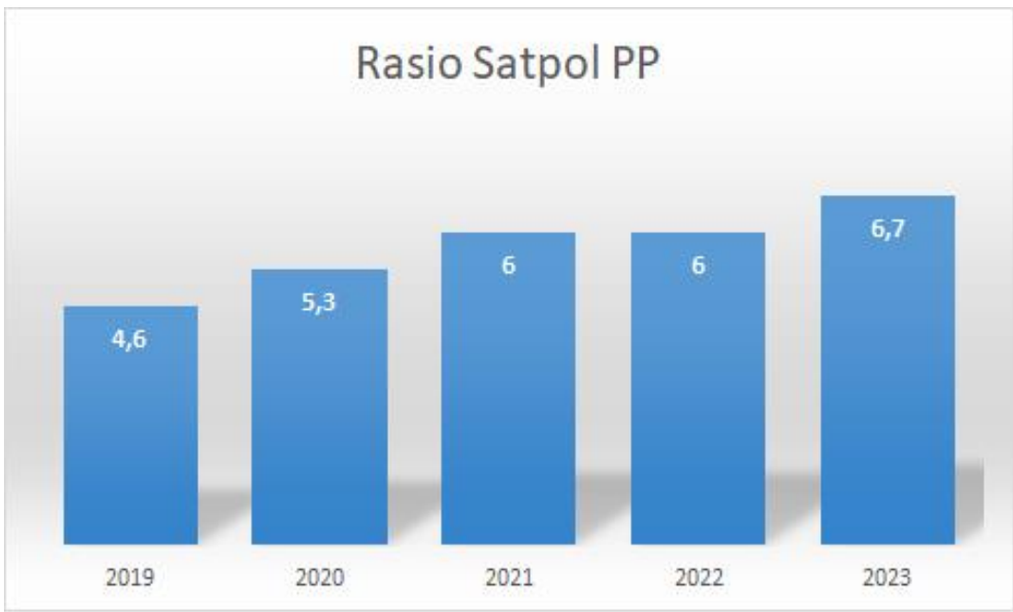
Pemerintah Kota Madiun akan memperkecil rasio petugas dan jumlah penduduk dengan mengagendakan perekrutan petugas Satuan Polisi Polisi Pamong Praja (Satpol PP) per kelurahan. Untuk mengetahui besar cakupan petugas tahun 2023 Satpol PP dan Linmas dengan jumlah penduduk dapat dilihat pada gambar 2.22 dan 2.23 di bawah ini:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun

Gambar 2. 23 Rasio Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk di Kota Madiun Tahun 2019-2023



Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun

Gambar 2. 24 Rasio Petugas Pol PP per 10.000 Penduduk di Kota Madiun Tahun 2019-2023

Sebagaimana yang ditampilkan pada Gambar 2.23 dan Gambar 2.24 di atas, rasio petugas Satpol PP per 10.000 penduduk selama tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 mengalami peningkatan. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2019 ke tahun 2020 yakni meningkat dari 4,6 menjadi 5,3. Adapun pada tahun 2021 hingga 2023, angka rasio petugas Pol PP di Kota Madiun di angka 6 (enam).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Selain itu Satuan Polisi Pamong Praja juga mengampu penanganan kejadian kebakaran, pelayanan penanganan kebakaran ditunjukkan dengan persentase kejadian kebakaran yang ditangani dalam waktu tanggap yang dicapai petugas pemadam kebakaran pada satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran di kisaran waktu 15 menit untuk realisasi capaian setiap tahunnya.

Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat juga mencakup pelayanan kebencanaan, yang menjadi kewenangan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Intensitas Bencana yang ditangani Badan Penanggulangan Bencana Daerah selama kurun waktu Tahun 2019 sampai dengan 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 59 Intensitas Bencana di Kota Madiun, 2019-2023

No.	Jenis Bencana	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Banjir	23	17	5	5	15
2.	Angin Puting Beliung	66	33	27	57	77
3.	Kebakaran	36	29	14	20	70

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Capaian standar pelayanan minimal bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah selama tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 60 Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kota Madiun, Tahun 2023

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Realisasi 2023
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada	100%
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%
3	Pelayanan pencehan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

o. Pelayanan Perizinan

Pada saat ini pengurusan perizinan sudah sangat efektif. Rata-rata lama mengurus perizinan di Kota Madiun membutuhkan proses selama 5 (lima) hari kerja. Jumlah persyaratan yang harus dilengkapi jumlahnya berbeda-beda sesuai perizinan yang akan diurus. Hal ini dapat dilihat sesuai tabel di bawah terkecuali untuk perizinan yang melibatkan beberapa rekomendasi dari berbagai instansi dikarenakan harus ada survei lapangan.

Tabel 2. 61 Lama Proses Perizinan di Kota Madiun, 2023

NO	Uraian	Lama Mengurus Izin	Jumlah Persyaratan (dokumen)	Biaya Retribusi (Rp,00)
1	2	3	4	5
A	Pelayanan Perizinan Non Berusaha			
1	Izin Pemakaian Kekayaan Daerah Bahu Badan Jalan	5 (Lima)	3 (Tiga)	Tidak Ada
2	Izin Pemakaian Kekayaan Daerah Penurunan Trotoar	5 (Lima)	4 (Empat)	Tidak Ada
3	Izin Pemakaian Kekayaan Daerah Gedung dan/atau Lapangan	5 (Lima)	3 (Tiga)	Tidak Ada
4	Izin Pemakaian Kekayaan Daerah Tanah dan/atau Bangunan	5 (Lima)	4 (Empat)	Tidak Ada
5	Izin Pemakaian Kekayaan Daerah Lahan Parkir	5 (Lima)	5 (Lima)	Tidak Ada
6	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) non Berusaha	5 (Lima)	9 (Sembilan)	Tidak Ada
7	Izin Penempatan Bangunan Reklame	5 (Lima)	13 (Tiga Belas)	Tidak Ada
8	Izin Reklame Insidentil	5 (Lima)	5 (Lima)	Tidak Ada
9	Izin Reklame Permanen	5 (Lima)	9 (Sembilan)	Tidak Ada
10	Izin Praktik Psikolog Klinis	5 (Lima)	8 (Delapan)	Tidak Ada
11	Izin Praktik Perawat	5 (Lima)	6 (Enam)	Tidak Ada
12	Izin Praktik Bidan	5 (Lima)	7 (Tujuh)	Tidak Ada
13	Izin Praktik Tenaga Gizi	5 (Lima)	6 (Enam)	Tidak Ada

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2	3	4	5
14	Izin Kerja Tenaga Gizi	5 (Lima)	6 (Enam)	Tidak Ada
15	Izin Praktik Apoteker	5 (Lima)	9 (Sembilan)	Tidak Ada
16	Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian	5 (Lima)	6 (Enam)	Tidak Ada
17	Izin Praktik Fisioterapis	5 (Lima)	6 (Enam)	Tidak Ada
18	Izin Kerja Fisioterapis	5 (Lima)	6 (Enam)	Tidak Ada
19	Izin Praktik Okupasi Terapis	5 (Lima)	6 (Enam)	Tidak Ada
20	Izin Kerja Okupasi Terapis	5 (Lima)	6 (Enam)	Tidak Ada
21	Izin Praktik Terapis Wicara	5 (Lima)	6 (Enam)	Tidak Ada
22	Izin Kerja Terapis Wicara	5 (Lima)	6 (Enam)	Tidak Ada
23	Izin Praktik Akupuntur Terapis	5 (Lima)	6 (Enam)	Tidak Ada
24	Izin Kerja Tenaga Sanitarian	5 (Lima)	6 (Enam)	Tidak Ada
25	Izin Kerja Perekam Medis	5 (Lima)	6 (Enam)	Tidak Ada
26	Izin Praktik Teknisi Kardiovaskuler	5 (Lima)	6 (Enam)	Tidak Ada
27	Izin Kerja Refraksionis Optisien	5 (Lima)	6 (Enam)	Tidak Ada
28	Izin Kerja Optometris	5 (Lima)	6 (Enam)	Tidak Ada
29	Izin Kerja Teknisi Gigi	5 (Lima)	6 (Enam)	Tidak Ada
30	Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut	5 (Lima)	6 (Enam)	Tidak Ada
31	Izin Praktik Penata Anestesi	5 (Lima)	6 (Enam)	Tidak Ada
32	Izin Kerja Radiografer	5 (Lima)	6 (Enam)	Tidak Ada
33	Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik	5 (Lima)	6 (Enam)	Tidak Ada
34	Izin Praktik Fisikawan Medis	5 (Lima)	6 (Enam)	Tidak Ada
35	Izin Praktik Ortotis Prostetis	5 (Lima)	6 (Enam)	Tidak Ada
36	Izin Praktik Elektromedis	5 (Lima)	6 (Enam)	Tidak Ada
37	Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Interkontinental;	5 (Lima)	7 (Tujuh)	Tidak Ada
38	Izin Praktik Teknisi Pelayanan Darah	5 (Lima)	6 (Enam)	Tidak Ada
39	Izin Tukang Gigi	5 (Lima)	4 (Empat)	Tidak Ada

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2	3	4	5
40	Izin Praktik Dokter Hewan/Dokter Hewan Spesialis	5 (Lima)	7 (Tujuh)	Tidak Ada
41	Izin Penempatan Pedagang Pasar;	5 (Lima)	7 (Tujuh)	Tidak Ada
42	Izin Promosi dalam Pasar;	5 (Lima)	5 (Lima)	Tidak Ada
43	Izin Reklame dalam Pasar;	5 (Lima)	4 (Empat)	Tidak Ada
44	Izin Pengelolaan Parkir Pasar;	5 (Lima)	3 (Tiga)	Tidak Ada
45	Izin Pengelolaan Kamar Mandi/ WC Pasar;	5 (Lima)	3 (Tiga)	Tidak Ada
46	Persetujuan Bangunan dan Gedung (PBG);			
	-Fungsi Hunian	5 (Lima)	2 (Dua)	L x Indeks Lokalitas x SHST x Indeks terintegrasi x Indeks Bangunan Gedung Terbangun
	-Fungsi Usaha	5 (Lima)	2 (Dua)	L x Indeks Lokalitas x SHST x Indeks terintegrasi x Indeks Bangunan Gedung Terbangun
	-Fungsi Sosbud	5 (Lima)	2 (Dua)	L x Indeks Lokalitas x SHST x Indeks terintegrasi x Indeks Bangunan Gedung Terbangun
	-Fungsi Keagamaan	5 (Lima)	2 (Dua)	L x Indeks Lokalitas x SHST x Indeks terintegrasi x Indeks Bangunan Gedung Terbangun
	-Fungsi Campuran	5 (Lima)	2 (Dua)	L x Indeks Lokalitas x SHST x Indeks terintegrasi x Indeks Bangunan Gedung Terbangun
47	Pencabutan Surat Izin Tenaga Kesehatan	5 (Lima)	4 (Empat)	Tidak Ada

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2	3	4	5
48	Konsultasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);	1 (Satu)	30 menit	Tidak Ada
49	Pengaduan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha;	30 menit - Max 3 Hari	Konsultasi dan Pengaduan Secara Langsung/Tatap muka: 2 (Dua) Konsultasi dan Pengaduan Secara *Online*: 3 (Tiga)	Tidak Ada
B	Pelayanan Perizinan Berusaha			
1	Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Dasar;	5 (Lima)	9 (Sembilan)	Tidak Ada
2	Izin Penyelenggaraan PAUD dan Pendidikan NonFormal;	5 (Lima)	9 (Sembilan)	Tidak Ada
3	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang menjadi Kewenangan DPMPTSP Kota Madiun;	Sesuai *Service Level Agreement* pada sistem OSS berdasarkan sektor	UMK Perorangan: 3 (Tiga) UMK Badan Usaha: 6 (Enam) Non UMK: 6 (Enam)	Tidak Ada

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

p. Pelayanan Perindustrian

Jika dilihat dari jumlah industri yang tercatat dan tenaga kerjanya menurut kecamatan di Kota Madiun tahun 2022, kecamatan yang memiliki jumlah industri terbanyak adalah Kecamatan Taman yaitu 11 industri yang hanya dapat menyerap tenaga kerja sebesar 238 orang. Namun kecamatan Manguharjo dengan jumlah industri hanya sebanyak 9 industri mampu menyerap jumlah tenaga kerja yang sangat besar yaitu sebanyak 4782 orang, yang juga merupakan penyerapan tenaga kerja terbanyak dibanding kecamatan lain.

Tabel 2. 62 Jumlah Industri yang Tercatat dan Tenaga Kerjanya Menurut Kecamatan di Kota Madiun, Tahun 2019 – 2023

No.	Kecamatan	Industri Besar Sedang					Tenaga Kerja				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	Manguharjo	5	5	6	9	12	1874	1874	2818	4782	4819
2	Taman	10	9	10	11	13	345	325	412	238	271
3	Kartoharjo	7	7	7	7	8	294	294	311	369	371
Jumlah		22	21	23	27	33	2513	2493	3541	5389	5461

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

q. Pelayanan Perdagangan

Orientasi pembangunan pada penyelenggaraan urusan perdagangan di Kota Madiun adalah untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berdaya saing, berbasis potensi lokal dan pemberdayaan masyarakat, yang diarahkan untuk mencapai tujuan meningkatkan kapasitas pasar, Jumlah pasar umum di Kota Madiun tahun 2023 terdapat 9 unit, pasar khusus 2unit dan pasar desa 6 unit dengan jumlah pedagang tetap sebanyak 3.524 pedagang.

Tabel 2. 63 Sarana Perdagangan dan Jumlah Pedagang di Kota Madiun, Tahun 2019-2023

No.	Sarana Perdagangan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Pasar Umum	9	9	9	9	9
2.	Pasar Khusus	3	2	2	2	2
3.	Pasar Desa	6	6	6	6	6
4.	Pedagang Tetap	3.485	3.555	3.143	3.320	3.524

Sumber: Dinas Perdagangan Kota Madiun

r. Pelayanan Kepariwisataan

Pelayanan kepariwisataan di Kota Madiun dilakukan dengan mendata dan membina destinasi pariwisata untuk dikembangkan serta mendata dan membina pelaku ekonomi kreatif, perkembangan data jumlah destinasi pariwisata yang dibina sebagaimana tabel di bawah:

Tabel 2. 64 Data Jumlah Destinasi Pariwisata yang dibina, 2023

No	Destinasi Pariwisata	Tahun
		2023
1	Lapak/ODTW	35 tempat
2	THM/Karaoke	21 tempat
3	Cafe	66 tempat
4	Rumah Makan	68 tempat
5	Restoran	68 tempat
6	Hotel	36 tempat

Sumber: Dinas Budparpora Kota Madiun

Sedangkan data jumlah pelaku ekonomi kreatif di Kota Madiun sebagaimana tabel di bawah:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Tabel 2. 65 Pelaku Ekonomi Kreatif, 2023

No	Pelaku Ekonomi Kreatif	Tahun
		2023
1	Seni Pertunjukan	25 Seni
2	Fesyen	28 pelaku
3	Kriya (kerajinan tangan)	12 pelaku
4	Kuliner	66 pelaku
5	Fotografi	15 pelaku
6	Musik	8 prlaku
7	Periklanan	1 pelaku
8	Seni Rupa	1 pelaku
9	Film Animasi	1 pelaku

Sumber: Dinas Budparpora Kota Madiun

Serta kontribusi pariwisata terhadap PDRB dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah:

Tabel 2. 66 Kontribusi pada PDRB, 2023

Uraian Data	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB	8,86	-7,98	3,21	9,96	6,93

Sumber: Dinas Budparpora Kota Madiun

s. Pelayanan Kepegawaian

Fungsi pelayanan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan berperan penting untuk mengatasi permasalahan seperti kurangnya kesesuaian penempatan dan promosi jabatan, dan dinamika kinerja ASN. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 7 Tahun 2022, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi penunjang kepegawaian dan fungsi penunjang pendidikan dan pelatihan. Indikator kinerja persentase penempatan ASN sesuai dengan kompetensinya serta Indeks Profesionalitas ASN dipergunakan untuk mengukur keberhasilan dari kegiatan pembinaan kepegawaian yang ada di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Madiun. Capaian indek profesionalitas asn dan persentase penempatan ASN sesuai dengan kompetensinya dapat dilihat pada tabel berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Tabel 2. 67 Pelayanan Kepegawaian, 2019-2023

No	Indikator	Capaian 2019	Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023
1	Indeks Profesionalitas ASN	72,03	46,49	49,72	79,88	83,38
2	Persentase penempatan ASN sesuai dengan Kompetensinya	17,25	34,38	71%	63,22%	67,82%

Sumber: BKPSDM Kota Madiun

t. Pelayanan Komunikasi dan Informatika

Komunikasi dan Informatika pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan akses dan kemudahan masyarakat berkomunikasi dan mendapatkan informasi di semua wilayah Kota Madiun dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Hal tersebut diwujudkan dengan sasaran terwujudnya peningkatan akses, pelayanan dan kemudahan masyarakat untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi. Tingkat Keterbukaan Informasi Publik yang digunakan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam untuk mengukur keberhasilannya seperti dalam tabel berikut:

Tabel 2. 68 Capaian Pelayanan Komunikasi dan Informatika, 2019-2023

No	Indikator	Capaian 2019	Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023
1	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	87,10	87,25	97,33	99,25	96,71

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun

u. Pelayanan Statistik

Bidang urusan statistik daerah mempunyai tugas dan fungsi pengolahan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. Hasil pengolahan data dan informasi, selanjutnya dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan rencana kerja tahunan pemerintah daerah, yang mencakup data dan informasi gambaran umum kondisi daerah, data kondisi geografis dan demografis daerah, serta data terkait dengan indikator kinerja kunci penyelenggaraan pemerintahan daerah yang meliputi aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Dalam pencatatan statistik, Pemerintah Kota Madiun bekerjasama dengan BPS Kota Madiun telah merangkum berbagai statistik Kota Madiun yang selanjutnya merupakan indikator atau tolak ukur yang digunakan untuk menggambarkan kelengkapan urusan statistik yang tersedia oleh Kota Madiun. Jenis dokumen yang dapat menjadi indikator urusan statistik antara lain Buku Analisis ASPM (Analisa Situasi Pembangunan Manusia) dan Buku Data Sektoral. Penyusunan 2 (dua) buku tersebut penting kaitannya dengan keberadaan data yang digunakan dalam merancang kebijakan, dan penyusunan program kegiatan.

Tabel 2. 69 Capaian Pelayanan Statistik, 2019-2023

No	Indikator	Capaian 2019	Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023
1	Buku Analisis ASPM	ada	ada	ada	ada	ada
2	Buku Data Sektoral	ada	ada	ada	ada	ada

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun

v. Pelayanan Persandian

Salah satu urusan wajib di luar pelayanan dasar yang perlu diatur oleh perangkat daerah adalah bidang persandian. Kewenangan daerah terkait dengan urusan persandian telah dijabarkan dalam pemetaan urusan persandian dalam rangka Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Bidang Persandian Sesuai Arah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah dijelaskan terkait pembagian urusan pemerintahan untuk bidang persandian.

Kewenangan pertama adalah penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi, yaitu dengan melaksanakan tata kelola Jaminan Keamanan Informasi (JKI) yang meliputi aspek kerahasiaan, ketersediaan, keutuhan, keaslian dan/atau nir-sangkal. Indikator keberhasilan dari layanan ini dapat dilihat dari jumlah informasi dan juga jumlah konten informasi yang wajib diamankan dengan persandian sesuai peraturan perundang-undangan. Selain itu layanan yang juga perlu dilaksanakan yaitu dukungan kegiatan pengamanan informasi, indikatornya dilihat dari jumlah aset atau fasilitas yang harus diamankan serta jumlah rata-rata kegiatan penting yang membutuhkan dukungan pengamanan informasi per bulannya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Tabel 2. 70 Capaian Pelayanan Komunikasi dan Informatika, 2019-2023

No	Indikator	Capaian 2019	Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023
1	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	-	65%	83,57%	96,74%	96,74%

Sumber: Dinas KOmunikasi dan Informatika Kota Madiun

w. Pelayanan Perkoperasian

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian pelaksanaan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah, salah satu indikator yang dapat digunakan adalah persentase koperasi aktif. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Sedang koperasi aktif didefinisikan sebagai koperasi yang dalam 2 (dua) tahun terakhir mengadakan Rapat Anggota Tahunan atau koperasi yang dalam tahun terakhir melakukan kegiatan usaha. Pada kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir yaitu tahun 2019-2023, persentase koperasi aktif, jumlah koperasi, dan persentase koperasi aktif di Kota Madiun menunjukkan tren fluktuatif, peningkatan dan penurunan diakibatkan jumlah koperasi yang mengalami penambahan dan pengurangan selama kurun waktu tahun 2019-2023 sebagaimana terdapat pada tabel berikut:

Tabel 2. 71 persentase Koperasi Aktif di Kota Madiun, 2019-2023

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Koperasi	308	155	156	156	156
Jumlah Koperasi Aktif	302	153	154	156	140
persentase Koperasi Aktif	98,05	98,71	98,71%	100%	89,74%

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, KUKM Kota Madiun

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan provinsi lainnya yang berdekatan, domestik atau internasional. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia. Indikator aspek daya saing daerah sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

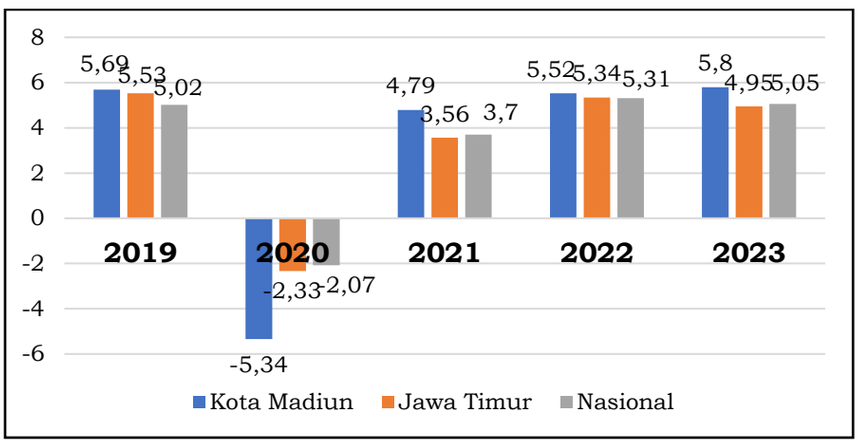
a. Fokus kemampuan ekonomi daerah

Kemampuan ekonomi daerah dapat dilihat dari beberapa indikator ekonomi daerah, seperti laju pertumbuhan ekonomi dan PDRB Atas Harga Berlaku (ADHB) maupun Atas Harga Konstan (ADHK). Laju pertumbuhan ekonomi dapat digunakan untuk mengukur pembangunan ekonomi di suatu daerah. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Madiun dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut:

Tabel 2. 72 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun Tahun 2019 - 2023 (%)

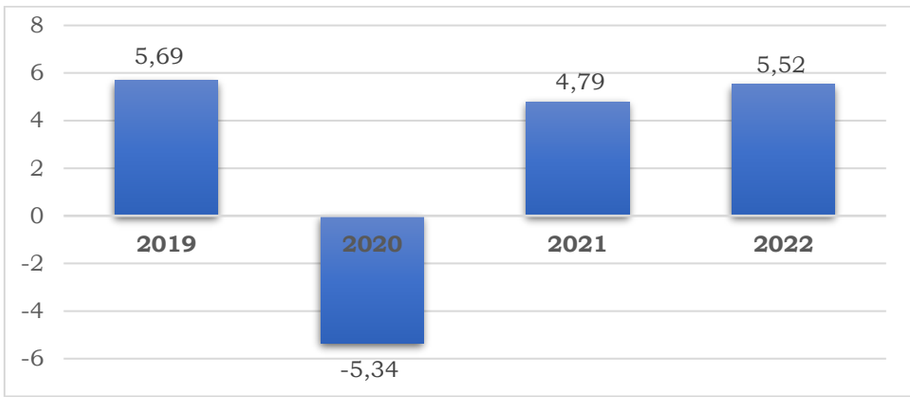
Tahun	Pertumbuhan Ekonomi
2019	5,69
2020	-5,34
2021	4,79
2022	5,52
2023	5,80

Sumber: BPS Kota Madiun



Gambar 2. 25 Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kota Madiun Tahun 2019-2023 (%)

Laju pertumbuhan ekonomi, Nasional, Provinsi dan Kota Madiun, untuk kota madiun selalu di atas Provinsi dan Nasional, hanya saja pada saat terjadi pandemi Covid-19 pada tahun 2020 dan 2021 perekonomian Kota Madiun di bawah Nasional dan Provinsi Jawa Timur.



Sumber: BPS Kota Madiun, Tahun 2023

Gambar 2. 26 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun Tahun 2019 - 2023 (%)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun selama periode 2020-2023 menunjukkan tren yang meningkat. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global dan daya beli masyarakat. Pada tahun 2020 hingga 2022 laju pertumbuhan mengalami peningkatan yang signifikan dari minus 3,39% pada tahun 2020 hingga mencapai minus 4,79% pada tahun 2021. Data BPS menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi Kota Madiun meningkat dari 4,79% pada tahun 2021 menjadi 5,52% di tahun 2022 dan pada tahun 2023 menjadi 5,8.

Untuk laju pertumbuhan riil PDRB menurut lapangan usaha pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 Kota Madiun sebagai berikut:

Tabel 2. 73 Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha (%) Tahun 2020 - 2023

Lapangan Usaha	Tahun				Rata-rata
	2020	2021	2022	2023	
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	11,57	-7,26	-5,67	4,79	0,86
Pertambangan dan Penggalian	-5,65	-4,12	-8,49	-5,53	-5,95
Industri Pengolahan	-12,84	7,10	2,17	7,98	1,10
Pengadaan Listrik dan Gas	1,98	2,95	7,95	5,38	4,57
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,86	6,28	3,50	4,21	4,71
Konstruksi	-4,71	-0,90	8,24	4,83	1,87
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan persewaan Mobil dan Sepeda Motor	-11,18	10,16	7,98	5,60	3,14
Transportasi dan Pergudangan	-4,38	7,17	16,90	11,64	7,83
Penyediaan Akomodasi dan Makan minum	-7,98	3,21	9,96	6,93	3,03
Informasi dan Komunikasi	16,12	4,75	5,94	6,17	8,25
Jasa Keuangan dan Asuransi	-0,66	0,47	0,32	2,82	0,74
Real Estate	0,33	1,19	5,09	4,35	2,74
Jasa Perusahaan	-3,18	0,77	5,26	6,12	2,24
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-2,23	-0,99	-0,43	0,51	-0,79
Jasa Pendidikan	1,97	0,54	0,59	03,17	1,57
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,98	5,46	3,29	3,20	5,48
Jasa Lainnya	-10,68	4,08	12,11	9,39	3,73
PDRB	-3,39	4,79	5,52	5,80	3,18

Sumber: BPS Kota Madiun

Sebagaimana yang ditampilkan pada Tabel 2.73 di atas, Pertumbuhan yang tinggi tahun 2022 berada pada sektor transportasi dan pergudangan yang mencapai (16,9%), jasa lainnya sebesar (12,11%) dan Penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar (9,96%), hal ini ditopang oleh status Kota Madiun sebagai kota transit maupun pusat bisnis yang mendorong berdirinya jasa hotel dan rumah makan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

PDRB atas dasar harga berlaku pada Tahun 2020-2023 Kota Madiun sebagai berikut:

Tabel 2. 74 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2020 – 2023 (Milyar Rupiah)

No	Uraian	TAHUN			
		2020	2021	2022	2023
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	120,59	108,70	110,35	121,77
2	Pertambangan dan Penggalian	2,95	2,91	2,72	2,65
3	Industri Pengolahan	2.030,28	1.985,25	2.099,37	2340,47
4	Pengadaan Listrik dan Gas	11,48	11,72	12,89	13,75
5	Pengadaan Air dan Pengolahan Sampah, Limbah & Daur Ulang	30,4	32,65	34,76	36,82
6	Konstruksi	798,95	805,73	935,22	1005,19
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Persewaan Mobil dan Motor	3.311,32	3.712,41	4.216,70	4608,99
8	Transportasi dan Pergudangan	477,53	516,72	643,89	740,48
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	661,55	716,40	811,41	900,81
10	Informasi dan Komuniasi	2.172,16	2.296,07	2.435,44	2632,13
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.423,02	1.462,62	1.583,93	1668,21
12	Real Estate	381,91	388,09	413,30	438,04
13	Jasa Perusahaan	97,71	100,68	108,69	117,38
14	Administrasi Pemerintahaan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	452,66	447,71	454,35	465,47
15	Jasa Pendidikan	1.109,27	1.113,54	1.135,80	1202,87
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	212,57	227,26	240,59	256,87
17	Jasa Lainnya	474,94	506,98	586,23	664,37
PDRB		13519,88	13.769,29	14.435,43	17256,23

Sumber: BPS Kota Madiun

Sebagaimana yang ditampilkan pada Tabel 2.74 di atas, sektor terbesar pada tahun 2020 adalah sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi dan persewaan mobil dan motor yaitu sebesar 3.311,32 miliar. Sektor terbesar kedua adalah informasi dan komunikasi sebesar 2.172,16 miliar. Jika dilihat pada tahun 2023, PDRB ADHB tertinggi juga ditempati oleh sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi dan persewaan mobil dan motor sebesar 4.608,99, diikuti sektor informasi dan komunikasi sebesar 2.632,13. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa Kota Madiun merupakan kota industri yang mendorong munculnya bisnis baru yang dapat meningkatkan PDRB sektor lain.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Sedangkan atas dasar harga konstan peranan PDRB menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku tahun 2020 s/d 2023 sebagai berikut:

Tabel 2. 75 PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2020 – 2023 (Milyar Rupiah)

No	Uraian	TAHUN			
		2020	2021	2022	2023
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	84,38	78,26	73,82	77,36
2	Pertambangan dan Penggalian	2,08	1,99	1,82	1,72
3	Industri Pengolahan	1.637,31	1.532,38	1.565,69	1690,61
4	Pengadaan Listrik dan Gas	8,78	9,04	9,76	10,28
5	Pengadaan Air dan Pengolahan Sampah, Limbah & Daur Ulang	23,34	24,80	25,67	26,75
6	Konstruksi	616,69	611,17	661,51	693,46
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Persewaan Mobil dan Motor	2.233,21	2.460,08	2.656,42	2805,14
8	Transportasi dan Pergudangan	318,4	341,24	398,92	445,33
9	Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum	514,6	531,10	583,98	624,48
10	Informasi dan Komunikasi	1.940,86	2.032,96	2.153,80	2286,79
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	941,3	945,67	948,75	975,52
12	Real Estate	263,89	267,05	280,64	292,84
13	Jasa Perusahaan	74,9	75,48	79,45	84,31
14	Administrasi Pemerintahaan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	315,18	312,05	310,70	312,28
15	Jasa Pendidikan	783,82	788,06	792,75	817,91
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	153,48	161,86	167,19	172,55
17	Jasa Lainnya	350,22	364,51	408,67	447,05
PDRB			10.262,44	10.537,70	11764,40

Sumber: BPS Kota Madiun

Sebagaimana yang ditampilkan pada Tabel 2.75 di atas, PDRB ADHK menunjukan bahwa pada tahun 2023, sektor yg tertinggi adalah sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi dan persewaan mobil dan motor sebesar 2.805,14 miliar. Sektor terbesar kedua adalah sektor informasi dan komunikasi sebesar 2.286,79 miliar. Jika dilihat pada tahun 2020 hingga 2023, PDRB ADHK tertinggi ditempati oleh sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi dan persewaan mobil dan motor, kemudian disusul oleh sektor informasi dan komunikasi serta di posisi ke-tiga industri pengolahan. Kondisi tersebut tidak jauh beda dengan PDRB ADHB, sektor dengan PDRB ADHK terendah yaitu sektor pertambangan dan penggalian.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Sedangkan atas dasar harga konstan peranan PDRB Menurut Lapangan Usaha sebagai berikut:

Tabel 2. 76 Peranan PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2020 - 2023 (%)

Lapangan Usaha	Tahun				Rata-rata
	2020	2021	2022	2023	
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,88	0,74	0,70	0,71	0,76
Pertambangan dan Penggalian	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Industri Pengolahan	14,74	15,3	13,27	13,56	14,22
Pengadaan Listrik dan Gas	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,22	0,22	0,22	0,21	0,22
Konstruksi	5,8	5,48	5,91	6,83	6,01
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan persewaan Mobil dan Sepeda Motor	24,05	25,25	26,64	26,71	25,66
Transportasi dan Pergudangan	3,47	3,52	4,07	4,52	3,90
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,8	4,87	5,13	5,22	5,01
Informasi dan Komunikasi	15,78	15,62	15,39	15,25	15,51
Jasa Keuangan dan Asuransi	10,33	9,55	10,01	9,67	9,89
Real Estate	2,77	2,64	2,61	2,54	2,64
Jasa Perusahaan	0,71	0,68	0,69	0,68	0,69
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,29	3,05	2,87	2,70	2,98
Jasa Pendidikan	8,06	7,58	7,18	6,97	7,45
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,54	1,55	1,52	1,49	1,53
Jasa Lainnya	3,45	3,45	3,70	3,85	3,61
PDRB	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kota Madiun

Sebagaimana yang ditampilkan pada Tabel 2.76 di atas, sektor yang paling dominan terhadap perekonomian Kota Madiun adalah sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Rata-rata kontribusi sektor tersebut setiap tahunnya adalah sebesar 25,66% per tahun. Dengan tren yang fluktuatif dalam kurun waktu 2020-2023, kontribusi sektor tersebut di masa mendatang diperkirakan akan terus meningkat dan semakin menguatkan posisi Kota Madiun sebagai Kota perdagangan di bagian barat Provinsi Jawa Timur.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Kontribusi terbesar kedua adalah sektor informasi dan komunikasi dengan rata-rata kontribusi sebesar 15,51% per tahun dimana kontribusi terbesar sektor ini terjadi pada tahun 2020 yaitu mencapai 15,78%. Adapun dalam satu tahun terakhir tepatnya di tahun 2023, ternyata untuk sektor yang memberikan dampak paling besar adalah perdagangan besar dan eceran, reparasi dan persewaan mobil dan sepeda motor dengan angka kontribusi sebesar 25,66%. Sektor informasi komunikasi memberikan kontribusi terbesar kedua sebesar 15,51% dan sektor industri pengolahan dengan kontribusi sebesar 14,22%. Selanjutnya, PDRB perkapita menurut lapangan usaha 2020 s/d 2023 yaitu, sebagai berikut:

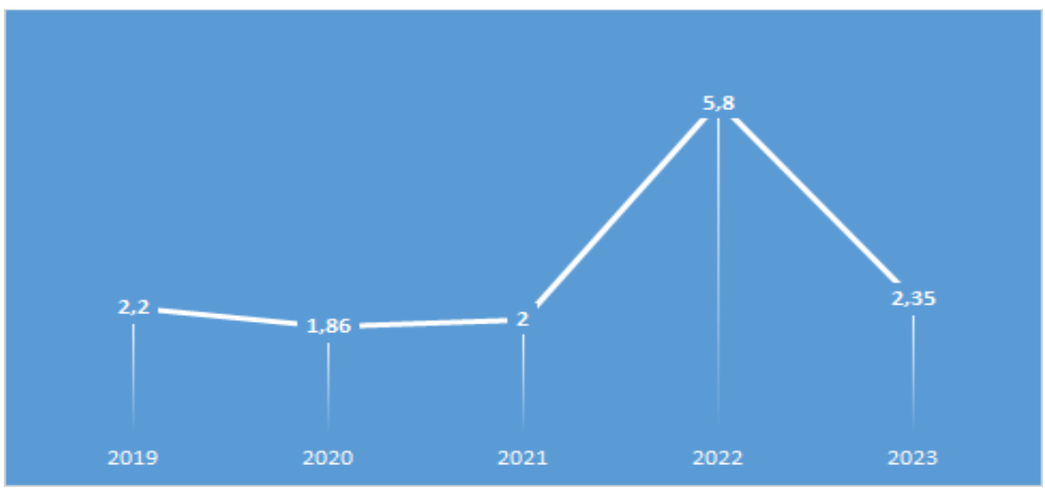
Tabel 2. 77 PDRB Per Kapita Menurut Lapangan Usaha (Juta Rp.)
Tahun 2019 - 2023

TAHUN	NILAI
2019	79,65
2020	69,46
2021	73,50
2022	79,81
2023	86,28

Sumber: BPS Kota Madiun

PDRB per kapita Kota Madiun menurut lapangan usaha selama tahun 2019-2023 menunjukkan trend kenaikan pada angka 79,65 pada tahun 2019 dan mengalami kenaikan 6,67 poin selama kurun waktu 5 tahun di angka 86,28 pada tahun 2023. namun mulai tahun 2022-2023 BPS tidak merilis data PDRB persektor.

Tingkat Inflasi Kota Madiun cenderung stabil. Perkembangan inflasi di Kota Madiun tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Sumber: BPS Kota Madiun

Gambar 2. 27
Tingkat Inflasi Kota Madiun Tahun 2019 - 2023 (%)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Sebagaimana yang ditampilkan pada Gambar 2.27 di atas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 sebesar 2,20% dan 2020 di angka 1,86%. Namun pada tahun 2022 terjadi peningkatan yang cukup tinggi sebesar 3,7 poin dari tahun 2021 sehingga inflasi Kota Madiun pada tahun 2022 di angka 5,70% dan pada tahun 2023, terjadi penurunan inflasi menjadi 2,35%. Penyebab utama dari kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan harga bahan bakar minyak yang menyebabkan kenaikan komoditas lainnya.

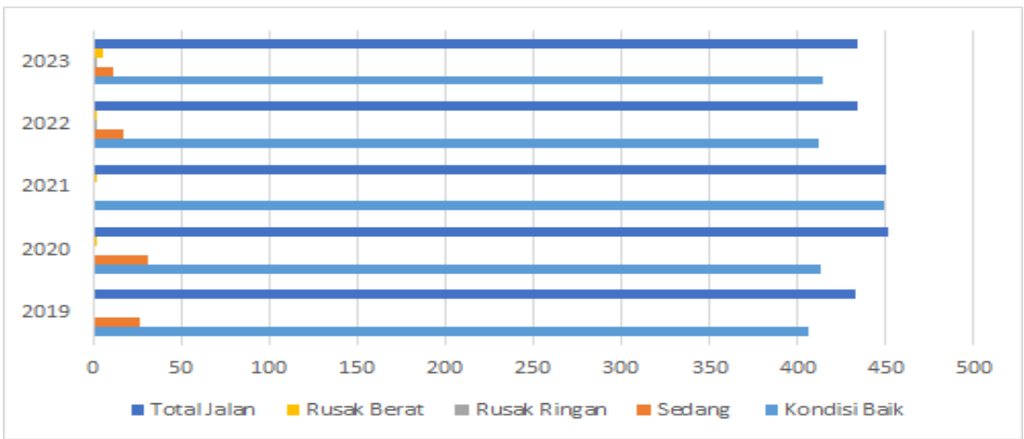
b. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Perkembangan fasilitas wilayah/infrastruktur daerah salah satunya dapat dilihat dari ketersediaan jalan dan kondisi jalan. Jalan yang ada di Kota Madiun yang dalam hal ini jalan yang menjadi kewenangan Kota Madiun.

Tabel 2. 78 Kondisi Jalan yang Ada di Kota Madiun Tahun 2019-2023

Tahun	Kondisi Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat	Total Jalan
2019	405,54	26,25	0	1,305	433,104
2020	413,100	31,6	0	1,93	450,885
2021	448,820	0	0	1,925	450,745
2022	411,955	17,580	1,751	2,199	433,485
2023	414,056	11,962	2,280	5,187	433,485

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kota Madiun



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kota Madiun

Gambar 2. 28
Kondisi Jalan yang Ada di Kota Madiun Tahun 2019-2023

Sebagaimana yang ditampilkan pada Tabel 2.78 dan Gambar 2.28 di atas, kondisi jalan terbagi menjadi kondisi baik, sedang, rusak, dan rusak berat. Selama tahun 2019 hingga tahun 2022 kondisi jalan berkategori baik di Kota Madiun terus mengalami peningkatan. Panjang jalan dalam kondisi baik sepanjang 405,54 km pada tahun 2019.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Dalam rangka menjaga kondisi jalan yang tetap mantap dan memadai, Pemerintah Kota Madiun telah melaksanakan langkah-langkah pemeliharaan jalan setiap tahun dengan kondisi jalan baik dilaksanakan dengan sistem pemeliharaan rutin untuk kondisi jalan rusak ringan, kondisi jalan sedang dilaksanakan dengan pemeliharaan berkala, dan kondisi rusak berat dilaksanakan sistem pemeliharaan berkala atau dengan peningkatan jalan. Secara umum kondisi jalan di Kota Madiun telah memenuhi kebutuhan masyarakat akan aksesibilitas yang memadai.

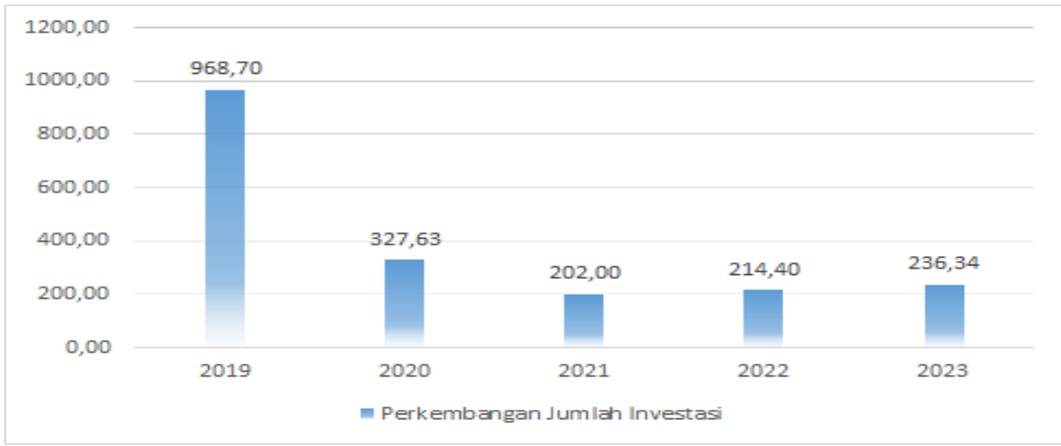
Berdasarkan data di atas, pada tahun 2022 terdapat penurunan kualitas dari kondisi baik dari 448,820 km pada tahun 2021 turun menjadi 411,955 km pada tahun 2022. Akibat penurunan jumlah jalan kondisi baik tersebut maka untuk jalan yang rusak sedang, rusak ringan dan rusak berat mengalami kenaikan sebesar 17,580 km untuk jalan dengan rusak sedang, 1,751 km untuk jalan dengan rusak ringan dan 2,199 km untuk jalan dengan rusak berat.

Pada tahun 2023, kualitas jalan yang berkualitas baik mengalami penurunan menjadi 414,056 dari tahun 2022. Lebih lanjut, panjang jalan dengan kondisi rusak ringan mengalami peningkatan sepanjang 0,529 km dari tahun 2022, sedangkan panjang jalan dengan kondisi rusak berat mengalami peningkatan sepanjang 2,988 km dari tahun 2022.

c. Fokus Iklim Berinvestasi

Dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi yang berdaya saing, berbasis potensi lokal dan pemberdayaan masyarakat, maka penyelenggaraan urusan penanaman modal di Kota Madiun diarahkan untuk meningkatkan potensi ekonomi lokal yang mendukung potensi perdagangan dan perindustrian. Peningkatan tersebut akan menunjang sasaran meningkatnya kontribusi sektor-sektor unggulan terhadap PDRB di Kota Madiun. Penyelenggaraan kegiatan urusan penanaman modal (investasi) di Kota Madiun diampu oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Perkembangan jumlah realisasi investasi di Kota Madiun tahun 2019-2023 sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



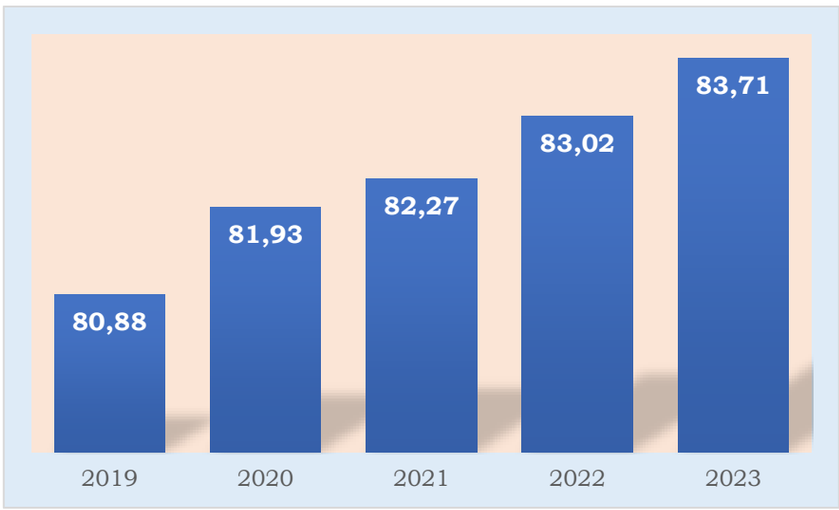
Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Gambar 2. 29
Perkembangan Jumlah Investasi Kota Madiun Tahun 2019 – 2023

Sebagaimana yang ditampilkan pada Gambar 2.29 di atas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2023 realisasi investasi yang masuk di Kota Madiun tercatat sebesar 236 miliar atau melampaui target yang telah ditetapkan senilai 194 miliar. Sesuai data yang masuk bahwa mayoritas investasi disumbang dari sektor perdagangan sekitar 60% dan selebihnya dari sektor perhotelan, restoran serta usaha jasa lainnya.

d. Fokus Sumber Daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari capaian tingkat pengangguran Terbuka (TPT) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).



Sumber: BPS Kota Madiun

Gambar 2. 30
Indeks Pembangunan Manusia Kota Madiun Tahun 2019 – 2023

Sebagaimana yang ditampilkan pada Gambar 2.30 di atas, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Madiun dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

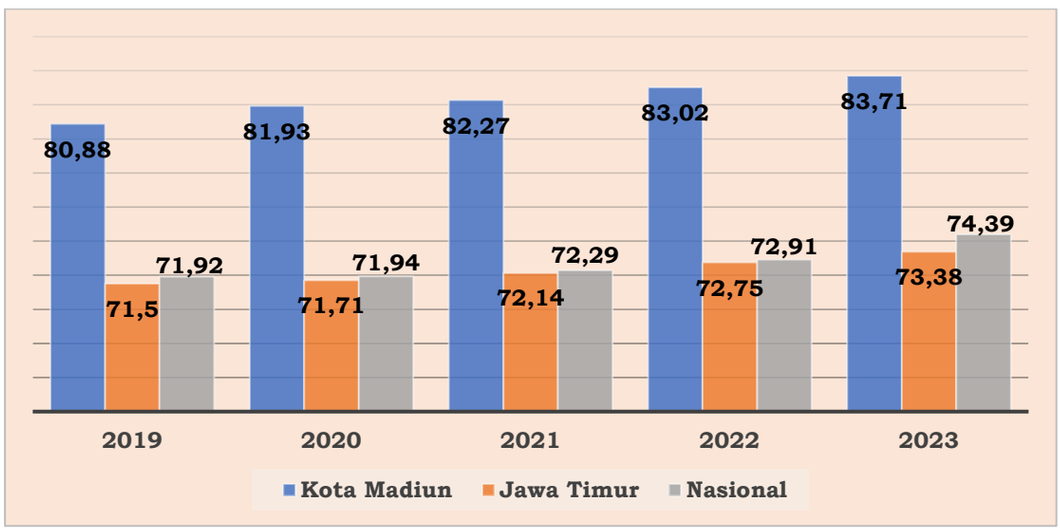
Kemajuan tersebut terlihat dari peningkatan semua komponen penyusun IPM yaitu Angka Harapan Hidup, Tingkat Pendidikan dan Kemampuan Daya Beli. Kemajuan pembangunan manusia di Kota Madiun tersebut mengindikasikan capaian pembangunan yang telah dilaksanakan sudah cukup baik dan dipertahankan dan ditingkatkan di masa mendatang.

Tabel 2. 79 Perkembangan IPM Kota Madiun Tahun 2019 - 2023

Indeks	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
IPM	80,88	81,93	82,27	83,02	83,71
Umur Harapan Hidup	72,75	72,81	72,83	73,13	73,44
Harapan Lama Sekolah	14,39	14,40	14,41	14,43	14,44
Rata-rata Lama Sekolah	11,13	11,14	11,37	11,67	11,82
Pengeluaran per kapita (Rp 000)	16.040	16.018	16.095	16.503	17.115

Sumber: BPS Kota Madiun

Sebagaimana yang ditampilkan pada Tabel 2.79 di atas, Perkembangan IPM dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 mengalami kenaikan. Pada tahun 2019 nilai IPM Kota Madiun mencapai 80,88 dan pada tahun 2023 mencapai 83,71. Kenaikan nilai IPM dapat diartikan sebagai tanda pembangunan manusia di Kota Madiun mengalami kemajuan.
Kota Madiun masuk daerah dengan IPM sangat tinggi diatas 80 poin, dan menempati posisi tertinggi ketiga setelah Kota Malang dan Kota Surabaya di Provinsi Jawa Timur.



Sumber: BPS Kota Madiun

Gambar 2. 31 Indeks Pembangunan Manusia Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kota Madiun Tahun 2019-2023

Sekedar menginformasikan, Indeks Pembangunan Manusia Kota Madiun menduduki urutan ke-3 se Provinsi Jawa Timur setelah Kota Surabaya dan Kota Malang, akan tetapi berada di atas Nasional dan Provinsi Jawa Timur.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

2.2. Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD berfungsi untuk melihat capaian tingkat kemajuan dan kesesuaiannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Prioritas pembangunan daerah di Kota Madiun berpedoman pada RPJMD Tahun 2019-2024.

Untuk mengetahui ketercapaian target yang direncanakan oleh pemerintah dengan realisasi yang terjadi, dapat ditinjau dari urusan yang dilakukan oleh pemerintah, baik dalam urusan wajib ataupun urusan pilihan yaitu, sebagaimana ditampilkan pada tabel sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Tabel 2. 1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Sampai dengan Tahun Berjalan Kota Madiun

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2019 s/d 2024		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2023) PAK		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) PAK		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I		II		III		IV										
1				2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																									
1	1			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																									
1	1	2		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	498.036.453.858,00	100	86.482.747.671,00	100	113.775.180.835,00	100	4.436.758.660,00	100	56.961.060.579,00	100	11.686.873.118,00	100	10.552.763.546,00	100	83.637.455.903,00	100%	74%	100	170.120.203.574,00	100%	34%	
1	1	2	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	persentase sekolah yang dikelola dengan baik	%	100	291.026.365.524,00	100	41.637.468.487,00	100	76.114.604.735,00	100	2.554.155.718,00	100	52.258.845.487,00	100	3.993.974.129,00	100	4.450.005.928,00	100	63.256.981.262,00	100%	83%	100	104.894.449.749,00	100%	22%	
1	1	2	2.01	8 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	238	82.575.157.150,00	0	16.688.221.564,00	68	2.112.207.499,00	0	2.900.000,00	28	437.954.868,00	17	486.894.929,00	17	188.682.262,00	62	1.116.432.059,00	91%	53%	62	17.804.653.623,00	26%	22%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	16 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Unit	9760	98.855.310.800,00	0	0,00	4880	49.427.655.400,00	0	48.388.866,00	4600	49.130.202.330,00	0	13.795.000,00	0	141.916.652,00	4600	49.334.302.848,00	94%	100%	4600	49.334.302.848,00	47%	50%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Kartoharjo)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	1.625.769.115,00	1	567.506.337,00	1	253.281.000,00	0	60.480.790,00	0	46.823.900,00	0	65.126.000,00	1	75.980.300,00	1	248.410.990,00	100%	98%	1	815.917.327,00	100%	50%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Kartoharjo)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	627.626.723,00	1	267.294.129,00	0	0,00	0	0,00	0		0		0		0	0,00	0%	0%	1	267.294.129,00	100%	43%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 03 Kartoharjo)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	816.135.500,00	1	233.204.609,00	1	345.753.000,00	0	30.649.435,00	0	71.805.717,00	0	109.722.000,00	1	119.441.500,00	1	331.618.652,00	100%	96%	1	564.823.261,00	100%	69%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Klegen)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	1.446.158.150,00	1	638.098.670,00	1	293.566.000,00	0	73.486.091,00	0	64.440.000,00	0	76.617.500,00	1	66.031.700,00	1	280.575.291,00	100%	96%	1	918.673.961,00	100%	64%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Klegen)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	814.302.638,00	1	344.351.068,00	1	189.916.000,00	0	33.157.838,00	0	30.424.000,00	0	42.498.000,00	1	55.550.000,00	1	161.629.838,00	100%	85%	1	505.980.906,00	100%	62%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 03 Klegen)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	1.492.648.000,00	1	651.805.673,00	1	306.973.000,00	0	53.815.359,00	0	88.955.939,00	0	46.011.000,00	1	268.537.298,00	1	457.319.596,00	100%	149%	1	1.109.125.269,00	100%	74%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 04 Klegen)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	604.104.965,00	1	285.103.798,00	1	152.626.000,00	0	32.477.612,00	0	23.241.000,00	0	55.023.300,00	1	32.071.400,00	1	142.813.312,00	100%	94%	1	427.917.110,00	100%	71%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN Oro - Oro Ombo)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	1.420.023.320,00	1	593.264.987,00	1	334.228.000,00	0	83.815.161,00	0	70.316.900,00	0	89.949.500,00	1	78.110.000,00	1	322.191.561,00	100%	96%	1	915.456.548,00	100%	64%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Rejomulyo)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	555.464.400,00	1	201.090.451,00	1	292.132.000,00	0	26.659.300,00	0	71.856.220,00	0	107.177.250,00	1	75.512.007,00	1	281.204.777,00	100%	96%	1	482.295.228,00	100%	87%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Rejomulyo)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	654.999.250,00	1	285.744.927,00	0	0,00	0	0,00	0		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0%	0%	1	285.744.927,00	100%	44%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Kanigoro)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	881.297.450,00	1	311.718.323,00	1	158.442.000,00	0	37.986.493,00	0	31.700.208,00	0	34.027.400,00	1	46.799.900,00	1	150.514.001,00	100%	95%	1	462.232.324,00	100%	52%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Kanigoro)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	904.402.885,00	1	361.244.304,00	1	254.492.000,00	0	57.486.099,00	0	72.234.800,00	0	74.126.800,00	1	47.923.000,00	1	251.770.699,00	100%	99%	1	613.015.003,00	100%	68%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 03 Kanigoro)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	1.257.517.533,00	1	394.778.543,00	1	226.001.000,00	0	47.321.649,00	0	47.671.010,00	0	60.138.000,00	1	36.640.000,00	1	191.770.659,00	100%	85%	1	586.549.202,00	100%	47%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN Sukosari)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	573.640.200,00	1	260.952.121,00	1	162.225.500,00	0	39.527.691,00	0	37.768.300,00	0	24.835.400,00	1	55.923.300,00	1	158.054.691,00	100%	97%	1	419.006.812,00	100%	73%	Dinas Pendidikan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
1	1	2	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN Pilangbango)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	845.740.200,00	1	549.999.438,00	1	347.985.800,00	0	56.165.377,00	0	72.358.000,00	0	92.953.500,00	1	113.957.000,00	1	335.433.877,00	100%	96%	1	885.433.315,00	100%	105%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Tawangrejo)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	1.717.043.250,00	1	507.316.550,00	1	160.295.500,00	0	31.957.660,00	0	27.657.000,00	0	39.057.800,00	1	51.962.500,00	1	150.634.960,00	100%	94%	1	657.951.510,00	100%	38%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Tawangrejo)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	627.522.218,00	1	245.746.669,00	1	98.470.000,00	0	26.909.710,00	0	24.897.000,00	0	22.132.000,00	1	17.477.500,00	1	91.416.210,00	100%	93%	1	337.162.879,00	100%	54%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN Kelun)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	824.560.240,00	1	307.705.791,00	1	199.889.000,00	0	36.291.395,00	0	44.940.675,00	0	56.333.550,00	1	44.601.500,00	1	182.167.120,00	100%	91%	1	489.872.911,00	100%	59%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Manguharjo)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	1.466.016.000,00	1	659.610.345,00	1	280.346.000,00	0	69.391.800,00	0	57.708.449,00	0	38.446.000,00	1	111.503.735,00	1	277.049.984,00	100%	99%	1	936.660.329,00	100%	64%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Nambangan Lor)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	1.282.983.113,00	1	494.079.231,00	1	271.700.000,00	0	41.437.788,00	0	61.222.000,00	0	60.015.800,00	1	97.836.800,00	1	260.512.388,00	100%	96%	1	754.591.619,00	100%	59%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Nambangan Lor)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	679.805.800,00	1	253.026.640,00	1	198.418.000,00	0	36.472.586,00	0	53.745.600,00	0	55.663.200,00	1	49.481.600,00	1	195.362.986,00	100%	98%	1	448.389.626,00	100%	66%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Madiun Lor)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	722.877.300,00	1	309.850.400,00	1	174.272.000,00	0	19.999.298,00	0	39.999.555,00	0	32.001.500,00	1	52.012.500,00	1	144.012.853,00	100%	83%	1	453.863.253,00	100%	63%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Madiun Lor)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	581.275.495,00	1	235.440.527,00	1	117.129.000,00	0	25.720.917,00	0	25.798.900,00	0	22.516.200,00	1	36.768.300,00	1	110.804.317,00	100%	95%	1	346.244.844,00	100%	60%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 03 Madiun Lor)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	2.690.392.875,00	1	914.836.156,00	1	436.862.000,00	0	84.317.424,00	0	116.252.800,00	0	94.776.900,00	1	88.771.600,00	1	384.118.724,00	100%	88%	1	1.298.954.880,00	100%	48%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 04 Madiun Lor)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	1.381.230.200,00	1	576.180.879,00	1	238.571.000,00	0	80.429.617,00	0	67.410.600,00	0	42.456.000,00	1	35.791.000,00	1	226.087.217,00	100%	95%	1	802.268.096,00	100%	58%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 05 Madiun Lor)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	1.757.643.500,00	1	679.864.119,00	1	333.674.000,00	0	79.788.211,00	0	68.335.000,00	0	96.414.500,00	1	79.257.000,00	1	323.794.711,00	100%	97%	1	1.003.658.830,00	100%	57%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Nambangan Kidul)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	1.069.337.553,00	1	384.132.390,00	1	402.896.000,00	0	58.883.309,00	0	59.880.874,00	0	93.506.600,00	1	115.663.100,00	1	327.933.883,00	100%	81%	1	712.066.273,00	100%	67%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Nambangan Kidul)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	636.543.225,00	1	261.731.852,00	0	0,00	0	0,00	0		0	0,00			0	0,00	0%	0%	1	261.731.852,00	100%	41%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 03 Nambangan Kidul)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	1.325.577.395,00	1	488.989.852,00	1	250.832.000,00	0	71.484.150,00	0	24.655.200,00	0	69.925.600,00	1	52.374.200,00	1	218.439.150,00	100%	87%	1	707.429.002,00	100%	53%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 04 Nambangan Kidul)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	590.204.715,00	1	208.956.729,00	1	173.282.000,00	0	36.385.908,00	0	33.597.226,00	0	34.867.500,00	1	62.913.500,00	1	167.764.134,00	100%	97%	1	376.720.863,00	100%	64%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Winongo)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	1.188.359.986,00	1	437.433.343,00	1	279.104.000,00	0	48.105.814,00	0	47.674.000,00	0	64.899.500,00	1	94.639.250,00	1	255.318.564,00	100%	91%	1	692.751.907,00	100%	58%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Winongo)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	591.994.750,00	1	220.656.086,00	1	176.350.000,00	0	26.148.550,00	0	28.598.000,00	0	24.972.400,00	1	31.002.600,00	1	110.721.550,00	100%	63%	1	331.377.636,00	100%	56%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN Ngegong)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	520.047.600,00	1	242.301.443,00	1	162.976.000,00	0	31.239.330,00	0	35.128.700,00	0	32.461.000,00	1	59.136.000,00	1	157.965.030,00	100%	97%	1	400.266.473,00	100%	77%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN Patihan)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	1.240.373.150,00	1	542.276.450,00	1	243.546.000,00	0	60.288.300,00	0	69.199.707,00	0	64.400.800,00	1	45.887.200,00	1	239.776.007,00	100%	98%	1	782.052.457,00	100%	63%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Pangongangan)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	636.210.350,00	1	206.577.524,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0%	0%	1	206.577.524,00	100%	32%	Dinas Pendidikan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
1	1	2	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Pangongangan)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	1.319.842.468,00	1	491.223.503,00	1	446.426.000,00	0	76.234.988,00	0	111.032.829,00	0	143.724.500,00	1	107.533.000,00	1	438.525.317,00	100%	98%	1	929.748.820,00	100%	70%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN Sogaten)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	734.403.705,00	1	275.276.921,00	1	189.465.000,00	0	28.488.684,00	0	22.471.000,00	0	41.993.900,00	1	89.886.100,00	1	182.839.684,00	100%	97%	1	458.116.605,00	100%	62%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Taman)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	1.703.057.863,00	1	678.309.267,00	1	436.181.000,00	0	101.668.410,00	0	110.557.600,00	0	87.765.500,00	1	133.184.800,00	1	433.176.310,00	100%	99%	1	1.111.485.577,00	100%	65%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Taman)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	591.181.585,00	1	239.492.326,00	1	133.440.000,00	0	23.870.232,00	0	40.876.200,00	0	28.272.000,00	1	37.691.100,00	1	130.709.532,00	100%	98%	1	370.201.858,00	100%	63%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 03 Taman)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	926.315.350,00	1	375.853.318,00	1	196.679.000,00	0	39.394.030,00	0	37.785.280,00	0	38.833.000,00	1	59.908.600,00	1	175.920.910,00	100%	89%	1	551.774.228,00	100%	60%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Pandean)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	1.271.157.983,00	1	531.291.579,00	1	284.316.000,00	0	77.931.722,00	0	39.325.000,00	0	70.209.000,00	1	94.752.049,00	1	282.217.771,00	100%	99%	1	813.509.350,00	100%	64%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Pandean)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	1.628.458.950,00	1	591.271.444,00	1	350.290.000,00	0	54.654.202,00	0	81.733.800,00	0	80.635.500,00	1	113.674.506,00	1	330.698.008,00	100%	94%	1	921.969.452,00	100%	57%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN Banjarejo)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	1.821.835.770,00	1	743.668.972,00	1	244.879.000,00	0	62.897.456,00	0	69.090.000,00	0	64.516.600,00	1	29.514.000,00	1	226.018.056,00	100%	92%	1	969.687.028,00	100%	53%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Mojorejo)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	909.208.700,00	1	348.626.820,00	1	224.045.000,00	0	20.878.373,00	0	17.356.000,00	0	41.940.100,00	1	135.430.200,00	1	215.604.673,00	100%	96%	1	564.231.493,00	100%	62%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Mojorejo)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	2.020.594.865,00	1	822.092.388,00	1	405.178.000,00	0	79.225.823,00	0	57.092.500,00	0	135.878.000,00	1	126.408.200,00	1	398.604.523,00	100%	98%	1	1.220.696.911,00	100%	60%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Manisrejo)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	1.491.199.660,00	1	620.675.810,00	1	277.056.600,00	0	59.478.018,00	0	43.959.500,00	0	60.660.300,00	1	102.489.800,00	1	266.587.618,00	100%	96%	1	887.263.428,00	100%	59%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Manisrejo)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	1.193.113.263,00	1	439.903.435,00	1	238.968.000,00	0	53.350.491,00	0	36.900.000,00	0	59.478.500,00	1	67.974.549,00	1	217.703.540,00	100%	91%	1	657.606.975,00	100%	55%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 03 Manisrejo)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	924.425.620,00	1	356.922.821,00	1	165.087.000,00	0	31.564.000,00	0	54.471.500,00	0	39.383.500,00	1	61.996.500,00	1	187.415.500,00	100%	114%	1	544.338.321,00	100%	59%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 04 Manisrejo)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	1.329.776.983,00	1	499.730.711,00	1	223.445.000,00	0	45.778.605,00	0	33.093.300,00	0	56.907.350,00	1	63.231.550,00	1	199.010.805,00	100%	89%	1	698.741.516,00	100%	53%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Demangan)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	681.716.075,00	1	278.141.493,00	1	151.303.000,00	0	27.259.947,00	0	20.897.000,00	0	33.901.000,00	1	61.844.000,00	1	143.901.947,00	100%	95%	1	422.043.440,00	100%	62%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Demangan)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	695.837.800,00	1	268.598.436,00	1	175.762.000,00	0	42.107.066,00	0	41.018.000,00	0	37.820.000,00	1	47.065.670,00	1	168.010.736,00	100%	96%	1	436.609.172,00	100%	63%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Josenan)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	917.353.700,00	1	289.219.368,00	1	187.140.000,00	0	40.031.663,00	0	38.406.500,00	0	46.594.200,00	1	37.952.200,00	1	162.984.563,00	100%	87%	1	452.203.931,00	100%	49%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Josenan)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	743.765.750,00	1	301.098.233,00	1	213.101.000,00	0	33.470.240,00	0	37.687.000,00	0	38.944.000,00	1	64.710.100,00	1	174.811.340,00	100%	82%	1	475.909.573,00	100%	64%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 03 Josenan)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	570.522.200,00	1	216.435.746,00	1	116.239.000,00	0	17.483.320,00	0	19.843.900,00	0	26.033.700,00	1	25.204.000,00	1	88.564.920,00	100%	76%	1	305.000.666,00	100%	53%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN Kejuron)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	666.400.850,00	1	301.984.506,00	1	148.714.000,00	0	26.011.719,00	0	33.945.700,00	0	37.517.950,00	1	47.355.750,00	1	144.831.119,00	100%	97%	1	446.815.625,00	100%	67%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN Kuncen)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	743.524.001,00	1	266.198.014,00	1	148.079.000,00	0	24.037.201,00	0	30.090.400,00	0	33.176.600,00	1	52.111.100,00	1	139.415.301,00	100%	94%	1	405.613.315,00	100%	55%	Dinas Pendidikan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
1	1	2	2.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Siswa	152	1.989.882.561,00	0	551.228.279,00	50	550.112.336,00	0	0,00	5	18.515.500,00	15	176.083.000,00	15	215.940.000,00	35	410.538.500,00	70%	75%	35	961.766.779,00	23%	48%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	168	2.899.439.479,00	73	1.036.631.258,00	73	646.979.700,00	6	38.770.000,00	14	78.242.500,00	36	289.963.500,00	36	143.991.950,00	92	550.967.950,00	126%	85%	165	1.587.599.208,00	98%	55%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Kartoharjo)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	1.361.331.295,00	1		1	332.640.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	1	0,00	100%	0%	1	0,00	100%	0%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Kartoharjo)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	186.121.000,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0		0		0		0	0,00	0%	0%	1	0,00	100%	0%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 03 Kartoharjo)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	241.847.199,00	1	0,00	1	105.930.000,00	0	0,00	0		0		1		1	0,00	100%	0%	1	0,00	100%	0%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Klegen)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	1.379.371.864,00	1	0,00	1	340.560.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	1	0,00	100%	0%	1	0,00	100%	0%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Klegen)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	507.036.708,00	1	0,00	1	127.710.000,00	0		0		0	0,00	1		1	0,00	100%	0%	1	0,00	100%	0%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 03 Klegen)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	1.375.300.090,00	1	0,00	1	332.640.000,00	0		0		0	0,00	1		1	0,00	100%	0%	1	0,00	100%	0%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 04 Klegen)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	352.440.245,00	1	0,00	1	85.140.000,00	0		0		0	0,00	1		1	0,00	100%	0%	1	0,00	100%	0%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN Oro - Oro Ombo)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	1.007.030.738,00	1	0,00	1	254.429.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	1	0,00	100%	0%	1	0,00	100%	0%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Rejomulyo)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	398.707.900,00	1	0,00	1	145.530.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	1	0,00	100%	0%	1	0,00	100%	0%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Rejomulyo)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	210.566.734,00	1	0,00	0	0,00	0		0		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0%	0%	1	0,00	100%	0%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Kanigoro)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	317.975.817,00	1	0,00	1	70.290.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	1	0,00	100%	0%	1	0,00	100%	0%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Kanigoro)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	653.166.856,00	1	0,00	1	151.470.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1		1	0,00	100%	0%	1	0,00	100%	0%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 03 Kanigoro)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	666.340.000,00	1	0,00	1	155.430.000,00	0		0		0	0,00	1		1	0,00	100%	0%	1	0,00	100%	0%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN Sukosari)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	136.920.960,00	1	0,00	1	27.720.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1		1	0,00	100%	0%	1	0,00	100%	0%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN Pilangbango)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	810.829.745,00	1	0,00	1	211.860.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1		1	0,00	100%	0%	1	0,00	100%	0%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Tawangrejo)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	650.610.000,00	1	0,00	1	155.430.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1		1	0,00	100%	0%	1	0,00	100%	0%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Tawangrejo)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	393.122.000,00	1	0,00	1	89.100.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1		1	0,00	100%	0%	1	0,00	100%	0%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN Kelun)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	685.080.000,00	1	0,00	1	168.300.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1		1	0,00	100%	0%	1	0,00	100%	0%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Manguharjo)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	1.144.606.416,00	1	0,00	1	272.250.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1		1	0,00	100%	0%	1	0,00	100%	0%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Nambangan Lor)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	1.213.735.431,00	1	0,00	1	291.060.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1		1	0,00	100%	0%	1	0,00	100%	0%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Nambangan Lor)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	568.397.516,00	1	0,00	1	131.670.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1		1	0,00	100%	0%	1	0,00	100%	0%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Madiun Lor)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	463.541.623,00	1	0,00	1	109.890.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1		1	0,00	100%	0%	1	0,00	100%	0%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Madiun Lor)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	467.280.632,00	1	0,00	1	97.020.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1		1	0,00	100%	0%	1	0,00	100%	0%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 03 Madiun Lor)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	1.976.731.875,00	1	0,00	1	514.800.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1		1	0,00	100%	0%	1	0,00	100%	0%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 04 Madiun Lor)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	1.335.635.734,00	1	0,00	1	302.940.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1		1	0,00	100%	0%	1	0,00	100%	0%	Dinas Pendidikan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 05 Madiun Lor)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	1.808.562.919,00	1	0,00	1	459.360.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1		1	0,00	100%	0%	1	0,00	100%	0%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Nambangan Kidul)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	495.630.000,00	1	0,00	1	203.940.000,00	0		0	0,00	0	0,00	1		1	0,00	100%	0%	1	0,00	100%	0%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Nambangan Kidul)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	366.960.000,00	1	0,00	0	0,00	0		0		0	0,00			0	0,00	0%	0%	1	0,00	100%	0%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 03 Nambangan Kidul)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	1.300.663.667,00	1	0,00	1	306.900.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1		1	0,00	100%	0%	1	0,00	100%	0%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 04 Nambangan Kidul)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	507.233.195,00	1	0,00	1	117.810.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1		1	0,00	100%	0%	1	0,00	100%	0%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Winongo)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	1.291.500.034,00	1	0,00	1	319.770.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1		1	0,00	100%	0%	1	0,00	100%	0%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Winongo)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	214.680.414,00	1	0,00	1	53.460.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1		1	0,00	100%	0%	1	0,00	100%	0%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN Ngegong)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	641.296.911,00	1	0,00	1	158.400.000,00	0		0	0,00	0	0,00	1		1	0,00	100%	0%	1	0,00	100%	0%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN Patihan)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	1.227.110.001,00	1	0,00	1	277.200.000,00	0		0		0	0,00	1		1	0,00	100%	0%	1	0,00	100%	0%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Pangongangan)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	289.330.411,00	1	0,00	0	0,00	0		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0%	0%	1	0,00	100%	0%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Pangongangan)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	1.214.421.200,00	1	0,00	1	340.560.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1		1	0,00	100%	0%	1	0,00	100%	0%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN Sogaten)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	685.468.854,00	1	0,00	1	170.280.000,00	0		0		0	0,00	1		1	0,00	100%	0%	1	0,00	100%	0%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Taman)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	1.724.835.446,00	1	0,00	1	426.690.000,00	0		0		0	0,00	1		1	0,00	100%	0%	1	0,00	100%	0%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Taman)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	308.756.904,00	1	0,00	1	75.240.000,00	0		0	0,00	0	0,00	1		1	0,00	100%	0%	1	0,00	100%	0%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 03 Taman)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	429.224.595,00	1	0,00	1	87.120.000,00	0		0		0	0,00	1		1	0,00	100%	0%	1	0,00	100%	0%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Pandean)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	1.370.034.373,00	1	0,00	1	323.512.500,00	0		0		0	0,00	1		1	0,00	100%	0%	1	0,00	100%	0%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Pandean)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	1.305.983.252,00	1	0,00	1	316.800.000,00	0		0		0	0,00	1		1	0,00	100%	0%	1	0,00	100%	0%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN Banjarejo)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	1.664.737.234,00	1	0,00	1	396.000.000,00	0		0		0	0,00	1		1	0,00	100%	0%	1	0,00	100%	0%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Mojorejo)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	412.569.814,00	1	0,00	1	109.890.000,00	0		0		0	0,00	1		1	0,00	100%	0%	1	0,00	100%	0%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Mojorejo)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	2.033.786.533,00	1	0,00	1	484.110.000,00	0		0		0	0,00	1		1	0,00	100%	0%	1	0,00	100%	0%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Manisrejo)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	1.342.721.683,00	1	0,00	1	325.710.000,00	0		0		0	0,00	1		1	0,00	100%	0%	1	0,00	100%	0%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Manisrejo)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	1.194.921.165,00	1	0,00	1	303.930.000,00	0		0		0	0,00	1		1	0,00	100%	0%	1	0,00	100%	0%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 03 Manisrejo)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	660.715.887,00	1	0,00	1	167.310.000,00	0		0		0	0,00	1		1	0,00	100%	0%	1	0,00	100%	0%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 04 Manisrejo)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	1.329.776.983,00	1	302.501.921,00	1	186.120.000,00	0		0		0	0,00	1		1	0,00	100%	0%	1	302.501.921,00	100%	23%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Demangan)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	528.032.241,00	1	0,00	1	121.770.000,00	0		0		0	0,00	1		1	0,00	100%	0%	1	0,00	100%	0%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Demangan)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	645.505.865,00	1	0,00	1	160.380.000,00	0		0		0	0,00	1		1	0,00	100%	0%	1	0,00	100%	0%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Josenan)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	709.974.598,00	1	0,00	1	170.280.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1		1	0,00	100%	0%	1	0,00	100%	0%	Dinas Pendidikan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Josenan)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	695.845.597,00	1	0,00	1	174.240.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1		1	0,00	100%	0%	1	0,00	100%	0%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 03 Josenan)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	352.574.199,00	1	0,00	1	74.250.000,00	0		0		0	0,00	1		1	0,00	100%	0%	1	0,00	100%	0%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN Kejuron)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	211.540.137,00	1	0,00	1	37.620.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1		1	0,00	100%	0%	1	0,00	100%	0%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN Kuncen)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	304.930.859,00	1		1	83.160.000,00	0		0		0		1		1	0,00	100%	0%	1	0,00	100%	0%	Dinas Pendidikan
1	**1**	**2**	**2.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**persentase sekolah yang dikelola dengan baik**	**%**	**100**	**161.131.292.315,00**	**100**	**33.078.920.957,00**	**100**	**27.248.006.062,00**	**100**	**1.835.458.882,00**	**100**	**4.605.151.802,00**	**100**	**5.860.967.750,00**	**100**	**3.423.620.453,00**	**100**	**15.725.198.887,00**	**100%**	**58%**	**100**	**48.804.119.844,00**	**100%**	**10%**	
1	1	2	2.02	13	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Jumlah Gedung Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat	unit	154	56.979.002.100,00	8	10.543.297.687,00	6	3.288.125.572,00	0	600.000,00	2	834.316.158,00	3	2.239.836.112,00	3	93.443.150,00	8	3.168.195.420,00	133%	96%	16	13.711.493.107,00	10%	24%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02	27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket	2	13.537.484.000,00	0	5.760.125.666,00	1	3.975.043.026,00	0	10.812.000,00	0	1.814.987.000,00	0	1.345.412.100,00	0	507.835.000,00	0	3.679.046.100,00	0%	93%	0	9.439.171.766,00	0%	70%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02	36	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 1)	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	Peserta Didik	1522	3.810.408.799,00	1	1.551.907.818,00	761	1.000.814.000,00	0	125.157.088,00	0	111.639.435,00	0	205.597.010,00	750	482.349.688,00	750	924.743.221,00	99%	92%	751	2.476.651.039,00	49%	65%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02	36	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 2)	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	Peserta Didik	1498	4.259.981.150,00	1	1.272.640.260,00	749	649.743.000,00	0	137.402.366,00	0	147.357.252,00	0	176.867.653,00	747	151.419.183,00	747	613.046.454,00	100%	94%	748	1.885.686.714,00	50%	44%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02	36	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 3)	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	Peserta Didik	1112	2.563.605.100,00	1	1.033.753.227,00	556	566.869.000,00	0	149.263.100,00	0	179.981.500,00	0	110.937.200,00	557	110.798.659,00	557	550.980.459,00	100%	97%	558	1.584.733.686,00	50%	62%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02	36	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 4)	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	Peserta Didik	1720	3.365.787.950,00	1	1.087.659.419,00	860	503.332.000,00	0	111.779.327,00	0	106.951.000,00	0	127.586.480,00	826	123.807.680,00	826	470.124.487,00	96%	93%	827	1.557.783.906,00	48%	46%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02	36	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 5)	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	Peserta Didik	844	2.825.050.505,00	1	1.033.988.934,00	422	780.283.000,00	0	235.981.698,00	0	179.087.119,00	0	147.898.766,00	416	202.976.692,00	416	765.944.275,00	99%	98%	417	1.799.933.209,00	49%	64%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02	36	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 6)	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	Peserta Didik	1230	3.130.943.545,00	1	1.127.995.264,00	615	725.546.500,00	0	100.617.863,00	0	173.023.400,00	0	172.970.160,00	619	195.385.500,00	619	641.996.923,00	101%	88%	620	1.769.992.187,00	50%	57%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02	36	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 7)	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	Peserta Didik	1444	3.154.598.650,00	1	1.003.621.544,00	722	667.390.000,00	0	95.681.050,00	0	181.641.300,00	0	174.289.960,00	738	170.948.200,00	738	622.560.510,00	102%	93%	739	1.626.182.054,00	51%	52%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02	36	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 8)	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	Peserta Didik	1052	2.251.651.760,00	1	812.830.413,00	526	324.372.000,00	0	41.296.050,00	0	87.242.150,00	0	63.081.760,00	1	108.734.250,00	1	300.354.210,00	0%	93%	2	1.113.184.623,00	0%	49%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02	36	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 9)	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	Peserta Didik	870	3.291.187.255,00	1	1.159.016.434,00	435	701.484.000,00	0	233.776.748,00	0	139.781.000,00	0	123.679.000,00	411	183.846.874,00	411	681.083.622,00	94%	97%	412	1.840.100.056,00	47%	56%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02	36	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 10)	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	Peserta Didik	1034	3.872.945.545,00	1	1.399.971.609,00	517	860.520.000,00	0	158.461.741,00	0	169.370.850,00	0	204.300.775,00	521	278.264.790,00	521	810.398.156,00	101%	94%	522	2.210.369.765,00	50%	57%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02	36	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 11)	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	Peserta Didik	1300	3.059.069.867,00	1	1.164.175.567,00	650	672.148.000,00	0	142.089.184,00	0	175.377.700,00	0	180.351.960,00	673	155.703.000,00	673	653.521.844,00	104%	97%	674	1.817.697.411,00	52%	59%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02	36	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 12)	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	Peserta Didik	1162	3.151.822.350,00	1	1.030.026.026,00	581	378.161.000,00	0	74.420.311,00	0	110.405.750,00	0	68.559.860,00	552	100.514.630,00	552	353.900.551,00	95%	94%	553	1.383.926.577,00	48%	44%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02	36	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 13)	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	Peserta Didik	1384	2.706.472.233,00	1	1.032.464.876,00	692	441.302.000,00	0	129.783.460,00	0	113.933.288,00	0	99.187.044,00	678	69.140.000,00	678	412.043.792,00	98%	93%	679	1.444.508.668,00	49%	53%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02	36	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 14)	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	Peserta Didik	648	2.061.109.818,00	0	747.433.240,00	324	375.477.000,00	0	88.336.896,00	0	68.618.900,00	0	88.603.710,00	312	109.209.157,00	312	354.768.663,00	96%	94%	312	1.102.201.903,00	48%	53%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02	37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Satuan Pendidikan	92	1.149.551.220,00	48	433.054.202,00	23	212.633.000,00	0	0,00	0	0,00	0	1.770.000,00	23	98.486.000,00	23	100.256.000,00	100%	47%	71	533.310.202,00	77%	46%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	210	2.432.946.145,00	0	624.749.445,00	105	494.740.000,00	0	0,00	2	11.438.000,00	53	330.038.200,00	50	94.014.000,00	105	435.490.200,00	100%	88%	105	1.060.239.645,00	50%	44%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Satuan Pendidikan	384	731.221.199,00	48	260.209.326,00	23	559.017.964,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	186.744.000,00	0	186.744.000,00	0%	33%	48	446.953.326,00	13%	61%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 1)	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	3.832.568.089,00	1	0,00	1	920.020.000,00	0		0		0	0,00	1		1	0,00	100%	0%	1	0,00	100%	0%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 2)	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	4.112.545.132,00	1	0,00	1	906.273.800,00	0		0		0		1		1	0,00	100%	0%	1	0,00	100%	0%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 3)	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	2.790.811.881,00	1	0,00	1	671.550.000,00	0		0		0	0,00	1		1	0,00	100%	0%	1	0,00	100%	0%	Dinas Pendidikan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 4)	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	4.053.654.362,00	1	0,00	1	1.040.600.000,00	0		0		0	0,00	1		1	0,00	100%	0%	1	0,00	100%	0%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 5)	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	2.242.713.042,00	1	0,00	1	510.620.000,00	0		0		0		1		1	0,00	100%	0%	1	0,00	100%	0%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 6)	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	3.154.450.000,00	1	0,00	1	744.150.000,00	0		0		0	0,00	1		1	0,00	100%	0%	1	0,00	100%	0%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 7)	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	3.611.337.628,00	1	0,00	1	873.620.000,00	0		0		0		1		1	0,00	100%	0%	1	0,00	100%	0%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 8)	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	2.605.484.500,00	1	0,00	1	642.510.000,00	0		0		0		1		1	0,00	100%	0%	1	0,00	100%	0%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 9)	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	2.119.498.805,00	1		1	525.140.000,00	0		0		0		1		1	0,00	100%	0%	1	0,00	100%	0%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 10)	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	2.525.322.623,00	1	0,00	1	435.351.200,00	0		0		0		1		1	0,00	100%	0%	1	0,00	100%	0%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 11)	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	3.114.222.499,00	1	0,00	1	787.710.000,00	0		0		0		1		1	0,00	100%	0%	1	0,00	100%	0%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 12)	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	3.159.122.827,00	1	0,00	1	706.640.000,00	0		0		0		1		1	0,00	100%	0%	1	0,00	100%	0%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 13)	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	3.746.431.814,00	1	0,00	1	839.740.000,00	0		0		0		1		1	0,00	100%	0%	1	0,00	100%	0%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 14)	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	1.728.289.922,00	1	0,00	1	467.080.000,00	0		0		0		1		1	0,00	100%	0%	1	0,00	100%	0%	Dinas Pendidikan
1	**1**	**2**	**2.03**		**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**persentase sekolah yang dikelola dengan baik**	**%**	**100**	**40.521.510.039,00**	**100**	**10.398.743.289,00**	**64**	**9.421.140.038,00**	**0**	**44.048.060,00**	**0**	**65.971.290,00**	**0**	**1.810.200.980,00**	**0**	**2.548.992.365,00**	**0**	**4.469.212.695,00**	**0%**	**47%**	**100**	**14.867.955.984,00**	**100%**	**11%**	
1	1	2	2.03	13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	Peserta Didik	350	1.274.367.075,00	0	515.091.938,00	175	386.444.038,00	0	21.004.060,00	15	39.550.290,00	0	80.678.980,00	56	78.691.690,00	71	219.925.020,00	41%	57%	71	735.016.958,00	20%	58%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	4000	13.995.000.000,00	1990	6.384.715.050,00	1000	3.600.000.000,00	0	0,00	0	0,00	500	1.709.700.000,00	500	1.683.000.000,00	1000	3.392.700.000,00	100%	94%	2990	9.777.415.050,00	75%	70%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	326	20.829.242.964,00	0	3.498.936.301,00	163	1.011.796.000,00	6	23.044.000,00	8	26.421.000,00	6	19.822.000,00	6	787.300.675,00	26	856.587.675,00	16%	85%	26	4.355.523.976,00	8%	21%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	163	4.422.900.000,00	0	0,00	163	4.422.900.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0%	0%	0	0,00	0%	0%	Dinas Pendidikan
1	**1**	**2**	**2.04**		**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**persentase lembaga non formal yang dikelola dengan baik**	**%**	**100**	**5.357.285.980,00**	**100**	**1.367.614.938,00**	**100**	**991.430.000,00**	**100**	**3.096.000,00**	**0**	**31.092.000,00**	**0**	**21.730.259,00**	**0**	**130.144.800,00**	**100**	**186.063.059,00**	**100%**	**19%**	**100**	**1.553.677.997,00**	**100%**	**3%**	
1	1	2	2.04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Peserta Didik	525	3.748.309.230,00	175	710.888.046,00	175	178.000.000,00	0	1.856.000,00	8	4.234.000,00	5	484.500,00	163	119.140.800,00	176	125.715.300,00	101%	71%	351	836.603.346,00	67%	22%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.04	16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	150	1.208.176.750,00	0	656.726.892,00	75	85.000.000,00	8	1.240.000,00	11	26.858.000,00	14	21.245.759,00	20	11.004.000,00	53	60.347.759,00	71%	71%	53	717.074.651,00	35%	59%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	4	400.800.000,00	0	0,00	4	728.430.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0%	0%	0	0,00	0%	0%	Dinas Pendidikan
1	**1**	**3**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	**Prosentase Sekolah berkurikulum SNP**	**%**	**100**	**14.695.824.830,00**	**100**	**3.266.779.999,00**	**100**	**4.807.339.116,00**	**100**	**214.244.000,00**	**100**	**1.462.267.023,00**	**100**	**919.252.957,00**	**100**	**1.687.913.993,00**	**100**	**4.283.677.973,00**	**100%**	**89%**	**100**	**7.550.457.972,00**	**100%**	**51%**	
1	**1**	**3**	**2.01**		**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar**	**persentase sekolah yang berkurikulum sesuai standar mutu**	**%**	**100**	**12.339.730.672,00**	**100**	**2.837.367.118,00**	**100**	**3.550.447.213,00**	**100**	**158.635.000,00**	**100**	**1.068.049.808,00**	**100**	**402.936.457,00**	**100**	**1.567.238.193,00**	**100**	**3.196.859.458,00**	**100%**	**90%**	**100**	**6.034.226.576,00**	**100%**	**26%**	
1	1	3	2.01	1	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	Dokumen	2	4.914.744.274,00	0	1.059.827.000,00	1	1.550.038.223,00	0	115.609.500,00	0	631.755.500,00	0	53.316.000,00	1	562.118.850,00	1	1.362.799.850,00	100%	88%	1	2.422.626.850,00	50%	49%	Dinas Pendidikan
1	1	3	2.01	2	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	Dokumen	2	3.900.453.830,00	0	777.593.247,00	1	1.112.630.191,00	0	39.190.500,00	0	314.154.800,00	0	76.694.780,00	1	581.470.343,00	1	1.011.510.423,00	100%	91%	1	1.789.103.670,00	50%	46%	Dinas Pendidikan
1	1	3	2.01	4	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	Orang	192	3.524.532.568,00	0	999.946.871,00	96	887.778.799,00	0	3.835.000,00	9	122.139.508,00	27	272.925.677,00	61	423.649.000,00	97	822.549.185,00	101%	93%	97	1.822.496.056,00	51%	52%	Dinas Pendidikan
1	**1**	**3**	**2.02**		**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal**	**persentase sekolah yang berkurikulum sesuai standar mutu**	**%**	**100**	**2.356.094.158,00**	**100**	**429.412.881,00**	**100**	**1.256.891.903,00**	**100**	**55.609.000,00**	**100**	**394.217.215,00**	**100**	**516.316.500,00**	**100**	**120.675.800,00**	**100**	**1.086.818.515,00**	**100%**	**86%**	**100**	**1.516.231.396,00**	**100%**	**46%**	
1	1	3	2.02	2	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	Dokumen	2	2.356.094.158,00		429.412.881,00	1	1.256.891.903,00	0	55.609.000,00	0	394.217.215,00	0	516.316.500,00	0	120.675.800,00	0	1.086.818.515,00	0%	86%	0	1.516.231.396,00	0%	64%	Dinas Pendidikan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1				2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
1	**1**	**4**		**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**Persentase Tenaga Pendidik Bersertifikasi yang Berprestasi**	**%**	**60**	**8.517.875.000,00**	**100**	**2.550.039.077,00**	**65**	**1.609.200.000,00**	**0**	**305.844.400,00**	**0**	**264.725.200,00**	**0**	**411.403.100,00**	**0**	**521.842.500,00**	**0**	**1.503.815.200,00**	**0%**	**93%**	**100**	**4.053.854.277,00**	**167%**	**48%**	
1	**1**	**4**	**2.01**	**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan**	**persentase tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi dan bersertifikasi**	**%**	**100**	**8.517.875.000,00**	**100**	**2.550.039.077,00**	**66**	**1.609.200.000,00**	**0**	**305.844.400,00**	**0**	**264.725.200,00**	**0**	**411.403.100,00**	**0**	**521.842.500,00**	**0**	**1.503.815.200,00**	**0%**	**93%**	**100**	**4.053.854.277,00**	**100%**	**18%**	
1	1	4	2.01	1 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dokumen	12	5.998.350.000,00	0	2.120.645.943,00	6	750.000.000,00	0	0,00	1	239.022.200,00	2	399.487.100,00	2	101.876.000,00	5	740.385.300,00	83%	99%	5	2.861.031.243,00	42%	48%	Dinas Pendidikan
1	1	4	2.01	2 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Laporan	4	2.519.525.000,00	0	429.393.134,00	2	859.200.000,00	1	305.844.400,00	0	25.703.000,00	0	11.916.000,00	0	419.966.500,00	1	763.429.900,00	50%	89%	1	1.192.823.034,00	25%	47%	Dinas Pendidikan
1	**2**			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**																									
1	**2**	**2**		**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target**	**%**	**77**	**325.400.392.418,00**	**74**	**134.894.306.710,00**	**75**	**100.394.234.912,00**	**0**	**5.994.295.925,00**	**0**	**15.024.115.008,00**	**0**	**23.580.785.211,00**	**75**	**51.505.104.796,00**	**75**	**96.104.300.940,00**	**100%**	**96%**	**75**	**230.998.607.650,00**	**97%**	**71%**	
1	**2**	**2**	**2.01**	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Indikator SPM Kesehatan Rujukan Mencapai Target**	**%**	**90,22**	**151.350.541.487,00**	**0**	**31.768.284.694,00**	**89**	**41.262.774.488,00**	**0**	**52.132.525,00**	**0**	**2.444.633.748,00**	**0**	**6.043.748.719,00**	**91**	**31.411.342.437,00**	**91,4**	**39.951.857.429,00**	**103%**	**97%**	**91**	**71.720.142.123,00**	**101%**	**47%**	
1	2	2	2.01	8 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit (RSUD)	Jumlah sarana, prasarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan program rehabilitasi dan pemeliharaan oleh rumah sakit	Unit	5	7.985.985.425,00	1	2.523.905.777,00	1	546.652.000,00	0	0,00	0		0	52.083.750,00	1	485.453.250,00	1	537.537.000,00	100%	98%	2	3.061.442.777,00	40%	38%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.01	9 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Unit	2	493.258.160,00	0	0,00	1	246.629.080,00	0	0,00	0	1.192.000,00	0	1.192.000,00	1	236.077.800,00	1	238.461.800,00	100%	97%	1	238.461.800,00	50%	48%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.01	12 Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan (RSUD)	Jumlah sarana di fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	Unit	5	79.232.096.871,00	2	3.152.084.550,00	3	22.862.791.500,00	0	0,00	0		0	2.236.832.500,00	1	20.625.958.976,00	1	22.862.791.476,00	33%	100%	3	26.014.876.026,00	60%	33%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.01	13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan (RSUD)	Jumlah prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	Unit	37	7.948.077.781,00	10	689.570.000,00	198	1.934.320.134,00	0	0,00	0		171	740.043.050,00	2	1.336.772.500,00	173	2.076.815.550,00	87%	107%	183	2.766.385.550,00	495%	35%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.01	14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	778	8.614.795.149,00	4	3.062.971.023,00	778	2.136.931.017,00	0	1.417.000,00	118	396.554.527,00	32	109.521.200,00	1042	1.477.815.712,00	1192	1.985.308.439,00	153%	93%	1196	5.048.279.462,00	154%	59%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.01	14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (RSUD)	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	Unit	33	23.849.613.724,00	20	4.789.029.316,00	57	3.828.686.000,00	0	0,00	0		51	1.266.000,00	6	3.288.686.000,00	57	3.289.952.000,00	100%	86%	77	8.078.981.316,00	233%	34%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.01	15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	Unit	1238	327.919.763,00	52	199.919.966,00	619	158.439.200,00	0	0,00	0	0,00	456	115.316.000,00	163	14.824.200,00	619	130.140.200,00	100%	82%	671	330.060.166,00	54%	101%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.01	16 Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	Paket	50	10.564.863.586,00	2	6.283.509.847,00	25	2.904.515.327,00	2	35.554.435,00	4	629.205.346,00	5	679.035.793,00	14	1.251.736.622,00	25	2.595.532.196,00	100%	89%	27	8.879.042.043,00	54%	84%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
1	2	2	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin (RSUD)	Jumlah obat dan vaksin yang disediakan	Paket	8	10.499.233.022,00	6	11.067.294.215,00	6	5.712.640.227,00	0	0,00	1	1.395.402.000,00		1.983.857.051,00	6	2.319.303.939,00	6	5.698.562.990,00	100%	100%	12	16.765.857.205,00	150%	160%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	Paket	8	1.303.580.006,00	0	0,00	4	651.790.003,00	0	0,00	0	0,00	2	81.928.000,00	2	338.433.698,00	4	420.361.698,00	100%	64%	4	420.361.698,00	50%	32%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit	167	208.760.000,00	0	0,00	162	104.380.000,00	0	15.161.090,00	36	22.279.875,00	50	19.345.375,00	77	30.939.740,00	163	87.726.080,00	101%	84%	163	87.726.080,00	98%	42%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Puskesmas Manguharjo)	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit	30	27.642.000,00	0	0,00	15	27.642.000,00					15	3.024.000,00	0	0,00	15	3.024.000,00	100%	11%	15	3.024.000,00	50%	11%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Puskesmas Ngegong)	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit	30	54.940.000,00	0	0,00	15	27.470.000,00	0	0,00	0	0,00	3	4.548.000,00	12	0,00	15	4.548.000,00	100%	17%	15	4.548.000,00	50%	8%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Puskesmas Sukosari)	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit	30	58.736.000,00	0	0,00	15	29.368.000,00	0	0,00	0	0,00	2	3.060.000,00	13	0,00	15	3.060.000,00	100%	10%	15	3.060.000,00	50%	5%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Puskesmas Tawangrejo)	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit	36	60.814.000,00	0	0,00	18	30.407.000,00	0	0,00	0	0,00	3	5.676.000,00	15	0,00	18	5.676.000,00	100%	19%	18	5.676.000,00	50%	9%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Puskesmas Banjarejo)	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit	30	62.572.000,00	0	0,00	15	31.286.000,00	0	0,00	0	0,00	2	7.020.000,00	17	0,00	19	7.020.000,00	127%	22%	19	7.020.000,00	63%	11%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Puskesmas Demangan)	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit	30	57.654.000,00	0	0,00	15	28.827.000,00	0	0,00	0	0,00	9	0,00	3	5.340.000,00	12	5.340.000,00	80%	19%	12	5.340.000,00	40%	9%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	**2**	**2**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Indikator SPM Kesehatan Dasar Mencapai Target**	**%**	**79**	**174.049.850.931,00**	**0**	**103.126.022.016,00**	**75**	**59.131.460.424,00**	**0**	**5.942.163.400,00**	**0**	**12.579.481.260,00**	**0**	**17.537.036.492,00**	**92**	**20.093.762.359,00**	**92**	**56.152.443.511,00**	**123%**	**95%**	**92**	**159.278.465.527,00**	**116%**	**92%**	
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	4980	8.454.617.574,00	0	6.907.810.478,00	2490	883.311.400,00	567	10.745.600,00	598	12.268.400,00	678	14.458.400,00	610	840.230.000,00	2453	877.702.400,00	99%	99%	2453	7.785.512.878,00	49%	92%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Manguharjo)	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	870	52.064.000,00	0	0,00	435	26.032.000,00	0	0,00	0	0,00	254	8.976.000,00	181	16.956.000,00	435	25.932.000,00	100%	100%	435	25.932.000,00	50%	50%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Ngegong)	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	596	60.850.400,00	0	0,00	298	30.425.200,00	0	0,00	0	0,00	214	19.230.000,00	298	11.148.000,00	298	30.378.000,00	100%	100%	298	30.378.000,00	50%	50%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Sukosari)	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	820	45.336.000,00	0	0,00	410	22.668.000,00	0	0,00	0	0,00	309	15.962.000,00	228	6.706.000,00	537	22.668.000,00	131%	100%	537	22.668.000,00	65%	50%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Tawangrejo)	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	596	43.580.800,00	0	0,00	298	21.790.400,00	0	0,00	0	0,00	224	14.029.600,00	298	7.760.800,00	298	21.790.400,00	100%	100%	298	21.790.400,00	50%	50%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Banjarejo)	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	1044	77.901.600,00	0	0,00	522	38.950.800,00	0	0,00	0	0,00	398	25.212.400,00	523	13.737.600,00	523	38.950.000,00	100%	100%	523	38.950.000,00	50%	50%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Demangan)	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	974	48.741.600,00	0	0,00	487	24.370.800,00					367	16.728.000,00	487	7.578.400,00	487	24.306.400,00	100%	100%	487	24.306.400,00	50%	50%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	4754	216.109.197,00	0	83.993.550,00	2377	49.007.200,00	642	10.929.600,00	573	5.683.600,00	519	15.288.400,00	613	15.005.600,00	2347	46.907.200,00	99%	96%	2347	130.900.750,00	49%	61%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	4528	231.292.367,00	0	120.023.180,00	2264	84.232.800,00	498	7.168.000,00	542	5.218.000,00	667	42.072.800,00	549	16.920.000,00	2256	71.378.800,00	100%	85%	2256	191.401.980,00	50%	83%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	18436	729.476.345,00	0	104.322.020,00	9218	242.621.000,00	0	0,00	0	0,00	7002	33.054.000,00	2097	202.885.910,00	9099	235.939.910,00	99%	97%	9099	340.261.930,00	49%	47%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (Puskesmas Manguharjo)	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	3746	7.500.000,00	0	0,00	1873	3.750.000,00	0	0,00	0	0,00	1574	0,00	299	3.650.000,00	1873	3.650.000,00	100%	97%	1873	3.650.000,00	50%	49%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (Puskesmas Ngegong)	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	2128	9.800.000,00	0	0,00	1064	4.900.000,00	0	0,00	0	0,00	841	200.000,00	1064	4.450.000,00	1064	4.650.000,00	100%	95%	1064	4.650.000,00	50%	47%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (Puskesmas Tawangrejo)	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	2082	11.400.000,00	0	0,00	1041	5.700.000,00	0	0,00	0	0,00	790	2.000.000,00	1041	3.700.000,00	1041	5.700.000,00	100%	100%	1041	5.700.000,00	50%	50%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (Puskesmas Demangan)	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	4220	22.700.000,00	0	0,00	2110	11.350.000,00					1832	0,00	2110	11.350.000,00	2110	11.350.000,00	100%	100%	2110	11.350.000,00	50%	50%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	63944	232.979.349,00	0	118.018.750,00	31972	97.973.500,00	31098	736.000,00	31102	4.226.000,00	31167	18.066.000,00	415	66.780.892,00	31167	89.808.892,00	97%	92%	31167	207.827.642,00	49%	89%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (Puskesmas Manguharjo)	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	7182	12.600.000,00	0	0,00	3591	6.300.000,00	0	0,00	0	0,00	3784	2.500.000,00	3591	3.500.000,00	3591	6.000.000,00	100%	95%	3591	6.000.000,00	50%	48%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (Puskesmas Ngegong)	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	15448	18.800.000,00	0	0,00	7724	9.400.000,00	0	0,00	0	0,00	7724	8.600.000,00	7724	800.000,00	7724	9.400.000,00	100%	100%	7724	9.400.000,00	50%	50%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (Puskesmas Tawangrejo)	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	4096	6.400.000,00	0	0,00	2048	3.200.000,00	0	0,00	0	0,00	2015	2.400.000,00	2048	800.000,00	2048	3.200.000,00	100%	100%	2048	3.200.000,00	50%	50%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (Puskesmas Banjarejo)	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	15210	12.400.000,00	0	0,00	7605	6.200.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7678	6.200.000,00	7678	6.200.000,00	101%	100%	7678	6.200.000,00	50%	50%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (Puskesmas Demangan)	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	15508	13.200.000,00	0	0,00	7754	6.600.000,00					7476	0,00	7754	6.600.000,00	7754	6.600.000,00	100%	100%	7754	6.600.000,00	50%	50%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	229328	977.855.817,00	0	330.652.500,00	114664	56.621.200,00	33284	4.872.000,00	31923	7.670.000,00	34894	29.399.200,00	126836	10.340.000,00	126836	52.281.200,00	111%	92%	126836	382.933.700,00	55%	39%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Sukosari)	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	40652	21.168.000,00	0	0,00	20326	10.584.000,00	0	0,00	0	0,00	22437	3.742.000,00	0	6.242.000,00	22437	9.984.000,00	110%	94%	22437	9.984.000,00	55%	47%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Banjarejo)	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	51050	9.300.000,00	0	0,00	25525	4.650.000,00	0	0,00	0	0,00	20756	3.700.000,00	27508	950.000,00	27508	4.650.000,00	108%	100%	27508	4.650.000,00	54%	50%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	57194	198.979.120,00	0	63.884.400,00	28597	50.753.600,00	0	368.000,00	5028	8.643.600,00	20200	18.446.000,00	11160	13.940.000,00	36388	41.397.600,00	127%	82%	36388	105.282.000,00	64%	53%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (Puskesmas Manguharjo)	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	9654	5.184.000,00	0	0,00	4827	2.592.000,00	0	0,00	0	0,00	2889	0,00	4862	2.392.000,00	4862	2.392.000,00	101%	92%	4862	2.392.000,00	50%	46%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (Puskesmas Ngegong)	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	6314	7.728.000,00	0	0,00	3157	3.864.000,00	0	0,00	0	0,00	2530	3.864.000,00	3226	0,00	3226	3.864.000,00	102%	100%	3226	3.864.000,00	51%	50%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (Puskesmas Sukosari)	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	7958	12.316.000,00	0	0,00	3979	6.158.000,00	0	0,00	0	0,00	3729	6.008.000,00	0	0,00	3729	6.008.000,00	94%	98%	3729	6.008.000,00	47%	49%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (Puskesmas Tawangrejo)	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	6532	14.880.000,00	0	0,00	3266	7.440.000,00	0	0,00	0	0,00	2977	7.440.000,00	3335	0,00	3335	7.440.000,00	102%	100%	3335	7.440.000,00	51%	50%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (Puskesmas Banjarejo)	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	15848	2.000.000,00	0	0,00	7924	1.000.000,00	0	0,00	0	0,00	7437	1.000.000,00	8267	0,00	8267	1.000.000,00	104%	100%	8267	1.000.000,00	52%	50%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (Puskesmas Demangan)	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	14846	10.664.000,00	0	0,00	7423	5.332.000,00					4969	5.332.000,00	7549	0,00	7549	5.332.000,00	102%	100%	7549	5.332.000,00	51%	50%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	137946	37.098.149,00	0	11.829.900,00	68973	13.548.000,00	0	0,00	0	0,00	34875	4.174.000,00	8095	7.974.000,00	42970	12.148.000,00	62%	90%	42970	23.977.900,00	31%	65%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	16286	92.677.318,00	0	25.780.850,00	8143	202.012.000,00	0	0,00	0	0,00	7641	1.250.000,00	784	191.083.200,00	8425	192.333.200,00	103%	95%	8425	218.114.050,00	52%	235%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	676	458.160.742,00	0	144.091.390,00	338	64.735.000,00	110	11.972.000,00	104	7.980.000,00	105	16.040.800,00	374	26.706.400,00	374	62.699.200,00	111%	97%	374	206.790.590,00	55%	45%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (Puskesmas Manguharjo)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	120	6.000.000,00	0	0,00	60	3.000.000,00	0	0,00	0	0,00	59	0,00	63	3.000.000,00	63	3.000.000,00	105%	100%	63	3.000.000,00	53%	50%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (Puskesmas Ngegong)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	74	2.000.000,00	0	0,00	37	1.000.000,00	0	0,00	0	0,00	45	700.000,00	45	300.000,00	45	1.000.000,00	122%	100%	45	1.000.000,00	61%	50%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (Puskesmas Tawangrejo)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	78	2.000.000,00	0	0,00	39	1.000.000,00	0	0,00	0	0,00	35	500.000,00	41	500.000,00	41	1.000.000,00	105%	100%	41	1.000.000,00	53%	50%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (Puskesmas Banjarejo)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	152	3.000.000,00	0	0,00	76	1.500.000,00	0	0,00	0	0,00	77	1.050.000,00	81	450.000,00	81	1.500.000,00	107%	100%	81	1.500.000,00	53%	50%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (Puskesmas Demangan)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	146	3.000.000,00	0	0,00	73	1.500.000,00					59	0,00	80	1.500.000,00	80	1.500.000,00	110%	100%	80	1.500.000,00	55%	50%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	10152	537.735.225,00	0	205.543.070,00	5076	53.440.000,00	0	0,00	0	8.312.000,00	2072	24.458.000,00	3691	17.522.000,00	5763	50.292.000,00	114%	94%	5763	255.835.070,00	57%	48%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (Puskesmas Manguharjo)	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	388	2.600.000,00	0	0,00	194	1.300.000,00	0	0,00	0	0,00	177	100.000,00	395	1.150.000,00	395	1.250.000,00	204%	96%	395	1.250.000,00	102%	48%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (Puskesmas Ngegong)	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	280	3.500.000,00	0	0,00	140	1.750.000,00	0	0,00	0	0,00	164	1.200.000,00	254	550.000,00	254	1.750.000,00	181%	100%	254	1.750.000,00	91%	50%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (Puskesmas Sukosari)	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	334	2.000.000,00	0	0,00	167	1.000.000,00	0	0,00	0	0,00	290	400.000,00	0	600.000,00	290	1.000.000,00	174%	100%	290	1.000.000,00	87%	50%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (Puskesmas Tawangrejo)	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	216	2.700.000,00	0	2,00	108	1.350.000,00	0	0,00	0	0,00	94	700.000,00	113	550.000,00	113	1.250.000,00	105%	93%	113	1.250.002,00	52%	46%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (Puskesmas Banjarejo)	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	324	4.500.000,00	0	0,00	162	2.250.000,00	0	0,00	0	0,00	0	550.000,00	356	950.000,00	356	1.500.000,00	220%	67%	356	1.500.000,00	110%	33%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (Puskesmas Demangan)	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	432	6.000.000,00	0	0,00	216	3.000.000,00					305	1.450.000,00	563	1.550.000,00	563	3.000.000,00	261%	100%	563	3.000.000,00	130%	50%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	11560	1.841.578.687,00	0	349.536.712,00	5780	199.463.200,00	50	9.800.000,00	3100	58.829.000,00	2200	19.248.000,00	6664	48.471.200,00	6664	136.348.200,00	115%	68%	6664	485.884.912,00	58%	26%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV (Puskesmas Manguharjo)	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	964	7.682.400,00	0	0,00	482	3.841.200,00	0	0,00	0	0,00	281	1.495.600,00	524	1.845.580,00	524	3.341.180,00	109%	87%	524	3.341.180,00	54%	43%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV (Puskesmas Sukosari)	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	1016	2.200.000,00	0	0,00	508	1.100.000,00	0	0,00	0	0,00	353	400.000,00	507	700.000,00	507	1.100.000,00	100%	100%	507	1.100.000,00	50%	50%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV (Puskesmas Tawangrejo)	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	684	1.000.000,00	0	0,00	342	500.000,00	0	0,00	0	0,00	312	250.000,00	389	250.000,00	389	500.000,00	114%	100%	389	500.000,00	57%	50%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV (Puskesmas Demangan)	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	1164	22.000.000,00	0	0,00	582	11.000.000,00					418	5.500.000,00	509	5.500.000,00	509	11.000.000,00	87%	100%	509	11.000.000,00	44%	50%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) (Puskesmas Manguharjo)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Dokumen	0	688.060.500,00	0	528.285.500,00	0	0,00	0	0,00	0		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0%	0%	0	528.285.500,00	#DIV/0!	77%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) (Puskesmas Ngegong)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Dokumen	0	584.016.000,00	0	474.871.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0%	0%	0	474.871.000,00	#DIV/0!	81%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) (Puskesmas Sukosari)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Dokumen	4	692.405.000,00	4	612.165.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	-	0	0,00	0%	0%	4	612.165.000,00	100%	88%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) (Puskesmas Tawangrejo)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Dokumen	4	576.500.820,00	4	512.909.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0%	0%	4	512.909.800,00	100%	89%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) (Puskesmas Banjarejo)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Dokumen	4	511.661.000,00	4	386.482.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0%	0%	4	386.482.500,00	100%	76%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) (Puskesmas Demangan)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Dokumen	4	545.045.000,00	8	444.537.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0%	0%	8	444.537.000,00	200%	82%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	6	603.791.602,00	0	4.309.797.930,00	3	1.488.729.800,00	0	2.208.000,00	0	30.602.000,00	1	66.154.400,00	2	1.357.967.249,00	3	1.456.931.649,00	100%	98%	3	5.766.729.579,00	50%	955%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Manguharjo)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	6	706.579.250,00	0	536.216.250,00	3	583.664.600,00	0	20.700.000,00	1	62.190.000,00	1	82.455.000,00	3	388.644.350,00	3	553.989.350,00	100%	95%	3	1.090.205.600,00	50%	154%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Ngegong)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	6	660.298.800,00	0	518.257.950,00	3	614.653.800,00	0	25.140.000,00	0	110.265.000,00	2	97.755.000,00	3	373.096.000,00	3	606.256.000,00	100%	99%	3	1.124.513.950,00	50%	170%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Sukosari)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	16	696.963.210,00	10	694.038.180,00	3	739.242.200,00	0	24.150.000,00	1	148.695.000,00	1	131.130.000,00	1	349.230.600,00	3	653.205.600,00	100%	88%	13	1.347.243.780,00	81%	193%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Tawangrejo)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	15	546.383.130,00	9	546.301.130,00	3	570.850.600,00	0	24.000.000,00	1	92.835.000,00	1	66.240.000,00	3	381.848.550,00	3	564.923.550,00	100%	99%	12	1.111.224.680,00	80%	203%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Banjarejo)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	15	1.041.364.070,00	9	971.369.680,00	3	1.028.370.800,00	0	44.580.000,00	1	108.600.000,00	1	313.005.000,00	3	561.658.000,00	3	1.027.843.000,00	100%	100%	12	1.999.212.680,00	80%	192%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Demangan)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	15	735.674.980,00	9	735.407.980,00	3	849.704.400,00	0	0,00	1	220.125.000,00	2	157.725.000,00	3	471.237.100,00	3	849.087.100,00	100%	100%	12	1.584.495.080,00	80%	215%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	6	651.887.986,00	0	601.530.320,00	3	207.449.500,00	0	34.896.000,00	1	48.023.000,00	1	14.689.000,00	1	89.778.500,00	3	187.386.500,00	100%	90%	3	788.916.820,00	50%	121%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Puskesmas Manguharjo)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	2	55.924.000,00	0	0,00	1	27.962.000,00	0	0,00	0	0,00	0	4.912.000,00	1	23.004.000,00	1	27.916.000,00	100%	100%	1	27.916.000,00	50%	50%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Puskesmas Ngegong)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	2	30.280.000,00	0	0,00	1	15.140.000,00	0	0,00	0	0,00	1	14.940.000,00	1	200.000,00	1	15.140.000,00	100%	100%	1	15.140.000,00	50%	50%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Puskesmas Sukosari)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	2	1.200.000,00	0	0,00	1	600.000,00	0	0,00	0	0,00	1	400.000,00	0	200.000,00	1	600.000,00	100%	100%	1	600.000,00	50%	50%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Puskesmas Tawangrejo)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	2	14.499.200,00	0	0,00	1	7.249.600,00	0	0,00	0	0,00	1	5.014.000,00	1	2.234.000,00	1	7.248.000,00	100%	100%	1	7.248.000,00	50%	50%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Puskesmas Banjarejo)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	2	65.932.000,00	0	0,00	1	32.966.000,00	0	0,00	0	0,00	1	20.206.000,00	1	12.760.000,00	1	32.966.000,00	100%	100%	1	32.966.000,00	50%	50%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Puskesmas Demangan)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	2	78.270.600,00	0	0,00	1	39.135.300,00					0	2.650.000,00	1	36.460.000,00	1	39.110.000,00	100%	100%	1	39.110.000,00	50%	50%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	10	2.046.882.964,00	0	848.111.507,00	5	115.042.400,00	0	1.668.800,00	0	4.618.400,00	5	26.189.600,00	0	65.251.900,00	5	97.728.700,00	100%	85%	5	945.840.207,00	50%	46%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Manguharjo)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	2	15.167.600,00	0	0,00	1	7.583.800,00	0	0,00	0	0,00	0	1.837.000,00	1	2.112.000,00	1	3.949.000,00	100%	52%	1	3.949.000,00	50%	26%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Ngegong)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	2	25.048.000,00	0	0,00	1	12.524.000,00	0	0,00	0	0,00	1	12.184.000,00	1	340.000,00	1	12.524.000,00	100%	100%	1	12.524.000,00	50%	50%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Sukosari)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	2	35.846.800,00	0	0,00	1	17.923.400,00	0	0,00	0	0,00	0	7.125.000,00	1	7.772.500,00	1	14.897.500,00	100%	83%	1	14.897.500,00	50%	42%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Tawangrejo)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	2	43.038.000,00	0	0,00	1	21.519.000,00	0	0,00	0	0,00	0	15.148.500,00	1	5.492.000,00	1	20.640.500,00	100%	96%	1	20.640.500,00	50%	48%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Banjarejo)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	2	19.587.800,00	0	0,00	1	9.793.900,00	0	0,00	0	0,00	0	7.879.100,00	1	1.681.500,00	1	9.560.600,00	100%	98%	1	9.560.600,00	50%	49%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Demangan)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	2	16.126.600,00	0	0,00	1	8.063.300,00					0	2.019.000,00	1	5.769.100,00	1	7.788.100,00	100%	97%	1	7.788.100,00	50%	48%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Puskesmas Manguharjo)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	2	256.867.200,00	0	0,00	1	128.433.600,00	0	0,00	0	0,00	0	85.406.400,00	1	43.027.200,00	1	128.433.600,00	100%	100%	1	128.433.600,00	50%	50%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Puskesmas Ngegong)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	6	254.361.200,00	0	0,00	3	127.180.600,00	0	0,00	0	0,00	2	82.670.000,00	3	44.504.800,00	3	127.174.800,00	100%	100%	3	127.174.800,00	50%	50%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Puskesmas Sukosari)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	6	204.752.800,00	0	0,00	3	102.376.400,00	0	0,00	0	0,00	1	59.946.000,00	2	42.418.000,00	3	102.364.000,00	100%	100%	3	102.364.000,00	50%	50%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Puskesmas Tawangrejo)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	6	202.776.000,00	0	0,00	3	101.388.000,00	0	0,00	0	0,00	2	64.352.000,00	3	37.036.000,00	3	101.388.000,00	100%	100%	3	101.388.000,00	50%	50%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Puskesmas Banjarejo)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	6	133.076.800,00	0	0,00	3	66.538.400,00	0	0,00	0	0,00	2	47.224.000,00	3	13.554.400,00	3	60.778.400,00	100%	91%	3	60.778.400,00	50%	46%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Puskesmas Demangan)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	6	170.942.400,00	0	0,00	3	85.471.200,00					1	21.578.400,00	3	63.892.800,00	3	85.471.200,00	100%	100%	3	85.471.200,00	50%	50%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	6	2.615.586.425,00	0	2.390.680.825,00	3	112.452.800,00	0	3.000.000,00	1	54.113.200,00	2	28.125.200,00	0	10.614.400,00	3	95.852.800,00	100%	85%	3	2.486.533.625,00	50%	95%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Puskesmas Manguharjo)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	4	19.628.000,00	0	0,00	2	9.814.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	7.014.000,00	2	7.014.000,00	100%	71%	2	7.014.000,00	50%	36%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1						2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
									K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
1	2	2	2.02	20		Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Puskesmas Ngegong)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	4	5.300.000,00	0	0,00	2	2.650.000,00	0	0,00	0	0,00	1	2.000.000,00	2	350.000,00	2	2.350.000,00	100%	89%	2	2.350.000,00	50%	44%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	20		Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Puskesmas Sukosari)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	4	18.400.000,00	0	0,00	2	9.200.000,00	0	0,00	0	0,00	1	4.800.000,00	1	2.000.000,00	2	6.800.000,00	100%	74%	2	6.800.000,00	50%	37%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	20		Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Puskesmas Tawangrejo)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	4	14.907.200,00	0	0,00	2	7.453.600,00	0	0,00	0	0,00	0	1.900.000,00	2	3.853.600,00	2	5.753.600,00	100%	77%	2	5.753.600,00	50%	39%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	20		Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Puskesmas Banjarejo)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	4	6.400.000,00	0	0,00	2	3.200.000,00	0	0,00	0	0,00	1	1.500.000,00	2	150.000,00	2	1.650.000,00	100%	52%	2	1.650.000,00	50%	26%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	20		Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Puskesmas Demangan)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	4	18.400.000,00	0	0,00	2	9.200.000,00					0	2.800.000,00	2	1.000.000,00	2	3.800.000,00	100%	41%	2	3.800.000,00	50%	21%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	21		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	678	72.696.000,00	0	0,00	339	36.348.000,00	281	0,00	307	0,00	319	0,00	55	34.730.200,00	374	34.730.200,00	110%	96%	374	34.730.200,00	55%	48%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	22		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	676	619.564.467,00	0	168.101.932,00	338	55.294.000,00	275	4.800.000,00	293	7.200.000,00	319	29.791.200,00	55	11.072.000,00	374	52.863.200,00	111%	96%	374	220.965.132,00	55%	36%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	22		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA (Puskesmas Manguharjo)	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	120	2.000.000,00	0	0,00	60	1.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	200.000,00	60	800.000,00	60	1.000.000,00	100%	100%	60	1.000.000,00	50%	50%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	22		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA (Puskesmas Ngegong)	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	74	200.000,00	0	0,00	37	100.000,00	0	0,00	0	0,00	0	50.000,00	37	50.000,00	37	100.000,00	100%	100%	37	100.000,00	50%	50%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	22		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA (Puskesmas Tawangrejo)	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	78	4.800.000,00	0	0,00	39	2.400.000,00	0	0,00	0	0,00	12	1.200.000,00	39	1.200.000,00	39	2.400.000,00	100%	100%	39	2.400.000,00	50%	50%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	25		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	4	780.919.926,00	0	811.306.938,00	2	475.514.250,00	0	19.165.000,00	0	20.006.000,00	2	114.493.100,00	0	221.133.700,00	2	374.797.800,00	100%	79%	2	1.186.104.738,00	50%	152%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	25		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Puskesmas Manguharjo)	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	2	108.877.600,00	0	0,00	1	54.438.800,00	0	0,00	0	0,00	0	21.863.200,00	1	28.931.600,00	1	50.794.800,00	100%	93%	1	50.794.800,00	50%	47%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	25		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Puskesmas Ngegong)	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	2	57.416.000,00	0	0,00	1	28.708.000,00	0	0,00	0	0,00	0	17.454.000,00	1	10.654.000,00	1	28.108.000,00	100%	98%	1	28.108.000,00	50%	49%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	25		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Puskesmas Sukosari)	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	2	69.904.000,00	0	0,00	1	34.952.000,00	0	0,00	0	0,00	1	25.352.000,00	0	9.100.000,00	1	34.452.000,00	100%	99%	1	34.452.000,00	50%	49%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Puskesmas Tawangrejo)	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	2	83.505.600,00	0	0,00	1	41.752.800,00	0	0,00	0	0,00	0	29.328.000,00	1	11.824.800,00	1	41.152.800,00	100%	99%	1	41.152.800,00	50%	49%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Puskesmas Banjarejo)	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	2	93.940.000,00	0	0,00	1	46.970.000,00	0	0,00	0	0,00	0	29.129.600,00	1	16.690.400,00	1	45.820.000,00	100%	98%	1	45.820.000,00	50%	49%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Puskesmas Demangan)	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	2	70.928.000,00	0	0,00	1	35.464.000,00					0	7.682.000,00	1	27.082.000,00	1	34.764.000,00	100%	98%	1	34.764.000,00	50%	49%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	72	112.527.707.750,00	0	64.377.775.524,00	36	33.448.581.200,00	3	5.558.928.100,00	15	10.385.381.900,00	9	7.965.948.000,00	9	8.040.294.580,00	36	31.950.552.580,00	100%	96%	36	96.328.328.104,00	50%	86%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional (Puskesmas Manguharjo)	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Paket	2	832.000,00	0	0,00	1	416.000,00	0	0,00	0	0,00	0	89.700,00	1	326.300,00	1	416.000,00	100%	100%	1	416.000,00	50%	50%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional (Puskesmas Ngegong)	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Paket	2	332.800,00	0	0,00	1	166.400,00	0	0,00	0	0,00	0	83.200,00	1	0,00	1	83.200,00	100%	50%	1	83.200,00	50%	25%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional (Puskesmas Sukosari)	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Paket	2	832.000,00	0	0,00	1	416.000,00	0	0,00	0	0,00	1	332.800,00	0	0,00	1	332.800,00	100%	80%	1	332.800,00	50%	40%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional (Puskesmas Tawangrejo)	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Paket	2	832.000,00	0	0,00	1	416.000,00	0	0,00	0	0,00	0	166.400,00	1	0,00	1	166.400,00	100%	40%	1	166.400,00	50%	20%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional (Puskesmas Banjarejo)	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Paket	2	998.400,00	0	0,00	1	499.200,00	0	0,00	0	0,00	1	249.600,00	0	83.200,00	1	332.800,00	100%	67%	1	332.800,00	50%	33%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional (Puskesmas Demangan)	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Paket	2	832.000,00	0	0,00	1	416.000,00					0	259.500,00	1	0,00	1	259.500,00	100%	62%	1	259.500,00	50%	31%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Demangan)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	18	3.126.467.523,00	10		4	2.113.717.000,00	0	0,00	0	0,00	2	1.316.598.885,00	4	646.113.381,00	4	1.962.712.266,00	100%	93%	14	1.962.712.266,00	78%	63%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Dokumen	20	1.295.071.863,00	0	539.957.240,00	10	324.109.600,00	1	17.674.000,00	3	25.062.000,00	4	54.925.500,00	1	101.906.000,00	9	199.567.500,00	90%	62%	9	739.524.740,00	45%	57%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Manguharjo)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	8	2.434.428.833,00	0	1.263.061.021,00	4	2.108.353.500,00	0	0,00	0		2	1.263.252.696,00	4	674.449.462,00	4	1.937.702.158,00	100%	92%	4	3.200.763.179,00	50%	131%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Ngegong)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	8	2.779.172.501,00	0	1.429.027.262,00	4	1.663.487.100,00	0	0,00	0	0,00	3	1.046.834.854,00	4	586.946.826,00	4	1.633.781.680,00	100%	98%	4	3.062.808.942,00	50%	110%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Sukosari)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	18	3.162.640.296,00	10	1.256.410.415,00	4	1.844.816.500,00	0	0,00	0	0,00	4	1.157.385.844,00	0	608.308.669,00	4	1.765.694.513,00	100%	96%	14	3.022.104.928,00	78%	96%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Tawangrejo)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	18	1.359.336.366,00	10	1.461.344.103,00	4	1.744.300.500,00	0	0,00	0	0,00	3	1.107.161.947,00	4	579.310.064,00	4	1.686.472.011,00	100%	97%	14	3.147.816.114,00	78%	232%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Banjarejo)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	18	2.529.704.450,00	10	252.601.234,00	4	2.320.312.000,00	0	0,00	0	0,00	3	1.395.125.666,00	4	841.244.062,00	4	2.236.369.728,00	100%	96%	14	2.488.970.962,00	78%	98%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dokumen	14	8.511.906.005,00	0	6.369.502.674,00	7	2.376.233.374,00	2	23.467.500,00	3	950.007.760,00	1	1.876.000,00	1	1.146.393.584,00	7	2.121.744.844,00	100%	89%	7	8.491.247.518,00	50%	100%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Unit	12	1.339.514.898,00	0	167.884.419,00	6	220.947.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6	191.905.400,00	6	191.905.400,00	100%	87%	6	359.789.819,00	50%	27%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Puskesmas Manguharjo)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan	2	400.000,00	0	0,00	1	200.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	1	0,00	100%	0%	1	0,00	50%	0%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Puskesmas Ngegong)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan	2	500.000,00	0	0,00	1	250.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	100.000,00	1	100.000,00	100%	40%	1	100.000,00	50%	20%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Puskesmas Sukosari)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan	2	500.000,00	0	0,00	1	250.000,00	0	0,00	0	0,00	1	250.000,00	0	0,00	1	250.000,00	100%	100%	1	250.000,00	50%	50%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Puskesmas Tawangrejo)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan	2	400.000,00	0	0,00	1	200.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	200.000,00	1	200.000,00	100%	100%	1	200.000,00	50%	50%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Puskesmas Banjarejo)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan	2	2.400.000,00	0	0,00	1	1.200.000,00	0	0,00	0	0,00	1	1.200.000,00	1	0,00	1	1.200.000,00	100%	100%	1	1.200.000,00	50%	50%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Puskesmas Demangan)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan	2	1.000.000,00	0	0,00	1	500.000,00					0	0,00	1	500.000,00	1	500.000,00	100%	100%	1	500.000,00	50%	50%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis (Puskesmas Demangan)	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	40	1.500.000,00	0	0,00	20	750.000,00					16	200.000,00	20	150.000,00	20	350.000,00	100%	47%	20	350.000,00	50%	23%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria (Puskesmas Demangan)	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Orang	2	200.000,00	0	0,00	1	100.000,00					0	0,00	0	0,00	0	0,00	0%	0%	0	0,00	0%	0%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Unit	2	2.782.000.026,00	100	1.452.599.900,00	1	683.036.000,00	0	81.194.800,00	0	192.926.400,00	1	97.918.000,00	0	301.934.000,00	1	673.973.200,00	100%	99%	101	2.126.573.100,00	5050%	76%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
1	2	2	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis (Puskesmas Manguharjo)	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	58	2.000.000,00	0	0,00	29	1.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	28	1.000.000,00	28	1.000.000,00	97%	100%	28	1.000.000,00	48%	50%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis (Puskesmas Ngegong)	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	38	2.000.000,00	0	0,00	19	1.000.000,00	0	0,00	0		18	700.000,00	21	300.000,00	21	1.000.000,00	111%	100%	21	1.000.000,00	55%	50%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis (Puskesmas Sukosari)	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	2	2.000.000,00	0	0,00	1	1.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	400.000,00	1	500.000,00	1	900.000,00	100%	90%	1	900.000,00	50%	45%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis (Puskesmas Tawangrejo)	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	26	800.000,00	0	0,00	13	400.000,00	0	0,00	0	0,00	10	150.000,00	13	250.000,00	13	400.000,00	100%	100%	13	400.000,00	50%	50%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis (Puskesmas Banjarejo)	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	24	1.000.000,00	0	0,00	12	500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	50.000,00	37	200.000,00	37	250.000,00	308%	50%	37	250.000,00	154%	25%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis (Puskesmas Demangan)	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	40	1.500.000,00	0	0,00	20	750.000,00					16	200.000,00	20	150.000,00	20	350.000,00	100%	47%	20	350.000,00	50%	23%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria (Puskesmas Manguharjo)	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Orang	10	200.000,00	0	0,00	5	100.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0%	0%	0	0,00	0%	0%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria (Puskesmas Ngegong)	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Orang	2	200.000,00	0	0,00	1	100.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0%	0%	0	0,00	0%	0%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria (Puskesmas Sukosari)	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Orang	2	200.000,00	0	0,00	1	100.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0%	0%	0	0,00	0%	0%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria (Puskesmas Tawangrejo)	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Orang	2	200.000,00	0	0,00	1	100.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0%	0%	0	0,00	0%	0%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria (Puskesmas Banjarejo)	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Orang	2	200.000,00	0	0,00	1	100.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0%	0%	0	0,00	0%	0%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria (Puskesmas Demangan)	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Orang	2	200.000,00	0	0,00	1	100.000,00					0	0,00	0	0,00	0	0,00	0%	0%	0	0,00	0%	0%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1				2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
1	**2**	**3**		**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**																									
1	**2**	**3**	**2.02**	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**																									
1	2	3	2.02	3 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen	12	84.838.000,00	0	0,00	6	42.419.000,00	0	0,00	-	0,00	2	18.071.000,00	4	24.348.000,00	6	42.419.000,00	100%	100%	6	42.419.000,00	50%	50%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	**2**	**3**	**2.03**	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya**	**Orang**	**1000**	**1.450.873.482,00**	**0**	**299.658.250,00**	**500**	**1.179.147.900,00**	**98**	**47.153.000,00**	**72**	**39.347.850,00**	**430**	**413.315.000,00**	**15**	**525.221.424,00**	**615**	**1.025.037.274,00**	**123%**	**87%**	**615**	**1.324.695.524,00**	**62%**	**91%**	
1	2	3	2.03	1 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Orang	1000	795.029.682,00	0	299.658.250,00	500	851.226.000,00	98	47.153.000,00	72	39.347.850,00	430	243.751.000,00	15	376.545.024,00	615	706.796.874,00	123%	83%	615	1.006.455.124,00	62%	127%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	5	2.03	1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Ngegong)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	2	84.468.000,00	0	0,00	1	42.234.000,00	0	0,00	0	0,00	0	21.742.000,00	1	20.492.000,00	1	42.234.000,00	100%	100%	1	42.234.000,00	50%	50%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	5	2.03	1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Sukosari)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	2	228.824.000,00	0	0,00	1	114.412.000,00	0	0,00	0	0,00	0	50.462.400,00	1	60.082.000,00	1	110.544.400,00	100%	97%	1	110.544.400,00	50%	48%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	5	2.03	1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Tawangrejo)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	2	146.504.000,00	0	0,00	1	73.252.000,00	0	0,00	0	0,00	0	41.114.000,00	1	29.588.000,00	1	70.702.000,00	100%	97%	1	70.702.000,00	50%	48%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	5	2.03	1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Banjarejo)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	2	126.379.800,00	0	0,00	1	63.189.900,00	0	0,00	0	0,00	0	41.485.600,00	1	20.240.400,00	1	61.726.000,00	100%	98%	1	61.726.000,00	50%	49%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	5	2.03	1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Demangan)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	2	69.668.000,00	0	0,00	1	34.834.000,00						14.760.000,00	1	18.274.000,00	1	33.034.000,00	100%	95%	1	33.034.000,00	50%	47%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	**2**	**4**		**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**Persentase Fasilitas Pelayanan Farmasi, Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) dan Depot Air Minum (DAM) sesuai Standar**	**%**	**89**	**902.553.576,00**	**87**	**199.805.941,00**	**88**	**91.395.000,00**	**0**	**15.656.200,00**	**0**	**16.614.000,00**	**88**	**10.280.800,00**	**89**	**33.160.300,00**	**88,5**	**75.711.300,00**	**101%**	**83%**	**89**	**275.517.241,00**	**99%**	**31%**	
1	**2**	**4**	**2.01**	**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	**Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	**Dokumen**	**4**	**802.237.581,00**	**0**	**170.733.551,00**	**2**	**58.600.000,00**	**0**	**15.656.200,00**	**0**	**4.714.400,00**	**1**	**0,00**	**1**	**24.214.700,00**	**2**	**44.585.300,00**	**100%**	**76%**	**100**	**215.318.851,00**	**2500%**	**27%**	
1	2	4	2.01	1 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dokumen	4	802.237.581,00	0	170.733.551,00	2	58.600.000,00	0	15.656.200,00	0	4.714.400,00	1	0,00	1	24.214.700,00	2	44.585.300,00	100%	76%	2	215.318.851,00	50%	27%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1				2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
1	**2**	**4**	**2.04**	**Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)**	**Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)**	**Dokumen**	**6**	**100.315.995,00**	**0**	**29.072.390,00**	**3**	**32.795.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**11.899.600,00**	**2**	**10.280.800,00**	**1**	**8.945.600,00**	**3**	**31.126.000,00**	**100%**	**95%**	**100**	**60.198.390,00**	**1667%**	**60%**	
1	2	4	2.04	1 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Dokumen	6	100.315.995,00	0	29.072.390,00	3	32.795.000,00	0		0	11.899.600,00	2	10.280.800,00	1	8.945.600,00	3	31.126.000,00	100%	95%	3	60.198.390,00	50%	60%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	**2**	**5**		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang mengalami kenaikan strata**	**%**	**63**	**5.875.105.104,00**	**61**	**2.185.336.788,00**	**63**	**2.893.531.836,00**	**0**	**165.352.800,00**	**0**	**575.317.400,00**	**47**	**538.563.290,00**	**17**	**1.512.870.976,00**	**64**	**2.792.104.466,00**	**102%**	**96%**	**64**	**4.977.441.254,00**	**101%**	**85%**	
1	**2**	**5**	**2.01**	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat**	**Dokumen**	**2**	**1.175.985.504,00**	**0**	**524.341.318,00**	**1**	**543.972.036,00**	**0**	**28.586.800,00**	**0**	**17.395.400,00**	**1**	**78.406.590,00**	**0**	**349.969.691,00**	**1**	**474.358.481,00**	**100%**	**87%**	**100**	**998.699.799,00**	**5000%**	**85%**	
1	2	5	2.01	1 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dokumen	2	1.175.985.504,00	0	524.341.318,00	1	543.972.036,00	0	28.586.800,00	0	17.395.400,00	1	78.406.590,00	0	349.969.691,00	1	474.358.481,00	100%	87%	1	998.699.799,00	50%	85%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	**2**	**5**	**2.03**	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)**	**Dokumen**	**3**	**4.699.119.600,00**	**0**	**1.660.995.470,00**	**1**	**2.349.559.800,00**	**0**	**136.766.000,00**	**1**	**557.922.000,00**	**1**	**460.156.700,00**	**0**	**1.162.901.285,00**	**1**	**2.317.745.985,00**	**100%**	**99%**	**100**	**3.978.741.455,00**	**3333%**	**85%**	
1	2	5	2.03	1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	3	4.699.119.600,00	0	1.660.995.470,00	1	2.349.559.800,00	0	136.766.000,00	1	557.922.000,00	1	460.156.700,00	0	1.162.901.285,00	1	2.317.745.985,00	100%	99%	1	3.978.741.455,00	33%	85%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	**3**			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**																									
1	**3**	**2**		**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Persentase Rawan Banjir/Genangan**	**%**	**12**	**74.397.300.310,00**	**10**	**14.931.897.846,00**	**18,47**	**7.384.071.500,00**	**0**	**146.056.500,00**	**0**	**394.840.487,00**	**0**	**2.102.528.923,00**	**18**	**4.367.062.206,00**	**18**	**7.010.488.116,00**	**97%**	**95%**	**18,47**	**14.394.559.616,00**	**154%**	**19%**	
					Persentase ketaatan terhadap RTRW	**%**	**100**		**0**		**100**		**0**		**0**		**0**		**100**		**100**		**100%**		**100**		**100%**		
1	**3**	**2**	**2.01**	**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase rawan Genangan**	**%**	**12**	**74.397.300.310,00**	**10**	**14.931.897.846,00**	**18,47**	**7.384.071.500,00**	**0**	**146.056.500,00**	**0**	**394.840.487,00**	**0**	**2.102.528.923,00**		**4.367.062.206,00**	**0**	**7.010.488.116,00**	**0%**	**95%**	**10**	**21.942.385.962,00**	**83%**	**9%**	
1	3	2	2.01	28 Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Direhabilitasi	Unit	4	1.193.190.630,00	2	1.902.455.750,00	2	235.100.000,00	0	0,00	0	0,00	0	11.739.360,00	2	217.438.470,00	2	229.177.830,00	100%	97%	4	2.131.633.580,00	100%	179%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	2	2.01	38 Peningkatan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Ditingkatkan	Unit	4	12.130.350.000,00	0	0,00	2	2.123.400.000,00	0	0,00	0	0,00	0	153.250,00	4	2.116.700.000,00	4	2.116.853.250,00	200%	100%	4	2.116.853.250,00	100%	17%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	2	2.01	46 Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	KM	6	57.769.028.780,00	3	11.082.479.830,00	0,5	3.927.242.500,00	0	26.647.500,00	0	56.833.080,00	0	1.947.246.200,00		1.765.460.736,00	0	3.796.187.516,00	0%	97%	3	14.878.667.346,00	50%	26%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	2	2.01	55 Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit	2	3.304.730.900,00	0	1.946.962.266,00	1	1.098.329.000,00	0	119.409.000,00	0	338.007.407,00	0	143.390.113,00	1	267.463.000,00	1	868.269.520,00	100%	79%	1	2.815.231.786,00	50%	85%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	**3**	**3**		**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**Persentase rumah tangga yang terlayani kebutuhan air minum**	**%**	**100**	**101.669.000,00**	**100**	**350.000,00**	**100**	**21.269.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**100**	**20.095.000,00**	**100**	**20.095.000,00**	**100%**	**94%**	**100**	**20.445.000,00**	**100%**	**20%**	
1	**3**	**3**	**2.01**	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase rumah tangga yang terlayani kebutuhan air minum**	**%**	**100**	**101.669.000,00**	**100**	**350.000,00**	**100**	**21.269.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**100**	**20.095.000,00**	**100**	**20.095.000,00**	**100%**	**94%**	**100**	**20.445.000,00**	**100%**	**20%**	
1	3	3	2.01	1 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	Dokumen	3	101.669.000,00	0	350.000,00	1	21.269.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	20.095.000,00	1	20.095.000,00	100%	94%	1	20.445.000,00	33%	20%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1				2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
1	**3**	**6**		**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**Persentase panjang drainase dalam kondisi baik**	**%**	**95**	**134.163.438.030,00**	**0**	**34.284.565.104,00**	**80,09**	**16.872.319.750,00**	**0**	**300.098.789,00**	**0**	**1.669.794.797,00**	**0**	**5.498.142.959,00**	**80**	**8.879.923.928,00**	**80**	**16.347.960.473,00**	**100%**	**97%**	**80**	**50.632.525.577,00**	**84%**	**38%**	
1	**3**	**6**	**2.01**	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase panjang drainase dalam kondisi baik**	**%**	**95**	**134.163.438.030,00**	**0**	**34.284.565.104,00**	**80,09**	**16.872.319.750,00**	**0**	**300.098.789,00**	**0**	**1.669.794.797,00**	**0**	**5.498.142.959,00**	**80**	**8.879.923.928,00**	**80**	**16.347.960.473,00**	**100%**	**97%**	**80**	**50.632.525.577,00**	**84%**	**12%**	
1	3	6	2.01	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun	Dokumen	32	4.696.654.000,00	15	1.000.354.668,00	20	934.450.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	20	762.260.900,00	20	762.260.900,00	100%	82%	35	1.762.615.568,00	109%	38%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	6	2.01	5	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun	M	16	115.844.751.460,00	0	29.276.886.437,00	100	13.295.841.000,00	0	0,00	0	884.947.707,00	0	5.080.802.619,00	100	7.134.177.600,00	100	13.099.927.926,00	100%	99%	100	42.376.814.363,00	625%	37%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	6	2.01	9	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara	M	16	13.622.032.570,00	0	4.007.323.999,00	100	2.642.028.750,00	19	300.098.789,00	25	784.847.090,00	19	417.340.340,00	37	983.485.428,00	100	2.485.771.647,00	100%	94%	100	6.493.095.646,00	625%	48%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	**3**	**8**		**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Persentase Bangunan Sesuai Ketentuan**	**%**	**100**	**40.224.620.052,00**	**100**	**35.346.724.111,00**	**100**	**46.306.881.500,00**	**0**	**2.592.100,00**	**0**	**3.706.682.200,00**	**0**	**13.506.869.100,00**	**100**	**25.682.678.555,00**	**100**	**42.898.821.955,00**	**100%**	**93%**	**100**	**78.245.546.066,00**	**100%**	**195%**	
1	**3**	**8**	**2.01**	**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	**Persentase bangunan gedung sesuai ketentuan**	**%**	**100**	**40.224.620.052,00**	**100**	**35.346.724.111,00**	**100**	**46.306.881.500,00**	**0**	**2.592.100,00**	**0**	**3.706.682.200,00**	**0**	**13.506.869.100,00**	**100**	**25.682.678.555,00**	**100**	**42.898.821.955,00**	**100%**	**93%**	**200**	**78.245.546.066,00**	**200%**	**107%**	
1	3	8	2.01	1	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Dokumen	200	321.200.000,00	140	300.000.000,00	5	242.900.000,00	0	2.592.100,00	0	0,00	2	86.581.700,00	3	135.504.500,00	5	224.678.300,00	100%	92%	145	524.678.300,00	73%	163%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	8	2.01	2	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	16	39.903.420.052,00	0	35.046.724.111,00	40	46.063.981.500,00	0	0,00	2	3.706.682.200,00	0	13.420.287.400,00	39	25.547.174.055,00	41	42.674.143.655,00	103%	93%	41	77.720.867.766,00	256%	195%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	**3**	**9**		**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	**Persentase Bangunan Sesuai Ketentuan**	**%**	**100**	**34.437.976.602,00**	**100**	**29.410.240.642,00**	**100**	**12.877.487.200,00**	**0**	**1.305.498.400,00**	**0**	**3.065.002.864,00**	**0**	**3.063.499.500,00**	**100**	**4.884.272.454,00**	**100**	**12.318.273.218,00**	**100%**	**96%**	**100**	**41.728.513.860,00**	**100%**	**121%**	
1	**3**	**9**	**2.01**	**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Bangunan sesuai Ketentuan**	**%**	**100**	**34.437.976.602,00**	**100**	**29.410.240.642,00**	**100**	**12.877.487.200,00**	**0**	**1.305.498.400,00**	**0**	**3.065.002.864,00**	**0**	**3.063.499.500,00**	**100**	**4.884.272.454,00**	**100**	**12.318.273.218,00**	**100%**	**96%**	**200**	**41.728.513.860,00**	**200%**	**36%**	
1	3	9	2.01	3	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Kawasan	108	33.837.976.602,00	68	29.410.240.642,00	27	12.197.807.500,00	27	1.252.570.400,00	27	2.858.731.850,00	27	2.985.249.500,00	27	4.550.311.454,00	27	11.646.863.204,00	100%	95%	95	41.057.103.846,00	88%	121%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	9	2.01	4	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Kawasan	27	600.000.000,00	0	0,00	27	679.679.700,00	27	52.928.000,00	27	206.271.014,00	27	78.250.000,00	27	333.961.000,00	27	671.410.014,00	100%	99%	27	671.410.014,00	100%	112%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	**3**	**10**		**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Persentase jalan dalam kondisi mantab**	**%**	**96**	**367.274.907.819,00**	**95**	**94.576.529.244,00**	**95,5**	**34.139.050.650,00**	**0**	**1.298.291.000,00**	**0**	**11.795.911.889,00**	**0**	**10.576.708.708,00**	**95**	**8.077.978.499,00**	**95**	**31.748.890.096,00**	**99%**	**93%**	**100**	**126.325.419.340,00**	**104%**	**34%**	
1	**3**	**10**	**2.01**	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	**Persentase jalan dalam kondisi mantap**	**%**	**96**	**367.274.907.819,00**	**95**	**94.576.529.244,00**	**95,5**	**34.139.050.650,00**	**0**	**1.298.291.000,00**	**0**	**11.795.911.889,00**	**0**	**10.576.708.708,00**	**95**	**8.077.978.499,00**	**95**	**31.748.890.096,00**	**99%**	**93%**	**190**	**126.325.419.340,00**	**198%**	**9%**	
1	3	10	2.01	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	Dokumen	40	5.776.092.300,00	22	3.353.806.698,00	1	341.114.450,00	0	0,00	0	0,00	0	29.800.000,00	10	181.450.000,00	10	211.250.000,00	1000%	62%	32	3.565.056.698,00	80%	62%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	10	2.01	2	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan	M²	1000	90.825.007.130,00	0	0,00	1500	316.258.000,00	0	0,00	0	2.575.509,00	0	0,00	0	191.269.366,00	0	193.844.875,00	0%	61%	0	193.844.875,00	0%	0%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	10	2.01	4	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	Dokumen	8	1.720.268.700,00	4	403.919.593,00	1	408.600.000,00	0	0,00	0	0,00	0	2.765.065,00	1	400.700.000,00	1	403.465.065,00	100%	99%	5	807.384.658,00	63%	47%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
1	3	10	2.01	5	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	KM	7	109.884.119.582,00	2,4	41.653.863.306,00	1,5	1.726.277.000,00	0	0,00	0	39.200.000,00	0	680.232.573,00	1,5	993.526.500,00	1,5	1.712.959.073,00	100%	99%	4	43.366.822.379,00	56%	39%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	10	2.01	7	Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran dengan Menambah Lajur	KM	4	50.650.594.800,00	0	8.699.111.649,00	2	12.366.408.000,00	0	0,00	0	1.397.260.380,00	0	5.971.254.590,00	2	3.149.451.790,00	2	10.517.966.760,00	100%	85%	2	19.217.078.409,00	50%	38%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	10	2.01	10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	KM	12	79.976.239.815,00	7,5	28.175.619.935,00	1,5	13.419.746.000,00	0	649.766.000,00	0,5	8.989.036.000,00	0	3.638.283.119,00	1,5	103.290.000,00	2	13.380.375.119,00	133%	100%	10	41.555.995.054,00	79%	52%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	10	2.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	KM	34	16.457.503.992,00	0	7.914.488.533,00	6	4.059.337.200,00	0	648.525.000,00	2	1.269.790.000,00	0	250.369.445,00	6	1.746.210.843,00	8	3.914.895.288,00	133%	96%	8	11.829.383.821,00	24%	72%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	10	2.01	12	Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun	M2	56	11.034.685.500,00	0	3.722.623.025,00	10	1.063.670.000,00	0	0,00	0	0,00	0	2.543.433,00	1	978.980.000,00	1	981.523.433,00	10%	92%	1	4.704.146.458,00	2%	43%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	10	2.01	19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	M²	240	950.396.000,00	25	653.096.505,00	10	437.640.000,00	0	0,00	3	98.050.000,00	0	1.460.483,00	10	333.100.000,00	13	432.610.483,00	130%	99%	38	1.085.706.988,00	16%	114%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	**3**	**11**			**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**Persentase pelaku jasa konstruksi yang memenuhi standar kompetensi**	**%**	**96,5**	**2.193.400.000,00**	**75**	**488.598.895,00**	**77,98**	**986.419.000,00**	**0**	**1.750.700,00**	**0**	**124.435.000,00**	**0**	**137.402.886,00**	79	**436.163.406,00**	**79**	**699.751.992,00**	**101%**	**71%**	**100**	**1.188.350.887,00**	**104%**	**54%**	
1	**3**	**11**	**2.01**		**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**	**Jumlah tenaga trampil konstruksi yang bersertifikat**	**orang**	**700**	**1.096.700.000,00**	**175**	**222.811.000,00**	**100**	**207.669.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**12.000.000,00**	**0**	**137.402.886,00**	**100**	**17.550.000,00**	**100**	**166.952.886,00**	**100%**	**80%**	**275**	**389.763.886,00**	**39%**	**15%**	
1	3	11	2.01	4	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan	Orang	700	1.096.700.000,00	160	222.811.000,00	100	207.669.000,00	0	0,00	0	12.000.000,00	0	137.402.886,00	100	17.550.000,00	100	166.952.886,00	100%	80%	260	389.763.886,00	37%	36%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	**3**	**11**	**2.03**		**Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)**	**Persentase pelaku jasa konstruksi yang memenuhi standar kompetensi**	**%**	**95**	**1.096.700.000,00**	**0**	**265.787.895,00**	**95**	**778.750.000,00**	**0**	**1.750.700,00**	**0**	**112.435.000,00**	**0**	**0,00**	**95**	**418.613.406,00**	**95**	**532.799.106,00**	**100%**	**68%**	**95**	**798.587.001,00**	**100%**	**49%**	
1	3	11	2.03	3	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan dan peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	Orang	200	1.096.700.000,00	75	265.787.895,00	80	778.750.000,00	0	1.750.700,00	0	112.435.000,00	0	0,00	80	418.613.406,00	80	532.799.106,00	100%	68%	155	798.587.001,00	78%	73%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	**3**	**12**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Persentase ketaatan terhadap RTRW**	**%**	**100**	**7.583.600.000,00**	**100**	**1.760.804.995,00**	**100**	**1.075.860.000,00**	**0**	**18.448.912,00**	**0**	**66.136.128,00**	**0**	**27.337.574,00**	**100**	**808.058.806,00**	**100**	**919.981.420,00**	**100%**	**86%**	**100**	**2.680.786.415,00**	**100%**	**35%**	
1	**3**	**12**	**2.01**		**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**	**Jumlah dokumen tata ruang yang ditetapkan**	**Dokumen**	**4**	**5.181.600.000,00**	**2**	**1.016.243.251,00**	**1**	**732.000.000,00**	**0**	**12.125.862,00**	**0**	**42.392.480,00**	**0**	**6.913.106,00**	**1**	**584.274.130,00**	**1**	**645.705.578,00**	**100%**	**88%**	**3**	**1.661.948.829,00**	**75%**	**12%**	
1	3	12	2.01	1	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen	4	1.497.800.000,00	2	779.745.527,00	1	177.000.000,00	0	6.573.630,00	0	26.916.210,00	0	4.632.350,00	1	123.746.906,00	1	161.869.096,00	100%	91%	3	941.614.623,00	75%	63%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	12	2.01	2	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Dokumen	3	2.078.500.000,00	1	236.497.724,00	1	555.000.000,00	0	5.552.232,00	0	15.476.270,00	0	2.280.756,00	1	460.527.224,00	1	483.836.482,00	100%	87%	2	720.334.206,00	67%	35%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	12	2.01	3	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen	2	1.228.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0,00	0%	0%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	12	2.01	4	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang	Dokumen	2	376.800.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0,00	0%	0%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	**3**	**12**	**2.03**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**Dokumen Pemanfaatan Ruang**	**Dokumen**	**4**	**829.600.000,00**	**2**	**300.753.178,00**	**1**	**140.000.000,00**	**0**	**5.893.050,00**	**0**	**19.325.680,00**	**0**	**10.057.443,00**	**1**	**90.872.934,00**	**1**	**126.149.107,00**	**100%**	**90%**	**3**	**426.902.285,00**	**75%**	**15%**	
1	3	12	2.03	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Dokumen	4	829.600.000,00	2	300.753.178,00	1	140.000.000,00	0	5.893.050,00	0	19.325.680,00	0	10.057.443,00	1	90.872.934,00	1	126.149.107,00	100%	90%	3	426.902.285,00	75%	51%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	**3**	**12**	**2.04**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**Dokumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang**	**Dokumen**	**4**	**1.572.400.000,00**	**2**	**443.808.566,00**	**1**	**203.860.000,00**	**0**	**430.000,00**	**0**	**4.417.968,00**	**0**	**10.367.025,00**	**1**	**132.911.742,00**	**1**	**148.126.735,00**	**100%**	**73%**	**3**	**591.935.301,00**	**75%**	**9%**	
1	3	12	2.04	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Dokumen	4	1.572.400.000,00	2	443.808.566,00	1	203.860.000,00	0	430.000,00	0	4.417.968,00	0	10.367.025,00	1	132.911.742,00	1	148.126.735,00	100%	73%	3	591.935.301,00	75%	38%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1				2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
1	**4**			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**																									
1	**4**	**2**		**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Prosentase Pengembangan Perumahan**	**%**	**100**	**12.869.561.000,00**	**100**	**3.837.032.078,00**	**100**	**2.477.810.500,00**	**0**	**217.001.502,00**	**0**	**664.489.908,00**	**0**	**836.968.452,00**	**100**	**750.035.701,00**	**100**	**2.468.495.563,00**	**100%**	**100%**	**100**	**6.305.527.641,00**	**100%**	**49%**	
1	**4**	**2**	**2.01**	**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**Jumlah dokumen penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota yang dihasilkan**	**Dokumen**	**4**	**538.350.000,00**	**2**	**329.015.900,00**	**1**	**86.150.000,00**	**0**	**1.445.900,00**	**0**	**86.150.000,00**	**0**	**79.800.000,00**	**1**	**1.519.300,00**	**1**	**168.915.200,00**	**100%**	**196%**	**3**	**497.931.100,00**	**75%**	**31%**	
1	4	2	2.01	6 Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	Dokumen	4	538.350.000,00	2	329.015.900,00	1	86.150.000,00	0	1.445.900,00	0	86.150.000,00	1	79.800.000,00	0	1.519.300,00	1	168.915.200,00	100%	196%	3	497.931.100,00	75%	92%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	**4**	**2**	**2.03**	**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**Jumlah pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program**	**lokasi**	**4**	**8.081.261.000,00**	**2**	**2.457.795.366,00**	**3**	**2.295.210.500,00**	**0**	**215.055.602,00**	**1**	**577.889.908,00**	1	**666.292.052,00**	**1**	**744.596.351,00**	**3**	**2.203.833.913,00**	**100%**	**96%**	**5**	**4.661.629.279,00**	**125%**	**27%**	
1	4	2	2.03	6 Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	unit rumah	6	8.081.261.000,00	0	2.457.795.366,00	3	2.295.210.500,00	0	215.055.602,00	1	577.889.908,00	2	666.292.052,00	0	744.596.351,00	3	2.203.833.913,00	100%	96%	3	4.661.629.279,00	50%	58%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	**4**	**2**	**2.05**	**Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus**	**Persentase Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus**	**%**	**100**	**4.249.950.000,00**	**100**	**1.050.220.812,00**	**100**	**96.450.000,00**	**0**	**500.000,00**	**0**	**450.000,00**	**100**	**90.876.400,00**	**0**	**3.920.050,00**	**100**	**95.746.450,00**	**100%**	**99%**	**200**	**1.145.967.262,00**	**200%**	**2%**	
1	4	2	2.05	1 Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah	Laporan	2	4.249.950.000,00	100	1.050.220.812,00	1	96.450.000,00	0	500.000,00	0	450.000,00	1	90.876.400,00	0	3.920.050,00	1	95.746.450,00	100%	99%	101	1.145.967.262,00	5050%	27%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	**4**	**3**		**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**Prosentase kawasan permukiman yang tidak kumuh**	**%**	**100**	**26.376.615.983,00**	**100**	**12.296.029.861,00**	**99,5**	**5.901.801.600,00**	**0**	**44.364.000,00**	**0**	**2.335.806.550,00**	**0**	**942.511.115,00**	**100**	**2.632.397.770,00**	**100**	**5.955.079.435,00**	**101%**	**101%**	**100**	**18.251.109.296,00**	**100%**	**69%**	
1	**4**	**3**	**2.02**	**Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	**Prosentase kawasan permukiman kumuh yang ditangani**	**%**	**0,5**	**751.286.000,00**	**0,2**	**298.400.100,00**	**0,5**	**95.000.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**66.426.000,00**	**0,5**	**28.490.700,00**	**0,5**	**94.916.700,00**	**100%**	**100%**	**0,5**	**393.316.800,00**	**100%**	**13%**	
1	4	3	2.02	1 Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Dokumen	4	751.286.000,00	2	298.400.100,00	1	95.000.000,00	0	0,00	0	0,00	1	66.426.000,00	0	28.490.700,00	1	94.916.700,00	100%	100%	3	393.316.800,00	75%	52%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	**4**	**3**	**2.03**	**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	**Prosentase kawasan permukiman kumuh yang ditangani**	**%**	**0,5**	**25.625.329.983,00**	**0,5**	**11.997.629.761,00**	**0,5**	**5.806.801.600,00**	**0**	**44.364.000,00**	**0**	**2.335.806.550,00**	**0**	**876.085.115,00**	**0,5**	**2.603.907.070,00**	**0,5**	**5.860.162.735,00**	**100%**	**101%**	**0,50**	**17.857.792.496,00**	**100%**	**23%**	
1	4	3	2.03	1 Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Dokumen	12	1.239.264.343,00	8	613.140.600,00	3	236.996.000,00	0	4.196.000,00	0	9.736.000,00	0	8.765.000,00	3	183.851.200,00	3	206.548.200,00	100%	87%	11	819.688.800,00	92%	66%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	4	3	2.03	2 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	unit	320	8.603.895.000,00	0	4.174.395.050,00	160	2.222.940.600,00	19	8.391.000,00	67	1.992.898.250,00	38	40.106.900,00	32	330.393.120,00	156	2.371.789.270,00	98%	107%	156	6.546.184.320,00	49%	76%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	4	3	2.03	6 Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar	ha	16,41	15.782.170.640,00	0	7.210.094.111,00	16,41	3.346.865.000,00	0	31.777.000,00	0	333.172.300,00	16,41	827.213.215,00	0	2.089.662.750,00	16,41	3.281.825.265,00	100%	98%	16	10.491.919.376,00	100%	66%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	**4**	**5**		**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**Prosentase Peningkatan Prasarana,Sarana dan Utilitas Umum (PSU)**	**%**	**100**	**96.514.035.970,00**	**100**	**40.753.492.553,00**	**100**	**22.957.447.900,00**	**0**	**1.628.169.110,00**	**50**	**7.571.567.080,00**	**0**	**8.251.840.111,00**	**50**	**5.455.790.546,00**	**100**	**22.907.366.847,00**	**100%**	**100%**	**200**	**63.660.859.400,00**	**200%**	**66%**	
1	**4**	**5**	**2.01**	**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	**Prosentase penyelenggaraan PSU perumahan yang memadai**	**%**	**100**	**96.514.035.970,00**	**100**	**40.753.492.553,00**	**100**	**22.957.447.900,00**	**0**	**1.628.169.110,00**	**50**	**7.571.567.080,00**	**0**	**8.251.840.111,00**	**50**	**5.455.790.546,00**	**100**	**22.907.366.847,00**	**100%**	**100%**	**200**	**63.660.859.400,00**	**200%**	**24%**	
1	4	5	2.01	2 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	lokasi	3	96.514.035.970,00	3	40.753.492.553,00	3	22.957.447.900,00	3	1.628.169.110,00	3	7.571.567.080,00	3	8.251.840.111,00	0	5.455.790.546,00	3	22.907.366.847,00	100%	100%	6	63.660.859.400,00	200%	66%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1				2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
1	**5**			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**																									
1	**5**	**2**		**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Kasus K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) yang diselesaikan**	**%**	**97**	**32.800.164.000,00**	**82**	**2.967.792.281,00**	**97**	**11.032.938.311,00**	**97**	**744.669.042,00**	**99**	**1.306.689.500,00**	**99**	**2.304.326.926,00**	**0**	**3.348.205.920,00**	**99**	**7.703.891.388,00**	**102%**	**70%**	**99**	**10.671.683.669,00**	**102%**	**33%**	
1	**5**	**2**	**2.01**	**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah SDM atuan Polisi Pamong Praja, Satuan Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Orang**	**156**	**27.331.861.000,00**	**0**	**2.269.026.467,00**	**78**	**7.981.051.762,00**	**78**	**538.597.750,00**	**78**	**892.558.000,00**	**78**	**1.094.085.290,00**	**0**	**2.453.372.950,00**	**78**	**4.978.613.990,00**	**100%**	**62%**	**78**	**7.247.640.457,00**	**50%**	**18%**	
1	5	2	2.01	1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Kasus	80	4.776.694.000,00	0	2.269.026.467,00	40	1.313.413.000,00	10	162.929.250,00	10	304.073.250,00	10	285.029.040,00	10	411.058.800,00	40	1.163.090.340,00	100%	89%	40	3.432.116.807,00	50%	72%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	5	2	2.01	2	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Kasus	550	6.889.813.000,00	0		275	720.060.000,00	67	96.479.750,00	108	183.060.000,00	141	262.288.000,00	246	164.188.000,00	246	706.015.750,00	89%	98%	246	706.015.750,00	45%	10%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	5	2	2.01	3	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	16	541.871.000,00	0		8	152.772.000,00	1	0,00	1	19.847.500,00	2	18.373.000,00	4	74.743.750,00	8	112.964.250,00	100%	74%	8	112.964.250,00	50%	21%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	5	2	2.01	4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	12	13.597.631.000,00	0		6	5.481.931.762,00	5	217.452.750,00	1	327.667.250,00	3	427.815.250,00	0	1.763.632.400,00	9	2.736.567.650,00	150%	50%	9	2.736.567.650,00	75%	20%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	5	2	2.01	5	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	156	1.525.852.000,00	0		78	312.875.000,00	40	61.736.000,00	165	57.910.000,00	122	100.580.000,00		39.750.000,00	165	259.976.000,00	212%	83%	165	259.976.000,00	106%	17%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	**5**	**2**	**2.02**	**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota yang dapat ditangani sesuai SOP**	**Dokumen**	**24**	**4.698.434.000,00**	**0**	**698.765.814,00**	**4**	**3.040.808.549,00**	**3**	**206.071.292,00**	**4**	**414.131.500,00**	**4**	**1.210.241.636,00**	**0**	**894.832.970,00**	**4**	**2.725.277.398,00**	**100%**	**90%**	**4**	**3.424.043.212,00**	**17%**	**58%**	
1	5	2	2.02	1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	Dokumen	8	1.603.945.000,00	0	698.765.814,00	4	2.392.746.805,00	3	189.921.292,00	0	189.293.500,00	1	1.072.461.600,00	0	739.892.970,00	4	2.191.569.362,00	100%	92%	4	2.890.335.176,00	50%	180%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	5	2	2.02	3	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	Laporan	24	3.094.489.000,00	0		12	648.061.744,00	3	16.150.000,00	3	224.838.000,00	3	137.780.036,00	4	154.940.000,00	13	533.708.036,00	108%	82%	13	533.708.036,00	54%	17%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	**5**	**2**	**2.03**	**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**	**Prosentase Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota yang berkualitas**	**%**	**80**	**769.869.000,00**	**0**	**0,00**	**100**	**11.078.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0%**	**0%**	**0**	**0,00**	**0%**	**0%**	
1	5	2	2.03	1	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	Laporan	24	769.869.000,00	0	0,00	12	11.078.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0%	0%	0	0,00	0%	0%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	**5**	**3**		**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**Persentase Korban Bencana Yang Ditangani**	**%**	**100**	**7.346.744.000,00**	**100**	**2.619.857.996,00**	**100**	**1.396.582.000,00**	**0**	**196.288.300,00**	**0**	**374.174.182,00**	**41,54**	**392.203.800,00**	**58**	**364.209.120,00**	**99,54**	**1.326.875.402,00**	**100%**	**95%**	**100**	**3.946.733.398,00**	**100%**	**54%**	
1	**5**	**3**	**2.01**	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	**Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan informasi rawan bencana**	**%**	**100**	**784.445.000,00**	**100**	**216.833.073,00**	**100**	**61.133.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**100**	**51.656.000,00**	**0**	**5.750.000,00**	**100**	**57.406.000,00**	**100%**	**94%**	**100**	**274.239.073,00**	**100%**	**7%**	
1	5	3	2.01	1	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen	2	255.000.000,00	0	49.883.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0%	0%	0	49.883.400,00	0%	20%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
1	5	3	2.01	2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	Orang	600	529.445.000,00	0	166.949.673,00	300	61.133.000,00	0	0,00	0	0,00	300	51.656.000,00	0	5.750.000,00	300	57.406.000,00	100%	94%	300	224.355.673,00	50%	42%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**5**	**3**	**2.02**		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana**	**%**	**100**	**5.970.049.000,00**	**100**	**2.215.882.587,00**	**100**	**1.182.035.000,00**	**0**	**134.215.000,00**	**42,83**	**348.154.182,00**	**6,17**	**306.502.800,00**	**51**	**334.159.120,00**	**100**	**1.123.031.102,00**	**100%**	**95%**	**100**	**3.338.913.689,00**	**100%**	**19%**	
1	5	3	2.02	1	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen	2	100.000.000,00	0	0,00	1	50.000.000,00	0	0,00	0	50.000.000,00	1	0,00	0	0,00	1	50.000.000,00	100%	100%	1	50.000.000,00	50%	50%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	2.02	2	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Orang	400	568.603.000,00	0	279.838.220,00	200	85.633.000,00	0	0,00	0	26.000.000,00	200	41.969.000,00	0	13.330.520,00	200	81.299.520,00	100%	95%	200	361.137.740,00	50%	64%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	2.02	4	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	Unit	10	38.080.000,00	0	0,00	8	16.636.000,00	0	1.015.000,00	4	15.620.182,00	0	0,00	0	0,00	4	16.635.182,00	50%	100%	4	16.635.182,00	40%	44%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	2.02	6	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kawasan	12	388.686.000,00	0	133.631.207,00	8	47.613.000,00	0	0,00	7	36.239.000,00	0	5.533.800,00	1	3.050.000,00	8	44.822.800,00	100%	94%	8	178.454.007,00	67%	46%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	2.02	8	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	Orang	74	4.676.790.000,00	0	1.802.413.160,00	37	888.600.000,00	8	133.200.000,00	0	199.800.000,00	0	259.000.000,00	11	296.600.000,00	19	888.600.000,00	51%	100%	19	2.691.013.160,00	26%	58%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	2.02	9	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	Dokumen	2	100.000.000,00	0	0,00	1	50.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0%	0%	0	0,00	0%	0%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	2.02	10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	Orang	600	97.890.000,00	0	0,00	300	43.553.000,00	0	0,00	300	20.495.000,00	0	0,00	0	21.178.600,00	300	41.673.600,00	100%	96%	300	41.673.600,00	50%	43%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**5**	**3**	**2.03**		**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana**	**%**	**100**	**492.250.000,00**	**100**	**187.142.336,00**	**100**	**103.064.000,00**	**0**	**42.073.300,00**	**75**	**16.020.000,00**	**10**	**24.045.000,00**	**15**	**13.950.000,00**	**100**	**96.088.300,00**	**100%**	**93%**	**100**	**283.230.636,00**	**100%**	**20%**	
1	5	3	2.03	3	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Orang	24	160.950.000,00	0	0,00	12	80.475.000,00	4	19.485.000,00	18	16.020.000,00	0	24.045.000,00	0	13.950.000,00	18	73.500.000,00	150%	91%	18	73.500.000,00	75%	46%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	2.03	4	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	24	331.300.000,00		187.142.336,00	12	22.589.000,00	8	22.588.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	8	22.588.300,00	67%	100%	8	209.730.636,00	33%	63%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**5**	**3**	**2.04**		**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**Persentase tersusunnya sistem dasar penanggulangan bencana**	**%**	**100**	**100.000.000,00**	**0**	**0,00**	**100**	**50.350.000,00**	**0**	**20.000.000,00**	**20**	**10.000.000,00**	**50**	**10.000.000,00**	**30**	**10.350.000,00**	**100**	**50.350.000,00**	**100%**	**100%**	**100**	**50.350.000,00**	**100%**	**50%**	
1	5	3	2.04	6	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	Dokumen	2	100.000.000,00	0	0,00	1	50.350.000,00	0	20.000.000,00	0	10.000.000,00	0	10.000.000,00	1	10.350.000,00	1	50.350.000,00	100%	100%	1	50.350.000,00	50%	50%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**5**	**4**			**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran**	**%**	**100**	**7.545.254.000,00**	**100**	**2.116.274.766,00**	**100**	**1.123.228.000,00**	**50**	**181.159.850,00**	**50**	**245.046.100,00**	**100**	**214.929.620,00**	**0**	**434.335.400,00**	**100**	**1.075.470.970,00**	**100%**	**96%**	**200**	**3.191.745.736,00**	**200%**	**42%**	
1	**5**	**4**	**2.01**		**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Penanganan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penangangan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**%**	**100**	**6.941.154.000,00**	**100**	**2.068.909.906,00**	**100**	**1.064.655.000,00**	**100**	**181.159.850,00**	**100**	**245.046.100,00**	**100**	**214.929.620,00**	**0**	**386.334.400,00**	**100**	**1.027.469.970,00**	**100%**	**97%**	**200**	**3.096.379.876,00**	**200%**	**15%**	
1	5	4	2.01	1	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Dokumen	12	5.409.480.000,00	0	1.620.841.670,00	6	699.128.000,00	2	102.421.100,00	1	145.281.600,00	1	140.407.500,00	2	295.089.400,00	6	683.199.600,00	100%	98%	6	2.304.041.270,00	50%	43%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	5	4	2.01	2	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	12	1.531.674.000,00	0	448.068.236,00	6	365.527.000,00	2	78.738.750,00	1	99.764.500,00	1	74.522.120,00	2	91.245.000,00	6	344.270.370,00	100%	94%	6	792.338.606,00	50%	52%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
1	**5**	**4**	**2.02**		**Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran**	**Prosentase Kegiatan Inspeksi Proteksi Kebakaran**	**%**	**90**	**604.100.000,00**	**90**	**47.364.860,00**	**90**	**58.573.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**90**	**48.001.000,00**	**90**	**48.001.000,00**	**100%**	**82%**	**180**	**95.365.860,00**	**200%**	**8%**	
1	5	4	2.02	1	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	Dokumen	12	604.100.000,00	0	47.364.860,00	6	58.573.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6	48.001.000,00	6	48.001.000,00	100%	82%	6	95.365.860,00	50%	16%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	**6**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**																									
1	**6**	**2**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Persentase PSKS yang berperan aktif dalam Pemberdayaan Sosial**	**%**	**66**	**15.258.928.296,00**	**58**	**6.270.189.257,00**	**58**	**3.868.748.450,00**	**0**	**218.067.200,00**	**0**	**524.292.285,00**	**0**	**1.928.272.550,00**	**58,33**	**951.284.024,00**	**58,33**	**3.621.916.059,00**	**101%**	**94%**	**58**	**9.892.105.316,00**	**88%**	**65%**	
1	**6**	**2**	**2.03**		**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase PSKS yang dibina**	**%**	**66**	**15.258.928.296,00**	**0**	**6.270.189.257,00**	**58**	**3.868.748.450,00**	**0**	**218.067.200,00**	**0**	**524.292.285,00**	**0**	**1.928.272.550,00**	**58,33**	**951.284.024,00**	**58,33**	**3.621.916.059,00**	**101%**	**94%**	**58**	**9.892.105.316,00**	**88%**	**24%**	
1	6	2	2.03	1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	733	1.044.015.417,00	305	556.089.123,00	214	692.969.400,00	43	67.428.400,00	209	119.850.500,00	0	74.405.000,00	0	395.935.694,00	252	657.619.594,00	118%	95%	557	1.213.708.717,00	76%	116%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	2	2.03	2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten /Kota	Orang	6	268.742.380,00	0	46.662.800,00	3	60.155.800,00	0	7.023.800,00	3	16.175.700,00	0	11.058.700,00	0	23.973.980,00	3	58.232.180,00	100%	97%	3	104.894.980,00	50%	39%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	2	2.03	3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	10	968.296.730,00	0	133.773.300,00	5	199.425.600,00	0	7.458.300,00	5	59.919.700,00	0	31.358.000,00	0	81.717.300,00	5	180.453.300,00	100%	90%	5	314.226.600,00	50%	32%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	2	2.03	4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	28	12.977.873.769,00	0	5.533.664.034,00	14	2.916.197.650,00	0	136.156.700,00	14	328.346.385,00	0	1.811.450.850,00	0	449.657.050,00	14	2.725.610.985,00	100%	93%	14	8.259.275.019,00	50%	64%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	**6**	**4**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial**	**%**	**100**	**7.798.657.826,00**	**0**	**3.701.956.379,00**	**100**	**3.011.758.543,00**	**0**	**587.204.900,00**	**0**	**229.295.650,00**	**0**	**1.034.740.660,00**	**100**		**100**	**1.851.241.210,00**	**100%**	**61%**	**100**	**5.553.197.589,00**	**100%**	**71%**	
1	**6**	**4**	**2.01**		**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial**	**%**	**100**	**5.429.261.451,00**	**100**	**3.144.409.097,00**	**100**	**2.466.492.063,00**	**0**	**522.697.600,00**	**0**	**102.653.250,00**	**0**	**934.705.960,00**	**100**		**100**	**1.560.056.810,00**	**100%**	**63%**	**100**	**4.704.465.907,00**	**100%**	**29%**	
1	6	4	2.01	1	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	650	1.205.594.772,00	231	593.345.301,00	165	166.548.000,00	24	31.076.000,00	24	35.623.800,00	44	36.720.000,00	53	28.832.000,00	145	132.251.800,00	88%	79%	376	725.597.101,00	58%	60%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	4	2.01	2	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	183	212.607.726,00	83	39.969.400,00	60	52.967.043,00	27	15.843.700,00	0	0,00	15	0,00	23	36.900.800,00	65	52.744.500,00	108%	100%	148	92.713.900,00	81%	44%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	4	2.01	3	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	43	208.135.881,00	23	38.842.000,00	13	35.457.200,00	7	25.594.900,00	0	0,00	1	3.500.000,00	8	2.920.000,00	16	32.014.900,00	123%	90%	39	70.856.900,00	91%	34%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	4	2.01	4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	47	149.330.000,00	28	53.181.500,00	12	42.300.000,00	0	4.263.000,00	4	0,00	1	640.000,00	115	36.054.000,00	120	40.957.000,00	1000%	97%	148	94.138.500,00	315%	63%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	4	2.01	5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	317	286.874.095,00	236	73.640.000,00	62	10.100.000,00	0	2.100.000,00	1	0,00	41	2.050.000,00	110	4.350.000,00	152	8.500.000,00	245%	84%	388	82.140.000,00	122%	29%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	4	2.01	6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	1153	2.844.425.390,00	630	2.223.332.496,00	270	1.978.852.820,00	114	432.542.000,00	230	39.646.950,00	223	866.199.960,00	11	506.247.600,00	578	1.844.636.510,00	214%	93%	1208	4.067.969.006,00	105%	143%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	4	2.01	10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	195	522.293.587,00	69	122.098.400,00	60	180.267.000,00	13	11.278.000,00	3	27.382.500,00	6	25.596.000,00	3	63.311.000,00	25	127.567.500,00	42%	71%	94	249.665.900,00	48%	48%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1				2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
1	**6**	**4**	**2.02**	**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	**Persentase PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapatkan rehabilitasi sosial**	**%**	**100**	**2.369.396.375,00**	**100**	**557.547.282,00**	**100**	**545.266.480,00**	**0**	**64.507.300,00**	**0**	**126.642.400,00**	**0**	**100.034.700,00**	**100**	**227.067.900,00**	**100**	**518.252.300,00**	**100%**	**95%**	**100**	**1.075.799.582,00**	**100%**	**22%**	
1	6	4	2.02	2 Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	90	876.874.045,00	53	279.834.742,00	25	191.360.500,00	0	16.359.000,00	4	22.800.000,00	10	23.790.000,00	0	90.300.000,00	14	153.249.000,00	56%	80%	67	433.083.742,00	74%	49%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	4	2.02	3 Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	660	371.144.640,00	345	99.428.400,00	250	95.736.800,00	0	13.472.800,00	160	30.639.200,00	123	20.209.200,00	19	31.144.800,00	302	95.466.000,00	121%	100%	647	194.894.400,00	98%	53%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	4	2.02	4 Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	315	202.048.254,00	220	40.117.640,00	50	20.250.900,00	0	1.340.000,00	34	11.604.400,00	0	0,00	16	4.254.000,00	50	17.198.400,00	100%	85%	270	57.316.040,00	86%	28%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	4	2.02	5 Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	53	71.878.700,00	14	14.142.000,00	20	10.774.900,00	0	0,00	0	0,00	20	0,00	0	30.425.100,00	20	30.425.100,00	100%	282%	34	44.567.100,00	64%	62%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	4	2.02	6 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	230	137.967.546,00	10	7.898.500,00	100	26.051.380,00	0	3.003.500,00	85	12.110.800,00	15	10.887.500,00	0	0,00	100	26.001.800,00	100%	100%	110	33.900.300,00	48%	25%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	4	2.02	7 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	417	369.946.190,00	360	91.860.000,00	135	69.200.000,00	0	10.700.000,00	160	17.850.000,00	101	15.700.000,00	91	23.550.000,00	352	67.800.000,00	261%	98%	712	159.660.000,00	171%	43%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	4	2.02	10 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	155	243.917.000,00	0	0,00	75	117.792.000,00	0	19.632.000,00	75	29.448.000,00	75	29.448.000,00	0	39.264.000,00	75	117.792.000,00	100%	100%	75	117.792.000,00	48%	48%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	4	2.02	12 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	58	95.620.000,00	16	24.266.000,00	18	14.100.000,00	0	0,00	4	2.190.000,00	0	0,00	0	8.130.000,00	4	10.320.000,00	22%	73%	20	34.586.000,00	34%	36%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	**6**	**5**		**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Persentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial**	**%**	**91**	**46.549.372.750,00**	**93**	**21.877.440.297,00**	**99,66**	**11.248.468.350,00**	**0**	**2.386.333.150,00**	**0**	**2.723.963.800,00**	**0**	**814.798.600,00**	**94,87**	**5.673.028.350,00**	**94,87**	**11.598.123.900,00**	**95%**	**103%**	**95**	**33.475.564.197,00**	**104%**	**72%**	
1	**6**	**5**	**2.01**	**Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar**	**persentase anak terlantar yang mendapatkan perlindungan sosial**	**%**	**95**	**33.922.800,00**	**92**	**2.656.647,00**	**95**	**4.270.000,00**	**0**	**100.000,00**	**0**	**350.000,00**	**0**	**550.000,00**	**62,5**	**1.700.000,00**	**62,5**	**2.700.000,00**	**66%**	**63%**	**155**	**5.356.647,00**	**163%**	**8%**	
1	6	5	2.01	1 Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	78	15.516.000,00	20	2.100.000,00	15	1.660.000,00	0	100.000,00	4	250.000,00	3	250.000,00	0	610.000,00	7	1.210.000,00	47%	73%	27	3.310.000,00	35%	21%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	5	2.01	2 Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	64	17.544.800,00	6	556.647,00	8	2.410.000,00	0	0,00	0	100.000,00	2	200.000,00	3	1.090.000,00	5	1.390.000,00	63%	58%	11	1.946.647,00	17%	11%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	5	2.01	3 Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	64	862.000,00	0	0,00	8	200.000,00	0	0,00	1	0,00	3	100.000,00	0	0,00	4	100.000,00	50%	50%	4	100.000,00	6%	12%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	**6**	**5**	**2.02**	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**persentase fakir miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial**	**%**	**100**	**46.515.449.950,00**	**100**	**21.874.783.650,00**	**100**	**11.244.198.350,00**	**0**	**2.386.233.150,00**	**0**	**2.723.613.800,00**	**0**	**814.248.600,00**	**100**	**5.671.328.350,00**	**100**	**11.595.423.900,00**	**100%**	**103%**	**100**	**33.470.207.550,00**	**100%**	**25%**	
1	6	5	2.02	1 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Orang	73.412	4.926.741.250,00	37599	1.582.922.800,00	24685	917.583.200,00	1376	81.413.600,00	30889	196.869.400,00	0	216.574.600,00	26188	398.039.400,00	58453	892.897.000,00	237%	97%	96052	2.475.819.800,00	131%	50%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	5	2.02	2 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Keluarga	8000	3.456.501.280,00	0	1.099.805.650,00	4000	452.052.550,00	873	123.458.150,00	30889	124.326.000,00	0	1.100.000,00	4988	130.920.000,00	36750	379.804.150,00	919%	84%	36750	1.479.609.800,00	459%	43%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
1	6	5	2.02	3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan kabupaten/kota	Keluarga	8000	37.702.271.930,00	23154	19.095.517.300,00	4000	9.847.017.600,00	873	2.178.811.800,00	3726	2.389.927.800,00	1135	596.574.000,00	4988	5.131.954.950,00	10722	10.297.268.550,00	268%	105%	33876	29.392.785.850,00	423%	78%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	5	2.02	4	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	112	429.935.490,00	0	96.537.900,00	56	27.545.000,00	0	2.549.600,00	0	12.490.600,00	0	0,00	56	10.414.000,00	56	25.454.200,00	100%	92%	56	121.992.100,00	50%	28%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	**6**	**6**			**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Persentase perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana**	**%**	**100**	**2.787.910.815,00**	**100**	**859.482.294,00**	**100**	**657.016.300,00**	**0**	**54.220.500,00**	**0**	**86.195.400,00**	**0**	**162.592.700,00**	**100**	**254.884.900,00**	**100**	**557.893.500,00**	**100%**	**85%**	**100**	**1.417.375.794,00**	**100%**	**51%**	
1	**6**	**6**	**2.01**		**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	**Persentase Korban bencana yang mendapat bantuan**	**%**	**100**	**377.739.777,00**	**100**	**41.241.910,00**	**100**	**78.209.900,00**	**0**	**4.184.500,00**	**0**	**2.192.100,00**	**0**	**1.986.300,00**	**100**	**16.797.700,00**	**100**	**25.160.600,00**	**100%**	**32%**	**100**	**66.402.510,00**	**100%**	**7%**	
1	6	6	2.01	1	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	7200	151.530.373,00	3700	21.213.910,00	300	39.282.600,00	0	4.184.500,00	0	2.192.100,00	75	1.986.300,00	0	1.620.400,00	75	9.983.300,00	25%	25%	3775	31.197.210,00	52%	21%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	6	2.01	2	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	2600	68.951.724,00	1250	15.178.000,00	300	15.177.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	75	15.177.300,00	75	15.177.300,00	25%	100%	1325	30.355.300,00	51%	44%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	6	2.01	5	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	50	157.257.680,00	20	4.850.000,00	15	23.750.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0%	0%	20	4.850.000,00	40%	3%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	**6**	**6**	**2.02**		**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**	**Persentase Kelurahan yang mendapatkan Sosialisasi Kampung Siaga Bencana**	**%**	**100**	**2.410.171.038,00**	**100**	**818.240.384,00**	**100**	**578.806.400,00**	**0**	**50.036.000,00**	**0**	**84.003.300,00**	**0**	**160.606.400,00**	**100**	**238.087.200,00**	**100**	**532.732.900,00**	**100%**	**92%**	**100**	**1.350.973.284,00**	**100%**	**22%**	
1	6	6	2.02	1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kampung	2	438.160.580,00	0	164.808.100,00	1	135.615.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	120.459.200,00	1	120.459.200,00	100%	89%	1	285.267.300,00	50%	65%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	6	2.02	2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	106	1.972.010.458,00	46	653.432.284,00	30	443.191.200,00	17	50.036.000,00	22	84.003.300,00	30	160.606.400,00	30	117.628.000,00	30	412.273.700,00	100%	93%	76	1.065.705.984,00	72%	54%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	**6**	**7**			**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**Persentase Pengelolaan Taman makam Pahlawan dalam kondisi baik**	**%**	**100**	**722.680.670,00**	**100**	**244.600.150,00**	**100**	**182.250.086,00**	**0**	**24.283.942,00**	**0**	**29.151.630,00**	**0**	**81.342.310,00**	**100**	**33.581.366,00**	**100**	**168.359.248,00**	**100%**	**92%**	**100**	**412.959.398,00**	**100%**	**57%**	
1	**6**	**7**	**2.01**		**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan**	**%**	**100**	**722.680.670,00**	**100**	**244.600.150,00**	**100**	**182.250.086,00**	**0**	**24.283.942,00**	**0**	**29.151.630,00**	**0**	**81.342.310,00**	**100**	**33.581.366,00**	**100**	**168.359.248,00**	**100%**	**92%**	**100**	**412.959.398,00**	**100%**	**23%**	
1	6	7	2.01	2	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Makam	1932	722.680.670,00	0	244.600.150,00	966	182.250.086,00	0	24.283.942,00	966	29.151.630,00	966	81.342.310,00	0	33.581.366,00	966	168.359.248,00	100%	92%	966	412.959.398,00	50%	57%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
																							Rata - Rata Capaian Kinerja	**106%**						
																							Rata - Rata Realisasi Anggaran	**90%**						

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2019 s/d 2024		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2023) PAK		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) PAK		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I		II		III		IV										
1				2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																										
2	7			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA																										
2	**7**	**3**		**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**persentase jumlah peserta pelatihan yang berbasis kompetensi**	**%**	**35**	**4.375.201.450,00**	**23**	**1.466.880.398,00**	**30**	**2.093.811.800,00**	**0**	**24.060.000,00**	**0**	**495.023.700,00**	**0**	**53.678.600,00**	**30**	**1.272.344.833,00**	**30**	**1.845.107.133,00**	**100%**	**88%**	**100**	**3.311.987.531,00**	**286%**	**76%**	
2	**7**	**3**	**2.01**	**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	**Jumlah peserta pelatihan ketrampilan yang mengikuti Uji Kompetensi**	**Orang**	**440**	**4.120.201.450,00**	**310**	**1.401.868.963,00**	**150**	**2.071.802.000,00**	**0**	**23.362.000,00**	**45**	**487.062.900,00**	**0**	**53.678.600,00**	**192**	**1.260.770.833,00**	**192**	**1.824.874.333,00**	**128%**	**88%**	**502**	**3.226.743.296,00**	**114%**	**44%**	
2	7	3	2.01	1 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Orang	370	4.120.201.450,00	220	1.401.868.963,00	180	2.071.802.000,00	0	23.362.000,00	45	487.062.900,00	0	53.678.600,00	192	1.260.770.833,00	192	1.824.874.333,00	107%	88%	412	3.226.743.296,00	111%	78%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	**7**	**3**	**2.02**	**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**	**Prosentase LPKS yang berijin**	**%**	**20**	**55.000.000,00**	**0**	**65.011.435,00**	**20**	**10.054.800,00**	**0**	**698.000,00**	**60**	**7.960.800,00**	**0**	**0,00**	**25**	**0,00**	**25**	**8.658.800,00**	**125%**	**86%**	**25**	**73.670.235,00**	**125%**	**16%**	
2	7	3	2.02	1 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Lembaga	62	55.000.000,00	8	65.011.435,00	27	10.054.800,00	0	698.000,00	30	7.960.800,00	0	0,00	0	0,00	30	8.658.800,00	111%	86%	38	73.670.235,00	61%	134%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	**7**	**3**	**2.05**	**Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Perusahaan yang mendapatkan sosialisasi Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja**	**perusahaan**	**60**	**200.000.000,00**	**0**	**0,00**	**30**	**11.955.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**30**	**11.574.000,00**	**30**	**11.574.000,00**	**100%**	**97%**	**30**	**11.574.000,00**	**50%**	**6%**	
2	7	3	2.05	1 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	Dokumen	2	200.000.000,00	0	0,00	1	11.955.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	11.574.000,00	1	11.574.000,00	100%	97%	1	11.574.000,00	50%	6%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	**7**	**4**		**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Persentase Pencari Kerja Yang Ditempatkan melalui informasi bursa kerja**	**%**	**15**	**2.101.667.296,00**	**0**	**647.047.989,00**	**15**	**170.900.000,00**	**0**	**40.889.400,00**	**0**	**61.146.000,00**	**11,879**	**26.604.000,00**	**63,13**	**38.723.950,00**	**11,879**	**167.363.350,00**	**79%**	**98%**	**12**	**814.411.339,00**	**79%**	**39%**	
2	**7**	**4**	**2.03**	**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	**Jumlah pencari kerja yang ditempatkan melalui informasi bursa kerja**	**Orang**	**1140**	**2.101.667.296,00**	**752**	**647.047.989,00**	**150**	**170.900.000,00**	**0**	**40.889.400,00**	**0**	**61.146.000,00**	**158**	**26.604.000,00**	**249**	**38.723.950,00**	**249**	**167.363.350,00**	**166%**	**98%**	**1001**	**814.411.339,00**	**88%**	**8%**	
2	7	4	2.03	1 Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Dokumen	4	745.829.416,00	2	266.498.867,00	1	102.931.575,00	0	31.888.800,00	0	20.106.000,00	0	20.004.000,00	1	29.249.650,00	1	101.248.450,00	100%	98%	3	367.747.317,00	75%	49%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	7	4	2.03	2 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	Orang	1288	1.355.837.880,00	788	380.549.122,00	200	67.968.425,00	23	9.000.600,00	213	41.040.000,00	307	6.600.000,00	361	9.474.300,00	361	66.114.900,00	181%	97%	1149	446.664.022,00	89%	33%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	**7**	**5**		**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Persentase Perusahaan Yang Mengesahkan Peraturan Perusahaan**	**%**	**16**	**7.712.488.490,00**	**0**	**3.066.043.264,00**	**16**	**3.207.508.890,00**	**0**	**270.046.000,00**	**0**	**301.045.542,00**	**0**	**304.125.864,00**	**16**	**602.277.166,00**	**16**	**1.477.494.572,00**	**100%**	**46%**	**16**	**4.543.537.836,00**	**100%**	**59%**	
2	**7**	**5**	**2.01**	**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah perusahaan yang mendapatkan bimbingan PP dan PKB**	**Perusahaan**	**100**	**1.878.698.170,00**	**0**	**696.946.716,00**	**60**	**9.050.000,00**	**0**	**3.462.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**50**	**5.588.000,00**	**50**	**9.050.000,00**	**83%**	**100%**	**50**	**705.996.716,00**	**50%**	**0%**	
2	7	5	2.01	1 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Perusahaan	70	791.480.550,00	30	266.309.350,00	15	3.462.000,00	15	3.462.000,00	0	0,00	8	0,00	0	0,00	23	3.462.000,00	153%	100%	53	269.771.350,00	76%	34%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	7	5	2.01	3 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Laporan	2	1.087.217.620,00	0	430.637.366,00	1	5.588.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	5.588.000,00	1	5.588.000,00	100%	100%	1	436.225.366,00	50%	40%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
2	**7**	**5**	**2.02**		**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**	**Prosentase permasalahan HI yang terselesaikan**	**%**	**75**	**5.833.790.320,00**	**0**	**2.369.096.548,00**	**75**	**3.198.458.890,00**	**0**	**266.584.000,00**	**0**	**301.045.542,00**	**0**	**304.125.864,00**	**100**	**596.689.166,00**	**100**	**1.468.444.572,00**	**133%**	**46%**	**100**	**3.837.541.120,00**	**133%**	**25%**	
2	7	5	2.02	2	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	Perkara	60	423.042.880,00	30	168.007.417,00	15	35.460.000,00	0	4.400.000,00	8	6.600.000,00	12	6.600.000,00	0	17.803.200,00	20	35.403.200,00	133%	100%	50	203.410.617,00	83%	48%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	7	5	2.02	5	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Orang	18066	5.410.747.440,00	9066	2.201.089.131,00	10000	3.162.998.890,00	576	262.184.000,00	4413	294.445.542,00	604	297.525.864,00	7987	578.885.966,00	13580	1.433.041.372,00	136%	45%	22646	3.634.130.503,00	125%	67%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	**8**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**																										
2	**8**	**2**			**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Persentase Alokasi Anggaran APBD yang di ARG**	**%**	**100**	**1.773.093.674,00**	**18**	**729.300.156,00**	**100**	**1.319.598.350,00**	**0**	**207.291.150,00**	**0**	**303.667.340,00**	**0**	**289.126.850,00**	**100**	**252.653.374,00**	**100**	**1.052.738.714,00**	**100%**	**80%**	**100**	**1.782.038.870,00**	**100%**	**101%**	
2	**8**	**2**	**2.01**		**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Persentase program yang di ARG**	**%**	**100**	**1.168.500.429,00**	**20**	**367.624.088,00**	**100**	**136.992.400,00**	**0**	**72.096.550,00**	**0**	**29.447.500,00**	**0**	**16.978.900,00**	**100**	**35.093.854,00**	**100**	**153.616.804,00**	**100%**	**112%**	**100**	**521.240.892,00**	**100%**	**13%**	
2	8	2	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	64	470.005.554,00	0	223.248.788,00	32	72.834.400,00	12	62.843.550,00	20	0,00	0	2.806.400,00	0	6.875.854,00	32	72.525.804,00	100%	100%	32	295.774.592,00	50%	63%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	2	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	68	254.292.689,00	0	68.463.750,00	34	23.043.000,00	0	0,00	34	11.572.500,00	0	11.192.500,00	0	18.205.000,00	34	40.970.000,00	100%	178%	34	109.433.750,00	50%	43%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	2	2.01	3	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	34	290.575.678,00	0	52.878.600,00	34	30.217.000,00	0	0,00	34	17.875.000,00	0	2.000.000,00	0	10.013.000,00	34	29.888.000,00	100%	99%	34	82.766.600,00	100%	28%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	2	2.01	4	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	34	153.626.508,00	0	23.032.950,00	34	10.898.000,00	0	9.253.000,00	34	0,00	0	980.000,00	0	0,00	34	10.233.000,00	100%	94%	34	33.265.950,00	100%	22%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**8**	**2**	**2.02**		**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Persentase Partisipasi Perempuan pada Lembaga Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi dan Pelatihan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi**	**%**	**32,5**	**270.129.736,00**	**13**	**78.248.900,00**	**20**	**34.946.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**31.362.000,00**	**0**	**0,00**	**20,56**	**0,00**	**20,56**	**31.362.000,00**	**103%**	**90%**	**34**	**109.610.900,00**	**103%**	**12%**	
2	8	2	2.02	1	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	16	270.129.736,00	0	78.248.900,00	8	34.946.000,00	0	0,00	8	31.362.000,00	0	0,00	0	0,00	8	31.362.000,00	100%	90%	8	109.610.900,00	50%	41%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**8**	**2**	**2.03**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Persentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang dibina**	**%**	**60**	**334.463.509,00**	**50**	**283.427.168,00**	**55**	**1.147.659.950,00**	**0**	**135.194.600,00**	**0**	**242.857.840,00**	**0**	**272.147.950,00**	**55**	**217.559.520,00**	**55**	**867.759.910,00**	**100%**	**76%**	**55**	**1.151.187.078,00**	**92%**	**259%**	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
2	8	2	2.03	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	1380	334.463.509,00	308	96.860.518,00	580	1.124.879.950,00	127	135.194.600,00	170	220.078.840,00	130	272.147.950,00	338	217.559.520,00	765	844.980.910,00	132%	75%	1073	941.841.428,00	78%	282%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	2	2.03	3	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	2		0	186.566.650,00	1	22.780.000,00	0	0,00	1	22.779.000,00	0	0,00	0	0,00	1	22.779.000,00	100%	100%	1	209.345.650,00	50%	#DIV/0!	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**8**	**3**			**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Persentase Penanganan Pengaduan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan**	**%**	**100**	**1.266.150.020,00**	**0**	**470.692.851,00**	**100**	**231.711.580,00**	**0**	**49.388.000,00**	**0**	**73.866.880,00**	**0**	**42.592.000,00**	**100**	**64.492.000,00**	**100**	**230.338.880,00**	**100%**	**99%**	**100**	**701.031.731,00**	**100%**	**55%**	
2	**8**	**3**	**2.01**		**Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase lembaga yang mendapatkan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap Perempuan**	**%**	**100**	**328.512.610,00**	**67,39**	**114.694.448,00**	**98**	**68.286.980,00**	**0**	**21.696.000,00**	**0**	**33.074.880,00**	**0**	**2.100.000,00**	**100**	**10.200.000,00**	**100**	**67.070.880,00**	**102%**	**98%**	**100**	**181.765.328,00**	**100%**	**20%**	
2	8	3	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	2	218.091.655,00	0	85.110.713,00	1	36.390.980,00	0	0,00	1	32.024.880,00	0	2.100.000,00	0	1.050.000,00	1	35.174.880,00	100%	97%	1	120.285.593,00	50%	55%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	3	2.01	2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	27	110.420.955,00	0	29.583.735,00	27	31.896.000,00	27	21.696.000,00	0	1.050.000,00	0	0,00	0	9.150.000,00	27	31.896.000,00	100%	100%	27	61.479.735,00	100%	56%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**8**	**3**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Persentase penyedia layanan yang melaksanakan rujukan lanjutan**	**%**	**95**	**799.587.270,00**	**53**	**323.543.291,00**	**85**	**155.906.600,00**	**0**	**25.900.000,00**	**0**	**39.000.000,00**	**0**	**38.700.000,00**	**87,5**	**52.150.000,00**	**87,5**	**155.750.000,00**	**103%**	**100%**	**88**	**479.293.291,00**	**92%**	**19%**	
2	8	3	2.02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan	40	799.587.270,00	0	323.543.291,00	20	155.906.600,00	0	25.900.000,00	6	39.000.000,00	2	38.700.000,00	3	52.150.000,00	11	155.750.000,00	55%	100%	11	479.293.291,00	28%	60%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**8**	**3**	**2.03**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase penyedia layanan perlindungan perempuan yang aktif**	**%**	**100**	**138.050.140,00**	**100**	**32.455.112,00**	**100**	**7.518.000,00**	**0**	**1.792.000,00**	**0**	**1.792.000,00**	**0**	**1.792.000,00**	**100**	**2.142.000,00**	**100**	**7.518.000,00**	**100%**	**100%**	**100**	**39.973.112,00**	**100%**	**5%**	
2	8	3	2.03	3	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	Orang	73	138.050.140,00	44	32.455.112,00	12	7.518.000,00	4	1.792.000,00	6	1.792.000,00	3	1.792.000,00	0	2.142.000,00	13	7.518.000,00	108%	100%	57	39.973.112,00	78%	29%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	3	2.03	4	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	2	91.177.890,00	0	24.723.910,00	1	8.658.770,00	0	8.308.770,00	1	0,00	1	0,00	0	0,00	1	8.308.770,00	100%	96%	1	33.032.680,00	50%	36%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**8**	**4**			**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**Persentase RT yang memiliki data keluarga berkualitas**	**%**	**30**	**523.507.579,00**	**16**	**198.220.440,00**	**20**	**295.700.300,00**	**0**	**116.289.300,00**	**0**	**49.279.000,00**	**0**	**72.211.000,00**	**39,6**	**15.852.000,00**	**39,6**	**253.631.300,00**	**198%**	**86%**	**40**	**451.851.740,00**	**132%**	**86%**	
2	**8**	**4**	**2.01**		**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak**	**Persentase peserta yang memahami Kesetaraan Gender dan Hak Anak**	**%**	**100**	**188.575.962,00**	**80**	**124.960.110,00**	**85**	**246.779.300,00**	**0**	**112.989.300,00**	**0**	**25.842.000,00**	**0**	**64.269.000,00**	**85**	**1.610.000,00**	**85**	**204.710.300,00**	**100%**	**83%**	**85**	**329.670.410,00**	**85%**	**109%**	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
					Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																									
2	8	4	2.01	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	34	188.575.962,00	0	60.304.130,00	34	82.969.300,00	34	81.417.300,00	0	0,00	0	0,00	0	1.200.000,00	34	82.617.300,00	100%	100%	34	142.921.430,00	100%	76%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	4	2.01	2	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	2	678.830.237,00	0	64.655.980,00	1	163.810.000,00	0	31.572.000,00	0	25.842.000,00	1	64.269.000,00	0	410.000,00	1	122.093.000,00	100%	75%	1	186.748.980,00	50%	28%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**8**	**4**	**2.02**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase lembaga yang aktif dalam peningkatan Kualitas Keluarga dan Hak anak**	**%**	**100**	**334.931.617,00**	**100**	**73.260.330,00**	**100**	**48.921.000,00**	**0**	**3.300.000,00**	**75**	**23.437.000,00**	**0**	**7.942.000,00**	**25**	**14.242.000,00**	**100**	**48.921.000,00**	**100%**	**100%**	**100**	**122.181.330,00**	**100%**	**15%**	
2	8	4	2.02	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	514	334.931.617,00	0	73.260.330,00	257	48.921.000,00	0	3.300.000,00	190	23.437.000,00	0	7.942.000,00	70	14.242.000,00	260	48.921.000,00	101%	100%	260	122.181.330,00	51%	36%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**8**	**5**			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**Terpenuhinya Data terpilah gender dan anak**	**Dokumen**	**3**	**974.733.426,00**	**1**	**296.146.003,00**	**1**	**108.891.900,00**	**0**	**8.686.000,00**	**0**	**42.228.500,00**	**0**	**32.647.000,00**	**1**	**18.823.000,00**	**1**	**102.384.500,00**	**100%**	**94%**	**2**	**398.530.503,00**	**67%**	**41%**	
2	**8**	**5**	**2.01**		**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pengumpulan data gender dan anak**	**%**	**100**	**974.733.426,00**	**100**	**296.146.003,00**	**100**	**108.891.900,00**	**0**	**8.686.000,00**	**0**	**42.228.500,00**	**0**	**32.647.000,00**	**100**	**18.823.000,00**	**100**	**102.384.500,00**	**100%**	**94%**	**100**	**398.530.503,00**	**100%**	**11%**	
2	8	5	2.01	1	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	4	484.367.892,00	0	113.965.403,00	2	45.649.900,00	0	280.000,00	0	30.840.500,00	2	8.172.000,00	0	4.185.000,00	2	43.477.500,00	100%	95%	2	157.442.903,00	50%	33%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	5	2.01	2	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	4	490.365.534,00	0	182.180.600,00	2	63.242.000,00	0	8.406.000,00	0	11.388.000,00	2	24.475.000,00	0	14.638.000,00	2	58.907.000,00	100%	93%	2	241.087.600,00	50%	49%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**8**	**6**			**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Persentase Lembaga yang aktif dalam Pemenuhan Hak Anak**	**%**	**42,2**	**1.872.636.980,00**	**12,5**	**570.788.556,00**	**22,43**	**264.553.110,00**	**0**	**25.876.300,00**	**0**	**70.329.400,00**	**0**	**101.782.710,00**	**42,2**	**61.458.714,00**	**42,2**	**259.447.124,00**	**188%**	**98%**	**42**	**830.235.680,00**	**100%**	**44%**	
2	**8**	**6**	**2.01**		**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Persentase Lembaga yang dibina dalam rangka pemenuhan hak anak**	**%**	**38**	**242.238.865,00**	**15**	**74.521.851,00**	**22**	**43.237.900,00**	**0**	**18.346.300,00**	**0**	**14.350.600,00**	**0**	**9.568.000,00**	**42,2**	**0,00**	**42,2**	**42.264.900,00**	**192%**	**98%**	**42**	**116.786.751,00**	**111%**	**17%**	
2	8	6	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	2	242.238.865,00	0	74.521.851,00	1	43.237.900,00	0	18.346.300,00	0	14.350.600,00	1	9.568.000,00	1	0,00	1	42.264.900,00	100%	98%	1	116.786.751,00	50%	48%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**8**	**6**	**2.02**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Persentase Lembaga yang dibina dalam rangka Peningkatan Kualitas Hidup Anak**	**%**	**27**	**1.630.398.115,00**	**15**	**496.266.705,00**	**22**	**221.315.210,00**	**0**	**7.530.000,00**	**0**	**55.978.800,00**	**0**	**92.214.710,00**	**42,2**	**61.458.714,00**	**42,2**	**217.182.224,00**	**192%**	**98%**	**42**	**713.448.929,00**	**156%**	**13%**	

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
2	8	6	2.02	1	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	335	384.540.695,00	135	103.307.796,00	100	22.583.900,00	0	0,00	0	0,00	100	22.535.000,00	0	0,00	100	22.535.000,00	100%	100%	235	125.842.796,00	70%	33%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	6	2.02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	2	552.063.000,00	0	186.577.085,00	1	84.178.800,00	0	3.530.000,00	0	49.158.800,00	1	17.134.000,00	0	12.371.414,00	1	82.194.214,00	100%	98%	1	268.771.299,00	50%	49%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	6	2.02	3	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	4	492.138.250,00	2	132.059.654,00	1	76.211.600,00	0	4.000.000,00	0	6.820.000,00	1	28.783.600,00	0	34.922.500,00	1	74.526.100,00	100%	98%	3	206.585.754,00	75%	42%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	6	2.02	4	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	2	201.656.170,00	0	74.322.170,00	1	38.340.910,00	0	0,00	0	0,00	1	23.762.110,00	0	14.164.800,00	1	37.926.910,00	100%	99%	1	112.249.080,00	50%	56%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**8**	**7**			**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Persentase kasus kekerasan terhadap anak**	**%**	**0,04**	**837.693.179,00**	**1**	**236.916.170,00**	**0,04**	**82.817.640,00**	**0**	**1.350.000,00**	**0**	**7.760.000,00**	**0**	**65.852.240,00**	**0,0126**	**3.105.000,00**	**0,0126**	**78.067.240,00**	**32%**	**94%**	**1,013**	**314.983.410,00**	**2532%**	**38%**	
2	**8**	**7**	**2.01**		**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Sekolah yang terlibat dalam perlindungan Anak**	**%**	**69,5**	**261.751.620,00**	**43,2**	**118.881.214,00**	**40,47**	**26.311.810,00**	**0**	**0,00**	**0**	**6.000.000,00**	**0**	**19.225.410,00**	**61,72**	**0,00**	**61,72**	**25.225.410,00**	**153%**	**96%**	**62**	**144.106.624,00**	**89%**	**10%**	
2	8	7	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	2	261.751.620,00	0	118.881.214,00	1	26.311.810,00	0	0,00	0	6.000.000,00	1	19.225.410,00	0	0,00	1	25.225.410,00	100%	96%	1	144.106.624,00	50%	55%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**8**	**7**	**2.02**		**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase anak yang mendapatkan Layanan Perlindungan Khusus**	**%**	**100**	**401.197.341,00**	**100**	**91.170.036,00**	**100**	**34.149.900,00**	**0**	**1.350.000,00**	**0**	**1.350.000,00**	**0**	**27.421.900,00**	**100**	**1.700.000,00**	**100**	**31.821.900,00**	**100%**	**93%**	**100**	**122.991.936,00**	**100%**	**8%**	
2	8	7	2.02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan	24	63.180.000,00	0	25.410.080,00	12	5.750.000,00	0	1.350.000,00	0	1.350.000,00	4	1.350.000,00	14	1.700.000,00	14	5.750.000,00	117%	100%	14	31.160.080,00	58%	49%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	7	2.02	4	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	2	338.017.341,00	0	65.759.956,00	1	28.399.900,00	0	0,00	0	0,00	1	26.071.900,00	0	0,00	1	26.071.900,00	100%	92%	1	91.831.856,00	50%	27%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**8**	**7**	**2.03**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Lembaga yang terlibat dalam perlindungan Khusus Anak**	**%**	**100**	**174.744.218,00**	**100**	**26.864.920,00**	**100**	**22.355.930,00**	**0**	**0,00**	**0**	**410.000,00**	**0**	**19.204.930,00**	**100**	**1.405.000,00**	**100**	**21.019.930,00**	**100%**	**94%**	**100**	**47.884.850,00**	**100%**	**12%**	
2	8	7	2.03	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	2	174.744.218,00	0	26.864.920,00	1	22.355.930,00	0	0,00	0	410.000,00	1	19.204.930,00	0	1.405.000,00	1	21.019.930,00	100%	94%	1	47.884.850,00	50%	27%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
2	**9**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**																									
2	**9**	**3**			**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**Prosentase Angka Kecukupan Energi**	**%**	**100**	**4.379.600.000,00**	**97**	**2.124.808.266,00**	**100**	**512.371.500,00**	**0**	**26.921.100,00**	**0**	**97.539.800,00**	**0**	**54.881.600,00**	**97,4**	**320.537.650,00**	**97,4**	**499.880.150,00**	**97%**	**98%**	**194**	**2.624.688.416,00**	**194%**	**60%**	
2	**9**	**3**	**2.01**		**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	**Prosentase ketersediaan pangan utama**	**%**	**100**	**1.219.966.000,00**	**106**	**575.697.114,00**	**100**	**360.320.500,00**	**0**	**4.050.000,00**	**0**	**62.971.000,00**	**25**	**24.117.800,00**	**25**	**257.176.650,00**	**50**	**348.315.450,00**	**50%**	**97%**	**156**	**924.012.564,00**	**156%**	**29%**	
2	9	3	2.01	1	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Laporan	20	235.150.000,00	8	52.953.650,00	3	12.662.000,00	0	0,00	1	9.705.000,00	1	1.786.800,00	1	534.000,00	3	12.025.800,00	100%	95%	11	64.979.450,00	55%	28%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	9	3	2.01	2	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan berbasis sumber daya lokal yang tersedia	Laporan	2	717.816.000,00	0	406.811.815,00	1	317.889.500,00	0	4.050.000,00	0	45.916.000,00	0	14.981.000,00	1	241.574.250,00	1	306.521.250,00	100%	96%	1	713.333.065,00	50%	99%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	9	3	2.01	4	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan stok pasokan dan harga pangan	Dokumen	16	267.000.000,00	8	115.931.649,00	4	29.769.000,00	0	0,00	0	7.350.000,00	0	7.350.000,00	4	15.068.400,00	4	29.768.400,00	100%	100%	12	145.700.049,00	75%	55%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	**9**	**3**	**2.04**		**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**	**Angka Kecukupan Energi / AKE**	**kkal/kapita**	**2100**	**3.159.634.000,00**	**2100**	**1.549.111.152,00**	**2100**	**152.051.000,00**	**0**	**22.871.100,00**	**0**	**34.568.800,00**	**0**	**30.763.800,00**	**2046**	**63.361.000,00**	**2046**	**151.564.700,00**	**97%**	**100%**	**4146**	**1.700.675.852,00**	**197%**	**5%**	
2	9	3	2.04	1	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Dokumen	8	195.050.000,00	7	74.337.580,00	1	23.553.000,00	0	19.271.100,00	0	1.098.800,00	0	0,00	1	2.937.000,00	1	23.306.900,00	100%	99%	8	97.644.480,00	100%	50%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	9	3	2.04	2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Laporan	6	2.964.584.000,00	0	1.474.773.572,00	3	128.498.000,00	0	3.600.000,00	0	33.470.000,00	1	30.763.800,00	1	60.424.000,00	2	128.257.800,00	67%	100%	2	1.603.031.372,00	33%	54%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	**9**	**4**			**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**Prosentase daerah rentan dan rawan pangan**	**%**	**22**	**60.000.000,00**	**0**	**0,00**	**25**	**39.730.000,00**	**0**	**3.200.000,00**	**0**	**4.800.000,00**	**0**	**10.010.700,00**	**25**	**14.463.000,00**	**25**	**32.473.700,00**	**100%**	**82%**	**25**	**32.473.700,00**	**114%**	**54%**	
2	**9**	**4**	**2.01**		**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**	**Tersedianya peta ketahanan pangan dan kerentanan pangan**	**Dokumen**	**2**	**60.000.000,00**	**0**	**0,00**	**1**	**39.730.000,00**	**0**	**3.200.000,00**	**0**	**4.800.000,00**	**0**	**10.010.700,00**	**1**	**14.463.000,00**	**1**	**32.473.700,00**	**100%**	**82%**	**1**	**32.473.700,00**	**50%**	**54%**	
2	9	4	2.01	1	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	Dokumen	4	60.000.000,00	0	0,00	1	39.730.000,00	0	3.200.000,00	0	4.800.000,00	0	10.010.700,00	2	14.463.000,00	2	32.473.700,00	200%	82%	2	32.473.700,00	50%	54%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	**9**	**5**			**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**Prosentase pangan segar aman yang teruji**	**%**	**80**	**741.622.000,00**	**98**	**315.276.054,00**	**80**	**78.393.500,00**	**0**	**4.417.000,00**	**0**	**51.460.475,00**	**0**	**13.373.000,00**	**80**	**5.420.500,00**	**80**	**74.670.975,00**	**100%**	**95%**	**178**	**389.947.029,00**	**223%**	**53%**	
2	**9**	**5**	**2.01**		**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar**	**lokasi**	**32**	**741.622.000,00**	**16**	**315.276.054,00**	**8**	**78.393.500,00**	**0**	**4.417.000,00**	**0**	**51.460.475,00**	**3**	**13.373.000,00**	**5**	**5.420.500,00**	**8**	**74.670.975,00**	**100%**	**95%**	**24**	**389.947.029,00**	**75%**	**10%**	
2	9	5	2.01	1	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	KelembagaanKeamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina	Dokumen	2	428.033.000,00	0	190.960.684,00	1	23.538.500,00	0	4.417.000,00	0	1.350.000,00	1	13.373.000,00	0	3.771.900,00	1	22.911.900,00	100%	97%	1	213.872.584,00	50%	50%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	9	5	2.01	5	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	2	313.589.000,00	0	124.315.370,00	1	54.855.000,00	0	0,00	1	50.110.475,00	0	0,00	0	1.648.600,00	1	51.759.075,00	100%	94%	1	176.074.445,00	50%	56%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
2	**10**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**																									
2	**10**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI**	**Prosentase Pengelolaan Izin Lokasi**	**%**	**100**	**464.901.600,00**	**100**	**412.404.475,00**	**100**	**15.000.000,00**	**0**	**2.402.000,00**	**30**	**2.681.250,00**	**0**	**900.000,00**	**70**	**4.364.500,00**	**100**	**10.347.750,00**	**100%**	**69%**	**200**	**422.752.225,00**	**200%**	**91%**	
2	**10**	**2**	**2.01**		**Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Prosentase pemberian izin lokasi**	**%**	**100**	**464.901.600,00**	**100**	**412.404.475,00**	**100**	**15.000.000,00**	**0**	**2.402.000,00**	**30**	**2.681.250,00**	**0**	**900.000,00**	**70**	**4.364.500,00**	**100**	**10.347.750,00**	**100%**	**69%**	**200**	**422.752.225,00**	**200%**	**2%**	
2	10	2	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	Persentase pemberian rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT) sesuai ketentuan	%	100	464.901.600,00	100	412.404.475,00	100	15.000.000,00	0	2.402.000,00	30	2.681.250,00	0	900.000,00	70	4.364.500,00	100	10.347.750,00	100%	69%	200	422.752.225,00	200%	91%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
2	**10**	**4**			**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan**	**%**	**100**	**97.400.000,00**	**100**	**32.958.750,00**	**100**	**36.200.000,00**	**0**	**0,00**	**50**	**19.904.300,00**	**0**	**8.000.000,00**	**50**	**4.344.885,00**	**100**	**32.249.185,00**	**100%**	**89%**	**200**	**65.207.935,00**	**200%**	**67%**	
2	**10**	**4**	**2.01**		**Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan**	**%**	**100**	**97.400.000,00**	**100**	**32.958.750,00**	**100**	**36.200.000,00**	**0**	**0,00**	**50**	**19.904.300,00**	**0**	**8.000.000,00**	**50**	**4.344.885,00**	**100**	**32.249.185,00**	**100%**	**89%**	**200**	**65.207.935,00**	**200%**	**33%**	
2	10	4	2.01	1	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	2	97.400.000,00	0	32.958.750,00	1	36.200.000,00	0	0,00	1	19.904.300,00	0	8.000.000,00	0	4.344.885,00	1	32.249.185,00	100%	89%	1	65.207.935,00	50%	67%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
2	**10**	**10**			**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	**Prosentase Penatagunaan Tanah**	**%**	**100**	**360.000.000,00**	**100**	**122.960.613,00**	**100**	**263.400.000,00**	**0**	**25.000.800,00**	**50**	**21.755.700,00**	**0**	**12.658.600,00**	**50**	**158.939.850,00**	**100**	**218.354.950,00**	**100%**	**83%**	**200**	**341.315.563,00**	**200%**	**95%**	
2	**10**	**10**	**2.01**		**Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota**	**Prosentase Penggunaan Tanah yang hamparannya dalam satu daerah**	**%**	**100**	**360.000.000,00**	**100**	**122.960.613,00**	**100**	**263.400.000,00**	**0**	**25.000.800,00**	**50**	**21.755.700,00**	**0**	**12.658.600,00**	**50**	**158.939.850,00**	**100**	**218.354.950,00**	**100%**	**83%**	**200**	**341.315.563,00**	**200%**	**61%**	
2	10	10	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	20	360.000.000,00	0	122.960.613,00	10	263.400.000,00	1	25.000.800,00	3	21.755.700,00	4	12.658.600,00	2	158.939.850,00	10	218.354.950,00	100%	83%	10	341.315.563,00	50%	95%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
2	**11**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**																									
2	**11**	**2**			**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Prosentase Data Perencanaan Lingkungan Hidup yang Tersedia**	**%**	**79,5**	**1.680.124.000,00**	**72**	**776.317.516,00**	**79,49**	**299.284.000,00**	**0**	**6.505.000,00**	**0**	**10.568.800,00**	**79,49**	**233.860.750,00**	**0**	**32.559.750,00**	**79,49**	**283.494.300,00**	**100%**	**95%**	**151**	**1.059.811.816,00**	**191%**	**63%**	
2	**11**	**2**	**2.01**		**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**	**Jumlah data dan informasi PPLH yang tersedia**	**dokumen**	**7**	**1.162.506.000,00**	**3**	**471.961.531,00**	**1**	**123.700.000,00**	**0**	**6.505.000,00**	**0**	**8.118.800,00**	**1**	**83.855.000,00**	**0**	**15.278.000,00**	**1**	**113.756.800,00**	**100%**	**92%**	**4**	**585.718.331,00**	**57%**	**10%**	
2	11	2	2.01	1	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	dokumen	7	1.162.506.000,00	3	471.961.531,00	1	123.700.000,00	0	6.505.000,00	0	8.118.800,00	1	83.855.000,00	0	15.278.000,00	1	113.756.800,00	100%	92%	4	585.718.331,00	57%	50%	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**2**	**2.02**		**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota**	**Jumlah data dan informasi kajian LH yang tersedia**	**dokumen**	**4**	**517.618.000,00**	**2**	**304.355.985,00**	**1**	**175.584.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**2.450.000,00**	**1**	**150.005.750,00**	**0**	**17.281.750,00**	**1**	**169.737.500,00**	**100%**	**97%**	**3**	**474.093.485,00**	**75%**	**33%**	
2	11	2	2.02	2	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	dokumen	3	517.618.000,00	2	304.355.985,00	1	175.584.000,00	0	0,00	0	2.450.000,00	1	150.005.750,00	0	17.281.750,00	1	169.737.500,00	100%	97%	3	474.093.485,00	100%	92%	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**3**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Prosentase titik sampel kualitas air dan udara yang memenuhi baku mutu**	**%**	**50,1**	**5.260.125.365,00**	**53**	**2.396.400.474,00**	**50**	**1.034.768.770,00**	**0**	**66.867.500,00**	**7,5**	**254.725.300,00**	**20**	**327.187.750,00**	**25,2**	**458.114.050,00**	**52,67**	**1.106.894.600,00**	**105%**	**107%**	**53**	**3.503.295.074,00**	**105%**	**67%**	
2	**11**	**3**	**2.01**		**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Jumlah kegiatan / usaha yang dipantau pencegahan pencemarannya**	**kegaitan/ usaha**	**177**	**3.783.012.365,00**	**20**	**1.736.793.793,00**	**78**	**607.704.574,00**	**0**	**59.984.500,00**	**53**	**158.641.300,00**	**13**	**185.988.750,00**	**22**	**201.944.500,00**	**88**	**606.559.050,00**	**113%**	**100%**	**88**	**2.343.352.843,00**	**50%**	**16%**	
2	11	3	2.01	1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	dokumen	2	2.276.442.000,00	0	989.979.512,00	1	231.912.780,00	0	44.808.500,00	0	57.276.000,00	0	31.829.250,00	1	97.551.500,00	1	231.465.250,00	100%	100%	1	1.221.444.762,00	50%	54%	Dinas Lingkungan Hidup

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
2	11	3	2.01	2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	dokumen	2	1.506.570.365,00	0	746.814.281,00	1	375.791.794,00	0	15.176.000,00	0	101.365.300,00	0	154.159.500,00	1	104.393.000,00	1	375.093.800,00	100%	100%	1	1.121.908.081,00	50%	74%	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**3**	**2.02**		**Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**jumlah usaha / kegiatan yang sudah melakukan pengolahan limbah cair**	**usaha/ kegaitan**	**35**	**1.477.113.000,00**	**0**	**659.606.681,00**	**17**	**427.064.196,00**	**0**	**6.883.000,00**	**3**	**96.084.000,00**	**9**	**141.199.000,00**	**5**	**256.169.550,00**	**17**	**500.335.550,00**	**100%**	**117%**	**17**	**1.159.942.231,00**	**49%**	**34%**	
2	11	3	2.02	1	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	laporan	4	1.070.113.000,00	0	530.598.681,00	2	301.831.396,00	0	870.000,00	1	90.584.000,00	0	135.199.000,00	1	74.430.450,00	2	301.083.450,00	100%	100%	2	831.682.131,00	50%	78%	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	3	2.02	3	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	titik	4	407.000.000,00	0	129.008.000,00	2	125.232.800,00	0	6.013.000,00	0	5.500.000,00	1	6.000.000,00	1	181.739.100,00	2	199.252.100,00	100%	159%	2	328.260.100,00	50%	81%	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**4**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**Prosentase jumlah spesies KEHATI Lokal Daerah**	**%**	**100**	**481.500.000,00**	**97**	**168.379.500,00**	**100**	**76.700.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**130.800,00**	**100**	**75.000.000,00**	**0**	**1.400.000,00**	**100**	**76.530.800,00**	**100%**	**100%**	**100**	**244.910.300,00**	**100%**	**51%**	
2	**11**	**4**	**2.01**		**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	**jumlah spesies KEHATI Lokal Daerah**	**spesies**	**352**	**481.500.000,00**	**340**	**168.379.500,00**	**342**	**76.700.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**130.800,00**	**352**	**75.000.000,00**	**0**	**1.400.000,00**	**352**	**76.530.800,00**	**103%**	**100%**	**692**	**244.910.300,00**	**197%**	**16%**	
2	11	4	2.01	1	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	dokumen	4	481.500.000,00	2	168.379.500,00	1	76.700.000,00	0	0,00	0	130.800,00	1	75.000.000,00	0	1.400.000,00	1	76.530.800,00	100%	100%	3	244.910.300,00	75%	51%	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**5**			**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**Prosentase pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun(limbah B3)**	**%**	**78**	**598.627.000,00**	**74**	**249.397.166,00**	**75**	**51.985.000,00**	**0**	**0,00**	**23**	**0,00**	**39,5**	**2.000.000,00**	**13,5**	**43.855.000,00**	**76**	**45.855.000,00**	**101%**	**88%**	**76**	**295.252.166,00**	**97%**	**49%**	
2	**11**	**5**	**2.01**		**Penyimpanan sementara Limbah B3**	**Prosentase pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun(limbah B3)**	**lokasi**	**51**	**598.627.000,00**	**16**	**249.397.166,00**	**17**	**51.985.000,00**	**0**	**0,00**	**7**	**0,00**	**8**	**2.000.000,00**	**2**	**43.855.000,00**	**17**	**45.855.000,00**	**100%**	**88%**	**33**	**295.252.166,00**	**65%**	**8%**	
2	11	5	2.01	1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha integrasi	dokumen	17	598.627.000,00	7	249.397.166,00	5	51.985.000,00	0	0,00	3	0,00	2	2.000.000,00	1	43.855.000,00	6	45.855.000,00	120%	88%	13	295.252.166,00	76%	49%	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**6**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**Prosentase pelaku usaha / kegiatan yang taat terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)**	**%**	**88,20**	**2.018.065.600,00**	**65**	**623.452.150,00**	**76,47**	**323.629.200,00**	**0**	**13.950.000,00**	**35**	**75.301.000,00**	**29,7**	**42.095.000,00**	**12,06**	**188.526.000,00**	**76,76**	**319.872.000,00**	**100%**	**99%**	**77**	**943.324.150,00**	**87%**	**47%**	
2	**11**	**6**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**jumlah Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**perusahaan**	**50**	**2.018.065.600,00**	**15**	**623.452.150,00**	**17**	**323.629.200,00**	**0**	**13.950.000,00**	**7**	**75.301.000,00**	**8**	**42.095.000,00**	**7**	**188.526.000,00**	**22**	**319.872.000,00**	**129%**	**99%**	**37**	**943.324.150,00**	**74%**	**16%**	
2	11	6	2.01	1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	dokumen	8	1.407.303.100,00	0	377.806.900,00	4	177.829.200,00	0	13.950.000,00	2	22.424.000,00	1	31.050.000,00	5	108.568.000,00	5	175.992.000,00	125%	99%	5	553.798.900,00	63%	39%	Dinas Lingkungan Hidup

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
2	11	6	2.01	3	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah	laporan	20	610.762.500,00	0	245.645.250,00	10	145.800.000,00	0	0,00	5	52.877.000,00	4	11.045.000,00	5	79.958.000,00	14	143.880.000,00	140%	99%	14	389.525.250,00	70%	64%	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**8**			**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**PROSENTASE PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**%**	**100**	**3.254.550.000,00**	**100**	**906.615.834,00**	**100**	**672.265.000,00**	**0**	**31.555.000,00**	**0**	**44.591.450,00**	**50**	**43.602.500,00**	**50**	**498.481.150,00**	**100**	**618.230.100,00**	**100%**	**92%**	**100**	**1.524.845.934,00**	**100%**	**47%**	
2	**11**	**8**	**2.01**		**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**umlah Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/Kota**	**kegiatan**	**60**	**3.254.550.000,00**	**31**	**906.615.834,00**	**15**	**672.265.000,00**	**0**	**31.555.000,00**	**0**	**44.591.450,00**	**11**	**43.602.500,00**	**4**	**498.481.150,00**	**15**	**618.230.100,00**	**100%**	**92%**	**46**	**1.524.845.934,00**	**77%**	**19%**	
2	11	8	2.01	2	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	dokumen	16	3.254.550.000,00	8	906.615.834,00	4	672.265.000,00	0	31.555.000,00	0	44.591.450,00	3	43.602.500,00	1	498.481.150,00	4	618.230.100,00	100%	92%	12	1.524.845.934,00	75%	47%	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**10**			**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Prosentase penanganan pengaduan lingkungan hidup**	**%**	**100**	**393.000.000,00**	**100**	**172.561.600,00**	**100**	**145.000.000,00**	**0**	**0,00**	**40**	**49.580.500,00**	**60**	**28.321.500,00**	**0**	**65.677.000,00**	**100**	**143.579.000,00**	**100%**	**99%**	**100**	**316.140.600,00**	**100%**	**80%**	
2	**11**	**10**	**2.01**		**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**	**jumlah pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)**	**kasus**	**20**	**393.000.000,00**	**20**	**172.561.600,00**	**5**	**145.000.000,00**	**0**	**0,00**	**2**	**49.580.500,00**	**3**	**28.321.500,00**	**3**	**65.677.000,00**	**8**	**143.579.000,00**	**160%**	**99%**	**28**	**316.140.600,00**	**140%**	**37%**	
2	11	10	2.01	1	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	dokumen	10	165.000.000,00	0	94.762.350,00	5	45.000.000,00	0	0,00	2	10.943.000,00	3	27.106.000,00	3	6.738.000,00	8	44.787.000,00	160%	100%	8	139.549.350,00	80%	85%	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	10	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	dokumen	2	228.000.000,00	0	77.799.250,00	1	100.000.000,00	0	0,00	1	38.637.500,00	0	1.215.500,00	0	58.939.000,00	1	98.792.000,00	100%	99%	1	176.591.250,00	50%	77%	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**11**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Prosentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga**	**persen**	**71**	**78.582.982.000,00**	**72,98**	**7.158.474.849,00**	**72**	**6.184.615.336,00**	**0**	**319.408.050,00**	**72,04**	**1.003.632.965,00**	**0,02**	**744.980.443,00**	**0,35**	**3.486.007.367,00**	**72,41**	**5.554.028.825,00**	**101%**	**90%**	**145**	**12.712.503.674,00**	**205%**	**16%**	
2	**11**	**11**	**2.01**		**Pengelolaan Sampah**	**Jumlah sampah yang dikelola**	**ton**	**163697**	**78.136.982.000,00**	**82783**	**6.512.022.938,00**	**43780**	**6.084.615.336,00**	**0**	**319.408.050,00**	**16756,17**	**992.908.465,00**	**13.538.096**	**705.465.443,00**	**10213,01**	**3.455.354.867,00**	**10213,012**	**5.473.136.825,00**	**23%**	**90%**	**92996**	**11.985.159.763,00**	**57%**	**7%**	
2	11	11	2.01	2	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	lokasi	8	1.212.900.000,00	4	222.738.881,00	2	201.015.336,00	0	3.742.700,00	2	10.016.900,00	0	7.303.450,00	0	154.090.863,00	2	175.153.913,00	100%	87%	6	397.892.794,00	75%	33%	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11	2.01	3	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	ton	128107	18.591.500.000,00	60840	6.289.284.057,00	32280	2.130.000.000,00	7854	262.032.750,00	4218,558	372.752.750,00	9759,66	498.050.580,00	7500,786	723.687.900,00	29333,004	1.856.523.980,00	91%	87%	90173	8.145.808.037,00	70%	44%	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11	2.01	4	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Kelompok	86	632.582.000,00	0	0,00	43	92.000.000,00	0	53.632.600,00	27	34.135.000,00	0	2.500.000,00	0	610.500,00	27	90.878.100,00	63%	99%	27	90.878.100,00	31%	14%	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11	2.01	7	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	unit	6	57.700.000.000,00	0	0,00	3	3.661.600.000,00	0	0,00	2	576.003.815,00	0	197.611.413,00	1	2.576.965.604,00	3	3.350.580.832,00	100%	92%	3	3.350.580.832,00	50%	6%	Dinas Lingkungan Hidup

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
2	**11**	**11**	**2.03**		**Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta**	**jumlah Pihak Swasta pengelola sampah yang dibina dan diawasi**	**kelompok**	**140**	**446.000.000,00**	**45**	**646.451.911,00**	**45**	**100.000.000,00**	**0**	**0,00**	**20**	**10.724.500,00**	**14**	**39.515.000,00**	**11**	**30.652.500,00**	**45**	**80.892.000,00**	**100%**	**81%**	**90**	**727.343.911,00**	**64%**	**18%**	
2	11	11	2.03	2	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Jumlah Unit/Usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lembaga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja	unit	6	446.000.000,00	0	646.451.911,00	3	100.000.000,00	0	0,00	3	10.724.500,00	0	39.515.000,00	0	30.652.500,00	3	80.892.000,00	100%	81%	3	727.343.911,00	50%	163%	Dinas Lingkungan Hidup
2	**12**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**																									
2	**12**	**2**			**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Persentase Penerbitan Dokumen Kependudukan**	**%**	**85**	**1.436.352.900,00**		**507.626.485,00**	**97**	**187.143.864,00**	**0**	**68.386.235,00**	**66,22**	**27.732.650,00**	**90,66**	**36.415.000,00**	**97**	**54.468.700,00**	**90,66**	**187.002.585,00**	**93%**	**100%**	**91**	**694.629.070,00**	**107%**	**48%**	
2	**12**	**2**	**2.01**		**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	**Persentase Penerbitan KTP EL dan KIA**	**%**	**99**	**1.185.282.900,00**		**507.626.485,00**	**96**	**122.853.104,00**	**0**	**46.155.835,00**	**25**	**27.732.650,00**	**100**	**27.277.000,00**	**97**	**21.547.000,00**	**97**	**122.712.485,00**	**101%**	**100%**	**97**	**630.338.970,00**	**98%**	**10%**	
2	12	2	2.01	4	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan hasil peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	laporan	24	753.071.200,00	0	368.400.188,00	12	85.822.640,00	0	36.859.835,00	5	20.704.650,00	3	10.541.000,00	4	17.596.000,00	12	85.701.485,00	100%	100%	12	454.101.673,00	50%	60%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	2	2.01	5	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	dokumen	24	432.211.700,00	0	139.226.297,00	12	37.030.464,00	0	9.296.000,00	5	7.028.000,00	3	16.736.000,00	4	3.951.000,00	12	37.011.000,00	100%	100%	12	176.237.297,00	50%	41%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**2**	**2.03**		**Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	**Persentase Penerbitan Kartu Keluarga**	**%**	**99**	**251.070.000,00**		**0,00**	**96**	**64.290.760,00**	**0**	**22.230.400,00**	**0**	**0,00**	**3**	**9.138.000,00**	3	**32.921.700,00**	**6**	**64.290.100,00**	**6%**	**100%**	**6**	**64.290.100,00**	**6%**	**26%**	
2	12	2	2.03	3	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan hasil fasilitasi pendaftaran penduduk	laporan	24	251.070.000,00	0	0,00	12	64.290.760,00	0	22.230.400,00	0	0,00	3	9.138.000,00	0	32.921.700,00	3	64.290.100,00	25%	100%	3	64.290.100,00	13%	26%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**3**			**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**Persentase Kepemilikan Dokumen Akta Pencatatan Sipil**	**%**	**94,75**	**2.024.023.360,00**	**0**	**855.056.585,00**	**94,5**	**172.282.982,00**	**0**	**0,00**	**99,2**	**93.980.000,00**	**94,92**	**0,00**	**94,5**		**94,92**	**93.980.000,00**	**100%**	**55%**	**95**	**949.036.585,00**	**100%**	**47%**	
2	**12**	**3**	**2.01**		**Pelayanan Pencatatan Sipil**	**Persentase Penerbitan Dokumen Akta Perkawinan dan Akta Perceraian Non Muslim**	**%**	**95**	**2.024.023.360,00**	**0**	**855.056.585,00**	**91**	**172.282.982,00**	**0**	**0,00**	**0**	**93.980.000,00**	**100**	**0,00**	**94,5**		**94,5**	**93.980.000,00**	**104%**	**55%**	**95**	**949.036.585,00**	**99%**	**5%**	
2	12	3	2.01	1	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah dokumen hasil pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	dokumen	24	562.162.544,00	0	196.297.000,00	12	87.596.380,00	0	0,00	5	34.200.000,00	3	0,00	4	50.673.600,00	12	84.873.600,00	100%	97%	12	281.170.600,00	50%	50%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	3	2.01	2	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah layanan pencatatan sipil yang ditingkatkan	layanan	8	1.461.860.816,00	0	658.759.585,00	4	84.686.602,00	0	0,00	4	59.780.000,00	4	0,00	0	24.680.000,00	4	84.460.000,00	100%	100%	4	743.219.585,00	50%	51%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**4**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**Akurasi database kependudukan**	**%**	**100**	**1.493.237.856,00**	**100**	**575.950.556,00**	**99,46**	**215.242.891,00**	**0**	**77.865.443,00**	**100**	**75.632.167,00**	**100**	**13.175.000,00**	**99,46**	**46.908.000,00**	**100**	**213.580.610,00**	**101%**	**99%**	**100**	**789.531.166,00**	**100%**	**53%**	
2	**12**	**4**	**2.01**		**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**	**Persentase update data penduduk**	**%**	**77**	**1.047.457.856,00**	**92**	**575.950.556,00**	**83**	**69.029.960,00**	**0**	**3.304.000,00**	**0**	**58.632.167,00**	**100**	**175.000,00**	**83**	**6.788.000,00**	**83**	**68.899.167,00**	**100%**	**100%**	**175**	**644.849.723,00**	**227%**	**7%**	
2	12	4	2.01	1	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah dokumen data kependudukan yang diolah dan disajikan	dokumen	24	789.255.057,00	0	517.801.519,00	12	33.695.600,00	0	0,00	1	32.895.000,00	1	0,00	0	800.000,00	2	33.695.000,00	17%	100%	2	551.496.519,00	8%	70%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	4	2.01	2	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah dokumen kerjasama dan pemanfaatan data kependudukan	dokumen	32	258.202.799,00	0	58.149.037,00	16	35.334.360,00	0	3.304.000,00	17	25.737.167,00	17	175.000,00	18	5.988.000,00	17	35.204.167,00	106%	100%	17	93.353.204,00	53%	36%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**4**	**2.03**		**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Persentase Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**%**	**100**	**445.780.000,00**	**0**	**0,00**	**12**	**146.212.931,00**	**0**	**74.561.443,00**	**5**	**17.000.000,00**	**3**	**13.000.000,00**	**4**	**40.120.000,00**	**12**	**144.681.443,00**	**100%**	**99%**	**12**	**144.681.443,00**	**12%**	**32%**	
2	12	4	2.03	5	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan hasil sosialisasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	laporan	24	445.780.000,00	0	0,00	12	146.212.931,00	0	74.561.443,00	5	17.000.000,00	3	13.000.000,00	4	40.120.000,00	12	144.681.443,00	100%	99%	12	144.681.443,00	50%	32%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1						2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
									K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
2	**14**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**																											
2	**14**	**2**				**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**Meningkatnya Jumlah SSK**	**SSK**	**8**		**0**		**8**		**0**		**0**		**9**		**0**		**9**								
							Meningkatnya Kampung KB yang berstandar paripurna	**Kampung KB**	**5**	**2.019.163.184,00**	**0**	**1.091.023.929,00**	**5**	**704.621.300,00**	**0**	**64.433.900,00**	**0**	**169.285.000,00**	**6**	**95.774.400,00**	**1**	**76.712.600,00**	**7**	**406.205.900,00**							
2	**14**	**2**	**2.01**			**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	**Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota**	**Dokumen**	**14**	**236.267.131,00**	**0**	**304.325.154,00**	**7**	**93.263.600,00**	**0**	**7.128.400,00**	**2**	**27.537.600,00**	**4**	**38.243.600,00**	**1**	**20.352.600,00**	**7**	**93.262.200,00**	**100%**	**100%**	**100**	**397.587.354,00**	**714%**	**168%**	
2	14	2	2.01	7		Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Dokumen	14	236.267.131,00	0	304.325.154,00	7	93.263.600,00	0	7.128.400,00	2	27.537.600,00	4	38.243.600,00	1	20.352.600,00	7	93.262.200,00	100%	100%	7	397.587.354,00	50%	168%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**14**	**2**	**2.02**			**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah kelurahan yang telah melakukan updating data keluarga**	**Kelurahan**	**27**	**1.782.896.053,00**	**27**	**786.698.775,00**	**27**	**611.357.700,00**	**27**	**57.305.500,00**	**27**	**141.747.400,00**	**27**	**57.530.800,00**	**27**	**56.360.000,00**	**27**	**312.943.700,00**	**100%**	**51%**	**100**	**1.099.642.475,00**	**370%**	**62%**	
2	14	2	2.02	9		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Laporan	24	593.430.000,00	0	0,00	12	296.715.000,00	0	0,00	5	89.787.030,00	4	54.465.720,00	3	151.092.780,00	12	295.345.530,00	100%	100%	12	295.345.530,00	50%	50%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	2	2.02	12		Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Laporan	27	1.742.525.553,00	27	745.578.675,00	27	314.642.700,00	4	57.305.500,00	7	141.747.400,00	10	57.530.800,00	6	56.360.000,00	27	312.943.700,00	100%	99%	54	1.058.522.375,00	200%	61%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	2	2.02	13		Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Dokumen	24	40.370.500,00	0	41.120.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0%	0%	0	41.120.100,00	0%	102%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**14**	**3**				**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**Menurunnya Unmet Need**	**%**	**8,5**	**11.545.509.145,00**	**0**	**3.634.088.000,00**	**8**	**2.674.264.000,00**	**0**	**80.377.200,00**	**0**	**291.909.800,00**	**6**	**786.802.600,00**	**5**	**1.067.518.433,00**	**4,73**	**2.226.608.033,00**	**63%**	**83%**	**5**	**5.860.696.033,00**	**56%**	**51%**	
2	**14**	**3**	**2.01**			**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja**	**Organisasi**	**27**	**3.320.859.395,00**	**27**	**701.296.240,00**	**27**	**533.450.000,00**	**27**	**8.092.000,00**	**27**	**85.245.200,00**	**27**	**153.040.500,00**	**27**	**281.365.600,00**	**27**	**527.743.300,00**	**100%**	**99%**	**100**	**1.229.039.540,00**	**370%**	**37%**	
2	14	3	2.01	1		Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Organisasi	99	16.897.790,00	45	5.450.900,00	27	120.000.000,00	0	0,00	0	0,00	22	47.189.300,00	27	72.680.800,00	27	119.870.100,00	100%	100%	72	125.321.000,00	73%	742%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	3	2.01	2		Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Dokumen	5	539.610.120,00	1	25.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0%	0%	1	25.000.000,00	20%	5%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	3	2.01	3		Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Unit	8	274.449.020,00	8	117.998.090,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0%	0%	8	117.998.090,00	100%	43%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	3	2.01	4		Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Dokumen	5	207.500.000,00	1	50.000.000,00	2	150.000.000,00	0	0,00	0	10.250.000,00	2	44.370.000,00	0	95.329.200,00	2	149.949.200,00	100%	100%	3	199.949.200,00	60%	96%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
2	14	3	2.01	6	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Laporan	30	283.987.450,00	3	176.613.500,00	12	39.000.000,00	0	0,00	0	6.405.600,00	15	12.811.200,00	3	19.216.800,00	18	38.433.600,00	150%	99%	21	215.047.100,00	70%	76%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	3	2.01	7	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Laporan	144	1.998.415.015,00	0	326.233.750,00	72	144.450.000,00	6	8.092.000,00	23	68.589.600,00	27	20.928.000,00	16	46.818.800,00	72	144.428.400,00	100%	100%	72	470.662.150,00	50%	24%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	3	2.01	8	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Laporan	4	0,00	0	0,00	2	80.000.000,00	0	0,00	0	0,00	3	27.742.000,00	1	47.320.000,00	4	75.062.000,00	200%	94%	4	75.062.000,00	100%	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**14**	**3**	**2.02**		**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	**Persentase Kader yang Melakukan Updating Data**	**%**	**100**	**1.851.287.240,00**	**100**	**203.349.036,00**	**100**	**58.000.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**15.500.000,00**	**77**	**7.500.000,00**	**23**	**35.000.000,00**	**100,07**	**58.000.000,00**	**100%**	**100%**	**100**	**261.349.036,00**	**100%**	**14%**	
2	14	3	2.02	1	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Organisasi	15	8.000.000,00	0	0,00	7	4.000.000,00	0	0,00		0,00	6	2.000.000,00	1	2.000.000,00	7	4.000.000,00	100%	100%	7	4.000.000,00	47%	50%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	3	2.02	2	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	Unit	9	1.569.773.400,00	3	4.849.036,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0%	0%	3	4.849.036,00	33%	0%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	3	2.02	4	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Orang	148	273.513.840,00	282	198.500.000,00	150	54.000.000,00	0	0,00	150	15.500.000,00	115	5.500.000,00	150	33.000.000,00	150	54.000.000,00	100%	100%	432	252.500.000,00	292%	92%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**14**	**3**	**2.03**		**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Angka Drop Out**	**%**	**18**	**6.113.862.510,00**	**17**	**2.457.040.874,00**	**18**	**1.965.314.000,00**	**0**	**62.325.200,00**	**0**	**136.384.600,00**	**5**	**590.410.100,00**	**6**	**734.718.833,00**	**11,02**	**1.523.838.733,00**	**61%**	**78%**	**100**	**3.980.879.607,00**	**556%**	**65%**	
2	14	3	2.03	1	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	56	117.777.499,00	12	19.808.950,00	22	13.000.000,00	2	550.000,00	10	1.100.000,00	12	1.000.000,00	1	5.900.000,00	25	8.550.000,00	114%	66%	37	28.358.950,00	66%	24%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	3	2.03	3	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Orang	1306	2.682.794.885,00	1382	440.491.868,00	651	781.632.000,00	79	61.775.200,00	138	130.804.600,00	178	140.372.600,00	427	128.166.100,00	822	461.118.500,00	126%	59%	2204	901.610.368,00	169%	34%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	3	2.03	6	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Unit	7	3.261.821.226,00	4	1.974.251.156,00	2	1.158.982.000,00	0	0,00	0	0,00	1	447.537.500,00	1	594.980.733,00	2	1.042.518.233,00	100%	90%	6	3.016.769.389,00	86%	92%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	3	2.03	8	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	4	51.468.900,00	2	22.488.900,00	4	11.700.000,00	0	0,00	1	4.480.000,00	1	1.500.000,00	2	5.672.000,00	4	11.652.000,00	100%	100%	6	34.140.900,00	150%	66%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
2	**14**	**3**	**2.04**		**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	**Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB**	**Dokumen**	**14**	**259.500.000,00**	**0**	**272.401.850,00**	**7**	**117.500.000,00**	**0**	**9.960.000,00**	**2**	**54.780.000,00**	**1**	**35.852.000,00**	**3**	**16.434.000,00**	**6**	**117.026.000,00**	**86%**	**100%**	**100**	**389.427.850,00**	**714%**	**150%**	
2	14	3	2.04	2	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Dokumen	2	18.000.000,00	0	0,00	1	9.000.000,00	0	0,00	0	0,00	1	8.960.000,00	0	0,00	1	8.960.000,00	100%	100%	1	8.960.000,00	50%	50%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	3	2.04	3	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	Kampung	8	241.500.000,00	7	272.401.850,00	7	108.500.000,00	0	9.960.000,00	0	54.780.000,00	8	26.892.000,00	0	16.434.000,00	8	108.066.000,00	114%	100%	15	380.467.850,00	188%	158%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**14**	**4**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Meningkatnya Kepesertaan Anggota Tribina PUS yang ber-KB**	**%**	**83**	**3.838.104.921,00**	**75**	**1.012.077.909,00**	**82**	**1.788.450.000,00**	**0**	**107.790.400,00**	**0**	**231.420.200,00**	**87**	**255.488.500,00**	**88**	**461.235.160,00**	**87,51**	**1.055.934.260,00**	**107%**	**59%**	**88**	**2.068.012.169,00**	**105%**	**54%**	
2	**14**	**4**	**2.01**		**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)**	**Orang**	**480**	**3.838.104.921,00**	**0**	**1.012.077.909,00**	**240**	**1.788.450.000,00**	**0**	**107.790.400,00**	**0**	**231.420.200,00**	**0**	**255.488.500,00**	**30**	**461.235.160,00**	**30**	**1.055.934.260,00**	**13%**	**59%**	**100**	**2.068.012.169,00**	**21%**	**54%**	
2	14	4	2.01	2	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Unit	40	722.400.000,00	0	0,00	20	361.200.000,00			-	0,00	0	0,00	20	353.250.000,00	20	353.250.000,00	100%	98%	20	353.250.000,00	50%	49%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	4	2.01	4	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Orang	480	1.116.860.997,00	0	96.376.650,00	240	172.563.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	210	152.643.200,00	210	152.643.200,00	88%	88%	210	249.019.850,00	44%	22%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	4	2.01	5	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Orang	504	885.654.000,00	54	475.780.000,00	225	973.800.000,00	33	52.200.000,00	74	185.110.000,00	118	185.962.000,00	107	205.240.000,00	332	628.512.000,00	148%	65%	386	1.104.292.000,00	77%	125%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	4	2.01	7	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Laporan	64	1.835.589.924,00	0	439.921.259,00	32	280.886.100,00	7	55.590.400,00	4	46.310.200,00	14	69.526.500,00	7	103.351.960,00	32	274.779.060,00	100%	98%	32	714.700.319,00	50%	39%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
2	**15**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**																									
2	**15**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Meningkatnya sarana dan prasarana, serta fasilitas perlengkapan lalu lintas**	**%**	**96**	**30.693.521.575,00**	**88**	**8.747.934.090,00**	**92**	**7.739.534.952,00**	**0**	**699.389.290,00**	**0**	**3.133.496.615,00**	**20**	**1.692.003.091,00**	**36**	**2.063.983.740,00**	**56**	**7.588.872.736,00**	**61%**	**98%**	**144**	**16.336.806.826,00**	**150%**	**53%**	
2	**15**	**2**	**2.02**		**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	**persentasi perlengkapan jalan yang berfugsi baik**	**%**	**90**	**14.220.829.200,00**	**80**	**4.469.504.093,00**	**85**	**3.296.725.427,00**	**0**	**224.073.550,00**	**60**	**1.382.915.295,00**	**20**	**941.713.379,00**	**20**	**676.927.550,00**	**100**	**3.225.629.774,00**	**100%**	**98%**	**100**	**7.695.133.867,00**	**111%**	**23%**	
2	15	2	2.02	1	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit	4	743.000.000,00	0	0,00	2	120.350.000,00	0	0,00		0,00	0	0,00	2	118.100.900,00	2	118.100.900,00	100%	98%	2	118.100.900,00	50%	16%	Dinas Perhubungan
2	15	2	2.02	2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit	400	7.089.651.100,00	0	2.819.718.747,00	200	1.092.124.400,00	0	0,00	200	1.005.175.000,00	0	0,00	200	100.910.000,00	200	1.106.085.000,00	100%	101%	200	3.925.803.747,00	50%	55%	Dinas Perhubungan
2	15	2	2.02	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	10	6.388.178.100,00	0	1.649.785.346,00	5	2.084.251.027,00	0	224.073.550,00	2	377.740.295,00	2	941.713.379,00	1	457.916.650,00	5	2.001.443.874,00	100%	96%	5	3.651.229.220,00	50%	57%	Dinas Perhubungan
2	**15**	**2**	**2.03**		**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**	**Persentase terminal berfungsi baik**	**%**	**100**	**441.250.000,00**	**100**	**129.927.332,00**	**100**	**189.200.000,00**	**0**	**9.430.400,00**	**100**	**176.923.350,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**100**	**186.353.750,00**	**100%**	**98%**	**100**	**316.281.082,00**	**100%**	**42%**	
2	15	2	2.03	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	4	441.250.000,00	0	129.927.332,00	2	189.200.000,00	0	9.430.400,00	2	176.923.350,00	0	0,00	0	0,00	2	186.353.750,00	100%	98%	2	316.281.082,00	50%	72%	Dinas Perhubungan
2	**15**	**2**	**2.04**		**Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**	**Persentase fasilitas terselanggaranya pelayanan parkir**	**%**	**100**	**2.315.588.000,00**	**100**	**457.236.963,00**	**100**	**1.026.708.000,00**	**0**	**105.067.630,00**	**70**	**500.500.102,00**	**25**	**123.946.058,00**	**5**	**284.801.895,00**	**100**	**1.014.315.685,00**	**100%**	**99%**	**100**	**1.471.552.648,00**	**100%**	**44%**	
2	15	2	2.04	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	4	2.315.588.000,00	0	457.236.963,00	1	1.026.708.000,00	0	105.067.630,00	1	500.500.102,00	1	123.946.058,00	1	284.801.895,00	1	1.014.315.685,00	100%	99%	1	1.471.552.648,00	25%	64%	Dinas Perhubungan
2	**15**	**2**	**2.05**		**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	**Persentase kendaraan lulus uji**	**%**	**100**	**1.777.738.540,00**	**100**	**359.270.000,00**	**100**	**652.225.800,00**	**0**	**65.895.750,00**	**100**	**444.786.250,00**	**25**	**67.383.519,00**	**25**	**66.045.540,00**	**100**	**644.111.059,00**	**100%**	**99%**	**100**	**1.003.381.059,00**	**100%**	**36%**	
2	15	2	2.05	1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Unit	20	1.231.958.540,00	0	151.860.000,00	10	257.077.000,00	0	45.991.750,00	10	109.961.435,00	10	29.377.334,00	10	66.045.540,00	10	251.376.059,00	100%	98%	10	403.236.059,00	50%	33%	Dinas Perhubungan
2	15	2	2.05	7	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Unit	24	545.780.000,00	0	207.410.000,00	12	395.148.800,00	0	19.904.000,00	12	334.824.815,00	12	38.006.185,00	12	0,00	12	392.735.000,00	100%	99%	12	600.145.000,00	50%	110%	Dinas Perhubungan
2	**15**	**2**	**2.06**		**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	**Persentase pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas**	**%**	**100**	**476.400.000,00**	**100**	**298.893.215,00**	**100**	**56.304.000,00**	**0**	**430.500,00**	**50**	**12.300.000,00**	**25**	**6.837.500,00**	**25**	**36.650.000,00**	**100**	**56.218.000,00**	**100%**	**100%**	**100**	**355.111.215,00**	**100%**	**12%**	
2	15	2	2.06	1	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	12	476.400.000,00	0	298.893.215,00	6	56.304.000,00	0	430.500,00	3	12.300.000,00	2	6.837.500,00	1	36.650.000,00	6	56.218.000,00	100%	100%	6	355.111.215,00	50%	75%	Dinas Perhubungan
2	**15**	**2**	**2.07**		**Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota**	**Persentase pengurusan rekomendasi anaalalin**	**%**	**100**	**1.259.945.000,00**	**100**	**155.909.530,00**	**100**	**231.316.000,00**	**0**	**28.385.740,00**	**40**	**34.773.585,00**	**25**	**44.148.670,00**	**35**	**120.425.005,00**	**100**	**227.733.000,00**	**100%**	**98%**	**100**	**383.642.530,00**	**100%**	**18%**	
2	15	2	2.07	4	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	Laporan	24	1.259.945.000,00	0	155.909.530,00	12	231.316.000,00	0	28.385.740,00	4	34.773.585,00	3	44.148.670,00	5	120.425.005,00	12	227.733.000,00	100%	98%	12	383.642.530,00	50%	30%	Dinas Perhubungan
2	**15**	**2**	**2.08**		**Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**	**Persentase terlaksananya kebijakan**	**%**	**100**	**4.206.326.200,00**	**100**	**1.187.655.043,00**	**100**	**944.622.525,00**	**0**	**107.871.800,00**	**40**	**248.204.388,00**	**25**	**242.114.165,00**	**35**	**329.807.360,00**	**100**	**927.997.713,00**	**100%**	**98%**	**100**	**2.115.652.756,00**	**100%**	**22%**	
2	15	2	2.08	1	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ	Jumlah Auditor dan Inspektor LLAJ yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	8	164.360.000,00	0	31.893.580,00	4	51.300.000,00	0	0,00	0	0,00	4	50.800.000,00	0	0,00	4	50.800.000,00	100%	99%	4	82.693.580,00	50%	50%	Dinas Perhubungan
2	15	2	2.08	2	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan	2	3.825.784.200,00	0	1.073.519.863,00	1	782.858.525,00	0	107.871.800,00	1	200.095.380,00	1	136.967.675,00	1	325.612.360,00	1	770.547.215,00	100%	98%	1	1.844.067.078,00	50%	48%	Dinas Perhubungan
2	15	2	2.08	4	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Laporan	2	216.182.000,00	0	82.241.600,00	1	110.464.000,00	0	0,00	1	48.109.008,00	1	54.346.490,00	1	4.195.000,00	1	106.650.498,00	100%	97%	1	188.892.098,00	50%	87%	Dinas Perhubungan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
2	**15**	**2**	**2.09**		**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase ketersediaan angkutan umum**	**%**	**100**	**5.995.444.635,00**	**80**	**1.689.537.914,00**	**100**	**1.342.433.200,00**	**0**	**158.233.920,00**	**40**	**333.093.645,00**	**25**	**265.859.800,00**	**35**	**549.326.390,00**	**100**	**1.306.513.755,00**	**100%**	**97%**	**100**	**2.996.051.669,00**	**100%**	**22%**	
2	15	2	2.09	1	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit	82	5.995.444.635,00	0	1.689.537.914,00	41	1.342.433.200,00	0	158.233.920,00	41	333.093.645,00	41	265.859.800,00	41	549.326.390,00	41	1.306.513.755,00	100%	97%	41	2.996.051.669,00	50%	50%	Dinas Perhubungan
2	**16**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**																										
2	**16**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**Persentase OPD yang memenuhi Standar Layanan Informasi Publik**	**%**	**82**	**19.968.763.819,00**	**0**	**8.937.107.544,00**	**80**	**3.236.765.320,00**	**0**	**426.221.755,00**	**0**	**903.975.044,00**	**0**	**914.865.123,00**	**95**	**1.722.101.456,00**	**95**	**3.967.163.378,00**	**119%**	**123%**	**95**	**12.904.270.922,00**	**116%**	**65%**	
2	**16**	**2**	**2.01**		**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi dan kebijakan Pemerintah Daerah**	**%**	**100**	**19.968.763.819,00**	**100**	**8.937.107.544,00**	**100**	**3.236.765.320,00**	**100**	**426.221.755,00**	**100**	**903.975.044,00**	**100**	**914.865.123,00**	**100**	**1.722.101.456,00**	**100**	**3.967.163.378,00**	**100%**	**123%**	**100**	**12.904.270.922,00**	**100%**	**20%**	
2	16	2	2.01	2	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Dokumen	24	10.328.710.000,00	0	4.831.915.486,00	12	1.555.562.323,00	3	173.218.000,00	2	616.762.255,00	3	596.721.966,00	3	770.536.816,00	11	2.157.239.037,00	92%	139%	11	6.989.154.523,00	46%	68%	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	2	2.01	4	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	24	6.155.192.000,00	0	2.885.488.387,00	12	1.173.923.328,00	3	201.986.120,00	2	197.948.754,00	3	239.555.757,00	3	681.301.715,00	11	1.320.792.346,00	92%	113%	11	4.206.280.733,00	46%	68%	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	2	2.01	6	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Dokumen	24	857.480.819,00	0	356.151.919,00	12	250.664.450,00	3	32.117.635,00	2	44.929.035,00	3	37.523.400,00	3	128.600.425,00	11	243.170.495,00	92%	97%	11	599.322.414,00	46%	70%	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	2	2.01	8	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Dokumen	24	1.161.303.000,00	0	330.174.442,00	12	135.415.219,00	3	9.450.000,00	2	9.000.000,00	3	8.614.000,00	3	107.452.500,00	11	134.516.500,00	92%	99%	11	464.690.942,00	46%	40%	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	2	2.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Dokumen	24	1.466.078.000,00	0	533.377.310,00	12	121.200.000,00	3	9.450.000,00	2	35.335.000,00	3	32.450.000,00	3	34.210.000,00	11	111.445.000,00	92%	92%	11	644.822.310,00	46%	44%	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**16**	**3**			**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**Persentase perangkat daerah yang saling terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo**	**%**	**100**	**43.717.933.600,00**	**100**	**19.292.912.684,00**	**100**	**19.138.006.560,00**	**100**	**3.166.008.341,00**	**100**	**4.616.809.587,00**	**100**	**4.754.642.294,00**	**100**	**7.082.804.144,00**	**100**	**19.620.264.366,00**	**100%**	**103%**	**100**	**38.913.177.050,00**	**100%**	**89%**	
2	**16**	**3**	**2.01**		**Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase OPD pengguna domain.id**	**%**	**100**	**21.818.547.600,00**	**100**	**9.708.245.098,00**	**100**	**15.000.000.000,00**	**100**	**2.499.038.891,00**	**100**	**3.736.447.336,00**	**100**	**3.746.397.726,00**	**100**	**5.580.510.133,00**	**100**	**15.562.394.086,00**	**100%**	**104%**	**100**	**25.270.639.184,00**	**100%**	**71%**	
2	16	3	2.01	2	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	2	326.800.000,00	0	97.898.250,00	1	100.000.000,00	0	16.056.891,00	0	11.974.336,00	0	21.924.726,00	1	49.996.133,00	1	99.952.086,00	100%	100%	1	197.850.336,00	50%	61%	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	3	2.01	3	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Unit	164	21.491.747.600,00	0	9.610.346.848,00	3000	14.900.000.000,00	82	2.482.982.000,00	82	3.724.473.000,00	3000	3.724.473.000,00	3000	5.530.514.000,00	3000	15.462.442.000,00	100%	104%	3000	25.072.788.848,00	1829%	117%	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**16**	**3**	**2.02**		**Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah daerah**	**%**	**100**	**21.899.386.000,00**	**100**	**9.584.667.586,00**	**100**	**4.138.006.560,00**	**0**	**666.969.450,00**	**100**	**880.362.251,00**	**100**	**1.008.244.568,00**	**100**	**1.502.294.011,00**	**100**	**4.057.870.280,00**	**100%**	**98%**	**100**	**13.642.537.866,00**	**100%**	**19%**	
2	16	3	2.02	1	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E -Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	4	14.278.200.000,00	2	6.151.305.967,00	1	2.776.480.000,00	0	460.536.105,00	0	694.513.481,00	0	688.241.323,00	1	924.311.423,00	1	2.767.602.332,00	100%	100%	3	8.918.908.299,00	75%	62%	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	3	2.02	4	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Dokumen	2	1.855.000.000,00	0	991.453.621,00	1	273.700.000,00	0	48.832.130,00	0	54.568.405,00	0	71.034.075,00	1	94.065.305,00	1	268.499.915,00	100%	98%	1	1.259.953.536,00	50%	68%	Dinas Komunikasi dan Informatika

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
2	16	3	2.02	7	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Unit	20	1.840.000.000,00	14	1.183.626.044,00	3	475.942.000,00	0	49.308.715,00	0	35.445.365,00	3	125.845.170,00	3	173.061.505,00	3	383.660.755,00	100%	81%	17	1.567.286.799,00	85%	85%	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	3	2.02	8	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	layanan	6	1.359.380.960,00	2	488.583.156,00	2	180.778.560,00	0	27.300.000,00	0	18.200.000,00	2	27.300.000,00	2	107.867.778,00	2	180.667.778,00	100%	100%	4	669.250.934,00	67%	49%	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	3	2.02	9	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	Dokumen	2	1.404.605.000,00	0	461.549.400,00	1	76.906.000,00	0	0,00	0	13.590.000,00	0	10.303.000,00	1	88.638.000,00	1	112.531.000,00	100%	146%	1	574.080.400,00	50%	41%	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	3	2.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Dokumen	2	636.000.000,00	0	186.000.000,00	1	35.000.000,00	0	2.992.500,00	0	12.045.000,00	0	7.521.000,00	1	12.350.000,00	1	34.908.500,00	100%	100%	1	220.908.500,00	50%	35%	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	3	2.02	11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Dokumen	4	526.200.040,00	2	122.149.398,00	1	319.200.000,00	0	78.000.000,00	0	52.000.000,00	0	78.000.000,00	1	102.000.000,00	1	310.000.000,00	100%	97%	3	432.149.398,00	75%	82%	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**17**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**																										
2	**17**	**5**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**Persentase jumlah koperasi yang disetujui permohonan bersertifikat NIK**	**%**	**75**	**2.669.246.100,00**	**0**	**1.074.386.070,00**	**75**	**460.790.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**197.955.000,00**	**100**	**133.988.000,00**	**75**	**125.021.000,00**	**75**	**456.964.000,00**	**100%**	**99%**	**75**	**1.531.350.070,00**	**100%**	**57%**	
2	**17**	**5**	**2.01**		**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah koperasi yang mengajukan sertifikat NIK**	**koperasi**	**75**	**2.669.246.100,00**	**0**	**1.074.386.070,00**	**35**	**460.790.000,00**	**0**	**0,00**	**20**	**197.955.000,00**	**56**	**133.988.000,00**	**283**	**125.021.000,00**	**56**	**456.964.000,00**	**160%**	**99%**	**56**	**1.531.350.070,00**	**75%**	**17%**	
2	17	5	2.01	1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Orang	1100	2.669.246.100,00	264	1.074.386.070,00	300	460.790.000,00	0	0,00	185	197.955.000,00	60	133.988.000,00	120	125.021.000,00	365	456.964.000,00	122%	99%	629	1.531.350.070,00	57%	57%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	**17**	**6**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**Persentase koperasi yang dibina dan jenis usahanya bertambah**	**%**	**2,5**	**625.589.500,00**	**0**	**286.174.039,00**	**2,5**	**180.804.100,00**	**0**	**900.000,00**	**0**	**116.238.400,00**	**0**	**20.015.500,00**	**3**	**14.210.000,00**	**3**	**151.363.900,00**	**120%**	**84%**	**3**	**437.537.939,00**	**120%**	**70%**	
2	**17**	**6**	**2.01**		**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**jumlah koperasi yang dibina dan jenis usahanya bertambah**	**koperasi**	**10**	**625.589.500,00**	**0**	**286.174.039,00**	**5**	**180.804.100,00**	**0**	**900.000,00**	**0**	**116.238.400,00**	**2**	**20.015.500,00**	**3**	**14.210.000,00**	**5**	**151.363.900,00**	**100%**	**84%**	**5**	**437.537.939,00**	**50%**	**24%**	
2	17	6	2.01	1	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	unit usaha	564	625.589.500,00	306	286.174.039,00	130	180.804.100,00	0	900.000,00	0	116.238.400,00	120	20.015.500,00	10	14.210.000,00	130	151.363.900,00	100%	84%	436	437.537.939,00	77%	70%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	**17**	**8**			**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**Persentase Usaha Mikro dibina yang beromzet naik**	**%**	**8**	**2.378.413.520,00**	**0**	**1.161.069.300,00**	**7,33**	**202.295.406,00**	**0**	**17.029.300,00**	**0**	**40.311.768,00**	**0**	**71.054.451,00**	**5,54**	**72.930.806,00**	**5,54**	**201.326.325,00**	**76%**	**100%**	**6**	**1.362.395.625,00**	**69%**	**57%**	
2	**17**	**8**	**2.01**		**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**	**Jumlah pelaku usaha mikro yang dibina beromzet naik**	**orang**	**78**	**2.378.413.520,00**	**41**	**1.161.069.300,00**	**71**	**202.295.406,00**	**0**	**17.029.300,00**	**0**	**40.311.768,00**	**78**	**71.054.451,00**	**0**	**72.930.806,00**	**78**	**201.326.325,00**	**110%**	**100%**	**119**	**1.362.395.625,00**	**153%**	**8%**	
2	17	8	2.01	1	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Unit Usaha	420	2.378.413.520,00	254	1.161.069.300,00	60	202.295.406,00	0	17.029.300,00	48	40.311.768,00	30	71.054.451,00	0	72.930.806,00	78	201.326.325,00	130%	100%	332	1.362.395.625,00	79%	57%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1				2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
2	**18**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**																								
2	**18**	**2**			**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Persentase ketersediaan dokumen perencanaan penanaman modal**	**persen**	**100**	**64.312.500,00**	**100**	**79.478.636,00**	**100**	**34.700.000,00**	**0**	**0,00**	**100**	**350.000,00**	**0**	**34.700.000,00**	**0**	**1.050.000,00**	**100**	**36.100.000,00**	**100%**	**104%**	**200**	**115.578.636,00**	**200%**	**180%**	
2	**18**	**2**	**2.02**		**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	**Jumlah peta potensi investasi yang tersedia**	**buah**	**2**	**64.312.500,00**	**0**	**79.478.636,00**	**1**	**34.700.000,00**	**0**	**0,00**	**1**	**350.000,00**	**0**	**34.700.000,00**	**0**	**1.050.000,00**	**1**	**36.100.000,00**	**100%**	**104%**	**1**	**115.578.636,00**	**50%**	**56%**	
2	18	2	2.02	2	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Dokumen	2	64.312.500,00	1	79.478.636,00	1	34.700.000,00	0	0,00	1	350.000,00	0	34.700.000,00	0	1.050.000,00	1	36.100.000,00	100%	104%	2	115.578.636,00	100%	180%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**3**			**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Persentase investor yang merealisasikan investasinya**	**%**	**39**	**306.663.900,00**	**33**	**475.477.478,00**	**40**	**308.848.200,00**	**0**	**21.283.159,00**	**32**	**134.646.000,00**	**0**	**64.602.046,00**	**8**	**73.813.000,00**	**40**	**294.344.205,00**	**100%**	**95%**	**73**	**769.821.683,00**	**187%**	**251%**	
2	**18**	**3**	**2.01**		**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah investor baru**	**investor**	**40**	**306.663.900,00**	**20**	**475.477.478,00**	**30**	**308.848.200,00**	**0**	**21.283.159,00**	**27**	**134.646.000,00**	**0**	**64.602.046,00**	**3**	**73.813.000,00**	**30**	**294.344.205,00**	**100%**	**95%**	**50**	**769.821.683,00**	**125%**	**96%**	
2	18	3	2.01	2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Dokumen	2	306.663.900,00	0	475.477.478,00	1	308.848.200,00	0	21.283.159,00	1	134.646.000,00	0	64.602.046,00	0	73.813.000,00	1	294.344.205,00	100%	95%	1	769.821.683,00	50%	251%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**4**			**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase Pelayanan Perizinan Terselesaikan**	**%**	**95**	**2.733.930.000,00**	**100**	**1.120.081.006,00**	**90**	**798.175.500,00**	**0**	**121.171.645,00**	**99,62**	**172.699.938,00**	**99,55**	**268.994.118,00**	**99,87**	**217.899.090,00**	**99,87**	**780.764.791,00**	**111%**	**98%**	**200**	**1.900.845.797,00**	**210%**	**70%**	
2	**18**	**4**	**2.01**		**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah Pemohon Izin**	**izin**	**1900**	**2.733.930.000,00**	**0**	**1.120.081.006,00**	**4000**	**798.175.500,00**	**0**	**121.171.645,00**	**2656**	**172.699.938,00**	**3405**	**268.994.118,00**	**3090**	**217.899.090,00**	**3405**	**780.764.791,00**	**85%**	**98%**	**3405**	**1.900.845.797,00**	**179%**	**29%**	
2	18	4	2.01	1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Pelaku Usaha	3800	1.096.843.000,00	0	608.040.563,00	4000	227.314.000,00	0	41.758.900,00	1712	78.400.950,00	4322	53.106.540,00	9139	53.250.110,00	4322	226.516.500,00	108%	100%	4322	834.557.063,00	114%	76%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	4	2.01	2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	Kegiatan Usaha	860	1.018.287.000,00	0	441.933.533,00	240	222.501.500,00	0	41.948.220,00	66	79.685.788,00	175	53.188.090,00	153	45.989.730,00	394	220.811.828,00	164%	99%	394	662.745.361,00	46%	65%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	4	2.01	3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Orang	80	618.800.000,00	0	70.106.910,00	30	348.360.000,00	0	37.464.525,00	10	14.613.200,00	10	162.699.488,00	10	118.659.250,00	30	333.436.463,00	100%	96%	30	403.543.373,00	38%	65%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**5**			**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Jumlah Perusahaan yang melaporkan LKPM**	**perusahaan**		**1.919.970.000,00**	**126**	**788.433.486,00**	**110**	**462.675.000,00**	**0**	**47.017.000,00**	**6**	**128.992.700,00**	**110**	**143.972.500,00**	**18**	**114.891.508,00**	**134**	**434.873.708,00**	**122%**	**94%**	**260**	**1.223.307.194,00**	**#DIV/0!**	**64%**	
2	**18**	**5**	**2.01**		**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah perusahaan yang dibina**	**perusahaan**		**1.919.970.000,00**	**126**	**788.433.486,00**	**350**	**462.675.000,00**	**0**	**47.017.000,00**	**154**	**128.992.700,00**	**427**	**143.972.500,00**	**123**	**114.891.508,00**	**427**	**434.873.708,00**	**122%**	**94%**	**553**	**1.223.307.194,00**	**#DIV/0!**	**23%**	
2	18	5	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Pelaku Usaha	600	1.829.970.000,00	0	742.891.136,00	350	420.273.500,00	0	40.670.000,00	145	118.412.700,00	427	133.606.000,00	123	100.052.508,00	427	392.741.208,00	122%	93%	427	1.135.632.344,00	71%	62%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	5	2.01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	kegiatan usaha	40	90.000.000,00	0	45.542.350,00	20	42.401.500,00	0	6.347.000,00	9	10.580.000,00	12	10.366.500,00	28	14.839.000,00	12	42.132.500,00	60%	99%	12	87.674.850,00	30%	97%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
2	**18**	**6**			**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Persentase Jenis Izin Yang Diproses Secara Elektronik**	**%**	**100**	**615.661.400,00**	**100**	**160.829.750,00**	**100**	**198.248.500,00**	**0**	**29.143.200,00**	**0**	**90.342.000,00**	**100**	**31.345.000,00**	**0**	**37.033.200,00**	**100**	**187.863.400,00**	**100%**	**95%**	**200**	**348.693.150,00**	**200%**	**57%**	
2	**18**	**6**	**2.01**		**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Jenis Izin Yang Diproses Secara Elektronik**	**jenis izin**	**110**	**615.661.400,00**	**70**	**160.829.750,00**	**52**	**198.248.500,00**	**0**	**29.143.200,00**	**0**	**90.342.000,00**	**36**	**31.345.000,00**	**0**	**37.033.200,00**	**36**	**187.863.400,00**	**69%**	**95%**	**106**	**348.693.150,00**	**96%**	**31%**	
2	18	6	2.01	1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Dokumen	4	615.661.400,00	0	160.829.750,00	2	198.248.500,00	0	29.143.200,00	1	90.342.000,00	1	31.345.000,00	0	37.033.200,00	2	187.863.400,00	100%	95%	2	348.693.150,00	50%	57%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**19**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**																										
2	**19**	**2**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**Prosentase peningkatan pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan**	**%**	**15**	**2.666.700.000,00**	**0**	**1.220.188.762,00**	**10**	**475.000.000,00**	**0**	**104.740.600,00**	**0**	**84.533.228,00**	**0**	**272.360.100,00**	**10**	**8.080.000,00**	**10**	**469.713.928,00**	**100%**	**99%**	**10**	**1.689.902.690,00**	**67%**	**63%**	
2	**19**	**2**	**2.01**		**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**	**Jumlah Event Kepemudaan yang diselenggarakan**	**Event**	**16**	**2.666.700.000,00**	**7**	**1.220.188.762,00**	**2**	**475.000.000,00**	**0**	**104.740.600,00**	**0**	**84.533.228,00**	**0**	**272.360.100,00**	**1**	**8.080.000,00**	**1**	**469.713.928,00**	**50%**	**99%**	**8**	**1.689.902.690,00**	**50%**	**18%**	
2	19	2	2.01	8	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	Orang	400	2.666.700.000,00	178	1.220.188.762,00	100	475.000.000,00	23	104.740.600,00	78	84.533.228,00	23	272.360.100,00	24	8.080.000,00	78	469.713.928,00	78%	99%	256	1.689.902.690,00	64%	63%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
2	**19**	**3**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**Prosentase peningkatan pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan**	**%**	**30**	**12.433.197.280,00**	**0**	**10.470.919.397,00**	**25**	**7.493.389.861,00**	**0**	**954.328.577,00**	**0**	**515.134.482,00**	**0**	**2.582.474.700,00**	**0**	**3.345.799.992,00**	**0**	**7.397.737.751,00**	**0%**	**99%**	**0**	**17.868.657.148,00**	**0%**	**144%**	
2	**19**	**3**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah sarana prasarana olahraga yang terfasilitasi**	**Sarpras Olahraga**	**12**	**12.433.197.280,00**	**9**	**3.943.363.338,00**	**3**	**3.015.546.361,00**	**0**	**697.501.202,00**	**0**	**347.558.482,00**	**0**	**240.179.500,00**	**0**	**1.696.848.092,00**	**0**	**2.982.087.276,00**	**0%**	**99%**	**9**	**6.925.450.614,00**	**75%**	**24%**	
2	19	3	2.01	3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah sarana prasarana olahraga yang terfasilitasi	sarana prasarana	12	12.433.197.280,00	5	3.943.363.338,00	3	3.015.546.361,00	0	697.501.202,00	3	347.558.482,00	0	240.179.500,00	0	1.696.848.092,00	3	2.982.087.276,00	100%	99%	8	6.925.450.614,00	67%	56%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
2	**19**	**3**	**2.02**		**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah penyelenggaraan event olahraga prestasi tingkat daerah**	**Event**	**12**	**7.376.120.000,00**	**2**	**2.593.926.175,00**	**3**	**1.658.000.000,00**	**1**	**216.909.000,00**	**0**	**25.400.000,00**	**1**	**1.158.511.200,00**	**1**	**254.890.800,00**	**3**	**1.655.711.000,00**	**100%**	**100%**	**5**	**4.249.637.175,00**	**42%**	**22%**	
2	19	3	2.02	2	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah penyelenggaraan event olahraga prestasi tingkat daerah	Event	12	7.376.120.000,00	2	2.593.926.175,00	3	1.658.000.000,00	1	216.909.000,00	0	25.400.000,00	1	1.158.511.200,00	1	254.890.800,00	3	1.655.711.000,00	100%	100%	5	4.249.637.175,00	42%	58%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
2	**19**	**3**	**2.04**		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**	**Jumlah cabang olahraga yang dibina**	**Cabang Olahraga**	**40**	**7.500.000.000,00**	**26**	**3.627.260.635,00**	**10**	**2.203.843.500,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**1.000.000.000,00**	**11**	**1.144.482.100,00**	**11**	**2.144.482.100,00**	**110%**	**97%**	**37**	**5.771.742.735,00**	**93%**	**29%**	
2	19	3	2.04	2	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Organisasi Hasil Pengembangan Keolahragaan	Organisasi	1	7.500.000.000,00	0	3.627.260.635,00	1	2.203.843.500,00	0	0,00	0	0,00	0	1.000.000.000,00	1	1.144.482.100,00	1	2.144.482.100,00	100%	97%	1	5.771.742.735,00	100%	77%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
2	**19**	**3**	**2.05**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	**Jumlah event festival olahraga yang diselenggarakan**	**Festival Olahraga**	**12**	**5.300.000.000,00**	**8**	**306.369.249,00**	**3**	**616.000.000,00**	**0**	**39.918.375,00**	**0**	**142.176.000,00**	**0**	**183.784.000,00**	**1**	**249.579.000,00**	**1**	**615.457.375,00**	**33%**	**100%**	**9**	**921.826.624,00**	**75%**	**12%**	
2	19	3	2.05	1	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah event festival olahraga yang diselenggarakan	Festival Olahraga	12	5.300.000.000,00	4	306.369.249,00	3	616.000.000,00	0	39.918.375,00	2	142.176.000,00	0	183.784.000,00	1	249.579.000,00	3	615.457.375,00	100%	100%	7	921.826.624,00	58%	17%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
2	**20**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**																									
2	**20**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan**	**dokumen**	**2**	**1.208.128.000,00**	**0**	**408.885.019,00**	**1**	**125.000.000,00**	**0**	**7.753.700,00**	**0**	**3.273.500,00**	**0**	**1.160.000,00**	**1**	**111.239.500,00**	**1**	**123.426.700,00**	**100%**	**99%**	**1**	**532.311.719,00**	**50%**	**44%**	
2	**20**	**2**	**2.01**		**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan**	**survey**	**3**	**1.208.128.000,00**	**1**	**408.885.019,00**	**1**	**125.000.000,00**	**0**	**7.753.700,00**	**0**	**3.273.500,00**	**1**	**1.160.000,00**	**1**	**111.239.500,00**	**1**	**123.426.700,00**	**100%**	**99%**	**2**	**532.311.719,00**	**67%**	**10%**	
2	20	2	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Dokumen	2	1.208.128.000,00	1	408.885.019,00	1	125.000.000,00	0	7.753.700,00	0	3.273.500,00	0	1.160.000,00	1	111.239.500,00	1	123.426.700,00	100%	99%	2	532.311.719,00	100%	44%	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**21**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**																									
2	**21**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**Persentase OPD yang menggunakan layanan persandian untuk pengamanan informasi**	**%**	**100**	**1.645.502.695,00**	**100**	**409.071.269,00**	**100**	**292.872.000,00**	**0**	**6.738.000,00**	**0**	**1.945.000,00**	**0**	**88.817.175,00**	**100**	**187.392.700,00**	**100**	**284.892.875,00**	**100%**	**97%**	**100**	**693.964.144,00**	**100%**	**42%**	
2	**21**	**2**	**2.01**		**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah JKS (Jaring Komunikasi Sandi) yang digunakan**	**JKS**	**4**	**1.645.502.695,00**	**0**	**409.071.269,00**	**2**	**292.872.000,00**	**0**	**6.738.000,00**	**0**	**1.945.000,00**	**2**	**88.817.175,00**	**2**	**187.392.700,00**	**2**	**284.892.875,00**	**100%**	**97%**	**2**	**693.964.144,00**	**50%**	**17%**	
2	21	2	2.01	3	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Laporan	2	550.000.000,00	0	57.931.500,00	1	41.752.000,00	0	3.012.000,00	0	1.105.000,00	0	1.200.000,00	1	36.322.100,00	1	41.639.100,00	100%	100%	1	99.570.600,00	50%	18%	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	21	2	2.01	4	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Perangkat Daerah	34	1.095.502.695,00	0	351.139.769,00	34	251.120.000,00	34	3.726.000,00	34	840.000,00	34	87.617.175,00	34	151.070.600,00	34	243.253.775,00	100%	97%	34	594.393.544,00	100%	54%	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**22**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**																									
2	**22**	**2**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**Prosentase seni budaya yang dilestarikan**	**%**	**100**	**8.600.000.000,00**	**88**	**4.448.595.338,00**	**100**	**1.907.100.000,00**	**0**	**39.018.500,00**	**0**	**564.777.000,00**	**0**	**922.920.000,00**	**100**	**358.824.000,00**	**100**	**1.885.539.500,00**	**100%**	**99%**	**100**	**6.334.134.838,00**	**100%**	**74%**	
2	**22**	**2**	**2.02**		**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan**	**Budaya**	**15**	**8.600.000.000,00**	**30**	**4.448.595.338,00**	**15**	**1.907.100.000,00**	**0**	**39.018.500,00**	**0**	**564.777.000,00**	**0**	**922.920.000,00**	**15**	**358.824.000,00**	**15**	**1.885.539.500,00**	**100%**	**99%**	**45**	**6.334.134.838,00**	**300%**	**22%**	
2	22	2	2.02	1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah obyek pemajuan budaya yang dimanfaatkan	Budaya	37	6.700.000.000,00	19	3.552.051.073,00	10	1.637.100.000,00	0	39.018.500,00	3	564.777.000,00	0	662.805.000,00	3	349.224.000,00	6	1.615.824.500,00	60%	99%	25	5.167.875.573,00	68%	77%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
2	22	2	2.02	3	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi dalam Pemajuan Kebudayaan	Orang/Group	40	1.900.000.000,00	0	896.544.265,00	20	270.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	260.115.000,00	0	9.600.000,00	0	269.715.000,00	0%	100%	0	1.166.259.265,00	0%	61%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
2	**22**	**3**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	**Prosentase SDM, lembaga dan pranata kesenian yang dibina**	**%**	**100**	**975.000.000,00**	**0**	**246.447.060,00**	**100**	**50.000.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**14.000.000,00**	**0**	**23.360.000,00**	**0**	**12.523.250,00**	**0**	**49.883.250,00**	**0%**	**100%**	**0**	**296.330.310,00**	**0%**	**30%**	
2	**22**	**3**	**2.01**		**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah seni budaya yang dibina**	**Jenis**	**6**	**975.000.000,00**	**0**	**246.447.060,00**	**3**	**50.000.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**14.000.000,00**	**0**	**23.360.000,00**	**0**	**12.523.250,00**	**0**	**49.883.250,00**	**0%**	**100%**	**0**	**296.330.310,00**	**0%**	**5%**	
2	22	3	2.01	1	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah seniman yang mendapat pembinaan	Orang/Group	90	975.000.000,00	0	246.447.060,00	45	50.000.000,00	0	0,00	22	14.000.000,00	0	23.360.000,00	50	12.523.250,00	72	49.883.250,00	160%	100%	72	296.330.310,00	80%	30%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
2	**22**	**5**			**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**Jumlah cagar budaya dan WBTB yang berpotensi menjadi destinasi wisata**	**Obyek**	**6**	**808.200.000,00**	**2**	**282.450.570,00**	**2**	**50.000.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**13.842.400,00**	**0**	**29.885.000,00**	**4**	**6.115.500,00**	**4**	**49.842.900,00**	**200%**	**100%**	**6**	**332.293.470,00**	**100%**	**41%**	
2	**22**	**5**	**2.02**		**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	**Jumlah cagar budaya yang dikembangkan**	**Obyek**	**20**	**808.200.000,00**	**10**	**282.450.570,00**	**20**	**50.000.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**13.842.400,00**	**0**	**29.885.000,00**	**4**	**6.115.500,00**	**4**	**49.842.900,00**	**20%**	**100%**	**14**	**332.293.470,00**	**70%**	**6%**	
2	22	5	2.02	2	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dilindungi	Obyek	20	808.200.000,00	10	282.450.570,00	20	50.000.000,00	0	0,00	8	13.842.400,00	0	29.885.000,00	4	6.115.500,00	12	49.842.900,00	60%	100%	22	332.293.470,00	110%	41%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
2	**23**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**																									
2	**23**	**2**			**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan**	**%**	**5,95**	**3.961.075.499,00**	**5,8**	**1.797.838.631,00**	**6,0**	**949.099.000,00**	**0**	**200.715.000,00**	**0**	**165.125.361,00**	**0**	**191.015.500,00**	**5,8**	**364.525.132,00**	**5,8**	**921.380.993,00**	**97%**	**97%**	**6**	**2.719.219.624,00**	**101%**	**69%**	
2	**23**	**2**	**2.01**		**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase ketermanfaatan perpustakaan oleh masyarakat**	**%**	**4,9**	**1.436.090.499,00**	**4**	**904.777.619,00**	**4,6**	**291.040.000,00**	**0**	**79.772.500,00**	**0**	**69.055.361,00**	**0**	**43.620.000,00**	**4,7**	**93.922.132,00**	**4,7**	**286.369.993,00**	**102%**	**98%**	**9**	**1.191.147.612,00**	**178%**	**20%**	
2	23	2	2.01	1	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	layanan	148	1.436.090.499,00	0	904.777.619,00	74	291.040.000,00	24	79.772.500,00	50	69.055.361,00	0	43.620.000,00	0	93.922.132,00	74	286.369.993,00	100%	98%	74	1.191.147.612,00	50%	83%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	2	2.01	9	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Eksemplar	13700	650.190.000,00	2583	197.089.210,00	2400	66.800.000,00	0	0,00	0	600.000,00	1170	66.019.150,00	1170	0,00	2340	66.619.150,00	98%	100%	4923	263.708.360,00	36%	41%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**23**	**2**	**2.02**		**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah pemasyarakatan gemar membaca**	**kali**	**80**	**2.524.985.000,00**	**20**	**893.061.012,00**	**20**	**658.059.000,00**	**0**	**120.942.500,00**	**3**	**96.070.000,00**	**4**	**147.395.500,00**	**13**	**270.603.000,00**	**20**	**635.011.000,00**	**100%**	**96%**	**40**	**1.528.072.012,00**	**50%**	**25%**	
2	23	2	2.02	1	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	lokus	2600	2.324.985.000,00	0	893.061.012,00	2600	558.059.000,00	325	120.942.500,00		92.930.000,00	218	106.485.500,00	378	221.333.000,00	921	541.691.000,00	35%	97%	921	1.434.752.012,00	35%	62%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	2	2.02	4	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah perpustakaan berbasis inklusi sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	perpustakaan	2	200.000.000,00			1	100.000.000,00	0	0,00	1	3.140.000,00	0	40.910.000,00	0	49.270.000,00	1	93.320.000,00	100%	93%	1	93.320.000,00	50%	47%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**23**	**3**			**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	**Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan**	**%**	**38**	**372.375.876,00**	**35**	**97.495.500,00**	**37**	**128.037.656,00**	**0**	**33.648.500,00**	**0**	**16.146.000,00**	**0**	**9.325.000,00**	**37**	**44.510.000,00**	**37**	**103.629.500,00**	**100%**	**81%**	**72**	**201.125.000,00**	**189%**	**54%**	
2	**23**	**3**	**2.01**		**Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah karya cetak dan karya rekam koleksi daerah yang dilestarikan**	**Eksemplar**	**519**	**372.375.876,00**	**168**	**97.495.500,00**	**178**	**128.037.656,00**	**0**	**33.648.500,00**	**0**	**16.146.000,00**	**20**	**9.325.000,00**	**83**	**44.510.000,00**	**103**	**103.629.500,00**	**58%**	**81%**	**271**	**201.125.000,00**	**52%**	**28%**	
2	23	3	2.01	1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian naskah kuno	orang	4	330.000.000,00	0	97.495.500,00	2	106.849.718,00	0	33.648.500,00	2	13.771.000,00	0	0,00	0	38.185.000,00	2	85.604.500,00	100%	80%	2	183.100.000,00	50%	55%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	3	2.01	2	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah pengadaan/akuisisi naskah kuno	Eksemplar	4	42.375.876,00	0	0,00	2	21.187.938,00	0	0,00	4	2.375.000,00	3	9.325.000,00	3	6.325.000,00	3	18.025.000,00	150%	85%	3	18.025.000,00	75%	43%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**24**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**																									
2	**24**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan)**	**skor**	**90**	**2.581.457.105,00**	**85**	**1.027.017.095,00**	**88**	**705.708.673,00**	**0**	**155.998.700,00**	**0**	**175.754.165,00**	**0**	**116.250.600,00**	**85**	**240.094.142,00**	**85**	**688.097.607,00**	**97%**	**98%**	**170**	**1.715.114.702,00**	**189%**	**66%**	
2	**24**	**2**	**2.01**		**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Arsip Dinamis yang telah dibuatkan daftar arsip**	**%**	**100**	**1.320.740.815,00**	**100**	**570.774.338,00**	**100**	**363.150.000,00**	**0**	**45.227.000,00**	**0**	**86.464.165,00**	**0**	**69.138.600,00**	**100**	**148.626.142,00**	**100**	**349.455.907,00**	**100%**	**96%**	**100**	**920.230.245,00**	**100%**	**26%**	
2	24	2	2.01	2	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	berkas	118000	1.320.740.815,00	0	570.774.338,00	58000	363.150.000,00	4395	45.227.000,00	24166	86.464.165,00	17729	69.138.600,00	18762	148.626.142,00	65052	349.455.907,00	112%	96%	65052	920.230.245,00	55%	70%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
2	**24**	**2**	**2.02**		**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**	**Presentase Arsip Statis yang telah dibuatkan sarana temu balik arsip**	**%**	**100**	**1.260.716.290,00**	**0**	**456.242.757,00**	**100**	**342.558.673,00**	**0**	**110.771.700,00**	**0**	**89.290.000,00**	**0**	**47.112.000,00**	**100**	**91.468.000,00**	**100**	**338.641.700,00**	**100%**	**99%**	**100**	**794.884.457,00**	**100%**	**27%**	
2	24	2	2.02	2	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	arsip	530	1.260.716.290,00	0	456.242.757,00	260	342.558.673,00	93	110.771.700,00	198	89.290.000,00	43	47.112.000,00	63	91.468.000,00	198	338.641.700,00	76%	99%	198	794.884.457,00	37%	63%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**24**	**3**			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	**Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat**	**skor**	**8,8**	**499.291.000,00**	**8,5**	**114.659.915,00**	**8,6**	**162.762.100,00**	**0**	**72.028.400,00**	**0**	**77.019.900,00**	**0**	**9.718.000,00**	**0**	**0,00**	**8,5**	**158.766.300,00**	**99%**	**98%**	**9**	**273.426.215,00**	**98%**	**55%**	
2	**24**	**3**	**2.01**		**Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun**	**Persentase tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK**	**%**	**100**	**499.291.000,00**	**100**	**114.659.915,00**	**100**	**162.762.100,00**	**0**	**72.028.400,00**	**0**	**77.019.900,00**	**0**	**9.718.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**158.766.300,00**	**0%**	**98%**	**100**	**273.426.215,00**	**100%**	**32%**	
2	24	3	2.01	1	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	arsip	2100	245.390.000,00	0	58.068.250,00	1000	81.211.400,00	732	70.057.100,00	1664	0,00	0	8.000.000,00	0	0,00	1664	78.057.100,00	166%	96%	1664	136.125.350,00	79%	55%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24	3	2.01	2	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	berkas	2100	253.901.000,00	0	56.591.665,00	1000	81.550.700,00	0	1.971.300,00	1160	77.019.900,00	0	1.718.000,00	0	0,00	1160	80.709.200,00	116%	99%	1160	137.300.865,00	55%	54%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Rata - Rata Capaian Kinerja																							**99%**							
Rata - Rata Realisasi Anggaran																								**92%**						

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2019 s/d 2024		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2023) PAK		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) PAK		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I		II		III		IV										
1				2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
3	**25**			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**																									
3	**25**	**4**		**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Jumlah total produksi perikanan budidaya**	**Ton**	**850**	**735.000.000,00**	**280**	**189.006.375,00**	**285**	**186.241.000,00**	**34**	**38.533.520,00**	**37**	**46.078.316,00**	**38**	**32.590.380,00**	**60**	**67.413.101,00**	**169**	**184.615.317,00**	**59%**	**99%**	**449**	**373.621.692,00**	**53%**	**51%**	
3	**25**	**4**	**2.04**	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	**Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/kemitraan usaha/kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan) (RTP)**	**RTP**	**500**	**735.000.000,00**	**0**	**189.006.375,00**	**250**	**186.241.000,00**	**38**	**38.533.520,00**	**30**	**46.078.316,00**	**30**	**32.590.380,00**	**126**	**67.413.101,00**	**224**	**184.615.317,00**	**90%**	**99%**	**224**	**373.621.692,00**	**45%**	**25%**	
3	25	4	2.04	3 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	12	60.000.000,00	5	18.207.540,00	3	18.691.000,00	0	0,00	0	10.636.260,00	5	7.762.970,00	0	0,00	5	18.399.230,00	167%	98%	10	36.606.770,00	83%	61%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	25	4	2.04	5 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah pembudidaya yang memperoleh pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan di darat	Orang	140	675.000.000,00	0	170.798.835,00	100	167.550.000,00	100	38.533.520,00	0	35.442.056,00	0	24.827.410,00	15	67.413.101,00	115	166.216.087,00	115%	99%	115	337.014.922,00	82%	50%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	**25**	**5**		**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**Jumlah total produksi perikanan tangkap**	**Ton**	**267**	**240.000.000,00**	**93**	**37.905.320,00**	**89**	**34.510.000,00**	**0**	**16.100.000,00**	**0**	**5.240.000,00**	**0**	**4.800.000,00**	**18,5**	**8.213.600,00**	**18,5**	**34.353.600,00**	**21%**	**100%**	**112**	**72.258.920,00**	**42%**	**30%**	
3	**25**	**5**	**2.01**	**Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota**	**Jumlah nelayan/usaha perikanan tangkap yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/kemitraan usaha/kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)**	**orang**	**1305**	**240.000.000,00**	**435**	**37.905.320,00**	**435**	**34.510.000,00**	**0**	**16.100.000,00**	**75**	**5.240.000,00**	**150**	**4.800.000,00**	**210**	**8.213.600,00**	**435**	**34.353.600,00**	**100%**	**100%**	**870**	**72.258.920,00**	**67%**	**14%**	
3	25	5	2.01	1 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Dokumen	6	240.000.000,00	2	37.905.320,00	2	34.510.000,00	0	16.100.000,00	1	5.240.000,00	0	4.800.000,00	1	8.213.600,00	2	34.353.600,00	100%	100%	4	72.258.920,00	67%	30%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	**25**	**6**		**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Tingkat Konsumsi Makan Ikan**	**Kg/Kapita/tahun**	**15,9**	**432.000.000,00**	**16,9**	**777.117.512,00**	**16,1**	**190.004.000,00**	**0**	**3.735.000,00**	**0**	**82.879.300,00**	**0**	**74.392.197,00**	**17,8**	**21.422.612,00**	**17,8**	**182.429.109,00**	**111%**	**96%**	**35**	**959.546.621,00**	**218%**	**222%**	
3	**25**	**6**	**2.02**	**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**	**Jumlah pengolah dan pemasar ikan yang dibina**	**orang**	**200**	**142.000.000,00**	**133**	**521.692.839,00**	**50**	**65.164.000,00**	**0**	**3.735.000,00**	**20**	**28.237.800,00**	**1**	**24.099.100,00**	**14**	**8.634.612,00**	**35**	**64.706.512,00**	**70%**	**99%**	**168**	**586.399.351,00**	**84%**	**46%**	
3	25	6	2.02	1 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Unit Usaha	60	142.000.000,00	0	521.692.839,00	30	65.164.000,00	0	3.735.000,00	30	28.237.800,00	0	24.099.100,00	0	8.634.612,00	30	64.706.512,00	100%	99%	30	586.399.351,00	50%	413%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	**25**	**6**	**2.03**	**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan ikan skala rumah tangga**	**ton**	**76**	**290.000.000,00**	**30**	**255.424.673,00**	**26**	**124.840.000,00**	**0**	**0,00**	**15**	**54.641.500,00**	**6**	**50.293.097,00**	**9**	**12.788.000,00**	**30**	**117.722.597,00**	**115%**	**94%**	**60**	**373.147.270,00**	**79%**	**41%**	
3	25	6	2.03	2 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Pelaku Usaha	46	290.000.000,00	23	255.424.673,00	12	124.840.000,00	0	0,00	0	54.641.500,00	0	50.293.097,00	0	12.788.000,00	0	117.722.597,00	0%	94%	23	373.147.270,00	50%	129%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	**26**			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**																									
3	**26**	**2**		**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**Persentase Peningkatan Destinasi wisata daerah**	**%**	**100**	**7.064.048.300,00**	**0**	**751.373.483,00**	**100**	**437.660.866,00**	**0**	**14.596.500,00**	**0**	**168.386.250,00**	**0**	**90.320.000,00**	**100**	**163.595.165,00**	**100**	**436.897.915,00**	**100%**	**100%**	**100**	**1.188.271.398,00**	**100%**	**17%**	
3	**26**	**2**	**2.03**	**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Jumlah destinasi pariwisata yang dikelola**	**Destinasi**	**50**	**7.064.048.300,00**	**4**	**751.373.483,00**	**2**	**437.660.866,00**	**0**	**14.596.500,00**	**0**	**168.386.250,00**	**0**	**90.320.000,00**	**2**	**163.595.165,00**	**2**	**436.897.915,00**	**100%**	**100%**	**6**	**1.188.271.398,00**	**12%**	**6%**	
3	26	2	2.03	3 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi destinasi pariwisata yang dikembangkan	Lokasi	8	5.874.048.300,00	3	276.300.173,00	2	50.000.000,00	0	2.800.000,00	2	17.190.250,00	0	22.370.000,00	2	7.125.000,00	4	49.485.250,00	200%	99%	7	325.785.423,00	88%	6%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
3	26	2	2.03	6	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	Lokasi	38	1.190.000.000,00	2	475.073.310,00	12	387.660.866,00	0	11.796.500,00	8	151.196.000,00	0	67.950.000,00	4	156.470.165,00	12	387.412.665,00	100%	100%	14	862.485.975,00	37%	72%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
3	**26**	**3**			**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**Persentase peningkatan pemasaran pariwisata yang diselenggarakan**	**%**	**20**	**4.850.000.000,00**	**0**	**1.161.394.154,00**	**50**	**1.180.786.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**714.248.730,00**	**0**	**159.983.894,00**	**50**	**264.212.000,00**	**50**	**1.138.444.624,00**	**100%**	**96%**	**50**	**2.299.838.778,00**	**250%**	**47%**	
3	**26**	**3**	**2.01**		**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Jumlah promosi pariwisata**	**Event**	**16**	**4.850.000.000,00**	**10**	**1.161.394.154,00**	**4**	**1.180.786.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**714.248.730,00**	**0**	**159.983.894,00**	**2**	**264.212.000,00**	**2**	**1.138.444.624,00**	**50%**	**96%**	**12**	**2.299.838.778,00**	**75%**	**23%**	
3	26	3	2.01	2	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah promosi pariwisata	Event	8	4.850.000.000,00	0	1.161.394.154,00	4	1.180.786.000,00	0	0,00	4	714.248.730,00	0	159.983.894,00	2	264.212.000,00	6	1.138.444.624,00	150%	96%	6	2.299.838.778,00	75%	47%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
3	**26**	**5**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**Persentase SDM pariwisata pembekalan sektor kepariwisataan**	**%**	**20**	**2.524.600.000,00**	**19**	**409.222.799,00**	**19,5**	**278.000.000,00**	**0**	**400.000,00**	**0**	**2.720.000,00**	**0**	**9.930.000,00**	**21,5**	**264.600.600,00**	**21,5**	**277.650.600,00**	**110%**	**100%**	**41**	**686.873.399,00**	**203%**	**27%**	
3	**26**	**5**	**2.01**		**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	**Persentase SDM pariwisata pembekalan sektor kepariwisataan**	**%**	**20**	**2.524.600.000,00**	**8**	**409.222.799,00**	**19,5**	**278.000.000,00**	**0**	**400.000,00**	**0**	**2.720.000,00**	**0**	**9.930.000,00**	**21,5**	**264.600.600,00**	**21,5**	**277.650.600,00**	**110%**	**100%**	**30**	**686.873.399,00**	**148%**	**11%**	
3	26	5	2.01	6	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah pengembangan SDM ekonomi kreatif	Orang	50	2.524.600.000,00	0	409.222.799,00	24	278.000.000,00	0	400.000,00	0	2.720.000,00	0	9.930.000,00	24	264.600.600,00	24	277.650.600,00	100%	100%	24	686.873.399,00	48%	27%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**																									
3	**27**	**2**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Efektivitas sarana pertanian**	**%**	**65**	**9.290.509.200,00**	**55**	**3.079.073.702,00**	**60**	**2.269.957.000,00**	**0**	**98.478.920,00**	**0**	**123.680.400,00**	**10**	**1.532.222.275,00**	**50**	**397.050.106,00**	**60**	**2.151.431.701,00**	**100%**	**95%**	**115**	**5.230.505.403,00**	**177%**	**56%**	
3	**27**	**2**	**2.01**		**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	**Prosentase ketersediaan sarana pertanian terhadap kebutuhan petani**	**%**	**80**	**8.532.709.200,00**	**75**	**2.664.613.143,00**	**75**	**2.140.615.000,00**	**0**	**52.512.400,00**	**0**	**103.130.400,00**	**0**	**1.513.172.275,00**	**75**	**353.838.606,00**	**75**	**2.022.653.681,00**	**100%**	**94%**	**150**	**4.687.266.824,00**	**188%**	**24%**	
3	27	2	2.01	1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Laporan	2	476.588.200,00	0	339.601.560,00	1	23.550.000,00	0	0,00	0	8.700.000,00	0	5.700.000,00	1	8.700.000,00	1	23.100.000,00	100%	98%	1	362.701.560,00	50%	76%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	27	2	2.01	2	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	4	8.056.121.000,00	0	2.325.011.583,00	1	2.117.065.000,00	0	52.512.400,00	0	94.430.400,00	0	1.507.472.275,00	1	345.138.606,00	1	1.999.553.681,00	100%	94%	1	4.324.565.264,00	25%	54%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	**27**	**2**	**2.03**		**Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Prosentase jumlah bibit ternak dan produk pakan yang bermutu baik**	**%**	**75**	**757.800.000,00**	**75**	**414.460.559,00**	**75**	**129.342.000,00**	**0**	**45.966.520,00**	**0**	**20.550.000,00**	**5**	**19.050.000,00**	**10**	**43.211.500,00**	**15**	**128.778.020,00**	**20%**	**100%**	**90**	**543.238.579,00**	**120%**	**17%**	
3	27	2	2.03	1	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Laporan	48	757.800.000,00	24	414.460.559,00	12	129.342.000,00	30	45.966.520,00	5	20.550.000,00	0	19.050.000,00	3	43.211.500,00	38	128.778.020,00	317%	100%	62	543.238.579,00	129%	72%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	**27**	**3**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Prosentase pengembangan prasarana yang berfungsi dengan baik**	**%**	**100**	**4.177.553.000,00**	**50**	**264.822.500,00**	**75**	**439.684.000,00**	**0**	**4.897.000,00**	**0**	**1.490.000,00**	**20**	**205.679.475,00**	**50**	**207.890.625,00**	**70**	**419.957.100,00**	**93%**	**96%**	**120**	**684.779.600,00**	**120%**	**16%**	
3	**27**	**3**	**2.01**		**Pengembangan Prasarana Pertanian**	**Prosentase pengembangan prasarana pertanian**	**%**	**100**	**69.653.000,00**	**50**	**0,00**	**75**	**14.954.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**1.490.000,00**	**0**	**0,00**	**75**	**0,00**	**75**	**1.490.000,00**	**100%**	**10%**	**125**	**1.490.000,00**	**125%**	**2%**	
3	27	3	2.01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian	Laporan	2	69.653.000,00	0	0,00	1	14.954.000,00	0	0,00	0	1.490.000,00	0	0,00	1	0,00	1	1.490.000,00	100%	10%	1	1.490.000,00	50%	2%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	**27**	**3**	**2.02**		**Pembangunan Prasarana Pertanian**	**Prosentase prasarana pertanian yang terbangun /rehabilitasi /dipelihara**	**%**	**25**	**4.107.900.000,00**	**0**	**264.822.500,00**	**25**	**424.730.000,00**	**0**	**4.897.000,00**	**0**	**0,00**	**10**	**205.679.475,00**	**10**	**207.890.625,00**	**20**	**418.467.100,00**	**80%**	**99%**	**20**	**683.289.600,00**	**80%**	**10%**	
3	27	3	2.02	3	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	5	3.042.900.000,00	1	264.822.500,00	1	52.815.000,00	0	0,00	1	0,00	1	52.229.475,00	0	0,00	2	52.229.475,00	200%	99%	3	317.051.975,00	60%	10%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	27	3	2.02	7	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah rumah Potong Hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	Unit	2	310.000.000,00	0	0,00	1	7.215.000,00	0	4.897.000,00	1	0,00	0	0,00	0	1.500.000,00	1	6.397.000,00	100%	89%	1	6.397.000,00	50%	2%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	27	3	2.02	9	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	6	755.000.000,00	0	0,00	2	364.700.000,00	0	0,00	0	0,00	2	153.450.000,00	2	206.390.625,00	4	359.840.625,00	200%	99%	4	359.840.625,00	67%	48%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
3	**27**	**4**			**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**Prosentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular**	**%**	**10**	**1.188.050.000,00**	**10**	**528.644.268,00**	**10**	**342.841.000,00**	**0**	**97.852.187,00**	**0**	**10.920.000,00**	**0**	**56.836.000,00**	**28**	**144.821.210,00**	**28**	**310.429.397,00**	**280%**	**91%**	**38**	**839.073.665,00**	**380%**	**71%**	
3	**27**	**4**	**2.01**		**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota**	**Prosentase keberhasilan pelayanan kesehatan hewan**	**%**	**80**	**625.500.000,00**	**80**	**318.279.954,00**	**80**	**240.353.000,00**	**0**	**77.136.287,00**	**0**	**1.500.000,00**	**20**	**31.550.000,00**	**30**	**120.206.410,00**	**50**	**230.392.697,00**	**63%**	**96%**	**130**	**548.672.651,00**	**163%**	**37%**	
3	27	4	2.01	1	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Laporan	8	625.500.000,00	0	318.279.954,00	4	240.353.000,00	1	77.136.287,00	2	1.500.000,00	2	31.550.000,00	1	120.206.410,00	6	230.392.697,00	150%	96%	6	548.672.651,00	75%	88%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	**27**	**4**	**2.03**		**Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jenis pelayanan yang direkomendasikan (izin medik veteriner dan paramedik veteriner)**	**jenis**	**2**	**120.850.000,00**	**0**	**0,00**	**1**	**15.000.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**1**	**350.000,00**	**1**	**350.000,00**	**100%**	**2%**	**1**	**350.000,00**	**50%**	**0%**	
3	27	4	2.03	2	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah pelayanan jasa medik veterine	Laporan	2	120.850.000,00	0	0,00	1	15.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	350.000,00	1	350.000,00	100%	2%	1	350.000,00	50%	0%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	**27**	**4**	**2.04**		**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**	**Prosentase jumlah sampel produk asal hewan yang aman dikonsumsi**	**%**	**80**	**441.700.000,00**	**80**	**210.364.314,00**	**80**	**87.488.000,00**	**0**	**20.715.900,00**	**0**	**9.420.000,00**	**0**	**25.286.000,00**	**98,6**	**24.264.800,00**	**98,6**	**79.686.700,00**	**123%**	**91%**	**179**	**290.051.014,00**	**223%**	**18%**	
3	27	4	2.04	1	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Laporan	20	50.000.000,00	0	0,00	10	16.543.000,00	0	1.368.000,00	0	0,00	0	0,00	35	7.866.500,00	35	9.234.500,00	350%	56%	35	9.234.500,00	175%	18%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	27	4	2.04	2	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Laporan	20	391.700.000,00	0	210.364.314,00	10	70.945.000,00	0	19.347.900,00	3	9.420.000,00	3	25.286.000,00	3	16.398.300,00	9	70.452.200,00	90%	99%	9	280.816.514,00	45%	72%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	**27**	**5**			**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**Prosentase lahan aman bencana pertanian**	**%**	**76**	**692.950.400,00**	**72**	**288.103.345,00**	**74**	**167.855.000,00**	**0**	**1.950.000,00**	**0**	**29.346.120,00**	**30**	**28.526.840,00**	**25**	**95.195.290,00**	**55**	**155.018.250,00**	**74%**	**92%**	**127**	**443.121.595,00**	**167%**	**64%**	
3	**27**	**5**	**2.01**		**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	**Luas lahan aman bencana pertanian**	**Ha/Tahun**	**5650**	**692.950.400,00**	**1750**	**288.103.345,00**	**1900**	**167.855.000,00**	**0**	**1.950.000,00**	**0**	**29.346.120,00**	**815**	**28.526.840,00**	**891**	**95.195.290,00**	**1706**	**155.018.250,00**	**90%**	**92%**	**3456**	**443.121.595,00**	**61%**	**22%**	
3	27	5	2.01	1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Ha	110	692.950.400,00	10	288.103.345,00	50	167.855.000,00	0	1.950.000,00	0	29.346.120,00	35	28.526.840,00	22	95.195.290,00	57	155.018.250,00	114%	92%	67	443.121.595,00	61%	64%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	**27**	**6**			**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	**Prosentase kelompok tani yang memiliki izin usaha pertanian**	**%**	**15**	**185.000.000,00**	**8**	**37.547.250,00**	**12**	**33.600.000,00**	**0**	**0,00**	**12**	**1.000.000,00**	**0**	**4.090.000,00**	**15,7**	**19.935.150,00**	**15,7**	**25.025.150,00**	**131%**	**74%**	**24**	**62.572.400,00**	**158%**	**34%**	
3	**27**	**6**	**2.01**		**Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah izin usaha pertanian yang diterbitkan oleh otoritas kompeten**	**jenis**	**6**	**185.000.000,00**	**1**	**37.547.250,00**	**2**	**33.600.000,00**	**0**	**0,00**	**2**	**1.000.000,00**	**0**	**4.090.000,00**	**2**	**19.935.150,00**	**4**	**25.025.150,00**	**200%**	**74%**	**5**	**62.572.400,00**	**83%**	**14%**	
3	27	6	2.01	2	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Dokumen	12	185.000.000,00	0	37.547.250,00	2	33.600.000,00	0	0,00	0	1.000.000,00	0	4.090.000,00	2	19.935.150,00	2	25.025.150,00	100%	74%	2	62.572.400,00	17%	34%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	**27**	**7**			**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Prosentase jumlah SDM pertanian terlatih**	**%**	**20**	**744.268.000,00**	**20**	**62.909.000,00**	**20**	**2.086.055.300,00**	**0**	**1.350.000,00**	**0**	**232.986.040,00**	**0**	**333.773.050,00**	**26**	**1.706.133.670,00**	**26**	**2.274.242.760,00**	**130%**	**109%**	**46**	**2.337.151.760,00**	**230%**	**314%**	
3	**27**	**7**	**2.01**		**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	**Jumlah SDM Pertanian terlatih**	**orang**	**478**	**744.268.000,00**	**78**	**62.909.000,00**	**200**	**2.086.055.300,00**	**0**	**1.350.000,00**	**100**	**232.986.040,00**	**60**	**333.773.050,00**	**40**	**1.706.133.670,00**	**200**	**2.274.242.760,00**	**100%**	**109%**	**278**	**2.337.151.760,00**	**58%**	**306%**	
3	27	7	2.01	2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kelompok	78	401.363.000,00	0	14.602.500,00	46	1.946.820.300,00	0	1.350.000,00	38	160.785.740,00	0	333.773.050,00	0	1.216.676.385,00	38	1.712.585.175,00	83%	88%	38	1.727.187.675,00	49%	430%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	27	7	2.01	3	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Unit usaha	4	342.905.000,00	0	48.306.500,00	2	139.235.000,00	0	0,00	0	72.200.300,00	0	0,00	0	489.457.285,00	0	561.657.585,00	0%	403%	0	609.964.085,00	0%	178%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	**30**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**																										
3	**30**	**2**			**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**Prosentase perusahaan yang memperbarui perijinan**	**%**	**100**	**749.725.500,00**	**100**	**468.492.690,00**	**100**	**267.374.400,00**	**18**	**46.769.000,00**	**16**	**40.507.500,00**	**13**	**146.710.900,00**	**12**	**33.338.300,00**	**59**	**267.325.700,00**	**59%**	**100%**	**100**	**735.818.390,00**	**100%**	**98%**	
3	**30**	**2**	**2.01**		**Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan**	**Presentase rekomendasi perizinan yang diterbitkan**	**%**	**100**	**749.725.500,00**	**100**	**468.492.690,00**	**100**	**267.374.400,00**	**18**	**46.769.000,00**	**16**	**40.507.500,00**	**13**	**146.710.900,00**	**12**	**33.338.300,00**	**59**	**267.325.700,00**	**59%**	**100%**	**100**	**735.818.390,00**	**100%**	**36%**	
3	30	2	2.01	1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	dokumen	150	749.725.500,00	0	468.492.690,00	75	267.374.400,00	2	46.769.000,00	12	40.507.500,00	10	146.710.900,00	9	33.338.300,00	33	267.325.700,00	44%	100%	33	735.818.390,00	22%	98%	Dinas Perdagangan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
3	**30**	**3**			**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Prosentase pasar yang dikelola sarana distribusinya**	**%**	**100**	**28.890.161.680,00**	**100**	**13.600.172.835,00**	**100**	**4.323.887.270,00**	**0**	**691.241.000,00**	**16**	**1.067.020.450,00**	**25**	**926.986.200,00**	**25**	**1.580.809.790,00**	**66**	**4.266.057.440,00**	**66%**	**99%**	**166**	**17.866.230.275,00**	**166%**	**62%**	
3	**30**	**3**	**2**	**2.01**	**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	**Jumlah pasar yang dikelola sarana distribusinya**	**pasar**	**17**	**11.226.501.582,00**	**17**	**5.598.986.091,00**	**17**	**811.300.070,00**	**0**	**112.538.400,00**	**17**	**193.292.450,00**	**17**	**85.496.200,00**	**17**	**406.844.790,00**	**17**	**798.171.840,00**	**100%**	**98%**	**17**	**6.397.157.931,00**	**100%**	**7%**	
3	30	3	2	2.01	1 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Unit	12	6.813.999.725,00	6	3.714.361.028,00	3	11.046.000,00	0	0,00	3	9.608.000,00	0	0,00	2	50.055.800,00	5	59.663.800,00	167%	540%	11	3.774.024.828,00	92%	55%	Dinas Perdagangan
3	30	3	2	2.01	2 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Unit	17	4.412.501.857,00	17	1.884.625.063,00	17	800.254.070,00	17	112.538.400,00	17	183.684.450,00	17	85.496.200,00	14	356.788.990,00	17	738.508.040,00	100%	92%	34	2.623.133.103,00	200%	59%	Dinas Perdagangan
3	**30**	**3**	**2**	**2.02**	**Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**	**Persentase Pembinaan dan Pemberdayaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan**	**%**	**100**	**17.663.660.098,00**	**100**	**8.001.186.744,00**	**100**	**3.512.587.200,00**	**12,5**	**578.702.600,00**	**12,5**	**873.728.000,00**	**12,5**	**841.490.000,00**	**12,5**	**1.173.965.000,00**	**50**	**3.467.885.600,00**	**50%**	**99%**	**100**	**11.469.072.344,00**	**100%**	**20%**	
3	30	3	2	2.02	1 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	dokumen	6	2.944.960.983,00	2	1.204.645.654,00	2	210.310.000,00	0	34.760.000,00	0	71.640.000,00	0	39.460.000,00	2	63.230.000,00	2	209.090.000,00	100%	99%	4	1.413.735.654,00	67%	48%	Dinas Perdagangan
3	30	3	2	2.02	2 Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	dokumen	8	14.718.699.115,00	0	6.796.541.090,00	4	3.302.277.200,00	0	543.942.600,00	1	802.088.000,00	1	802.030.000,00	1	1.110.735.000,00	3	3.258.795.600,00	75%	99%	3	10.055.336.690,00	38%	68%	Dinas Perdagangan
3	**30**	**4**			**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**Persentase pelaksanaan pengawasan bahan pokok dan barang penting**	**%**	**100**	**7.330.384.326,00**	**100**	**6.854.387.671,00**	**100**	**250.257.000,00**	**0**	**67.411.200,00**	**41,8**	**33.435.800,00**	**25**	**21.045.000,00**	**21**	**127.619.500,00**	**87,8**	**249.511.500,00**	**88%**	**100%**	**100**	**7.103.899.171,00**	**100%**	**97%**	
3	**30**	**4**	**4**	**2.02**	**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**	**Persentase ketersediaan bahan pokok dan barang penting**	**%**	**100**	**7.291.987.126,00**	**100**	**6.849.382.671,00**	**100**	**232.264.000,00**	**0**	**61.841.200,00**	**33,5**	**29.027.800,00**	**0**	**15.990.000,00**	**42**	**124.959.500,00**	**75,5**	**231.818.500,00**	**76%**	**100%**	**100**	**7.081.201.171,00**	**100%**	**3%**	
3	30	4	2	2.02	1 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	12	7.020.073.126,00	6	6.849.382.671,00	3	96.307.000,00	0	30.497.200,00	1	20.968.800,00	0	15.990.000,00	1	28.725.000,00	2	96.181.000,00	67%	100%	8	6.945.563.671,00	67%	99%	Dinas Perdagangan
3	30	4	2	2.02	3 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	2	271.914.000,00	0	0,00	4	135.957.000,00	0	31.344.000,00	0	8.059.000,00	0	0,00	2	96.234.500,00	2	135.637.500,00	50%	100%	2	135.637.500,00	100%	50%	Dinas Perdagangan
3	**30**	**4**	**2**	**2.03**	**Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Prosentase Tersalurnya pupuk dan pestisida kepada petani berhak**	**%**	**100**	**38.397.200,00**	**100**	**5.005.000,00**	**100**	**17.993.000,00**	**0**	**5.570.000,00**	**50**	**4.408.000,00**	**50**	**5.055.000,00**	**0**	**2.660.000,00**	**100**	**17.693.000,00**	**100%**	**98%**	**100**	**22.698.000,00**	**100%**	**46%**	
3	30	4	2	2.03	2 Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Laporan	6	38.397.200,00	2	5.005.000,00	2	17.993.000,00	0	5.570.000,00	1	4.408.000,00	1	5.055.000,00	0	2.660.000,00	2	17.693.000,00	100%	98%	4	22.698.000,00	67%	59%	Dinas Perdagangan
3	**30**	**6**			**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Prosentase UTTP dan BDKT yg telah melakukan tera dan pengawasan BDKT**	**%**	**100**	**1.055.660.135,00**	**100**	**611.923.753,00**	**100**	**235.684.724,00**	**14**	**35.168.400,00**	**13**	**41.810.000,00**	**75**	**47.925.000,00**	**36**	**106.040.000,00**	**75**	**230.943.400,00**	**75%**	**98%**	**100**	**842.867.153,00**	**100%**	**80%**	
3	**30**	**6**	**2**	**2.01**	**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	**Jumlah terlaksananya pelayanan metrologi legal, berupa tera, tera ulang dan pengawasannya**	**bulan**	**12**	**1.055.660.135,00**	**12**	**611.923.753,00**	**12**	**235.684.724,00**	**3**	**35.168.400,00**	**2**	**41.810.000,00**	**3**	**47.925.000,00**	**3**	**106.040.000,00**	**11**	**230.943.400,00**	**92%**	**98%**	**12**	**842.867.153,00**	**100%**	**22%**	
3	30	6	2	2.01	1 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Unit	28000	996.209.155,00	16706	598.907.863,00	7000	226.416.724,00	963	30.718.400,00	1823	41.810.000,00	2461	47.925.000,00	1889	101.590.000,00	7136	222.043.400,00	102%	98%	23842	820.951.263,00	85%	82%	Dinas Perdagangan
3	30	6	2	2.01	2 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Orang	300	59.450.980,00	0	13.015.890,00	150	9.268.000,00	0	4.450.000,00	0	0,00	0	0,00	75	4.450.000,00	75	8.900.000,00	50%	96%	75	21.915.890,00	25%	37%	Dinas Perdagangan
3	**30**	**7**			**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**Persentase produk perdagangan yang dipromosikan**	**%**	**100**	**1.813.521.300,00**	**62**	**560.484.526,00**	**100**	**309.031.550,00**	**0**	**0,00**	**25**	**13.000.000,00**	**25**	**224.804.750,00**	**12,5**	**67.388.250,00**	**62,5**	**305.193.000,00**	**63%**	**99%**	**100**	**865.677.526,00**	**100%**	**48%**	
3	**30**	**7**	**2**	**2.01**	**Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	**Jumlah terlaksananya promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri.**	**kali**	**16**	**1.813.521.300,00**	**8**	**560.484.526,00**	**4**	**309.031.550,00**	**0**	**0,00**	**1**	**13.000.000,00**	**2**	**224.804.750,00**	**0**	**67.388.250,00**	**3**	**305.193.000,00**	**75%**	**99%**	**11**	**865.677.526,00**	**69%**	**17%**	
3	30	7	2	2.01	1 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	UMKM	8	1.129.114.850,00	0	343.728.526,00	4	129.031.550,00	0	0,00	0	3.000.000,00	2	64.804.750,00	1	57.388.250,00	3	125.193.000,00	75%	97%	3	468.921.526,00	38%	42%	Dinas Perdagangan
3	30	7	2	2.01	3 Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	dokumen	4	684.406.450,00	0	216.756.000,00	2	180.000.000,00	0	0,00	1	10.000.000,00	1	160.000.000,00	0	10.000.000,00	2	180.000.000,00	100%	100%	2	396.756.000,00	50%	58%	Dinas Perdagangan
3	**31**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**																										
3	**31**	**2**			**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Persentase IKM yang mutu produk dan kapasitasnya meningkat**	**%**	**5**	**1.595.264.490,00**	**0**	**654.188.764,00**	**5**	**2.090.592.950,00**	**0**	**4.400.000,00**	**0**	**86.284.795,00**	**0**	**33.180.250,00**	**19,2**	**160.053.700,00**	**19,2**	**283.918.745,00**	**383%**	**14%**	**19**	**938.107.509,00**	**383%**	**59%**	
3	**31**	**2**	**2**	**2.01**	**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	**Jumlah IKM yang mutu produk dan kapasitasnya meningkat setelah pembinaan**	**IKM**	**22**	**1.595.264.490,00**	**0**	**654.188.764,00**	**20**	**2.090.592.950,00**	**0**	**4.400.000,00**	**0**	**86.284.795,00**	**65**	**33.180.250,00**	**23**	**160.053.700,00**	**88**	**283.918.745,00**	**440%**	**14%**	**88**	**938.107.509,00**	**400%**	**18%**	
3	31	2	2	2.01	3 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dokumen	4	359.752.240,00	0	214.964.388,00	1	22.906.150,00	0	0,00	1	19.523.000,00	0	0,00	0	3.375.000,00	1	22.898.000,00	100%	100%	1	237.862.388,00	25%	66%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
3	31	2	2	2.01	4 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dokumen	6	277.713.160,00	0	110.499.750,00	2	23.000.000,00	0	0,00	1	22.990.000,00	1	0,00	0	0,00	2	22.990.000,00	100%	100%	2	133.489.750,00	33%	48%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
3	31	2	2	2.01	5 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan	Dokumen	6	957.799.090,00	0	328.724.626,00	1	2.044.686.800,00	0	4.400.000,00	0	43.771.795,00	1	33.180.250,00	0	156.678.700,00	1	238.030.745,00	100%	12%	1	566.755.371,00	17%	59%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1						2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
									K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
							Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat																								Usaha Kecil Dan Menengah
3	**31**	**4**				**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	**persentase IKM yang mengikuti publikasi produk**	**%**	**10**	**2.062.682.870,00**	**15**	**1.215.009.182,00**	**12,83**	**374.720.438,00**	**0**	**16.927.000,00**	**0**	**115.694.800,00**	**0**	**35.998.800,00**	**13,4**	**205.859.585,00**	**13,4**	**374.480.185,00**	**105%**	**100%**	**28**	**1.589.489.367,00**	**284%**	**77%**	
3	**31**	**4**	**2.01**			**Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah IKM yang mengikuti publikasi**	**IKM**	**80**	**2.062.682.870,00**	**0**	**1.215.009.182,00**	**40**	**374.720.438,00**	**0**	**16.927.000,00**	**0**	**115.694.800,00**	**2**	**35.998.800,00**	**148**	**205.859.585,00**	**150**	**374.480.185,00**	**375%**	**100%**	**150**	**1.589.489.367,00**	**188%**	**18%**	
3	31	4	2.01	2		Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Dokumen	10	2.062.682.870,00	0	1.215.009.182,00	2	374.720.438,00	0	16.927.000,00	1	115.694.800,00	1	35.998.800,00	0	205.859.585,00	2	374.480.185,00	100%	100%	2	1.589.489.367,00	20%	77%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
3	**32**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**																									
							Persentase Penduduk yang mendapatkan sosialisasi ketransmigrasian	**%**	**20**	**94.653.500,00**	**20**	**14.028.750,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**		**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**20**	**14.028.750,00**	**100%**	**15%**	
3	**32**	**3**	**2.01**			**Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Penduduk Yang Mendapatkan Sosialisasi Penataan Persebaran**	**0rang**	**40**	**94.653.500,00**	**42**	**14.028.750,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**42**	**14.028.750,00**	**105%**	**0%**	
3	32	3	2.01	5		Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	Kepala Keluarga	80	62.653.500,00	0	14.028.750,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0	14.028.750,00	0%	22%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3	32	3	2.01	6		Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	Orang	65	32.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0,00	0%	0%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
																							Rata - Rata Capaian Kinerja		**114%**						
																							Rata - Rata Realisasi Anggaran			**92%**					

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2019 s/d 2024		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2023) PAK		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) PAK		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
														I		II		III		IV									
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																										
4	1				SEKRETARIAT DAERAH																										
4	1	2			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Prosentase Penyediaan data Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat	%	100	9.117.349.000,00	0	3.275.689.755,00	100	1.969.948.600,00	25	493.330.500,00	25	683.999.675,00	25	302.905.670,00	25	591.656.900,00	100	2.071.892.745,00	100%	105%	100	5.347.582.500,00	100%	59%	
4	1	2	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	Prosentase Laporan Administrasi Pemerintahan yang disusun tepat waktu	%	100	7.422.377.000,00	100	2.494.364.147,00	100	1.624.948.600,00	0	366.245.600,00	0	562.252.675,00	0	251.534.170,00	100	591.656.900,00	100	1.771.689.345,00	100%	109%	100	4.266.053.492,00	100%	24%	
4	1	2	2.01	1	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Dokumen	8	6.162.377.000,00	0	2.007.628.380,00	4	1.214.948.600,00	1	340.327.600,00	1	425.442.000,00	1	93.801.520,00	1	505.403.900,00	4	1.364.975.020,00	100%	112%	4	3.372.603.400,00	50%	55%	Bagian Pemerintahan
4	1	2	2.01	3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Dokumen	24	1.260.000.000,00	10	486.735.767,00	7	410.000.000,00	0	25.918.000,00	0	136.810.675,00	2	157.732.650,00	5	86.253.000,00	7	406.714.325,00	100%	99%	17	893.450.092,00	71%	71%	Bagian Pemerintahan
4	1	2	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Prosentase pelaksanaan kebijakan rakyat	%	100	26.301.040.564,00	100	8.806.736.116,00	100	13.434.120.929,00	0	294.353.500,00	50	3.236.219.500,00	0	4.746.857.600,00	50	3.919.999.000,00	100	12.197.429.600,00	100%	91%	100	21.004.165.716,00	100%	46%	
4	1	2	2.02	1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	12	26.301.040.564,00	0	8.806.736.116,00	6	13.434.120.929,00	1	294.353.500,00	2	3.236.219.500,00	2	4.746.857.600,00	1	3.919.999.000,00	6	12.197.429.600,00	100%	91%	6	21.004.165.716,00	50%	80%	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
4	1	2	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Pesentase Produk Hukum yang disusun	%	100	3.744.131.160,00	100	1.344.752.107,00	100	912.374.175,00	25	67.958.620,00	25	222.677.785,00	25	180.462.225,00	25	397.136.220,00	100	868.234.850,00	100%	95%	100	2.212.986.957,00	100%	23%	
4	1	2	2.03	1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Dokumen	73	1.675.943.160,00	54	469.376.454,00	12	390.500.000,00	0	0,00	3	184.950.000,00	3	86.550.000,00	3	104.600.000,00	9	376.100.000,00	75%	96%	63	845.476.454,00	86%	50%	Bagian Hukum
4	1	2	2.03	2	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kasus	50	1.210.180.400,00	0	357.937.689,00	25	228.661.660,00	5	67.958.620,00	0	37.727.785,00	10	38.000.000,00	10	62.989.320,00	25	206.675.725,00	100%	90%	25	564.613.414,00	50%	47%	Bagian Hukum
4	1	2	2.03	3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Dokumen	800	858.007.600,00	0	517.437.964,00	400	293.212.515,00	0	0,00	56	0,00	88	55.912.225,00	104	229.546.900,00	248	285.459.125,00	62%	97%	248	802.897.089,00	31%	94%	Bagian Hukum
4	1	2	2.04		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Prosentase Kerjasama yang difasilitasi	%	100	1.694.972.000,00	100	781.325.608,00	100	345.000.000,00	0	127.084.900,00	0	121.747.000,00	100	51.371.500,00	0		100	300.203.400,00	100%	87%	100	1.081.529.008,00	100%	18%	
4	1	2	2.04	1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Dokumen	20	1.694.972.000,00	10	781.325.608,00	5	345.000.000,00	1	127.084.900,00	1	121.747.000,00	2	51.371.500,00	1	35.080.000,00	5	335.283.400,00	100%	97%	15	1.116.609.008,00	75%	66%	Bagian Pemerintahan
4	1	3			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Penyediaan Data Bidang Perekonomian dan Pembangunan	%	100	2.665.317.292,00	0	762.964.604,00	100	304.843.127,00	25	96.065.171,00	25	68.525.000,00	25	13.800.000,00	25	126.275.700,00	100	304.665.871,00	100%	100%	100	1.067.630.475,00	100%	40%	
4	1	3	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Indeks Kepuasan Masyarakat di Bidang perekonomian dan pembangunan	Indeks	80,98	2.368.033.600,00	0	505.090.273,00	81	336.769.600,00	0	38.296.500,00	0	75.248.775,00	0	38.203.000,00	80	141.520.825,00	80	293.269.100,00	99%	87%	80	798.359.373,00	99%	12%	
4	1	3	2.01	2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan	4	1.525.650.000,00	0	344.730.666,00	2	235.984.960,00	0	17.565.500,00	1	72.163.775,00	0	38.203.000,00	1	90.370.825,00	2	218.303.100,00	100%	93%	2	563.033.766,00	50%	37%	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
4	1	3	2.01	5	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Dokumen	4	842.383.600,00	0	160.359.607,00	2	100.784.640,00	0	20.731.000,00	1	3.085.000,00	0	0,00	1	51.150.000,00	2	74.966.000,00	100%	74%	2	235.325.607,00	50%	28%	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
4	**1**	**3**	**2.02**		**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	**Persentase perangkat daerah yang capaian realisasi fisik keuangannya >79% dari target**	**%**	**100**	**816.207.983,00**	**100**	**203.651.857,00**	**100**	**107.011.660,00**	**25**	**15.084.651,00**	**25**	**22.500.000,00**	**25**	**9.000.000,00**	**25**	**60.414.800,00**	**100**	**106.999.451,00**	**100%**	**100%**	**100**	**310.651.308,00**	**100%**	**13%**	
4	1	3	2.02	1	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Dokumen	2	388.926.438,00	0	128.152.107,00	1	31.496.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	31.496.300,00	1	31.496.300,00	100%	100%	1	159.648.407,00	50%	41%	Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan
4	1	3	2.02	3	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	24	427.281.545,00	0	75.499.750,00	12	75.515.360,00	3	15.084.651,00	3	22.500.000,00	3	9.000.000,00	3	28.918.500,00	12	75.503.151,00	100%	100%	12	151.002.901,00	50%	35%	Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan
4	**1**	**3**	**2.03**		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**Persentase realisasi paket pengadaan barang/jasa >79% dari target**	**%**	**100**	**1.849.109.309,00**	**0**	**559.312.747,00**	**100**	**197.831.467,00**	**25**	**80.980.520,00**	**25**	**46.025.000,00**	**25**	**4.800.000,00**	**25**	**65.860.900,00**	**100**	**197.666.420,00**	**100%**	**100%**	**100**	**756.979.167,00**	**100%**	**11%**	
4	1	3	2.03	1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	24	752.279.129,00	0	259.838.816,00	12	124.454.027,00	3	51.304.520,00	3	22.500.000,00	3	2.800.000,00	3	47.736.500,00	12	124.341.020,00	100%	100%	12	384.179.836,00	50%	51%	Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan
4	1	3	2.03	2	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Dokumen	24	1.096.830.180,00	0	299.473.931,00	12	73.377.440,00	3	29.676.000,00	3	23.525.000,00	3	2.000.000,00	3	18.124.400,00	12	73.325.400,00	100%	100%	12	372.799.331,00	50%	34%	Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan
4	**1**	**3**	**2.04**		**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**	**Prosentase kegiatan yang telah dilaksanakan**	**%**	**100**	**1.113.500.000,00**		**488.323.675,00**	**100**	**198.130.095,00**	**0**	**0,00**	**0**	**32.019.000,00**	**0**	**22.372.000,00**	**100**	**119.105.300,00**	**100**	**173.496.300,00**	**100%**	**88%**	**100**	**661.819.975,00**	**100%**	**16%**	
4	1	3	2.04	1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Dokumen	4	1.113.500.000,00	0	488.323.675,00	2	198.130.095,00	0	0,00	0	32.019.000,00	1	22.372.000,00	1	119.105.300,00	2	173.496.300,00	100%	88%	2	661.819.975,00	50%	59%	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
4	**2**				**SEKRETARIAT DPRD**																									
4	**2**	**2**			**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap Layanan Tugas dan Fungsi DPRD**	**Skor**	**80**	**62.896.085.602,00**	**82**	**24.702.116.722,00**	**85**	**14.019.653.533,00**	**0**	**2.967.847.994,00**	**0**	**3.296.887.533,00**	**0**	**3.190.515.176,00**	**82**	**5.222.380.692,00**	**82**	**14.677.631.395,00**	**96%**	**105%**	**82**	**39.379.748.117,00**	**103%**	**63%**	
4	**2**	**2**	**2.01**		**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	**Persentase Tercapainya Fungsi Pembentukan Perda DPRD**	**%**	**100**	**23.388.670.051,00**	**100**	**12.192.905.994,00**	**100**	**6.948.967.120,00**	**0**	**1.854.688.800,00**	**8**	**1.426.725.525,00**	**25**	**1.325.962.550,00**	**67**	**3.251.832.399,00**	**100**	**7.859.209.274,00**	**100%**	**113%**	**100**	**20.052.115.268,00**	**100%**	**34%**	
4	2	2	2.01	2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Dokumen	42	17.016.503.391,00	0	8.025.065.694,00	15	3.233.640.060,00	2	377.870.000,00	0	670.173.400,00	5	881.560.550,00	8	1.024.823.899,00	15	2.954.427.849,00	100%	91%	15	10.979.493.543,00	36%	65%	Sekretariat DPRD
4	2	2	2.01	3	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah dokumen Kajian Perundang-undangan yang dilaksanakan	Dokumen	21	6.372.166.660,00	6	4.167.840.300,00	6	3.715.327.060,00	6	1.476.818.800,00	1	756.552.125,00	2	444.402.000,00	2	2.227.008.500,00	11	4.904.781.425,00	183%	132%	17	9.072.621.725,00	81%	142%	Sekretariat DPRD
4	**2**	**2**	**2.02**		**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**Persentase Tercapainya Fungsi Penganggaran DPRD**	**%**	**100**	**5.073.995.000,00**	**100**	**1.781.460.594,00**	**100**	**1.287.648.000,00**	**0**	**6.650.000,00**	**20**	**235.518.000,00**	**25**	**618.246.450,00**	**100**	**455.591.650,00**	**145**	**1.316.006.100,00**	**145%**	**102%**	**100**	**3.097.466.694,00**	**100%**	**26%**	
4	2	2	2.02	3	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Dokumen	18	5.073.995.000,00	8	1.781.460.594,00	5	1.287.648.000,00	0	6.650.000,00	1	235.518.000,00	4	618.246.450,00	2	455.591.650,00	7	1.316.006.100,00	140%	102%	15	3.097.466.694,00	83%	61%	Sekretariat DPRD
4	**2**	**2**	**2.03**		**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**Persentase Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Penyelenggaraan Program-Program Pemerintah Daerah**	**%**	**100**	**4.254.995.025,00**	**100**	**953.185.050,00**	**100**	**499.378.733,00**	**0**	**176.642.000,00**	**50**	**255.318.700,00**	**25**	**18.086.500,00**	**100**	**28.268.000,00**	**175**	**478.315.200,00**	**175%**	**96%**	**100**	**1.431.500.250,00**	**100%**	**11%**	
4	2	2	2.03	6	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Dokumen	8	1.311.754.450,00	6	389.617.960,00	1	223.112.793,00	0	162.642.000,00	0	42.004.850,00	0	5.800.000,00	1	5.900.000,00	1	216.346.850,00	100%	97%	7	605.964.810,00	88%	46%	Sekretariat DPRD

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
4	2	2	2.03	7	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Dokumen	6	2.943.240.575,00	4	563.567.090,00	1	276.265.940,00	0	14.000.000,00	1	213.313.850,00	0	12.286.500,00	0	22.368.000,00	1	261.968.350,00	100%	95%	5	825.535.440,00	83%	28%	Sekretariat DPRD
4	**2**	**2**	**2.04**		**Peningkatan Kapasitas DPRD**	**Persentase Peningkatan SDM Anggota DPRD**	**%**	**100**	**25.743.717.166,00**	**100**	**7.990.972.854,00**	**100**	**4.356.857.280,00**	**0**	**649.936.794,00**	**39**	**1.056.742.908,00**	**25**	**1.226.164.676,00**	**100**	**1.159.916.343,00**	**164**	**4.092.760.721,00**	**164%**	**94%**	**100**	**12.083.733.575,00**	**100%**	**16%**	
4	2	2	2.04	2	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Dokumen	12	14.688.902.751,00	0	3.905.183.863,00	6	2.104.590.000,00	1	545.011.794,00	0	453.274.179,00	1	344.695.475,00	4	453.548.857,00	6	1.796.530.305,00	100%	85%	6	5.701.714.168,00	50%	39%	Sekretariat DPRD
4	2	2	2.04	3	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Dokumen	240	6.876.738.115,00	0	2.894.037.991,00	120	1.359.356.800,00	0	88.425.000,00	20	293.030.000,00	30	385.430.001,00	70	422.681.000,00	120	1.189.566.001,00	100%	88%	120	4.083.603.992,00	50%	59%	Sekretariat DPRD
4	2	2	2.04	7	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Dokumen	12	4.178.076.300,00	6	1.191.751.000,00	1	892.910.480,00	0	16.500.000,00	1	310.438.729,00	0	496.039.200,00		283.686.486,00	1	1.106.664.415,00	100%	124%	7	2.298.415.415,00	58%	55%	Sekretariat DPRD
4	**2**	**2**	**2.05**		**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**Persentase Jumlah Pokir yang Masuk RKPD**	**%**	**100**	**4.434.708.360,00**	**100**	**1.783.592.230,00**	**100**	**926.802.400,00**	**0**	**279.930.400,00**	**32**	**322.582.400,00**	**25**	**2.055.000,00**	**94**	**326.772.300,00**	**95**	**931.340.100,00**	**95%**	**100%**	**100**	**2.714.932.330,00**	**100%**	**21%**	
4	2	2	2.05	3	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Dokumen	360	4.434.708.360,00	89	1.783.592.230,00	90	926.802.400,00	0	279.930.400,00	29	322.582.400,00	0	2.055.000,00	29	326.772.300,00	58	931.340.100,00	64%	100%	147	2.714.932.330,00	41%	61%	Sekretariat DPRD
Rata - Rata Capaian Kinerja																								**105%**						
Rata - Rata Realisasi Anggaran																									**103%**					

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2019 s/d 2024		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2023) PAK		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) PAK		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
														I		II		III		IV									
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																										
5	1				PERENCANAAN																										
5	1	2			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Perangkat Daerah yang Dokumen Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Sesuai Ketentuan	%	100	4.720.016.655,00	100	2.382.702.486,00	100	1.705.165.050,00	0	502.196.923,00	0	338.137.895,00	0	196.324.000,00	100	669.259.635,00	100	1.705.918.453,00	100%	100%	100	4.088.620.939,00	100%	87%	
5	1	2	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kota	Dokumen	12	3.793.016.655,00	6	2.039.000.911,00	3	1.564.697.600,00	0	477.732.573,00	0	303.111.895,00	0	162.612.000,00	3	623.982.635,00	3	1.567.439.103,00	100%	100%	9	3.606.440.014,00	75%	41%	
5	1	2	2.01	3	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara	5	590.575.800,00	3	151.836.992,00	1	275.913.380,00	1	129.361.700,00	0	3.933.000,00	0	0,00	0	111.105.000,00	1	244.399.700,00	100%	89%	4	396.236.692,00	80%	67%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	2	2.01	4	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat	Berita Acara	5	647.695.500,00	3	257.898.492,00	1	147.815.700,00	1	147.815.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	147.815.700,00	100%	100%	4	405.714.192,00	80%	63%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	2	2.01	5	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara	6	1.388.690.325,00	4	711.004.579,00	1	282.324.770,00	0	175.250.813,00	1	86.800.000,00	0	0,00	0	32.475.000,00	1	294.525.813,00	100%	104%	5	1.005.530.392,00	83%	72%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	2	2.01	7	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dokumen	4	1.166.055.030,00	2	918.260.848,00	2	858.643.750,00	0	25.304.360,00	0	212.378.895,00	0	162.612.000,00	2	480.402.635,00	2	880.697.890,00	100%	103%	4	1.798.958.738,00	100%	154%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	2	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	jumlah dokumen berita acara hasil verifikasi pengendalian rencana kerja perangkat daerah	Dokumen	8	927.000.000,00	4	343.701.575,00	2	140.467.450,00	0	24.464.350,00	0	35.026.000,00	0	33.712.000,00	2	45.277.000,00	2	138.479.350,00	100%	99%	6	482.180.925,00	75%	15%	
5	1	2	2.03	1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Dokumen	8	297.000.000,00	4	150.981.000,00	2	96.660.650,00	0	19.478.600,00	1	23.835.000,00	0	23.625.000,00	1	28.855.000,00	2	95.793.600,00	100%	99%	6	246.774.600,00	75%	83%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	2	2.03	3	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi	Dokumen	16	630.000.000,00	8	192.720.575,00	4	43.806.800,00	1	4.985.750,00	1	11.191.000,00	1	10.087.000,00	1	16.422.000,00	4	42.685.750,00	100%	97%	12	235.406.325,00	75%	37%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	3			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah	%	100	7.129.450.000,00	84	833.170.449,00	92	1.328.385.500,00	0	56.263.100,00	0	129.486.500,00	0	382.006.590,00	91,7	674.727.680,00	91,7	1.242.483.870,00	100%	94%	176	2.075.654.319,00	176%	29%	
5	1	3	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi	Dokumen	2	1.884.000.000,00	0	833.170.449,00	1	469.615.120,00	0	34.906.000,00	0	50.128.000,00	0	154.305.300,00	1	253.473.450,00	1	492.812.750,00	100%	105%	1	1.325.983.199,00	50%	26%	
5	1	3	2.01	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	2	345.000.000,00	0	228.141.864,00	1	97.000.000,00	0	17.428.200,00	0	20.814.000,00	0	17.992.000,00	1	40.719.950,00	1	96.954.150,00	100%	100%	1	325.096.014,00	50%	94%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	3	2.01	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	2	60.000.000,00	0	111.638.350,00	1	144.950.000,00	0	0,00	0	420.000,00	0	30.200.000,00	1	141.758.350,00	1	172.378.350,00	100%	119%	1	284.016.700,00	50%	473%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	3	2.01	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen	2	1.459.744.500,00	0	355.008.935,00	1	221.246.620,00	0	14.223.800,00	0	27.174.000,00	0	105.354.800,00	1	70.309.650,00	1	217.062.250,00	100%	98%	1	572.071.185,00	50%	39%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	3	2.01	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	OPD	26	19.255.500,00	0	138.381.300,00	26	6.418.500,00	0	3.254.000,00	0	1.720.000,00	0	758.500,00	26	685.500,00	26	6.418.000,00	100%	100%	26	144.799.300,00	100%	752%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
5	**1**	**3**	**2.02**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi**	**Dokumen**	**5**	**2.681.400.000,00**	**3**		**1**	**185.982.000,00**	**0**	**5.000.000,00**	**0**	**11.718.500,00**	**0**	**114.649.240,00**	**1**	**46.889.100,00**	**1**	**178.256.840,00**	**100%**	**96%**	**4**	**178.256.840,00**	**80%**	**7%**	
5	1	3	2.02	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen	4	461.400.000,00	2	405.903.290,00	1	34.437.000,00	0	0,00	0	4.218.500,00	0	15.224.240,00	1	14.962.900,00	1	34.405.640,00	100%	100%	3	440.308.930,00	75%	95%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	3	2.02	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	perangkat daerah	5	2.220.000.000,00	0	495.430.455,00	5	151.545.000,00	0	5.000.000,00	0	7.500.000,00	0	99.425.000,00	3	31.926.200,00	3	143.851.200,00	60%	95%	3	639.281.655,00	60%	29%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	**1**	**3**	**2.03**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi**	**Dokumen**	**3**	**2.564.050.000,00**	**1**		**1**	**672.788.380,00**	**0**	**16.357.100,00**	**0**	**67.640.000,00**	**0**	**113.052.050,00**	**1**	**374.365.130,00**	**1**	**571.414.280,00**	**100%**	**85%**	**2**	**571.414.280,00**	**67%**	**22%**	
5	1	3	2.03	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen	4	546.000.000,00	2	221.826.818,00	1	462.458.000,00	0	10.998.000,00	0	16.337.000,00	0	19.775.750,00	1	324.260.630,00	1	371.371.380,00	100%	80%	3	593.198.198,00	75%	109%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	3	2.03	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	OPD	6	1.474.000.000,00	0	425.118.890,00	6	47.254.880,00	0	5.359.100,00	0	14.438.000,00	0	4.291.200,00	0	19.838.500,00	0	43.926.800,00	0%	93%	0	469.045.690,00	0%	32%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	3	2.03	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen	4	295.650.000,00	2	218.809.800,00	1	147.975.500,00	0	0,00	0	34.360.000,00	0	87.001.100,00	1	21.584.000,00	1	142.945.100,00	100%	97%	3	361.754.900,00	75%	122%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	3	2.03	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Dokumen	12	248.400.000,00	0	46.167.950,00	6	15.100.000,00	0	0,00	0	2.505.000,00	0	1.984.000,00	4	8.682.000,00	4	13.171.000,00	67%	87%	4	59.338.950,00	33%	24%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	**2**				**KEUANGAN**																									
5	**2**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Realisasi Kinerja Keuangan yang memenuhi target**	**%**	**100**	**88.647.719.784,00**	**100**	**22.038.715.222,00**	**100**	**5.738.124.860,00**	**0**	**236.665.850,00**	**25**	**678.193.400,00**	**25**	**742.598.131,00**	**50**	**1.706.412.941,00**	**100**	**3.363.870.322,00**	**100%**	**59%**	**100**	**25.402.585.544,00**	**100%**	**29%**	
5	**2**	**2**	**2.01**		**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**Pengesahan Perda APBD tepat waktu**	**%**	**100**	**5.547.219.060,00**	**100**	**1.625.437.819,00**	**100**	**1.026.814.000,00**	**0**	**28.335.600,00**	**25**	**345.129.400,00**	**25**	**245.944.500,00**	**50**	**360.775.400,00**	**100**	**980.184.900,00**	**100%**	**95%**	**100**	**2.605.622.719,00**	**100%**	**18%**	
5	2	2	2.01	1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Dokumen	8	1.676.760.110,00	4	147.848.629,00	2	83.421.000,00	0	0,00	0	0,00	2	74.671.000,00	0	750.000,00	2	75.421.000,00	100%	90%	6	223.269.629,00	75%	13%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Dokumen	8	314.892.110,00	4	125.757.900,00	2	56.819.000,00	0	0,00	0	0,00	2	36.743.500,00	0	0,00	2	36.743.500,00	100%	65%	6	162.501.400,00	75%	52%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.01	5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	70	147.393.060,00	68	47.611.455,00	28	16.876.000,00	28	16.335.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	28	16.335.600,00	100%	97%	96	63.947.055,00	137%	43%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.01	6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	70	143.604.080,00	68	48.765.629,00	28	23.640.000,00	0	0,00	0	8.200.800,00	28	0,00	0	14.657.400,00	28	22.858.200,00	100%	97%	96	71.623.829,00	137%	50%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.01	7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen	8	1.041.872.920,00	4	379.476.514,00	2	154.679.000,00	0	0,00	0	28.640.500,00	1	34.720.000,00	0	90.975.000,00	1	154.335.500,00	50%	100%	5	533.812.014,00	63%	51%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.01	8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen	8	823.731.210,00	4	216.404.176,00	2	154.679.000,00	0	0,00	0	0,00	2	0,00	0	154.574.000,00	2	154.574.000,00	100%	100%	6	370.978.176,00	75%	45%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.01	9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dokumen	6	1.398.965.570,00	4	659.573.516,00	3	536.700.000,00	0	12.000.000,00	0	308.288.100,00	3	99.810.000,00	0	99.819.000,00	3	519.917.100,00	100%	97%	7	1.179.490.616,00	117%	84%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	**2**	**2**	**2.02**		**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**Pengelolaan Keuangan yang Sesuai Dengan Peraturan Perundangan**	**%**	**100**	**1.095.243.000,00**	**100**	**234.579.999,00**	**100**	**50.600.000,00**	**0**	**6.325.000,00**	**25**	**11.745.000,00**	**25**	**10.525.000,00**	**50**	**14.905.000,00**	**100**	**43.500.000,00**	**100%**	**86%**	**100**	**278.079.999,00**	**100%**	**4%**	
5	2	2	2.02	1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen	220	575.243.000,00	90	148.995.892,00	47	45.500.000,00	0	5.475.000,00	24	10.300.000,00	12	8.825.000,00	11	14.905.000,00	47	39.505.000,00	100%	87%	137	188.500.892,00	62%	33%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.02	9	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen	12	520.000.000,00	6	85.584.107,00	3	5.100.000,00	0	850.000,00	2	1.445.000,00	3	1.700.000,00	3	0,00	3	3.995.000,00	100%	78%	9	89.579.107,00	75%	17%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	**2**	**2**	**2.03**		**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**Permintaan Laporan Keuangan yang terfasilitasi**	**%**	**100**	**5.335.766.000,00**	**100**	**2.285.510.305,00**	**100**	**1.147.759.000,00**	**0**	**198.953.000,00**	**25**	**269.153.000,00**	**25**	**273.988.000,00**	**50**	**359.373.600,00**	**100**	**1.101.467.600,00**	**100%**	**96%**	**100**	**3.386.977.905,00**	**100%**	**21%**	
5	2	2	2.03	3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Laporan	8	1.160.000.000,00	4	386.912.388,00	2	135.000.000,00	0	22.598.000,00	2	60.728.000,00	2	50.853.000,00	0	750.000,00	2	134.929.000,00	100%	100%	6	521.841.388,00	75%	45%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.03	8	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggunjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen	8	170.000.000,00	4	84.262.074,00	2	66.000.000,00	0	9.855.000,00	0	15.500.000,00	2	11.425.000,00	2	17.355.000,00	4	54.135.000,00	200%	82%	8	138.397.074,00	100%	81%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.03	9	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Dokumen	14	500.000.000,00	7	134.017.723,00	4	80.000.000,00	0	0,00	0	0,00	1	6.580.000,00	3	72.700.000,00	4	79.280.000,00	100%	99%	11	213.297.723,00	79%	43%	Badan Keuangan dan Aset Daerah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
5	2	2	2.03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggunjawaban Pemerintah Kabupaten / Kota	Orang	2200	3.505.766.000,00	584	1.680.318.120,00	600	866.759.000,00	0	166.500.000,00	100	192.925.000,00	245	205.130.000,00	255	268.568.600,00	600	833.123.600,00	100%	96%	1184	2.513.441.720,00	54%	72%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	**2**	**2**	**2.04**		**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Persentase tersusunnya Laporan BTT**	**%**	**100**	**76.669.491.724,00**	**100**	**17.893.187.099,00**	**100**	**3.512.951.860,00**	**0**	**3.052.250,00**	**25**	**52.166.000,00**	**25**	**212.140.631,00**	**25**	**971.358.941,00**	**75**	**1.238.717.822,00**	**75%**	**35%**	**175**	**19.131.904.921,00**	**175%**	**2%**	
5	2	2	2.04	9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan	36	76.669.491.724,00	12	17.893.187.099,00	12	3.512.951.860,00	0	3.052.250,00	3	52.166.000,00	3	212.140.631,00	3	971.358.941,00	9	1.238.717.822,00	75%	35%	21	19.131.904.921,00	58%	25%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	**2**	**3**			**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Pengelolaan Aset yang Berkondisi Baik**	**%**	**100**	**10.047.997.420,00**	**100**	**3.273.539.352,00**	**100**	**2.149.948.000,00**	**25**	**1.462.324.000,00**	**25**	**47.077.000,00**	**25**	**16.719.500,00**	**25**	**319.019.670,00**	**100**	**1.845.140.170,00**	**100%**	**86%**	**100**	**5.118.679.522,00**	**100%**	**51%**	
5	**2**	**3**	**2.01**		**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Laporan**	**66**	**10.047.997.420,00**	**22**	**3.273.539.352,00**	**22**	**2.149.948.000,00**	**0**	**1.462.324.000,00**	**5**	**47.077.000,00**	**6**	**16.719.500,00**	**10**	**319.019.670,00**	**21**	**1.845.140.170,00**	**95%**	**86%**	**43**	**5.118.679.522,00**	**65%**	**18%**	
5	2	3	2.01	5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan	14	630.960.000,00	7	160.480.469,00	2	157.142.000,00	0	0,00	1	12.500.000,00	1	4.000.000,00	0	29.995.000,00	2	46.495.000,00	100%	30%	9	206.975.469,00	64%	33%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	3	2.01	7	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan	8	9.217.037.420,00	4	3.051.890.993,00	2	1.953.206.000,00	1	1.456.969.000,00	0	27.132.000,00	0	4.184.500,00	1	276.464.670,00	2	1.764.750.170,00	100%	90%	6	4.816.641.163,00	75%	52%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	3	2.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan	72	200.000.000,00	36	61.167.890,00	18	39.600.000,00	0	5.355.000,00	4	7.445.000,00	5	8.535.000,00	9	12.560.000,00	18	33.895.000,00	100%	86%	54	95.062.890,00	75%	48%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	**2**	**4**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Prosentase Peningkatan Data Potensi Wajib Pajak Daerah**	**%**	**10**	**6.354.001.780,00**	**10**	**1.556.322.130,00**	**10**	**1.326.995.292,00**	**0**	**13.876.200,00**	**0**	**386.327.900,00**	**0**	**293.195.700,00**	**10**	**553.561.600,00**	**10**	**1.246.961.400,00**	**100%**	**94%**	**10**	**2.803.283.530,00**	**100%**	**44%**	
5	**2**	**4**	**2.01**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Pertumbuhan Pendapatan Pajak Daerah**	**%**	**100**	**6.354.001.780,00**	**100**	**1.556.322.130,00**	**100**	**1.326.995.292,00**	**0**	**13.876.200,00**	**0**	**386.327.900,00**	**0**	**293.195.700,00**	**100**	**553.561.600,00**	**100**	**1.246.961.400,00**	**100%**	**94%**	**100**	**2.803.283.530,00**	**100%**	**20%**	
5	2	4	2.01	1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah dokumen penyusunan perencanaan, pengelolaan Pajak Daerah	dokumen	8	524.787.300,00	4	16.787.300,00	2	254.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	148.625.000,00	1	101.710.000,00	1	250.335.000,00	50%	99%	5	267.122.300,00	63%	51%	Badan Pendapatan Daerah
5	2	4	2.01	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan Pajak Daerah	dokumen	4	2.452.161.000,00	2	552.213.150,00	1	185.268.002,00	0	6.857.400,00	0	27.830.000,00	0	2.164.400,00	1	47.175.000,00	1	84.026.800,00	100%	45%	3	636.239.950,00	75%	26%	Badan Pendapatan Daerah
5	2	4	2.01	5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran obyek pajak daerah, subyek pajak dan wajib pajak daerah	dokumen	4	69.750.000,00	2	25.006.000,00	1	107.849.430,00	0	0,00	0	5.682.500,00	0	1.028.800,00	1	95.453.500,00	1	102.164.800,00	100%	95%	3	127.170.800,00	75%	182%	Badan Pendapatan Daerah
5	2	4	2.01	6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah	dokumen	4	1.300.000.000,00	2	260.000.000,00	1	165.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	62.444.000,00	1	99.524.500,00	1	161.968.500,00	100%	98%	3	421.968.500,00	75%	32%	Badan Pendapatan Daerah
5	2	4	2.01	7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Obyek Pajak yang disesuaikan NJOP nya	WP	12909	610.899.600,00	4303	244.866.000,00	4303	183.016.800,00	0	0,00	0	99.400.500,00	0	2.077.500,00	1598	68.090.700,00	1598	169.568.700,00	37%	93%	5901	414.434.700,00	46%	68%	Badan Pendapatan Daerah
5	2	4	2.01	8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	dokumen	4	207.300.000,00	2	68.059.400,00	1	5.007.540,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	4.573.200,00	1	4.573.200,00	100%	91%	3	72.632.600,00	75%	35%	Badan Pendapatan Daerah
5	2	4	2.01	9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah layanan dan konsultasi Pajak Daerah	Wajib Pajak	26769	135.074.540,00	8923	121.088.540,00	8923	6.993.000,00	0	1.656.000,00	0	0,00	0	0,00	8920	85.744.000,00	8920	87.400.000,00	100%	1250%	17843	208.488.540,00	67%	154%	Badan Pendapatan Daerah
5	2	4	2.01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi	%	156	298.977.000,00	0	144.545.550,00	100	99.040.000,00	0	0,00	0	32.836.400,00	0	65.538.500,00	0	0,00	0	98.374.900,00	0%	99%	0	242.920.450,00	0%	81%	Badan Pendapatan Daerah
5	2	4	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan Pajak Daerah	%	100	704.030.340,00	100	82.929.300,00	100	310.550.520,00	0	4.480.400,00	0	217.434.000,00	0	7.070.400,00	100	49.296.000,00	100	278.280.800,00	100%	90%	100	361.210.100,00	100%	51%	Badan Pendapatan Daerah
5	2	4	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah	dokumen	4	51.022.000,00	2	40.826.890,00	1	10.270.000,00	0	882.400,00	0	3.144.500,00	0	4.247.100,00	1	1.994.700,00	1	10.268.700,00	100%	100%	3	51.095.590,00	75%	100%	Badan Pendapatan Daerah
5	**3**				**KEPEGAWAIAN**																									
5	**3**	**2**			**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**skor**	**89**	**7.263.051.469,00**	**88**	**2.808.527.715,00**	**87,7**	**2.073.107.400,00**	**0**	**288.177.250,00**	**0**	**295.022.450,00**	**0**	**237.874.600,00**	**87,7**	**1.062.780.684,00**	**87,7**	**1.883.854.984,00**	**100%**	**91%**	**176**	**4.692.382.699,00**	**197%**	**65%**	
5	**3**	**2**	**2.01**		**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**Persentase Realisasi Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi**	**%**	**100**	**3.795.920.632,00**	**100**	**1.617.606.328,00**	**100**	**975.462.200,00**	**0**	**58.030.000,00**	**89**	**118.494.200,00**	**0**	**68.241.600,00**	**11**	**277.008.384,00**	**100**	**521.774.184,00**	**100%**	**53%**	**100**	**2.139.380.512,00**	**100%**	**14%**	
5	3	2	2.01	4	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	Laporan	6	3.482.620.632,00	2	897.752.800,00	2	777.682.200,00	0	45.152.000,00	1	64.344.200,00	0	25.709.000,00	1	215.080.000,00	2	350.285.200,00	100%	45%	4	1.248.038.000,00	67%	36%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	2	2.01	6	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Dokumen	797	153.300.000,00	415	103.180.000,00	160	89.360.000,00	0	700.000,00	36	42.135.000,00	46	32.872.600,00	78	13.215.000,00	160	88.922.600,00	100%	100%	575	192.102.600,00	72%	125%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	2	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Dokumen	12000	160.000.000,00	5057	616.673.528,00	1000	108.420.000,00	0	12.178.000,00	1380	12.015.000,00	825	9.660.000,00	600	48.713.384,00	1380	82.566.384,00	138%	76%	6437	699.239.912,00	54%	437%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	**3**	**2**	**2.02**		**Mutasi dan Promosi ASN**	**Persentase Penyelesaian Administrasi Mutasi dan Promosi**	**%**	**100**	**1.512.759.907,00**	**100**	**666.250.107,00**	**100**	**447.096.200,00**	**0**	**69.518.250,00**	**61**	**107.712.450,00**	10	**21.263.000,00**	**29**	**190.110.600,00**	**100**	**388.604.300,00**	**100%**	**87%**	**100**	**1.054.854.407,00**	**100%**	**26%**	
5	3	2	2.02	1	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Dokumen	1613	1.190.399.907,00	702	524.293.107,00	702	375.626.200,00	0	44.018.250,00	45	107.712.450,00	97	9.763.000,00	590	167.260.600,00	732	328.754.300,00	104%	88%	1434	853.047.407,00	89%	72%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
5	3	2	2.02	2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Dokumen	2164	322.360.000,00	1289	141.957.000,00	455	71.470.000,00	0	25.500.000,00	7	0,00	386	11.500.000,00	151	22.850.000,00	544	59.850.000,00	120%	84%	1833	201.807.000,00	85%	63%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	**3**	**2**	**2.03**		**Pengembangan Kompetensi ASN**	**Persentase Realisasi Pengembangan Kompetensi**	**%**	**100**	**1.438.077.400,00**	**100**	**361.713.950,00**	**100**	**530.956.400,00**	**0**	**154.470.000,00**	**30**	**57.432.800,00**	30	**121.316.000,00**	**40**	**547.722.200,00**	**100**	**880.941.000,00**	**100%**	**166%**	**100**	**1.242.654.950,00**	**100%**	**61%**	
5	3	2	2.03	2	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	Dokumen	410	1.438.077.400,00	150	361.713.950,00	150	530.956.400,00	0	154.470.000,00	28	57.432.800,00	18	121.316.000,00	137	547.722.200,00	183	880.941.000,00	122%	166%	333	1.242.654.950,00	81%	86%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	**3**	**2**	**2.04**		**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**Persentase realisasi pengembangan kompetensi teknis**	**%**	**100**	**516.293.530,00**	**100**	**162.957.330,00**	**100**	**119.592.600,00**	**0**	**6.159.000,00**	**20**	**11.383.000,00**	**30**	**27.054.000,00**	**50**	**47.939.500,00**	**100**	**92.535.500,00**	**100%**	**77%**	**100**	**255.492.830,00**	**100%**	**18%**	
5	3	2	2.04	2	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	4	97.782.000,00	1	37.640.000,00	1	13.980.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	3.925.000,00	1	3.925.000,00	100%	28%	2	41.565.000,00	50%	43%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	2	2.04	4	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Orang	2799	128.760.000,00	1429	0,00	1429	28.490.000,00	0	0,00	98	643.000,00	877	15.779.000,00	1342	9.013.500,00	1342	25.435.500,00	94%	89%	2771	25.435.500,00	99%	20%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	2	2.04	7	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Orang	349	289.751.530,00	229	125.317.330,00	60	77.122.000,00	0	6.159.000,00	18	10.740.000,00	16	11.275.000,00	26	35.001.000,00	60	63.175.000,00	100%	82%	289	188.492.330,00	83%	65%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	**4**				**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**																									
5	**4**	**2**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**Persentase Realisasi Pengembangan SDM**	**%**	**20**	**14.307.129.964,00**	**14**	**5.899.404.613,00**	**20**	**2.459.306.900,00**	**0**	**351.438.489,00**	**0**	**585.834.942,00**	**0**	**685.029.684,00**	**20**	**740.231.336,00**	**20**	**2.362.534.451,00**	**100%**	**96%**	**34**	**8.261.939.064,00**	**170%**	**58%**	
5	**4**	**2**	**2.01**		**Pengembangan Kompetensi Teknis**	**Persentase realisasi pengembangan kompetensi teknis**	**%**	**85**	**5.886.274.020,00**	**85**	**1.911.277.306,00**	**85**	**1.590.042.900,00**	**0**	**290.679.400,00**	**44,4**	**433.272.476,00**	**0**	**352.786.746,00**	**44,6**	**475.550.669,00**	**89**	**1.552.289.291,00**	**105%**	**98%**	**174**	**3.463.566.597,00**	**205%**	**26%**	
5	4	2	2.01	3	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Orang	777	5.886.274.020,00	436	1.911.277.306,00	277	1.590.042.900,00	37	290.679.400,00	182	433.272.476,00	165	352.786.746,00	200	475.550.669,00	584	1.552.289.291,00	211%	98%	1020	3.463.566.597,00	131%	59%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	**4**	**2**	**2.02**		**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**Persentase ASN yang mengikuti syarat kompetensi jabatannya**	**%**	**80**	**8.420.855.944,00**	**80**	**3.988.127.307,00**	**80**	**869.264.000,00**	**0**	**60.759.089,00**	**14**	**152.562.466,00**	**0**	**332.242.938,00**	**46**	**264.680.667,00**	**60**	**810.245.160,00**	**75%**	**93%**	**80**	**4.798.372.467,00**	**100%**	**10%**	
5	4	2	2.02	7	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, JabatanFungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Laporan	824	8.420.855.944,00	459	3.988.127.307,00	177	869.264.000,00	0	60.759.089,00	26	152.562.466,00	189	332.242.938,00	27	264.680.667,00	242	810.245.160,00	137%	93%	701	4.798.372.467,00	85%	57%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	**5**				**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**																									
5	**5**	**2**			**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**persentase hasil penelitian/kajian yang dapat dimanfaatkan**	**%**	**100**	**1.890.055.122,00**	**100**	**1.120.135.355,00**	**100**	**1.344.069.542,00**	**0**	**24.407.900,00**	**0**	**524.442.225,00**	**0**	**264.897.640,00**	**100**	**428.696.854,00**	**100**	**1.242.444.619,00**	**100%**	**92%**	**100**	**2.362.579.974,00**	**100%**	**125%**	
5	**5**	**2**	**2.01**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	**Jumlah Dokumen Penelitian/Kajian**	**Dokumen**	**5**	**1.210.809.201,00**	**1**	**891.168.959,00**	**2**	**1.157.453.652,00**	**0**	**16.769.900,00**	**0**	**450.720.700,00**	**0**	**195.326.600,00**	**1**	**395.974.854,00**	**1**	**1.058.792.054,00**	**50%**	**91%**	**2**	**1.949.961.013,00**	**40%**	**87%**	
5	5	2	2.01	2	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Laporan	6	653.766.060,00	4	628.974.815,00	1	1.035.126.452,00	0	11.844.900,00	0	445.388.700,00	0	129.618.600,00	1	360.847.400,00	1	947.699.600,00	100%	92%	5	1.576.674.415,00	83%	241%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	5	2	2.01	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Laporan	4	557.043.141,00	2	262.194.144,00	1	122.327.200,00	0	4.925.000,00	0	5.332.000,00	0	65.708.000,00	2	35.127.454,00	2	111.092.454,00	200%	91%	4	373.286.598,00	100%	67%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	**5**	**2**	**2.04**		**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Inovasi Daerah**	**Dokumen**	**3**	**679.245.921,00**	**1**	**228.966.396,00**	**1**	**186.615.890,00**	**0**	**7.638.000,00**	**0**	**73.721.525,00**	**0**	**69.571.040,00**	**1**	**32.722.000,00**	**1**	**183.652.565,00**	**100%**	**98%**	**2**	**412.618.961,00**	**67%**	**27%**	
5	5	2	2.04	1	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dokumen	10	679.245.921,00	8	228.966.396,00	1	186.615.890,00	0	7.638.000,00	0	73.721.525,00	0	69.571.040,00	2	32.722.000,00	2	183.652.565,00	200%	98%	10	412.618.961,00	100%	61%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
																							Rata - Rata Capaian Kinerja	**100%**					
																							Rata - Rata Realisasi Anggaran	**92%**					

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2019 s/d 2024		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2023) PAK		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) PAK		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
														I		II		III		IV									
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN																										
6	1				INSPEKTORAT DAERAH																										
6	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase OPD yang maturitas SPInya level 3	%	45	3.046.318.530,00	37	1.206.039.359,00	40	368.115.900,00	0	119.540.798,00	6	40.450.000,00	0	74.523.705,00	40	110.571.365,00	46	345.085.868,00	115%	94%	46	1.551.125.227,00	102%	51%	
6	1	2	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah laporan kegiatan	Laporan	88	2.381.777.600,00	29	867.847.753,00	29	334.646.300,00	8	118.465.598,00	6	33.034.000,00	8	66.142.505,00	8	110.571.365,00	30	328.213.468,00	103%	98%	59	1.196.061.221,00	67%	14%	
6	1	2	2.01	1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	12	210.534.800,00	6	53.299.500,00	3	51.712.800,00	0	19.140.000,00	1	5.400.000,00	0	8.931.705,00	1	18.165.400,00	2	51.637.105,00	67%	100%	8	104.936.605,00	67%	50%	Inspektorat Daerah
6	1	2	2.01	2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	74	1.203.958.270,00	44	528.555.203,00	15	129.926.000,00	6	64.290.050,00	4	22.596.000,00	6	28.812.000,00	0	11.244.400,00	16	126.942.450,00	107%	98%	60	655.497.653,00	81%	54%	Inspektorat Daerah
6	1	2	2.01	3	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	16	91.751.640,00	8	33.985.000,00	4	24.436.000,00	0	4.906.800,00	1	5.038.000,00	0	14.490.400,00	0	0,00	1	24.435.200,00	25%	100%	9	58.420.200,00	56%	64%	Inspektorat Daerah
6	1	2	2.01	4	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	12	795.300.980,00	6	221.378.850,00	3	110.766.400,00	0	28.808.748,00	0	0,00	0	5.474.400,00	3	73.166.565,00	3	107.449.713,00	100%	97%	9	328.828.563,00	75%	41%	Inspektorat Daerah
6	1	2	2.01	7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	16	80.231.910,00	8	30.629.200,00	4	17.805.100,00	0	1.320.000,00	0	0,00	0	8.434.000,00	2	7.995.000,00	2	17.749.000,00	50%	100%	10	48.378.200,00	63%	60%	Inspektorat Daerah
6	1	2	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti	%	100	664.540.930,00	0	338.191.606,00	100	33.469.600,00	0	1.075.200,00	0	7.416.000,00	0	8.381.200,00	100		100	16.872.400,00	100%	50%	100	355.064.006,00	100%	3%	
6	1	2	2.02	1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan	4	21.033.600,00	0	0,00	2	5.364.000,00	0	0,00	0	0,00	0	1.084.000,00	2	4.253.000,00	2	5.337.000,00	100%	99%	2	5.337.000,00	50%	25%	Inspektorat Daerah
6	1	2	2.02	2	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	4	643.507.330,00	2	338.191.606,00	3	28.105.600,00	0	1.075.200,00	1	7.416.000,00	0	7.297.200,00	2	11.030.000,00	3	26.818.400,00	100%	95%	5	365.010.006,00	125%	57%	Inspektorat Daerah
6	1	3			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Dokumen Kebijakan dan Sisdur Pengawasan serta Asistensi yang terpenuhi	%	100	3.842.894.480,00	100	1.857.738.584,00	100	836.851.800,00	30	154.672.000,00	15	240.649.200,00	35	180.728.781,00	20	329.078.400,00	100	905.128.381,00	100%	108%	100	2.762.866.965,00	100%	72%	
6	1	3	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah dokumen kebijakan dan sisdur pengawasan yang disusun	Dokumen	10	24.227.300,00	6	9.638.000,00	2	6.622.800,00	0	0,00	0	2.999.600,00	0	2.719.600,00	2	901.200,00	2	6.620.400,00	100%	100%	8	16.258.400,00	80%	27%	
6	1	3	2.01	1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	4	24.227.300,00	0	9.638.000,00	2	6.622.800,00	0	0,00	0	2.999.600,00	0	2.719.600,00	2	901.200,00	2	6.620.400,00	100%	100%	2	16.258.400,00	50%	67%	Inspektorat Daerah
6	1	3	2.02		Pendampingan dan Asistensi	Jumlah dokumen hasil pendampingan dan asistensi	Dokumen	24	3.818.667.180,00	12	1.848.100.584,00	7	830.229.000,00	0	154.672.000,00	5	237.649.600,00	0	178.009.181,00	2	328.177.200,00	7	898.507.981,00	100%	108%	19	2.746.608.565,00	79%	24%	
6	1	3	2.02	2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	perangkat daerah	34	1.304.190.980,00	0	650.492.184,00	5	171.795.100,00	0	0,00	4	75.469.600,00	0	20.575.181,00	1	145.606.400,00	5	241.651.181,00	100%	141%	5	892.143.365,00	15%	68%	Inspektorat Daerah
6	1	3	2.02	3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan	9	2.514.476.200,00	0	1.197.608.400,00	4	658.433.900,00	0	154.672.000,00	1	162.180.000,00	0	157.434.000,00	3	182.570.800,00	4	656.856.800,00	100%	100%	4	1.854.465.200,00	44%	74%	Inspektorat Daerah
Rata - Rata Capaian Kinerja																							92%						
Rata - Rata Realisasi Anggaran																								99%					

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2019 s/d 2024		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2023) PAK		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) PAK		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
														I		II		III		IV									
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
7					UNSUR KEWILAYAHAN																									
7	1				KECAMATAN TAMAN																									
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88	203.766.710,00	88,3	83.786.385,00	88,78	21.998.400,00	0	0,00	25	2.438.000,00		10.754.000,00	92,1	7.889.000,00	92	21.081.000,00	104%	96%	92	104.867.385,00	105%	51%	
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di Kelurahan sesuai ketentuan	%	100	3.045.398.257,00	100	1.468.359.700,00	100	675.994.765,00	0	177.158.061,00	50	136.511.419,00	25	187.436.065,00	25	172.873.663,00	100	673.979.208,00	100%	100%	100	2.142.338.908,00	100%	22%	
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Mojorejo)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	24	3.045.398.257,00	0	1.468.359.700,00	12	675.994.765,00	3	177.158.061,00	3	136.511.419,00	3	187.436.065,00	3	172.873.663,00	12	673.979.208,00	100%	100%	12	2.142.338.908,00	50%	70%	Kecamatan Taman
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Pandean)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	24	3.037.887.882,00	0	1.399.611.469,00	12	612.398.800,00	3	141.565.972,00	3	162.970.224,00	3	163.891.957,00	3	136.446.445,00	12	604.874.598,00	100%	99%	12	2.004.486.067,00	50%	66%	Kecamatan Taman
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Banjarejo)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	24	2.817.121.283,00	0	1.200.146.538,00	12	670.080.065,00	3	152.487.609,00	3	157.787.959,00	3	165.152.356,00	3	186.069.220,00	12	661.497.144,00	100%	99%	12	1.861.643.682,00	50%	66%	Kecamatan Taman
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kuncen)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	24	1.775.702.108,00	0	960.642.141,00	12	446.737.020,00	3	109.565.996,00	3	97.263.511,00	3	119.854.970,00	3	113.773.099,00	12	440.457.576,00	100%	99%	12	1.401.099.717,00	50%	79%	Kecamatan Taman
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Manisrejo)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	24	3.637.248.214,00	0	1.798.758.427,00	12	822.821.604,00	3	222.674.800,00	3	233.387.331,00	3	194.294.405,00	3	168.024.544,00	12	818.381.080,00	100%	99%	12	2.617.139.507,00	50%	72%	Kecamatan Taman
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kejuron)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	24	2.930.464.825,00	0	1.421.678.576,00	12	640.447.557,00	3	137.101.588,00	3	150.952.039,00	6	179.568.207,00	3	155.670.277,00	15	623.292.111,00	125%	97%	15	2.044.970.687,00	63%	70%	Kecamatan Taman
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Josenan)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	24	2.793.187.567,00	0	1.343.820.043,00	12	657.329.758,00	3	167.533.994,00	3	137.654.718,00	4	205.319.578,00	5	137.682.861,00	15	648.191.151,00	125%	99%	15	1.992.011.194,00	63%	71%	Kecamatan Taman
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Demangan)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	24	3.010.891.200,00	0	1.622.486.013,00	12	604.046.896,00	3	145.287.302,00	3	144.769.125,00	3	157.317.136,00	3	145.573.256,00	12	592.946.819,00	100%	98%	12	2.215.432.832,00	50%	74%	Kecamatan Taman
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Taman)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	24	3.178.840.900,00	0	1.403.792.741,00	12	654.329.414,00	3	137.450.710,00	3	182.859.315,00	3	163.665.143,00	3	169.251.329,00	12	653.226.497,00	100%	100%	12	2.057.019.238,00	50%	65%	Kecamatan Taman
7	1	2	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase hasil koordinasi pemeliharaan Sarpras Pelayanan Umum yang ditindaklanjuti	%	100	203.766.710,00	100	83.786.385,00	100	21.998.400,00	0	0,00	1	2.438.000,00	50	10.754.000,00	50	7.889.000,00	101	21.081.000,00	101%	96%	201	104.867.385,00	201%	10%	
7	1	2	2.03	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Dokumen	8	203.766.710,00	0	83.786.385,00	4	21.998.400,00	0	0,00	0	2.438.000,00	2	10.754.000,00	2	7.889.000,00	4	21.081.000,00	100%	96%	4	104.867.385,00	50%	51%	Kecamatan Taman

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan**	**%**	**100**	**1.519.933.064,00**	**0**	**462.633.261,00**	**100**	**461.562.333,00**	**70**	**297.460.900,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**30**	**163.294.900,00**	**100**	**460.755.800,00**	**100%**	**100%**	**100**	**923.389.061,00**	**100%**	**61%**	
7	**1**	**3**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat**	**%**	**100**	**1.231.203.848,00**	**100**	**462.633.261,00**	**100**	**317.197.725,00**	**70**	**297.460.900,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**20.479.500,00**	**70**	**317.940.400,00**	**70%**	**100%**	**170**	**780.573.661,00**	**170%**	**26%**	
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga	7	1.231.203.848,00	0	462.633.261,00	7	317.197.725,00	7	297.460.900,00	0	0,00	0	0,00	0	20.479.500,00	7	317.940.400,00	100%	100%	7	780.573.661,00	100%	63%	Kecamatan Taman
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Mojorejo)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	6	1.230.000.000,00	0	880.306.049,00	3	322.984.000,00	0	0,00	3	39.694.250,00	0	0,00	3	282.483.100,00	3	322.177.350,00	100%	100%	3	1.202.483.399,00	50%	98%	Kecamatan Taman
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Pandean)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	6	879.709.890,00	0	892.493.786,00	4	422.231.000,00	3	43.845.000,00	0	124.000.000,00	0	41.635.000,00	2	212.375.000,00	5	421.855.000,00	125%	100%	5	1.314.348.786,00	83%	149%	Kecamatan Taman
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Banjarejo)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	6	847.354.000,00	0	921.636.161,00	4	642.962.000,00	2	81.464.000,00	1	156.300.000,00	0	0,00	2	401.627.600,00	5	639.391.600,00	125%	99%	5	1.561.027.761,00	83%	184%	Kecamatan Taman
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kuncen)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	6	1.020.125.000,00	0	700.674.188,00	3	485.873.500,00	0	0,00	0	7.000.000,00	3	85.213.695,00	2	304.417.494,00	5	396.631.189,00	167%	82%	5	1.097.305.377,00	83%	108%	Kecamatan Taman
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Manisrejo)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	6	956.750.000,00	0	1.419.391.800,00	4	836.596.638,00	0	0,00	2	191.896.638,00	0	0,00	2	644.700.000,00	4	836.596.638,00	100%	100%	4	2.255.988.438,00	67%	236%	Kecamatan Taman
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kejuron)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	6	893.112.808,00	0	862.607.500,00	3	432.449.810,00	1	32.995.700,00	0	0,00	1	38.838.800,00	1	456.709.620,00	3	528.544.120,00	100%	122%	3	1.391.151.620,00	50%	156%	Kecamatan Taman
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Josenan)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	8	688.085.970,00	0	910.844.262,00	4	928.772.928,00	0	20.500.000,00	2	196.687.240,00	0	0,00	2	669.334.000,00	4	886.521.240,00	100%	95%	4	1.797.365.502,00	50%	261%	Kecamatan Taman
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Demangan)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	10	755.528.000,00	0	1.702.906.092,00	4	663.224.500,00	1	24.000.000,00	0	30.626.600,00	2	58.884.000,00	1	535.073.850,00	4	648.584.450,00	100%	98%	4	2.351.490.542,00	40%	311%	Kecamatan Taman
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Taman)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	8	1.308.780.000,00	0	1.398.188.000,00	3	238.168.440,00	0	34.019.200,00	0	93.090.000,00	0	1.200.000,00	1	203.946.424,00	1	332.255.624,00	33%	140%	1	1.730.443.624,00	13%	132%	Kecamatan Taman
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Mojorejo)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/Ormas	3	476.687.535,00	0	292.142.615,00	3	77.873.600,00	0	0,00	1	71.431.904,00	0	2.660.000,00	0	0,00	1	74.091.904,00	33%	95%	1	366.234.519,00	33%	77%	Kecamatan Taman
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pandean)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/ Ormas	2	390.264.650,00	0	286.649.850,00	2	72.563.272,00	0	0,00	1	72.543.000,00	0	0,00	0	0,00	1	72.543.000,00	50%	100%	1	359.192.850,00	50%	92%	Kecamatan Taman
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Banjarejo)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/ Ormas	3	228.750.000,00	0	82.385.700,00	3	46.486.400,00	0	13.500.000,00	2	32.453.400,00	0	0,00	0	0,00	2	45.953.400,00	67%	99%	2	128.339.100,00	67%	56%	Kecamatan Taman
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kuncen)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/Ormas	3	118.606.875,00	0	48.046.200,00	3	11.520.000,00	0	0,00	2	7.000.000,00	0	0,00	1	4.249.500,00	3	11.249.500,00	100%	98%	3	59.295.700,00	100%	50%	Kecamatan Taman
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Manisrejo)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/Ormas	4	488.875.750,00	0	367.663.600,00	4	66.430.200,00	0	0,00	4	66.419.000,00	0	0,00	0	0,00	4	66.419.000,00	100%	100%	4	434.082.600,00	100%	89%	Kecamatan Taman
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kejuron)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/Ormas	2	407.511.070,00	0	233.183.850,00	2	51.297.700,00	0	0,00	1	46.855.000,00	0	0,00	0	0,00	1	46.855.000,00	50%	91%	1	280.038.850,00	50%	69%	Kecamatan Taman
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Josenan)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/Ormas	2	478.850.000,00	0	186.517.735,00	2	44.901.040,00	0	0,00	1	42.498.805,00	1	1.800.000,00	0	600.000,00	2	44.898.805,00	100%	100%	2	231.416.540,00	100%	48%	Kecamatan Taman
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Demangan)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/Ormas	4	228.750.000,00	0	83.630.300,00	4	54.638.700,00	3	44.682.000,00	1	9.400.000,00	0	550.000,00	0	0,00	4	54.632.000,00	100%	100%	4	138.262.300,00	100%	60%	Kecamatan Taman

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Taman)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/Ormas	3	228.750.000,00	0	69.514.100,00	3	46.263.200,00	0	0,00	3	44.713.200,00	0	0,00	0	0,00	3	44.713.200,00	100%	97%	3	114.227.300,00	100%	50%	Kecamatan Taman
7	**1**	**3**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat**	**Laporan**	**2**	**288.729.216,00**	**0**	**0,00**	**1**	**144.364.608,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**1**	**142.815.400,00**	**1**	**142.815.400,00**	**100%**	**99%**	**1**	**142.815.400,00**	**50%**	**49%**	
7	1	3	2.03	4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan	4	288.729.216,00	0	0,00	2	144.364.608,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	142.815.400,00	2	142.815.400,00	100%	99%	2	142.815.400,00	50%	49%	Kecamatan Taman
7	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Pengkoordinasian Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan**	**%**	**100**	**2.280.307.923,00**	**100**	**645.242.340,00**	**100**	**1.030.309.220,00**	**0**	**50.165.500,00**	**67**	**412.187.500,00**	**25**	**69.817.000,00**	**8**	**449.914.450,00**	**100**	**982.084.450,00**	**100%**	**95%**	**100**	**1.627.326.790,00**	**100%**	**71%**	
7	**1**	**4**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Rekomendasi hasil penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti**	**%**	**100**	**1.147.934.268,00**	**100**	**270.457.450,00**	**100**	**547.671.370,00**	**0**	**17.657.500,00**	**7**	**361.952.500,00**	**25**	**36.615.000,00**	**25**	**83.339.000,00**	**57**	**499.564.000,00**	**57%**	**91%**	**157**	**770.021.450,00**	**157%**	**44%**	
7	1	4	2.01	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	28	1.147.934.268,00	0	270.457.450,00	31	547.671.370,00	3	17.657.500,00	25	361.952.500,00	2	36.615.000,00	1	83.339.000,00	31	499.564.000,00	100%	91%	31	770.021.450,00	111%	67%	Kecamatan Taman
7	**1**	**4**	**2.02**		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti**	**%**	**100**	**1.132.373.655,00**	**100**	**374.784.890,00**	**100**	**482.637.850,00**	**0**	**32.508.000,00**	**2**	**50.235.000,00**	**25**	**33.202.000,00**	**25**	**366.575.450,00**	**52**	**482.520.450,00**	**52%**	**100%**	**100**	**857.305.340,00**	**100%**	**43%**	
7	1	4	2.02	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	32	1.132.373.655,00	10	374.784.890,00	11	482.637.850,00	2	32.508.000,00	25	50.235.000,00	3	33.202.000,00	4	366.575.450,00	34	482.520.450,00	309%	100%	44	857.305.340,00	138%	76%	Kecamatan Taman
7	**1**	**5**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Kewenangan yang dijalankan Kecamatan dan tidak dilaksanakan OPD lain**	**%**	**100**	**481.170.346,00**	**100**	**163.106.895,00**	**100**	**102.064.100,00**	**0**	**38.544.300,00**	**25**	**28.099.000,00**	**25**	**10.225.000,00**	**25**	**20.627.200,00**	**75**	**97.495.500,00**	**75%**	**96%**	**100**	**260.602.395,00**	**100%**	**54%**	
7	**1**	**5**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase himbauan Kepala daerah yang ditindaklanjuti**	**%**	**100**	**481.170.346,00**	**100**	**163.106.895,00**	**100**	**102.064.100,00**	**0**	**38.544.300,00**	**0**	**28.099.000,00**	**25**	**10.225.000,00**	**25**	**20.627.200,00**	**50**	**97.495.500,00**	**50%**	**96%**	**100**	**260.602.395,00**	**100%**	**20%**	
7	1	5	2.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	240	280.870.105,00	0	71.033.906,00	120	36.448.000,00	47	18.204.000,00	0	18.139.000,00	0	0,00	0	0,00	47	36.343.000,00	39%	100%	47	107.376.906,00	20%	38%	Kecamatan Taman
7	1	5	2.01	5	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan	8	142.192.750,00	0	60.042.363,00	4	44.648.400,00	0	11.162.100,00	0	9.960.000,00	1	10.225.000,00	1	10.910.000,00	2	42.257.100,00	50%	95%	2	102.299.463,00	25%	72%	Kecamatan Taman
7	1	5	2.01	7	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Dokumen	10	58.107.491,00	4	32.030.626,00	3	20.967.700,00	0	9.178.200,00	0	0,00	0	0,00	2	9.717.200,00	2	18.895.400,00	67%	90%	6	50.926.026,00	60%	88%	Kecamatan Taman

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
7	**1**				**KECAMATAN KARTOHARJO**																									
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indek Kepuasan Masyarakat**	**indeks**	**89**	**211.373.350,00**	**87,8**	**57.767.168,00**	**87,8**	**38.656.000,00**	**0**	**8.530.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**1.462.500,00**	**88,7**	**28.219.000,00**	**88,7**	**38.211.500,00**	**101%**	**99%**	**89**	**95.978.668,00**	**101%**	**45%**	
7	**1**	**2**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP)**	**indeks**	**3,2**	**2.830.176.550,00**	**2,9**	**1.373.399.729,00**	**2,96**	**620.627.700,00**	**0**	**125.869.693,00**	**0**	**195.827.203,00**	**0**	**131.681.228,00**	**3,45**	**161.585.217,00**	**3,45**	**614.963.341,00**	**117%**	**99%**	**4**	**1.988.363.070,00**	**109%**	**22%**	
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Oro - Oro Ombo)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	24	2.830.176.550,00	0	1.373.399.729,00	12	620.627.700,00	3	125.869.693,00	2	195.827.203,00	4	131.681.228,00	3	161.585.217,00	12	614.963.341,00	100%	99%	12	1.988.363.070,00	50%	70%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Sukosari)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	24	2.496.137.690,00	0	1.144.894.907,00	12	529.626.528,00	3	103.042.665,00	2	158.022.241,00	4	123.220.181,00	3	137.613.049,00	12	521.898.136,00	100%	99%	12	1.666.793.043,00	50%	67%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Klegen)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	24	3.149.632.421,00	0	1.543.561.248,00	12	646.455.420,00	3	121.471.208,00	2	198.538.269,00	4	161.080.436,00	3	160.011.312,00	12	641.101.225,00	100%	99%	12	2.184.662.473,00	50%	69%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Rejomulyo)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	24	2.815.245.991,00	0	1.261.912.035,00	12	609.465.393,00	3	117.146.491,00	2	183.079.370,00	4	121.098.249,00	3	180.858.929,00	12	602.183.039,00	100%	99%	12	1.864.095.074,00	50%	66%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Pilangbango)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan	24	2.604.190.966,00	0	1.228.894.245,00	12	559.273.659,00	3	109.691.513,00	2	177.075.586,00	4	120.841.809,00	3	142.632.000,00	12	550.240.908,00	100%	98%	12	1.779.135.153,00	50%	68%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Tawangrejo)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan	24	2.460.405.000,00	0	1.260.245.629,00	12	491.568.900,00	3	92.602.926,00	2	130.878.239,00	4	102.763.150,00	3	143.555.460,00	12	469.799.775,00	100%	96%	12	1.730.045.404,00	50%	70%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kanigoro)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan	24	2.890.693.570,00	0	1.470.685.126,00	12	613.108.430,00	3	121.234.122,00	2	173.652.852,00	4	144.331.507,00	3	150.620.343,00	12	589.838.824,00	100%	96%	12	2.060.523.950,00	50%	71%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kartoharjo)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan	24	2.729.342.780,00	0	1.325.618.022,00	12	550.264.805,00	3	100.925.392,00	2	165.507.305,00	4	113.662.356,00	3	158.234.494,00	12	538.329.547,00	100%	98%	12	1.863.947.569,00	50%	68%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelun)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan	24	2.582.106.038,00	0	1.225.089.788,00	12	530.396.630,00	3	93.629.194,00	2	171.038.587,00	4	99.035.209,00	3	154.314.703,00	12	518.017.693,00	100%	98%	12	1.743.107.481,00	50%	68%	Kecamatan Kartoharjo
7	**1**	**2**	**2.03**		**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	**Persentase hasil koordinasi pemeliharaan Sarpras Pelayanan Umum yang ditindaklanjuti**	**%**	**100**	**211.373.350,00**	**100**	**57.767.168,00**	**100**	**38.656.000,00**	**0**	**8.530.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**1.462.500,00**	**2**	**28.219.000,00**	**2**	**38.211.500,00**	**2%**	**99%**	**102**	**95.978.668,00**	**102%**	**18%**	
7	1	2	2.03	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Dokumen	9	211.373.350,00	0	57.767.168,00	4	38.656.000,00	1	8.530.000,00	0	0,00	1	1.462.500,00	2	28.219.000,00	4	38.211.500,00	100%	99%	4	95.978.668,00	44%	45%	Kecamatan Kartoharjo
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan**	**%**	**100**	**1.230.487.134,00**	**100**	**458.189.250,00**	**100**	**349.255.200,00**	**25**	**264.081.813,00**	**25**	**11.412.000,00**	**25**	**58.689.600,00**	**25**	**57.222.800,00**	**100**	**391.406.213,00**	**100%**	**112%**	**100**	**849.595.463,00**	**100%**	**69%**	
7	**1**	**3**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase kelurahan yang terklasifikasi swasembada di Kecamatan Kartoharjo**	**%**	**100**	**1.077.868.734,00**	**100**	**458.189.250,00**	**55**	**265.520.400,00**	**0**	**256.978.013,00**	**0**	**2.489.500,00**	**0**	**0,00**	**100**	**2.992.000,00**	**100**	**262.459.513,00**	**182%**	**99%**	**100**	**720.648.763,00**	**100%**	**24%**	
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	lembaga	7	1.077.868.734,00	0	458.189.250,00	7	265.520.400,00	7	256.978.013,00	0	2.489.500,00	0	0,00	0	2.992.000,00	7	262.459.513,00	100%	99%	7	720.648.763,00	100%	67%	Kecamatan Kartoharjo

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Oro - Oro Ombo)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit	4	1.371.704.780,00	0	1.188.238.331,00	3	506.936.800,00	0	12.750.000,00	0	3.990.000,00	1	138.206.800,00	2	380.290.000,00	3	535.236.800,00	100%	106%	3	1.723.475.131,00	75%	126%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Sukosari)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit	4	1.288.993.271,00	0	1.030.277.801,00	3	517.928.547,00	0	12.750.000,00	0	3.990.000,00	1	151.776.100,00	2	248.922.000,00	3	417.438.100,00	100%	81%	3	1.447.715.901,00	75%	112%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Klegen)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit	4	1.359.741.400,00	0	1.064.704.611,00	3	512.681.000,00	0	12.750.000,00	0	53.990.000,00	1	89.101.000,00	2	363.840.000,00	3	519.681.000,00	100%	101%	3	1.584.385.611,00	75%	117%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Rejomulyo)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit	4	1.320.192.250,00	0	906.281.720,00	3	509.295.200,00	0	12.750.000,00	0	3.990.000,00	1	140.580.777,00	3	506.040.000,00	3	663.360.777,00	100%	130%	3	1.569.642.497,00	75%	119%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Pilangbango)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit	4	1.077.172.443,00	0	727.427.935,00	3	518.360.000,00	0	12.750.000,00	0	3.990.000,00	1	151.780.000,00	2	312.740.000,00	3	481.260.000,00	100%	93%	3	1.208.687.935,00	75%	112%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Tawangrejo)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit	4	1.053.044.800,00	0	612.243.531,00	3	524.174.000,00	0	12.500.000,00	0	0,00	1	142.636.343,00	2	338.705.187,00	3	493.841.530,00	100%	94%	3	1.106.085.061,00	75%	105%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kanigoro)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit	4	1.655.636.375,00	0	1.095.902.515,00	3	482.058.400,00	0	12.750.000,00	0	3.990.000,00	1	127.478.400,00	3	472.990.000,00	3	617.208.400,00	100%	128%	3	1.713.110.915,00	75%	103%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kartoharjo)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit	4	1.050.838.280,00	0	1.063.003.500,00	3	541.607.600,00	0	12.750.000,00	0	3.990.000,00	1	143.027.600,00	3	284.400.000,00	3	444.167.600,00	100%	82%	3	1.507.171.100,00	75%	143%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelun)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit	4	1.554.877.355,00	0	979.816.007,00	3	548.920.400,00	0	12.750.000,00	0	3.990.000,00	1	150.340.400,00	2	276.890.000,00	3	443.970.400,00	100%	81%	3	1.423.786.407,00	75%	92%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Oro - Oro Ombo)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	pokmas	5	226.414.150,00	0	53.001.850,00	5	41.503.200,00	1	15.900.000,00	4	25.398.400,00	0	0,00	0	0,00	5	41.298.400,00	100%	100%	5	94.300.250,00	100%	42%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Sukosari)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	pokmas	5	206.622.000,00	0	55.465.300,00	5	26.511.453,00	1	7.500.000,00	4	19.009.200,00	0	0,00	0	0,00	5	26.509.200,00	100%	100%	5	81.974.500,00	100%	40%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Klegen)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	pokmas	5	229.146.600,00	0	51.521.950,00	5	43.759.000,00	2	17.700.000,00	3	26.059.000,00	0	0,00	0	0,00	5	43.759.000,00	100%	100%	5	95.280.950,00	100%	42%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Rejomulyo)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	pokmas	5	341.367.500,00	0	116.678.000,00	5	39.144.800,00	2	15.000.000,00	3	24.138.000,00	0	0,00	0	0,00	5	39.138.000,00	100%	100%	5	155.816.000,00	100%	46%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pilangbango)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	pokmas	5	221.430.180,00	0	56.740.000,00	5	30.080.000,00	1	8.400.000,00	3	21.569.000,00	0	0,00	0	0,00	4	29.969.000,00	80%	100%	4	86.709.000,00	80%	39%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Tawangrejo)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	pokmas	5	243.253.895,00	0	65.582.300,00	5	36.266.000,00	1	9.300.000,00	3	26.656.000,00	0	0,00	0	0,00	4	35.956.000,00	80%	99%	4	101.538.300,00	80%	42%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kanigoro)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	pokmas	5	256.700.500,00	0	70.411.750,00	5	54.381.600,00	1	19.500.000,00	3	34.326.600,00	0	0,00	0	0,00	4	53.826.600,00	80%	99%	4	124.238.350,00	80%	48%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kartoharjo)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	pokmas	5	224.416.160,00	0	54.678.650,00	5	38.832.400,00	1	14.400.000,00	3	24.062.800,00	0	0,00	0	0,00	4	38.462.800,00	80%	99%	4	93.141.450,00	80%	42%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelun)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	pokmas	5	231.480.850,00	0	61.506.950,00	5	31.519.600,00	1	9.900.000,00	3	20.521.100,00	0	0,00	0	550.000,00	4	30.971.100,00	80%	98%	4	92.478.050,00	80%	40%	Kecamatan Kartoharjo
7	**1**	**3**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat**	**%**	**100**	**152.618.400,00**	**0**	**0,00**	**100**	**83.734.800,00**	**25**	**7.103.800,00**	**25**	**8.922.500,00**	**25**	**58.689.600,00**	**25**	**54.230.800,00**	**100**	**128.946.700,00**	**100%**	**154%**	**100**	**128.946.700,00**	**100%**	**84%**	
7	1	3	2.03	4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan	24	152.618.400,00	0	0,00	12	83.734.800,00	3	7.103.800,00	2	8.922.500,00	4	58.689.600,00	3	54.230.800,00	12	128.946.700,00	100%	154%	12	128.946.700,00	50%	84%	Kecamatan Kartoharjo

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
7	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**persentase pengkoordinasian ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan**	**%**	**100**	**1.822.423.455,00**	**100**	**677.390.590,00**	**100**	**1.022.012.200,00**	**15**	**108.952.000,00**	**20**	**312.317.200,00**	**25**	**158.403.500,00**	**40**	**337.353.000,00**	**100**	**917.025.700,00**	**100%**	**90%**	**100**	**1.594.416.290,00**	**100%**	**87%**	
7	**1**	**4**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase terfasilitasi pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat**	**%**	**100**	**986.862.980,00**	**100**	**405.565.446,00**	**100**	**554.960.200,00**	**25**	**62.495.000,00**	**25**	**262.052.200,00**	**25**	**107.554.000,00**	**25**	**60.220.000,00**	**100**	**492.321.200,00**	**100%**	**89%**	**100**	**897.886.646,00**	**100%**	**50%**	
7	1	4	2.01	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	32	986.862.980,00	0	405.565.446,00	23	554.960.200,00	4	62.495.000,00	5	262.052.200,00	5	107.554.000,00	9	60.220.000,00	23	492.321.200,00	100%	89%	23	897.886.646,00	72%	91%	Kecamatan Kartoharjo
7	**1**	**4**	**2.02**		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Persentase terfasilitasi pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat**	**%**	**100**	**835.560.475,00**	**100**	**271.825.144,00**	**100**	**467.052.000,00**	**15**	**46.457.000,00**	**10**	**50.265.000,00**	**15**	**50.849.500,00**	**60**	**277.133.000,00**	**100**	**424.704.500,00**	**100%**	**91%**	**100**	**696.529.644,00**	**100%**	**51%**	
7	1	4	2.02	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatananjuti	Laporan	17	835.560.475,00	0	271.825.144,00	12	467.052.000,00	2	46.457.000,00	0	50.265.000,00	1	50.849.500,00	9	277.133.000,00	12	424.704.500,00	100%	91%	12	696.529.644,00	71%	83%	Kecamatan Kartoharjo
7	**1**	**5**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**persentase kewenangan yang dijalankan kecamatan (tidak dilaksanakan OPD lain)**	**%**	**100**	**729.543.230,00**	**100**	**195.854.197,00**	**100**	**186.232.000,00**	**20**	**44.390.000,00**	**25**	**22.265.000,00**	**25**	**43.593.100,00**	**30**	**55.680.600,00**	**100**	**165.928.700,00**	**100%**	**89%**	**100**	**361.782.897,00**	**100%**	**50%**	
7	**1**	**5**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase terfasilitasi pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat**	**%**	**100**	**729.543.230,00**	**100**	**195.854.197,00**	**100**	**186.232.000,00**	**15**	**44.390.000,00**	**15**	**22.265.000,00**	**20**	**43.593.100,00**	**50**	**55.680.600,00**	**100**	**165.928.700,00**	**100%**	**89%**	**100**	**361.782.897,00**	**100%**	**23%**	
7	1	5	2.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	orang	450	256.799.410,00	0	37.560.176,00	720	100.000.000,00	35	22.475.000,00	40	22.265.000,00	120	21.910.000,00	525	33.025.000,00	720	99.675.000,00	100%	100%	720	137.235.176,00	160%	53%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	5	2.01	5	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan	8	292.730.460,00	0	111.366.899,00	4	75.000.000,00	1	18.685.000,00	0		2	18.246.000,00	1	18.165.000,00	4	55.096.000,00	100%	73%	4	166.462.899,00	50%	57%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	5	2.01	7	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Dokumen	8	180.013.360,00	5	46.927.122,00	3	11.232.000,00	0	3.230.000,00	0	0,00	1	3.437.100,00	2	4.490.600,00	3	11.157.700,00	100%	99%	8	58.084.822,00	100%	32%	Kecamatan Kartoharjo
7	**1**				**KECAMATAN MANGUHARJO**																									
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan**	**Skor**	**93**	**258.308.090,00**	**92,1**	**64.135.819,00**	**90,5**	**18.152.000,00**	**0**	**10.216.400,00**	**0**	**2.070.000,00**	**0**	**2.640.000,00**	**94**	**2.640.000,00**	**94**	**17.566.400,00**	**104%**	**97%**	**94**	**81.702.219,00**	**101%**	**32%**	
7	**1**	**2**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan**	**%**	**100**	**2.875.032.246,00**	**100**	**1.658.921.557,00**	**100**	**682.077.399,00**	**0**	**202.808.490,00**	**20**	**186.576.545,00**	**25**	**164.333.341,00**	**55**	**127.542.880,00**	**100**	**681.261.256,00**	**100%**	**100%**	**100**	**2.340.182.813,00**	**100%**	**24%**	
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Manguharjo)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	24	2.875.032.246,00	0	1.658.921.557,00	12	682.077.399,00	3	202.808.490,00	2	186.576.545,00	4	164.333.341,00	15	127.542.880,00	15	681.261.256,00	125%	100%	15	2.340.182.813,00	63%	81%	Kecamatan Manguharjo
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Sogaten)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	24	2.586.502.235,00	0	1.301.254.075,00	12	590.027.790,00	3	174.972.705,00	2	148.230.740,00	4	128.409.303,00	15	134.012.642,00	15	585.625.390,00	125%	99%	15	1.886.879.465,00	63%	73%	Kecamatan Manguharjo
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Patihan)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	24	2.416.966.423,00	0	1.210.229.612,00	12	525.116.000,00	3	128.004.109,00	2	141.702.326,00	4	120.372.100,00	15	129.650.446,00	15	519.728.981,00	125%	99%	15	1.729.958.593,00	63%	72%	Kecamatan Manguharjo

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Ngegong)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Laporan	24	2.299.617.535,00	0	1.225.154.899,00	12	517.448.249,00	3	162.873.518,00	2	123.159.311,00	4	116.408.706,00	15	107.061.650,00	15	509.503.185,00	125%	98%	15	1.734.658.084,00	63%	75%	Kecamatan Manguharjo
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Winongo)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	24	2.905.116.377,00	0	1.332.321.367,00	12	568.535.164,00	3	134.993.091,00	2	143.329.286,00	4	140.026.469,00	15	124.239.081,00	15	542.587.927,00	125%	95%	15	1.874.909.294,00	63%	65%	Kecamatan Manguharjo
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Madiun Lor)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	24	2.790.671.914,00	0	1.432.603.772,00	12	614.635.419,00	3	153.099.059,00	2	157.020.509,00	4	154.164.323,00	15	153.163.374,00	15	617.447.265,00	125%	100%	15	2.050.051.037,00	63%	73%	Kecamatan Manguharjo
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Pangongangan)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	24	2.387.695.609,00	0	1.275.096.368,00	12	511.160.484,00	3	147.559.788,00	2	117.737.276,00	4	109.992.593,00	4	121.528.369,00	13	496.818.026,00	108%	97%	13	1.771.914.394,00	54%	74%	Kecamatan Manguharjo
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Nambangan Lor)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	24	3.451.235.283,00	0	1.904.013.487,00	12	849.509.000,00	3	241.466.033,00	2	225.526.856,00	4	201.794.349,00	15	174.591.207,00	15	843.378.445,00	125%	99%	15	2.747.391.932,00	63%	80%	Kecamatan Manguharjo
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Nambangan Kidul)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Laporan	24	3.041.971.349,00	0	1.688.902.290,00	12	566.872.381,00	3	156.002.998,00	2	173.758.707,00	4	113.963.494,00	15	122.555.543,00	15	566.280.742,00	125%	100%	15	2.255.183.032,00	63%	74%	Kecamatan Manguharjo
7	**1**	**2**	**2.03**		**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	**persentase hasil koordinasi sarpras pelayanan umum yang ditindaklanjuti**	**%**	**100**	**258.308.090,00**	**100**	**64.135.819,00**	**100**	**18.152.000,00**	**0**	**10.216.400,00**	**0**	**2.070.000,00**	**25**	**2.640.000,00**	**75**	**2.640.000,00**	**100**	**17.566.400,00**	**100%**	**97%**	**100**	**81.702.219,00**	**100%**	**7%**	
7	1	2	2.03	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Dokumen	2	258.308.090,00	0	64.135.819,00	1	18.152.000,00	0	10.216.400,00	0	2.070.000,00		2.640.000,00	2	2.640.000,00	2	17.566.400,00	200%	97%	2	81.702.219,00	100%	32%	Kecamatan Manguharjo
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan**	**%**	**100**	**1.295.631.695,00**	**100**	**451.135.850,00**	**100**	**344.167.480,00**	**0**	**277.339.360,00**	**0**	**15.188.000,00**	**25**	**36.883.100,00**	**75**	**7.319.000,00**	**100**	**336.729.460,00**	**100%**	**98%**	**100**	**787.865.310,00**	**100%**	**61%**	
7	**1**	**3**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat**	**%**	**100**	**1.168.806.895,00**	**100**	**451.135.850,00**	**100**	**280.755.080,00**	**0**	**277.339.360,00**	**0**	**0,00**	**25**	**0,00**	**75**	**0,00**	**100**	**277.339.360,00**	**100%**	**99%**	**100**	**728.475.210,00**	**100%**	**24%**	
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	lembaga	7	1.168.806.895,00	0	451.135.850,00	7	280.755.080,00	7	277.339.360,00	0	0,00		0,00	0	0,00	7	277.339.360,00	100%	99%	7	728.475.210,00	100%	62%	Kecamatan Manguharjo
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Manguharjo)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	4	1.052.000.000,00	0	1.165.541.650,00	2	445.800.000,00	0	0,00	0	0,00	1	149.742.000,00	3	289.444.000,00	3	439.186.000,00	150%	99%	3	1.604.727.650,00	75%	153%	Kecamatan Manguharjo
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Sogaten)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit	4	925.900.000,00	0	1.154.034.941,00	2	374.249.500,00	0	0,00	1	34.909.500,00	1	43.499.833,00	3	292.314.419,00	3	370.723.752,00	150%	99%	3	1.524.758.693,00	75%	165%	Kecamatan Manguharjo
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Patihan)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit	4	972.500.000,00	0	739.705.400,00	2	363.060.000,00	0	0,00	0	10.500.000,00	1	45.290.000,00	2	306.600.000,00	3	362.390.000,00	150%	100%	3	1.102.095.400,00	75%	113%	Kecamatan Manguharjo
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Ngegong)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	4	773.000.000,00	0	1.319.713.455,00	2	379.239.981,00	0	0,00	1	18.731.250,00	1	62.739.981,00	3	297.000.000,00	3	378.471.231,00	150%	100%	3	1.698.184.686,00	75%	220%	Kecamatan Manguharjo
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Winongo)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit	4	947.088.320,00	0	602.796.740,00	2	514.483.890,00	0	0,00	0	0,00	1	163.095.350,00	3	318.430.032,00	3	481.525.382,00	150%	94%	3	1.084.322.122,00	75%	114%	Kecamatan Manguharjo
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Madiun Lor)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit	4	992.600.000,00	0	1.140.096.946,00	2	396.138.100,00	0	0,00	0	45.570.600,00	1	54.697.600,00	2	295.850.000,00	2	396.118.200,00	100%	100%	2	1.536.215.146,00	50%	155%	Kecamatan Manguharjo
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Pangongangan)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit	4	740.385.000,00	0	981.858.835,00	2	394.251.000,00	0	0,00	1	80.596.667,00	0	0,00	2	295.350.000,00	2	375.946.667,00	100%	95%	2	1.357.805.502,00	50%	183%	Kecamatan Manguharjo
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Nambangan Lor)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit	4	1.210.000.000,00	0	1.997.545.189,00	2	508.322.860,00	0	2.300.000,00	1	130.507.540,00	1	77.781.260,00	3	497.593.500,00	3	708.182.300,00	150%	139%	3	2.705.727.489,00	75%	224%	Kecamatan Manguharjo

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Nambangan Kidul)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit	4	635.000.000,00	0	475.113.892,00	2	454.572.500,00	0	0,00	0	0,00	1	153.488.220,00	3	299.725.700,00	3	453.213.920,00	150%	100%	3	928.327.812,00	75%	146%	Kecamatan Manguharjo
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Manguharjo)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/Ormas	5	348.000.000,00	0	121.682.200,00	5	80.634.281,00	2	35.559.600,00	1	22.500.000,00	1	21.820.000,00	1	0,00	5	79.879.600,00	100%	99%	5	201.561.800,00	100%	58%	Kecamatan Manguharjo
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Sogaten)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/Ormas	5	474.100.000,00	0	200.633.200,00	5	50.124.368,00	0	0,00	0	19.500.000,00	1	29.266.752,00	4	550.000,00	5	49.316.752,00	100%	98%	5	249.949.952,00	100%	53%	Kecamatan Manguharjo
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Patihan)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/Ormas	5	427.500.000,00	0	154.158.565,00	5	52.400.000,00	0	0,00	0	14.400.000,00	1	37.722.500,00	2	0,00	3	52.122.500,00	60%	99%	3	206.281.065,00	60%	48%	Kecamatan Manguharjo
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Ngegong)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/Ormas	5	475.000.000,00	0	178.123.700,00	5	75.000.000,00	0	0,00	2	11.500.000,00	1	63.038.536,00	1	0,00	4	74.538.536,00	80%	99%	4	252.662.236,00	80%	53%	Kecamatan Manguharjo
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Winongo)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/Ormas	5	452.911.680,00	0	102.601.350,00	5	48.495.550,00	0	0,00	3	24.480.000,00	1	20.195.000,00	2	3.594.000,00	6	48.269.000,00	120%	100%	6	150.870.350,00	120%	33%	Kecamatan Manguharjo
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Madiun Lor)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/Ormas	5	424.400.000,00	0	137.496.890,00	5	78.250.000,00	0	1.500.000,00	2	26.500.000,00	1	40.900.000,00	1	4.500.000,00	4	73.400.000,00	80%	94%	4	210.896.890,00	80%	50%	Kecamatan Manguharjo
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pangongangan)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/Ormas	5	429.615.000,00	0	133.910.200,00	5	74.787.910,00	1	9.744.500,00	2	21.938.000,00	1	39.478.600,00	1	912.000,00	5	72.073.100,00	100%	96%	5	205.983.300,00	100%	48%	Kecamatan Manguharjo
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Nambangan Lor)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/Ormas	5	340.000.000,00	0		5	75.000.000,00	0	1.500.000,00	3	54.497.550,00	1	11.500.000,00	1	7.464.000,00	5	74.961.550,00	100%	100%	5	74.961.550,00	100%	22%	Kecamatan Manguharjo
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Nambangan Kidul)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/Ormas	5	475.000.000,00	0	162.709.470,00	5	68.910.500,00	0	0,00	3	31.000.000,00	1	34.788.500,00	1	0,00	5	65.788.500,00	100%	95%	5	228.497.970,00	100%	48%	Kecamatan Manguharjo
7	**1**	**3**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**				**126.824.800,00**		**0,00**	**100**	**63.412.400,00**	**0**	**0,00**	**0**	**15.188.000,00**	**0**	**36.883.100,00**	**100**	**7.319.000,00**	**100**	**59.390.100,00**	**100%**	**94%**	**100**	**59.390.100,00**	**#DIV/0!**	**47%**	
7	1	3	2.03	4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan	2	126.824.800,00	0	0,00	1	63.412.400,00	0	0,00	0	15.188.000,00	0	36.883.100,00	2	7.319.000,00	2	59.390.100,00	200%	94%	2	59.390.100,00	100%	47%	Kecamatan Manguharjo
7	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**persentase pengkoordinasian ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan**	**%**	**100**	**3.036.549.115,00**	**100**	**943.893.330,00**	**100**	**977.504.450,00**	**0**	**93.079.000,00**	**50**	**386.402.100,00**	**25**	**43.431.500,00**	**25**	**381.848.200,00**	**100**	**904.760.800,00**	**100%**	**93%**	**100**	**1.848.654.130,00**	**100%**	**61%**	
7	**1**	**4**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Prosentase Rekomendasi Hasil Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang ditindak lanjuti**	**%**	**100**	**2.158.825.525,00**	**100**	**278.111.058,00**	**100**	**446.876.600,00**	**0**	**44.883.000,00**	**0**	**303.321.100,00**	**25**	**0,00**	**75**	**53.770.000,00**	**100**	**401.974.100,00**	**100%**	**90%**	**100**	**680.085.158,00**	**100%**	**19%**	
7	1	4	2.01	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	2	2.158.825.525,00	0	278.111.058,00	1	446.876.600,00	0	44.883.000,00	0	303.321.100,00	0	0,00	2	53.770.000,00	2	401.974.100,00	200%	90%	2	680.085.158,00	100%	32%	Kecamatan Manguharjo
7	**1**	**4**	**2.02**		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Prosentase Rekomendasi Hasil Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang ditindak lanjuti**	**%**	**100**	**877.723.590,00**	**100**	**665.782.272,00**	**100**	**530.627.850,00**	**0**	**48.196.000,00**	**0**	**83.081.000,00**	**25**	**43.431.500,00**	**75**	**328.078.200,00**	**100**	**502.786.700,00**	**100%**	**95%**	**100**	**1.168.568.972,00**	**100%**	**57%**	
7	1	4	2.02	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	2	877.723.590,00	0	665.782.272,00	1	530.627.850,00	0	48.196.000,00	0	83.081.000,00	0	43.431.500,00	2	328.078.200,00	2	502.786.700,00	200%	95%	2	1.168.568.972,00	100%	133%	Kecamatan Manguharjo

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
7	**1**	**5**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase kewenangan yang dijalankan Kecamatan (tidak dilaksanakan OPD lain)**	**%**	**100**	**983.837.267,00**	**100**	**381.264.657,00**	**100**	**154.653.200,00**	**0**	**0,00**	**30**	**52.921.000,00**	**40**	**13.600.000,00**	**30**	**79.595.400,00**	**100**	**146.116.400,00**	**100%**	**94%**	**100**	**527.381.057,00**	**100%**	**54%**	
7	**1**	**5**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase Himbauan Kepala daerah Yang ditindaklanjuti**	**%**	**100**	**755.449.767,00**	**100**	**272.053.657,00**	**100**	**103.577.200,00**	**0**	**0,00**	**0**	**36.581.000,00**	**40**	**6.800.000,00**	**60**	**55.561.400,00**	**100**	**98.942.400,00**	**100%**	**96%**	**100**	**370.996.057,00**	**100%**	**13%**	
7	1	5	2.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	700	464.774.767,00	0	133.365.207,00	700	37.482.000,00	0	0,00	0	20.241.000,00	0	0,00	700	16.591.000,00	700	36.832.000,00	100%	98%	700	170.197.207,00	100%	37%	Kecamatan Manguharjo
7	1	5	2.01	5	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan	Laporan	2	228.387.500,00	0	109.211.000,00	1	51.076.000,00	0	0,00	0	16.340.000,00	0	6.800.000,00	2	24.034.000,00	2	47.174.000,00	200%	92%	2	156.385.000,00	100%	68%	Kecamatan Manguharjo
7	1	5	2.01	7	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pmerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Dokumen	8	62.287.500,00	4	29.477.450,00	2	15.019.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	14.936.400,00	4	14.936.400,00	200%	99%	8	44.413.850,00	100%	71%	Kecamatan Manguharjo
Rata - Rata Capaian Kinerja																							**106%**							
Rata - Rata Realisasi Anggaran																								**96%**						

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2019 s/d 2024	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2023) PAK	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) PAK	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							I	II	III	IV					

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
8					**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**																									
8	**1**				**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**																									
8	**1**	**2**			**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**Cakupan pembinaan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan**	**%**	**100**	**1.261.549.441,00**	**100**	**652.966.024,00**	**100**	**314.049.297,00**	**0**	**22.547.080,00**	**0**	**170.660.680,00**	**0**	**79.473.140,00**	**100**	**70.784.440,00**	**100**	**343.465.340,00**	**100%**	**109%**	**100**	**996.431.364,00**	**100%**	**79%**	
8	**1**	**2**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Jumlah jenis kegiatan**	**jenis**	**12**	**1.261.549.441,00**	**0**	**652.966.024,00**	**6**	**314.049.297,00**	**0**	**22.547.080,00**	**2**	**170.660.680,00**	**1**	**79.473.140,00**	**3**	**70.784.440,00**	**6**	**343.465.340,00**	**100%**	**109%**	**6**	**996.431.364,00**	**50%**	**27%**	
8	1	2	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	600	1.261.549.441,00	300	652.966.024,00	125	314.049.297,00	0	22.547.080,00	0	170.660.680,00	0	79.473.140,00	25	70.784.440,00	25	343.465.340,00	20%	109%	325	996.431.364,00	54%	79%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**1**	**3**			**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**Persentase pendidikan politik kepada Partai Politik pemenang Pemilu**	**%**	**100**	**26.043.809.410,00**	**100**	**1.860.382.027,00**	**100**	**12.000.062.030,00**	**0**	**0,00**	**0**	**972.788.900,00**	**0**	**321.801.525,00**	**100**	**10.692.753.108,00**	**100**	**11.987.343.533,00**	**100%**	**100%**	**100**	**13.847.725.560,00**	**100%**	**53%**	
8	**1**	**3**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**	**Persentase kegiatan pendidikan politik kepada masyarakat**	**%**	**100**	**26.043.809.410,00**	**80**	**1.860.382.027,00**	**100**	**12.000.062.030,00**	**0**	**0,00**	**0**	**972.788.900,00**	**0**	**321.801.525,00**	**100**	**10.692.753.108,00**	**100**	**11.987.343.533,00**	**100%**	**100%**	**100**	**13.847.725.560,00**	**100%**	**46%**	
8	1	3	2.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitaskelembagaan Pemerintah, perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi Politik di Daerah	Orang	66	3.679.304.210,00	0	1.699.067.635,00	33	980.581.030,00	0	0,00	33	972.788.900,00	0	3.218.600,00	0	4.552.600,00	33	980.560.100,00	100%	100%	33	2.679.627.735,00	50%	73%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	3	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang Pendidikan Politik, Etikan Budaya Politik, Peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi Politik di Daerah	Orang	525	360.698.200,00	250	161.314.392,00	125	34.353.000,00	0	0,00	0	0,00	35	34.352.820,00	0	0,00	35	34.352.820,00	28%	100%	285	195.667.212,00	54%	54%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	3	2.01	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pendidikan Politik, etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi Politik di Daerah	laporan	2	22.003.807.000,00	0	0,00	1	10.985.128.000,00	0	0,00	0	0,00	0	284.230.105,00	1	10.688.200.508,00	1	10.972.430.613,00	100%	100%	1	10.972.430.613,00	50%	50%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
8	**1**	**4**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**Persentase Status Kelembagaan Orkemas**	**%**	**68**	**866.644.000,00**	**71**	**486.245.040,00**	**68**	**185.337.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**29.538.000,00**	**0**	**77.995.500,00**	**67**	**55.000.000,00**	**67**	**162.533.500,00**	**99%**	**88%**	**67**	**648.778.540,00**	**99%**	**75%**	
8	**1**	**4**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**Persentase Tingkat Keaktifan Organisasi Kemasyarakatan**	**%**	**75**	**866.644.000,00**	**75**	**486.245.040,00**	**75**	**185.337.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**29.538.000,00**	**0**	**77.995.500,00**	**75**	**55.000.000,00**	**75**	**162.533.500,00**	**100%**	**88%**	**150**	**648.778.540,00**	**200%**	**19%**	
8	1	4	2.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas asing di Daerah	Orang	359	866.644.000,00	200	486.245.040,00	75	185.337.000,00	0	0,00	0	29.538.000,00	0	77.995.500,00	0	55.000.000,00	75	162.533.500,00	100%	88%	275	648.778.540,00	77%	75%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**1**	**5**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**Persentase koordinasi yang dilakukan dengan pemangku kepentingan**	**%**	**100**	**2.094.310.276,00**	**100**	**1.096.662.488,00**	**100**	**671.581.250,00**	**0**	**105.204.000,00**	**0**	**307.828.308,00**	**0**	**140.243.000,00**	**100**	**117.446.000,00**	**100**	**670.721.308,00**	**100%**	**100%**	**100**	**1.767.383.796,00**	**100%**	**84%**	
8	**1**	**5**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**Jumlah koordinasi**	**kali**	**12**	**2.094.310.276,00**	**0**	**1.096.662.488,00**	**3**	**671.581.250,00**	**0**	**105.204.000,00**	**0**	**307.828.308,00**	**0**	**140.243.000,00**	**3**	**117.446.000,00**	**3**	**670.721.308,00**	**100%**	**100%**	**3**	**1.767.383.796,00**	**25%**	**32%**	
8	1	5	2.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di Daerah	Orang	470	223.634.166,00	270	103.634.166,00	100	60.000.000,00	0	0,00	20	46.285.662,00	0	13.628.000,00	0	0,00	20	59.913.662,00	20%	100%	290	163.547.828,00	62%	73%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	5	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	1600	1.870.676.110,00	800	993.028.322,00	400	611.581.250,00	70	105.204.000,00	93	261.542.646,00	0	126.615.000,00	123	117.446.000,00	286	610.807.646,00	72%	100%	1086	1.603.835.968,00	68%	86%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**1**	**6**			**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**Persentase konflik yang terfasilitasi**	**%**	**100**	**6.940.734.600,00**	**100**	**3.037.475.575,00**	**100**	**1.711.599.350,00**	**0**	**133.024.600,00**	**0**	**1.285.972.000,00**	**0**	**110.870.500,00**	**100**	**228.116.000,00**	**100**	**1.757.983.100,00**	**100%**	**103%**	**100**	**4.795.458.675,00**	**100%**	**69%**	
8	**1**	**6**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**Jumlah konflik**	**konflik**	**0**	**6.940.734.600,00**	**0**	**3.037.475.575,00**	**0**	**1.711.599.350,00**	**0**	**133.024.600,00**	**0**	**1.285.972.000,00**	**0**	**110.870.500,00**	**0**	**228.116.000,00**	**0**	**1.757.983.100,00**	**100%**	**103%**	**0**	**4.795.458.675,00**	**100%**	**25%**	
8	1	6	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja orang asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah	Orang	2013	6.047.481.100,00	1813	3.037.475.575,00	100	1.335.350.000,00	0	59.047.600,00	0	1.200.686.100,00	0	13.940.000,00	0	43.722.000,00	100	1.317.395.700,00	100%	99%	1913	4.354.871.275,00	95%	72%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	6	2.01	6	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota	Dokumen	24	893.253.500,00	0	0,00	12	376.249.350,00	3	73.977.000,00	3	85.285.900,00	3	96.930.500,00	3	184.394.000,00	12	440.587.400,00	100%	117%	12	440.587.400,00	50%	49%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
																						Rata - Rata Capaian Kinerja		**86%**						
																						Rata - Rata Realisasi Anggaran		**100%**						

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2019 s/d 2024		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2023) PAK		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) PAK		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I		II		III		IV									
1				2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
1	**1**	**1**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Dinas Pendidikan**	**Skor**	**A**	**881.734.832.129,00**	**BB**	**351.819.060.434,00**	**A**	**203.373.277.308,00**	**0**	**30.765.917.574,00**	**0**	**56.326.180.895,00**	**0**	**41.427.998.144,00**	**A**	**60.721.207.769,00**	**A**	**189.241.304.382,00**	**100%**	**93%**	**A**	**541.060.364.816,00**	**100%**	**61%**	
1	**1**	**1**	**2.01**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah**	**%**	**100**	**29.705.441.571,00**	**100**	**6.135.807.332,00**	**100**	**8.307.433.400,00**	**25**	**0,00**	**13**	**2.766.372.000,00**	**31**	**741.114.000,00**	**31**	**4.640.048.040,00**	**100**	**8.147.534.040,00**	**100%**	**98%**	**100**	**14.283.341.372,00**	**100%**	**27%**	
1	2	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	16	345.651.400,00	0	0,00	8	172.825.700,00	2	6.766.400,00	3	65.408.000,00	1	0,00	2	87.572.000,00	8	159.746.400,00	100%	92%	8	159.746.400,00	50%	46%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	3	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	16	178.066.240,00	0	42.395.244,00	1	50.000.000,00	0	9.662.200,00	0	1.833.297,00	0	2.012.500,00	1	36.373.946,00	1	49.881.943,00	100%	100%	1	92.277.187,00	6%	52%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	6	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	8	255.350.302,20	0	0,00	4	124.237.500,00	0	75.327.000,00	2	10.750.000,00	2	16.959.400,00	0	20.848.400,00	4	123.884.800,00	100%	100%	4	123.884.800,00	50%	49%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	7	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	12	142.560.000,00	0	0,00	6	71.280.000,00	1	33.909.400,00	2	11.450.000,00	2	71.280.000,00	1	12.278.000,00	6	128.917.400,00	100%	181%	6	128.917.400,00	50%	90%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	15	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		280.400.000,00	0	0,00	6	93.740.000,00	1	10.211.185,00	2	48.219.500,00	2	14.340.000,00	1	18.676.975,00	6	91.447.660,00	100%	98%	6	91.447.660,00	#DIV/0!	33%	Dinas Perhubungan
2	18	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	60.982.000,00	0	0,00	5	30.491.000,00	1	15.698.000,00	1	5.165.800,00	2	3.198.000,00	1	6.406.250,00	5	30.468.050,00	100%	100%	5	30.468.050,00	50%	50%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3	30	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	24	184.377.580,00	26	76.031.566,00	6	894.000,00	3	0,00	1	0,00	1	494.000,00	1	400.000,00	6	894.000,00	100%	100%	32	76.925.566,00	133%	42%	Dinas Perdagangan
4	2	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	24	619.533.822,00	12	104.798.568,00	6	75.329.977,00	1	8.466.329,00	0	14.903.300,00	2	23.580.600,00	3	28.249.100,00	6	75.199.329,00	100%	100%	18	179.997.897,00	75%	29%	Sekretariat DPRD
5	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	28	200.937.600,00	14	75.266.442,00	7	207.129.900,00	2	8.623.000,00	1	3.466.400,00	2	4.470.000,00	2	3.511.000,00	7	20.070.400,00	100%	10%	21	95.336.842,00	75%	47%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
8	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	20	25.674.000,00	0	0,00	10	12.837.000,00	4	3.158.800,00	1	1.609.200,00	2	3.218.400,00	3	4.827.600,00	10	12.814.000,00	100%	100%	10	12.814.000,00	50%	50%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	36	18.999.168,00	0	0,00	18	2.380.000,00	1	700.000,00	0	0,00	8	260.000,00	6	211.000,00	15	1.171.000,00	83%	49%	15	1.171.000,00	42%	6%	Kecamatan Taman
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	52	109.931.658,00	12	23.015.781,00	18	3.351.265,00	4	0,00	3	0,00	5	280.800,00	5	3.070.400,00	17	3.351.200,00	94%	100%	29	26.366.981,00	56%	24%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	40	49.013.970,00	0	0,00	20	24.506.985,00	5	3.710.000,00	3	4.570.000,00	7	6.688.000,00	5	9.184.700,00	20	24.152.700,00	100%	99%	20	24.152.700,00	50%	49%	Kecamatan Manguharjo
1	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	24	29.705.441.571,00	12	6.135.807.332,00	6	8.307.433.400,00	0	0,00	4	2.766.372.000,00	1	741.114.000,00	1	4.640.048.040,00	6	8.147.534.040,00	100%	98%	18	14.283.341.372,00	75%	48%	Dinas Pendidikan
					Jumlah Mahasiswa Penerima BBM	Mahasiswa	1000		0		1000		0		0		0		1000		1000		100%		1000		100%		
1	2	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	44	1.169.066.658,00	22	396.761.067,00	3	110.718.000,00	0	10.000.000,00	1	22.540.000,00	1	24.206.000,00	1	68.008.400,00	3	124.754.400,00	100%	113%	25	521.515.467,00	57%	45%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	4	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	40	185.000.000,00	40	60.345.559,00	20	18.673.400,00	4	2.353.750,00	1	3.559.020,00	3	6.355.860,00	10	6.390.000,00	18	18.658.630,00	90%	100%	58	79.004.189,00	145%	43%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	5	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	43	535.519.000,00	24	185.390.560,00	12	163.974.000,00	6	106.470.000,00	0	0,00	3	4.792.000,00	3	51.816.400,00	12	163.078.400,00	100%	99%	36	348.468.960,00	84%	65%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
1	5	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	36	80.000.000,00	24	9.583.865,00	6	2.250.000,00	1	0,00	2	420.000,00	2	420.000,00	2	751.200,00	7	1.591.200,00	117%	71%	31	11.175.065,00	86%	14%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	6	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	62	810.374.169,00	32	211.934.934,00	14	21.227.400,00	3	6.016.100,00	4	0,00	4	6.092.000,00	3	8.148.300,00	14	20.256.400,00	100%	95%	46	232.191.334,00	74%	29%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	9	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen	48	410.000.000,00	32	135.554.650,00	8	113.649.000,00	1	56.910.000,00	4	13.511.500,00	1	9.576.000,00	2	30.764.500,00	8	110.762.000,00	100%	97%	40	246.316.650,00	83%	60%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	11	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	24	378.556.000,00	12	199.352.375,00	6	67.660.100,00	1	56.745.500,00	1	9.517.500,00	3	0,00	1	1.386.500,00	6	67.649.500,00	100%	100%	18	267.001.875,00	75%	71%	Dinas Lingkungan Hidup
2	12	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	40	164.208.720,00	0	73.115.015,00	12	2.290.000,00	0	0,00	6	0,00	0	0,00	6	2.132.000,00	12	2.132.000,00	100%	93%	12	75.247.015,00	30%	46%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	16	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	50	460.000.000,00	29	116.985.401,00	10	200.000.000,00	3	0,00	2	0,00	3	118.728.200,00	2	14.873.500,00	10	133.601.700,00	100%	67%	39	250.587.101,00	78%	54%	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	22	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	24	170.000.000,00	10	58.272.850,00	5	30.000.000,00	1	14.230.250,00	2	6.076.400,00	1	1.647.900,00	2	7.677.050,00	6	29.631.600,00	120%	99%	16	87.904.450,00	67%	52%	Dinas Kebudayaaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
2	23	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	Laporan	44	197.700.000,00	20	83.269.000,00	12	42.418.000,00	1	741.000,00	0	0,00	2	660.000,00	10	38.425.600,00	13	39.826.600,00	108%	94%	33	123.095.600,00	75%	62%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
4	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	24	37.417.000,00	12	8.174.710,00	6	8.000.000,00	1	2.529.000,00	1	1.421.000,00	2	350.000,00	8	3.694.000,00	8	7.994.000,00	133%	100%	20	16.168.710,00	83%	43%	Bagian Pemerintahan
4	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	24	85.000.000,00	0	14.932.300,00	12	15.000.000,00	3	4.409.000,00	3	2.166.000,00	3	1.653.000,00	3	6.682.750,00	12	14.910.750,00	100%	99%	12	29.843.050,00	50%	35%	Bagian Organisasi
4	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	12	155.692.800,00	0	35.478.124,00	6	1.000.000,00	0	0,00	0	0,00	2	0,00	3	703.300,00	5	703.300,00	83%	70%	5	36.181.424,00	42%	23%	Bagian Hukum
4	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	24	151.761.000,00	0	34.762.000,00	12	14.358.960,00	3	2.534.500,00	3	1.350.000,00	3	4.100.500,00	3	6.373.500,00	12	14.358.500,00	100%	100%	12	49.120.500,00	50%	32%	Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan
4	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	6	86.000.000,00	0	23.678.637,00	2	20.000.000,00	0	374.500,00	1	1.820.100,00	0	4.313.600,00	1	5.321.200,00	2	11.829.400,00	100%	59%	2	35.508.037,00	33%	41%	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
4	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	12	300.016.000,00	0	93.124.758,00	21	5.000.000,00	4	763.500,00	3	1.130.000,00	8	1.952.900,00	6	1.153.600,00	21	5.000.000,00	100%	100%	21	98.124.758,00	175%	33%	Bagian Umum
5	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	36	33.151.800,00	24	19.973.000,00	4	11.655.600,00	0	520.000,00	0	680.000,00	0	4.946.800,00	2	5.476.800,00	2	11.623.600,00	50%	100%	26	31.596.600,00	72%	95%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
5	2	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	32	48.064.000,00	16	16.227.600,00	8	2.000.000,00	0	0,00	4	429.200,00	1	0,00	2	855.300,00	7	1.284.500,00	88%	64%	23	17.512.100,00	72%	36%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	80	43.242.000,00	18	6.735.700,00	4	5.000.000,00	1	388.600,00	0	0,00	1	1.766.400,00	1	392.500,00	3	2.547.500,00	75%	51%	21	9.283.200,00	26%	21%	Badan Pendapatan Daerah
5	3	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	20	89.821.556,00	10	65.728.156,00	5	19.400.000,00	0	1.720.000,00	4	280.000,00	0	2.264.000,00	1	13.036.000,00	5	17.300.000,00	100%	89%	15	83.028.156,00	75%	92%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
6	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	52	169.357.030,00	21	107.337.285,00	10	1.861.500,00	5	1.800.000,00	0	0,00	5	0,00	0	0,00	10	1.800.000,00	100%	97%	31	109.137.285,00	60%	64%	Inspektorat Daerah
8	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	147.400.000,00	0	61.298.860,00	1	45.000.000,00	0	0,00	0	0,00	1	600.000,00	0	0,00	1	600.000,00	100%	1%	1	61.898.860,00	50%	42%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1	2	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	10	65.651.800,00	0	0,00	5	32.825.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	13.483.900,00	5	13.483.900,00	100%	41%	5	13.483.900,00	50%	21%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	6	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	192.332.280,00	0	0,00	2	61.311.800,00	0	57.081.800,00	2	1.640.000,00	0	410.000,00	0	820.000,00	2	59.951.800,00	100%	98%	2	59.951.800,00	50%	31%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	12	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	8	539.166.000,00	0	531.288.870,00	12	77.360.000,00	0	0,00	5	0,00	0	0,00	3	76.197.000,00	8	76.197.000,00	67%	98%	8	607.485.870,00	100%	113%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	8	30.556.800,00	4	11.251.206,00	2	104.703.287,00	0	0,00	0	0,00	0	4.412.000,00	2	98.847.800,00	2	103.259.800,00	100%	99%	6	114.511.006,00	75%	375%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
1	**1**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah**	**%**	**100**	**748.097.286.306,00**	**100**	**303.885.717.982,00**	**100**	**171.254.487.000,00**	**25**	**27.440.208.086,00**	**17**	**48.285.295.550,00**	**33**	**35.805.993.945,00**	**25**	**48.107.394.418,00**	**100**	**159.638.891.999,00**	**100%**	**93%**	**100**	**463.524.609.981,00**	**100%**	**21%**	
1	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	3098	748.097.286.306,00	0	303.885.717.982,00	1549	171.254.487.000,00	1549	27.440.208.086,00	1549	48.285.295.550,00	1549	35.805.993.945,00	1549	48.107.394.418,00	1549	159.638.891.999,00	100%	93%	1549	463.524.609.981,00	50%	62%	Dinas Pendidikan
1	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	437	124.790.708.471,00	0	66.982.071.353,00	423	46.266.894.960,00	313	6.018.201.944,00	313	13.302.965.037,00	423	10.665.512.221,00	418	15.073.013.349,00	423	45.059.692.551,00	100%	97%	423	112.041.763.904,00	97%	90%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (RSUD)	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/bulan	395	98.090.815.219,00	0	23.977.850.633,00	386	29.935.117.601,00	228	2.982.637.574,00	228	5.829.090.692,00	386	4.329.066.890,00	385	6.928.496.121,00	385	20.069.291.277,00	100%	67%	385	44.047.141.910,00	97%	45%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	3	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	orang/bulan	100	27.388.701.620,00	0	11.972.777.775,00	51	7.317.344.030,00	51	937.747.737,00	51	1.906.195.066,00	51	1.476.654.127,00	51	2.052.765.749,00	51	6.373.362.679,00	100%	87%	51	18.346.140.454,00	51%	67%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	4	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	68	23.177.194.000,00	0	8.675.282.277,00	34	5.610.968.670,00	34	733.483.651,00	34	1.450.564.935,00	34	1.071.395.956,00	0	1.532.496.822,00	34	4.787.941.364,00	100%	85%	34	13.463.223.641,00	50%	58%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	5	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	108	19.986.693.000,00	0	11.907.998.168,00	54	7.858.848.000,00	54	930.700.186,00	54	1.881.778.677,00	54	1.415.664.858,00	0	2.008.271.021,00	54	6.236.414.742,00	100%	79%	54	18.144.412.910,00	50%	91%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	5	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	26	5.192.675.000,00	0	2.473.796.386,00	12	1.682.835.000,00	13	216.572.600,00	0	485.788.204,00	0	387.515.238,00	0	537.877.184,00	13	1.627.753.226,00	108%	97%	13	4.101.549.612,00	50%	79%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	6	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	70	16.757.723.761,00	0	8.665.110.832,00	35	5.937.424.352,00	35	750.600.660,00	35	1.589.355.562,00	35	1.264.714.485,00	38	1.815.104.804,00	35	5.419.775.511,00	100%	91%	35	14.084.886.343,00	50%	84%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
2	7	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	72	17.319.271.280,00	0	7.915.617.374,00	36	5.470.630.413,00	36	695.756.799,00	35	1.533.494.214,00	36	1.170.247.208,00	36	1.660.114.531,00	36	5.059.612.752,00	100%	92%	36	12.975.230.126,00	50%	75%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	9	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	orang/bulan	54	15.937.330.000,00	0	7.370.876.404,00	27	5.132.457.000,00	27	560.419.234,00	26	1.245.821.051,00	26	967.589.453,00	26	1.409.047.821,00	26	4.182.877.559,00	96%	81%	26	11.553.753.963,00	48%	72%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	11	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	178	36.487.447.671,00	0	18.744.493.568,00	89	9.759.198.388,00	89	1.529.805.368,00	0	2.918.611.829,00	0	2.097.445.702,00	0	2.737.103.674,00	89	9.282.966.573,00	100%	95%	89	28.027.460.141,00	50%	77%	Dinas Lingkungan Hidup
2	12	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	56	6.175.160.000,00	0	6.488.264.947,00	29	4.328.123.400,00	28	559.164.962,00	29	1.244.442.308,00	29	1.002.031.159,00	29	1.434.754.526,00	29	4.240.392.955,00	100%	98%	29	10.728.657.902,00	52%	174%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	15	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	108	27.905.995.367,00	0	11.359.995.917,00	54	6.399.332.086,00	54	941.024.840,00	54	1.857.325.692,00	54	1.426.666.404,00	54	1.992.178.791,00	54	6.217.195.727,00	100%	97%	54	17.577.191.644,00	50%	63%	Dinas Perhubungan
2	16	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	74	15.743.141.000,00	0	8.451.958.816,00	33	5.380.709.137,00	33	695.434.303,00	33	1.442.772.997,00	33	1.142.249.342,00	33	1.642.189.812,00	33	4.922.646.454,00	100%	91%	33	13.374.605.270,00	45%	85%	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	18	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	72	16.604.773.600,00	0	6.038.526.002,00	26	4.009.723.000,00	26	510.645.448,00	26	1.134.801.385,00	26	906.020.215,00	26	1.261.626.088,00	26	3.813.093.136,00	100%	95%	26	9.851.619.138,00	36%	59%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	22	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	25	14.478.302.783,00	25	6.637.750.423,00	25	4.400.232.397,00	25	587.803.207,00	25	1.298.824.931,00	25	981.225.247,00	25	1.364.156.985,00	25	4.232.010.370,00	100%	96%	25	10.869.760.793,00	100%	75%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
2	23	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	100	13.203.685.623,00	200	6.179.403.188,00	27	4.040.291.218,00	27	499.994.834,00	27	1.115.429.897,00	27	881.191.383,00	27	1.227.350.342,00	27	3.723.966.456,00	100%	92%	227	9.903.369.644,00	227%	75%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3	30	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	75	32.451.577.308,00	0	14.920.344.414,00	75	9.353.202.622,00	75	1.251.579.728,00	75	2.601.241.885,00	75	1.903.094.387,00	75	2.580.882.151,00	75	8.336.798.151,00	100%	89%	75	23.257.142.565,00	100%	72%	Dinas Perdagangan
4	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	24	2.252.067.127,00	0	1.145.469.872,00	11	898.410.000,00	11	66.695.533,00	11	218.079.785,00	11	199.047.600,00	11	331.976.589,00	11	815.799.507,00	100%	91%	11	1.961.269.379,00	46%	87%	Bagian Pemerintahan
4	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	18	1.805.092.000,00	0	1.072.064.125,00	9	815.534.310,00	9	77.014.399,00	9	205.266.859,00	9	204.483.403,00	9	303.481.029,00	9	790.245.690,00	100%	97%	9	1.862.309.815,00	50%	103%	Bagian Organisasi
4	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	Orang/Bulan	20	4.789.320.000,00	0	1.792.497.753,00	10	864.232.000,00	10	66.264.426,00	10	226.549.510,00	9	202.680.919,00	10	334.166.934,00	10	829.661.789,00	100%	96%	10	2.622.159.542,00	50%	55%	Bagian Hukum
4	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	30	4.644.434.500,00	0	2.304.819.226,00	15	1.663.571.476,00	15	95.094.183,00	8	462.253.784,00	15	491.281.168,00	15	599.725.923,00	8	1.648.355.058,00	53%	99%	8	3.953.174.284,00	27%	85%	Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan
4	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	26	2.352.924.150,00	0	1.399.809.704,00	13	1.007.694.810,00	3	77.166.980,00	3	238.400.146,00	3	224.422.523,00	4	366.638.968,00	13	906.628.617,00	100%	90%	13	2.306.438.321,00	50%	98%	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
4	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	250	43.224.418.767,00	0	17.787.069.538,00	163	12.946.369.109,00	163	1.572.089.800,00	163	3.263.742.975,00	163	2.382.158.364,00	162	3.114.342.013,00	163	10.332.333.152,00	100%	80%	163	28.119.402.690,00	65%	65%	Bagian Umum
4	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	38	10.212.589.623,00	0	5.028.740.008,00	18	3.366.682.326,00	19	409.038.339,00	0	889.642.976,00	0	671.557.499,00	18	969.562.495,00	37	2.939.801.309,00	206%	87%	37	7.968.541.317,00	97%	78%	Sekretariat DPRD
5	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	62	16.652.850.000,00	0	9.132.205.530,00	31	5.421.693.491,00	31	592.760.103,00	31	1.374.316.654,00	31	1.115.601.573,00	31	1.604.590.692,00	31	4.687.269.022,00	100%	86%	31	13.819.474.552,00	50%	83%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	12000	144.305.437.092,00	3000	37.769.578.703,00	2875	28.995.937.209,00	3000	3.192.905.889,00	3000	5.008.682.621,00	2875	4.671.151.706,00	2875	5.564.940.242,00	2875	18.437.680.458,00	100%	64%	5875	56.207.259.161,00	49%	39%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	31	39.157.530.000,00	31	14.320.909.881,00	31	8.249.589.800,00	31	643.597.241,00	31	1.850.270.312,00	31	1.737.862.010,00	31	3.617.634.550,00	31	7.849.364.113,00	100%	95%	31	22.170.273.994,00	100%	57%	Badan Pendapatan Daerah
5	3	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	43	21.454.626.896,00	43	9.112.005.745,00	43	5.900.998.559,00	43	777.433.299,00	43	1.674.697.337,00	43	1.351.677.819,00	43	1.884.085.355,00	43	5.687.893.810,00	100%	96%	43	14.799.899.555,00	100%	69%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
6	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	45	32.064.281.990,00	0	13.665.972.648,00	45	7.376.098.986,00	45	982.897.587,00	45	2.104.717.108,00	45	1.689.426.101,00	45	2.389.529.711,00	45	7.166.570.507,00	100%	97%	45	20.832.543.155,00	100%	65%	Inspektorat Daerah
8	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	23	15.062.299.047,00	0	5.848.573.789,00	23	4.053.271.149,00	23	500.629.165,00	23	1.090.886.720,00	23	839.481.244,00	23	1.185.535.201,00	23	3.616.532.330,00	100%	89%	23	9.465.106.119,00	100%	63%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	76	44.634.629.742,00	0	18.437.426.587,00	76	11.464.224.855,00	76	1.529.981.508,00	76	3.102.504.505,00	76	2.250.898.418,00	76	3.343.605.888,00	76	10.226.990.319,00	100%	89%	76	28.664.416.906,00	100%	64%	Kecamatan Taman
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	70	39.659.832.822,00	0	18.692.103.423,00	70	11.505.478.545,00	70	1.564.667.103,00	0	3.285.187.216,00	0	2.453.025.675,00	0	3.409.042.961,00	70	10.711.922.955,00	100%	93%	70	29.404.026.378,00	100%	74%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	70	39.728.234.320,00	0	19.279.056.403,00	70	11.868.699.082,00	70	1.573.436.314,00	70	3.427.705.904,00	70	2.544.049.745,00	100	3.520.764.297,00	70	11.065.956.260,00	100%	93%	70	30.345.012.663,00	100%	76%	Kecamatan Manguharjo
2	12	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	24	157.360.000,00	0	0,00	12	78.680.000,00	3	0,00	5	19.170.000,00	3	19.170.000,00	1	40.340.000,00	12	78.680.000,00	100%	100%	12	78.680.000,00	50%	50%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
1	4	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD	Dokumen	52	244.000.000,00	26	121.389.300,00	13	37.499.615,00	3	11.799.500,00	1	3.118.000,00	0	0,00	9	18.861.500,00	13	33.779.000,00	100%	90%	39	155.168.300,00	75%	64%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	6	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	39	198.905.655,00	13	89.487.250,00	13	133.054.950,00	3	33.282.800,00	3	27.402.750,00	3	25.332.800,00	4	46.806.200,00	13	132.824.550,00	100%	100%	26	222.311.800,00	67%	112%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD	Dokumen	39	389.775.000,00	31	129.133.736,00	2	13.435.000,00	0	246.000,00	0	3.084.200,00	0	3.358.000,00	2	6.746.800,00	2	13.435.000,00	100%	100%	33	142.568.736,00	85%	37%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
7	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD	Laporan	52	8.000.000,00	26	3.999.800,00	13	2.000.000,00	3	499.900,00	2	561.400,00	0	0,00	4	938.600,00	9	1.999.900,00	69%	100%	35	5.999.700,00	67%	75%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	52	8.305.000,00	0	3.878.500,00	26	2.000.000,00	0	0,00	0	957.600,00	12	0,00	14	1.013.200,00	26	1.970.800,00	100%	99%	26	5.849.300,00	50%	70%	Kecamatan Manguharjo
1	**4**	**1**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Prosentase pemenuhan dokumen administrasi kepegawaian**	**%**	**100**	**32.990.138.951,00**	**100**	**7.703.355.018,00**	**100**	**9.212.015.845,00**	**25**	**412.149.910,00**	**25**	**1.220.467.325,00**	**25**	**188.115.956,00**	**25**	**7.019.195.100,00**	**100**	**8.839.928.291,00**	**100%**	**96%**	**100**	**16.543.283.309,00**	**100%**	**27%**	
1	4	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2	480.160.000,00	0	229.210.075,00	1	129.600.000,00	0	0,00	1	129.363.525,00	0	0,00	0	0,00	1	129.363.525,00	100%	100%	1	358.573.600,00	50%	75%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	5	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2	2.241.788.000,00	0	882.313.600,00	1	684.175.000,00	0	8.466.000,00	1	600.815.000,00	0	0,00	0	8.350.300,00	1	617.631.300,00	100%	90%	1	1.499.944.900,00	50%	67%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
2	11	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	paket	6	649.284.290,00	0	342.067.600,00	3	157.200.600,00	1	99.953.250,00	2	21.880.800,00	0	22.971.450,00	0	12.381.400,00	3	157.186.900,00	100%	100%	3	499.254.500,00	50%	77%	Dinas Lingkungan Hidup
2	15	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2	744.750.000,00	0	341.191.350,00	1	204.235.166,00	0	126.352.360,00	1	70.292.000,00	0	5.121.000,00	0	141.000,00	1	201.906.360,00	100%	99%	1	543.097.710,00	50%	73%	Dinas Perhubungan
2	22	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2	64.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0%	0%	0	0,00	0%	0%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
3	30	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	paket	2	551.214.450,00	0	169.858.660,00	1	61.544.700,00	0	0,00	0	0,00	1	61.157.000,00	0	0,00	1	61.157.000,00	100%	99%	1	231.015.660,00	50%	42%	Dinas Perdagangan
4	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	6	26.658.933.090,00	0	5.030.034.883,00	3	7.537.085.000,00	0	69.936.000,00	0	153.333.000,00		21.358.500,00		6.938.076.500,00	0	7.182.704.000,00	0%	95%	0	12.212.738.883,00	0%	46%	Bagian Umum
4	2	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2	119.999.880,00	0	70.892.500,00	1	64.818.894,00	0	0,00	0	0,00	0	33.411.000,00	1	20.093.000,00	1	53.504.000,00	100%	83%	1	124.396.500,00	50%	104%	Sekretariat DPRD
2	9	1	2.05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	6	88.597.000,00	0	0,00	3	16.078.000,00	1	8.536.500,00	1	3.066.300,00	1	0,00	0	2.239.100,00	3	13.841.900,00	100%	86%	3	13.841.900,00	50%	16%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1	6	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	118	233.940.000,00	0	0,00	59	101.536.000,00	0	0,00	58	100.478.000,00	0	0,00	7	350.000,00	65	100.828.000,00	110%	99%	65	100.828.000,00	55%	43%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	11	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	460	331.000.000,00	0	76.185.400,00	230	113.226.800,00	135	97.007.000,00	95	14.082.000,00	0	0,00	0	2.010.000,00	230	113.099.000,00	100%	100%	230	189.284.400,00	50%	57%	Dinas Lingkungan Hidup
5	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	62	530.804.871,00	0	542.518.750,00	31	4.932.000,00	0	0,00	0	0,00	0	39.213.000,00	0	32.465.800,00	0	71.678.800,00	0%	1453%	0	614.197.550,00	0%	116%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
7	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	70	255.167.370,00	0	0,00	70	127.583.685,00	0	0,00	0	125.904.000,00	70	0,00	30	1.150.000,00	100	127.054.000,00	143%	100%	100	127.054.000,00	143%	50%	Kecamatan Manguharjo
1	4	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	"Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan"	orang	68	40.000.000,00	0	19.082.200,00	36	10.000.000,00	0	1.898.800,00	0	1.252.700,00	36	4.884.006,00	0	1.938.000,00	36	9.973.506,00	100%	100%	36	29.055.706,00	53%	73%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	6	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	120	337.215.622,00	0	56.524.250,00	60	26.487.000,00	15	6.735.000,00	58	7.953.700,00	0	3.918.000,00	7	6.784.000,00	80	25.390.700,00	133%	96%	80	81.914.950,00	67%	24%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	12	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	orang	784	392.381.040,00	0	449.137.122,00	30	11.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	30	11.464.500,00	30	11.464.500,00	100%	100%	30	460.601.622,00	4%	117%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
2	15	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	268	397.461.000,00	0	261.133.500,00	134	166.509.000,00	37	73.717.680,00	0	3.853.000,00	134	72.492.000,00	134	15.313.000,00	134	165.375.680,00	100%	99%	134	426.509.180,00	50%	107%	Dinas Perhubungan
4	2	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	38	8.025.592,00	0	3.032.000,00	18	228.211.455,00	2	26.000.000,00	5	226.268.400,00	5	31.000.000,00	6	90.700.000,00	18	373.968.400,00	100%	164%	18	377.000.400,00	47%	4697%	Sekretariat DPRD
5	1	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	orang/keg	134	549.120.000,00	0	108.179.652,00	67	85.366.000,00	67	53.962.997,00	67	14.078.112,00	67	12.797.350,00	67	1.492.000,00	67	82.330.459,00	100%	96%	67	190.510.111,00	50%	35%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
8	1	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undang	Orang	60	125.631.624,00	0	0,00	30	62.815.812,00	30	55.410.830,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	30	55.410.830,00	100%	88%	30	55.410.830,00	50%	44%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
7	1	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	100	62.775.690,00	100	24.681.675,00	100	198.271.000,00	100	51.893.000,00	100	13.142.000,00	0	0,00	100	222.000.000,00	100	287.035.000,00	100%	145%	200	311.716.675,00	200%	497%	Kecamatan Taman
7	1	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	70	42.676.155,00	0	16.745.500,00	150	143.241.896,00	70	125.230.000,00	70	14.570.500,00	0	0,00	10	3.410.000,00	150	143.210.500,00	100%	100%	150	159.956.000,00	214%	375%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	100	29.898.000,00	0	14.257.950,00	100	16.263.750,00	25	4.052.800,00	25	4.052.800,00	25	4.048.000,00	25	4.100.000,00	100	16.253.600,00	100%	100%	100	30.511.550,00	100%	102%	Kecamatan Manguharjo
2	12	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	orang	100	42.083.000,00			45	21.041.500,00		0,00	0	0,00	0	0,00	45	20.800.000,00	45	20.800.000,00	100%	99%	45	20.800.000,00	45%	49%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	**1**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**persentase pemenuhan dokumen administrasi umum**	%	**100**	**46.464.993.451,00**	**100**	**17.053.915.411,00**	**100**	**8.962.284.615,00**	**25**	**1.304.215.307,00**	**18**	**1.919.033.414,00**	**31**	**1.918.159.686,00**	**26**	**2.930.592.630,00**	**100**	**8.072.001.037,00**	**100%**	**90%**	**100**	**25.125.916.448,00**	**100%**	**17%**	
4	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2	725.000.000,00	0	500.499.880,00	1	271.500.000,00	0	25.895.000,00	0	186.930.580,00	0	12.700.000,00	1	23.945.720,00	1	249.471.300,00	100%	92%	1	749.971.180,00	50%	103%	Bagian Umum
1	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	74	25.476.529.892,00	0	6.724.012.276,00	37	3.696.172.000,00	12	543.023.286,00	8	873.709.951,00	5	785.727.666,00	12	1.028.807.428,00	37	3.231.268.331,00	100%	87%	37	9.955.280.607,00	50%	39%	Dinas Pendidikan
1	2	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	8.439.181.992,00	0	4.424.056.967,00	1	1.848.790.000,00	0	289.614.835,00	0	389.628.766,00	0	377.990.066,00	1	662.533.718,00	1	1.719.767.385,00	100%	93%	1	6.143.824.352,00	50%	73%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	7	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	18	2.982.673.000,00	0	1.229.536.402,00	9	548.800.000,00	1	78.799.356,00	1	99.816.908,00	2	136.871.329,00	5	149.776.143,00	9	465.263.736,00	100%	85%	9	1.694.800.138,00	50%	57%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	9	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	30	1.255.211.000,00	0	0,00	19	771.140.000,00	3	105.988.775,00	5	165.855.400,00	6	178.092.400,00	5	314.802.927,00	19	764.739.502,00	100%	99%	19	764.739.502,00	63%	61%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	12	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	24	2.671.994.205,00	0	1.949.831.612,00	12	389.242.700,00	2	29.961.250,00	5	61.345.930,00	2	105.084.645,00	3	154.546.320,00	12	350.938.145,00	100%	90%	12	2.300.769.757,00	50%	86%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jenis	9	1.741.872.760,00	0	1.012.929.853,00	9	482.603.490,00	1	102.231.200,00	1	110.443.700,00	1	88.291.200,00	5	181.250.100,00	8	482.216.200,00	89%	100%	8	1.495.146.053,00	89%	86%	Inspektorat Daerah
8	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	paket	2	2.660.906.502,00	0	1.055.201.448,00	1	576.810.940,00	0	101.473.235,00	0	113.814.000,00	0	127.701.800,00	1	216.529.940,00	1	559.518.975,00	100%	97%	1	1.614.720.423,00	50%	61%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2	12	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	24	53.000.000,00	0	0,00	12	36.357.375,00	5	10.638.050,00	5	7.740.500,00	1	600.000,00	1	17.228.400,00	12	36.206.950,00	100%	100%	12	36.206.950,00	50%	68%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	24	26.985.000,00	0	0,00	12	25.088.510,00	1	3.935.000,00	5	7.169.600,00	2	6.935.900,00	4	7.047.300,00	12	25.087.800,00	100%	100%	12	25.087.800,00	50%	93%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	9	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	24	37.083.800,00	0	0,00	12	23.476.600,00	3	3.630.000,00	5	3.437.000,00	3	5.043.000,00	3	11.229.900,00	14	23.339.900,00	117%	99%	14	23.339.900,00	58%	63%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	296	1.119.555.300,00	0	658.346.853,00	148	563.803.000,00	35	34.920.320,00	29	86.071.659,00	52	105.821.680,00	35	186.840.454,00	151	413.654.113,00	102%	73%	151	1.072.000.966,00	51%	96%	Dinas Pendidikan
1	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	240	1.967.107.824,00	0	1.141.165.375,00	120	751.220.000,00	0	81.234.573,00	29	112.203.530,00	159	201.945.160,00	150	354.585.389,00	159	749.968.652,00	133%	100%	159	1.891.134.027,00	66%	96%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	3	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	240	1.002.444.000,00	145	477.811.185,00	60	521.573.036,00	14	58.847.479,00	14	160.755.580,00	14	89.816.849,00	18	38.945.104,00	60	348.365.012,00	100%	67%	205	826.176.197,00	85%	82%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	4	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	Laporan	40	735.520.000,00	0	446.367.247,00	25	233.880.000,00	4	34.833.264,00	4	63.400.330,00	6	53.719.660,00	9	81.505.869,00	23	233.459.123,00	92%	100%	23	679.826.370,00	58%	92%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
1	5	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	40	1.025.000.000,00	0	348.717.100,00	20	300.000.000,00	6	23.890.260,00	4	113.781.056,00	4	11.605.460,00	6	150.615.803,00	20	299.892.579,00	100%	100%	20	648.609.679,00	50%	63%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	5	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	48	260.000.000,00	0	224.981.345,00	24	120.000.000,00	6	18.205.582,00	6	41.636.247,00	6	18.011.626,00	6	42.133.287,00	24	119.986.742,00	100%	100%	24	344.968.087,00	50%	133%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	6	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	284	927.901.000,00	0	413.389.807,00	142	325.541.000,00	23	56.614.500,00	12	33.115.020,00	40	98.414.930,00	70	137.387.180,00	145	325.531.630,00	102%	100%	145	738.921.437,00	51%	80%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	7	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	150	927.190.000,00	0	456.895.467,00	70	337.175.000,00	23	44.375.000,00	23	64.757.168,00	15	79.225.430,00	9	148.610.463,00	70	336.968.061,00	100%	100%	70	793.863.528,00	47%	86%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	9	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	24	742.996.000,00	0	333.977.734,00	12	391.125.000,00	3	41.972.000,00	5	71.715.403,00	3	123.775.707,00	3	153.645.569,00	14	391.108.679,00	117%	100%	14	725.086.413,00	58%	98%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	11	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	24	766.483.000,00	0	507.060.900,00	12	390.508.000,00	3	55.973.200,00	10	100.323.100,00	5	100.576.200,00	3	133.556.500,00	21	390.429.000,00	175%	100%	21	897.489.900,00	88%	117%	Dinas Lingkungan Hidup
2	12	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	80	220.000.000,00	0	341.486.195,00	12	170.361.880,00	9	26.895.500,00	16	52.062.280,00	2	30.596.410,00	10	60.673.444,00	10	170.227.634,00	83%	100%	10	511.713.829,00	13%	233%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	15	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	120	984.666.000,00	0	446.303.577,00	60	276.645.000,00	28	116.290.622,00	12	26.694.580,00	10	55.920.967,00	10	75.967.168,00	60	274.873.337,00	100%	99%	60	721.176.914,00	50%	73%	Dinas Perhubungan
2	16	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	50	816.447.000,00	0	427.427.927,00	25	220.753.200,00	20	59.498.140,00	12	58.303.005,00	28	88.700.177,00	25	89.251.878,00	28	295.753.200,00	112%	134%	28	723.181.127,00	56%	89%	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	18	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	98	850.000.000,00	0	377.363.286,00	48	274.233.794,00	12	59.407.000,00	5	62.342.862,00	17	44.599.000,00	16	107.843.196,00	50	274.192.058,00	104%	100%	50	651.555.344,00	51%	77%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	23	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	100	321.000.000,00	99,9	197.518.180,00	30	152.954.000,00	5	14.546.000,00	10	31.828.880,00	6	24.885.260,00	8	76.061.671,00	29	147.321.811,00	97%	96%	129	344.839.991,00	129%	107%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3	30	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	60	764.118.400,00	0	726.238.621,00	30	291.443.200,00	17	70.194.100,00	4	58.494.700,00	3	58.407.530,00	5	104.346.870,00	29	291.443.200,00	97%	100%	29	1.017.681.821,00	48%	133%	Dinas Perdagangan
4	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	48	696.971.896,00	0	296.971.896,00	24	150.000.000,00	4	24.791.500,00	4	59.513.814,00	10	65.694.686,00	0	0,00	18	150.000.000,00	75%	100%	18	446.971.896,00	38%	64%	Bagian Pemerintahan
4	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	24	831.680.280,00	0	255.299.751,00	12	186.112.700,00	3	11.393.246,00	3	61.632.194,00	3	40.898.280,00	3	72.188.980,00	12	186.112.700,00	100%	100%	12	441.412.451,00	50%	53%	Bagian Organisasi
4	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	24	520.000.000,00	0	239.180.799,00	12	214.042.509,00	2	15.012.000,00	7	29.971.000,00	23	32.578.960,00	10	140.160.515,00	42	217.722.475,00	350%	102%	42	456.903.274,00	175%	88%	Bagian Hukum
4	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	24	406.221.950,00	0	276.893.025,00	12	236.432.000,00	3	43.635.500,00	3	34.338.000,00	3	40.535.437,00	3	112.840.889,00	12	231.349.826,00	100%	98%	12	508.242.851,00	50%	125%	Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan
4	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	%	100	774.000.000,00	200	379.676.100,00	100	180.000.000,00	25	39.988.500,00	25	35.286.880,00	25	31.620.770,00	25	73.103.850,00	100	180.000.000,00	100%	100%	100	559.676.100,00	100%	72%	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
4	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	648	6.822.725.800,00	0	2.997.377.778,00	324	3.184.308.928,00	58	375.050.934,00	73	909.614.339,00	87	944.987.298,00	93	1.558.917.719,00	311	3.788.570.290,00	96%	119%	311	6.785.948.068,00	48%	99%	Bagian Umum
4	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	88	2.955.288.862,00	0	2.012.068.375,00	44	937.733.258,00	12	253.754.638,00	0	277.605.021,00	6	450.494.643,00	26	398.570.796,00	44	1.380.425.098,00	100%	147%	44	3.392.493.473,00	50%	115%	Sekretariat DPRD
5	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2	1.367.802.000,00	0	1.068.106.981,00	1	404.710.800,00	0	29.755.000,00	0	133.587.598,00	0	175.427.828,00	1	69.459.208,00	1	408.229.634,00	100%	101%	1	1.476.336.615,00	50%	108%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	210	120.000.000,00	70	640.070.733,00	70	500.000.000,00	42	255.484.491,00	10	103.188.860,00	27	67.252.677,00	26	71.999.514,00	105	497.925.542,00	150%	100%	175	1.137.996.275,00	83%	948%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	laporan	45	545.005.999,00	15	140.729.999,00	15	202.138.000,00	3	29.710.770,00	3	28.401.016,00	3	63.524.717,00	6	80.307.996,00	15	201.944.499,00	100%	100%	30	342.674.498,00	67%	63%	Badan Pendapatan Daerah
5	3	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	386	1.187.913.119,00	226	561.245.605,00	80	441.100.000,00	14	54.479.046,00	20	91.561.156,00	30	90.810.329,00	43	201.674.537,00	107	438.525.068,00	134%	99%	333	999.770.673,00	86%	84%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
6	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	130	913.024.490,00	0	665.648.059,00	65	395.376.400,00	16	148.147.500,00	2	81.995.465,00	16	99.560.814,00	21	65.403.743,00	55	395.107.522,00	85%	100%	55	1.060.755.581,00	42%	116%	Inspektorat Daerah
8	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	laporan	160	689.000.000,00	0	188.940.741,00	80	200.000.000,00	25	52.999.500,00	25	49.786.500,00	10	45.618.160,00	13	49.066.930,00	73	197.471.090,00	91%	99%	73	386.411.831,00	46%	56%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	20	318.666.601,00	0	95.317.258,00	10	106.446.859,00	2	25.495.260,00	0	9.306.150,00	3	23.755.460,00	4	47.888.353,00	9	106.445.223,00	90%	100%	9	201.762.481,00	45%	63%	Kecamatan Taman
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	24	558.661.000,00	0	321.720.085,00	12	236.932.000,00	3	40.461.500,00	2	32.219.680,00	4	89.887.245,00	3	139.111.313,00	12	301.679.738,00	100%	127%	12	623.399.823,00	50%	112%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	24	571.968.000,00	0	248.803.975,00	12	153.091.000,00	3	22.334.000,00	2	34.044.287,00	8	44.999.930,00	11	51.632.060,00	24	153.010.277,00	200%	100%	24	401.814.252,00	100%	70%	Kecamatan Manguharjo
1	**1**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan pemerintahan daerah**	**%**	**100**	**1.000.000.000,00**	**0**	**0,00**	**100**	**98.475.293,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**100**	**94.517.000,00**	**100**	**94.517.000,00**	**100%**	**96%**	**100**	**94.517.000,00**	**100%**	**9%**	
1	4	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	unit	4	8.037.487.500,00	0	3.748.334.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0%	0%	0	3.748.334.000,00	0%	47%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	6	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	59	1.055.543.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	0,00	5	0,00	0%	0%	5	0,00	8%	0%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4	1	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit					0	94.905.000,00		0,00		0,00	0	0,00	3	93.174.930,00	3	93.174.930,00	0%	98%	3	93.174.930,00	#DIV/0!	#DIV/0!	
4	1	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	2	10.364.550.000,00	0	19.378.950.000,00	1	1.173.100.000,00	0	307.000.000,00	0	1.500.000,00	1	862.700.000,00	0	1.700.000,00	1	1.172.900.000,00	100%	100%	1	20.551.850.000,00	50%	198%	Bagian Umum
8	1	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Unit	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	13.236.943,00	0	0,00	0	0,00	0	13.236.943,00	0%	0%	0	13.236.943,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1	3	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	2	309.915.930,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0%	0%	0	0,00	0%	0%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	5	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	6	1.608.068.000,00	0	0,00	5	200.000.000,00	0	0,00	5	184.792.000,00	0	0,00	0	1.200.000,00	5	185.992.000,00	100%	93%	5	185.992.000,00	83%	12%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	6	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	2	731.927.910,00	0	182.803.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	1	0,00	0%	0%	1	182.803.500,00	50%	25%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	7	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	2		0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	-	0	0,00	0	#VALUE!	0%	0%	0	#VALUE!	0%	#VALUE!	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	15	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	15	1.101.500.000,00	0	0,00	15	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0%	0%	0	0,00	0%	0%	Dinas Perhubungan
2	23	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan kebutuhan kendaraan dinas operasoonal atau lapangan	%	100	97.680.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		0,00	0	0,00	0	0,00	0%	0%	0	0,00	0%	0%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
7	1	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	12	1.026,00	0	0,00	3	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0%	0%	0	0,00	0%	0%	Kecamatan Taman
7	1	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	18	656.632.000,00	0	13.070.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0%	0%	0	13.070.000,00	0%	2%	Kecamatan Manguharjo
2	7	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2	914.561.620,00	0	814.030.055,00	1	119.627.510,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	194.532.738,00	1	194.532.738,00	100%	163%	1	1.008.562.793,00	50%	110%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	22	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2	35.600.000,00	0	0,00	2	17.800.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	17.300.000,00	4	17.300.000,00	200%	97%	4	17.300.000,00	200%	49%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
3	30	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10	730.000.000,00	0	0,00	9	64.168.000,00	1	5.500.000,00	0	0,00	0	0,00	8	53.413.200,00	9	58.913.200,00	100%	92%	9	58.913.200,00	90%	8%	Dinas Perdagangan
4	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	6	227.622.000,00	0	146.722.875,00	2	152.976.926,00	2	6.849.900,00	0	0,00	0	0,00	17	145.435.000,00	19	152.284.900,00	950%	100%	19	299.007.775,00	317%	131%	Bagian Hukum
4	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	6	709.665.790,00	0	748.093.490,00	3	46.900.000,00	3	14.150.000,00	0	0,00	0	0,00	0	30.855.000,00	3	45.005.000,00	100%	96%	3	793.098.490,00	50%	112%	Bagian Umum
1	5	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	595.000.000,00	0	0,00	1	735.850.000,00	0	0,00	0	205.370.000,00	0	0,00	1	248.202.057,00	1	453.572.057,00	100%	62%	1	453.572.057,00	50%	76%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
7	1	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	1	935.650.000,00	2	350.233.136,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0%	0%	2	350.233.136,00	200%	37%	Kecamatan Kartoharjo
1	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	50	1.000.000.000,00	0	0,00	2	98.475.293,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	94.517.000,00	2	94.517.000,00	100%	96%	2	94.517.000,00	4%	9%	Dinas Pendidikan
1	3	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	buah	20	482.139.785,00	0	191.238.381,00	3	15.575.000,00	0	0,00	2	13.250.000,00	0	0,00	1	1.325.000,00	3	14.575.000,00	100%	94%	3	205.813.381,00	15%	43%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	4	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	buah	13	358.834.050,00	0	317.647.500,00	74	223.610.017,00	0	5.100.000,00	0	0,00	0	0,00	74	214.291.500,00	74	219.391.500,00	100%	98%	74	537.039.000,00	569%	150%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	5	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	1.273.727.000,00	0	613.464.229,00	1	46.511.500,00	0		0	0,00	0	0,00	1	42.800.000,00	1	42.800.000,00	100%	92%	1	656.264.229,00	50%	52%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	5	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	210.000.000,00	0	51.780.000,00	4	12.375.000,00	1	12.375.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	12.375.000,00	25%	100%	1	64.155.000,00	50%	31%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	6	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	80	807.507.055,00	0	770.915.822,00	40	293.311.158,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	40	266.610.000,00	40	266.610.000,00	100%	91%	40	1.037.525.822,00	50%	128%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	9	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	4	753.067.000,00	0	202.633.250,00	2	78.880.300,00	0	0,00	2	4.880.000,00	0	0,00	10	73.618.000,00	10	78.498.000,00	500%	100%	10	281.131.250,00	250%	37%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	12	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	unit					4	240.665.951,00		0,00	0	0,00	0	8.880.000,00	4	244.480.600,00	4	253.360.600,00	100%	105%	4	253.360.600,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	15	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	20	1.171.722.000,00	0	0,00	10	110.428.373,00	7	106.626.600,00	3	1.200.000,00	0	0,00	0	0,00	10	107.826.600,00	100%	98%	10	107.826.600,00	50%	9%	Dinas Perhubungan
2	18	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	10	495.600.000,00	0	218.156.400,00	12	58.700.000,00	0	0,00	1	55.396.900,00	1	2.600.000,00	10	0,00	12	57.996.900,00	100%	99%	12	276.153.300,00	120%	56%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	23	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	4	877.385.400,00	0	777.625.920,00	12	12.210.000,00	0	0,00	0	11.400.000,00		0,00	0	0,00	0	11.400.000,00	0%	93%	0	789.025.920,00	0%	90%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
4	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	55.376.925,00	0	0,00	1	26.267.344,00	0		0	0,00	0	0,00	1	26.267.344,00	1	26.267.344,00	100%	100%	1	26.267.344,00	50%	47%	Bagian Organisasi
4	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	11	546.549.710,00	0	475.248.100,00	5	49.577.600,00	5	41.617.600,00	0	1.300.000,00	0	0,00	0	6.640.000,00	5	49.557.600,00	100%	100%	5	524.805.700,00	45%	96%	Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan
4	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase pemenuhan sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	%	100	3.223.775.000,00	200	157.738.800,00	100	3.265.065,00	0	0,00	0	0,00		2.865.000,00	0	0,00	0	2.865.000,00	0%	88%	100	160.603.800,00	100%	5%	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
4	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit	10	497.311.790,00	0	307.386.690,00	5	91.255.320,00	2	41.780.000,00	0	0,00	1	23.700.000,00	2	197.800.000,00	5	263.280.000,00	100%	289%	5	570.666.690,00	50%	115%	Bagian Umum
4	2	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	20	1.519.815.225,00	0	1.411.848.537,00	10	183.367.000,00	0	0,00	0	0,00	0	5.200.000,00	10	178.167.000,00	10	183.367.000,00	100%	100%	10	1.595.215.537,00	50%	105%	Sekretariat DPRD
5	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	2	22.628.071.820,00	0	346.255.530,00	1	72.566.785,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	44.425.000,00	1	44.425.000,00	100%	61%	1	390.680.530,00	50%	2%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	2	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	unit	12	293.892.060,00	0	0,00	6	146.946.030,00	0	0,00	0	122.586.250,00	0	0,00	2	20.000.000,00	2	142.586.250,00	33%	97%	2	142.586.250,00	17%	49%	Badan Pendapatan Daerah
8	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	10	139.945.406,00	0	0,00	5	69.972.703,00	1	10.679.300,00	3	58.592.000,00	0	0,00	0	0,00	4	69.271.300,00	80%	99%	4	69.271.300,00	40%	49%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
7	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangungan lainnya yang disediakan	Unit	2	1.764.858.790,00	0	1.304.306.310,00	3	230.276.240,00	0	64.625.000,00	0	0,00	1	18.650.000,00	2	0,00	3	83.275.000,00	100%	36%	3	1.387.581.310,00	150%	79%	Kecamatan Taman
7	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	40	860.992.255,00	20	490.204.265,00	10	60.990.696,00	0	0,00	5	52.742.542,00	0	0,00	1	5.245.000,00	6	57.987.542,00	60%	95%	26	548.191.807,00	65%	64%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	597.397.500,00	0	17.096.200,00	1	8.158.500,00	1	8.150.500,00	0	0,00	0	0,00		0,00	1	8.150.500,00	100%	100%	1	25.246.700,00	50%	4%	Kecamatan Manguharjo
2	11	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	4	370.759.250,00	0	414.436.250,00	2	5.550.000,00	0	0,00	0	5.023.000,00	2	0,00	0	500.000,00	2	5.523.000,00	100%	100%	2	419.959.250,00	50%	113%	Dinas Lingkungan Hidup

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
2	16	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	12	725.000.000,00	0	0,00	1	18.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	15.875.000,00	1	15.875.000,00	100%	88%	1	15.875.000,00	8%	2%	Dinas Komunikasi dan Informatika
5	2	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	10	276.664.500,00	8	184.950.000,00	17	860.410.000,00	0	647.190.000,00	0	0,00	0	0,00	21	200.190.000,00	21	847.380.000,00	124%	98%	29	1.032.330.000,00	290%	373%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	3	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	10	510.379.950,00	0	310.379.950,00	2	244.368.145,00	0	0,00	1	12.900.000,00	0	0,00	1	191.140.000,00	2	204.040.000,00	100%	83%	2	514.419.950,00	20%	101%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
1	**2**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang**	**%**	**100**	**5.182.835.350,00**	**100**	**2.343.900.000,00**	**100**	**770.550.000,00**	**25**	**238.050.000,00**	**25**	**269.900.000,00**	**25**	**123.900.000,00**	**25**	**81.600.000,00**	**100**	**713.450.000,00**	**100%**	**93%**	**100**	**3.057.350.000,00**	**100%**	**59%**	
1	3	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	40	14.477.651.751,00	20	5.706.218.860,00	10	3.569.911.522,00	2	408.931.800,00	3	718.965.834,00	2	744.622.647,00	3	1.311.821.354,00	10	3.184.341.635,00	100%	89%	30	8.890.560.495,00	75%	61%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	4	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	24	8.236.116.075,00	0	3.264.876.688,00	20	2.094.091.613,00	4	348.963.613,00	2	569.876.094,00	6	507.035.831,00	8	578.432.740,00	20	2.004.308.278,00	100%	96%	20	5.269.184.966,00	83%	64%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	5	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12.673.728.000,00	0	5.532.507.181,00	6	2.647.446.994,00	5	507.108.201,00	2	736.559.551,00	3	669.336.960,00	0	654.807.616,00	10	2.567.812.328,00	167%	97%	10	8.100.319.509,00	83%	64%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	5	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	24	2.146.092.000,00	0	820.545.956,00	12	374.576.000,00	3	108.185.700,00	3	93.208.750,00	3	50.667.950,00	3	105.134.598,00	12	357.196.998,00	100%	95%	12	1.177.742.954,00	50%	55%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	6	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	48	4.804.287.650,00	0	1.735.494.080,00	24	875.168.763,00	5	150.813.606,00	6	174.952.252,00	6	196.479.699,00	7	199.543.475,00	24	721.789.032,00	100%	82%	24	2.457.283.112,00	50%	51%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	11	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	laporan	8	5.750.771.055,00	0	2.550.898.529,00	4	680.284.208,00	0	146.548.950,00	4	211.059.250,00	4	142.257.350,00	0	173.002.500,00	4	672.868.050,00	100%	99%	4	3.223.766.579,00	50%	56%	Dinas Lingkungan Hidup
2	15	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4	9.753.973.456,00	0	4.611.277.863,00	2	2.057.999.389,00	0	447.074.901,00	1	492.684.825,00	2	541.825.376,00	1	549.361.195,00	2	2.030.946.297,00	100%	99%	2	6.642.224.160,00	50%	68%	Dinas Perhubungan
2	16	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	2	6.806.630.000,00	0	3.295.839.996,00	1	1.102.838.000,00	0	235.678.355,00	0	231.480.098,00	0	319.267.124,00	2	297.994.787,00	2	1.084.420.364,00	200%	98%	2	4.380.260.360,00	100%	64%	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	18	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	76	1.997.000.000,00	0	0,00	38	753.933.953,00	9	169.718.421,00	9	205.425.955,00	10	161.964.216,00	10	189.561.491,00	38	726.670.083,00	100%	96%	38	726.670.083,00	50%	36%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	22	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	2	9.860.500.650,00	0	3.641.525.854,00	1	2.065.042.292,00	0	384.288.800,00	1	584.668.540,00	0	515.767.050,00	0	561.070.000,00	1	2.045.794.390,00	100%	99%	1	5.687.320.244,00	50%	58%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
2	23	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	100	2.587.346.380,00	100	877.459.840,00	12	608.950.000,00	3	129.426.940,00	3	126.338.300,00	3	139.181.000,00	3	144.344.200,00	12	539.290.440,00	100%	89%	112	1.416.750.280,00	112%	55%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3	30	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	laporan	4	3.941.096.882,00	0	1.652.864.045,00	4	754.249.250,00	0	155.780.900,00	1	182.603.300,00	1	165.944.450,00	1	209.554.750,00	3	713.883.400,00	75%	95%	3	2.366.747.445,00	75%	60%	Dinas Perdagangan
4	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	24	1.010.831.851,00	0	386.735.411,00	12	214.400.000,00	3	37.977.000,00	3	58.178.600,00	4	54.216.650,00	2	57.497.600,00	12	207.869.850,00	100%	97%	12	594.605.261,00	50%	59%	Bagian Pemerintahan
4	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	24	904.194.216,00	0	300.295.569,00	12	158.263.760,00	3	25.709.100,00	3	20.000.300,00	3	41.838.400,00	3	69.008.425,00	12	156.556.225,00	100%	99%	12	456.851.794,00	50%	51%	Bagian Organisasi
4	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	24	1.236.102.800,00	0	536.919.535,00	12	334.604.548,00	3	39.043.716,00	14	79.227.739,00	3	52.743.911,00	121	144.871.885,00	14	315.887.251,00	117%	94%	14	852.806.786,00	58%	69%	Bagian Hukum
4	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	24	1.387.948.626,00	0	509.020.279,00	12	293.072.974,00	3	94.095.661,00	3	68.421.400,00	3	59.947.027,00	3	66.611.020,00	12	289.075.108,00	100%	99%	12	798.095.387,00	50%	58%	Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan
4	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	24	1.549.110.000,00	0	367.303.654,00	12	259.215.360,00	0	41.015.050,00	3	31.137.600,00	4	41.935.225,00	4	55.977.187,00	11	170.065.062,00	92%	66%	11	537.368.716,00	46%	35%	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
4	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	28	21.159.285.535,00	0	8.192.252.661,00	18	5.350.311.274,00	6	711.175.012,00	2	1.119.151.008,00	4	1.091.831.808,00	6	1.955.429.906,00	18	4.877.587.734,00	100%	91%	18	13.069.840.395,00	64%	62%	Bagian Umum
4	2	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	48	10.383.255.700,00	0	4.868.303.246,00	24	2.727.451.920,00	4	407.103.031,00	0	583.272.732,00	2	693.890.423,00	18	751.929.111,00	24	2.436.195.297,00	100%	89%	24	7.304.498.543,00	50%	70%	Sekretariat DPRD
5	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	2	2.105.698.135,00	0	1.135.509.434,00	1	935.662.000,00	0	123.261.280,00	0	228.395.503,00	0	223.589.744,00	1	262.864.798,00	1	838.111.325,00	100%	90%	1	1.973.620.759,00	50%	94%	Badan Perencanaan, Penelitian dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
																														Pengembangan Daerah
5	2	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Laporan	3	66.434.804.845,00	1	27.717.551.775,00	3	20.521.692.179,00	0	4.518.619.216,00	3	4.462.867.314,00	3	4.665.271.354,00	3	4.939.944.469,00	3	18.586.702.353,00	100%	91%	4	46.304.254.128,00	133%	70%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	3	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	56	3.381.997.771,00	18	1.428.237.296,00	12	436.886.605,00	3	86.872.840,00	3	96.914.200,00	4	112.424.350,00	2	115.807.587,00	12	412.018.977,00	100%	94%	30	1.840.256.273,00	54%	54%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	24	1.878.860.900,00	0	0,00	12	939.430.450,00	2	175.275.385,00	25	230.614.526,00	3	231.509.293,00	4	236.786.819,00	25	874.186.023,00	208%	93%	25	874.186.023,00	104%	47%	Kecamatan Taman
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	24	5.054.410.418,00	0	2.344.811.004,00	12	1.026.135.108,00	3	179.520.116,00	2	202.370.081,00	4	352.427.810,00	3	275.562.159,00	12	1.009.880.166,00	100%	98%	12	3.354.691.170,00	50%	66%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	24	5.869.326.405,00	0	1.855.692.972,00	12	930.603.809,00	0	151.337.352,00	20	231.241.458,00		229.996.431,00	4	301.629.655,00	24	914.204.896,00	200%	98%	24	2.769.897.868,00	100%	47%	Kecamatan Manguharjo
1	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (RSUD)	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	28	5.182.835.350,00	0	2.343.900.000,00	14	770.550.000,00	3	238.050.000,00	4	269.900.000,00	4	123.900.000,00	3	81.600.000,00	14	713.450.000,00	100%	93%	14	3.057.350.000,00	50%	59%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	6	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	24	1.698.020.000,00	0	330.730.000,00	12	398.700.000,00	3	66.590.000,00	3	98.870.000,00	3	98.005.000,00	3	120.075.000,00	12	383.540.000,00	100%	96%	12	714.270.000,00	50%	42%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	11	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	24	16.225.696.000,00	0	3.869.751.300,00	12	5.012.776.504,00	3	831.628.700,00	2	1.459.999.000,00	4	1.140.464.400,00	3	1.506.008.200,00	12	4.938.100.300,00	100%	99%	12	8.807.851.600,00	50%	54%	Dinas Lingkungan Hidup
2	12	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	laporan	24	1.149.803.912,00	0	392.076.060,00	12	660.037.110,00	3	140.003.680,00	5	128.666.650,00	2	164.890.895,00	2	213.579.620,00	12	647.140.845,00	100%	98%	12	1.039.216.905,00	50%	90%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Prosentase pemenuhan peralatan/perlengkapan kantor yang representatif	%	100	1.051.750.668,00	0	0,00	100	572.145.362,00	25	162.009.400,00	25	116.608.500,00	25	104.695.550,00	25	150.304.140,00	100	533.617.590,00	100%	93%	100	533.617.590,00	100%	51%	Badan Pendapatan Daerah
1	**1**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan**	**%**	**100**	**56.467.110.801,00**	**100**	**24.743.619.709,00**	**100**	**14.750.597.000,00**	**25**	**2.021.494.181,00**	**9**	**3.355.479.931,00**	**14**	**2.962.730.513,00**	**52**	**4.948.655.681,00**	**100**	**13.288.360.306,00**	**100%**	**90%**	**100**	**38.031.980.015,00**	**100%**	**24%**	
1	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	432	627.828.400,00	0	194.207.658,00	216	196.923.000,00	12	20.720.550,00	54	44.869.813,00	42	22.311.359,00	109	68.282.475,00	217	156.184.197,00	100%	79%	217	350.391.855,00	50%	56%	Dinas Pendidikan
1	2	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	160	1.249.562.189,00	0	446.019.317,00	80	321.706.000,00	80	21.872.300,00	80	27.217.423,00	80	44.924.500,00	80	133.459.406,00	80	227.473.629,00	100%	71%	80	673.492.946,00	50%	54%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	3	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	unit	236	1.816.808.200,00	139	592.441.870,00	59	370.280.838,00	17	85.277.918,00	15	84.065.310,00	17	68.701.112,00	10	125.677.522,00	59	363.721.862,00	100%	98%	198	956.163.732,00	84%	53%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	4	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	130	6.531.321.432,00	0	2.479.893.578,00	65	1.434.008.090,00	12	258.944.810,00	14	315.821.809,00	0	405.640.092,00	38	453.262.429,00	64	1.433.669.140,00	98%	100%	64	3.913.562.718,00	49%	60%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	5	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	40	2.000.000.000,00	0	830.767.485,00	20	443.057.000,00	5	56.707.780,00	5	96.821.100,00	5	74.480.625,00	5	144.636.836,00	20	372.646.341,00	100%	84%	20	1.203.413.826,00	50%	60%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	6	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	50	727.214.320,00	0	279.947.455,00	25	215.702.000,00	5	20.048.800,00	5	30.098.942,00	0	32.887.842,00	33	81.449.677,00	43	164.485.261,00	172%	76%	43	444.432.716,00	86%	61%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	7	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	38	196.318.000,00	0	96.222.040,00	19	68.716.000,00	5	15.961.280,00	2	7.221.576,00	5	11.773.691,00	7	40.177.775,00	19	75.134.322,00	100%	109%	19	171.356.362,00	50%	87%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	9	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	69	325.500.000,00	0	111.604.842,00	34	88.254.600,00	5	11.792.900,00	5	13.984.360,00	10	24.984.266,00	12	31.396.306,00	32	82.157.832,00	94%	93%	32	193.762.674,00	46%	60%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	11	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	30	4.875.379.700,00	0	2.228.060.450,00	15	1.320.115.722,00	4	318.435.400,00	11	291.908.250,00	7	267.888.400,00	0	320.621.550,00	22	1.198.853.600,00	147%	91%	22	3.426.914.050,00	73%	70%	Dinas Lingkungan Hidup
2	12	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	unit	50	108.107.950,00	0	43.587.500,00	22	25.406.367,00	2	4.069.500,00	5	4.963.800,00	2	3.325.300,00	9	10.492.900,00	18	22.851.500,00	82%	90%	18	66.439.000,00	36%	61%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
2	15	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	114	2.608.000.000,00	0	1.320.839.481,00	57	626.065.000,00	8	100.434.395,00	0	164.294.969,00	10	196.255.670,00	39	164.852.144,00	57	625.837.178,00	100%	100%	57	1.946.676.659,00	50%	75%	Dinas Perhubungan
2	16	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	62	640.500.000,00	0	342.626.188,00	31	170.608.000,00	4	28.353.627,00	3	39.427.316,00	2	27.250.090,00	22	73.550.416,00	31	168.581.449,00	100%	99%	31	511.207.637,00	50%	80%	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	18	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	46	195.000.000,00	0	74.025.750,00	21	53.397.800,00	3	10.057.800,00	3	10.500.000,00	9	11.873.842,00	5	18.146.500,00	20	50.578.142,00	95%	95%	20	124.603.892,00	43%	64%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	22	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	60	232.050.000,00	0	120.712.866,00	30	55.000.000,00	7	19.582.000,00	5	10.585.500,00	7	10.849.000,00	11	13.283.116,00	30	54.299.616,00	100%	99%	30	175.012.482,00	50%	75%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
2	23	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	100	234.452.000,00	100	135.200.750,00	22	58.000.000,00	5	19.286.020,00	6	12.075.550,00	4	10.230.500,00	7	38.912.050,00	22	80.504.120,00	100%	139%	122	215.704.870,00	122%	92%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3	30	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	88	1.133.596.930,00	0	442.182.282,00	44	238.701.714,00	8	51.585.900,00	7	58.033.759,00	8	47.266.068,00	13	72.425.965,00	36	229.311.692,00	82%	96%	36	671.493.974,00	41%	59%	Dinas Perdagangan
4	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	8	82.005.265,00	0	41.951.715,00	4	20.000.000,00	1	4.227.000,00	0	3.717.300,00	1	4.811.580,00	2	7.206.000,00	4	19.961.880,00	100%	100%	4	61.913.595,00	50%	75%	Bagian Pemerintahan
4	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	12	94.020.000,00	0	46.882.980,00	6	30.423.700,00	1	4.866.500,00	0	3.582.276,00	1	3.716.441,00	4	17.866.511,00	6	30.031.728,00	100%	99%	6	76.914.708,00	50%	82%	Bagian Organisasi
4	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	8	82.190.400,00	0	41.882.935,00	4	26.485.126,00	1	5.270.000,00	1	4.615.897,00	1	5.584.060,00	2	7.815.650,00	5	23.285.607,00	125%	88%	5	65.168.542,00	63%	79%	Bagian Hukum
4	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara atau Dibayarkan Pajaknya	Unit	14	65.658.958,00	0	37.622.778,00	7	22.290.200,00	1	7.850.160,00	2	3.136.771,00	3	4.501.680,00	1	6.320.400,00	7	21.809.011,00	100%	98%	7	59.431.789,00	50%	91%	Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan
4	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	persentase kendaraan dinas perorangan/jabatan yang layak digunakan	%	100	88.000.000,00	200	37.164.600,00	100	22.000.000,00	25	3.650.000,00	25	4.490.221,00	25	5.835.000,00	25	6.756.000,00	100	20.731.221,00	100%	94%	100	57.895.821,00	100%	66%	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
4	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	188	5.051.254.595,00	0	2.043.164.276,00	94	1.170.419.250,00	12	142.025.534,00	28	464.660.520,00	32	231.135.290,00	21	324.798.403,00	93	1.162.619.747,00	99%	99%	93	3.205.784.023,00	49%	63%	Bagian Umum
4	2	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	52	1.221.363.581,00	0	520.959.871,00	26	308.788.898,00	2	37.937.877,00	0	28.494.715,00	4	58.840.209,00	20	130.748.337,00	26	256.021.138,00	100%	83%	26	776.981.009,00	50%	64%	Sekretariat DPRD
5	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	66	150.000.000,00	0	58.350.030,00	33	85.730.400,00	0	8.758.000,00	0	15.941.300,00	0	20.198.046,00	0	37.375.200,00	0	82.272.546,00	0%	96%	0	140.622.576,00	0%	94%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	2	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	108	301.120.000,00	36	125.041.900,00	36	115.000.000,00	12	29.217.576,00	1	20.893.600,00	7	31.413.764,00	17	20.906.300,00	37	102.431.240,00	103%	89%	73	227.473.140,00	68%	76%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	105	197.574.000,00	37	66.333.241,00	35	41.725.000,00	7	7.920.000,00	2	8.997.800,00	7	10.627.085,00	15	13.452.500,00	31	40.997.385,00	89%	98%	68	107.330.626,00	65%	54%	Badan Pendapatan Daerah
5	3	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	87	30.000.000,00	48	30.959.060,00	18	22.300.000,00	3	3.872.243,00	5	2.591.500,00	5	2.384.000,00	5	8.117.380,00	18	16.965.123,00	100%	76%	66	47.924.183,00	76%	160%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
6	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	40	156.219.441,00	0	70.446.361,00	20	42.886.540,00	7	14.029.040,00	7	4.379.925,00	7	6.716.800,00	7	17.598.150,00	28	42.723.915,00	140%	100%	28	113.170.276,00	70%	72%	Inspektorat Daerah
8	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	2	126.892.000,00	0	66.158.925,00	1	50.740.000,00	0	7.242.000,00	0	13.236.943,00	0	2.000.000,00	1	26.905.000,00	1	49.383.943,00	100%	97%	1	115.542.868,00	50%	91%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	32	211.388.150,00	0	85.047.741,00	16	52.522.300,00	2	9.710.980,00	0	7.440.490,00	3	10.966.900,00	11	23.298.500,00	16	51.416.870,00	100%	98%	16	136.464.611,00	50%	65%	Kecamatan Taman

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	28	101.004.000,00	0	50.784.633,00	14	43.117.966,00	2	4.294.000,00	3	6.268.932,00	5	6.680.000,00	4	19.568.435,00	14	36.811.367,00	100%	85%	14	87.596.000,00	50%	87%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	30	248.118.400,00	0	78.517.387,00	15	67.667.208,00	3	6.941.300,00	2	8.436.000,00		17.171.650,00	10	33.454.150,00	15	66.003.100,00	100%	98%	15	144.520.487,00	50%	58%	Kecamatan Manguharjo
1	5	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	16	742.500.000,00	0	331.909.519,00	8	148.787.000,00	0	40.974.000,00	2	23.762.890,00	2	28.040.950,00	2	52.736.750,00	6	145.514.590,00	75%	98%	6	477.424.109,00	38%	64%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2	12	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	6	22.941.480,00	0	0,00	3	21.552.040,00	1	1.997.000,00	2	4.599.500,00	0	3.325.300,00	0	5.523.300,00	3	15.445.100,00	100%	72%	3	15.445.100,00	50%	67%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	2	70.380.000,00	0	28.419.800,00	1	23.157.329,00	0	3.820.000,00	0	4.270.000,00	0	5.410.800,00	1	7.340.000,00	1	20.840.800,00	100%	90%	1	49.260.600,00	50%	70%	Kecamatan Kartoharjo
2	9	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	30	18.995.000,00	0	0,00	15	15.584.500,00	3	2.445.000,00	10	2.964.000,00	4	2.185.870,00	4	6.658.890,00	21	14.253.760,00	140%	91%	21	14.253.760,00	70%	75%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	11	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	30	385.675.000,00	0	236.001.450,00	15	190.260.800,00	3	35.000.300,00	35	31.951.500,00	0	28.447.500,00	0	67.486.850,00	35	162.886.150,00	233%	86%	35	398.887.600,00	117%	103%	Dinas Lingkungan Hidup
2	12	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	unit	10	36.805.600,00	0	0,00	2	27.000.000,00	0	1.100.000,00	3	12.900.000,00	0	300.000,00	0	600.000,00	3	14.900.000,00	150%	55%	3	14.900.000,00	30%	40%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
4	2	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	358	1.082.650.826,00	0	438.542.224,00	179	238.673.550,00	0	8.245.000,00	0	32.341.900,00	118	80.936.148,00	61	140.277.809,00	179	261.800.857,00	100%	110%	179	700.343.081,00	50%	65%	Sekretariat DPRD
1	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	1.475.834.000,00	0	485.296.821,00	1	489.065.000,00	0	67.197.650,00	0	48.493.550,00	0	23.246.700,00	1	80.331.702,00	1	219.269.602,00	100%	45%	1	704.566.423,00	50%	48%	Dinas Pendidikan
1	2	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	63.639.127,00	0	85.474.804,00	1	24.663.000,00	0	201.500,00	0	0,00	0	2.160.000,00	1	21.256.946,00	1	23.618.446,00	100%	96%	1	109.093.250,00	50%	171%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	4	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	"Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi"	unit	2	203.000.000,00	0	67.804.000,00	1	150.000.000,00	0	24.980.000,00	0	0,00	1	25.905.000,00	0	49.833.000,00	1	100.718.000,00	100%	67%	1	168.522.000,00	50%	83%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	5	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	730.000.000,00	0	208.724.050,00	1	401.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	11.138.000,00	1	176.084.364,00	1	187.222.364,00	100%	47%	1	395.946.414,00	50%	54%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	6	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung Kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	Unit	4	714.181.300,00	0	379.681.420,00	2	152.421.075,00	0	24.804.577,00	2	49.316.454,00	0	39.581.655,00	0	34.892.422,00	2	148.595.108,00	100%	97%	2	528.276.528,00	50%	74%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	7	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	172.008.000,00	0	128.598.925,00	1	144.097.025,00	0	5.325.045,00	1	27.004.910,00	0	643.000,00	0	125.361.293,00	1	158.334.248,00	100%	110%	1	286.933.173,00	50%	167%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	9	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit/tahun	3	1.565.150.000,00	0	269.427.800,00	1	171.952.000,00	0	0,00	0	7.006.659,00	1	160.468.500,00	0	1.517.500,00	1	168.992.659,00	100%	98%	1	438.420.459,00	33%	28%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	11	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	6	463.418.900,00	0	284.196.500,00	3	244.237.638,00	0	23.180.400,00	3	7.846.600,00	0	1.118.500,00	0	208.445.415,00	3	240.590.915,00	100%	99%	3	524.787.415,00	50%	113%	Dinas Lingkungan Hidup
2	12	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	2	454.296.480,00	0	373.033.900,00	1	44.705.105,00	1	30.400.000,00	0	2.599.150,00	0	400.000,00	0	10.951.400,00	1	44.350.550,00	100%	99%	1	417.384.450,00	50%	92%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	15	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	2.184.350.000,00			2	493.500.000,00	0	17.600.000,00	2	200.350.000,00	2	0,00	2	268.448.118,00	2	486.398.118,00	100%	99%	2	486.398.118,00	40%	22%	Dinas Perhubungan
2	16	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6	615.000.000,00	0	259.911.260,00	3	88.612.000,00	0	0,00	3	11.032.250,00	3	20.124.320,00	3	55.425.431,00	3	86.582.001,00	100%	98%	3	346.493.261,00	50%	56%	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	18	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	443.018.000,00	0	239.433.980,00	1	266.510.000,00	0	0,00	1	26.250.000,00	0	0,00	0	220.325.000,00	1	246.575.000,00	100%	93%	1	486.008.980,00	50%	110%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	22	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	gedung	1	689.675.000,00	0	296.752.338,00	1	50.000.000,00	0	6.951.375,00	1	25.787.140,00	0	0,00	1	17.250.000,00	1	49.988.515,00	100%	100%	1	346.740.853,00	100%	50%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
2	23	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	100	344.757.000,00	100	204.487.800,00	4	94.378.940,00	1	43.928.106,00	1	23.027.960,00	2	12.962.880,00	1	10.476.200,00	5	90.395.146,00	125%	96%	105	294.882.946,00	105%	86%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3	30	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	6	1.468.014.750,00	0	961.814.652,00	3	71.696.200,00	0	11.401.000,00	2	33.906.200,00	0	58.000,00	1	19.254.000,00	3	64.619.200,00	100%	90%	3	1.026.433.852,00	50%	70%	Dinas Perdagangan
4	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	45.000.000,00	0	14.876.950,00	1	15.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	100%	100%	1	29.876.950,00	50%	66%	Bagian Pemerintahan
4	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	8.200.000,00	0	3.288.000,00	1	2.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	2.314.000,00	1	2.314.000,00	100%	93%	1	5.602.000,00	50%	68%	Bagian Organisasi
4	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	28.047.600,00	0	19.745.000,00	1	2.500.000,00	0	1.548.000,00	0	0,00	0	725.000,00	0	638.800,00	0	2.911.800,00	0%	116%	0	22.656.800,00	0%	81%	Bagian Hukum
4	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	1.606.250.000,00	0	812.456.358,00	1	647.360.000,00	0	0,00	0,5	603.710.000,00	0,5	43.650.000,00	0	0,00	1	647.360.000,00	100%	100%	1	1.459.816.358,00	50%	91%	Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan
4	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	179.745.000,00	0	104.020.000,00	1	28.750.000,00	0	0,00	0	13.397.500,00	0	0,00	1	1.000.000,00	1	14.397.500,00	100%	50%	1	118.417.500,00	50%	66%	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
4	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	2	2.140.282.750,00	0	995.289.854,00	1	892.818.000,00	0	91.642.780,00	0	63.033.326,00	1	212.985.496,00	0	128.511.897,00	1	496.173.499,00	100%	56%	1	1.491.463.353,00	50%	70%	Bagian Umum
4	2	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	12	1.742.254.488,00	0	1.134.032.738,00	6	73.638.750,00	0	7.346.800,00	0	11.682.400,00	0	20.929.110,00	6	92.732.711,00	6	132.691.021,00	100%	180%	6	1.266.723.759,00	50%	73%	Sekretariat DPRD
5	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	598.500.000,00	0	377.317.545,00	1	77.616.000,00	0	3.616.000,00	0	44.769.195,00	0	15.303.000,00	1	13.900.000,00	1	77.588.195,00	100%	100%	1	454.905.740,00	50%	76%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	2	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	270.000.000,00	1	169.570.000,00	1	122.400.000,00	0	21.000.000,00	0	0,00	0	0,00	1	101.121.000,00	1	122.121.000,00	100%	100%	2	291.691.000,00	67%	108%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	3	240.000.000,00	1	108.513.733,00	1	81.275.000,00	0	0,00	0	55.586.420,00	0	348.500,00	1	21.932.100,00	1	77.867.020,00	100%	96%	2	186.380.753,00	67%	78%	Badan Pendapatan Daerah
5	3	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	9	700.000.000,00	5	1.342.219.317,00	2	181.200.000,00	0	20.252.000,00	2	87.778.100,00	2	35.583.600,00	2	34.455.200,00	2	178.068.900,00	100%	98%	7	1.520.288.217,00	78%	217%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
6	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	1.282.395.810,00	2	278.995.810,00	1	501.700.000,00	0	27.600.000,00	0	500.000,00	0	437.456.622,00	0	0,00	0	465.556.622,00	0%	93%	2	744.552.432,00	50%	58%	Inspektorat Daerah
8	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	2	42.500.000,00	0	36.880.572,00	1	4.510.029,00	0	1.500.000,00	0	1.500.000,00	0	0,00	1	1.400.000,00	1	4.400.000,00	100%	98%	1	41.280.572,00	50%	97%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Unit	4	507.500.000,00	0	229.985.500,00	2	451.546.300,00	0	100.303.900,00	2	0,00	0	6.708.400,00	2	343.832.800,00	2	450.845.100,00	100%	100%	2	680.830.600,00	50%	134%	Kecamatan Taman
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	2	359.127.000,00	0	236.797.620,00	1	57.410.000,00	0	8.732.558,00	0	15.937.000,00	0	3.369.500,00	1	29.231.800,00	1	57.270.858,00	100%	100%	1	294.068.478,00	50%	82%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	12	382.656.879,00	0	199.161.725,00	6	75.000.000,00	2	26.501.000,00	7	20.756.660,00		24.473.300,00	3	1.960.000,00	7	73.690.960,00	117%	98%	7	272.852.685,00	58%	71%	Kecamatan Manguharjo
1	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	412	679.912.900,00	0	261.349.799,00	206	175.481.000,00	32	20.957.000,00	40	48.645.000,00	47	31.520.000,00	86	87.335.000,00	205	188.457.000,00	100%	107%	205	449.806.799,00	50%	66%	Dinas Pendidikan
1	2	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	546	653.958.774,00	0	441.416.575,00	273	122.627.000,00	21	18.019.000,00	18	9.250.000,00	45	29.881.000,00	189	63.873.000,00	273	121.023.000,00	100%	99%	273	562.439.575,00	50%	86%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	3	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	1.668.650.000,00	2	407.949.163,00	1	713.792.500,00	0	0,00	0	107.783.074,00	0	31.535.830,00	1	364.906.085,00	1	504.224.989,00	100%	71%	3	912.174.152,00	75%	55%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	4	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	"Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi"	unit	400	1.883.371.300,00	0	596.633.892,00	106	342.912.300,00	22	49.778.120,00	10	84.738.700,00	24	77.441.200,00	47	128.988.150,00	103	340.946.170,00	97%	99%	103	937.580.062,00	26%	50%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	5	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	136	249.440.000,00	0	101.617.580,00	68	104.720.000,00	24	4.500.000,00	20	19.775.000,00	7	7.000.000,00	14	72.246.600,00	65	103.521.600,00	96%	99%	65	205.139.180,00	48%	82%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
1	5	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	81.500.000,00	0	48.737.500,00	5	23.595.000,00	0	2.605.000,00	1	6.395.000,00	1	2.470.000,00	1	11.362.000,00	3	22.832.000,00	60%	97%	3	71.569.500,00	30%	88%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	6	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	Unit	220	379.300.000,00	0	145.245.350,00	110	91.034.720,00	13	18.323.400,00	30	14.422.800,00	24	13.109.350,00	43	38.222.700,00	110	84.078.250,00	100%	92%	110	229.323.600,00	50%	60%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	7	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	94	121.625.000,00	0	54.680.400,00	36	32.380.037,00	8	10.750.000,00	16	2.115.000,00	6	7.534.500,00	6	18.680.070,00	36	39.079.570,00	100%	121%	36	93.759.970,00	38%	77%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	9	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	200	254.500.000,00	0	95.606.090,00	122	34.670.500,00	6	5.715.000,00	5	5.955.000,00	32	10.845.000,00	30	11.530.000,00	73	34.045.000,00	60%	98%	73	129.651.090,00	37%	51%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	12	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	298	354.026.804,00	0	279.820.368,00	75	150.062.519,00	22	22.437.550,00	42	30.094.000,00	85	28.506.850,00	25	95.159.600,00	85	176.198.000,00	113%	117%	85	456.018.368,00	29%	129%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	15	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	20	600.000.000,00			10	136.075.000,00	4	48.865.300,00	6	31.236.550,00	10	27.642.100,00	2	28.146.950,00	10	135.890.900,00	100%	100%	10	135.890.900,00	50%	23%	Dinas Perhubungan
2	16	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	100	1.224.360.000,00	0	504.042.105,00	50	179.780.000,00	6	20.328.850,00	10	21.569.950,00	29	62.577.530,00	27	74.976.590,00	72	179.452.920,00	144%	100%	72	683.495.025,00	72%	56%	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	22	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	gedung	1	233.630.650,00	0	68.985.700,00	1	40.000.000,00	0	9.755.000,00	1	13.955.000,00	0	6.130.000,00	1	10.150.000,00	1	39.990.000,00	100%	100%	1	108.975.700,00	100%	47%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
2	23	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	100	247.650.000,00	100	140.058.000,00	78	63.408.829,00	25	15.646.000,00	7	3.145.500,00	28	17.570.000,00	28	17.810.700,00	88	54.172.200,00	113%	85%	188	194.230.200,00	188%	78%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3	30	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	6	544.712.800,00	0	220.251.845,00	3	80.653.400,00	0	15.177.000,00	1	5.689.600,00	1	23.106.000,00	1	31.582.550,00	3	75.555.150,00	100%	94%	3	295.806.995,00	50%	54%	Dinas Perdagangan
4	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	34	45.924.000,00	0	16.523.000,00	17	10.000.000,00	2	2.010.000,00	2	1.985.600,00	2	995.000,00	11	5.000.400,00	17	9.991.000,00	100%	100%	17	26.514.000,00	50%	58%	Bagian Pemerintahan
4	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	42	66.005.000,00	0	27.615.100,00	21	10.190.000,00	0	0,00	0	2.049.500,00	12	1.436.000,00	9	6.586.000,00	21	10.071.500,00	100%	99%	21	37.686.600,00	50%	57%	Bagian Organisasi
4	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	Unit	80	75.786.240,00	0	37.443.350,00	40	19.000.000,00	3	1.773.300,00	6	2.710.000,00	12	7.593.500,00	8	6.345.000,00	29	18.421.800,00	73%	97%	29	55.865.150,00	36%	74%	Bagian Hukum
4	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	80	54.250.000,00	0	31.000.000,00	40	19.159.000,00	10	3.500.000,00	10	4.000.000,00	10	4.000.000,00	10	7.659.000,00	40	19.159.000,00	100%	100%	40	50.159.000,00	50%	92%	Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan
4	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase sarana dan prasarana gedung yang layak digunakan	%	100	36.800.000,00	200	11.316.000,00	100	9.200.000,00	0	0,00	25	2.190.000,00	25	1.675.000,00	50	2.325.000,00	100	6.190.000,00	100%	67%	100	17.506.000,00	100%	48%	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
4	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	258	1.044.101.500,00	0	285.343.414,00	129	290.136.500,00	32	71.175.321,00	25	80.558.875,00	23	35.968.600,00	43	77.078.000,00	123	264.780.796,00	95%	91%	123	550.124.210,00	48%	53%	Bagian Umum
5	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	225.964.695,00	0	124.107.080,00	1	55.460.568,00	0	3.498.600,00	0	29.238.500,00	0	9.582.000,00	1	13.063.100,00	1	55.382.200,00	100%	100%	1	179.489.280,00	50%	79%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	2	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	32	411.000.000,00	12	165.252.495,00	8	108.000.000,00	0	6.602.500,00	3	28.369.650,00	4	25.829.000,00	5	36.086.100,00	12	96.887.250,00	150%	90%	24	262.139.745,00	75%	64%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	%	100	404.100.000,00	100	80.959.610,00	100	40.500.000,00	25	19.433.837,00	25	6.653.000,00	25	6.680.000,00	25	6.714.000,00	100	39.480.837,00	100%	97%	100	120.440.447,00	100%	30%	Badan Pendapatan Daerah
5	3	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	24	104.000.000,00	8	73.503.800,00	8	34.350.000,00	1	6.215.000,00	3	7.976.500,00	2	8.148.100,00	2	10.459.600,00	8	32.799.200,00	100%	95%	16	106.303.000,00	67%	102%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
6	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	20	95.414.000,00	11	65.414.000,00	15	15.000.000,00	2	3.900.000,00	1	1.850.000,00	2	7.105.000,00	3	2.124.000,00	8	14.979.000,00	53%	100%	19	80.393.000,00	95%	84%	Inspektorat Daerah
8	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	14	135.000.000,00	0	77.442.000,00	14	40.489.971,00	2	5.921.455,00	2	9.000.000,00	4	40.489.971,00	5	14.725.000,00	13	70.136.426,00	93%	173%	13	147.578.426,00	93%	109%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Unit	12	147.825.000,00	0	63.445.300,00	6	37.471.800,00	0	4.330.000,00	0	9.101.000,00	1	1.090.000,00	4	22.822.200,00	5	37.343.200,00	83%	100%	5	100.788.500,00	42%	68%	Kecamatan Taman
7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	120	150.058.000,00	0	71.687.400,00	60	34.882.000,00	9	5.975.000,00	15	7.501.000,00	20	12.360.000,00	16	8.795.000,00	60	34.631.000,00	100%	99%	60	106.318.400,00	50%	71%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	120	181.200.000,00	0	118.485.649,00	60	59.413.798,00	7	9.320.000,00	0	8.634.138,00		14.143.000,00	113	26.215.000,00	113	58.312.138,00	188%	98%	113	176.797.787,00	94%	98%	Kecamatan Manguharjo
2	18	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	13	835.000.000,00	0	0,00	6	53.915.500,00	0	5.000.000,00	3	15.478.500,00	1	14.644.000,00	2	18.278.500,00	6	53.401.000,00	100%	99%	6	53.401.000,00	46%	6%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1	**2**	**1**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Persentase pencapaian kinerja Badan Layanan Umum Daerah**	**%**	**100**	**270.865.042.848,00**	**100**	**31.485.786.024,00**	**100**	**76.729.039.563,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**80**	**57.829.633.738,00**	**20**	**18.820.909.494,00**	**100**	**76.650.543.232,00**	**100%**	**100%**	**100**	**108.136.329.256,00**	**100%**	**40%**	
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (RSUD)	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	Unit Kerja	2	270.865.042.848,00	0	31.485.786.024,00	1	76.729.039.563,00	0	0,00	0	0,00	1	57.829.633.738,00	1	18.820.909.494,00	1	76.650.543.232,00	100%	100%	1	108.136.329.256,00	50%	40%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
4	**1**	**1**	**2.11**		**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gaji Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**%**	**100**	**3.853.575.520,00**	**100**	**1.457.120.196,00**	**100**	**741.634.672,00**	**25**	**176.316.936,00**	**25**	**200.043.810,00**	**25**	**176.316.936,00**	**25**	**176.316.936,00**	**100**	**728.994.618,00**	**100%**	**98%**	**100**	**2.186.114.814,00**	**100%**	**19%**	
4	1	1	2.11	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	orang/bulan	4	1.453.575.520,00	0	397.640.196,00	2	201.634.672,00	2	43.881.936,00	2	67.608.810,00	0	43.881.936,00	0	43.881.936,00	2	199.254.618,00	100%	99%	2	596.894.814,00	50%	41%	Bagian Umum
4	1	1	2.11	4	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah orang yang menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	orang/bulan	4	2.400.000.000,00	0	1.059.480.000,00	2	540.000.000,00	2	132.435.000,00	2	132.435.000,00	0	132.435.000,00	0	132.435.000,00	2	529.740.000,00	100%	98%	2	1.589.220.000,00	50%	66%	Bagian Umum
4	**1**	**1**	**2.12**		**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**Persentase Rumah Tangga Pimpinan dan Sekretariat Daerah dalam kondisi baik**	**%**	**100**	**7.515.902.100,00**	**100**	**2.925.432.716,00**	**100**	**2.000.000.000,00**	**25**	**353.864.041,00**	**25**	**482.198.602,00**	**25**	**398.902.722,00**	**25**	**589.906.411,00**	**100**	**1.824.871.776,00**	**100%**	**91%**	**100**	**4.750.304.492,00**	**100%**	**24%**	
4	1	1	2.12	1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang disediakan	paket	40	3.954.060.600,00	0	1.584.550.346,00	20	1.100.000.000,00	2	186.354.450,00	4	308.494.273,00	3	246.832.166,00	11	318.722.688,00	20	1.060.403.577,00	100%	96%	20	2.644.953.923,00	50%	67%	Bagian Umum
4	1	1	2.12	2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang disediakan	paket	30	2.263.269.700,00	0	1.097.943.320,00	16	575.000.000,00	3	147.285.572,00	2	137.266.560,00	3	114.425.345,00	9	167.000.558,00	17	565.978.035,00	106%	98%	17	1.663.921.355,00	57%	74%	Bagian Umum
4	1	1	2.12	3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah tangga Sekretariat Daerah yang disediakan	paket	30	1.298.571.800,00	0	242.939.050,00	15	325.000.000,00	3	20.224.019,00	2	36.437.769,00	2	37.645.211,00	7	104.183.165,00	14	198.490.164,00	93%	61%	14	441.429.214,00	47%	34%	Bagian Umum
4	**1**	**1**	**2.13**		**Penataan Organisasi**	**Tingkat Kematangan Organisasi**	**skor**	**28,5**	**7.669.219.830,00**	**0**	**2.862.965.448,00**	**28,4**	**1.365.275.110,00**	**0**	**184.742.342,00**	**0**	**240.048.050,00**	**0**	**188.447.365,00**	**46,1**	**730.650.922,00**	**46,1**	**1.343.888.679,00**	**162%**	**98%**	**46**	**4.206.854.127,00**	**162%**	**18%**	
4	1	1	2.13	1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Dokumen	4	1.798.096.000,00	0	691.316.891,00	2	337.871.000,00	0	54.832.780,00	0	55.777.400,00	0	64.870.000,00	2	156.423.920,00	2	331.904.100,00	100%	98%	2	1.023.220.991,00	50%	57%	Bagian Organisasi
4	1	1	2.13	2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Dokumen	4	2.264.346.000,00	0	1.312.793.127,00	2	647.906.630,00	0	48.304.004,00	0	75.896.900,00	0	39.839.800,00	2	471.669.802,00	2	635.710.506,00	100%	98%	2	1.948.503.633,00	50%	86%	Bagian Organisasi
4	1	1	2.13	3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen	4	3.606.777.830,00	0	858.855.430,00	2	379.497.480,00	0	81.605.558,00	2	108.373.750,00	0	83.737.565,00	0	102.557.200,00	2	376.274.073,00	100%	99%	2	1.235.129.503,00	50%	34%	Bagian Organisasi
4	**1**	**1**	**2.14**		**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**Persentase Fasilitasi Keprotokolan**	**%**	**100**	**7.429.603.260,00**	**100**	**2.123.627.443,00**	**100**	**1.981.777.700,00**	**25**	**25.208.000,00**	**25**	**167.462.500,00**	**25**	**1.380.126.000,00**	**25**	**280.722.500,00**	**100**	**1.853.519.000,00**	**100%**	**94%**	**100**	**3.977.146.443,00**	**100%**	**25%**	
4	1	1	2.14	1	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Laporan	2000	7.429.603.260,00	556	2.123.627.443,00	500	1.981.777.700,00	25	25.208.000,00	25	167.462.500,00	213	1.380.126.000,00	231	280.722.500,00	494	1.853.519.000,00	99%	94%	1050	3.977.146.443,00	53%	54%	Bagian Umum
4	**2**	**1**	**2.15**		**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**Persentase Layanan Terhadap Hak Keuangan DPRD**	**%**	**100**	**64.995.240.461,00**	**100**	**29.315.813.440,00**	**100**	**16.295.942.237,00**	**25**	**2.453.998.305,00**	**9**	**2.731.737.075,00**	**25**	**5.531.263.285,00**	**41**	**3.857.837.215,00**	**100**	**14.574.835.880,00**	**100%**	**89%**	**100**	**43.890.649.320,00**	**100%**	**22%**	
4	2	1	2.15	1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Orang/Bulan	60	63.437.659.953,00	0	28.740.969.140,00	30	15.936.963.217,00	30	2.453.998.305,00	0	2.681.806.675,00	0	5.441.487.785,00	30	3.801.487.215,00	30	14.378.779.980,00	100%	90%	30	43.119.749.120,00	50%	68%	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.15	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Paket	4	1.139.530.508,00	0	488.836.300,00	2	253.979.020,00	0	0,00	0	28.350.000,00	1	62.217.500,00	1	56.350.000,00	2	146.917.500,00	100%	58%	2	635.753.800,00	50%	56%	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.15	3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Orang	60	418.050.000,00	0	86.008.000,00	30	105.000.000,00	0	0,00	8	21.580.400,00	10	27.558.000,00	0	0,00	18	49.138.400,00	60%	47%	18	135.146.400,00	30%	32%	Sekretariat DPRD
4	**2**	**1**	**2.16**		**Layanan Administrasi DPRD**	**Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi DPRD**	**%**	**100**	**18.266.831.972,00**	**100**	**8.252.274.201,00**	**100**	**6.407.626.147,00**	**25**	**2.110.797.839,00**	**17**	**833.408.686,00**	**25**	**1.128.968.297,00**	**33**	**1.625.933.298,00**	**100**	**5.699.108.120,00**	**100%**	**89%**	**100**	**13.951.382.321,00**	**100%**	**31%**	
4	2	1	2.16	2	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	Laporan	28	151.988.049,00	14	46.377.800,00	8	22.397.170,00	0	0,00	0	7.624.600,00	2	338.500,00	6	8.410.100,00	8	16.373.200,00	100%	73%	22	62.751.000,00	79%	41%	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.16	3	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Laporan	24	18.114.843.923,00	0	8.205.896.401,00	12	6.385.228.977,00	3	2.110.797.839,00	4	825.784.086,00	2	1.128.629.797,00	3	1.617.523.198,00	12	5.682.734.920,00	100%	89%	12	13.888.631.321,00	50%	77%	Sekretariat DPRD
																							Rata - Rata Capaian Kinerja	**101%**					
																							Rata - Rata Realisasi Anggaran	**87%**					

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

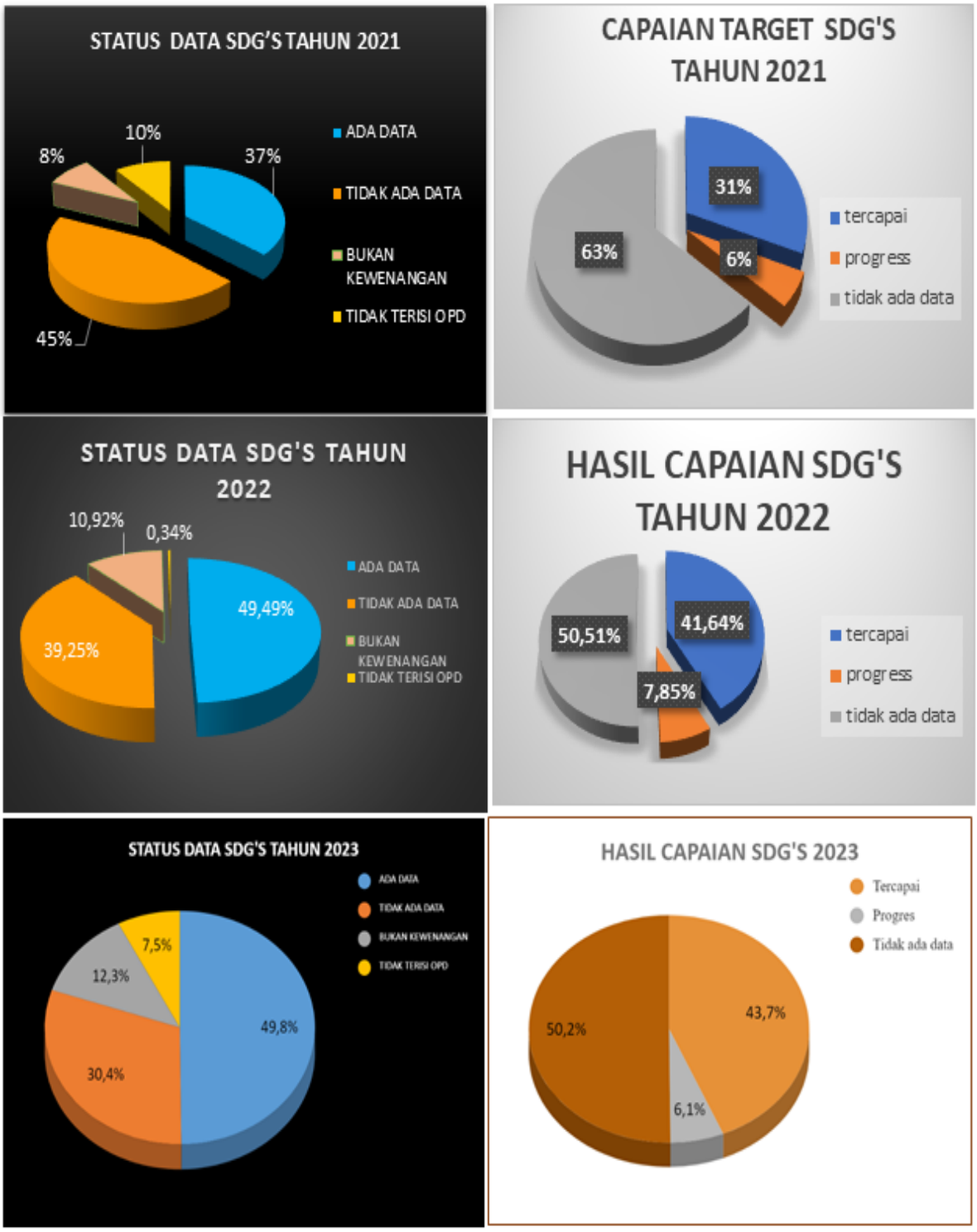
Kesimpulan Evaluasi terhadap Hasil RKPD Kota Madiun Semester II Tahun 2023

No	Nama Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja RKPD Kab/Kota	Predikat Capaian	Rata-rata Realiasi Anggaran Per Urusan	Predikat Capaian Realisasi	Faktor Penghambat	Faktor Pendukung	Ket.
1	Kota Madiun	100%	Sangat Tinggi	95%	Sangat Tinggi	Masih perlunya peningkatan kualitas pengelolaan data dan evaluasi	1. Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan target yang sudah ditetapkan 2. Kerjasama antara Pemerintah, Stakeholder dan masyarakat menjadikan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah bisa berjalan dengan maksimal	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

2.2.1. Capaian SDG's 3 Tahun Terakhir 2021 - 2023

Perkembangan Pemenuhan data dan ketercapaian data dalam pencapaian SDG's Kota Madiun Tahun 2021-2023.



Gambar 2. 1 Capaian SDG's Kota Madiun Tahun 2021-2023

Dari perkembangan data di atas perlu dilakukan kolaborasi aktif dalam pencapaian SDG's, selain intervensi program kegiatan dalam mendukung ketercapaian indikator SDG's.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

2.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1. Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan

Hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2023, mengungkapkan sejumlah permasalahan yang menghambat pencapaian atas target-target yang telah direncanakan. Identifikasi permasalahan ini didasarkan pada prioritas pembangunan yang tertuang dalam RKPD tahun 2023. Rincian mengenai Prioritas pembangunan tahun 2023 dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2. 2
Prioritas Pembangunan Daerah Kota Madiun Tahun 2023

Sesuai dengan empat prioritas pembangunan pada gambar 2.33 diatas, identifikasi permasalahan pembangunan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2. 1 Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Pembangunan Tahun 2023

No	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Permasalahan
1	2	3	4
1.	Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia	• Kualitas mutu pendidikan • Indeks pendidikan	• Pemerataan kualitas sarana dan prasarana sekolah sesuai SPM perlu ditingkatkan • kualifikasi tenaga pendidik perlu ditingkatkan • distribusi tenaga pengajar dan mutu pelayanan pendidikan yang perlu ditingkatkan
		• Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Ibu • Kualitas layanan kesehatan	• Masih terdapatnya angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Ibu • Cakupan jaminan kesehatan masyarakat kurang mampu rendah • Cakupan kesehatan rujukan perlu ditingkatkan • Perlu ditingkatkannya Pertolongan tenaga kesehatan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2	3	4
		• Pembangunan ekonomi • Kualitas SDM Tenaga Kerja • Rasio Ketergantungan	• Angka kemiskinan mengalami peningkatan akibat pandemi Covid-19 • Penanganan PMKS perlu dioptimalkan • Kualitas SDM tenaga kerja perlu ditingkatkan • Penyediaan lapangan pekerjaan pelru peningkatan jaringan ketenagakerjaan
2.	Pembangunan Kualitas Infrastruktur Berbasis Lingkungan dan Berkelanjutan	• Penyediaan infrastruktur dasar yang berkualitas untuk masyarakat	• Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik perlu ditingkatkan dan dipelihara • Drainase perkotaan perlu ditingkatkan • Penyediaan sarana air bersih bagi masyakat perlu pemeliharaan kualitas • Sarana sanitasi masyarakat perlu ditingkatkan • Sarana dan prasarana persampahan perlu di tingkatkan
		• Intensitas Bencana alam • Ruang Terbuka Hijau (RTH) • Pengelolaan Sumber Daya alam yang berkelanjutan	• Luasan RTH perlu ditingkatkan • Pemanfaatan pengelolaan air tanah perlu ditingkatkan • Mitigasi bencana perlu ditingkatkan
3.	Peningkatan inklusivitas ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan, ekonomi kreatif dan digital	• Pengembangan produk unggulan • Iklim investasi • Kinerja BUMD • Daya Saing UMKM	• Iklim investasi / usaha perlu peningkatan daya saing • Belum optimalnya kinerja BUMD • Belum optimalnya daya saing produk dan akses pasar bagi produk UMKM • Masih perlu ditingkatkannya sarana dan prasarana usaha untuk UMKM
4.	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	• Reformasi Birokrasi • Pelayanan Publik yang Murah, Tepat, Cepat dan Akurat. • Kualitas SDM (aparatur) dalam pelayanan public • Partisipasi public dalam pembangunan	• Reformasi Birokrasi belum optimal sehingga kinerja pemerintah belum dapat terukur dengan jelas • Perijinan satu pintu belum optimal • Kualitas SDM Aparatur masih perlu ditingkatkan dalam rangka peningkatan kinerja • pelayanan publik. • Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan

Sumber: Bappeda Kota Madiun, (2024)

Capaian prioritas pembangunan daerah tahun 2023 dapat dilihat dari capaian indikator kinerjanya, baik dari sisi target terhadap realisasi tahun 2023 maupun perbandingan dengan realisasi tahun sebelumnya. Capaian indikator kinerja tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Tabel 2. 2 Prioritas Pembangunan dan Indikator Kinerja Kota Madiun Tahun 2023

No.	Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	2023		
			Target	Realisasi	%
1.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	IPM	81,70	82,71	100,38%
2.	Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman dan Infrastruktur Hijau	Livable City (Indeks Kenyamanan Kota)	88,60	91,33	102,43%
3.	Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	6,42	6,87*	107,34%
4.	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	68 (B)	69,26 (B)	101,85%
5.	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat demi Kelancaran Pelaksanaan Pembangunan	Indeks Ketentraman	77,15	81,25	105,45*

*Sumber Data: PD dan BPS *) angka sementara*

Sebagaimana yang termuat pada Tabel 2.82 diatas, realisasi capaian terget indikator kinerja prioritas pembangunan pada Pemerintah Kota Madiun memiliki nilai diatas 100%. Capaian tersebut menunjukkan Pemerintah Kota Madiun dari tahun ke tahun berkinerja baik, hal itu terlihat dari capaian prioritas pembangunan pada tahun 2022 yang belum mencapai target dapat terealisasi sesuai target pada tahun 2023 kemarin. Sehingga diharapkan pada tahun 2025 nanti realiasi capaian target indikator kinerja dapat terealisasi sesuai target.

Data capaian 4 (empat) tahun terakhir Prioritas Pembangunan dan Indikator Kinerja Kota Madiun :

Tabel 2. 3 Capaian 5 Tahun Terakhir Prioritas Pembangunan dan Indikator Kinerja Kota Madiun Tahun 2023

No.	Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023
1.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	IPM	80,88	80,91	81,25	82,01	82,71
2.	Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman dan Infrastruktur Hijau	Livable City (Indeks Kenyamanan Kota)	85,32	86,67	89,40	90,33	91,33
3.	Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	6,78	6,69	6,87	-	-
4.	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	67,34	65,55	66,26	69,26	87,95
5.	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat demi Kelancaran Pelaksanaan Pembangunan	Indeks Ketentraman	-	76,87	78,74	81,25	82,88

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Dari data capaian di atas untuk capaian tahun 2023 rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun mendapatkan nilai hasil evaluasi 87,95 dengan kategori "A-" berdasarkan rincian hasil evaluasi pada komponen Penilaian sebagai berikut:

Tabel 2. 4 Rincian Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Kota Madiun Tahun 2023

No	Komponen Penilaian	Bobot	2023
1	2	3	4
A.	RB General		
	I. Strategi Pelaksanaan RB General	10	7,05
	1 Rencana Aksi Pembangunan RB General	3	2,33
	2 Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB General	7	4,72
	II. Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	40	25,88
	1 Penyederhanaan Struktur Organisasi	2	2
	2 Sistem Kerja Penyederhanaan Birokrasi	2	0,8
	3 Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	4	2,6
	4 Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	3,5	0,5
	5 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	4	3,2
	6 Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,5	0,5
	7 Digitalisasi Arsip	2,5	1,81
	8 Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang diselesaikan	2,5	2,5
	9 Kualitas Kebijakan	2,5	1,25
	10 Reformasi Hukum	2,5	1,91
	11 Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	2,5	1,44
	12 Tata Kelola Pengadaan	2,5	1,84
	13 Sistem Merit	4	2,8
	14 Pelayanan Publik	1,5	1,33
	15 Kepatuhan Standart Pelayanan Publik	1,5	1,4
	III. Capaian Sasaran Strategis	50	41,41
	1 Sistem Pemerintahan Berbasisi Elektronik (SPBE)	9	8,01
	2 Capaian Indikator Kinerja Utama Makro	2	2
	3 Capaian Indikator Kinerja Utama Non Makro	8	4,9

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2		3	4
	4	Opini BPK	5	5
	5	Tindak Lanjut Rekomendasi	4	3,74
	6	Indeks Berakhlak	4	2,52
	7	Survei Penilaian Integritas	10	8,19
	8	Survei Kepuasan Masyarakat	8	7,05
	IV. Koefisien		10	0
	1	Koefisien	10	0
Total Komponen RB General				
B.	RB Tematik			
	I. Strategi Pelaksanaan RB Tematik		5	3,04
	1	Rencana Aksi Pengentasan Kemiskinan	0,4	0,32
	2	Rencana Aksi Realisasi Investasi	0,4	0,2
	3	Rencana Aksi Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting	0,4	0,23
	4	Rencana Aksi Penggunaan Produk Dalam Negeri	0,4	0,4
	5	Rencana Aksi Pengendalian Inflasi	0,4	0,17
	6	Capaian Output Pengentasan Kemiskinan	0,6	0,48
	7	Capaian Output Realisasi Investasi	0,6	0,3
	8	Capaian Output Digitalisasi Adminstrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting	0,6	0,25
	9	Capaian Output Penggunaan Produk Dalam Negeri	0,6	0,52
	10	Capaian Output Pengendalian Inflasi	0,6	0,17
	II. Capaian Indikator Dampak RB Tematik		15	10,57
	1	Capaian Dampak Pengentasan Kemiskinan	3	1,53
	2	Capaian Dampak Realisasi Investasi	3	1,53
	3	Capaian Dampak Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting	3	2,56
	4	Capaian Dampak Penggunaan Produk Dalam Negeri	3	2,96
	5	Capaian Dampak Pengendalian Inflasi	3	1,99
Total Komponen RB Tematik			20	13,61
Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)			130	87,95

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Sebagaimana terlihat pada komponen hasil di atas, didalamnya terdapat penilaian SAKIP yang merupakan indikator sasaran pemerintah kota madiun untuk meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah sebagaimana penilaian hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) Tahun 2023 yang dikeluarkan pada tanggal 27 November 2023 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi maka diperoleh nilai hasil evaluasi 80,08 dengan kategori "A" dengan rincian komponen yang dinilai sebagai berikut:

1. Perencanaan bobot 30 nilai 25,67
2. Pengukuran Kinerja bobot 30 nilai 23,89
3. Pelaporan Kinerja bobot 15 nilai 12,44
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal bobot 25 nilai 18,08

Indeks ketentraman merupakan indikator dari tujuan peningkatan ketenteraman dan ketertiban masyarakat demi kelancaran pelaksanaan pembangunan, dengan sasaran indikator indeks kerukunan yang diampu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan perhitungan dari 5 (lima) dimensi persepsi yaitu Menghormati, Menerima, Jujur, Teladan, dan Kesetaraan serta indeks rasa aman yang diampu Satuan Polisi Pamong Praja dengan perhitungan dari 4 (empat) dimensi persepsi yaitu Keamanan dari Bencana, Pemenuhan Kesejahteraan Sosial, Perlindungan dan Pemanfaatan Atas Kebhinekaan, dan Keamanaan dari Kekerasan. Sebagaimana perhitungan diatas dapat dijadikan kesesuaian dan keselarasan terkait Indeks Kesalehan yang di gunakan sebagai Indikator Oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam variabel dimensi Kepedulian Sosial dan Kepedualian Lingkungan.

2.3.2. Identifikasi permasalahan penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Permasalahan pembangunan daerah di Kota Madiun tidak terlepas dari kondisi nasional, provinsi dan lingkungan eksternal lainnya. Hasil identifikasi terhadap permasalahan pembangunan daerah dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2. 5 Permasalahan Pembangunan Daerah

No	Isu Penting dan Masalah Mendesak		
	Tingkat Nasional	Tingkat Provinsi	Lingkungan Eksternal Lainnya
1	2	3	4
1	Pembangunan Sumber Daya Manusia termasuk permasalahan gizi buruk	Peningkatan Kualitas Pendidikan menengah, kompetensi guru dan sarana prasarana	Regionalisasi dari ekonomi global dengan peningkatan keterkaitan antara perdagangan antar regional dan keuangan
2	Mengantisipasi Perekonomian yang bergerak dengan sangat dinamis terkait dengan kebijakan moneter AS maupun fluktuasi harga	Penigkatan Kualitas Kesehatan dalam penurunan AKI, Stunting, pemberantasan penyakit menular dan tidk menular serta penyediaan sarana sanitasi dan air bersih	Meningkatnya ekonomi regional akan meningkatkan mobilitas tenaga kerja

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2	3	4
3	Menciptakan sinergi dalam pelaksanaan pembangunan dengan melibatkan stake holder khususnya dunia usaha	Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Ketenagakerjaan serta "*Link and Match*" antara kebutuhan pasar kerja dengan rendahnya kompetensi angkatan kerja	Negara ASEAN diharapkan akan semakin meluas dan mendalam
4	Penciptaan nilai tambah sektor pertanian, manufaktur dan jasa	Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan pengurangan luasan kawasan kumuh	Isu-isu HAM dan lingkungan hidup akan meningkat dan akan semakin menarik
5	Peningkatan sektor pariwisata untuk meningkatkan kontribusi penyumbang devisa	Penguatan konektifitas darat, laut dan udara untuk mendukun kawasan ekonomi potensial	
6	Perbaikan tenaga kerja yang tidak hanya dengan pendidikan vokasi tapi juga standar kerja dan kompetensi tenaga kerja	Pengembangan dan Pengelolaan Telekomunikasi dan Informatika	
7	Peningkatan ketahanan pangan dan energi khususnya energi baru dan terbarukan	Peningkatan nilai tambah pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	
8	Kelastarian lingkungan daya sumber daya air	Peningkatan nilai tambah agroindustri, agromaritim dan daya saing koperasi dan UMKM	
9		Optimalisasi Kepariwisataan	
10		Peningkatan Produktifitas Tenaga	
11		Industrialisasi berbasis ekonomi digital	
12		Peningkatan ketahanan pangan	
13		Peningkatan ketahanan energi	
14		Peningkatan ketentraman dan ketertiban terhadap isu potensi konflik dan penyalahgunaan obat-obat terlarang dan narkoba	

Pembangunan daerah diarahkan pada upaya transformasi sosial-ekonomi hingga birokrasi pemerintahan. Dalam pelaksanaan pembangunan, kapasitas pemerintah daerah dalam pembiayaan pembangunan menjadi sesuatu yang krusial. Namun, dengan kondisi perekonomian nasional yang ekspansif, dapat menjadi penyokong pelaksanaan program-program pemerintah daerah.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Permasalahan pembangunan daerah berkutat pada permasalahan seputar kualitas sumber daya manusia, pengembangan ekonomi pada sektor-sektor potensial, hingga permasalahan ketahanan pangan. Pada tahun 2023 dan seterusnya, perkiraan kondisi perekonomian yang membaik dapat menjadi peluang. Diharapkan proyeksi pendapatan transfer maupun Pendapatan Asli Daerah dapat melampaui tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian, diharapkan pula akan berdampak pada maksimalnya belanja program dan kegiatan pemerintah daerah.

Tabel 2. 6 Permasalahan dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

No	Bidang Urusan	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4
1	Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN a. Kegiatan KSN (Kompetisi Sains Nasional) untuk tahapan online jadwal belum ada kepastian pelaksanaan, sehingga berpengaruh pada persiapan siswa dan daerah untuk melakukan pembinaan b. Penetapan sasaran Program Sekolah Penggerak yang berencana tidak meneruskan Program Sekolah Penggerak diantaranya: TK ada 3, SD ada 1, SMP ada 2 c. Penggunaan BOP belum sesuai dengan Juknis (Petunjuk Teknis) d. Banyaknya peserta didik kesetaraan yang tidak mengikuti ANBK (Assesment Nasional Berbasis Komputer) e. Keterlambatan pengumpulan data persyaratan pencairan BBM, informasi admin BBM sering diabaikan, (S1, D4, D3) minim laporan kelulusannya, ganti nomor WA, tidak lapor pindah jurusan f. Terdapat kekurangan pembayaran Bantuan Sosial kepada guru dan tenaga kependidikan sekolah swasta pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Kesetaraan, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahap 1 Tahun 2022 sebanyak 2 orang	DINAS PENDIDIKAN a. Dinas Pendidikan membuat pola tersendiri dengan melakukan proses seleksi dan pembinaan yang akan menjadi wakil Wali Kota Madiun, walaupun pada Panduan KSN setiap sekolah berhak mengikuti secara serentak KSN online b. Program Sekolah Penggerak 1. Berkoordinasi dengan BBPMP Propinsi Jawa Timur dan Direktorat PAUD dan Pendidikan Dasar 2. Mengusulkan sasaran Program Sekolah Penggerak pengganti ke Kemdikbudristek (bulan Januari) c. Melakukan sosialisasi pada lembaga tentang Juknis BOP PAUD d. Memberikan sosialisasi tentang pentingnya ANBK pada penilaian rapor Pendidikan e. Memberikan sosialisasi yang intens kepada mahasiswa penerima Bantuan Beasiswa Mahasiswa (BBM) f. Telah diterbitkan Surat Keputusan Wali Kota Madiun Nomor: 400-401.101/249/2022 tanggal 28 November 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Madiun Nomor: 400.401.101/161/2022 tentang Penerimaan Bantuan Sosial kepada Guru dan Tenaga Kependidikan sekolah swasta pada Pendidikan Anak Usia Dini, pendidikan kesetaraan, sekolah dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahap 1 di Kota Madiun Tahun 2022, dari dasar perubahan Keputusan Wali Kota tersebut telah bisa dicairkan kekurangan pembayaran bantuan sosial kepada 2 orang guru sekolah swasta pada Bulan Desember 2022

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2	3	4
2	Kesehatan	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA a. Pengumpulan Data: Cut off pelaporan SPM Bangda berbeda dengan SPM Kementrian Kesehatan, sehingga terdapat kemungkinan adanya perbedaan angka yang terinput pada kedua aplikasi tersebut. b. Perencanaan dan Penganggara: Penyerapan anggaran belum dapat maksimal, terkendala terlambatnya Surat Mapping Nomenklatur DAK dari Kementrian Dalam Negeri, sehingga berdampak pada penyesuaian beberapa sub kegiatan SPM mengikuti nomenklatur sesuai SE. c. Perencanaan dan Penganggaran: Adanya perubahan Juknis DAK Non Fisik pada pertengahan tahun yaitu Permenkes RI Nomor 19 Tahun 2022 pada 28 Juli 2022, dengan adanya menu tambahan Insentif UKM. Sehingga perlu adanya penyesuaian anggaran dan terlambatnya proses penyerapan anggaran. d. Pelaksanaan: Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi, kesulitan mencapai target dikarenakan target yang ditetapkan oleh pusat terlalu tinggi (Target diperoleh dari Riskesdas Tahun 2018 yang menggambarkan prevalensi Hipertensi di Kota Madiun cukup tinggi), tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. e. Masih adanya prevelensi stunting RSUD a. Survey kepuasan masyarakat dan survey kepuasan karyawan tidak dilaksanakan b. Keterlambatan pembayaran klaim pelayanan dari BPJS dan Kemenkes c. Kebutuhan belanja melebihi anggaran / belanja yang belum direncanakan d. Pengiriman barang dari luar kota di tanggal akhir kontrak/keterlambatan	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA a. Menyertakan penjelasan dalam catatan apabila terdapat perbedaan angka yang terinput pada kedua aplikasi tersebut, melakukan perbaikan pelaporan SPM sesuai dengan hasil capaian SPM Tahun 2022. b. Melakukan penyerapan secara maksimal, melakukan follow up pada Kementrian Kesehatan dan Kementrian Dalam Negeri terkait Mapping Nomenklatur DAK Fisik dan Non Fisik untuk Tahun Anggaran 2023. c. Melaksanakan kegiatan pada tahun berikutnya sesuai dengan Rencana Anggaran Kas (RAK) TA 2023. d. Berkonsultasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, terkait pengkajian penggunaan Data PIS PK sebagai Data Dasar Sasaran untuk Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Tahun 2023 dan dituangkan ke dalam SK Wali Kota tentang Penetapan Jumlah Sasaran SPM Tahun 2023. RSUD a. Menggunakan hasil survey kepuasan masyarakat dari bagian organisasi b. Monitoring, evaluasi dan koordinasi dengan BPJS dan Kemenkes c. Disesuaikan dengan ketentuan BLUD dan melakukan Monitoring, evaluasi dan koordinasi dengan Inspektorat dan BKAD dan Diklat in house training di RSUD dan secara daring/online d. Komunikasi lebih intensif dengan penyedia barang dan Pemberian denda keterlambatan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2	3	4
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG a. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai tupoksi menjalankan kegiatan untuk mengurangi potensi banjir/ genangan wilayah kota. Wilayah Kota Madiun dilintasi oleh sungai-sungai yang mana menjadi kewenangannya merupakan kewenangan Dinas Pengairan Propinsi Jawa Timur dan BBWS Bengawan Solo. Pemeliharaan dan pembangunan saluran yang seharusnya dilaksanakan oleh Dinas Pengairan Propinsi Jawa Timur dan BBWS Bengawan Solo dikarenakan keterbatasan anggaran dan luasan wilayah maka pemeliharaan dan pembangunan saluran dilimpahkan kepada Pemerintah Kota Madiun dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun. b. Bidang Cipta Karya untuk Sie Penataan Bangunan Gedung apabila tolok ukur kinerja berdasarkan jumlah Bangunan Gedung milik Pemerintah Kota Madiun, maka permasalahan yang dialami adalah sebagai berikut: 1. Bidang Cipta Karya belum memiliki data total jumlah bangunan gedung milik Pemerintah Kota Madiun; 2. Bidang Cipta Karya tidak hanya mengerjakan pembangunan/rehab bangunan milik Pemerintah Kota Madiun saja, akan tetapi juga melaksanakan pembangunan/rehab bangunan milik instansi vertikal yang nantinya akan diserahterimakan melalui mekanisme hibah. Apakah ketika ini dilakukan, maka tidak dianggap sebagai suatu capaian kinerja, mengingat aset yang dibangun/direhab bukan aset milik Pemerintah Kota Madiun. 3. Pembangunan/rehab bangunan milik Pemerintah Kota Madiun bukan hanya dilakukan oleh Dinas PUPR saja, akan tetapi juga kewenangan masing-masing OPD yang memiliki aset bangunan gedung. Sehingga untuk bangunan gedung yang bukan merupakan kewenangan Dinas PUPR akan kesulitan melakukan pemantauan/pendataan peningkatan kondisi bangunan gedungnya mengingat tenaga teknis yang terbatas.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG a. Pemeliharaan dan pembangunan saluran ordo 2 dapat dilaksanakan setelah mendapatkan rekomendasi teknis dari BBWS Bengawan Solo dan Dirjen SDA Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait. b. Bidang cipta karya 1. Target jumlah bangunan gedung tahun ini bersumber dari data realisasi tahun yang kemarin 2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tetap melaksanakan pembangunan/rehab bangunan walaupun bukan aset Kota Madiun c. Bidang cipta karya pengembangan jasa konstruksi 1. Jumlah tenaga kerja di Bidang Jasa Konstruksi juga menjadi perhatian khusus karena paling tidak harus sebanding dengan Badan Usaha yang bergerak di Bidang Jasa Konstruksi di Wilayah Kota Madiun dalam rangka terwujudnya hasil- hasil pembangunan di Kota Madiun secara lebih maksimal. 2. Perubahan regulasi menyebabkan DPUPR tidak dapat melaksanakan pelatihan namun tetap koordinasi dengan Lembaga Sertifikasi Profesi/LSP Jawa Timur terkait kebijakan untuk daerah kota. Sub klasifikasi jasa kontruksi baru fix di LSP akhir tahun 2022 sehingga pelatihan baru dapat dilaksanakan di tahun 2023 d. Bidang cipta karya untuk penataan bangunan dan lingkungan 1. Dasar penentuan lokasi pembangunan saluran mengakomodir dari usulan masyarakat dan pokir dewan 2. Awalnya penyediaan kebutuhan air minum diampu oleh PDA dan limbah domestik oleh Dinas Perkim untuk Dinas Pekerjaaan Umum Dan Penataan Ruang hanya melaksanakaan monitoring kegiatan dan menyusun kebijakan air minum saja 3. Pada Tahap pemenuhan dan permintaan pelaporan SPM ada beberapa data yang mengakomodir data dari Dinas Kesehatan. e. Penetapan penyesuaian retribusi untuk persetujuan bangunan gedung (PBG) tetap menggunakan Perda IMB yang telah ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan Surat Sekretaris Kabinet Republik Indonesia No:B.84/Seskab/Ekon/2022 tentang Penyelesaian Permasalahan Pelayanan Penerbitan PBG Serta Pelaksanaan Kebijakan Pemberian Insentif PPN DTP Sektor Perumahan yang menyatakan bahwa pemerintah daerah masih boleh menggunakan Perda retribusi IMB sampai dengan Perda restribusi PBG yang telah disetujui oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Saat ini untuk layanan permohonan PBG/SLF masih menggunakan perhitungan berdasarkan Perda IMB.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2	3	4
		c. Bidang Cipta Karya untuk Sie Pengembangan Jasa Konstruksi 1. Perkembangan Jasa Konstruksi yang ada di Kota Madiun mengalami kondisi yang dinamis sehingga perlu adanya pembinaan dan pengawasan agar keberadaannya tetap memberikan sumbangsih terhadap pembangunan yang ada di Kota Madiun. 2. Pembinaan dan Pengawasan yang telah dilakukan setiap tahun oleh Pemerintah Kota Madiun dalam hal ini melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun sudah maksimal namun perlu ditingkatkan lagi terutama dalam hal penyampaian regulasi terbaru terkait perkembangan Jasa Konstruksi pada skala nasional. 3. Adanya perubahan regulasi yang signifikan membuat daerah kesulitan beradaptasi dengan regulasi yang baru. Dengan demikian pada tahun ini tidak bisa melaksanakan pelatihan tenaga terampil konstruksi d. Bidang Cipta Karya untuk Sie Penataan Bangunan dan Lingkungan apabila tolok ukur kinerja berdasarkan jumlah Saluran Lingkungan di wilayah Kota Madiun, maka permasalahan yang dialami adalah sebagai berikut: 1. Belum adanya database saluran lingkungan di wilayah Kota Madiun sehingga parameter pelaksanaan kegiatan belum ada; 2. Pelaksanaan manajemen pengolahan limbah domestic yang masih tumpang tindih dengan OPD lain sehingga penentuan sasaran menjadi kendala; 3. Penyediaan kebutuhan air minum sudah mencakup seluruh wilayah Kota Madiun dan kegiatan fisik sudah diserahkan pada PDAM sehingga tidak banyak kegiatan.	f. Proses persetujuan substansi oleh Kementerian ATR/BPN telah diproses dan masih menunggu surat persetujuan substansi dikeluarkan, untuk harmonisasi dengan Kanwil/Kemenkumham telah dijadwalkan rapot dengan Kanwil. Setelah surat persubs dan berita acara harmonisasi Kemenkumham didapatkan selanjutnya mengajukan surat rekomendasi Kemendagri dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. g. Pekerjaan pengadaan tanah masih menunggu ketersediaan dokumen KKPR

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2	3	4
		4. Kegiatan penataan lingkungan bangunan masih menunggu ketetapan regulasi yang masih berproses 5. Untuk penyusunan pelaporan SPM masih simpang siur dalam penggunaan data karena pelaksana SPM adalah dari PDAM dan Dinas Perkim sedangkan Dinkes juga mengeluarkan data terkait pelayanan dasar tersebut e. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang membidangin proses pelayanan untuk pengurusan PBG dan SLF, saat ini sedang dalam proses penyusunan PERDA tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dimana adanya penyesuaian dengan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 114 (1a) bahwa "Retribusi perizinan tertentu terkait retribusi izin mendirikan bangunan diubah menjadi retribusi perizinan berusaha terkait persetujuan bangunan gedung yang selanjutnya disebut retribusi persetujuan bangunan gedung". Saat ini, raperda yang telah disusun sudah terverifikasi bagian hukum Provinsi Jawa timur, dan telah terverifikasi juga di Kemenkumham Wilayah Jawa Timur serta saat ini masih dalam proses verifikasi dalam Kementerian Keuangan. f. Belum ditetapkannya Perda tentang revisi rencana tata ruang wilayah Kota Madiun tahun 2023-2043 karena memerlukan persetujuan substansi dari Kementerian ATR/BPN, harmonisasi dengan Kanwil, Kemenkumham, rekomendasi dari kementerian dalam negeri dan rekomendasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. g. Bidang Bina Marga pada tahun 2022 untuk Sub Kegiatan Pembangunan Jalan terdapat pekerjaan pengadaan tanah. Pekerjaan ini belum bisa dilaksanakan karena dokumen pengadaan tanah yang disusun pada tahun 2020 harus direvisi dan disesuaikan dengan permen atr yang terbaru dan saat ini masih dalam proses kkpr dengan badan pertanahan	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2	3	4
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN a. Dalam sub kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni masih memerlukan data DTKS yang valid sehingga apabila diverifikasi lapang/validasi kondisi rumah yang diusulkan tidak masuk kriteria b. Kurangnya kompetensi SDM masyarakat dalam pelaksanaan penataan kampung tematik yang bersifat teknis dan swakelola sehingga menghambat progres pelaksanaan kegiatan c. Masih terdapat Rumah Tidak Layak Huni di Kota Madiun d. Masih terdapat permukiman kumuh di Kota Madiun (kumuh ringan) e. Terdapat rumah tinggal yang belum bersanitasi f. Belum optimalnya penyediaan PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) dalam lingkungan perumahan dan kawasan permukiman g. Belum optimalnya legislasi daerah terutama tataran operasional terkait urusan perumahan dan kawasan permukiman h. Tingginya permintaan perubahan penggunaan tanah sebagai dampak pertumbuhan ekonomi di Kota Madiun i. Kecenderungan pertumbuhan investasi di Kota Madiun berdampak pada permintaan ijin lokasi untuk perolehan tanah dalam rangka investasi j. Belum optimalnya sarana dan prasarana makam aset Pemerintah Kota Madiun	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN a. Kompetensi SDM masyarakat harus benar-benar menguasai terutama dalam bidang teknis sehingga dari sisi administrasi maupun progress pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana b. Kompetensi SDM masyarakat harus benar-benar menguasai terutama dalam bidang teknis sehingga dari sisi administrasi maupun progress pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana c. Penanganan permukiman kumuh melalui pencegahan dan peningkatan kualitas d. Penanganan permukiman kumuh melalui pencegahan dan peningkatan kualitas e. Penanganan permukiman kumuh melalui pencegahan dan peningkatan kualitas f. Mengoptimalkan legislasi daerah melalui Perda & Perwal tentang tataran operasional urusan perumahan dan kawasan permukiman g. Mengoptimalkan legislasi daerah melalui Perda & Perwal tentang tataran operasional urusan perumahan dan kawasan permukiman h. Mengoptimalkan legislasi daerah melalui Perda & Perwal tentang tataran operasional urusan perumahan dan kawasan permukiman i. Mengoptimalkan legislasi daerah melalui Perda & Perwal tentang tataran operasional urusan perumahan dan kawasan permukiman j. Mengoptimalkan sarana & prasarana makam melalui peningkatan fasilitas
5	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN a. Masih adanya pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di wilayah Kota Madiun b. Adanya lintasan kereta api yang melintasi jalan raya di kota Madiun, sehingga menimbulkan waktu response time rate kebakaran tidak tercapai apabila terjadi kebakaran di area utara wilayah Kota Madiun BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH a. Terbatasnya sarana prasarana penanggulangan bencana b. Perlu ditingkatkannya kemampuan/pengetahuan penanganan bencana untuk Team Reaksi Cepat (TRC) BPBD Kota Madiun khususnya	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN a. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja meningkatkan patroli gangguan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kota Madiun dan melaksanakan penertiban sesuai dengan Standar Operasional Prosedur penertiban. b. Adanya Redkar Damkar ditiap-tiap kelurahan yang ikut membantu pemadaman ketika kebakaran. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH a. Pengajuan penambahan sarana dan prasarana penanggulangan bencana b. Dilaksanakannya Pelatihan/Mitigasi Penanggulangan Bencana

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2	3	4
6	Sosial	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK a. Penurunan indeks RB Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, disebabkan karena ada beberapa indikator yang belum dapat terpenuhinya sebagian indikator dan data dukungnya b. Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana kurang mendukung sehingga pelayanan tidak berjalan optimal	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK a. Memenuhi data dukung di tahun berikutnya saat pengisian dengan Lembar Kerja Evaluas b. Perlunya pelatihan teknis terhadap Aparatur Sipil Negara untuk peningkatan Sumber Daya Manusia serta ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
7	Ketenagakerjaan	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2022 sebesar 6,39 %, menurun dari tahun 2021 sebesar 8,15%. Namun angka TPT tahun 2022 walaupun menurun, namun masih cukup tinggi.	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH Perlunya ditingkat kan kegiatan yang akan menurunkan angka TPT: 1. Perluasan Informasi Pasar Kerja, utamanya melalui aplikasi SICAKER, Bursa Kerja Khusus, dan Sosialisasi Informasi Pasar Kerja dll; 2. Pelatihan Berbasis Kompetensi bagi pencari kerja, sehingga lebih mudah untuk diterima di pasar kerja;
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Belum adanya Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota tentang Pangarusutamaan Gender (PUG)	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Pengusulkan Peraturan Daerah dan Atau Peraturan Wali Kota tentang Pangarusutamaan Gender (PUG) serta menyusun Profil gender kerjasama dengan pihak ketiga
9	Pangan	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN a. Indikator PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT (Prosentase Angka Kecukupan Energi) Realisasi hanya 97% karena Berdasarkan Susenas 2022, AKE bernilai 2036 kkal/kapita. Walaupun AKE Kota Madiun kurang dari standar, namun tingkat kecukupan energinya masih termasuk kategori normal. Menurut Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) 2012 kategori tingkat kecukupan gizi: 1. jika AKE aktual <70% dari AKE standar, maka termasuk kategori defisit berat 2. jika AKE aktual 70-79% dari AKE standar, maka termasuk kategori deficit sedang 3. jika AKE aktual 80-89% dari AKE standar, maka termasuk kategori defisit ringan 4. jika AKE aktual 90-119% dari AKE standar, maka termasuk kategori normal	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN a. Melakukan upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan pola makan yang B2SA (Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman) melalui kegiatan sosialisasi, pelatihan, dan promosi kepada masyarakat dan/atau para pemangku kepentingan lainnya, serta kegiatan yang melibatkan peran aktif masyarakat dalam rangka membiasakan pola makan B2SA. b. Melakukan upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan pola makan yang B2SA (Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman) melalui kegiatan sosialisasi, pelatihan, dan promosi kepada masyarakat dan/atau para pemangku kepentingan lainnya, serta kegiatan yang melibatkan peran aktif masyarakat dalam rangka membiasakan pola makan B2SA. c. Realisasi output sub kegiatan hanya 1 dokumen karena yg dokumen SKPG, mulai 2022 dibuat oleh pusat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2	3	4
		5. jika AKE aktual >120% dari AKE standar, maka termasuk kategori melebihi kebutuhan b. Indikator Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi (Angka Kecukupan Energi)realisasinya hanya 2036 Kkal/per kapita c. Indikator Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun (Jumlah Dokumen Pola Pangan Harapan (PPH) dan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG), Realisasi hanya 1 dokumen	
10	Pertanahan	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN a. Kegiatan pemberian izin lokasi dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota Subkegiatan : Koordinasi dan sinkronisasi pemebrian izin lokasi penanaman modal dan kemudahan berusaha Masalah : tidak terserapnya uang bantuan transportasi dalam rangka konsultasi publik kegiatan perubahan Perda Nompr 18 tahun 2019 tentang izin lokasi dan izin perubahan penggunaan tanah (IPPT) b. Kegiatan penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah kabupaten/ Kota Subkegiatan : inventarisasi sengketa, konflik dan perkara pertanahan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota Masalah : Jumlah narasumber yang dianggarkan dengan yang diundang rapat dalam kegiatan fasilitasi penyelesaian sengketa/ konflik pertanahan tidak sesuai sehingga menyebabkan anggaran belanja honorarium narasumber atau pebahas, moderator, pembawa acara dan panitia tidak terserap dengan sempurna c. Kegiatan penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu daerah kabupaten/ kota Subkegiatan : koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah Masalah : tidak terserapnya belanja sewa bangunan gedung tempat pertemuan dalam sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah karena kegiatan rapat koordinasi dilaksanakan tidak secara bersamaan	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN a. Kegiatan pemberian izin lokasi 1. Perlu adanya perencanaan anggaran yang lebih detil lagi 2. Koordinasi dan konsultasi yang lebih intens dengan atasan langsung b. Kegiatan penyelesaian sengketa tanah garapan 1. Perlu adanya perencanaan anggaran yang lebih detil 2. Koordinasi dan konsultasi yang lebih intens dengan atasan langsung terkait dengan pelaksanaan kegiatan dimaksud c. Kegiatan penggunaan tanah yang hamparannya, Perlu adanya perencanaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan yang lebih detil

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2	3	4
11	Lingkungan Hidup	DINAS LINGKUNGAN HIDUP a. Kadar beban pencemar di badan air sungai yang sudah tinggi sebelum masuk ke badan air sungai wilayah Kota Madiun, sehingga saat dilakukan uji laboratorium pada sampel air badan air menunjukkan hasil yang melebihi baku mutu b. Kondisi TPA yang sudah hampir penuh	DINAS LINGKUNGAN HIDUP a. Kader beban pencemaran 1. Melakukan monev pengendalian pencemaran sungai Bengawan Solo (utamanya di musim kemarau) 2. Mendorong pembangunan pengolahan limbah komunal bagi masyarakat dan industri (kecil) yang berbasis masyarakat untuk menjaga keberlanjutannya 3. Sosialisasi bagi industri-industri agar memasang alat monitoring air limbah secara otomatis yang dibuang ke badan air 4. Mensosialisasikan bagi industri-industri yang belum memiliki izin pembuangan air limbah yang dibuang ke badan sungai 5. Berkoordinasi dengan DLH Provinsi Jawa Timur terhadap permodelan tersebut sebagaimana Rekomendasi Ketua Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai (TKPSDA WS) Bengawan Solo Nomor: 18/TKPSDAWSBS/2022 tanggal 25 Mei 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Pencemaran Sungai Bengawan Solo b. Kondisi TPA 1. Pembangunan TPST yang pengelolaannya bekerja sama dengan pihak swasta sehingga diharapkan pengurangannya bisa lebih dari 50% 2. Membangun TPS 3R yang dikelola oleh kelompok swadaya masyarakat (KSM) dan mendorong masyarakat untuk membentuk KSM pengelola sampah di TPS 3R 3. Menambah jumlah TPS 3R dan menambah jumlah tenaga pengolah sampah di TPS 3R
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL a. Server database administrasi kependudukan dipusatkan pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri sehingga lancar atau tidaknya jaringan database di daerah juga bergantung pada server yang ada di pusat b. Regulasi tentang Administrasi Kependudukan yang selalu berubah- ubah c. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya update data penduduk segera setelah terjadi nya peristiwa kependudukan	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL a. Selalu mengupdate informasi perihal kendala jaringan sehingga bisa segera ditindaklanjuti apabila menemui kendala. b. Selalu mengupdate informasi terkait perubahan regulasi untuk segera melakukan tindak lanjut c. Mengalokasikan anggaran dan menyusun kegiatan yang tepat sasaran untuk sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya update data penduduk d. Mengusulkan kebutuhan ASN bidang pelayanan Administrasi Kependudukan kepada BKPSDM melalui peta jabatan e. Meningkatkan kompetensi petugas pelayanan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2	3	4
		d. Kurangnya jumlah petugas pelayanan dengan status ASN sehingga alokasi anggaran banyak terserap untuk belanja jasa administrasi bagi petugas pelayanan dengan status non ASN e. Masih ada keluhan ataupun pengaduan masyarakat berkaitan dengan pelayanan Administrasi Kependudukan f. Data penduduk hanya bisa disajikan sesuai dengan Data Kependudukan Bersih (DKB) yang dikirim dari pusat per semester g. Penyajian data penduduk dari pusat berdasarkan DKB hanya dalam beberapa jenis data penduduk, dan belum mencakup semua kebutuhan pelaporan kinerja OPD h. Capaian target Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan Perjanjian Kerjasama tidak bisa maksimal, karena dari 32 OPD yang ada di Kota Madiun, tidak semua memanfaatkan data kependudukan, ditambah lagi syarat pengguna data kependudukan harus sudah berstandar ISO 27001:2013 (Security Information Management System/ Sistem Manajemen Keamanan Informasi) yang membutuhkan alokasi anggaran i. Berdasarkan surat edaran LKPP Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan E Purchasing katalog laptop produk dalam negeri hasil konsolidasi pengadaan laptop produk dalam negeri secara nasional tahun anggaran 2022, Bahwa pengadaan perangkat computer dan laptop harus sesuai spesifikasi yang ditentukan dalam surat edaran tersebut, padahal kebutuhan penyimpanan dan pengolahan database administrasi kependudukan membutuhkan spesifikasi khusus yang tidak terpenuhi oleh spesifikasi laptop dan computer sesuai surat edaran tersebut. Hal ini tentu saja akan berimbas pada waktu pemrosesan data menjadi lebih lambat. j. Ketidaksesuaian data Kependudukan dan eksistensi penduduk secara fisik k. Keterbatasan masyarakat dalam mengurus Dokumen Adminduk baik secara fisik, mental maupun berstatus orang terlantar	f. Bagi pengguna data kependudukan dianjurkan untuk menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan agar bisa mengakses data penduduk sesuai kebutuhan mereka g. Untuk memenuhi kebutuhan pelaporan kinerja OPD harus melakukan hitung secara manual sehingga tidak ada jaminan validasi data h. Memaksimalkan sosialisasi pemanfaatan data kependudukan dan syarat-syarat untuk bisa melakukan kerjasama dalam pemanfaatan data kependudukan bagi OPD pengguna i. Mengajukan permohonan khusus kepada bagian pengadaan barang/ jasa Pemerintah Kota Madiun untuk memberikan rekomendasi/ ijin penggunaan produk impor untuk perangkat pengolah dan penyimpanan database administrasi kependudukan. j. Lebih aktif memberikan sosialisasi dan pengarahan melalui Kelurahan dan media sosial agar penduduk yang memiliki identitas yang tidak sesuai dengan domisilinya (penduduk non permanen) untuk mendaftaran identitas kependudukannya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil k. Memberikan pelayanan khusus bagi masyarakat dengan keterbatasan tersebut melalui pelayanan Gadjah Mada yaitu layanan perekaman KTP EL ke rumah- rumah bagi penduduk rentan yang belum rekam KTP EL dan mempunyai kendala/ halangan tetap

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2	3	4
13	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Terdapat 2 dari 12 Sasaran Penilaian Kinerja Kepala Dinas Kesehatan PP dan KB yang tidak tercapai yaitu, Presentase Rumah Tangga Sehat dari target 70% tercapai 64,88% serta Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) puskesmas se- Kota Madiun belum memenuhi target dari 86,2 tercapai 86,02.	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Pada indikator Tidak merokok terjadi peningkatan disebabkan adanya perubahan Definisi Operasional (DO) penilaian. Ini berarti ada penambahan anggota Rumah Tangga yang merokok. Sehingga perlu meningkatkan sosialisasi mengenai Bahaya Rokok. Rencana tindak lanjut untuk meningkatkan Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) puskesmas se-Kota Madiun yaitu membuat usulan perluasan lahan parkir puskesmas, bagi puskesmas yang tidak memiliki kantin dapat bekerja sama dengan kantin terdekat di puskesmas, menata ulang pembagian tugas pada pegawai puskesmas.
14	Perhubungan	DINAS PERHUBUNGAN sektor pelayanan parkir tepi jalan umum. Pihak ketiga mengalami gagal prestasi untuk membayar retribusi yang telah ditetapkan sebanyak 3 kali sehingga dilakukan pemutusan kontrak.	DINAS PERHUBUNGAN Solusi yang dilakukan sementara yaitu dengan dilakukan pengelolahan langsung dari Dinas Perhubungan sambil menunggu proses dilakukan lelang ulang untuk menentukan penyedia penggantinya.
15	Komunikasi dan Informatika	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Penerapan SPBE yang belum optimal	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA a. Meningkatkan pengelolaan data/dokumen proses tata kelola dan manajemen SPBE Pemerintah Daerah b. Meningkatkan layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah c. Memberikan akses jaringan internet yang merata di seluruh wilayah Kota Madiun d. Meningkatkan sinergitas seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Madiun dalam penerapan SPBE
16	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH Kurangnya Sosialisasi tentang Fasilitasi Permodalan bagi UMKM a. Masih kurangnya bimbingan manajemen usaha kecil dan menengah. b. Masih rendahnya peluang yang diberikan bagi koperasi untuk berkompetisi dalam penyediaan barang dan jasa. c. Masih kurangnya fasilitas kerjasama KUMKM dengan pelaku usaha besar. d. Belum banyak tersedianya ruang Pamer Produk UMKM. e. Belum terpenuhinya kebutuhan personil yang menangani pelaksanaan kegiatan dan pelayanan Dinas Tenaga Kerja, KUKM	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH a. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah telah melaksanakan sosialisasi kepada para pelaku UMKM yang ada di Kota Madiun terkait dengan fasilitasi permodalan dengan bunga lunak, diantaranya yaitu kredit UMKM dari PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun, KUR (Kredit Usaha Rakyat) dari Bank Pemerintah dan Perguliran Dana Pinjaman PKBL (Program Kerja Bina Lingkungan) dari PT. INKA. b. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah telah menyelenggarakan berbagai macam bimbingan manajemen kepada para pelaku UMKM yang dibiayai oleh APBD maupun bekerjasama dengan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur diantaranya melalui berbagai macam pelatihan diantaranya adalah:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2	3	4
			1. Pelatihan pembuatan makanan olahan 2. Pelatihan pembuatan *handycraft* 3. Pelatihan batik tingkat lanjutan 4. Pelatihan internet marketing 5. Pelatihan manajerial 6. Pelatihan kewirausahaan c. Beberapa koperasi sudah bisa memenuhi kebutuhan barang dan jasa perusahaan -perusahan induknya antara lain, KOPINKA, Kopkar Siyvia Cendikia, Primkopad Yon 501, KPRI RSU Sudono, Kopkar RSI, Kopegtel, Koperasi Cahaya PLN, Koperasi Sejahtera PLN. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terus melakukan upaya pembinaan dan pengarahan pada waktu pelatihan, sosialisasi maupun Rapat Anggota Koperasi untuk memperluas kegiatan usahanya diluar unit simpan pinjam seperti penyediaan barang dan jasa sehingga akan meningkatkan pendapatan dan SHU yang diterima oleh anggota sehingga akan lebih meningkatkan kesejahteraan anggota. d. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun telah berupaya untuk memfasilitasi kerjasama antara UMKM degan pelaku usaha yang berskala besar, yaitu menjalin kerjasama dengan Toko Modern dan Perhotelan diantaranya Carrefour, PT. INKA, Hotel Aston dan Hotel Merdeka. Disamping itu Pemerintah Kota Madiun telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, yang juga mengatur masalah kemitraan antar KUMKM dengan pelaku usaha besar sehingga diharapkan dapat meningkatkan kerjasama antar pelaku usaha. e. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah telah mengajukan permohonan bantuan CSR ke PT. INKA untuk merenovasi salah satu gedung yang ada di Dinas Penanaman Modal, PTSP, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Madiun menjadi gedung pamer produk unggulan UMKM. f. Pengusulan personil kepada BKPSDM dan pengusulan peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan atau diklat teknis

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2	3	4
17	Penanaman modal	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU a. Pelaksanaan kegiatan banyak ditentukan oleh variabel partisipasi kehadiran dari lintas program/lintas sektor, yaitu antar Bidang, perangkat daerah teknis, pelaku usaha serta himpunan pelaku usaha b. Beberapa pelaku usaha dengan KBLI tertentu tidak segera dapat memenuhi kewajibannya sesuai peraturan/ perundangan c. Pemenuhan kewajiban berusaha belum dievaluasi d. Perlu adanya pendekatan pelayanan perizinan berusaha kepada masyarakat e. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (Baik itu Tenaga ASN dan Non ASN) di DPMPTSP sehingga pelaksanaan kegiatan menjadi kurang maksimal f. Belum adanya Mobil Keliling Perizinan untuk mendukung kegiatan SIAP KAKA (Pendampingan Sistem Pelayanan Perizinan ke Kelurahan) sehingga petugas masih harus perlu membawa dan menata peralatan yang dibawa saat kegiatan SIAP KAKA (terutama Printer, Laptop, dan ATK). g. Belum adanya tempat khusus untuk menerima konsultasi dan pengelolaan pengaduan h. Kurangnya peminat Masyarakat Kota Madiun untuk menjadi Calon Transmigran i. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal pada Kegiatan Pembinaan/ Sosialisasi Implementasi Perizinan/ Pengawasan Berusaha masih banyak peserta Pelaku Usaha/ Perusahaan yang diundang tidak datang (20%), sehingga kurang tersampaikan materi pokok pada pelaku usaha/ perusahaan dan pelaku usaha tidak memahami dan mengetahui hal yang penting untuk disampaikan dari BKPM, sehingga seringkali terjadi kesalahan/ permasalahan dalam input OSS atau pemilihan KBLI dan standarnya. j. Masih banyak Pelaku Usaha kurang memahami Sistem OSS RBA, dan pengurusan perizinannya, sehingga ada ketidaksesuaian/ permasalahan, dan juga kurang/ tidak memenuhi persyaratan dalam proses perizinannya serta kepatuhan laporan LKPMnya. k. Dengan adanya kemudahan berusaha, beberapa Pelaku Usaha cenderung melaksanakan operasional usahanya terlebih dahulu, meski belum memenuhi persyaratan dalam perizinan berusaha, bahkan ada yang belum berizin.	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Dilakukan perencanaan pelaksanaan kegiatan dan koordinasi rutin dengan lintas program/lintas sector a. Dilaksanakan pendampingan pelayanan perizinan bekerja sama dengan perangkat dinas teknis b. Dilaksanakan penjadwalan evaluasi pemenuhan kewajiban berusaha bersama perangkat dinas teknis c. Dilaksanakan inovasi pelayanan berbantuan langsung pada masyarakat, yaitu SIAP KAKA d. Pengajuan Tenaga ASN dan non ASN sesuai Analisa Jabatan yang telah disusun. e. Pengajuan Mobil Keliling Perizinan f. Pengajuan untuk penyediaan tempat khusus menerima konsultasi dan pengelolaan pengaduan. g. Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi dan Penyuluhan Transmigrasi h. Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi: 1. Intens melaksanakan sosialisasi ke Pelaku Usaha/Perusahaan dengan publikasi melalui medsos, website, media televisi, banner dan baliho. 2. Pendaftaran peserta untuk mengikuti sosialisasi/ pembinaan dengan flyer melalui medsos, wa group, website dan surat manual yang ditujukan ke Pelaku Usaha yang diundang. 3. Fasilitasi forum penyelesaian permasalahan pada perusahaan yang bermasalah dengan Dinas Pengampu/ kewenangan Provinsi Jawa Timur sesuai sector usaha. i. pelaku usaha kurang memahami OSS 1. Melaksanakan pengawasan dengan inspeksi/ visitasi/ kunjungan lapangan ke perusahaan untuk melaksanakan pembinaan terhadap Pelaku Usaha mengenai Sistem OSS RBA, pemenuhan persyaratan usaha dan pelaporannya (LKPM). 2. Menyediakan pelayanan perizinan dengan by WA Helpdesk, medsos, website dan meja manual (FO) di DPMPTSP Kota Madiun. j. Pelaksanaan pengawasan dengan pembinaan kepada pelaku usaha dengan inspeksi lapangan/ visitasi lapangan sesuai sektor usaha oleh OPD Teknis/ DPMPTSP Kota Madiun. k. Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 44 tahun 2019 telah di*update* sesuai dengan kondisi Kota Madiun saat ini dalam bentuk draft Perwal. l. Penambahan fitur dan informasi pada Peta Investasi m. Melaksanakan Promosi Investasi secara rutin melalui media elektronik dan non elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2	3	4
		l. Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 44 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kota Madiun sebagai dokumen perencanaan penanaman modal memerlukan pembaharuan data dan *roadmap*. m. Peta investasi sebagai bentuk informasi penanaman modal telah disediakan oleh DPMPTSP Kota Madiun pada tahun 2021, saat ini Peta Investasi memerlukan penambahan fitur dan informasi yang lebih lengkap. n. Promosi investasi masih dirasa kurang mengena kepada masyarakat	
18	Kepemudaan dan Olah Raga	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA a. Kota Madiun memiliki banyak atlit yang potensial untuk dikembangkan bakat dan minat olahraganya untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi lagi dikarenakan untuk pembinaan dan pelatihan kepada para atlit belum terlalu optimal, maka diperlukan pembinaan dan pelatihan agar lebih mengasah keahliannya agar lebih bisa berprestasi baik tingkat provinsi, regional maupun nasional; b. Perencanaan penyusunan Rencana Anggaran Kas belum sesuai pelaksanaan c. Belum optimalnya pelatihan dan pembinaan atlet	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA a. Pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Madiun memfasilitasi para atlit dengan melengkapi sarana prasarana olahraga secara bertahap pada setiap cabang olahraga serta memberikan sarana prasarana akomodasi bagi para atlit yang akan bertanding tingkat provinsi, regional maupun nasional; b. Penyusunan Rencana Anggaran Kas akan disesuaikan dengan rencana pelaksanaan kegiatan
19	Statistik	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1. Belum adanya sistem integrasi data-data statistik sektoral daerah; 2. Belum optimalnya ketersediaan data-data statistik sektoral untuk perencanaan pembangunan daerah; 3. Kurangnya koordinasi berbagai pihak dalam penyediaan data statistik pembangunan daerah; 4. Belum memadainya kapasitas sumber daya manusia dalam pendataan dan statistik daerah	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1. Meningkatkan koordinasi dan konsolidasi dengan BPS dalam penyediaan data statistik daerah; 2. Melakukan koordinasi dan kerjasama yang terstruktur dengan seluruh Perangkat Daerah dalam pengumpulan dan penyusunan data statistik daerah, sehingga tercipta data terbuka pemerintah; 3. Melaksanakan konsultasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan kewenangan urusan statistik.
20	Persandian	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1. Belum optimalnya penyelenggaraan keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Kota Madiun; 2. Belum optimalnya perangkat daerah yang menggunakan persandian untuk mengamankan setiap jenis informasi yang wajib diamankan; 3. Belum optimalnya sarana dan prasarana jejaring persandian daerah dan informasi; 4. Kurangnya sumber daya manusia di bidang pengelolaan persandian daerah	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) Persandian; 2. Peningkatan koordinasi dan konsolidasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dalam bidang persandian.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2	3	4
21	Kebudayaan	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA a. Kota Madiun memiliki kurang lebih ada 146 benda/bangunan yang diduga cagar budaya, namun benda/bangunan tersebut ada kendala dalam pelestarian dan penjagaan nya dikarenakan masih menunggu proses ketetapan Kepala Daerah untuk benda/bangunan tersebut menjadi cagar budaya yang dipelihara dan dirawat oleh Pemerintah Kota Madiun, sehingga belum optimal dalam pemeliharaan cagar budaya yang ada di Kota Madiun yang bisa lebih menarik wisatawan b. Perencanaan penyusunan Rencana Anggaran Kas belum sesuai pelaksanaan	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA a. Pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Madiunm Melakukan pemeliharaan terhadap cagar budaya terutama Masjid dan Makam Kuncen serta Masjid dan Makam Taman agar lebih terawat dan menarik minat wisatawan untuk mengunjunginya serta berusaha untuk melakukan penelitian keabsahan benda/bangunan yang diduga cagar budaya yang masih tersisauntuk ditetapkan sebagai benda/bangunan cagar budaya yang bisa dilestarikan. b. Penyusunan Rencana Anggaran Kas akan disesuaikan dengan rencana pelaksanaankegiatan
22	Perpustakaan	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Pada Bidang Perpustakaan: ruang layanan perpustakaan pada Perpustakaan Umum Daerah belum cukup menampug kapasitas jumlah pengunjung perpustakaan.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Direncanakan pada tahun 2024 akan dilaksanakan perluasan gedung layanan perpustakaan melalui dana DAK yang saat ini dalam proses pengajuan Perpustakaan Nasional.
23	Kearsipan	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Pada Bidang Kearsipan: Depo Arsip di Lembaga Kearsipan belum sesuai standart kearsipan dan pada Organisasi Perangkat Daerah sebagian besar belum memiliki Record Center/tempat penyimpanan Arsip In Aktif	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Memanfaatkan ruang kelas eks SMP 2 Kota Madiun untuk Depo Arsip
24	Kelautan dan Perikanan	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN Meningkatnya akses layanan permodalan peternakan dan perikanan	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN Penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna dan Pembinaan serta pengembangan perikanan budidaya
25	Pariwisata	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHA RAGA a. Kota Madiun telah memiliki banyak obyek wisata yang mampu menarik kunjungan wisatawan untuk berkunjung di Kota Madiun, sehingga diperlukan promosi kepariwisataan terutama di dalam Kota Madiun yang mampu menarik minat wisatawan luar kota untuk berkunjung ke Kota Madiun. Sehingga yang harus dilakukan adalah meningkat dan menimbulkan ketertarikan yang besar baik bagi masyarakat Kota Madiun sendiri maupun di luar Kota Madiun dengan menghadirkan destinasi wisata yang baru dan menarik. b. Perencanaan penyusunan Rencana Anggaran Kas belum sesuai pelaksanaan c. Kurangnya SDM dalam mengkoordinir data usaha industri pariwisata	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA a. Pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Madiun menyelenggarakan even promosi di dalam Kota Madiun b. Penyusunan Rencana Anggaran Kas akan disesuaikan dengan rencana pelaksanaan kegiatan c. Mengaktifkan tenaga yang ada semaksimal mungkin untuk memperoleh data yang berhubungan dengan kepariwisataan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2	3	4
26	Pertanian	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN Bidang Pertanian a. Sasaran OPD (Meningkatnya Kesejahteraan Petani) dengan indikator 1.) Peningkatan produktivitas pertanian (ton/ha), Realisasinya hanya 6,35 ton/ha b. Sasaran OPD (Meningkatnya Kesejahteraan Petani) dengan indikator 2.) Rasio pendapatan petani dengan biaya produksi, Realisasinya 1,10% c. Indikator Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota (Jumlah izin usaha pertanian yang diterbitkan oleh otoritas kompeten) Realisasinya hanya 1 jenis Bidang Peternakan a. Meningkatnya produksi, pengawasan produk peternakan b. Meningkatnya teknologi pengolahan dan pemasaran hasil peternakan c. Meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan menular d. Meningkatnya pengawasan pemotongan ternak sapi betina produktif dan pengeluaran ternak betina produktif keluar daerah e. Meningkatnya penerapan teknologi peternakan tepat guna	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN Bidang Pertanian a. Produktivitas padi tidak mencapai target (6,35 ton/ha) dikarenakan adanya serangan hama pada musim tanam kedua dan telah dilakukan upaya klaim AUTP seluas 103,99 hektar b. Rasio pendapatan petani tidak mencapai target (1,12%) dikarenakan biaya produksi yang membengkak dengan keluarnya biaya tambahan untuk penanggulangan hama wereng dan kerdil rumput, sehingga menyebabkan gagal panen c. Karena 1 jenis ijin sertifikasi beras prima baru dikeluarkan oleh OKKPD (Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah) di bulan November 2022, sedangkan 1 jenis ijin edar baru bisa diproses setelah sertifikasi keluar dan tidak cukup waktu, sehingga berpengaruh terhadap output realisasi sub kegiatan Bidang Peternakan a. Penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna b. Penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna c. Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak dan Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular hewan peliharaan d. Kesehatan masyarakat veteriner e. Penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna dan Penyuluhan pemasaran produksi peternakan Penyuluhan kualitas gizi pakan ternak
27	Perdagangan	DINAS PERDAGANGAN a. Belum optimalnya sarana prasarana pasar rakyat b. Sistem pengelolaan masih bersifat manual	DINAS PERDAGANGAN a. Melakukan revitalisasi pasar rakyat dan pemeliharaan sarana prasarana pasar rakyat b. Melakukan digitalisasi pengelolaan perdagangan contohnya portal parkir pasar, SIM Pasar, E-Retribusi
28	Perindustrian	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH a. Permasalahan yang sampai saat ini dihadapi adalah merubah sebagian mindset pengusaha untuk melakukan inovasi usaha sesuai perkembangan. b. Belum terpenuhinya kebutuhan personil yang menangani pelaksanaan kegiatan dan pelayanan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH a. Adapun solusi saat ini memberikan pemberdayaan, pembinaan serta melakukan promosi guna mengembangkan mindset pengusaha. b. Pengusulan personil kepada BKPSDM dan pengusulan peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan atau diklat teknis

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2	3	4
29	Unsur Staf	BAGIAN HUKUM a. Kurangnya tenaga penyusun pembentukan produk hukum b. OPD pemrakarsa kurang menguasai substansi/materi raperda yang diusulkan c. Keterbatasan anggaran untuk melaksanakan kegiatan pembinaan/penyuluhan hukum dan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat d. Kurangnya tenaga publikasi produk hukum BAGIAN PEMERINTAHAN a. Kurang akuratnya data dalam penyusunan Laporan Kinerja Pemerintahan b. Kurang tertibnya administrasi kecamatan dan kelurahan BAGIAN ORGANISASI a. Terdapat dinamisasi regulasi sehingga berpengaruh terhadap penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran b. Terdapat kesalahan kode rekening dalam penganggaran honorarium penanggung jawab pengelola keuangan c. Dinamisasi peraturan perundang-undangan terkait dengan kelembagaan dan standarisasi jabatan sehingga perlu adanya penyesuaian d. Terbatasnya SDM tentang ISO e. Dinamisasi peraturan perundang-undangan terkait dengan Reformasi Birokrasi, Budaya Kerja, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Zona Integritas sehingga perlu adanya penyesuaian dan upaya tindak lanjut di daerah BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN Jumlah personil Fungsional PBJ yang belum memenuhi kriteria kebutuhan LKPP dan MCP KPK. BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT a. Penanganan yang berpengaruh terhadap dokumen sakip dan kesulitan penerapan sakip b. Belum tersedia data penerima bantuan sosial pengabdian tokoh masyarakat c. Belum tersedianya aturan (SOP) yang mengatur dalam hal pembinaan BUMD d. Aturan Pemerintah Pusat yang Sangat Dinamis sehingga membutuhkan Penyesuaian	BAGIAN HUKUM a. Ada Mengajukan usulan penambahan pegawai kepada BKPSDM serta memaksimalkan potensi SDM *Legal Drafter* yang sudah b. Meningkatkan koordinasi dengan OPD terkait c. Menyusun RKA sesuai prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan d. Mengajukan usulan penambahan pegawai kepada BKPSDM serta memaksimalkan potensi SDM yang sudah ada BAGIAN PEMERINTAHAN a. Meningkatkan koordinasi antar OPD terkait, dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Pemerintahan b. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dalam rangka Pembinaan Administrasi Kecamatan dan Kelurahan melalui Bimtek Administrasi Kecamatan dan Kelurahan BAGIAN ORGANISASI a. Penyesuaian terhadap dokumen perencanaan dan anggaran dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku b. Telah dilakukan pergeseran anggaran untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dari kode rekening Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN menjadi kode rekening Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya c. Melakukan koordinasi dan upaya tindak lanjut terhadap perubahan peraturan perundang-undangan d. Melakukan Bimbingan Teknis Auditor Manajemen Mutu dan Anti Penyuapan e. Melakukan koordinasi dan upaya tindak lanjut terhadap perubahan peraturan perundang-undangan BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN Mengoptimalkan pegawai untuk ditugaskan sebagai Pokja Pemilihan UKPBJ dan berkoordinasi dengan BKPSDM untuk pemenuhan kebutuhan pegawai. BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT a. Penganggaran, pengendalian dan evaluasi kinerja dan keuangan b. Optimalisasi data penerimaan bantuan sosial pengabdian tokoh masyarakat c. Optimalisasi dalam pembuatan Peraturan Wali Kota dan SOP yang mengatur Pembinaan BUMD d. Melaksanakan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2	3	4
		BAGIAN UMUM a. Kurangnya koordinasi dalam menginformasikan rencana kegiatan di masing-masing sub bagian b. Perubahan status ASN Setda yang tidak diinformasikan ke bagian Umum sehingga mempengaruhi updating data kepegawaian c. Kurang tepatnya penganggaran untuk perjalanan dinas d. Ketidakpahaman pelaksana teknis dalam melaksanakan kegiatan pemeliharaan sarpras, bangunan gedung dan kendaraan dinas	BAGIAN UMUM a. Koordonasi dan *Sharing* dengan OPD yang lebih kompeten b. Koordinasi dengan bagian-bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Madiun agar segera melaporkan dinamika kepegawaian masing-masing bagian c. Perencanaan anggran perjalanan dinas disesuaikan dengan aturan terbaru dan menyesuaikan dengan kegiatan pimpinan d. Pembinaan rutin pegawai terkait dengan tugas dan tanggung jawab pelaksana teknis kegiatan pemeliharaan
30	Pelayanan Administrasi dan Pemberian Dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD	PELAYANAN LEGISLATIF a. Sumber daya aparatur Sekretariat DPRD yang belum optimal, dalam memenuhi kebutuhan dalam Peta Jabatan, Analisa Jabatan, dan Analisa Beban Kerja; b. Sarana dan prasarana belum terpelihara dengan baik dan belum dimanfaatkan secara optimal; c. Tingginya tuntutan pelayanan dalam memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD, dimana tuntutan pelayanan tersebut kadang kala di luar ketentuan; d. Padatnya kegiatan kedewanan sehingga agenda yang sudah dijadwalkan tidak terlaksana secara optimal;	PELAYANAN LEGISLATIF a. SDM aparatur secretariat DPRD belum optimal 1. Pengusulan penambahan SDM ASN terampil melalui pengajuan permohonan ke BKPSDM untuk pengadaan Staf ASN, terutama pada Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan. 2. Pemanfaatan teknologi untuk memudahkan aktivitas yang menunjang kinerja Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD, baik yang disediakan oleh Pemerintah Kota Madiun (aplikasi e-kinerja, M-SKP, SIPKD) maupun Instansi Pemerintah lainnya (SIPD, SIK, SIMDA BMD, e-LHKPN, e-LHK ASN, e-SAKIP, e-Monev); Adapun aplikasi yang disediakan oleh Sekretariat DPRD antara lain e-pengaduan, e-aspirasi Rakyat, e-notulen, dan e-inisiatif; 3. Peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia Sekretariat DPRD, melalui pelatihan formal dan informal yang diselenggarakan oleh Sekretariat DRPD maupun Instansi Lainnya. Contoh pelatihan yang diselenggarakan oleh Sekretariat DPRD yaitu pelatihan notulis, pelatihan MC, pembinaan SDM, pelatihan pembuatan Laporan dan pertanggungjawaban. Contoh lainnya adalah pelatihan yang diselenggarakan oleh selain Sekretariat DPRD yaitu pelatihan yang dilaksanakan oleh BKPSDM maupun yang diaksanakan di luar Pemerintah Kota Madiun b. Sarana Prasarana belum terpelihara 1. Pemanfaatan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana secara optimal. 2. Dilaksanakan pelatihan bagi seluruh operator peralatan dan mesin pada Sekretariat DPRD agar seluruh staf bisa mengoperasikan sarpras dengan baik dan benar;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2	3	4
			c. Tingginya tuntutan pelayanan 1. Mengikuti Perubahan peraturan peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah, kemudian menerapkannya. 2. Memberikan pemahaman kepada Pimpinan dan Anggota DPRD tentang Standart Pelayanan yang sesuai aturan melalui Bimbingan Teknis yang dilaksankan dalam rangka meningkatkan kapasitas Pimpinan dan anggota DPRD; d. Padatnya kegiatan kedewanan 1. Koordinasi antara Pimpinan dan anggota DPRD serta Eksekutif terkait penjadwalan kegiatan DPRD; 2. Penjadwalan kegiatan DPRD dilakukan lebih cermat dan tepat supaya dapat dilaksanakan secara optimal;
31	Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	INSPEKTORAT Inspektorat tahun 2022 pindah kantor menempati ex Rumah Dinas Ketua DPRD Kota Madiun di Jln. Dr. Soetomo 82 Madiun. Dari ruangan yang semula untuk kamar tidur dan ruang rapat, maka ketika kemudian dijadikan Ruang Kerja perlu diadakan penyesuaian- penyesuaian.	INSPEKTORAT Agar dapat berdayaguna maka kami lakukan penyesuaian dengan pengadaan meja kursi baru yang kompatibel dan praktis sehingga dapat menampung karyawan-karyawati Inspektorat.
32	Perencanaan	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH a. kolaborasi antar OPD belum tercipta dengan baik b. Belum semua Perangkat Daerah berperan serta secara optimal c. Pencarian data RPJMD kurang cepat dan akurat d. Belum seluruh Perangkat Daerah dapat mengoperasionalkan ESAKIP dengan baik e. Kurang optimalnya penyusunan data yang cepat dan akurat f. masih perlu peningkatan koordinasi dengan tim penyusun, supaya data lebih didapat dengan cepat dan akurat g. SDM perencana masih belum sepenuhnya mendapatkan bimbingan teknis sebagai perencana yang terstandar h. Faktor eksternal yang mempengaruhi/menghambat Pelaksanaan program/kegiatan i. terdapat masalah ketika memberikan bukti data dukung (teknis pemberian bukti data dukung kurang optimal) j. perlunya sosialisasi kepada perangkat daerah, agar SDM Operator dapat menjalankan dengan baik	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH a. Mengembangkan sistem aplikasi monev smart city b. Meningkatkan kualitas sosialisasi terhadap OPD akan arti pentingnya Satu Data c. Pengembangan aplikasi pencarian data perencanaan pembangunan d. peningkatan kualitas bintek E-SAKIP kepada perangkat daerah dan mengembangkan interface aplikasi ESAKIP agar lebih mudah digunakan e. peningkatan kualitas sosialisasi dan bimtek perencanaan pembangunan melalui pemanfaatan ESAKIP terintegrasi f. peningkatan kualitas koordinasi dan pengembangan sistem manajemen kinerja g. peningkatan kualitas bimbingan teknis terhadap perencana h. peningkatan kualitas kolaborasi antar pelaksanaan program/kegiatan dan Mempertahankan capaian kinerja yang ada i. Membangun aplikasi Reformasi Birokrasi dalam penilaian LKE implementasi RB j. Melakukan peningkatan kualitas bimbingan teknis pengisian aplikasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2	3	4
33	Keuangan	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH a. Minimnya komitmen Perangkat Daerah dalam menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu b. Belum adanya pemahaman yang sama terkait mekanisme pemberian hibah dan bantuan sosial c. Belum optimalnya pengelolaan barang milik daerah BADAN PENDAPATAN DAERAH a. Kurangnya sumber daya manusia/personil PNS serta kuantitas petugas pengelolaan Pajak Daerah b. Kurangnya pemahaman wajib pajak tentang Perpajakan Daerah c. Belum optimalnya penggalian potensi terhadap pajak daerah d. Kurangnya akurasi data pajak daerah	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH a. Sistim pengendalian internal yang lebuh baik, Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia, Komitmen Perangkat Daerah terhadap ketepatan waktu dalam penyampaian b. Melakukan Koordinasi dan konsultasi terkait dengan mekanisme pemberian hibah dan bantuan sosial terhadap pihak terkait sehingga menghasilkan suatu kesepakatan dan pemehaman yang sama c. Sering melaksanakan sosialisasi tentang pengelolaan barang milik daerah sehingga menghasilkan pengelolaan barang milik daerah yang optimal dan tepat sasaran BADAN PENDAPATAN DAERAH a. Penambahan sumber daya manusia/personil PNS serta pengembangan kuantitas petugas pengelolaan Pajak Daerah b. Melaksanakan Sosialisasi secara masif keseluruh lapisan elemen masyarakat terkait pemahaman wajib pajak tentang Perpajakan Daerah c. Pengoptimalan dalam penggalian/pendastaan potensi-potensi Wajib Pajak Daerah baru d. Melakukan Updating data wajib pajak daerah minimal setiap semester dan maximal setiap 1 tahun
34	Kepegawaian	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUASIA a. Penempatan ASN belum sepenuhnya berdasarkan kompetensi jabatan, distribusi ASN belum sesuai peta jabatan b. Belum terwujudnya data pegawai yang komprehensif	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUASIA a. Penerapan sistem remunerasi secara online, Adanya SKJ untuk semua jenis jabatan, dan Pengadaan CPNS dan PPPK b. Integrasi Aplikasi SKP, Absensi, Capaian Kinerja dan Administrasi Kepegawaian
35	Pendidikan dan Pelatihan	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUASIA Pengembangan kompetensi ASN belum optimal	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUASIA Diadakan Diklat atau Bimtek peningkatan kompetensi untuk semua jenis jabatan
36	Penelitian dan Pengembangan	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH a. Impelementasi kajian belum diupayakan secara optimal b. Kurangnya dukungan Organisasi terhadap pelaksanaan inovasi	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH a. Peningkatan Upaya / mendorong dalam pengimplementasian hasil kajian b. Meningkatkan kualitas sosialisasi terhadap pentingnya inovasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2	3	4
37	Kesatuan Bangsa dan Politik	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK a. Menumbuhkan rasa nasionalisme, cinta tanah air di masyarakat khususnya pelajar dan generasi muda. b. Dengan adanya 14 Perguruan Pencak Silat dan 24 suku di Kota Madiun yang rentan menimbulkan konflik sosial di masyarakat c. Mendukung peran Partai Politik dalam peningkatkan partisipasi politik masyarakat khususnya dalam pelaksanaan Pemilihan Umum, Pemilihan Legislatif dan Pemilih Kepala Daerah Tahun 2024 d. Mendorong organisasi kemasyarakatan dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan e. Meningkatkan koordinasi dalam penanganan ketahanan ekonomi f. Meningkatkan koordinasi dan peran forum kerukunan umat beragama untuk mencegah timbulnya konflik antar umat beragama g. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dan komunikasi dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK a. Diadakannya Sosialisasi Ideologi Wasbang, Bela Negara, Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan b. Melaksanakan pembinaan dan sosialisasi terhadap 14 perguruan Pencak Silat c. Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Parpol dan pendidikan politik kepada Masyarakat d. Pembinaan Pengurus dan anggota Orkemas e. Koordinasi dengan instansi terkait f. FKUB g. Pembinaan dan sosialisasi Narkoba
38	Kecamatan	PENYELENGGARAAN KECAMATAN a. SDM aparatur Kecamatan dan Kelurahan yang masih belum memadai b. Kurang memadainya sarana dan prasarana kelurahan c. Salah satu sasaran strategis tidak tercapai yaitu: Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan dengan indikator Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) dimana target pada tahun 2022 yaitu 3,30 skor, sedangkan realisasi yaitu 3,27 skor. d. Tuntutan Masyarakat terhadap pelayanan prima kepada Pemerintah e. Sarana dan prasarana kelurahan kecamatan belum optimal dalam pelayanan kepada masyarakat f. Terbatasnya kualitas SDM di kecamatan dan kelurahan. g. Kualitas dan kuantitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat kurang optimal h. Menurunnya semangat kepedulian nilai-nilai kegotongroyongan sebagai akibat berkembangnya semangat materialistis dan individualistis di tingkat kelurahan i. Kurangnya koordinasi dalam penyusunan jadwal kegiatan dengan instansi terkait yang berpengaruh terhadap serapan anggaran j. Adanya aturan baru terkait kebutuhan belanja barang yang berpengaruh terhadap serapan anggaran	PENYELENGGARAAN KECAMATAN a. Diperlukan diklat dan sosialisasi guna meningkatkan kualitas SDM kelurahan b. Mengusulkan dilaksanakannya pengadaan BMD c. Diadakan pembenahan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat, baik secara langsung maupun melalui media online dan perbaikan sarana prasarana yang menunjang pelayanan d. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada public e. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana di kecamatan dan kelurahan f. Meningkatkan kualitas pegawai untuk mengikuti diklat dan pelatihan g. Pengadaan sarana dan prasarana penunjang layanan serta mengadakan kegiatan pelatihan / bimtek pelayanan publik. h. Meningkatkan Rapat Koordinasi Lintas Sektoral bersama Tiga Pilar dengan mengundang Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Tokoh Pencak silat, Masyarakat Kurang beruntung dan lain-lain i. Penetapan jadwal ulang pada saat perubahan anggaran j. Pengadaan barang desesuaikan spek yang telah diatur oleh pemerintah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2	3	4
39	BUMD	PENGELOLAAN BUMD PDAM a. Semakin sulitnya menambah jumlah pelanggan. Hal ini disebabkan karena tingkat pelayanan pada akhir tahun 2022 telah mencapai lebih dari 96,10 %, hampir mencapai titik jenuh karena telah mendekati 100 %. Kondisi Kota Madiun yang sangat mudah mengambil air tanah membuat sebagian besar masyarakat menggunakan sumur dangkal sebagai alternative dalam mendapatkan air bersih. Sehingga semakin berat untuk mendapatkan pelanggan baru. b. Tingginya koefisien jam puncak (c=2,5). Koefisien jam puncak menunjukkan meningkatnya pemakaian air pada saat jam puncak hingga mencapai 2,5 kali rata-rata pemakaian air. Hal ini mengakibatkan berkurangnya tekanan air pada saat jam puncak walaupun kedua reservoir sudah dioptimalkan, sehingga pada saat jam puncak akan mengalami sedikit penurunan tekanan air terutama di daerah kritis. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Bank Daerah Kota Madiun a. Jaringan kantor seperti Kantor Cabang sangat diperlukan untuk lebih mendekatkan kepada pelayanan, dan memperluas daerah operasional BPR, selama ini kantor Operasional yang dimiliki adalah 1 (Satu) Kantor Pusat, dan 8 (Delapan) Kantor Kas semua di Kota Madiun belum memiliki Kantor Cabang. b. SDM adalah merupakan pilar utama dalam menjaga eksistensi suatu BPR untuk bisa terus tumbuh dan eksis dalam industri perbankan, peran SDM sangat besar dalam rangka pencapaian perusahaan. c. Banyaknya kompetitor sebagai pesaing seperti Bank Umum yang membiayai untuk pangsa pasar BPR, sama-sama BPR, Lembaga Keuangan NonBank seperti Koperasi, Danamon KSP, Pegadaian dan Lembaga Pembiayaan Keuangan, begitu pula lembaga tidak resmi seperti ijon, rentenir. PD. ANEKA USAHA a. Bidang SDM Perilaku pegawai dalam pelayanan kepada konsumen belum maksimal, kedisiplinan dan ketrampilan pegawai masih rendah b. Bidang Menejemen Sistem pelaporan keuangan belum sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku c. Bidang Sarana dan Prasarana/Peralatan Bangunan bekas cucian mobil belum dimanfaatkan.	PENGELOLAAN BUMD PDAM a. Solusi untuk mengatasi semakin sulitnya menambah jumlah pelanggan yaitu: b. Bekerjasama dengan pengembang perumahan (developer) untuk pemasangan jaringan perpipaan dan sambungan rumah baru. c. Mengadakan penyuluhan akan pentingnya air bersih bagi kesehatan kepada masyarakat kota Madiun. d. Mengadakan program pasang baru gratis. e. Disamping dengan membangun sumur baru yang diharapkan bisa menambah kapasitas produksi, PDAM Melaksanakan rehabilitasi jaringan pipa distribusi untuk meningkatkan debit air sehingga kebutuhan pelanggan bisa terpenuhi setiap saat. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Bank Daerah Kota Madiun a. Meningkatkan kepuasan kepada customer dengan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan yang berorientasi pada peningkatan pelayanan nasabah dengan sistem tangkap bola. b. Meningkatkan pemasaran / promosi BPR baik dengan penyebaran dan pengenalan langsung oleh petugas kepada sasaran masyarakat yang potensial, guna meningkatkan Image/ Citra BPR lebih baik lagi, juga memiliki Edukasi / Literasi Keuangan. c. Memberikan imbalan suku bunga yang memadai sesuai Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam produk Tabungan dan Deposito. d. Mengupayakan untuk Ekspansi jaringan kantor dengan membuka Kantor Cabang baru. e. Inovasi dan pengembangan produk baru. f. Mengupayakan penurunan NPL (*NonPerforming Loan*) dengan berbagai cara seperti melakukan pengeplangan agunan, pelelangan agunan melalui KPKNL dan melakukan gugatan ke pengadilan PD. ANEKA USAHA a. Telah dilakukan pelatihan kedisiplinan pegawai melalui pembinaan, pelatihan akuntansi guna penyempurnaan sistem pelaporan, pelatihan perpajakan dan pelatihan-pelatihan lain yang dapat mendukung peningkatan kedisiplinan pegawai; b. Memotivasi kepada pegawai SPBU untuk selalu meningkatkan pelayanan kepada konsumen; c. Telah dilakukan penggantian mesin dispenser untuk menjamin kualitas dan ketepatan takaran BBM; d. Segera diupayakan pemanfaatan lokasi bekas cucian mobil dengan menggandeng pihak ketiga agar dapat memberi manfaat dan menambah pendapatan Perumda Aneka Usaha

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

2.1.3. Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Pelayanan SPM

Capaian Standart Pelayanan Minimal Kota Madiun sebagaimana tertuang dalam permendagri 59 Tahun 2021 tentang penerapan standart pelayanan minimal

Tabel 2. 7 Capaian Standart Pelayanan Minimal 2021-2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	CAPAIAN								
			2021			2022			2023		
			target	hasil	capaian	target	hasil	capaian	target	hasil	capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PENDIDIKAN											
1	Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTS)	23.184	21.803	94,04%	26.323	30.270	114,99%	25.902	28.417	109,71%
		Rata-Rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional			63,82%			63,83%			89,06%
		Rata-Rata Kemampuan Numerasi SD Berdasarkan Asesmen Nasional			43,81%			46,91%			72,29%
		Iklim Keamanan SD			81,60%			87,57%			74,97%
		Iklim Kebhinekaan SD			65,22%			96,52%			72,73%
		Iklim Inklusivitas SD			76,75%			82,72%			58,94%
		Rata-Rata kemampuan Literasi SMP berdasarkan asesmen nasional			71,93%			77,03%			92,37%
		Rata-Rata Kemampuan Numerasi SMP Berdasarkan Asesmen Nasional			57,61%			62,11%			73,74%
		Iklim Keamanan SMP			85,44%			85,60%			73,31%
		Iklim Kebhinekaan SMP			79,69%			95,15%			70,88%
		Iklim Inklusivitas SMP			69,98%			82,19%			58,26%
		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil asesmen Nasional						1,96%			
2	Pendidikan kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	1.381	176	12,74%	175	273	156%	225	320	142,22%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Pendidikan anak usia dini	Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	2.582	2.483	96,17%	2.607	3.030	116,23%	5.162	5.395	104,51%
		Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD Yang Mendapatkan Minimal AKREDITAS B			90,85%			91,03%			-
4	Tenaga Kependidikan	Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1/ D IV			93,38%			94,71%			94,71%
KESEHATAN											
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	2.490	2.490	100%	2.470	2.470	100%	2.450	2.453	100,12%
2	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	2.377	2.384	100,29%	2.357	2.360	100,13%	2.338	2.347	100,38%
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	2.264	2.991	101,19%	2.245	2.257	100,53%	2.227	2.256	101,30%
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	9.218	9.198	99,78%	9.145	9.202	100,62%	9.081	9.099	100,20%
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	32.074	28.629	89,26%	31.855	31.855	100%	31.582	31.582	100%
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	115.489	136.729	118,39%	115.110	127.548	110,81%	114.664	126.836	100,00%
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	25.597	28.406	99,33%	29.585	30.187	102,03%	30.573	31.360	102,57%
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	68.685	37.767	54,99%	68.973	38.781	56,23%	69.278	42.970	62,03%
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah warga negara penderita diabetes melitus yang mendapatkan layanan kesehatan	8.111	9.574	118,04%	8.143	9.890	121,45%	7.741	8.425	108,84%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	338	389	115,09%	339	360	106,19%	339	374	110,32%
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulusis	Jumlah warga negara terduga tuberculusis yang mendapatkan layanan kesehatan	3.261	1.718	52,68%	5.184	6.553	126,41%	5.076	5.763	113,53%
12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*human immunodefiviency virus*) yang mendapatkan layanan kesehatan	5.845	5.968	102,10%	5.780	6.849	118,49%	5.828	6.664	114,34%
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG											
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	41.409	40.637	98,14%	44.831	44.011	98,17%	42.650	42.728	100,2%
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	41.409	40.591	98,02%	44.831	42.706	95,25%	44.706	46.141	103,20%
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN											
1	Penyediaan & rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kab/Kota	jumlah unit rumah rusak akibat bencana yang akan direhabilitasi, dibangun kembali, dan/atau direlokasi serta rencana jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan akses rumah darurat layak huni sesuai rencana dalam dokumen Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	0	0	100%	0	0	100%	0	0	100%
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota	jumlah Rumah Tangga terkena relokasi program pemerintah daerah, sesuai dengan jumlah rencana Rumah Tangga dalam rencana pemenuhan	65	65	100%	105	105	100%	105	105	100%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT											
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada	0	0	100%	0	0	100%	0	0	100%
2	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	45	45	100%	45	45	100%	41	41	100%
1	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	2.575	2.575	100%	153.367	153.367	100%	950	950	100%
2	Pelayanan pencehan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	2.575	2.575	100%	2.395	2.395	100%	252	252	100%
3	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	12%	12	100%	156	156	100%	42	42	100%
SOSIAL											
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	93	100	107,53%	100	95	107,53%	97	117	120,60%
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di luar panti	Jumlah Anak Terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	457	628	137,42%	460	736	160,22%	465	613	131,82%
3	Rehabilitasi Sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	135	276	204,44%	137	213	155,47%	139	251	180,57%
4	Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara / gelandangan dan Pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	50	50	100%	92	72	78,26%	94	105	111,70%
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap paska bencana bagi korban bencana Kab/Kota	Jumlah Warga Negara Korban Bencana Kab/Kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	3.300	5.734	173,75%	36	17	47,22%	36	58	161,11%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

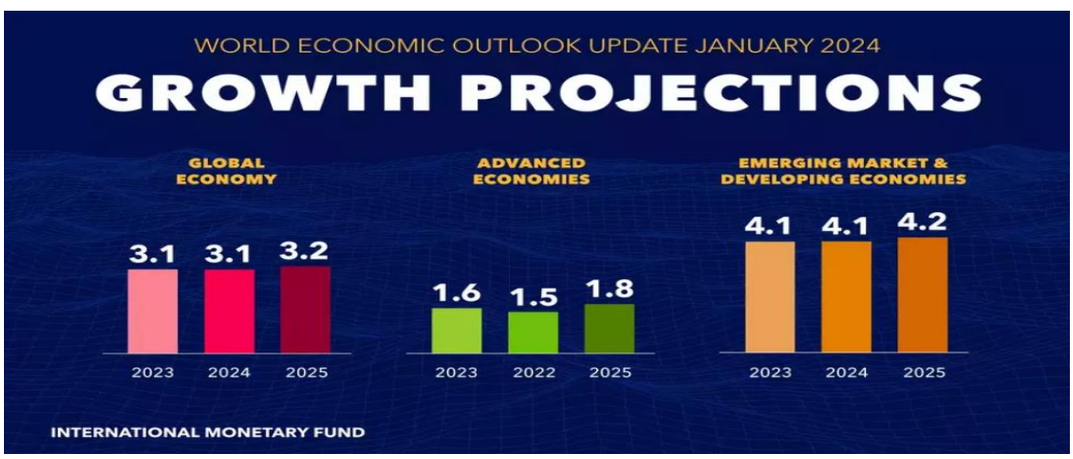
BAB III
KERANGKA EKONOMI DAERAH
DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Pertumbuhan ekonomi global diproyeksikan turun dari perkiraan 3,4% pada tahun 2022 menjadi 2,9% pada tahun 2023, kemudian naik menjadi 3,1% pada tahun 2024. Proyeksi tahun 2023 adalah 0,2% lebih tinggi daripada yang diperkirakan dalam *World Economic Outlook* (WEO) Oktober 2022, tetapi di bawah rata-rata historis (tahun 2000-2019) sebesar 3,8%. Penurunan proyeksi pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2023 ini disebabkan oleh kenaikan suku bunga bank sentral untuk memerangi inflasi dan perang Rusia di Ukraina yang terus membebani aktivitas ekonomi dunia. Diharapkan pada tahun 2025 terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi yang mencerminkan pemulihan bertahap dari gejolak perekonomian dunia.

Berdasarkan tren permintaan global, pertumbuhan perdagangan dunia diperkirakan akan menurun pada tahun 2025 menjadi 2,4% dan naik menjadi 3,4% pada tahun 2024. Perkiraan ini didasarkan pada sejumlah asumsi, termasuk harga bahan bakar dan komoditas non-bahan bakar, yang secara umum telah direvisi turun sejak bulan Oktober, serta suku bunga yang telah direvisi naik.

Berdasarkan proyeksi *International Monetary Fund* (IMF), pertumbuhan ekonomi global diprediksi akan stagnan pada tahun 2024 pada angka 3,1% kemudian akan meningkat menjadi 3,2% pada tahun 2025. Kenaikan suku bunga bank sentral guna melawan inflasi dan penarikan dukungan fiskal di tengah tingginya utang membebani aktivitas perekonomian. Dengan ketatnya kebijakan moneter, inflasi global diperkirakan akan turun menjadi 5,8% pada tahun 2024 dan 4,4% pada tahun 2025, dengan perkiraan tahun 2025 direvisi turun.



Sumber: IMF, 2023

Gambar 3. 1
Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Dunia Tahun 2023 – 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Sebagaimana yang termuat pada Gambar 3.1 di atas, pertumbuhan ekonomi negara maju diproyeksikan meningkat dari 1,5% pada tahun 2022 menjadi 1,6% pada tahun 2023 sebelum naik menjadi 1,4% pada tahun 2024. Sekitar 90% negara maju diproyeksikan akan mengalami penurunan pertumbuhan pada tahun 2023. Sedangkan untuk negara berkembang dan pertumbuhan diproyeksikan meningkat secara moderat, dari 3,9% pada tahun 2022 menjadi 4,0% pada tahun 2023; 4,1% pada tahun 2024; dan 4,2% pada tahun 2025 dengan revisi ke atas sebesar 0,1 poin untuk tahun 2023, revisi ke atas sebesar 0,2 poin untuk tahun 2024, dan revisi ke atas sebesaer 0,3 poin untuk tahun 2025. Sekitar setengah dari pasar negara berkembang dan negara berkembang memiliki pertumbuhan yang lebih rendah pada tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022.

Tabel 3. 1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global 2025

	IMF	WB	OECD
World Output	3,2	2,7	3,0
Advanced Economies	1,8	1,6	-
United States	1,7	1,7	1,7
Euro Area	1,7	1,6	1,3
Japan	0,8	0,8	1,0
Emerging Market and Developing Economies	4,2	4,0	-
China	4,1	4,3	4,2
Indonesia	5,0	4,9	5,1
Russia	1,1	0,9	1,0
Brazil	1,9	2,2	2,0
Saudi Arabia	5,5	4,2	4,2
South Africa	1,3	1,5	1,2

Sumber: WEO IMF Jan 2022, GEP WB Jan 2024,
OECD Economic Outlook November 2022, Global Economic Prospects January 2024

Sebagaimana yang termuat pada Tabel 3.1 di atas, Ekonomi Indonesia masih diperkirakan dapat tumbuh tinggi di tahun 2025. Proyeksi ekonomi tahun 2025 cenderung direvisi naik untuk negara negara maju, sedangkan untuk negara-negara berkembang beberapa direvisi turun. Negara-negara berkembang menghadapi periode pertumbuhan yang lambat selama beberapa tahun yang disebabkan oleh beban utang yang besar dan investasi yang lemah karena modal global diserap oleh negara-negara maju.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 didukung oleh konsumsi swasta, investasi, dan tetap positifnya kinerja ekspor di tengah pertumbuhan ekonomi global yang melambat. Namun di samping itu, perekonomian Indonesia dihadapkan pada tantangan global seperti gangguan rantai pasok, krisis energi, normalisasi suku bunga, perkembangan varian baru Covid-19, dan *China switching policy*.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Berbagai tantangan diatas menyebabkan kondisi perekonomian penuh dengan ketidakpastian namun dengan kecenderungan yang diproyeksikan meningkat. Namun demikian, berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk memulihkan kondisi perekonomian. Berdasarkan fenomena tersebut, proyeksi asumsi makro tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3. 2 Proyeksi Indikator Makro Ekonomi Indonesia 2024-2025

Indikator	2024	2025
Pertumbuhan Ekonomi (*%, yoy*)	5,3 – 5,7	5,5 - 6,0
Inflasi *(%, yoy)*	1,5 – 3,5	1,5 - 3,5
Tingkat Bunga SBN 10 Y (%)	6,5 – 7,4	6,3 - 7,5
Nilai Tukar (Rp/ US$)	14.800 – 15.400	14.900 - 15.300
Harga Minyak/ ICP (USD/barel)	75 – 85	70 - 90
Lifting Minyak Mentah (ribu barel/hari)	592 – 651	606 - 684
Lifting Gas (BOE/hari)	1.007 – 1.058	1061 - 1151

Sumber: Kemenkeu, 2024

Sebagaimana yang termuat pada Tabel 3.2 di atas, secara umum indikator makro ekonomi pada *outlook* tahun 2024 dan 2025 diproyeksikan mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Laju inflasi relatif menurun pada tahun 2025 sekitar 1,5 – 3,5. Kemudian, nilai tukar rupiah bergerak dinamis pada kisaran Rp14.900 hingga Rp15.300 per USD pada tahun 2024.
Sedangkan harga minyak mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar 75-85 USD per barel menjadi 70 – 90 USD per barel.

Outlook pada tahun 2024 dan 2025, menunjukan bahwa secara umum indikator makro ekonomi mulai menunjukkan perbaikan setelah Covid-19. Tentunya, hal ini tidak lepas dari upaya menggiatkan kinerja perekonomian Indonesia agar dapat berjalan efektif. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama multilateral yang kuat untuk mengatasi dampak pandemi, termasuk membantu negara-negara yang mengalami kendala finansial/pendanaan, dan penyaluran bantuan ke negara-negara dengan kondisi kesehatan yang lemah. Selain kerjasama multilateral, stimulus dalam mitigasi ekonomi Indonesia juga dilakukan dari sisi fiskal maupun moneter.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

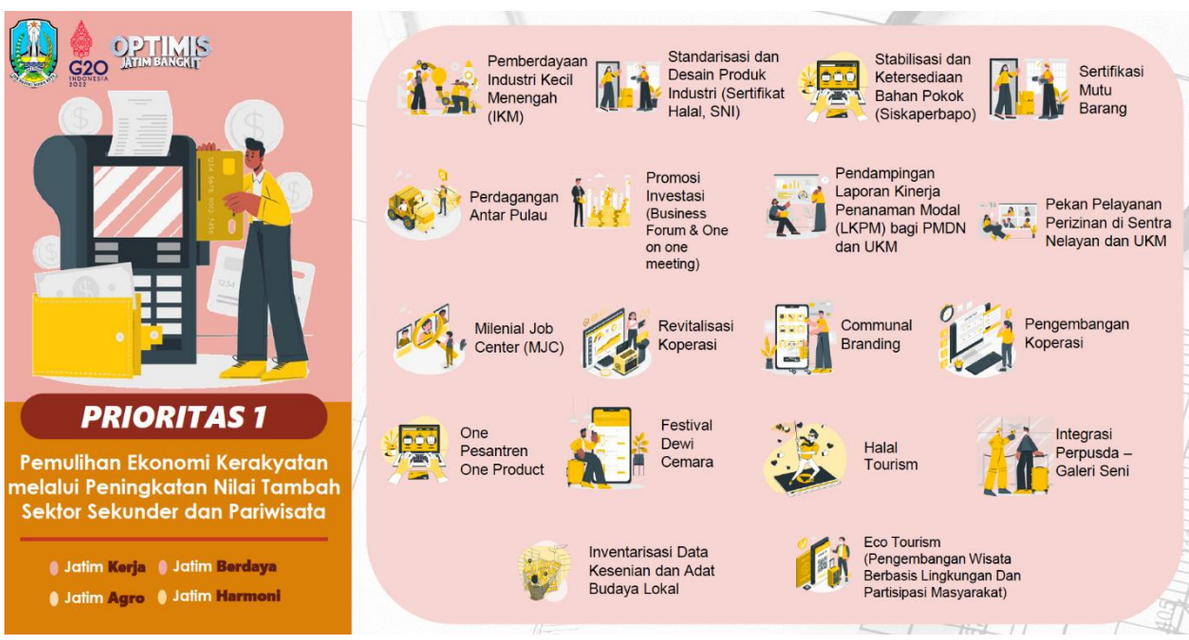
Peningkatan produktivitas menjadi kunci penting untuk tumbuh dalam jangka panjang. Ekonomi Indonesia sudah menunjukkan pemulihan dari sebagian indikator agregat, tetapi masih ada yang belum pulih akibat dampak luka perekonomian. Efek scars krisis Covid-19 ini sebagian besar mengena sisi produksi seperti penurunan produktivitas perekonomian, penurunan produktivitas tenaga kerja, dan penurunan produktivitas modal/*capital*. Produktivitas Indonesia menurun selama periode tahun 2010-2019 Sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia stagnan di 5%.



Sumber: Bappenas RI, 2023

Gambar 3. 2 Arah Kebijakan Ekonomi Indonesia 2025

Sebagaimana yang termuat pada Gambar 3.2 di atas, pada level Nasional, terdapat enam arah kebijakan ekonomi yang mengarah pada transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Peningkatan produktivitas yang pada tahun 2024 merupakan titik awal yang penting untuk transformasi ekonomi. Keenam startegi tersebut adalah SDM berdaya saing, produktivitas sektor ekonomi, ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik (*economic powerhouse*), dan pemindahan IKN.

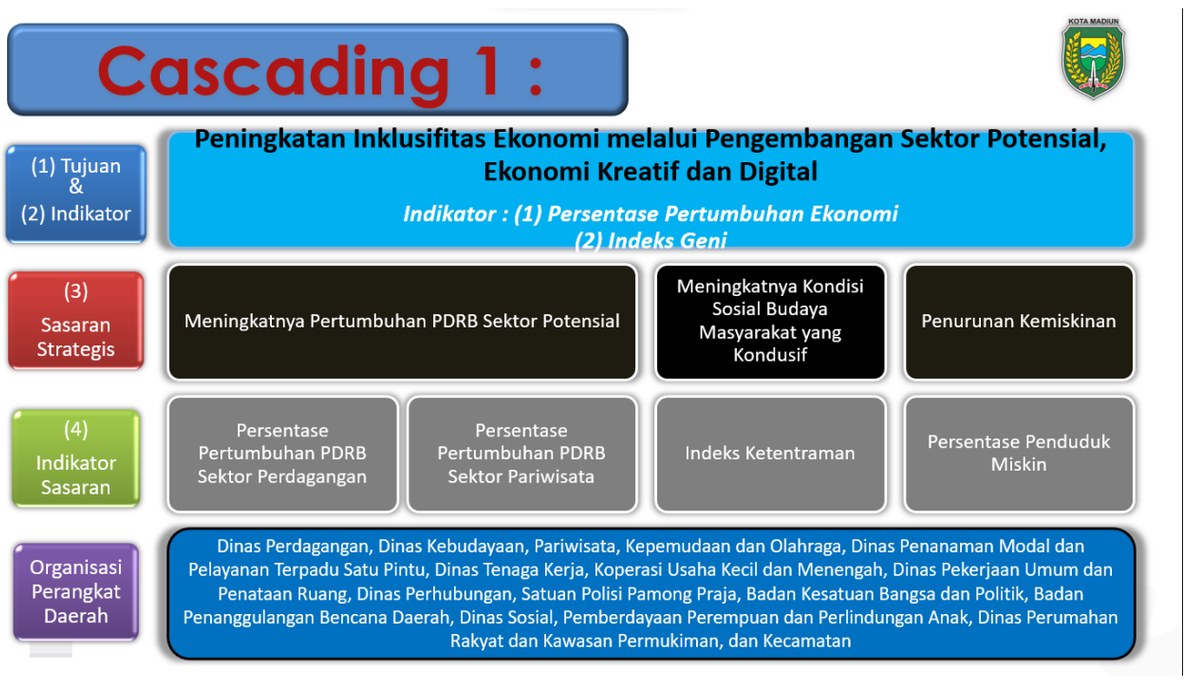


Sumber: Bappeda Jawa Timur, 2023

Gambar 3. 3 Arah Kebijakan Ekonomi Jawa Timur 2024

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Sebagaimana yang termuat pada Gambar 3.3 di atas, Provinsi Jawa Timur, arah kebijakan ekonomi terdapat pada prioritas pertama dari tujuh prioritas pembangunan Jawa Timur tahun 2024. Prioritas pertama Pembangunan Jawa Timur adalah pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata. Secara lebih detail, arah kebijakan ekonomi Jawa Timur diarahkan pada pemberdayaan Industri Kecil Menengah (IKM), standarisasi dan desain produk industri (Sertifikat Halal, SNI), Stabilisasi dan Ketersediaan Bahan Pokok (Siskaperbapo), sertifikasi mutu barang, perdagangan antar pulau, promosi investasi (*Business Forum and One on one meeting*), pendampingan Laporan Kinerja Penanaman Modal (LKPM) bagi PMDN dan UKM, Pekan Pelayanan Perizinan di sentra nelayan dan UKM, *Milenial Job Center* (MJC), revitalisasi koperasi, *Communal Branding*, pengembangan koperasi, *One Pesantren One Product*, *Halal Tourism*, integrasi Perpusda–Galeri Seni, inventarisasi data kesenian dan adat budaya lokal dan *Eco Tourism* (pengembangan wisata berbasis lingkungan dan partisipasi masyarakat).



Sumber: Bapppeda Kota Madiun,2024

Gambar 3. 4 Arah Kebijakan Ekonomi Dalam RPD Kota Madiun

Sebagaimana yang termuat pada Gambar 3.4 di atas, arah kebijakan ekonomi Kota Madiun dapat dilihat dari misi keempat dalam RPD Kota Madiun 2025 - 2026 yaitu Peningkatan inklusifitas ekonomi melalui pengembangan sektor potensial, ekonomi kreatif, dan digital.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Sasaran dari tujuan tersebut adalah menurunnya tingkat kemiskinan, meningkatnya kondisi sosial budaya masyarakat yang kondusif, dan meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Selanjutnya arah kebijakan ekonomi daerah Kota Madiun meliputi:

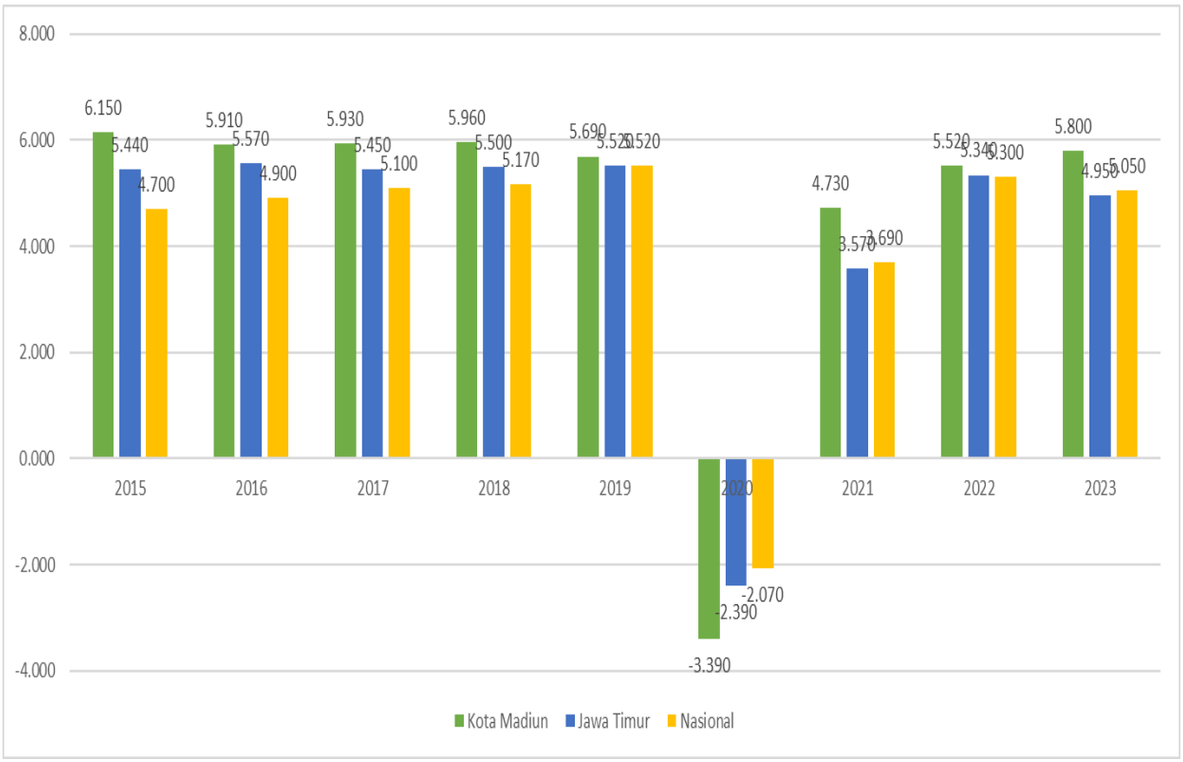
1. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif;
2. Peningkatan dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat;
3. Peningkatan Kesempatan Kerja, lapangan berusaha;
4. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang diindikasikan dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM);
5. Peningkatan kesetaraan dan pemberdayaan gender;
6. Penurunan tingkat kemiskinan baik nominal maupun ekstrem;
7. Peningkatan akses teknologi, informasi, dan komunikasi;
8. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik;
9. Peningkatan reformasi birokrasi;
10. Peningkatan nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Madiun;
11. Peningkatan infrastruktur dan kenyamanan kota; dan
12. Peningkatan kualitas lingkungan hidup.

3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2021 - 2023

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam dalam beberapa periode tertentu. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi maka semakin cepat proses pertambahan output wilayah sehingga prospek perkembangan wilayah semakin baik. Untuk Kota Madiun, pertumbuhan ekonomi dihitung dari pertumbuhan PDRB (ADHK) Tanpa Migas.

Pertumbuhan ekonomi dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 mengalami tren yang relatif stabil di angka 5,86%. Pada tahun 2017, pertumbuhan ekonomi Kota Madiun sebesar 5,93% mengalami sedikit peningkatan hingga 5,96% tahun 2018. Pada tahun 2020, sebagai dampak Covid-19, pertumbuhan ekonomi Kota Madiun mengalami kontraksi sebesar -3,39%. Setelah tahun 2020, pertumbuhan ekonomi menunjukan tren yang positif dari tahun 2021 dan 2022. Hal ini merupakan sinyal positif dari adanya pemulihan ekonomi pasca Covid-19.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



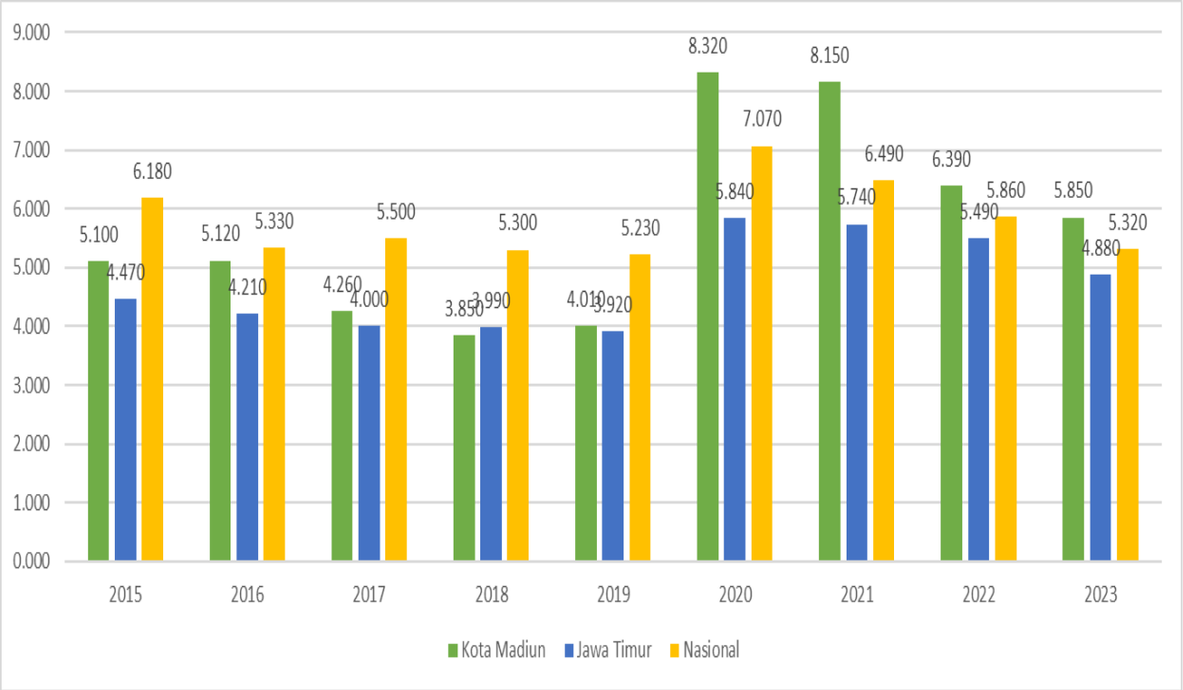
Sumber: BPS Kota Madiun, Tahun 2023

Gambar 3. 5 Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2016-2023

Sebagaimana yang termuat pada Gambar 3.5 di atas, sebelum terjadinya Covid-19, pertumbuhan ekonomi Kota Madiun selalu berada di atas pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dan Nasional. Pertumbuhan ekonomi Kota Madiun pada tahun 2016 sebesar 5,9% jauh di atas pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dan Nasional yang hanya sebesar 5,57% dan 4,9%.

Pada tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Kota Madiun mengalami penurunan hingga 5,69% namun masih di atas pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dan Nasional. Sebagai dampak pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi Kota Madiun mengalami kontraksi yang dalam yaitu sebesar -3,39% dibandingkan Jawa Timur dan Nasional dengan nilai pertumbuhan masing-masing sebesar -2,39% dan -2,07%. Penurunan yang sangat drastis pada pertumbuhan ekonomi sebagai dampak Covid-19, mengindikasikan bahwa kondisi fundamental makro ekonomi Kota Madiun masih rentan terhadap perubahan kondisi internal maupun eksternal. Pada tahun 2021 dan 2022, pertumbuhan ekonomi Kota Madiun mengalami peningkatan yang sangat tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 4,73% dan 5,52%. Nilai tersebut merupakan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Jawa Timur dan melebihi provinsi Jawa Timur dan Nasional.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



Sumber: BPS Kota Madiun, 2023

Gambar 3. 6 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Madiun, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2016-2023

Sebagaimana yang termuat pada Gambar 3.6 di atas, dalam empat tahun terakhir sebelum terjadinya pandemi Covid-19, TPT Kota Madiun selalu berada di bawah TPT nasional. Pada tahun 2016 BPS tidak merilis data TPT dikarenakan Indikator dihasilkan dari Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) Agustus - Tahun 2016 tidak cukup sampel untuk melakukan estimasi sampai level Kabupaten/Kota sebesar. Pada tahun 2017 TPT Kota Madiun 4,26% berada di bawah TPT Jawa Timur (4%) dan jauh dari TPT Nasional (5,5%). Pada tahun 2019, TPT Kota Madiun sedikit di atas Jawa Timur tapi jauh di bawah Nasional.

Namun, pandemi covid-19 tahun 2020 menyebabkan TPT Kota Madiun mengalami peningkatan sebesar 8,32%. Nilai tersebut di atas TPT Jawa Timur dan Nasional yang masing-masing sebesar 5,84% dan 7,07%.

Pada tahun 2021, TPT kota Madiun mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 8,15%. Nilai TPT tersebut lebih tinggi dibandingkan pada level provinsi Jawa Timur dan nasional. Sedangkan pada tahun 2022 TPT mengalami penurunan sebanyak 1,76 poin, dari 8,15 di tahun 2021 menjadi 6,39% di tahun 2022. Namun, pada tahun 2023 TPT Kota Madiun kembali mengalami penurunan meskipun angka ini masih tergolong tinggi dibanding TPT di tingkat Jawa Timur dan Nasional.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

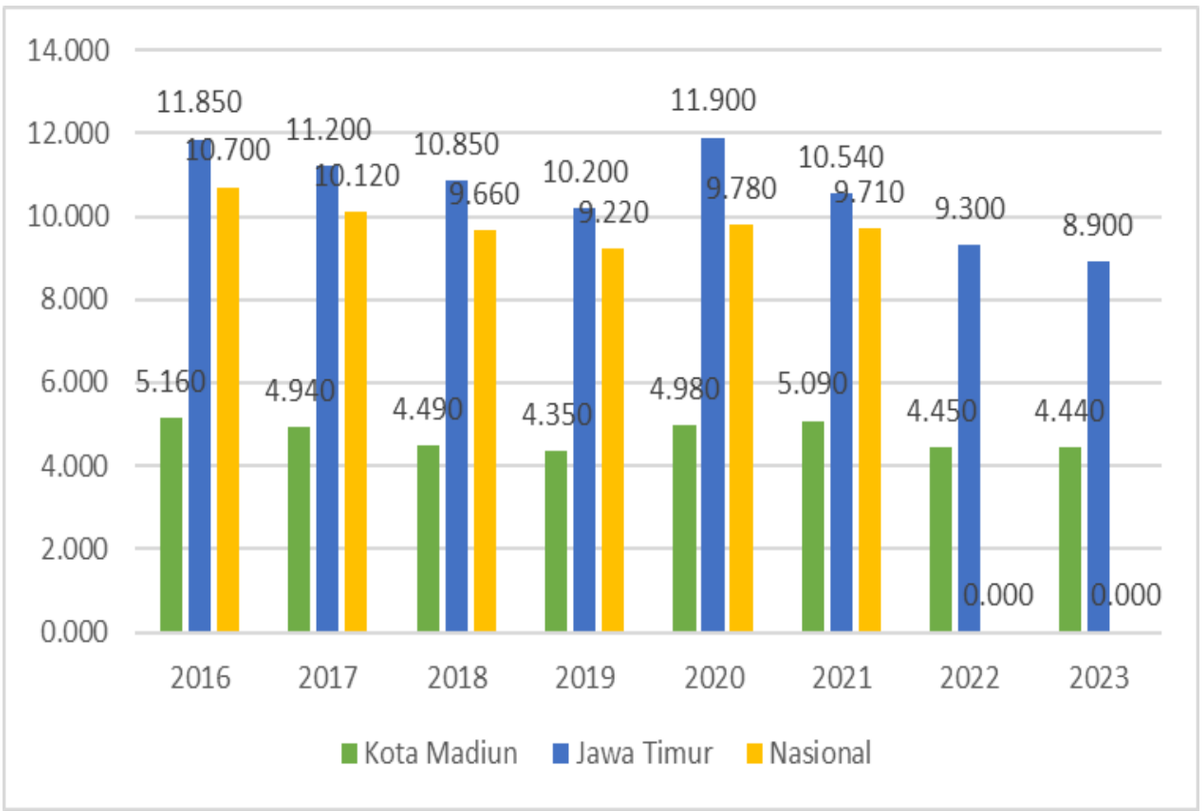


Sumber: BPS Kota Madiun

Gambar 3. 7 Gini Rasio Kota Madiun, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2016-2023

Sebagaimana yang termuat pada Gambar 3.7 di atas, keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya dilihat dari capaian pertumbuhan ekonomi saja namun juga dilihat dari aspek pemerataan pembangunan yang salah satunya ditunjukkan oleh gini ratio. Gini ratio Kota Madiun dalam tiga tahun terakhir selalu di bawah Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Pada Tahun 2017, gini rasio Kota Madiun Sebesar 0,36 lebih rendah dari pada Jawa Timur (0,44) dan Nasional (0,39). Ketika terjadi Pandemi Covid-19, ketimpangan pendapatan Kota Madiun justru mengalami kenaikan menjadi sebesar 0,392 pada tahun 2020. Pada tahun 2021, ketimpangan pendapatan mengalami sedikit penurunan menjadi sebesar 0,345. Nilai gini tersebut lebih baik dibandingkan di level provinsi Jawa Timur dan Nasional. Sementara pada tahun 2023, ketimpangan naik menjadi 0,42. Lebih tinggi dari pada ketimpangan Jawa Timur dan nasional. Meningkatnya ketimpangan di Kota Madiun, salah satunya disebabkan oleh peningkatan upah antar kelompok pendapatan yang tidak seimbang.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



Sumber: BPS Kota Madiun

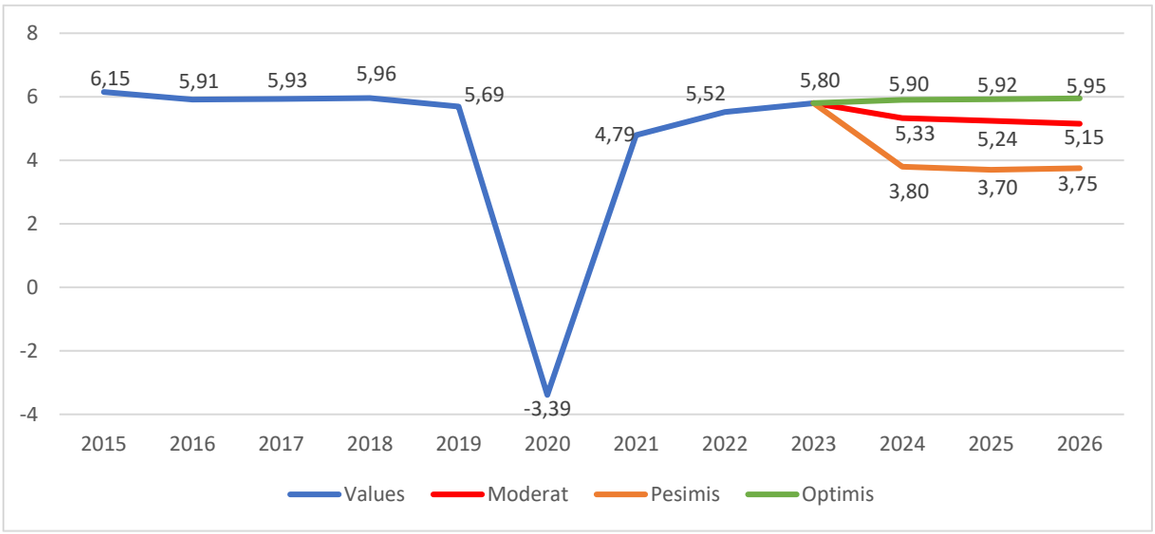
Gambar 3. 8 Angka Kemiskinan Kota Madiun

Gambar 3.8 di atas menunjukkan data angka kemiskinan Kota Madiun 2016 hingga tahun 2023. Kota Madiun memiliki angka kemiskinan yang lebih rendah daripada Jawa Timur maupun Nasional dari tahun 2016 hingga tahun 2023. Pada tahun 2016-2019, angka kemiskinan terus menurun dari yang awalnya sebesar 5,160 di tahun 2016 menjadi sebesar 4,350 di tahun 2019. Namun pada tahun 2020-2021, angka kemiskinan Kota Madiun terus meningkat hingga mencapai 5,090 di tahun 2021. Tahun 2022 seiring perekonomian pulih pasca Covid-19, angka kemiskinan turut menurun menjadi 4,450 di tahun 2022 dan 4,440 di tahun 2023.

3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Kota Madiun Tahun 2025 dan Tahun 2026

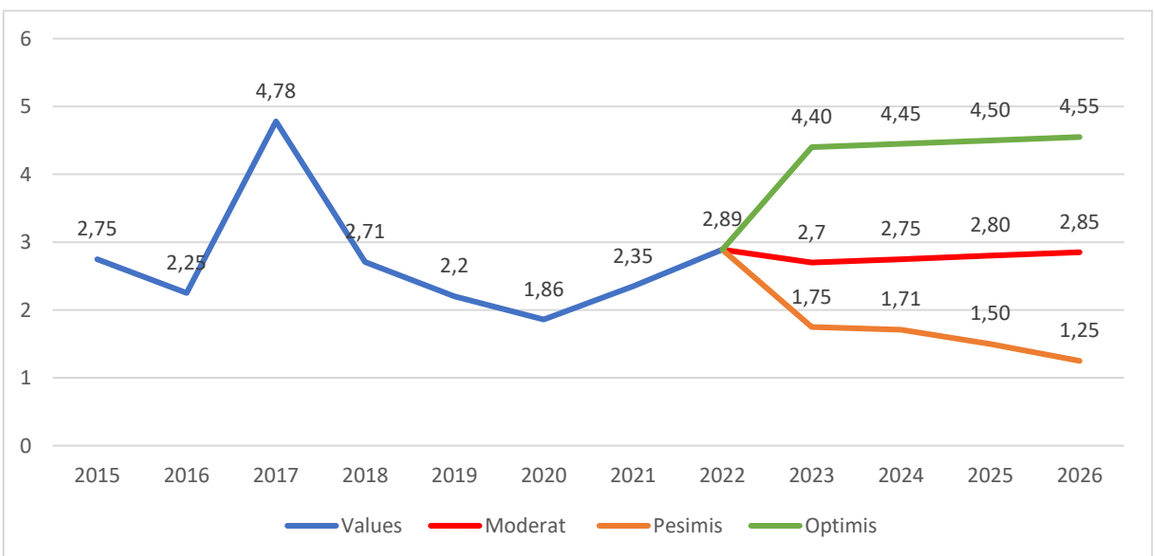
Pada tahun 2020 dan 2021, tantangan utama perekonomian Kota Madiun adalah penanganan pandemi Covid-19. Sedangkan pada tahun selanjutnya, tantangan terbesar adalah pemulihan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat sebagai dampak dari pandemi tersebut serta proyeksi resesi global tahun 2023. Hasil proyeksi dengan berbagai skenario yang digunakan, prospek perekonomian Kota Madiun menunjukkan kondisi ekonomi yang mengalami perbaikan pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2024.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



Gambar 3. 9
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun Tahun 2024 – 2026

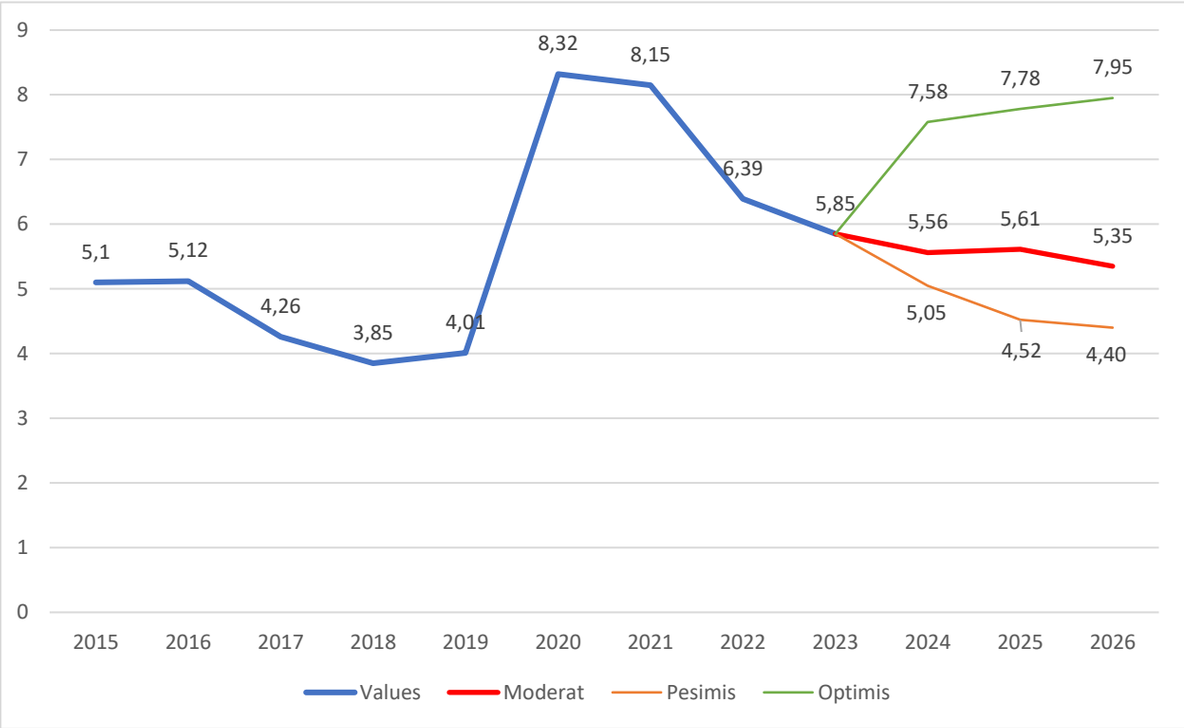
Sebagaimana yang termuat pada Gambar 3.9 di atas, dalam lima tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Kota Madiun cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2018 dan 2019 pertumbuhan ekonomi sedikit mengalami perlambatan dari 5,96 ke 5,69. Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi sebagai akibat adanya pandemi Covid-19 sehingga minus 3,39%. Pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan menjadi sebesar 4,79% dan semakin meningkat hingga 5,80% tahun 2023. Pada tahun 2025, dengan asumsi stabilitas ekonomi nasional dan regional terjaga, maka pertumbuhan ekonomi diproyeksikan meningkat menjadi 5,92% dengan skema optimis. Pada tahun 2026, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan berkontraksi, hingga mencapai angka 5,95%.



Gambar 3. 10 Proyeksi Inflasi Kota Madiun Tahun 2024 - 2026

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Sebagaimana yang termuat pada Gambar 3.10 di atas, Inflasi Kota Madiun dalam 5 (lima) tahun terakhir mengalami nilai yang cenderung menurun. Pada tahun 2018, inflasi sebasar 2,71% dan mengalami penurunan hingga sebesar 2,12% tahun 2022. Dampak Covid-19 terhadap inflasi tahun 2020 mengalami penurunan hingga 1,86%. Penurunan tersebut mengindikasikan kondisi daya beli masyarakat yang menurun sebagai dampak luas Covid-19. Pada tahun 2025, nilai inflasi di proyeksikan sebesar 2,80% dengan skema moderat atau pada kisaran rentang angka 3±1. Nilai inflasi yang stabil dalam perekonomian, jika nilainya berada pada kisaran angka 2 – 4%.

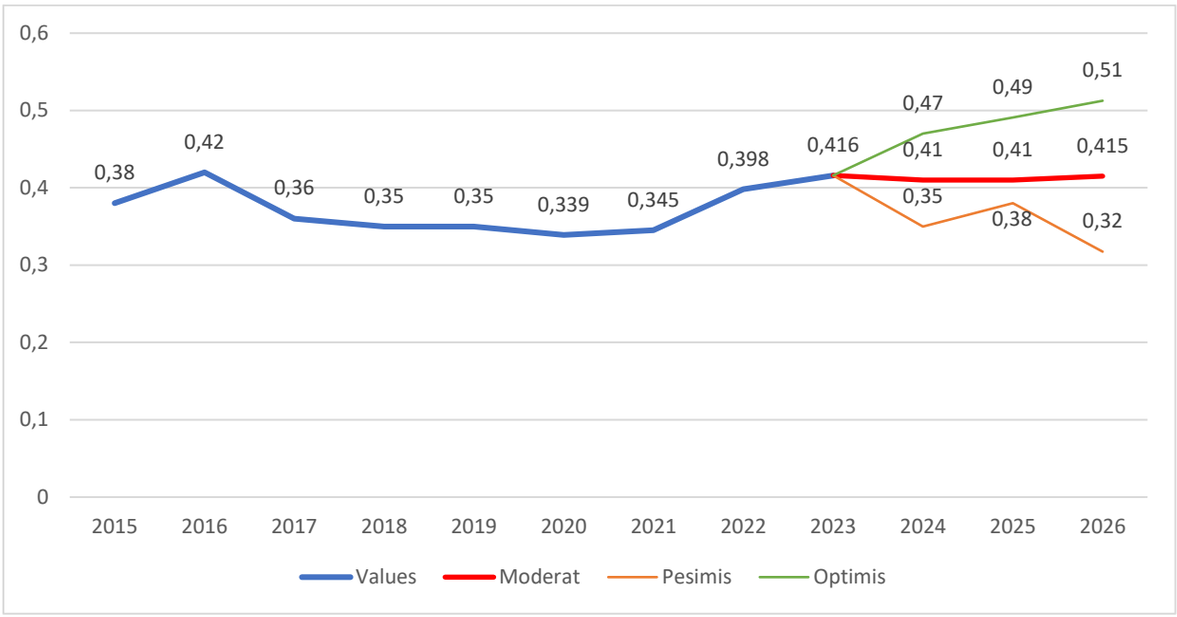


Gambar 3. 11 Proyeksi TPT Kota Madiun Tahun 2024 - 2026

Sebagaimana yang termuat pada Gambar 3.11 di atas, Seiring dengan penurunan pertumbuhan ekonomi tahun tahun 2020, TPT mengalami peningkatan. Pada tahun 2019, TPT Kota Madiun sebesar 4,01%. Kemudian, pada tahun 2020, TPT mengalami peningkatan sebesar 8,32%.

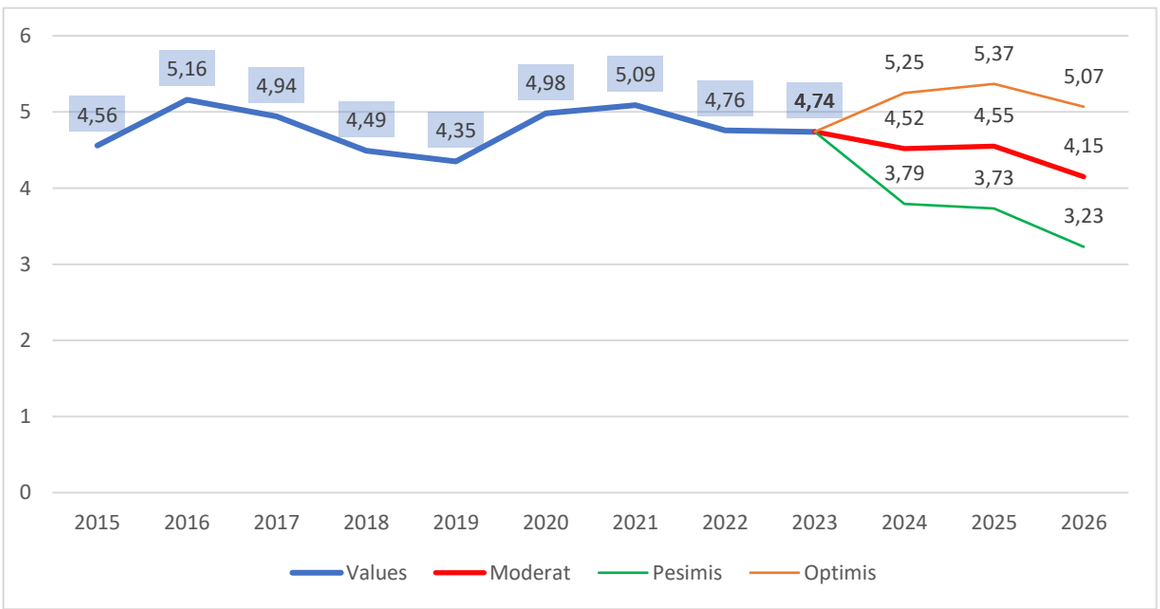
Sejalan dengan pemulihan ekonomi yang ditandai dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi tahun 2021, TPT masih tinggi meskipun mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu menjadi 8,15%. Pada tahun 2022, TPT kota Madiun mengalami penurunan hingga 6,39%. Dengan tren pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat, TPT di proyeksikan akan mengalami penurunan dari capaian tahun 2023 masing – masing sebesar 5,56% tahun 2024 dan 5,61% tahun 2025 dengan skema moderat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



Gambar 3. 12
Proyeksi Ketimpangan Pendapatan Kota Madiun Tahun 2024 – 2026

Sebagaimana yang termuat pada Gambar 3.12 di atas, Pelemahan pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya TPT sebagai dampak Covid-19, ketimpangan pendapatan tahun 2020 juga mengalami peningkatan hingga 0,392. Kemudian di tahun 2021, ketimpangan pendapatan mengalami penurunan hingga 0,345 namun kembali naik menjadi 0,398 pada tahun 2022. Pada tahun 2024 dan 2025, indek gini di proyeksikan mengalami penurunan masing – masing sebesar 0,35 dan 0,38 dari capaian tahun 2023 sebesar 0,416 dengan skema pesimis. Nilai indek di atas 0,30 mengindikasikan ketimpangan pendapatan antar kelompok masyarakat berkategori sedang.



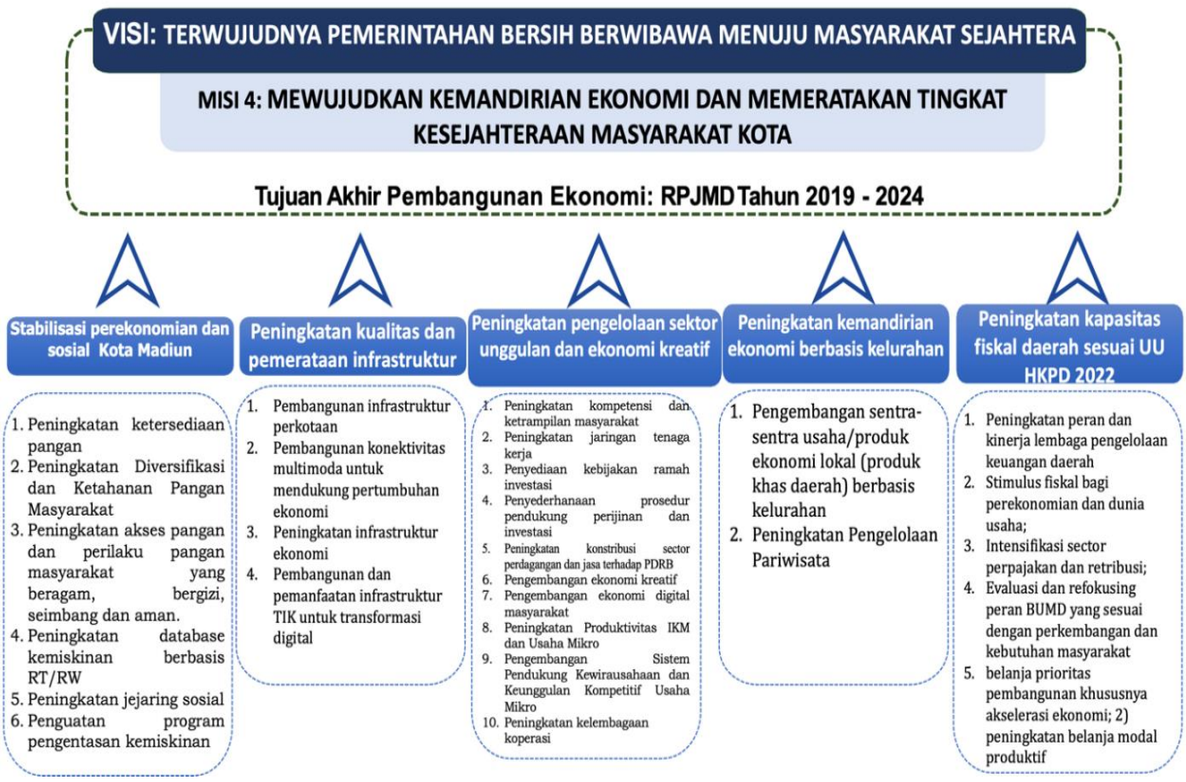
Gambar 3. 13 Proyeksi Tingkat Kemiskinan Kota Madiun Tahun 2024 - 2026

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Sebagaimana yang termuat pada Gambar 3.13 di atas, tingkat kemiskinan di Kota Madiun sejak tahun 2016-2019 terus mengalami penurunan. Pada periode tersebut, tingkat kemiskinan mengalami penurunan yang relatif cepat. Pada tahun 2020, tingkat kemiskinan mengalami peningkatan sebagai dampak pandemi Covid-19 yaitu sebesar 4,98%. Pada tahun 2021, dengan masih terjadinya eskalasi pandemi, tingkat kemiskinan sedikit mengalami peningkatan menjadi sebesar 5,09%. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat, pada tahun 2023, kemiskinan mengalami penurunan hingga 4,74%. Dengan asumsi, perekonomian kota Madiun terus mengalami peningkatan yang didukung oleh tingkat inflasi yang terkendali maka tingkat kemiskinan pada tahun 2025 di proyeksikan mengalami penurunan dengan nilai sebesar 4,55%.

3.1.3 Arah Kebijakan Ekonomi Tahun 2025

Arah kebijakan ekonomi Kota Madiun tahun 2025 mengikuti kebijakan umum yang dilakukan oleh pemerintah Pusat, Jawa Timur dan RPJMD Kota Madiun. Tahun 2024, kebijakan ekonomi diarahkan pada stabilisasi kondisi sosial dan ekonomi pasca Covid-19 meliputi tata kelola pemerintahan, penanganan kesehatan, penanganan sosial dan peningkatan infrastruktur untuk stabilisasi kondisi ekonomi. Dengan kebijakan tersebut, perekonomian Kota Madiun diharapkan mengalami peningkatan minimal seperti sebelum pandemi Covid.



Gambar 3. 14 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Pasca Covid-19 Kota Madiun

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Sebagaimana data yang termuat pada Gambar 3.14 diatas, selanjutnya dapat diuraikan dalam materi sebagai berikut:

Arah kebijakan ekonomi difokuskan pada penguatan pengelolaan potensi ekonomi daerah secara optimal. Beberapa kebijakan tersebut fokus pada, peningkatan infrastruktur daerah, dan penguatan kondisi ekonomi daerah. Secara rinci, arah kebijakan Kota Madiun Tahun 2025 berdasarkan kondisi eksisting dan permasalahan pembangunan antara lain:

1. Meningkatkan pengelolaan potensi ekonomi daerah secara optimal

   Orientasi pergerakan ekonomi difokuskan pada pengelolaan potensi ekonomi daerah yang optimal. Dalam rangka percepatan perekonomian, maka difokuskan pada sektor unggulan dan potensial, khususnya sektor pertanian dan ketahanan pangan, industri berbasis sumber daya lokal, dan pariwisata untuk mendorong revitalisasi pendapatan asli daerah. Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi sebesar 4,79% dan merupakan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Jawa Timur. Pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi kembali meningkat sebesar 5,8%. Pertumbuhan ini diharapkan dapat disertai dengan pemerataan pendapatan pada semua lapisan masyarakat (pertumbuhan inklusif). Inflasi daerah dijaga pada posisi 3–5%, inflasi yang terkendali diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat. Disisi lain, pertumbuhan ekonomi juga memperhatikan keberlanjutan atau ekonomi hijau, sehingga pengembangan sektor-sektor unggulan menggunakan pendekatan kelestarian lingkungan. Dengan demikian, optimalisasi potensi ekonomi daerah tidak hanya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang.

2. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial

   Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh warga kota memiliki akses yang mudah dan merata terhadap layanan pendidikan yang berkualitas, fasilitas kesehatan yang memadai, dan pelayanan sosial yang efektif. Untuk mencapai tujuan ini, alokasi anggaran akan diarahkan pada pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pendidikan, seperti sekolah dan pusat pelatihan, serta peningkatan kompetensi tenaga pendidik. Di sektor kesehatan, kebijakan akan mencakup peningkatan fasilitas kesehatan, penyediaan alat medis modern, dan program kesehatan preventif.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Dalam hal pelayanan sosial, akan dilakukan penguatan sistem jaminan sosial, peningkatan pelayanan untuk kelompok rentan, serta pengembangan program pemberdayaan masyarakat. Dengan langkah-langkah ini, Kota Madiun berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan potensi individu, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

3. Mewujudkan pemerintahan yang baik dalam situasi yang tertib, aman, dan damai

   Fokus utama kebijakan ini adalah peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan melalui transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, upaya untuk menjaga keamanan dan ketertiban kota akan diperkuat melalui kolaborasi dengan aparat keamanan dan penerapan teknologi informasi untuk pengawasan yang lebih efektif. Lingkungan yang aman dan damai diharapkan dapat mendorong investasi, meningkatkan kepercayaan publik, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ini juga mencakup program-program untuk memperkuat layanan publik, memperbaiki infrastruktur kota, dan memastikan bahwa semua kebijakan pembangunan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, Kota Madiun dapat mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan daya saing di tingkat regional maupun nasional.

4. Meningkatkan kerja sama antar pemangku kepentingan pembangunan, baik di tingkat daerah, nasional, maupun internasional

   Hal ini bertujuan untuk menciptakan sinergi yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Di tingkat daerah, ini mencakup kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah kota dengan berbagai organisasi lokal untuk mengidentifikasi dan memanfaatkan potensi ekonomi setempat. Di tingkat nasional, kebijakan ini mendorong kemitraan dengan pemerintah pusat dan provinsi serta perusahaan nasional untuk membawa investasi, teknologi, dan praktik terbaik ke Kota Madiun. Sementara itu, di tingkat internasional, kebijakan ini mengarahkan pada pembentukan hubungan dengan investor asing, lembaga internasional, dan kota-kota mitra di luar negeri untuk meningkatkan aliran modal, teknologi, dan pengetahuan.

   Dengan memperkuat kerja sama di semua tingkatan ini, Kota Madiun diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonominya, meningkatkan daya saing, dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi inovasi dan pembangunan berkelanjutan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

5. Melestarikan fungsi lingkungan hidup dengan menerapkan prinsip-prinsip pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan dengan melibatkan partisipasi masyarakat

   Kebijakan ini mencakup berbagai langkah strategis, seperti penguatan regulasi dan pengawasan terhadap kegiatan industri agar memenuhi standar lingkungan, serta penerapan teknologi ramah lingkungan dalam proses produksi. Selain itu, program edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian lingkungan juga menjadi prioritas, guna meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam berbagai kegiatan pelestarian lingkungan, seperti penghijauan, pengelolaan sampah, dan konservasi air. Penanggulangan kerusakan lingkungan dilakukan melalui upaya rehabilitasi lahan kritis dan pemulihan ekosistem yang terdegradasi, sementara pencegahan kerusakan lebih lanjut dicapai dengan merancang dan menerapkan rencana tata ruang yang berkelanjutan. Melalui kebijakan ini, Kota Madiun diharapkan mampu menjaga kualitas lingkungan hidup, mendukung kesejahteraan masyarakat, serta menciptakan kondisi yang kondusif bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah Kota Madiun mencakup arah kebijakan dalam pendapatan, penetapan anggaran belanja, dan mobilisasi pembiayaan. Penetapan kebijakan keuangan daerah tentunya didasarkan pada kondisi perekonomian Kota Madiun dan penyesuaian terhadap kebijakan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan berisi proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan. Pendapatan yang dimaksud terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. PAD terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah.

Pendapatan transfer bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) baik DAK Fisik maupun DAK Non Fisik. Selanjutnya pendapatan yang sah terdiri dari Hibah, Bagi Hasil Pajak dari Provinsi atau Pemda Lainnya, Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda lainnya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

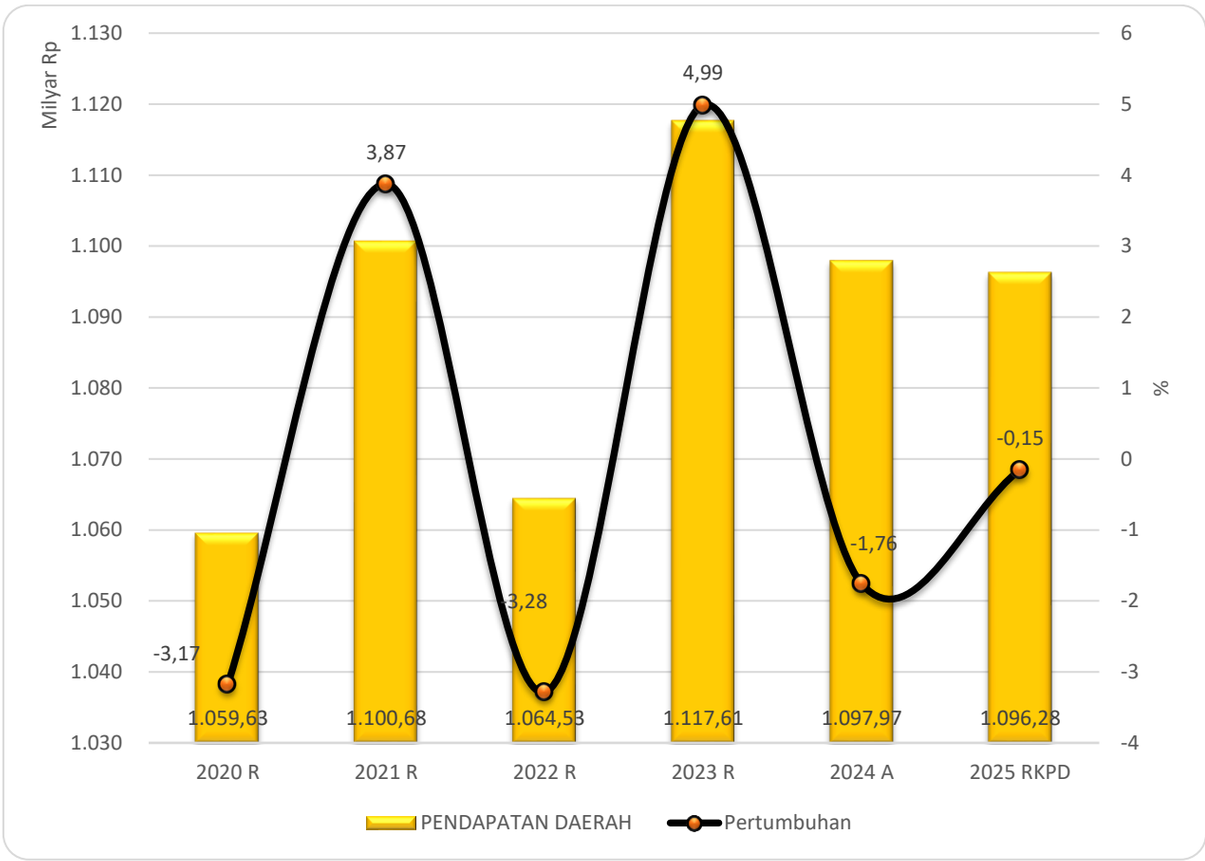
Proyeksi keuangan daerah didasarkan pada data masa lalu, baik pertumbuhan, nilai nominal, kebutuhan masyarakat, potensi penerimaan dan beberapa kondisi yang mempengaruhi. Proyeksi pendapatan daerah didasarkan pada potensi pendapatan daerah, baik PAD, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Selanjutnya, proyeksi belanja daerah memperhatikan dan menyesuaikan dengan kemampuan pendanaan daerah serta kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat dapat diidentifikasi dari hasil musrenbang, yang dilakukan mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan sampai dengan Kota. Proyeksi keuangan daerah Kota Madiun Tahun 2025 memperhatikan beberapa asumsi sebagai berikut:

Tabel 3. 3 Asumsi Makro RKPD Kota Madiun 2025

No	Indikator Makro	Satuan	Target RKP 2024	Target RKPD Kota Madiun 2025
1	Laju pertumbuhan Ekonomi	%	5,3 – 5,7	5,92
2	Inflasi	%	1,5 – 3,5	3 ± 1
3	Tingkat kemiskinan	%	8,50 – 8,90	4,58
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,75 – 4,46	5,61
5	Indeks Pembangunan Manusia	-	73,67 – 74,15	84,10
6	Indeks Gini	-	0,363 – 0,364	0,385

Sebagaimana yang termuat pada tabel 3.3 di atas, asumsi didasarkan pada rentang skenario pesimis ke optimis seperti yang sudah dijelaskan dalam sub bab 3.1.2. Selain asumsi makro di atas, beberapa asumsi lainnya adalah tingkat inflasi kisaran 3 ± 1%; Pendapatan Transfer Tahun 2025 diproyeksikan akan mengalami penurunan sebesar 1,76%; dan target anggaran tahun 2025 diproyeksikan memiliki SiLPA Rp 0.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



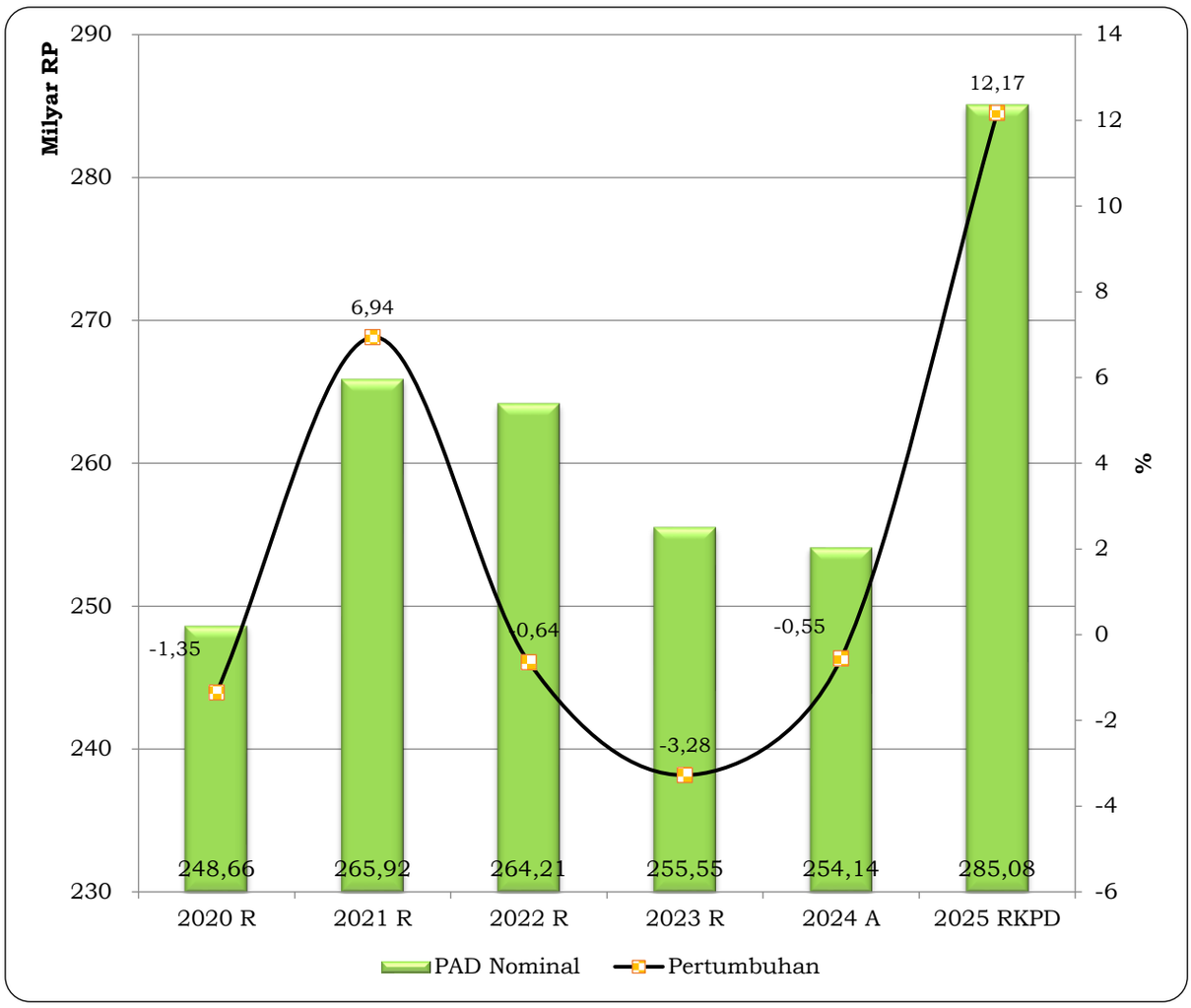
Sumber: BKAD Kota Madiun, 2024

Gambar 3. 15 Perkembangan Pendapatan Daerah Kota Madiun Tahun 2020–2025

Sebagaimana yang termuat pada gambar 3.15 di atas, Pertumbuhan nominal pendapatan Kota Madiun mulai tahun 2020 menunjukan tren yang semakin meningkat. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan dan naik kembali pada tahun 2021 menunjukan tren yang menurun. Pada tahun tahun 2020, realisasi pendapatan daerah pertumbuhannya menunjukkan penurunan sebesar 3,17% dan meningkat kembali menjadi 3,87% tahun 2021 dan mengalami penurunan hingga minus 3,28% pada tahun 2022. Selanjutnya, pada Tahun 2023, realisasi anggaran pendapatan daerah meningkat 4.99%. Pada tahun 2024, anggaran pendapatan daerah diproyeksikan sedikit mengalami penurunan 1,76%

Pada tahun 2025, pertumbuhan pendapatan daerah diproyeksikan meningkat menjadi sebesar 2,94%. Apabila berdasarkan tren data pertumbuhan pendapatan daerah selama 4 (empat) tahun terakhir, maka pertumbuhan pendapatan diproyeksi secara lebih optimistik di tingkat 6,81%. Namun pada tahun 2026, pendapatan daerah diproyeksikan mengalami pertumbuhan yang menurun yaitu sebesar 2,29%.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

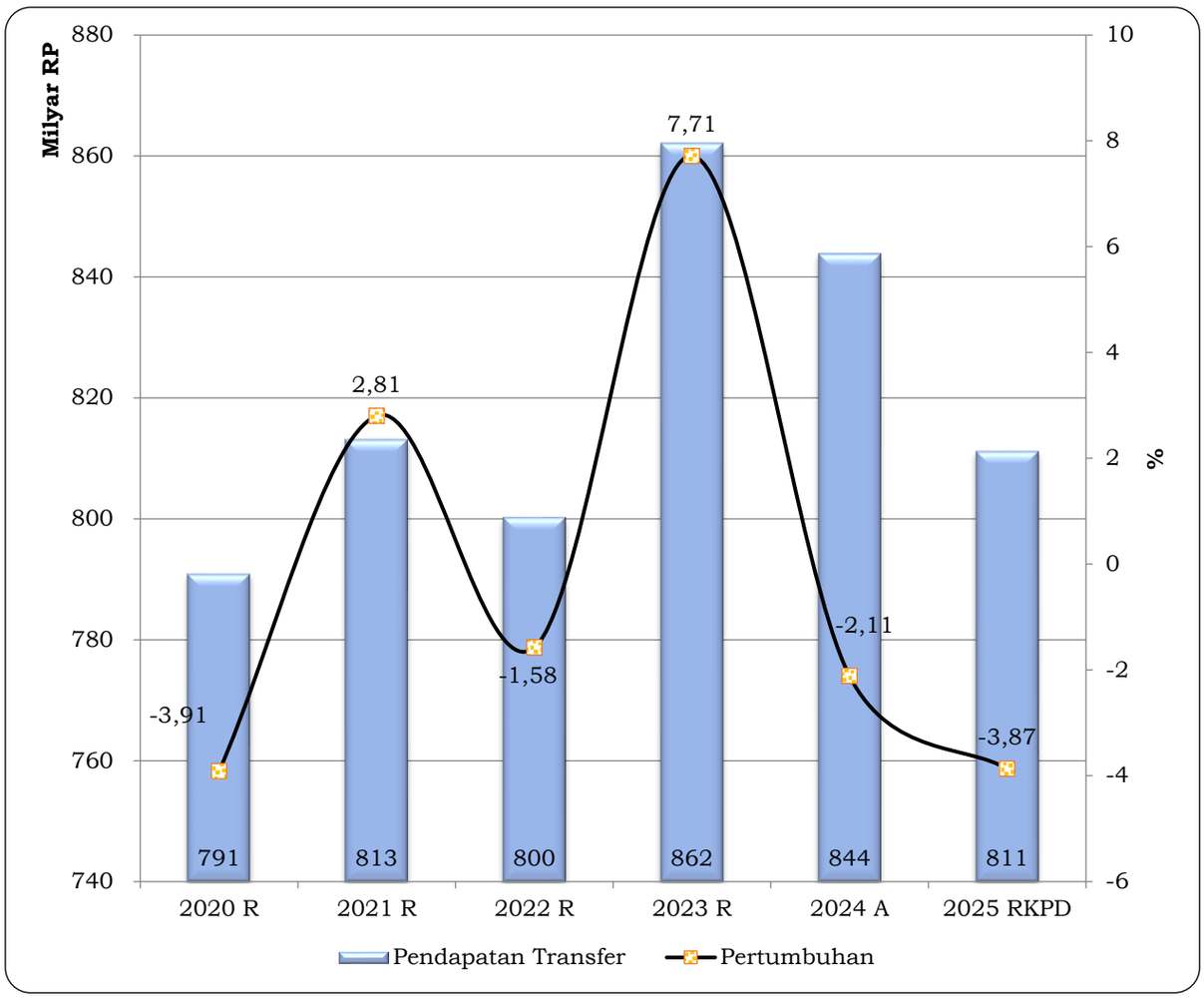


Sumber: BKAD Kota Madiun, 2024

Gambar 3. 16 Perkembangan PAD Kota Madiun Tahun 2020–2026

Sebagaimana yang termuat pada Gambar 3.16 di atas, PAD tahun 2021 mengalami pertumbuhan positif dengan nominal tertinggi dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Pada tahun 2022, pertumbuhan PAD di Kota Madiun mengalami penurunan hingga minus 0,64%. Sedangkan pada tahun 2023, PAD dalam APBD mengalami penurunan baik dari sisi pertumbuhan maupun nominal dibandingkan tahun 2022 dengan nilai masing-masing minus 3,28% dan 235,55 miliar. Pada tahun 2024, PAD diproyeksikan mengalami penurunan hingga minus 5,49%. Pendapatan Asli Daerah yang diproyeksikan mulai mengalami peningkatan tahun 2025 adalah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah karena adanya opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. sehingga pada tahun 2025 PAD dapat diproyeksikan secara optimistik mengalami peningkatan hingga 12,17%. Selanjutnya, perkembangan pendapatan transfer dapat dilihat dalam gambar berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

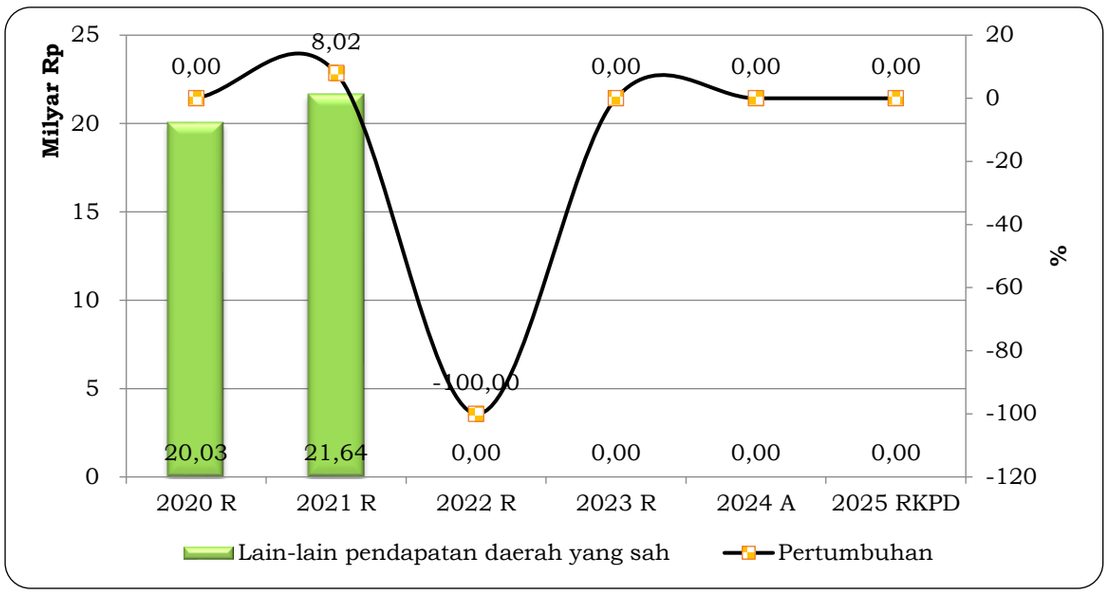


Sumber: BKAD Kota Madiun, 2024

Gambar 3. 17 Perkembangan Pendapatan Transfer Kota Madiun Tahun 2020–2025

Sebagaimana yang termuat pada Gambar 3.17 di atas, Secara nominal, realisasi dan pertumbuhan pendapatan transfer sampai dengan tahun 2022 menunjukan nilai yang fluktuatif. Pada tahun 2020 pertumbuhan transfer mengalami penurunan hingga minus 3,91% pada tahun 2020. Pada tahun 2021, pertumbuhan pendapatan transfer mengalami peningkatan hingga 2,81%, akan tetapi kembali menurun sebesar minus 2,04% pada tahun 2022. Tahun 2023 pertumbuhan pendapatan transfer dalam APBD kembali meningkat menjadi 7,71%% dan diproyeksikan turun kembali pada tahun 2024 menjadi 2,11%. Pada tahun 2025, pendapatan transfer diproyeksikan mengalami penurunan kembali sebesar 3.87% dibandingkan tahun sebelumnya Namun apabila berdasarkan tren data pertumbuhan pendapatan transfer, maka secara lebih optimistik pertumbuhan pendapatan transfer dapat diproyeksi di tingkat 6,10%. Selanjutnya, perkembangan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagai berikut:

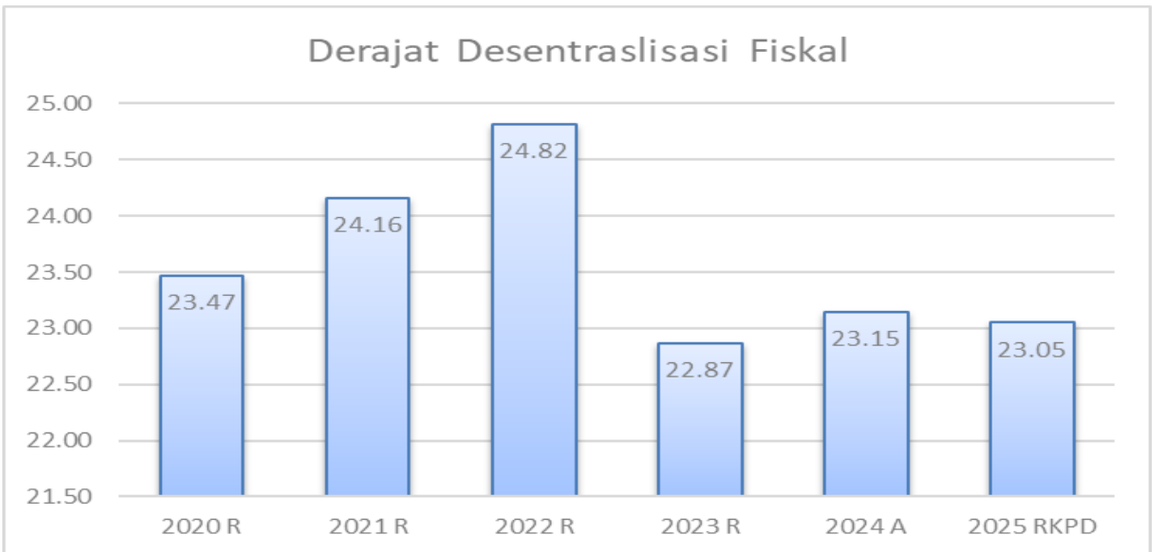
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



Sumber: BKAD Kota Madiun, 2024

Gambar 3. 18 Perkembangan Pertumbuhan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Madiun Tahun 2020–2026

Sebagaimana yang termuat pada Gambar 3.18 di atas, selama periode tahun 2019 dan 2020, lain-lain pendapatan daerah yang sah secara nominal mengalami sedikit peningkatan. Pada tahun 2019, realisasinya sebesar Rp. 19,19 miliar dan meningkat menjadi Rp. 20,03 miliar tahun 2020. Pada tahun 2021, realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp. 21,64 miliar dengan pertumbuhan sebesar 8,02%. Sedangkan pada realisasi 2022, 2023 dan APBD 2024, RKPD 2025 nilai pendapatan ini diproyeksikan nol atau tidak terdapat pendapatan daerah dari komponen ini khususnya dari sub komponen hibah. Berdasarkan proyeksi masing-masing komponen pendapatan daerah, maka perkembangan Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) dapat dilihat dalam gambar berikut:



Sumber: BKAD Kota Madiun, 2024

Gambar 3. 19 Perkembangan Derajat Desentralisasi Fiskal (dalam%) Kota Madiun Tahun 2020–2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Sebagaimana yang termuat pada Gambar 3.19 di atas, Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Madiun sampai dengan Tahun 2022 mengalami peningkatan dan merupakan nilai tertinggi dalam dua tahun terakhir. Namun dalam APBD 2023, derajat desentralisasi fiskal mengalami penurunan menjadi 22,87. Pada tahun 2025, derajat desentralisasi fiskal di proyeksikan akan sedikit mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024 yaitu menjadi sebesar 23,05. Realisasi Pendapatan Kota Madiun Tahun dari 2020 sampai dengan 2023, APBD 2024 dan proyeksi Tahun 2025, dapat dilihat pada tabel berikut:

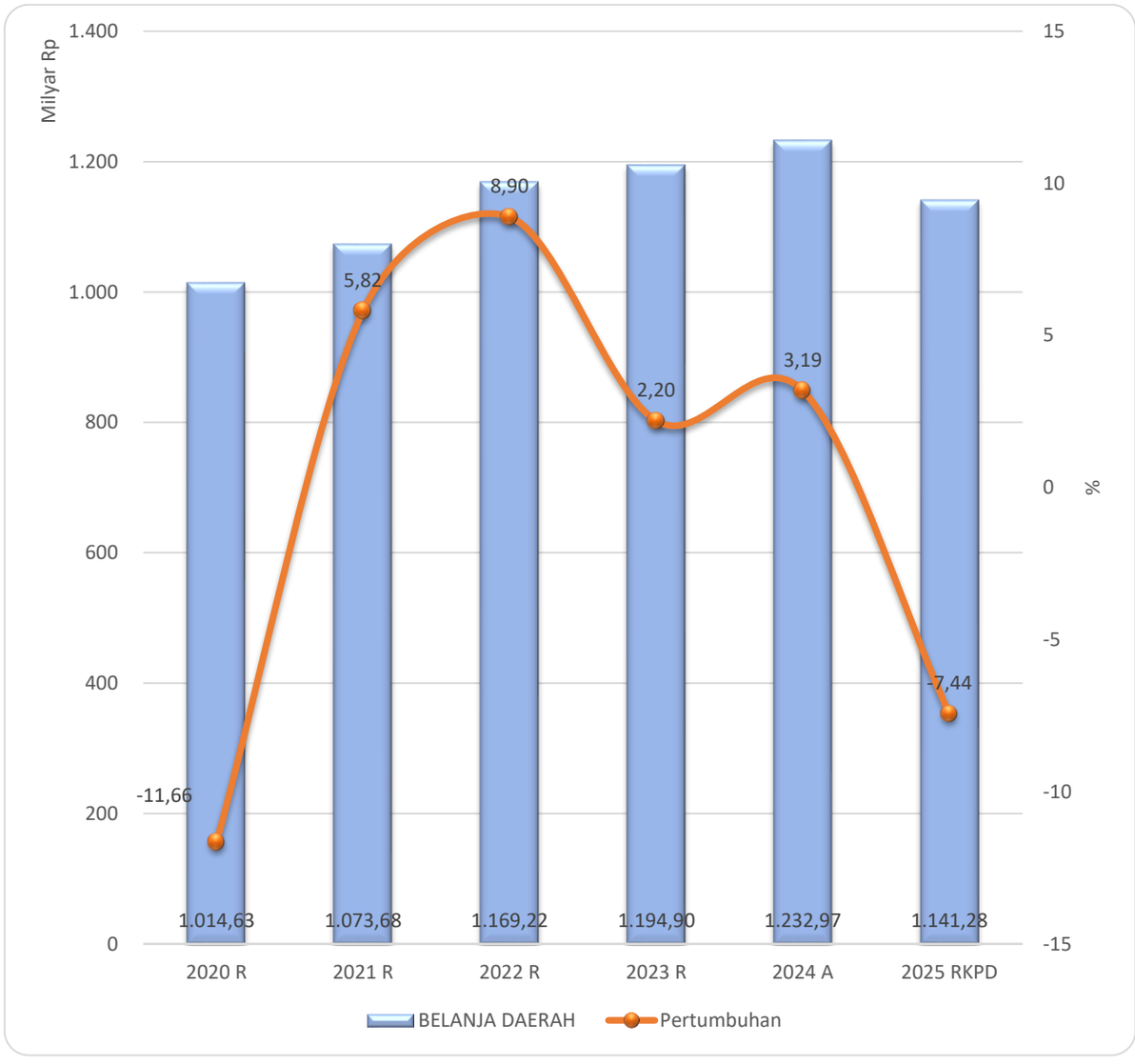
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Tabel 3. 4 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kota Madiun Tahun 2020 s.d Tahun 2025

	Uraian	JUMLAH					
		REALISASI 2020 (Rp)	REALISASI 2021 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	ANGGARAN 2024 (Rp)	TARGET 2025 (Rp)
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	248.656.192.759,32	265,920,295,216.86	264,207,393,517.55	255,551,933,408.67	254,141,714,400.00	285,083,304,225,00
1.1.1.	Pajak daerah	90.286.840.987,07	87,874,777,059.32	106,165,312,122.76	113,514,116,369.67	102,506,770,000.00	138,994,500,000,00
1.1.2.	Retribusi daerah	15.291.324.019,00	17,463,721,195.00	21,380,512,837.00	22,551,072,553.00	18,012,701,000.00	130.418.687.940,00
1.1.3.	Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	15.216.268.562,40	16,199,882,796.95	15,595,752,355.97	14,983,008,032.73	16,029,310,600.00	14.127.425.985,00
1.1.4.	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	127.861.759.190,85	144,381,914,165.59	121,065,816,201.82	104,503,736,453.27	117,592,932,800.00	1.542.690.300,00
1.2.	Pendapatan Transfer	790,939,408,652.00	813,126,832,914.00	796,504,081,567.00	862,057,636,824.80	843,825,317,600.00	811,196,220,000.00
1.2.1	Pendapatan Transfer Pusat	705.872.676.797,00	709,162,104,477.00	697,480,692,487.00	740,785,552,012.80	747,542,927,000.00	744,337,150,000.00
1.2.1.01	*Dana Perimbangan*	705.872.676.797,00	656,137,241,477.00	668,609,902,487.00	666,070,630,012.80	714,945,228,000.00	711,739,451,000.00
1.2.1.01.01.1	*Dana bagi hasil pajak*	34.444.290.949,20	33,962,127,578.00	29,804,646,600.00	24,092,136,000.00	24,441,861,000.00	24,441,861,000.00
1.2.1.01.01.2	*Dana bagi hasil bukan pajak*	51.666.436.423,80	63,851,956,219.00	82,308,678,000.00	36,475,210,342.00	26,554,349,000.00	26,554,349,000.00
1.2.1.01.01.3	*Dana Bagi hasil cukai*	-	19,833,010,286.00	21,802,781,361.00	35,959,029,435.00	29,607,909,000.00	26,402,123,000.00
1.2.1.01.01.4	*Dana Alokasi Umum*	473.852.439.000,00	465,495,171,000.00	463,486,748,121.00	487,141,770,396.00	510,653,158,000.00	510,653,158,000.00
1.2.1.01.01.5	*Dana Alokasi khusus*	72.596.481.424,00	72,994,976,394.00	71,207,048,405.00	82,402,483,839.80	123,687,951,000.00	123,687,960,000.00
1.2.1.01.02	Dana Insentif Daerah	73.313.029.000,00	53,024,863,000.00	28,870,790,000.00	74,714,922,000.00	32,597,699,000.00	32,597,699,000.00
1.2.1.01.03	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	85.066.731.855,00	103,964,728,437.00	99,023,389,080.00	121,272,084,812.00	96,282,390,600.00	66,859,070,000.00
1.2.2.01	Pendapatan Bagi Hasil	84.049.652.855,00	103,062,649,437.00	98,284,006,080.00	120,565,582,200.00	95,663,488,000.00	66,189,020,000.00
1.2.2.02	Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya	1.017.079.000,00	902,079,000.00	739,383,000.00	706,502,612.00	618,902,600.00	670,050,000.00
1.3.	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	20.029.980.000,00	21.635.701.000,00	21,635,701,000.00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	Hibah	20.029.980.000,00	21.635.701.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	Dana darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.059.625.581.411,32	1,100,682,829,130.86	1,082,347,176,084.55	1,117,609,570,233.47	1,097,967,032,000.00	1,096,279,524,225.00

Sumber: BKAD Kota Madiun, 2024

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

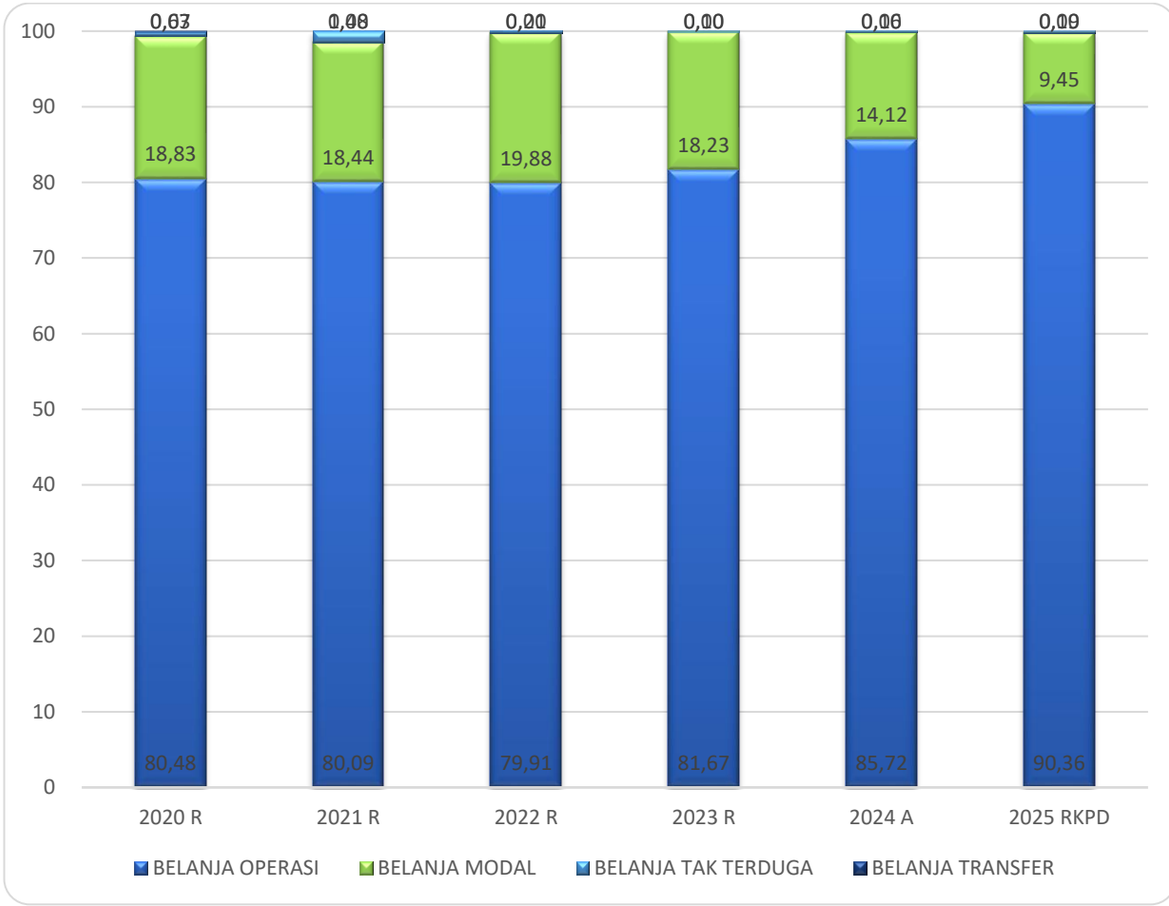


Sumber: BKAD Kota Madiun, 2024

Gambar 3. 20 Perkembangan Pertumbuhan Belanja Daerah Kota Madiun Tahun 2020–2025

Sebagaimana yang termuat pada Gambar 3.20 diatas, Pertumbuhan belanja daerah sejak pandemi Covid-19 menunjukan tren yang semakin meningkat. Pada tahun 2021, pertumbuhan belanja daerah sebesar 5,82%. Pertumbuhan tersebut menurun hingga 2,20% pada APBD tahun 2023. Pada Tahun 2024 pertumbuhan belanja daerah diproyeksikan mengalami peningkatan hingga mencapai 3.19%. Pada tahun 2024, belanja daerah di proyeksikan sebesar Rp 1,232 triliun mengalami peningkatan sebesar 38 miliar di bandingkan APBD 2023. Namun menindaklanjuti adanya proyeksi optimis dari sisi pendapatan pada tahun 2024 serta untuk mewujudkan optimalisasi pembangunan daerah, belanja daerah pada tahun 2025 diproyeksikan mampu mencapai Rp 1,141 triliun. Dengan demikian, beberapa pos belanja, baik belanja operasi, modal, dan belanja tidak terduga akan mengalami perubahan dari tahun sebelumnya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

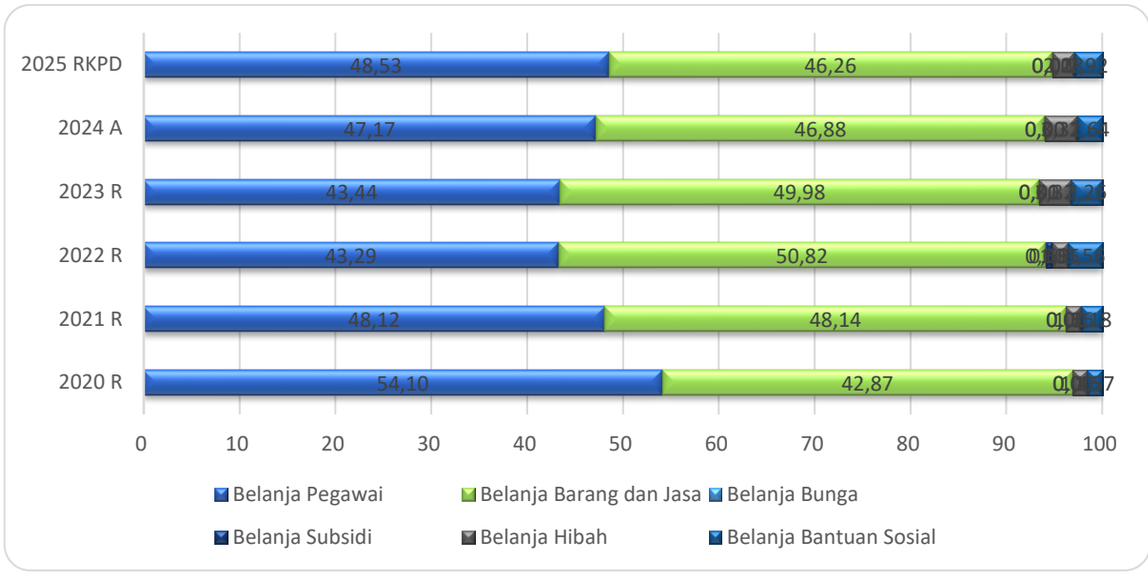


Sumber: BKAD Kota Madiun, 2024

Gambar 3. 21 Perkembangan Komposisi Belanja Daerah (dalam%) Kota Madiun Tahun 2020–2025

Sebagaimana yang termuat pada Gambar 3.21 di atas, Proyeksi komposisi belanja Pemerintah Kota Madiun Tahun 2025, sebagian besar masih dialokasikan pada belanja operasi. Pada Tahun 2025, persentase belanja operasi diproyeksikan sebesar 90,36%. Belanja operasi digunakan untuk menampung pengeluaran kegiatan rutin pemerintahan yang memberi manfaat jangka pendek. Termasuk belanja operasi di antaranya Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial. Kebijakan belanja operasi terdiri dari belanja pegawai untuk memenuhi belanja gaji pegawai beserta tunjangan dan penerimaan lainnya dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku, belanja barang dan jasa untuk memenuhi belanja alat tulis kantor, makan dan minum, sewa gedung, honor tenaga ahli, uang perjalanan dinas, serta belanja hibah dan bantuan sosial. Perkembangan persentase belanja operasi Kota Madiun tahun 2020-2025 dapat dilihat dalam gambar berikut:

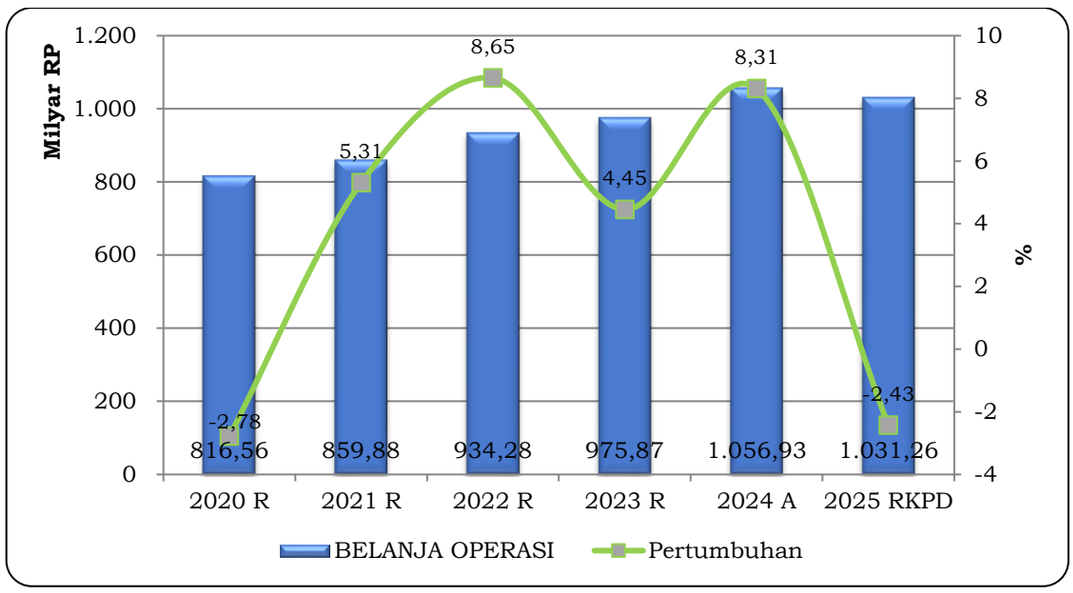
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



Sumber: BKAD Kota Madiun, 2024

Gambar 3. 22 Perkembangan Komposisi Komponen Belanja Operasi (dalam%) Kota Madiun Tahun 2020–2025

Sebagaimana yang termuat pada Gambar 3.22 di atas, Komposisi Belanja operasi dari tahun ke tahun memiliki komposisi yang relatif sama. Meskipun secara nominal nilainya berubah dari tahun ke tahun, komposisi terbesar masih terdapat pada belanja pegawai. Persentase belanja pegawai pada Tahun 2025 diproyeksikan sebesar 47,52%. Angka tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2024 yaitu sebesar 0,69%. Keseluruhan kondisi tersebut merupakan proyeksi belanja yang menyesuaikan dengan situasi, kondisi, serta prospek Keuangan Kota Madiun Tahun 2025. Dimana komposisi belanja operasi diproyeksikan didominasi oleh belanja pegawai yaitu sebesar 48,53%, sedangkan terbesar kedua adalah belanja barang dan jasa yaitu sebesar 46,26%.



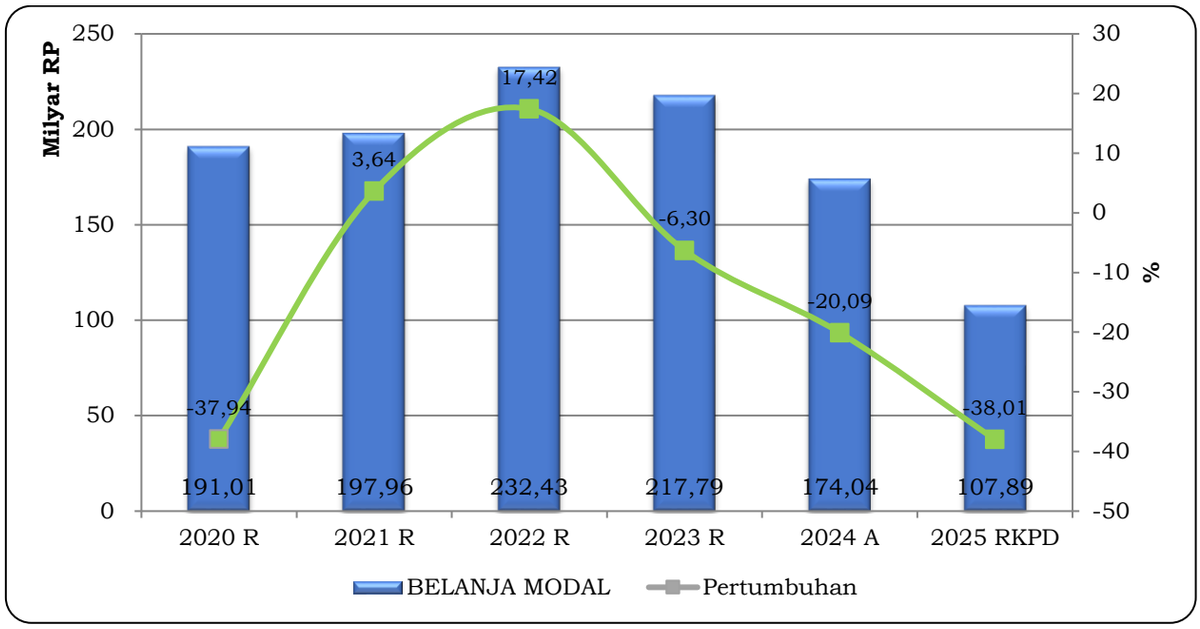
Sumber: BKAD Kota Madiun, 2024

Gambar 3. 23 Perkembangan Belanja Operasi Kota Madiun Tahun 2020–2026

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Sebagaimana yang termuat pada Gambar 3.22 di atas, Belanja Operasi terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial. Dalam kurun waktu enam tahun terakhir belanja operasi menunjukkan tren fluktuatif. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada realisasi tahun 2022 yaitu sebesar 8,65% dengan nominal Rp 934,28 miliar. Pada anggaran tahun 2023 realisasi belanja operasi mencapai Rp 975,87 miliar. Sedangkan target tahun 2024, belanja operasi dialokasikan sebesar Rp. 1.056 miliar.

Pada tahun 2025, sejalan dengan adanya proyeksi pendapatan optimistik yang dialokasikan untuk meningkatkan belanja daerah, maka belanja operasi diproyeksikan sebesar Rp 1.031 miliar. Selanjutnya gambar perkembangan pertumbuhan Belanja Modal tahun 2020 hingga 2025:



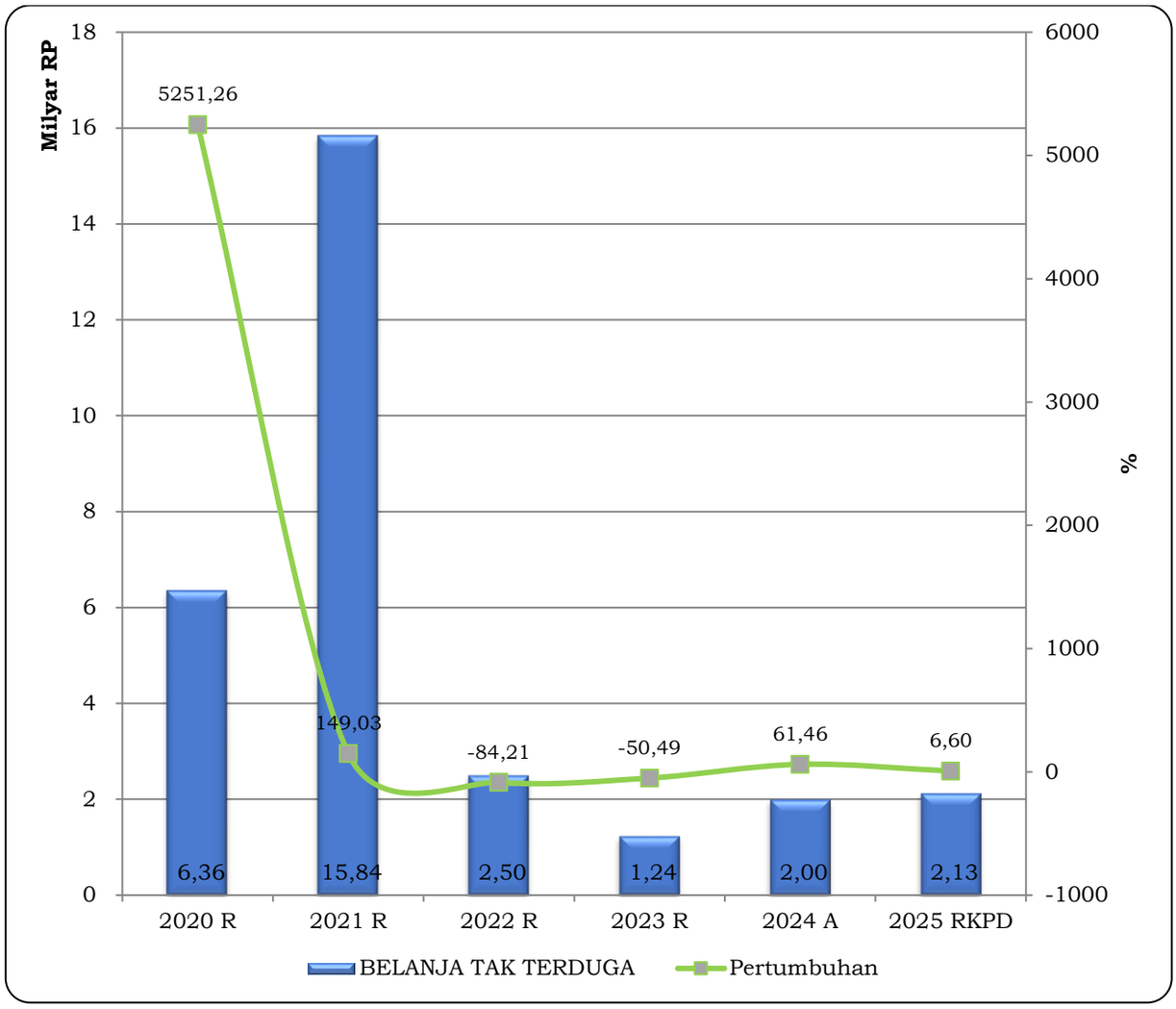
Sumber: BKAD Kota Madiun, 2024

Gambar 3. 24 Perkembangan Belanja Modal Kota Madiun Tahun 2020–2025

Sebagaimana yang termuat pada Gambar 3.24 di atas, dalam kurun waktu 6 (enam) tahun terakhir belanja modal mengalami tren fluktuatif. Komposisi Belanja Modal terdiri atas Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Bangunan Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan, dan terakhir Belanja Modal Aset Tetap Lainnya. Pada tahun 2020, belanja modal mengalami penurunan sebesar minus 37,94% sebagai dampak refocusing dan realokasi anggaran untuk penanggulangan dampak Covid19. Pada realisasi tahun 2021, belanja modal di meningkat hingga 3,64% atau sebesar Rp 197,96 miliar. Nilai tersebut meningkat sebesar 17,42% dengan nilai sebesar Rp 232,43 miliar tahun 2022. Pada tahun 2024, realisasi belanja modal mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar minus 20,09% atau Rp 174,04 miliar.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Sedangkan pada tahun 2025, belanja modal diproyeksikan mengalami penurunan minus 38,01 % atau sebesar Rp 107,89 miliar. Selanjutnya untuk perkembangan Belanja Tidak Terduga dapat dilihat pada gambar berikut:

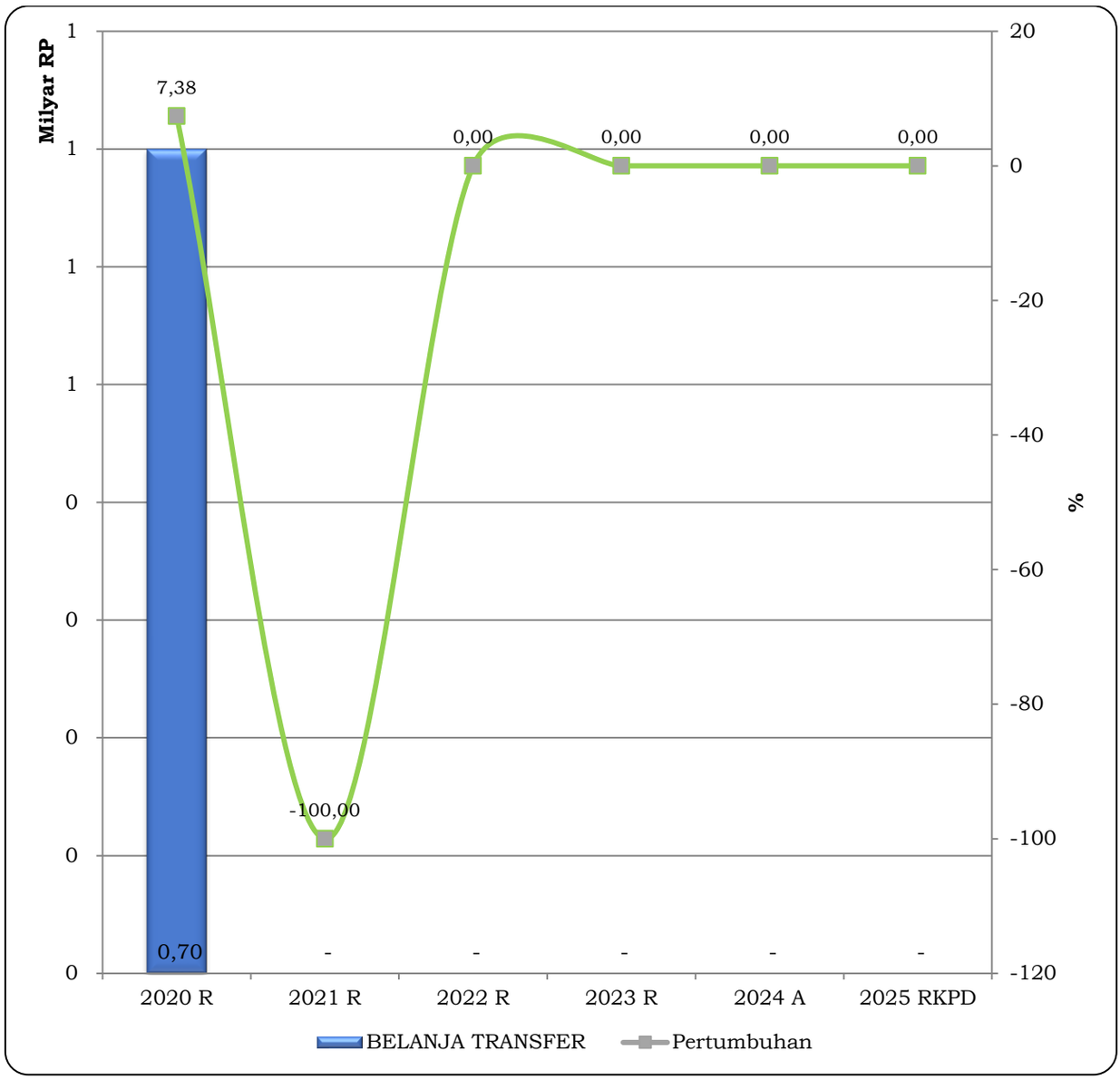


Sumber: BKAD Kota Madiun, 2024

Gambar 3. 25 Perkembangan Belanja Tidak Terduga Kota Madiun Tahun 2020–2025

Sebagaimana yang termuat pada Gambar 3.25 di atas, peningkatan yang signifikan belanja tak terduga terjadi pada tahun 2020 dan 2021 seiring dengan terjadinya pandemi Covid-19. Realisasi anggaran tahun 2019 sebesar Rp 0,12 miliar meningkat menjadi Rp 6,36 miliar pada tahun 2020 dan Rp 15,84 miliar pada tahun 2021. Pada realisasi 2022, belanja tidak terduga mengalami peningkatan seiring dengan kondisi pandemic yang relatif menurun. Pada APBD tahun 2024 belanja tak terduga mengalami sedikit kenaikan sebesar 2 miliar, sedangkan target 2025 cenderung tetap hanya mengalami sedikit peningkatan menjadi Rp. 2,13 miliar. Selanjutnya perkembangan Belanja Transfer dapat dilihat pada gambar berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



Sumber: BKAD Kota Madiun, 2024

Gambar 3. 26 Perkembangan Belanja Transfer Kota Madiun Tahun 2020–2025

Sebagaimana yang termuat pada Gambar 3.26 di atas, Trend pertumbuhan belanja transfer mulai tahun 2019 menuju tahun 2020 tidak mengalami perubahan pertumbuhan yaitu masih sebesar 0,00% meskipun pada tahun tersebut terdapat realisasi belanja transfer karena masih dalam masa pandemi Covid-19. Begitu juga anggaran tahun 2022 tidak mengalami perubahan. Pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 juga masih sama tidak ada perencanaan belanja transfer.

Selanjutnya, perkembangan nilai dan pertumbuhan belanja daerah Kota Madiun tahun 2020-2024 dan proyeksi anggaran tahun 2025 adalah sebagaimana termuat pada tabel berikut:

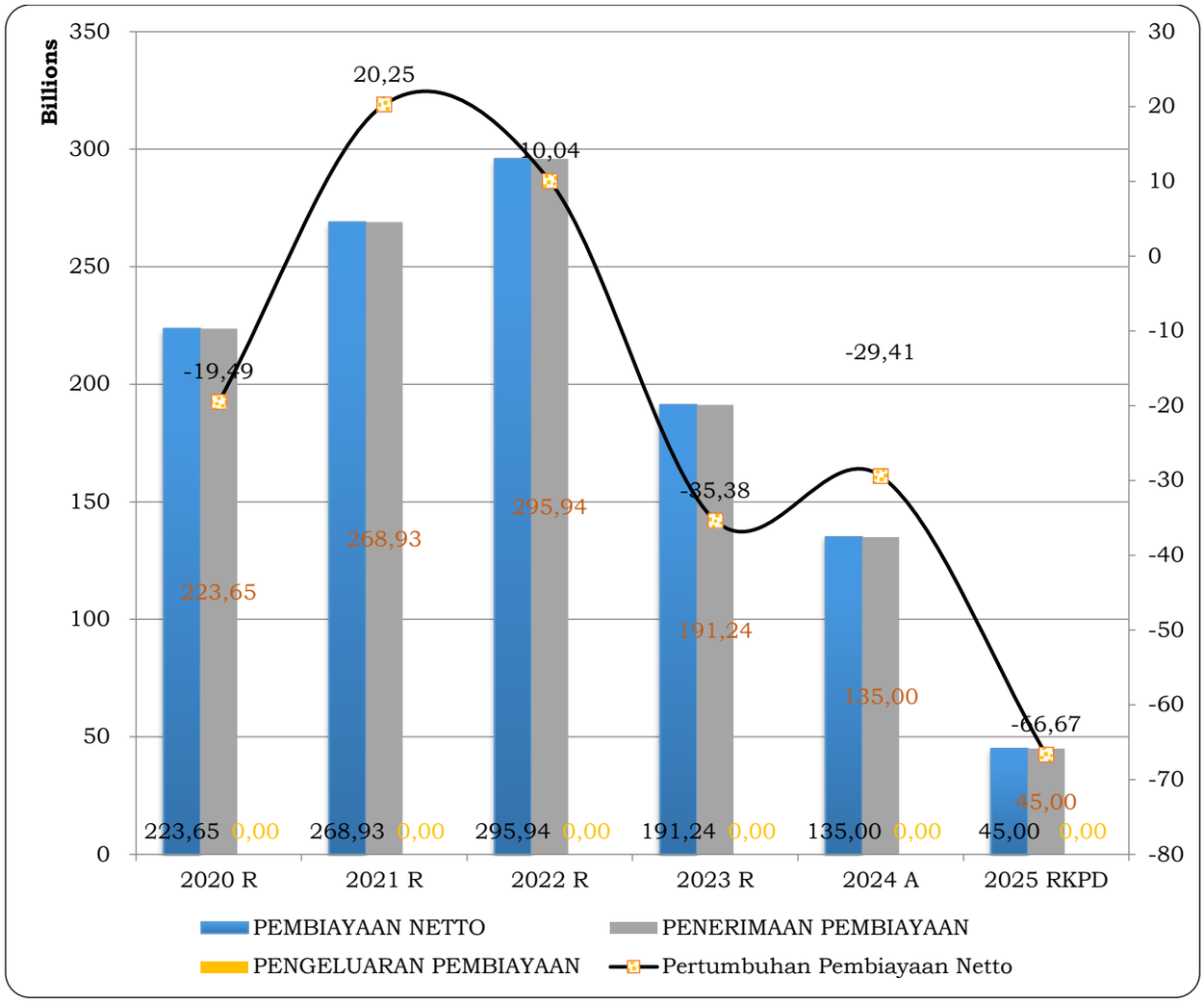
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Tabel 3. 5 Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Kota Madiun Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH					
		REALISASI 2020 (Rp)	REALISASI 2021 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	ANGGARAN 2024 (Rp)	TARGET 2025 (Rp)
5.1	BELANJA OPERASI	816.557.831.371,63	859.879.322.395,91	934,280,133,791,29	975,873,375,042,70	1,057,523,335,128,00	899,798,588,332,00
5.1.01.	Belanja Pegawai	441.740.830.119,00	413.765.191.395,00	404,406,660,608,25	423,896,152,844,39	498,361,265,622,00	500.482.954.817,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	350.024.036.581,10	413.958.099.347,91	474,775,658,285,04	487,717,322,693,31	496,250,751,989,00	477.018.344.006,00
5.1.03	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
5.1.04	Belanja Subsidi	-	-	6,480,445,500,00	99,146,000,00	50,000,000,00	100.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	11.938.091.671,53	13.431.646.653,00	15,369,183,718,00	32,355,896,005,00	34,955,559,517,00	23.513.066.824,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	12.854.873.000,00	18.724.385.000,00	33,248,185,680,00	31,804,857,500,00	27,905,758,000,00	30.144.313.136,00
5.2	BELANJA MODAL	191.011.897.074,57	197.958.260.924,01	232,434,449,701,97	217,790,302,662,69	173,443,696,872,00	107.888.845.795,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.972.500.000,00	-	-	-	2,000,000,000,00	-
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	68.549.937.238,00	26.304.347.775,00	53,011,211,346,00	71,585,868,051,04	13,310,214,640,00	21.419.280.171,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	35.326.461.602,57	65.170.777.016,83	72,843,838,757,97	80,940,539,683,65	51,725,560,446,00	27.118.048.757,00
5.2.04	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	80.833.932.839,00	103.172.346.821,18	103,137,296,907,00	62,832,477,443,00	103,508,030,586,00	57.253.413.385,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.521.068.895,00	3.310.789.311,00	3,442,102,691,00	2,431,417,485,00	2,210,626,200,00	1.321.673.482,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	2.807.996.500,00	-	-	-	689,265,000,00	776.430.000,00
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	6.361.433.706,00	15.841.760.294,00	2,502,082,962,00	1,238,717,822,00	2,000,000,000,00	2,131.999.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	6.361.433.706,00	15.841.760.294,00	2,502,082,962,00	1,238,717,822,00	2,000,000,000,00	2,131,999,000.00
5.4.	BELANJA TRANSFER	700.062.000,00	-	-	-	0	-
5.4.01	Belanja Transfer Ke Daerah Lain	700.062.000,00	-	-	-	0	-
	TOTAL JUMLAH BELANJA	1.014.631.224.152,20	1.073.679.343.613,92	1,169,216,666,455,26	1,194,902,395,527,39	1,232,967,032,000,00	1,141,279,524,225,00
	SURPLUS/DEFISIT	44.994.357.259,12	27.003.485.516,94	(104,701,001,398,47)	(96,530,870,564,39)	(135,000,000,000,00)	(45.000.000.000,00)

Sumber: BKAD Kota Madiun, 2024

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



Sumber: BKAD Kota Madiun, 2024

Gambar 3. 27 Perkembangan Penerimaan Pembiayaan Netto Tahun Berjalan Kota Madiun Tahun 2020–2025 (Miliar Rupiah)

Sebagaimana yang termuat pada Gambar 3.27 di atas, pada tahun 2024, pembiayaan netto diproyeksikan mengalami penurunan sebesar minus 73,96%. Penerimaan pembiayaan pada tahun 2023 sebesar Rp 191 miliar. Sedangkan dari sisi pengeluaran pembiayaan, tidak dianggarkan dari tahun 2020 hingga 2024. Namun pada tahun 2024, sejalan dengan adanya proyeksi optimistik dan peningkatan belanja daerah untuk optimalisasi pembangunan, maka pembiayaan netto diproyeksikan mengalami penurunan sebesar 2,41% dibandingkan APBD 2023. Penerimaan pembiayaan dianggarkan dari penggunaan SILPA tahun sebelumnya sebesar Rp 135,00 miliar. Pada tahun 2025, pembiayaan netto diproyeksikan menurun menjadi Rp 45,00 miliar. Sedangkan dari sisi pengeluaran pembiayaan, tidak dianggarkan. Selanjutnya, rincian perkembangan nilai penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, serta pembiayaan netto Kota Madiun tahun 2020 sampai dengan proyeksi tahun 2025 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Tabel 3. 6 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Tahun 2020 s.d Tahun 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH					
		REALISASI 2020 (Rp)	REALISASI 2021 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	ANGGARAN 2024 (Rp)	TARGET 2025 (Rp)
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	223.581.475.124,05	268.933.182.301,20	295.937.467.818,14	191.240.034.447,43	135.000.000.000,00	45.000.000.000,00
6.1.01	Penggunaan SiLPA	223.580.475.124,05	268.933.182.301,20	295.936.667.818,14	191.238.836.447,43	135.000.000.000,00	45.000.000.000,00
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.04.	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	1.000.000,00	0,00	800.000,00	1.198.000,00	0,00	0,00
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.03	Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	223.581.475.124,05	268.933.182.301,20	295.937.467.818,14	191.240.034.447,43	135.000.000.000,00	45.000.000.000,00
	SILPA	268.933.182.301,20	295.936.667.818,14	191.238.836.447,43	113.953.605.152,46	0,00	0,00

Sumber: BKAD Kota Madiun, 2024

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

3.2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan daerah berisi arah kebijakan dalam pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Arah kebijakan keuangan daerah bertujuan untuk meminimalkan risiko fiskal, sehingga diharapkan dapat tercipta kesinambungan anggaran. Selain itu, melalui arah kebijakan keuangan daerah dapat mendukung tujuan pembangunan sesuai visi Kota Madiun. Secara rinci, arah dan kebijakan keuangan Kota Madiun Tahun 2023 sebagai berikut:

3.2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dalam pengelolaan pendapatan daerah di Kota Madiun Tahun 2025, terdapat beberapa arah kebijakan utama, antara lain sebagai berikut:

1. Penentuan target pendapatan daerah menyesuaikan dengan aturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan regulasi lainnya yang sesuai;
2. Stabilisasi kondisi perekonomian daerah dalam menghadapi kondisi ketidakpastian global dan kondisi politik nasional dan daerah;
3. Peningkatan target pendapatan daerah dilakukan secara terencana sesuai dengan kondisi perekonomian;
4. Peningkatkan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah sesuai dengan perkembangan kondisi ekonomi dan sosial daerah;
5. Optimalisasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya peningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Daerah;
6. Peningkatan peran dan fungsi Unit Pelaksana Teknis dan Lembaga Penghasil dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan;
7. Optimaliasi penerimaan pendapatan transfer baik yang bersumber dari pemerintah maupun yang bersumber dari pemerintah provinsi;
8. Peningkatan sistem pengelolaan aset dan keuangan daerah;
9. Peningkatan komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam upaya pemenuhan kebutuhan fiskal daerah;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

10. Peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam pengelolaan pajak dan retribusi serta kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah dengan cara melakukan upaya perbaikan sistem pelayanan pungutan daerah; dan
11. Peningkatan penegakan hukum yang tegas terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah.

Selanjutnya, arah kebijakan masing-masing komponen pendapatan daerah (PAD, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah) sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
    a. Perluasan sumber-sumber pendapatan daerah melalui optimalisasi pengelolaan aset-aset daerah ataupun kerjasama dengan pihak ketiga;
    b. Melakukan intensifikasi perpajakan dengan beberapa upaya sebagai berikut:
        1. Meningkatkan dan memperluas penggunaan teknologi informasi di dalam layanan pajak hotel dan restoran, atau dengan kata lain penggunaan sistem *online* di dalam pembayaran pajak hotel dan restoran;
        2. Meningkatkan kapasitas aparatur PD penghasil dengan berbagai program pelatihan/diklat formal, sekaligus peningkatan sarana dan prasarana layanan. Selain itu perlu ditingkatkan sistem *rewards and punishment* untuk meningkatkan kinerja PD penghasil; dan
        3. Melaksanakan *update database* perpajakan secara berkala, khususnya NJOP di seluruh wilayah Kota Madiun.
    c. Optimalisasi BUMD, dalam hal ini pemerintah Kota Madiun akan merestrukturisasi kembali BUMD yang *social oriented* dan *profit oriented*. Untuk BUMD yang memiliki *profit oriented* diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan PAD;
    d. Peningkatan upaya penegakan hukum terhadap wajib pajak dan wajib retribusi; dan
    e. sanksi yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah.

2. Pendapatan transfer

Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi program maupun kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), baik DAK Reguler, DAK Penugasan dan DAK Afirmasi. Selain itu, Pemerintah Kota Madiun akan aktif berkomunikasi dengan pemerintah pusat di dalam koordinasi pos-pos DAK yang dapat dimanfaatkan. Sedangkan DAU pemerintah telah menyampaikan bahwa kebijakan DAU tidak bersifat pasti atau dinamis, sehingga alokasi belanja dari DAU agar betul-betul pada program yang sangat prioritas.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

3. Lain–lain pendapatan yang sah

Peningkatan koordinasi dan upaya perolehan alokasi anggaran dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Timur melalui hibah, bagi hasil pajak dari provinsi maupun bantuan keuangan. Melalui kebijakan tersebut, upaya yang dilakukan dalam mencapai target pendapatan daerah tersebut sebagai berikut:

1. Upaya pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD), dilakukan dengan:
   a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
      Kualitas pelayanan publik dapat ditingkatkan melalui percepatan mekanisme/prosedur, waktu, dan kualitas pelayanan serta kepuasan masyarakat;
   b. Meningkatkan kualitas SDM (aparat daerah), khususnya yang berkaitan dengan pemungutan PAD;
   c. Mengoptimalkan kerjasama dan koordinasi dengan pihak swasta; dan
   d. Mengoptimalkan pemanfaatan dan pengelolaan aset daerah.
2. Upaya untuk meningkatkan Pendapatan transfer dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi Jawa Timur dan pemerintah pusat, berkaitan dengan alokasi dana DAK dan DBH;
3. Upaya untuk meningkatkan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dilakukan melalui:
   a. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat mengenai kepastian dana hibah; dana darurat; dana penyesuaian dan otonomi khusus, dan bantuan keuangan dari provinsi, yang diperoleh Kota Madiun; dan
   b. Meningkatkan kerjasama antar OPD Pemerintah Kota Madiun dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur secara intensif.

3.2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang terdiri atas urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah telah menjelaskan beberapa hal penting terkait belanja daerah yaitu sebagai berikut:

1. Pengalokasian belanja pegawai agar diperhatikan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mengalokasikan belanja pegawai paling tinggi 30% dari total belanja APBD. Dalam hal persentase belanja pegawai melebihi 30%, pemerintah daerah harus menyesuaikan porsi belanja pegawai paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini diundangkan;
2. Pengalokasian Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa serta Belanja Bantuan Sosial dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% dari belanja daerah;
4. Dalam rangka Peningkatan bidang kesehatan, Pemerintah Daerah harus mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% dari total belanja APBD diluar gaji sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

Sejalan dengan ketentuan tersebut, penyusunan kebijakan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi OPD, dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Oleh karena itu, alokasi belanja daerah harus memiliki target yang jelas, baik orientasi *output* maupun *outcome*nya. Arah kebijakan belanja daerah Kota Madiun Tahun 2024 disusun untuk mendukung tujuan pembangunan daerah. Pengelolaan belanja daerah Kota Madiun Tahun 2024 didasarkan pada tujuh kebijakan utama, antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja dan disertai sistem pelaporan yang akuntabel;
2. Efektivitas dan efisiensi belanja daerah, melalui pemanfaatan sesuai prioritas daerah (m*oney follow program* prioritas);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

3. Pengelolaan belanja daerah berbasis kinerja (*performance based*), sehingga setiap belanja akan bermuara untuk mendukung capaian Indikator kinerja utama Kota Madiun pada tahun 2024;
4. Optimalisasi anggaran untuk percepatan pembangunan infrastruktur publik yang berkualitas;
5. Mengalokasikan kebutuhan belanja tetap, belanja rutin, dan belanja variabel secara terukur dan terarah; dan
6. Belanja daerah difokuskan dapat memenuhi *mandatory spending* atau belanja-belanja yang sudah di-*earmark*, seperti pendidikan 20% dan kesehatan 10%. Selain itu, belanja daerah diarahkan untuk menyelenggarakan urusan wajib dan urusan pilihan dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku dan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM).

Selanjutnya, arah kebijakan belanja daerah diuraikan pada masing-masing komponen sebagai berikut:

1. Belanja Operasi
   a. Alokasi Belanja Pegawai diproyeksikan sebesar 47,52% dari Belanja operasi, dengan mempertimbangkan penerimaan tenaga P3K dan pemberian TPP bagi ASN sesuai dengan kemampuan daerah;
   b. belanja Barang dan Jasa yang mengarah pada program yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, terutama pada kepentingan pelayanan publik;
   c. Belanja subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh Badan Usaha Milik Negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. Namun pada RKPD Kota Madiun 2024, belanja subsidi tidak dianggarkan;
   d. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hokum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   e. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

2. Belanja Modal
   a. Belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Namun dalam RKPD 2025, kebutuhan belanja ini tidak dianggarkan;
   b. Belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektonik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
   c. Belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksudu ntuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;
   d. Belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;
   e. Belanja asset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan asset tetap lainnya mencakup asset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok asset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai; dan
   f. Belanja asset lainnya, digunakan untuk menganggarkan asset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah, tidak memenuhi definisi asset tetap, dan harus disajikan dipos asset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
3. Belanja Tidak Terduga

   Belanja tidak terduga dialokasikan untuk mengatasi kejadian luar biasa yang bersifat *force major*, termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
4. Belanja Transfer

   Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa, ada dua, yaitu:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1. Belanja Bantuan Keuangan adalah diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerjasama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya;
2. Belanja Hibah adalah Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

3.2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Lebih lanjut, pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan dimaksudkan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, selisih dari keduanya disebut sebagai pembiayaan netto, yang dapat digunakan untuk menutup defisit anggaran. Pengelolaan pembiayaan daerah di Kota Madiun Tahun 2025 terdiri atas empat kebijakan utama. Kebijakan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Optimalisasi penerimaan pembiayaan daerah yang diperoleh dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) yang bersumber dari kelebihan penerimaan pendapatan daerah maupun sisa penghematan belanja;
2. Peningkatan Manajemen Pembiayaan Daerah dalam rangka akurasi, efisiensi, efektivitas, dan profitabilitas;
3. Apabila APBD dalam keadaan surplus, kebijakan yang diambil adalah melakukan transfer ke persediaan Kas Daerah dalam bentuk Giro/Deposito, Penyertaan Modal, atau sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan. Pada tahun 2025, tidak dialokasikan untuk penyertaan modal; dan
4. Apabila APBD dalam keadaan defisit, kebijakan yang diambil adalah memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, rasionalisasi belanja, pinjaman daerah, atau memperluas kemitraan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

3.2.2.4 Kebijakan Pembiayaan Daerah Non Pemerintah

Kebijakan Pembiayaan Daerah Non Pemerintah yang diambil yaitu dengan Peningkatan pembiayaan kreatif, melalui kerjasama dengan pihak swasta melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR). Pentingnya pembiayaan non-APBD disebabkan karena terbatasnya sumber pembiayaan pembangunan pemerintah daerah. Di sisi lain, kebutuhan belanja daerah dalam penyediaan sarana publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sangat beragam. Sehingga, hanya kebutuhan prioritas yang dibiayai oleh pemerintah. Melalui kerja sama dengan pihak swasta, diharapkan dapat membantu pemenuhan kebutuhan yang tidak bisa ter-*cover* oleh pemerintah daerah. Dengan demikian, diharapkan ada sinergitas antara peranan swasta dan pemerintah dalam mewujudkan tujuan pembangunan. Rincian realisasi dan rencana pembiayaan melalui *Corporate Social Responsibility* tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 pada tabel berikut:

Tabel 3. 7 Realisasi Anggaran Pembiayaan Pembangunan melalui CSR Kota Madiun 2020-2023

No	Nama Lembaga /Perusahaan	Jenis Kegiatan	Anggaran (Rp,00)			
			2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Hotel Merdeka	Penerangan Jl. Lodayan	1.200.000			
		Bantuan kepada penyandang Disabilitas	100.000			
		Santunan keluarga pinggir sungai Bantaran	2.500.000			
		Takjil buka Puasa di Masjid Agung Baitul Hakim	1.500.000			
		Bantuan untuk Kampung Tangguh	500.000			
		Partisipasi kegiatan warga gang Lodayan (Kel. Pangongangan)	1.000.000			
2	PT. Nitama Madiun	Pocari Sweat untuk tenaga medis	3.600.000			
		Masker berlogo Nitama	3.800.000			
		Tanaman buah				
		Pohon Jambu Citra 5 buah	1.125.000			
		Pohon Jambu Camplong 5 buah	1.125.000			

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2	3	4	5	6	7
		Pohon Jeruk 5 buah	2.250.000			
		Pohon Leci 2 buah	750.000			
		Pohon Sawo Mentega 3 buah	1.350.000			
		Metan plus ongkos tanaman 20 buah	1.500.000			
		Planter Bag PT. Nitama dan Madiun Kota Pendekar 20 buah	1.800.000			
		Pembersihan sungai sekitar Planter bag	480.000			
		Takjil Ramadhan 1.000 pcs				
		Donasi Persatuan Tuna Netra Indonesia	6.000.000			
		Beras CSR untuk warga sekitar	2.064.000			
		Proses pelapisan hot dip galvanize gratting makam	700.000			
		Proses pelapisan hot dip galvanize gratting makam	700.000			
		Hut Satpam	750.000			
		Mural dan pengecatan gapura dengan logo Perusahaan dan tulisan (logo) RW.06	6.000.000			
3	PT. INKA	Bantuan Bedak Kaca	750.000			
		Bantuan Program kemitraan 5 mitra	250.000.000			
		Rehab Ruang Kelas	2.000.000			
		Bantuan Pembangunan Perpustakaan	1.000.000			
		Paket Hand sanitizer 60.000 ml	7.300.000			
		Vitamin	1.000.000			
		Suplemen dan Vitamin	8.255.400			
		Bantuan Masker dan Faceshield 500 bh	5.250.000			
		Masker 1000 bh	6.500.000			
		Sosialisasi Bahaya Narkoba	51.900.700			
		Penyuluhan Pencegahan Covid	53.589.400			

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2	3	4	5	6	7
		Bantuan Sarpras Posko Covid	9.170.000			
		Bantuan Bilik Desinfektan	2.200.000			
		Bantuan Bilik Desinfektan	10.000.000			
		Tempat Cuci Tangan, Masker dan Hand sanitizer	2.887.500			
		Rapid tenaga medis	46.500.000			
		Pule dan bungur	184.750.000			
		Pohon Tabebuya	3.000.000			
		Pot, Media dan Bunga	2.500.000			
		Bibit Tanaman Bunga dan Buah	2.000.000			
		Tempat sampah 3 unit	2.397.000			
		Sarpras Poskamling Kel. Patihan	2.246.000			
		Pembelian Pot Bunga	1.000.000			
		Pembelian Pot Bunga	1.200.000			
		Pemeliharaan mural	20.090.000			
		Bantuan Kebersihan makam	3.000.000			
		Bantuan Paket sembako 200 paket	37.300.000			
		Bantuan Sembako	1.000.000			
		Baksos Sembako	5.000.000			
		Bantuan Sembako 50 paket	10.500.000			
		Bantuan untuk disabilitas 50 paket	8.749.587			
		Bantuan Baju Koko dan Mukena	35.407.990			
		Kegiatan Baksos	1.000.000			
		Santunan Yayasan Panti Asuhan	272.000.000			
		Renovasi Masjid	5.000.000			
		Bantuan Terpal Tenda	5.000.000			
		Bantuan Cover tenda	4.200.000			
		Renovasi masjid	2.000.000			
		Pembangunan Masjid	5.000.000			
		Pembelian Tanah Wakaf	2.000.000			
		Pembuatan Tempat Parkir PHBI	4.000.000			

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2	3	4	5	6	7
		RTLH Bp. Firman	86.125.000			
		Ruang Pelayanan Masyarakat	68.186.060			
		Pembelian material pipa besi dan cat	2.000.000			
		Pembelian material Kelas lapangan	29.785.000			
		Bantuan Laptop	35.200.000			
		bantuan Kodim	24.744.000			
		Pembuatan 200 Kaos	10.130.000			
		Bantuan AC Standing 5 PK 2 unit	28.730.000			
		Pengadaan portal	3.950.000			
		Bantuan Sarpras Posko Kampung Tangguh	2.775.200			
		Bantuan Kampung Tangguh di Kel. Sukosari, Manguharjo dan Nambangan Kidul	11.009.000			
		Bantuan Kampung Tangguh di Kel. Banjarejo, Mojorejo dan Nambangan Lor	13.250.000			
		Masker		7.500.000		
		Ranjang Pasien		121.850.000		
4	PT. KAI DAOP 7	Alat Peraga	25.000.000			
		Edukasi	5.000.000			
		Pule dan Bungur	92.500.000			
5	Hotel Amaris	Sumbangan Anak Yatim	3.000.000			
		Pembelian Hewan Qurban yang diserahkan pada Masjid Nurul Abror Jalan Kalimantan (1 ekor kambing)	2.800.000			
		CSR kepada masyarakat Jalan Kalimantan	2.000.000			
6	ALFAMART	biaya pangkas pule barito	15.000.000			
		tanaman hias sumber wangi (bugenvil varigata, kamboja besar, kelapa gading)	27.875.000			
		sulaman pohon sogo	2.400.000			
		Lampu Plenton	29.750.000			
		Lampu Penjor	150.000.000			

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2	3	4	5	6	7
7	PT. BRI	Pohon berbunga				
		Masker Non Medis 1250 pcs	12.500.000			
		Paket sembako 100 paket	15.000.000			
		Masker Kain (5000 buah)		5.000.000		
		Biskuit (30 dos)		1.440.000		
8	PT. TELKOM	Bantuan Pinjaman Bergulir	820.000.000			
		Booth untuk UMKM	100.000.000			
		300 buah Hazmat untuk Satgas Covid	14.250.000			
		300 psng Sepatu Boots	22.500.000			
		300 bh faceshield	5.850.000			
		320 box Masker medis	48.800.000			
		80 box sarung tangan karet	8.200.000			
		2000 bh masker non medis	13.300.000			
		Bantuan Sembako untuk warga Kota Madiun	15.000.000			
9	PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JATIM, Tbk	Sembako (Beras 4kg, Gula 2 kg, Minyak 1lt, kecap 1, sambel pecel 500gr)	66.896.000			
		Sembako (Beras 4kg, Gula 2 kg, Minyak 1lt, kecap 1, sambel pecel 500gr)	134.329.000			
		Paket Sembako (1500 paket)		210.000.000		
		Peket Sembako (1500 paket)		270.000.000		
		Both Container (2 buah)		545.800.000		
		Entrance gate Pahlawan Street Center (PSC)			541.178.000	
		Lanjutan Entrance gate Pahlawan Street Center (PSC) dan patung pendekar			564.541.000	
		Bantuan Sarpras Lingkungan Kendaraan dan Branding				533.000.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2	3	4	5	6	7
10	PT. REFINDO INTISELARAS INDONESIA	Lapak Joglo Paleraman		2.100.000		
		Lapak Kembulsari		18.500.000		
		Lapak Sido Dadi		24.500.000		
		Lapak Lintang Tawang		16.000.000		
		Bantuan Meja, Kursi dan Lemari Kaca			3.600.000	
11	BPR TUNAS ARTHA	Inklusi Keuangan	1.500.000			
		Sedekah Jumat	4.800.000			
		Sumbangan Kematian	1.000.000			
		Sumbangan Bencana Alam	1.500.000			
		Takjil Ramadhan	1.000.000			
		Parsel Lebaran	1.000.000			
		Sumbangan HUT RI	500.000			
		HUT BPR Tunas Artha	1.000.000			
		Sumbangan lain-lain	1.000.000			
12	PT. INDRACO SUN CITY	Sewa Bazar UMKM dari Dinkop	2.000.000			
		Penerimaan Peserta Didik magang	15.000.000			
		Penanaman Pohon	20.000.000			
		Bukber anak yatim Piat	12.000.000			
		Parsel Lebaran	5.000.000			
		Sumbangan HUT RI	2.000.000			
		Hewan Qurban	20.000.000			
		Takjil Ramadhan	5.000.000			
13	Hotel Aston	Donor Darah Umum	500.000			
		Takjil Ramadhan	1.500.000			
		Berbagi Sahur	1.500.000			
		Bakti Sosial	300.000			
		Natal Bersama Panti Asuhan	2.000.000			
		Hewan Qurban	3.500.000			
14	PD. BPR	Penyaluran tenda pedagang kaki lima	60.000.000			
		Penanaman dan Penghijauan lingkungan serta PD BPR Bank Daerah Kota Madiun	50.000.000			
		Program Bisafari Dhuafa	5.000.000			

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2	3	4	5	6	7
15	PT. PNM	Penanaman Pohon	10.000.000			
16	BANK WOORI BERSAUDARA	Penanaman Pohon	5.000.000			
17	PT. BCA	Penghijauan lingkungan kantor	3.000.000			
		Buka bersama anak yatim	3.000.000			
		Takjil Ramadhan	2.000.000			
		Bingkisan lebaran	7.000.000			
		Sumbangan HUT RI	1.000.000			
		Container (2 buah)			26.061.636	
18	BRI KANCAB MAGETAN	Pule	42.000.000			
		Tiang lampu penjor klasik Badungan	50.000.000			
19	PG. REDJOAGUNG	Bantuan untuk pendidikan	1.400.000			
		Penanganan Covid	231.716.237			
		Penanaman Pohon Flamboyan	45.500.000			
		bantuan Sarana Ibadah	3.950.000			
		Khitan massal	25.000.000			
		Bantuan Sosial	25.334.587			
		Bantuan sarana umum	2.550.000			
		Program Kemitraan	1.055.000.000			
		Gula Pasir (2.500 kg)		30.000.000		
		Gula Pasir (2,5 ton)			32.500.000	
20	PT. PERTAMINA	Pule dan Bungur	150.040.000			
		Pelatihan		28.394.000		
		Alat dan Bahan Pelatihan		33.000.000		
		Sarpras Lingkungan		17.000.000		
21	BANK BUKOPIN	Buka bersama anak yatim	20.000.000			
22	CV. SOHANTO ADI PERKASA, PT. SARI MELATI KECANA, PT. INUL VIZTA MADIUN	Gate Videotrone	330.000.000			
		Videotron			278.000.000	
23	PT. REZKY ANUGRAH SEJAHTERA	Mobil Golf Yamaha 4 Seat	170.000.000			
24	PDAM Tirta Taman Sari	TRAFFIC LIGHT Tempo doeloe dan Lampu Hijr Ismail	85.000.000			
		Balon Gate (2 unit)		20.000.000		
		BPJS Ketenagakerjaan 1.144 orang			230.630.400	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2	3	4	5	6	7
		Bantuan Beras dan Air Minum			31.412.000	
		Kaos 92 buah			6.127.200	
		Kaos 147 buah			9.790.200	
		Kaos 177 buah			11.788.200	
		Kaos 407 buah			27.106.200	
		Kaos 177 buah			11.788.200	
		Air minum kemasan 1.646 karton			44.442.000	
		Bantuan Sarpras Lingkungan Anjungan air siap minum				29.175.000
		Bantuan Sarpras Lingkungan Wastafel				7.086.996
25	PT. TASPEN	Bantuan kemitraan	280.000.000			
26	INDOSAT	Lampu Penjor	162.793.000			
27	PT. INTI BANGUN SEJAHTERA	Lampu heritange di madiun	15.000.000			
28	PT. PLN (persero) UP3 MADIUN	RUMAH PINTAR	202.555.000			
		Pohon pule 2 buah, treatment dan pemeliharaan pohon, dan branding PLN peduli			75.000.000	
29	PT. PENERBIT ERLANGGA CABANG MADIUN	Pompa Elektrik 4 unit	3.000.000			
		Chlorin 7 jerigen @ 20 liter	4.200.000			
		Chlorin 2 jerigen @ 10 liter	700.000			
		Karbol/wipol 2 jerigen @10 liter	700.000			
		Harpic/pembersih lantai 1 jerigen @ 10 liter	700.000			
		Harpic/pembersih lantai 2 jerigen @ 5 liter	700.000			
30	PT. BRI (Persero) CABANG MADIUN	Masker kain 1300 buah	6.500.000			
		Alat Pelindung Diri 75 buah	6.375.000			
		Sarung tangan 10 box/500 psng	1.150.000			
		Hand Sanitizer 20 liter	3.600.000			
		Wastafel aluminium 4 buah	2.800.000			
		Thermogun 4 buah	6.000.000			

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2	3	4	5	6	7
31	PT. CIPTA GAGAS LESTARI	Handsanitazer Merk Novo 80 ml (20 dos)		2.880.000		
		Masker Protector (20 dos)		7.680.000		
		Minuman Serbuk Merk Segar (20 dos)		2.592.000		
		Susu Milku (1500 botol)		3.562.500		
		Kopi Siap Saji (1000 cup)		2.000.000		
32	PT. BANK TABUNGAN NEGARA (BTN)	Healthy Kit Non Medis (2.000 buah)		56.000.000		
		Susu (360 buah)		780.000		
		Gula Pasir 3 ton			45.000.000	
33	PT. BANK NEGARA INDONESIA (BNI)	Masker Kain (1000 buah)		6.000.000		
		Paket Sembako (130 buah)		16.250.000		
		Susu (1145 buah)		2.750.000		
		Minyak goreng 1.056 liter			25.000.000	
34	PERUM BULOG	Bantuan Sembako		54.000.000		
35	PT. KIMIA FARMA DIAGNOSTIKA	Gerobak/ Booth Kontainer (6 unit)		87.000.000		
36	PT. BANK SYARIAH INDONESIA, Tbk	Susu Milku (5.000 botol)		12.250.000		
		Masker (2000 buah)		14.000.000		
37	PT. INTI DAYA GUNA ANEKAWARNA (INDANA)	Cat Outdoor (100 galon)		20.700.000		
38	LARISSA AETHETIC CENTER MADIUN	Tempat Cuci Tangan Injak (6 unit)		9.900.000		
		Masker Medis (40 box)		2.640.000		
39	PT. CALVARY ABADI	Paket Sembako (2000 paket)		202.000.000		
		Masker Medis (100.000 lembar)		40.000.000		
		Beras 10 ton dan Minyak Goreng 5.185 liter			159.997.500	
40	PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XI (PG. PAGOTAN)	Gula Pasir (10 Sack)		5.250.000		
41	PT. BAKTI NETRA UTAMA	Mesin Potong Rumput (11 unit)		18.700.000		
		Peralatan Gergaji Mesin (6 unit)		21.300.000		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2	3	4	5	6	7
42	POLITEKNIK PERKERETA APIAN INDONESIA	Paket Sembako (300 paket)		60.000.000		
43	PT. ASTRA INTERNATIONAL , Tbk	Booth Container (10 unit)		75.000.000		
44	PT. ULER RAYA INDONESIA	Paket Sembako (100 paket)		10.000.000		
45	PT. MIDI UTAMA INDONESIA, Tbk	Bantuan Sarpras Lingkungan		120.000.000		
46	PT. PESTA PORA ABADI	Masker Medis (20 box)		5.000.000		
47	PT. PEGADAIAN PERSERO	Vitamin (100 pack)		5.000.000		
48	PT. ACE HARDWARE INDONESIA LAWU PLAZA MADIUN	Earloop Face Mask (1440 pack)		47.376.000		
49	PT. INDOMARCO PRISMATAMA	Soud System Mushola dan Sound Outdoor Sumber Umis, AC 2 unit, CCTV 4 titik dan Voucher belanja Rp.100.000,00 (60 voucher)			200.100.000	
50	PT. REJEKI TAMBAH BAROKAH	Paket sembako (beras, minyak goreng, gula, susu) sejumlah 195 paket			11.640.000	
51	PT. ADHI KARTIKA JAYA	Beras 10 ton dan minyak goreng 2.962 liter			149.987.000	
52	PT. MADIUN RITELINDO (PLAZA MADIUN)	Sewa Area Café Pelayanan Publik dan Shervice Charge			26.748.660	
53	TOKO MODERN LARAIA	Paket sembako (beras, minyak goreng, gula, mie instan, roti roma) sejumlah 200 paket			32.000.000	
54	PT. MERAK JAYA PRACETAK	Minyak goreng 2.000 liter			26.000.000	
55	YAYASAN PELATIHAN FITRI AL-BAASITU	Beras 1.000 kg dan minyak goreng 1.000 liter			23.600.000	
56	PT. LINKNET	Bantuan Sarpras Lingkungan Mobil Jaguar				100.000.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2	3	4	5	6	7
57	PT. APLIKANUSA LINTASARTA	Bantuan Sarpras Lingkungan Pelengkap Mobil Jaguar				30.000.000
		Kontainer				70.000.000
58	CV. MAJU BERSAMA	Bantuan Sarpras Lingkungan Replika Menara Eifel				1.032.885.258
59	PT. INDUSTRI KERETA API	Bantuan Sarpras Sosial Bed /ranjang pasien				50.400.000
		Bantuan Iuran BPJS Ketenagakerjaan				3.830.400
		Bantuan Beasiswa Mahasiswa				6.000.000
60	PT. EKA MAS REPUBLIK	Bantuan Sarpras Lingkungan Kontainer				55.144.200
61	PT. SUCCESS JAYA GROUP	Bantuan Sarpras Lingkungan Replika Tugu Monas				554.948.000
		JUMLAH	6.251.135.661	2.421.662.500	2.594.038.196	2.472.469.854

Sumber: Bapppeda Kota Madiun, 2023

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Sinergitas arah dan prioritas pembangunan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah menjadi sebuah hal yang krusial dalam mencapai keberhasilan pembangunan. Maka, konsekuensi logis daripada keberhasilan pembangunan daerah adalah selarasnya tujuan pembangunan di berbagai level, terutama di level pemerintah provinsi dan pusat. Prioritas pembangunan daerah di Kota Madiun sejalan dengan perioritas pembangunan di level Provinsi Jawa Timur dan pemerintah Pusat. Keterkaitan ini dapat dilihat dari visi yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah baik nasional maupun daerah. Keterkaitan visi tersebut dapat dilihat dalam gambar berikut.



Gambar 4. 1 Keterkaitan Visi antar Level Pemerintahan

Visi Kepala Daerah Kota Madiun tahun 2025 – 2045 memiliki keterkaitan erat dengan visi Gubernur Jawa Timur dan Presiden. Tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah Kota Madiun menjelaskan keterkaitan dengan visi dan misi dalam dokumen RP. Visi Kota Madiun tahun 2025-2045 adalah: “Madiun Maju Mendunia Kota yang Berinovasi, Berbudaya, dan Berkelanjutan. Terdapat 3 (tiga) pilar utama dalam rumusan visi pembangunan Kota Madiun 2025-2045.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Nilai pertama adalah “Inovasi”, yang mana Kota Madiun mampu mengembangkan ide kreatif dan solutif dalam pemecahan permasalahan pembangunan kota dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan kolaborasi multipihak untuk menciptakan Kota Efisien, Berkelanjutan, dan Layanan Optimal. Nilai kedua adalah “Inovasi”, diharapkan Kota Madiun aktif mengembangkan ide-ide kreatif dan solutif dalam memecahkan permasalahan pembangunan kota meliputi transportasi, lingkungan, pendidikan, dan layanan publik. Selanjutnya, Nilai ketiga adalah “Berbudaya”, yang berarti Kota Madiun yang memberikan ruang ekspresi seni dan toleransi budaya dengan mengembangkan kekayaan seni, warisan budaya, dan keragaman sosial. Nilai ketiga adalah “Berkelanjutan”, yang berarti Kota Madiun mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, lingkungan yang sehat, dan kualitas hidup masyarakat yang sejahtera.

Sebagaimana yang termuat pada Gambar 4.2 di bawah ini, Terdapat 4 (empat) misi pembangunan dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kota Madiun tahun 2025-2045. Keempat misi tersebut yaitu:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berbasis *world class government*;
2. Mewujudkan transformasi sosial melalui pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing global;
3. Mewujudkan transformasi ekonomi daerah melalui pembangunan ekonomi inklusif yang berbasis kewilayahan yang merata, berkeadilan, dan berkelanjutan;
4. Menciptakan stabilitas demokrasi, harmonisasi sosial, dan trantibumlinmas masyarakat;
5. Mewujudkan sarana prasaran yang berkualitas dan berkelanjutan;
6. Mewujudkan ketahanan sosial, ekologi, dan budaya yang berkualitas;
7. Mewujudkan pembangunan ekoomi berbasis kecamatan/kelurahan sebagai titik pertumbuhan ekonomi baru untuk memperkuat konektivitas dan pemerataan; dan
8. Mewujudkan kesinambungan pembangunan yang merata.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



Gambar 4. 2
Hubungan antara Visi dan Misi dalam RPJPD Kota Madiun 2025-2045

Dalam rangka pencapaian misi diatas diperlukan tujuan dan sasaran pembangunan. Keterkaitan antara Misi, Tujuan, dan Sasaran dalam RPJPD 2025 - 2045 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4. 1 Keterkaitan Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Dalam RPJPD 2025 - 2045

Tujuan dan Sasaran		
1. Kota Madiun Menjadi Kota Berdaya Saing Tinggi		
T1	Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan dan Stabilitas Kehidupan Sosial Masyarakat	IT1.1. Indeks Reformasi Briokrasi
S1	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	IS1.1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Madiun
		IS1.2. Nilai Laporan Penyelanggaraan Pemerintah Daerah
S2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	IS2.1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Kota Madiun
		IS2.2. Indeks Inovasi Daerah
2. Intensitas Emisi GRK Menurun Menuju Net Zero Emission		
T2	Terwujudnya Pembangunan infrastruktur Kota yang Maju, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan	IT2.1. livable city
S3	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur kota	IS3.1. Indeks Infrastruktur
S4	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	IS4.1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Tujuan dan Sasaran		
3. Daya Saing SDM dan Peningkatan Produktivitas Daerah		
T3	Terwujudnya Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing	IT3.1. Indeks Pembangunan Manusia
		IT3.2. Indeks Pembangunan Gender
S5	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	IS5.1. Harapan Lama Sekolah
		IS5.2. Rata-rata Lama Sekolah
S6	Meningkatnya Derajat kesehatan Masyarakat	IS6.1. Angka Harapan Hidup
S7	Meningkatnya Pemberdayaan Gender	IS7.1. Indeks Pemberdayaan Gender
4. Peningkatan Pendapatan Perkapita		
T4	Terwujudnya Pembangunan ekonomi inklusif	IT4.1. Indeks Pembangunen Ekonomi Inklusif
S8	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	IS8.1. Tingkat Pengangguran Terbuka
S9	Meningkatnya Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi	IS9.1 Persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan
		IS9.2. Persentase pertumbuhan PDRB sektor jasa
5. Kemiskinan Menuju 0% dan Ketimpangan Berkurang		
T5	Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan dan Stabilitas Kehidupan Sosial Masyarakat	IT5.1. Indeks Ketentraman
		IT5.2. Indek Gini
S10	Pengurangan Kemiskinan	IS10.1. Angka Kemiskinan
S11	Meningkatnya stabilitas kehidupan sosial masyarakat	IS11.1. Indeks Kerukunan
		IS11.2. Indeks rasa aman

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025

Prioritas dan sasaran pembangunan merupakan acuan dalam hal pelaksanaan pembangunan daerah, dalam hal ini adalah pelaksanaan pembangunan Kota Madiun. Prioritas pembangunan daerah tahun 2025 dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun sebelumnya, isu-isu strategis pembangunan, aspirasi masyarakat dalam musrenbang tahunan, pokok pikiran DPRD, dan arah kebijakan pembangunan tahunan pemerintah yang tertuang dalam RPJMD. Penyusunan prioritas pembangunan didasarkan pada isu strategis Kota Madiun pada tahun berkenaan dengan memperhatikan urgensi, efisiensi, efektivitas, dan daya ungkit bagi kinerja pembangunan daerah.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Prioritas pembangunan Kota Madiun turut mempertimbangkan arah kebijakan nasional dan Provinsi Jawa Timur guna menciptakan keselarasan kebijakan pada level pemerintahan yang berbeda. Prioritas pembangunan Kota Madiun diarahkan pada upaya penyelesaian terhadap masalah-masalah yang mendesak dan berdampak luas terhadap upaya peningkatan kesejahteraan rakyat.

Proses perencanaan pembangunan daerah Kota Madiun tahun 2025 memperhatikan berbagai kebijakan pembangunan nasional, Provinsi yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 serta kebijakan pembangunan daerah dalam RPD Kota Madiun Tahun 2025 - 2026. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan sinkronisasi antar kebijakan pusat, provinsi dan daerah.

4.2.1 Prioritas dan Tema Pembangunan Nasional Tahun 2025

Penentuan prioritas pembangunan nasional mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025. Tahun 2025 merupakan tahun awal dalam rangka menyongsong pemenuhan target sasaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Prioritas pembangunan nasional menekankan pada penyelesaian dan penuntasan semua program dan pembangunan yang telah direncanakan pada 5 (lima) periodesasi RPJMN-RPJPD.

Terdapat 9 (sembilan) misi dalam upaya penjabaran dari visi pemerintah yaitu mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Misi Presiden tersebut yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkedaulatan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya; dan
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



Gambar 4. 3 Agenda Pembangunan RKP 2025

Sebagaimana yang termuat pada Gambar 4.3 di atas, terdapat 5 (lima) agenda pembangunan yang menjadi prioritas pembangunan beserta sasarannya. Dalam upaya mencapai 5 (lima) agenda pembangunan pemerintah menetapkan proyek dengan daya ungkit tinggi. Proyek tersebut diantaranya 41 proyek prioritas strategis. lima agenda pembangunan utama pemerintah pusat diantaranya sebagai berikut:

1. Transformasi Ekonomi

   Upaya transformasi ekonomi membutuhkan adanya kemajuan dalam ekosistem inovasi dan kualitas investasi yang baik. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:

   1) penguatan iptek, inovasi, dan produktivitas ekonomi;
   2) percepatan penerapan ekonomi hijau;
   3) penguatan fondasi utama transformasi digital; dan
   4) pengembangan integrasi ekonomi domestik dan global.

2. Transformasi Sosial

   Penguatan transformasi sosial difokuskan pada penuntasan pemenuhan layanan dasar pada seluruh siklus hidup manusia. Upaya yang dilakukan dalam mewujudkan transformasi sosial adalah dengan cara:

   1) meningkatkan akses kesehatan untuk semua;
   2) meningkatkan akses pendidikan yang merata; dan
   3) memberikan perlindungan sosial yang adaptif.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

3. Transformasi Tata Kelola

Negara wajib hadir dalam melayani dan melindungi segenap bangsa, serta menegakkan kedaulatan negara, melalui:

1) pelayanan publik yang berorientasi pada digitalisasi;
2) pembentukan lembaga tunggal pengelola regulasi dan tata kelola regulasi yang adaptif;
3) penyederhanaan dan penguatan penyusunan proses bisnis layanan prioritas; dan
4) transformasi budaya kerja dan kelembagaan manajemen Aparatur Sipil Negara.

4. Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia

Dalam pembangunan bidang hukum terdapat beberapa isu strategis yang masih menjadi kendala yaitu pada aspek budaya hukum, kelembagaan hukum, penerapan dan penegakan hukum baik pidana maupun perdata, perlindungan, pemenuhan dan penghormatan hak asasi manusia serta penguatan akses terhadap keadilan. Penguatan supremasi hukum dilakukan melalui:

1) pembaruan substansi dan transformasi kelembagaan hokum;
2) penguatan kerjasama politik dan keamanan kawasan serta penyelesaian permasalahan perbatasan negara; dan
3) penguatan kebebasan sipil dan kesetaraan.

5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

Keberagaman sosial dan budaya yang tinggi di Indonesia tecermin dalam berbagai aspek kehidupan. Hal tersebut turut didukung oleh kondisi ekologi Indonesia sebagai salah satu negara dengan keanekaragaman hayati tinggi di dunia. Penguatan ketahanan sosial budaya dan ekologi dilakukan melalui:

1) penguatan moderasi beragama;
2) pengurangan ancaman terhadap kelestarian keanekaragaman ekosistem dan spesies; dan
3) peningkatan kualitas lingkungan hidup dari segala aspek, seperti air, udara, lahan, dan air laut.

Sejalan dengan kondisi perkembangan ekonomi global dan nasional, pemerintah menetapkan tema pembangunan dalam RKP 2025 yaitu “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan. Selanjutnya, RKP Tahun 2025 ditekankan pada isu-isu sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1. Penguatan daya saing dan produktivitas sumber daya manusia. Sasaran ini dicapai melalui upaya transformasi sosial yang dapat dicapai dengan beberapa kebijakan seperti penetapan program wajib belajar 12 tahun dan restrukturisasi kelembagaan di bidang pendidikan dan pendidikan tinggi
2. Peningkatan produktivitas melalui infrastruktur. Sasaran ini dapat diwujudkan melalui upaya transformasi ekonomi yang dapat dilakukan dengan mendorong integrasi hub laut dan hub udara untuk menciptakan konektivitas regional. Selain itu, infrastruktur juga difokuskan pada percepatan transisi energi dan percepatan infrastruktur IKN
3. Belum adanya peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, sehingga mandat-mandat transformatif dari sisi kelembagaan maupun tata kelola administrasi birokrasi belum dapat terlaksana. Isu lain berkenaan dengan transformasi tata kelola adalah belum optimalnya digitalisasi pelayanan publik.
4. Dalam hal supremasi hukum, terdapat beberapa isu strategis, seperti masih rendahnya literasi hukum masyarakat, lemahnya budaya hukum penyelenggara negara, dan belum terpetakannya permasalahan hukum. Selain itu, terdapat permasalahan di bidang penegakan hukum pidana seperti belum selarasnya LPH dengan menerapkan penegakan keadilan restoratif.
5. Dalam hal ketahanan sosial budaya dan ekologi, terdapat beberapa isu strategis meliputi belum meratanya akses sanitasi aman oleh masyarakat di Kabupaten/Kota. Kebutuhan air bersih juga menjadi salah satu permasalahan. Saat ini kondisi akses air minum aman di Indonesia hanya sebesar 11,8 persen (SKAMRT, 2020), artinya masih banyak masyarakat yang belum mempunyai akses air minum aman. Selain itu, Penyediaan energi terkendala dengan semakin menurunnya produksi dan cadangan minyak bumi sehingga pasokan kebutuhan dalam negeri masih bergantung pada impor. Pada sisi akses energi, pemanfaatan gas dari skala rumah tangga sampai industri masih tergolong rendah karena terbatasnya infrastruktur gas. Untuk aspek keterjangkauan, harga energi masih tergolong tinggi di beberapa wilayah sehingga membutuhkan subsidi energi yang cukup besar.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Sejalan dengan prioritas pembangunan nasional tahun 2025, arah kebijakan nasional yaitu:

1. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim;
2. Peningkatan kualitas pelayanan Kesehatan dan Pendidikan;
3. Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan;
4. Penguatan Daya Saing Usaha;
5. Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi;
6. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas; dan
7. Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Pembahasan Tema, Prioritas dan Arah Kebijakan RKP tahun 2025 yang telah dijabarkan dalam uraian di atas, dapat digambarkan dalam Gambar 4.4.



Gambar 4. 4 Tema, dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025

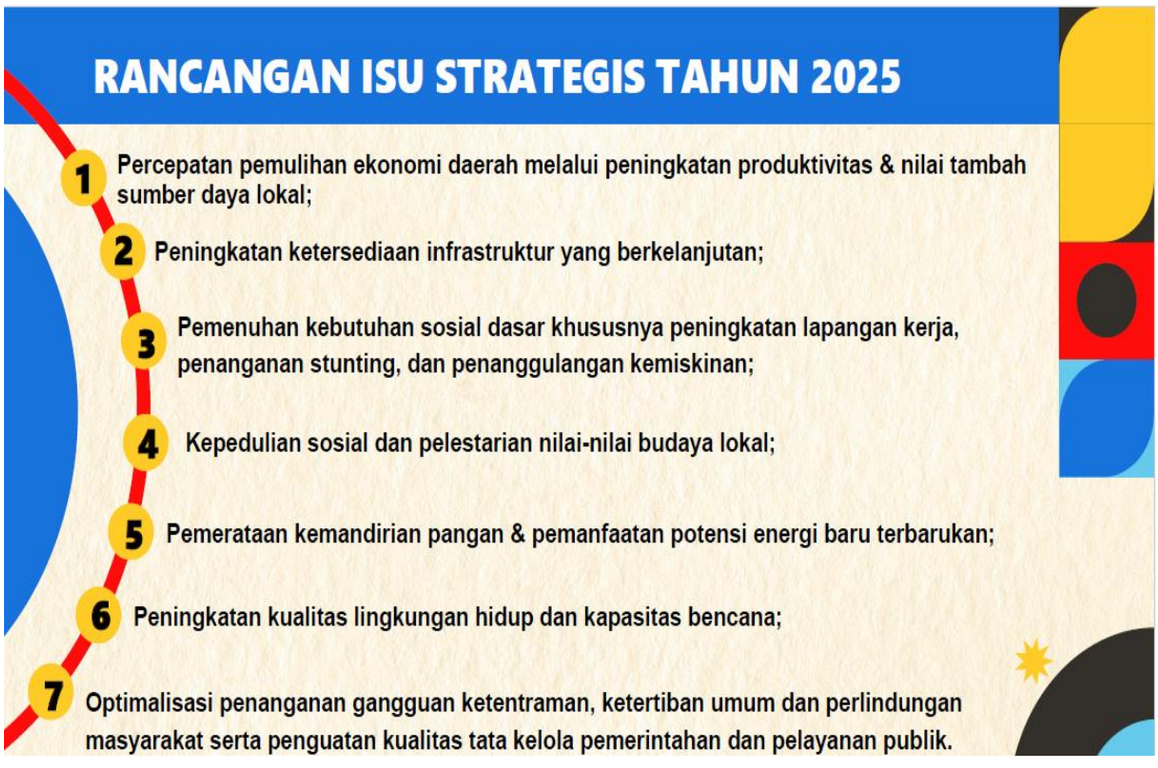
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

4.2.2 Prioritas dan Tema Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2025

Dalam menentukan Tema dan Prioritas Pembangunan yang tertuang dalam dokumen Rancangan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025, telah memperhatikan Isu Strategis sebagaimana tertuang dalam RPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 - 2026 meliputi:

1. Percepatan pemulihan ekonomi daerah melalui peningkatan produktivitas dan nilai tambah sumber daya local;
2. Peningkatan ketersediaan infrsatruktur yang berkelanjutan;
3. Pemenuhan kebutuhan layanan dasar Bidang Pendidikan, Kesehatan, Perumahan, Sanitasi dan Sosial Dasar Khususnya Peningkatan Lapangan Kerja, Penanganan Stunsting, dan Penanggulangan Kemiskinan;
4. Kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal;
5. Pemerataan kemandirian pangan dan pemanfaatan potensi energi baru terbarukan;
6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kapasitas Bencana; dan
7. Tatakelola pemerintahan yang belum optimal.

Dari Prioritas pembangunan tahun 2025-2026 di atas, telah dirumuskan beberapa isu strategis tahunan yang nantinya akan menjadi fokus yang akan diselesaikan pada tahun 2025 dalam rangka menyongsong mewujudkan Indonesia.



Gambar 4. 5 Isu Strategis Provinsi Jawa Timur Tahun 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Sebagaimana yang termuat pada Gambar 4.5 diatas, dalam upaya menyelesaikan Isu Strategis, pemerintah provinsi menetapkan 9 (sembilan) Rancangan Program Prioritas Tahun 2025, seperti terlihat dalam gambar berikut:



Gambar 4. 6 Rancangan Program Prioritas Provinsi Jawa Timur Tahun 2025

Sebagaimana Sebagaimana yang termuat pada Gambar 4.6 di atas, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menetapkan 9 (sembilan) program prioritas untuk Tahun 2025. Keenam program prioritas pembangunan tersebut sebagai berikut:

1) Pengentasan Kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial;
2) Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi;
3) Peningkatan pelayanan dasar berkualitas disektor pendidikan dan kesehatan;
4) Pembangunan insfrastruktur pengembangan wilayah terpadu dan berkeadilan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

5) Pembangunan karakter masyarakat yang berbasis nilai-nilai kesalehan sosial, budi pekerti luhur dan berintegrasi;
6) Pembangunan sektor pertanian, perikanan, kehutanan, perkebunan berbasis kerakyatan;
7) Pembangunan ekonomi kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong pemberdayaan pemerintah desa;
8) Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efektif dan anti korupsi; dan
9) Menjaga harmoni sosial dan alam dengan melestarikan kebudayaan dan lingkungan hidup.

Tema RKP Tahun 2025 adalah Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Sedangkan dalam RPD Provinsi Jawa Timur, arah kebijakannya adalah Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Mendukung Daya Saing Daerah Menyambut Era Industri Perdagangan dan Jasa Berbasis Agro guna meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.

Sejalan dengan RKP dan RPD tersebut, tema pembangunan Provinsi Jawa Timur 2025 adalah “Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Untuk Mendukung Transformasi Ekonomi Inkkuasif dan Berkelanjutan”.

Dalam upaya mencapai agenda dan prioritas pembangunan provinsi Jawa Timur, Pemerintah pusat maupun provinsi Jawa Timur menerapkan klastering wilayah, hal ini dilakukan dalam rangka pengembangan wilayah dengan memanfaatkan potensi daerah sehingga meningkatkan nilai tambah pada wilayah yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang rendah dan untuk peningkatan keterkaitan kantong-kantong produksi utama di Jawa Timur dengan pusat pengolahan dan pemasaran.

Sebagaimana yang termuat pada Gambar 4.7 di bawah ini, percepatan pembangunan Kawasan di jawa Timur diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



Gambar 4. 7 Pembagian Kawasan percepatan Pembangunan di Jawa Timur

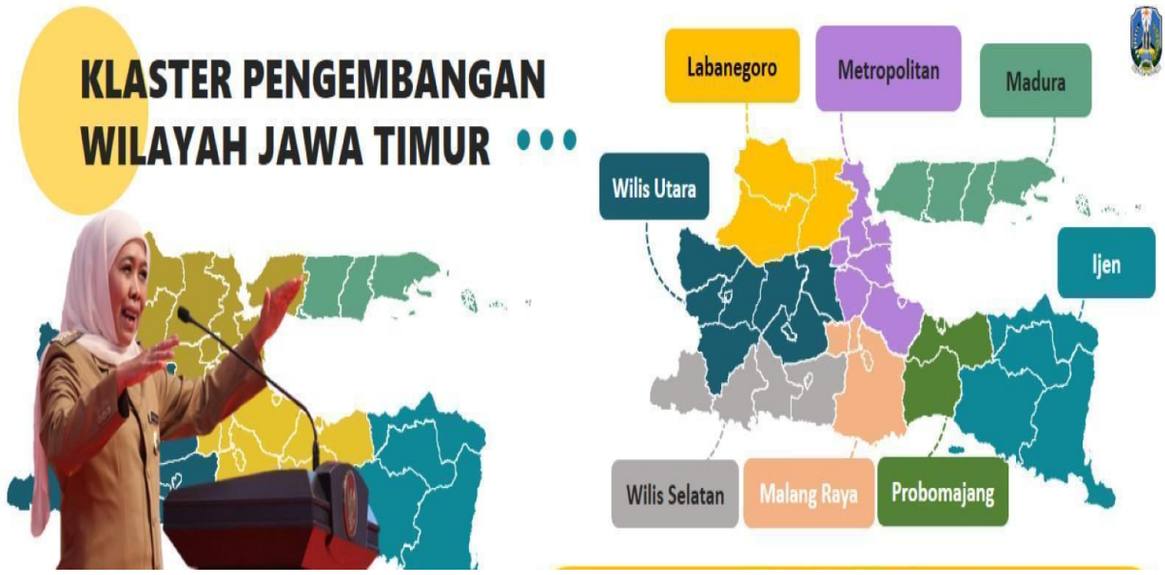
Selain mengatur tentang percepatan pembangunan ekonomi kawasan Gerbang Kertasusila dan sekitarnya, kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta kawasan selingkar Wilis dan Lintas Selatan, pembangunan kawasan di tujukan di daerah hinterland utama Gerbang Kertasusila+. Kawasan prioritas kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan, meliputi Kota Kediri, Kabupaten Kediri, Kabupaten Nganjuk, Kota Blitar, Kabupaten Blitar, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Madiun, Kota Madiun, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Trenggalek, dan Kabupaten Pacitan dengan fokus utama agroproduksi dan agroindustri, serta sektor pariwisata.

Pengembangan Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan mempunyai tema peningkatan nilai tambah agroindustri dan pengembangan agropolitan. Tema yang digunakan untuk pembangunan Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan tersebut melihat dari kondisi ekonomi saat ini yang memberikan kontribusi ekonomi yang paling tinggi di Provinsi Jawa Timur. Pengembangan Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan difokuskan pada peningkatan produksi dan prodtiktivitas pertanian hortikultura, perkebunan dan nilai tambah Agroindustri, dan pengembangan Kawasan Agropolitan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di perdesaan.

Nilai tambah Agroindustri pada komoditas perkebunan dan hortikultura, serta biofarmaka. Pengembangan pariwisata berbasis agro dan sumberdaya alam lainnya (geopark dan Iainnya) diharapkan dapat mengungkit perkembangan sektor ekonomi lainnya. Didukung dengan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), peningkatan aksesibilitas infrastruktur pendukung lainnya dengan tetap menjamin kelestarian lingkungan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Pembagian Wilayah Pembangunan pada Provinsi Jawa Timur, dibagi menjadi 8 (delapan) klister yaitu: Wilis Utara, Wilis Selatan, Malang Raya, Probomajang, Ijen, Madura, Metropolitan dan Labanegoro.



Gambar 4. 8 Pembagian Klaster Wilayah Pembangunan Jawa Timur

Sebagaimana yang termuat pada Gambar 4.8 di atas, di Jawa Timur, penetapan klaster di Jawa Timur dirumuskan atas dasar RKP tahun 2025 - 2026 dan juga arah pembangunan kewilayahan Jawa Timur yaitu sebagai Pusat Agrobisnis terkemuka. Klaster kewilayahan difokuskan pada pemerataan pembangunan melalui penciptaan pusat-pusat pertumbuhan dengan peningkatan dan penyediaan infrastruktur pendukung. Klaster kewilayahan yang ditetapkan menjadi dasar sasaran kebijakan pengembangan kewilayahan dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, sosial dan budaya di seluruh wilayah Jawa Timur.

Salah satu pengembangan klaster adalah klaster 2 (2) yaitu Wilis Utara. Klaster Wilis Utara terdiri dari Kabupaten Ngawi, Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Jombang, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Magetan, Kabupaten Kediri dan Kota Kediri. Klaster ini terbentuk karena kesamaan sektor unggulan yaitu sektor pertanian dan kehutanan.

Arahan pengembangan pada Klaster Selingkar Wilis dan Lintas Selatan adalah:

a. Aspek Sosial

Klaster Wilis Utara terbentuk dari latar belakang yang sama sebagai turunan dari budaya Matraman. Seperti halnya budaya Matraman dari Keraton Solo dan Surakarta, dalam kehidupan sosial masyarakatnya masih ada sistem pelapisan sosial atau stratafikasi sosial. Mayoritas wilayah Matraman masih menganut garis keturunan Patrilineal, dimana laki-laki mendapatkan keistimewaan lebih banyak dari wanita dalam hak tahta maupun harta.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Berbeda dengan wilayah Klaster Wilis Selatan, di wilayah Wilis Utara tidak ada daerah pesisir pantai seperti Wilis Selatan, melainkan daerah dataran rendah dan pegunungan. Hal tersebut yang membentuk mata pencaharian masyarakatnya yang agraris atau sebagai petani. Selain itu yang membedakan Wilis Utara dengan Wilis Selatan adalah masyarakat di daerah Wilis Utara lebih bersifat pluralistik atau majemuk.

Hal itu disebabkan karena di beberapa wilayah Wilis Utara sudah menjadi daerah industri, sehingga terjadi interaksi sosial antara pendatang yang bekerja disektor industri dengan masyarakat lokal. Masyarakat di wilayah Wilis Utara merupakan masyarakat transisi, yaitu masyarakat yang awal mulanya masyarakat desa kemudian bertransisi menuju masyarakat perkotaan. Masyarakat transisi ini sangat mudah untuk menerima hal – hal baru tanpa ada seleksi, sehingga akan merubah kebudayaan yang lebih dulu ada termasuk adat istiadat dan mata pencaharian. Adanya perubahan yang terjadi di wilayah ini sangatlah cepat, munculnya istilah Orang Kaya Baru akibat industrialisasi karena berkurangnya interaksi sosial antar masyarakat. Dengan adanya hal tersebut maka di wilayah Wilis Utara memerlukan pendampingan terhadap sumber daya manusia ataupun pengelolaan potensi sumber daya alamnya.

Pendampingan tersebut haruslah berkelanjutan karena menghindari perubahan sosial budaya yang sangat cepat. Di daerah klaster Wilis utara ini, masih terdapat kondisi wilayah tertinggal dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar dan pergerakan perekonomian khususnya di daerah-daerah pegungungan, terpencil dan terdalam, oleh karena itu diperlukan beberapa alternatif kebijakan seperti peningkatan akses masyarakat terhadap layanan fasilitas Kesehatan, peningkatan akses layanan pendidikan terhadap masyarakat di daerah terpencil, dan perluasan lapangan pekerjaan yang mampu menyerap tenaga kerja lokal secara optimal melalui pengembangan kegiatan ekonomi wilayah berbasis komoditas unggulan.

b. Aspek Ekonomi

Peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor primer melalui hilirisasi produk unggulan dan pembangunan enkubator ekonomi (anjungan cerdas, perluasan pemasaran produk dengan upaya mewujudkan keterkaitan pasar lokal dengan pasar regional, dan peningkatan akses masyarakat terhadap sumber-sumber pendanaan untuk meningkatkan akses terhadap produksi, teknologi, informasi, pemasaran maupun akses permodalan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

c. Aspek Infrastruktur

Peningkatan layanan prasarana transportasi dalam rangka mendukung sistem logistik; Peningkatan kualitas lingkungan permukiman melalui penyediaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman, dan peningkatan konektivitas ekonomi melalui penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang memadai dan handal serta penyediaan aksesibilitas antara Bandara dengan Jalan Tol.

4.2.3 Prioritas dan Tema Pembangunan Kota Madiun Tahun 2025

Perumusan prioritas pembangunan Kota Madiun Tahun 2025 di dasarkan pada sinkronisasi prioritas pembangunan nasional di level nasional dan provinsi. Selain itu, prioritas pembangunan mengacu pada startegi dan arah kebijakan serta program prioritas yang tertuang dalam RPD tahun 2025-2026. Selanjutnya, perumusan prioritas pembangunan juga melihat permasalahan dan isu strategis yang berkembang, serta pokok pikiran anggota dewan perwakilan daerah. Telaah terhadap Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas Pembangunan dalam RPD 2025-2026 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4. 2 Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas Pembangunan dalam RPD 2025-2026

No	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas
1	2	3	4
1	Meningkatkan kontribusi sektor unggulan dalam perekonomian	Peningkatan kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB	Program Pemasaran Pariwisata
		Peningkatan Pengelolaan Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
			Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya
		Pengembangan ekonomi kreatif	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
		Pengembangan ekonomi digital masyarakat	
		Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan yang representatif	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
			Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
			Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
2	Meningkatkan produktivitas dan daya saing IKM, Usaha Mikro dan koperasi	Pengembangan Sistem Pendukung Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2	3	4
		Peningkatan Produktivitas IKM dan Usaha Mikro	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
		Peningkatan kelembagaan koperasi	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
			Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
3	Meningkatkan akses ekonomi secara merata	Peningkatan kualitas layanan moda transportasi umum	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
		Manajemen dan rekayasa transportasi	
		Peningkatan kualitas infrastruktur jalan	Program Penyelenggaraan Jalan
4	Meningkatkan pemerataan pembangunan	Peningkatan kemitraan ekonomi dan pembangunan daerah	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
			Program Penataan Bangunan Gedung
			Program Pembangunan Jasa Konstruksi
		Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
5	Meningkatkan kondusifitas iklim berinvestasi	Penyediaan kebijakan ramah investasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
			Program Promosi Penanaman Modal
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
		Penyederhanaan prosedur pendukung perizinan dan investasi	Program Pelayanan Penanaman Modal
			Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal
6	Meningkatkan harmonisasi sosial kemasyarakatan	Peningkatan kemanana dan kenyamanan lingkungan serta bermasyarakat	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
			Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
			Program Penanggulangan Bencana
			Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
			Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
			Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2	3	4
7	Meningkatkan kuantitas dan kualitas pembangunan berbasis kesetaraan dan keadilan gender	Peningkatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat responsif gender	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
			Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak
			Program Pemenuhan Hak Anak
8	Meningkatkan pemberdayaan pada perempuan	Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak serta Rehabilitasi Sosial	Program Perlindungan Perempuan
			Program Peningkatan Kualitas Keluarga
			Program Perlindungan Khusus Anak
9	Menurunkan tingkat kemiskinan	Pengurangan Pengangguran	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
			Program Penempatan Tenaga Kerja
		Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat	Program Pengembangan Perumahan
			Program Kawasan Permukiman
10	Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Peningkatan kualitas proses pembelajaran untuk memenuhi target SPM bidang pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan
		Pengembangan layanan pendidikan anak usia dini	
11	Meningkatkan pendidikan inklusif	Pengembangan layanan pendidikan inklusif	
12	Meningkatkan akses dan kualitas internet dan teknologi pendidikan	Peningkatan fasilitasi pertukaran budaya dan pendidikan	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
			Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
			Program Pembinaan Perpustakaan
			Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno
13	Meningkatkan kualitas hidup bermasyarakat yang rukun dan berbudaya	Penguatan peran masyarakat dalam membangun Kerukunan	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
			Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
		Pelestarian Seni dan Budaya yang berbasis kearifan lokal	Program Pengembangan Kebudayaan
			Program Pengembangan Kesenian Tradisional
14	Meningkatkan pendidikan karakter masyarakat	Peningkatan partisipasi aktif pemuda	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
		Peningkatan Minat dan Bakat	Program Pengembangan Kurikulum
15	Meningkatkan kualitas pengajar	Peningkatan kualitas manajemen sekolah	Program Pendidikan Dan Tenaga Kependidikan
16	Meningkatkan sistem pembelajaran aktif dan interaktif	Peningkatan Harapan Lama Sekolah	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2	3	4
17	Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan	Peningkatan akses serta kualitas pelayanan kesehatan terpadu	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
		Peningkatan sumber daya dan informasi kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
		Peningkatan Promosi, upaya Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
		Peningkatan pelayanan kesehatan primer dan rujukan	
18	Meningkatkan kualitas gizi masyarakat	Peningkatan akses pangan dan perilaku pangan masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang dan aman.	Program Pemberdayaan Sosial
19	Meningkatkan kualitas dan kuantitas ketersediaan pangan	Peningkatan ketersediaan pangan	Program Pengawasan Keamanan Pangan
		Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
20	Meningkatkan penerapan pengolahan sampah yang terintegrasi dan berkelanjutan	Optimalisasi jaringan drainase perkotaan	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
			Program Pengelolaan Sumber Daya Air
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
		Peningkatan kualitas perumahan dan permukiman	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum
		Peningkatan tata kelola sampah dan limbah secara berkelanjutan	Program Pengelolaan Persampahan
21	Meningkatkan edukasi kelestarian lingkungan berkelanjutan	Peningkatan upaya pemanfaatan dan pengendalian tata ruang	Program Penyelanggaraan Penataan Ruang
		Penguatan kualitas koordinasi, pembinaan dan pengawasan serta sinergi pemanfaatan ruang	
		optimalisasi Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2	3	4
		Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	Program Perencanaan Lingkungan Hidup
			Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
			Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
			Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
			Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
			Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
22	Meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan	Peningkatan kompetensi dan keterampilan masyarakat	Program Pengembangan UMKM
		Pengembangan sentra-sentra usaha/produk ekonomi lokal (produk khas daerah) berbasis kelurahan	
23	Memperluas kesempatan kerja	Peningkatan jaringan tenaga kerja	Program Hubungan Industrial
24	Meningkatkan pengawasan dan regulasi pasar	Peningkatan kemudahan distribusi barang	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
			Program Penanganan Kerawanan Pangan
25	Meningkatkan Perlindungan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial	Peningkatan database kemiskinan berbasis RT/RW	Program Rehabilitasi Sosial
		Penguatan program pengentasan kemiskinan	
		Peningkatan jejaring sosial	Program Penanganan Bencana
		Peningkatan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
		Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat	
			Program Kawasan Permukiman

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2	3	4
26	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran	Peningkatan kualitas perencanaan dan pelaporan pembangunan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		Peningkatan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan daerah	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
			Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
			Program Kepegawaian Daerah
			Program Penyelenggaraan Pengawasan
			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
		Peningkatan peran dan kinerja lembaga pengelolaan keuangan daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
		Optimalisasi PAD	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
		Peningkatan kemandirian fiskal daerah	
27	Meningkatkan kualitas dan manajemen pelayanan publik	Penerapan layanan publik berbasis sistem informasi dan teknologi *(e-government*) terpadu	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
28	Meningkatkan kualitas implementasi e-Government	Peningkatan dan pengintegrasian kualitas penyelenggaraan pemerintahan berbasis *e-government*	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
29	Meningkatkan inovasi pelayanan publik	Peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik yang profesional dan melayani	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
30	Meningkatkan kualitas pembentukan ekosistem inovasi pada UMKM		
31	Meningkatkan kerjasama internasional melalui *sister city*	Peningkatan kerjasama antar daerah, provinsi, dan nasional	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
32	Meningkatkan akses dan implementasi *smart city*		

Sebagaimana yang termuat pada Tabel 4.2 di atas, telaah selanjutnya dalam proses perumusan prioritas pembangunan adalah dari hasil Pokok-pokok pikiran (POKIR) DPRD, yang dilaksanakan melalui serap aspirasi masyarakat baik lewat mekanisme reses masa sidang maupun kunjungan kerja.

Hasil dari reses dan kunjungan kerja tersebut dituangkan dalam POKIR DPRD yang mencakup beberapa aspek yang mendukung prioritas pembangunan yang masuk dalam aplikasi SIPD sebagaimana tabel 4.3.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Tabel 4. 3 Usulan Pokok Pikiran DPRD yang Masuk dalam Aplikasi SIPD

NO	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR
1	2	3	4	5
1	Perbaikan Saluran Air / Gorong - Gorong	Kondisi saluran di Jalan Tawang Bhakti ini sudah rusak sehingga tidak dapat berfungsi dengan baik. Apabila terjadi hujan, air seringkali menggenang sehingga menyebabkan terjadinya banjir di jalan karena saluran tidak dapat menampung debit air dengan baik.	Jalan Tawang Bhakti, Kelurahan Tawangrejo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	Perbaikan Saluran Air / Gorong - Gorong	Perbaikan Saluran Air atau Selokan yang ada di Jalan Flores sisi Utara (depan Makam Cangkring) ini merupakan usulan perbaikan lanjutan mengingat saluran air atau selokan di Jalan Flores sisi Selatan sudah diperbaiki. Hal ini dimaksudkan agar serapan air di sekitar Jalan Flores dapat maksimal dan tentunya untuk mencegah terjadinya banjir.	Jalan Flores sisi Utara (depan Makam Cangkring), Kelurahan Kartoharjo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3	Perbaikan Saluran Air / Gorong - Gorong	Saluran air atau selokan di sepanjang Jalan Sarean ini sudah cukup lama mengalami kerusakan. Kerusakan tersebut menyebabkan sering terjadinya genangan air / banjir disekitar Jalan Sarean bilamana hujan deras. Adapun ukuran saluran ini adalah sebagai berikut, panjang = ± 400 - 500 m ; lebar = 0,40 m ; tinggi = 0,40 m dengan hitungan volumenya adalah 80 m^3. Mohon adanya perbaikan saluran Jalan Sarean tersebut mengingat usulan ini sudah diajukan sejak reses Tahun 2021.	Sepanjang Jalan Sarean sisi Utara dari Gapura Ujung Barat s/d Ujung Timur belok ke Selatan, meliputi wilayah RT 15/RW 05, RT 16/RW 05 dan RT 21/RW 07, Kelurahan Taman, Kecamatan Taman, Kota Madiun.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	Perbaikan Jalan	Kondisi aspal di Jalan Jambu Kembar sudah banyak yang rusak dan berlubang sehingga mengganggu aktivitas warga sekitar. Ukuran dari jalan yang rusak tersebut yaitu panjang = 200 m dan lebar = 3 m. Mohon adanya pengaspalan hotmix untuk Jalan Jambu Kembar tersebut mengingat usulan ini sudah diajukan sejak tahun 2022 tapi sampai saat ini belum terealisasi.	Jalan Jambu Kembar, Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman, Kota Madiun.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5	Perbaikan Saluran Air / Gorong - Gorong	Kondisi saluran drainase di Jalan Nangka sudah mengalami kerusakan sejak lama. Air tidak dapat mengalir dengan lancar bahkan sebagian kondisinya sudah rusak dan ambrol. Mohon adanya perbaikan saluran drainase di Jalan Nangka sisi kanan maupun kiri.	Jalan Nangka (sisi kanan maupun kiri), RT 31 / RW X, Kelurahan Taman, Kecamatan Taman, Kota Madiun.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2	3	4	5
6	Penyediaan / Perbaikan Lampu Jalan	belum adanya lampu jalan	Lingkungan RT 13, Jl. Sawo Kel Kejuro, Kota Madiun	-
7	Penyediaan / Perbaikan Lampu Jalan	Lampu penerangan jalan	Lingkungan RT 13, Jalan Sawo Kelurahan Kejuron Kecamatan Taman, Kota Madiun.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
8	Pengajuan Alat Kesenian	Penggantian Dadak Merak Reog yang sudah rusak kelompok seni reog Blandotan Macan	Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun.	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
9	Pengajuan Alat Kesenian	Penggantian Dadak Merak Reog yang sudah rusak kelompok seni Reog Blandotan Macan	Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun.	-
10	Pavingisasi	Pavingisasi perempatan Jalan Ciliwung Gg IV selokan dipindah di tengah	Jalan Ciliwung Gg IV Kelurahan Josenan Kecamatan Taman Kota Madiun.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
11	Pavingisasi	Pavingisasi Jalan Tuntang Kelurahan Pandean RT 37	Jalan Tuntang Kelurahan Pandean RT 37 Kecamatan Taman Kota Madiun.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
12	Bantuan Alat Bantu bagi Disabilitas	Lowongan kerja untuk disabilitas	Area Madiun Kota Madiun.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
13	Penyediaan / Perbaikan Lampu Jalan	Lampu penerangan jalan	JL. Sultan Trenggono Kelurahan Manguharjo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
14	Pengadaan Sarpras Olahraga	Perbaikan ring basket dan pengecetan ring lapangan basket jalan Dwi Jaya Kelurahan Klegen Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun senilai Rp 3.000.000	Jl. Dwi Jaya Kelurahan Klegen Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun.	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
15	Perbaikan Saluran Air / Gorong - Gorong	Perbaikan saluran pertanian Punden Kelun sepanjang 300m sebesar Rp 300.000.000	Kelun Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
16	Pembangunan Jalan	Pengaspalan jalan di Jl. Sultan Trenggono	Jl. Sultan Trenggono Kecamatan Manguharjo Kota Madiun.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
17	Normalisasi Sungai atau Saluran	Jalan Guna Wijaya RT 27 depan sinilah sepanjang kurang lebih 210 meter kanan kiri pembuatan saluran yg lama terlalu kecil	Jl. Guna Wijaya RT 27 Kelurahan Klegen Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
18	Normalisasi Sungai atau Saluran	Saluran lingkungan di Jalan Sawo RT 14	Jl. Sawo Kel Kejuron RT 14 Kec Taman Kota Madiun.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2	3	4	5
19	Pengadaan Sarpras Olahraga	Bantuan perlengkapan voly	Jl. Sultan Trenggono RW 04, Kota Madiun	-
20	Bantuan Sosial yang diberikan kepada Individu	Pengadaan rombong jualan untuk bpk Slamet Saputro	Jl. Sultan Trenggono RT/RW 17/04 Kel. Manguharjo Kec. Manguharjo Kota Madiun.	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
21	Pembangunan Jalan	Pengaspalan jalan Pajang bagian utara	Jl. Pajang bagian utara Kelurahan Manguharjo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
22	Penyediaan / Perbaikan Lampu Jalan	lampu penerangan jalan di Jalan Pajang sebelah utara	Jl. Pajang sebelah utara Kelurahan Manguharjo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
23	Bantuan Bibit Tanaman Pohon Buah	Penebangan pohon mangga di depan rumah	Jl. Gajahmada 66 Kelurahan Winongo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun.	-
24	Pembangunan / Perbaikan Pagar Makam	Permasalahan yang sebenarnya adalah permohonan pembangunan toilet / kamar mandi di Makam Cangkring. Namun, karena pilihan usulan tersebut tidak ada dalam kamus, sehingga sesuai arahan dari Sekretariat DPRD agar dimasukkan ke usulan yang sekiranya mirip atau hampir sama. Adapun permohonan pembangunan toilet ini dilatarbelakangi banyaknya jumlah peziarah di Makam Cangkring, bahkan datang dari luar kota sehingga seringkali mereka membutuhkan toilet pada saat sedang ziarah. Ukuran toilet 2 m x 2 m	Makam Cangkring, Kelurahan Kartoharjo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
25	Perbaikan Jalan	Jalan sudah rusak sehingga tidak nyaman bagi pengguna jalan dikawatirkan nantinya mengakibatkan pengguna jalan jatuh	Perum Bumi Mas 1 RT/RW 59/07 Blok AA, Blok BB, Blok Z dan Blok Y, Kota Madiun	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
26	Normalisasi Sungai atau Saluran	Rehab dan normalisasi saluran perbatasan Perumnas I dan Perum Bumi Mas I RT/RW 59/07 Blok AA, Blok BB, Blok Y	Perumnas I dan Perum Bumi Mas I RT/RW 59/07 Blok AA, Blok BB, Blok Y, Kota Madiun	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
27	Perbaikan Saluran Air / Gorong - Gorong	Lanjutan renovasi saluran di Jalan Sriwibowo RT/RW 07/03 panjang -+ 100 meter	Jl. Sriwibowo RT/RW 07/03, Kel. Sukosari Kec. Kartoharjo Kota Madiun.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
28	Perbaikan Saluran Air / Gorong - Gorong	Renovasi saluran air di jalan Srikaloko RT/RW 08/03 panjang -+ 250 meter	Jl. Srikaloko RT/RW 08/03 Kel. Sukosari Kec. Kartoharjo Kota Madiun.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2	3	4	5
29	Perbaikan Jalan	Kondisi Jalan Puspowarno mulai banyak berlubang dan terjal. Oleh karena itu mohon dapatnya untuk dilakukan pengecoran jalan tersebut. Adapun panjang jalan 120 m dan lebarnya 3 m.	Jalan Puspowarno, RT 08/ RW 03, Kelurahan Sogaten, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
30	Perbaikan Jalan	Kondisi Jalan Puspowarno tidak rata dan cukup terjal sehingga mengganggu akses masyarakat yang melewatinya. Oleh karena itu mohon dapatnya untuk dilakukan pengecoran jalan tersebut. Adapun panjang jalan 100 m serta lebarnya 3 m.	Jalan Puspowarno, RT 08/RW 03, Kelurahan Sogaten, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
31	Pembangunan Saluran Air / Gorong - Gorong	Mohon dapatnya dilakukan Pembuatan Saluran Tengah dengan panjang jalan 114,5 m dan lebar jalan 3 m	Jalan Campursari Gg. IV, RT 17/ RW 06, Kelurahan Sogaten, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
32	Perbaikan Jalan	Kondisi jalan di Jalan Maskumambang Gg. I dan Gg. III sudah rusak dan terjal. Mohon dapatnya dilakukan pengecoran jalan atau pengaspalan jalan pada lokasi tersebut. Panjang jalan 557 m dan lebar 3 m	alan Maskumambang Gg. I dan Gg. III, RT 07/ RW 03 dan RT 09 / RW 03, Kelurahan Sogaten, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
33	Perbaikan Jalan	Peningkatan jalan atau pengaspalan jalan dengan ukuran panjang 50 m dan lebar 5 m	Jalan Campursari Utara RT 13/ RW 05 dan RT 15/ RW 06, Kelurahan Sogaten, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
34	Perbaikan Jalan	Kondisi jalan saat ini tidak rata dan perlu peningkatan atau pengaspalan. Adapun ukuran jalan yaitu panjang 90 m dan lebar 2,5 m.	Jalan Gambirsawit Selatan, RT 18/ RW 06, Kelurahan Sogaten, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
35	Pavingisasi	Kondisi makam Klumpit saat ini belum terpaving. Mohon adanya pavingisasi untuk Makam Klumpit, Sogaten	Makam Klumpit, Jalan Puspowarno, RT 11/ RW 04, Kelurahan Sogaten, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
36	Pembangunan atau Rehabilitasi Gedung Daerah	Memperbaiki lapangan voli RTH Nusa Penida untuk taman di sisi barat dan timur dirubah menjadi tribun penonton	Jl. Nusa Penida Kel. Klegen Kec. Kartoharjo Kota Madiun.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
37	Pembangunan Saluran Air / Gorong - Gorong	Pembuatan Saluran Tengah dengan panjang 82 m dan lebar bahu jalan 3 m	Jalan Gambir Sawit Selatan Gg. III RT 19/ RW 07 tembus RT 20/ RW 07, Kelurahan Sogaten, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
38	Perbaikan Jalan	Pengaspalan jalan akses menuju RTH di Jalan Nusa Penida	Jl. Nusa Penida Kel. Klegen Kec. Kartoharjo Kota Madiun.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2	3	4	5
39	Penyediaan / Perbaikan Lampu Jalan	Lampu penerangan lapangan RTH di Jalan Nusa Penida untuk dibenahi biar semakin terang	Jl. Nusa Penida Kel. Klegen Kec. Kartoharjo Kota Madiun.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
40	Pavingisasi	Pavingisasi jalan dengan panjan 82 m dan lebar bahu jalan 3 m	alan Gambir Sawit Selatan Gg. III RT 19/ RW 07 tembus RT 20/ RW 07, Kelurahan Sogaten, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
41	Pavingisasi	Kondisi paving di Jalan Gambir Sawit Utara Gg. IV sudah banyak yang berubah warna dan berlumut. Mohon dapatnya untuk dilakukan pavingisasi di lokasi tersebut	Jalan Gambir Sawit Utara Gg. IV, RT 14/ RW 05, Kelurahan Sogaten, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
42	Penyediaan / Perbaikan Lampu Jalan	Kondisi Jalan Gambir Sawit Selatan ini belum memiliki Penerangan Jalan Umum (PJU) yang memadai. Mohon dapatnya untuk penambahan PJU di lokasi tersebut	Jalan Gambir Sawit Selatan Gg. III, RT 19/ RW 07 tembus RT 20/ RW 07, Kelurahan Sogaten, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
43	Penyediaan / Perbaikan Lampu Jalan	Kondisi Jalan Puspowarno di sekitar area Makam Klumpit belum tercover PJU dengan maksimal. Mohon dapatnya untuk penambahan PJU pada lokasi tersebut	Jalan Puspowarno, RT 11/ RW 04, Kelurahan Sogaten, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
44	Penyediaan / Perbaikan Lampu Jalan	Penambahan PJU untuk Jalan Gambir Sawit Selatan agar tidak terlalu gelap pada malam hari dan memudahkan akses masyarakat yang melewati jalan tersebut	Jalan Gambir Sawit Selatan Gang III, Kelurahan Sogaten, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun.	-
45	Penyediaan / Perbaikan Lampu Jalan	Penambahan PJU untuk Jalan Campursari Utara agar tidak terlalu gelap pada malam hari dan memudahkan akses masyarakat yang melewati jalan tersebut	Jalan Campursari Utara, RT 13 dan RT 17, Kelurahan Sogaten, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
46	Penyediaan / Perbaikan Lampu Jalan	Penambahan PJU untuk Jalan Maskumambang Gg. I dan Gg. III agar tidak terlalu gelap pada malam hari dan memudahkan akses masyarakat yang melewati jalan tersebut	Jalan Maskumambang Gg. I dan Gg. III, Kelurahan Sogaten, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
47	Penyediaan / Perbaikan Lampu Jalan	enambahan PJU untuk Jalan Gambir Sawit Utara Gg. IV agar tidak terlalu gelap pada malam hari dan memudahkan akses masyarakat yang melewati jalan tersebut	Jalan Gambir Sawit Utara Gg. IV, Kelurahan Sogaten, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
48	Perbaikan Saluran Air / Gorong - Gorong	Perbaikan saluran air di Gg 2 Jl. Slamet Riyadi No 8b karena setelah di paving jadi lebih tinggi jalan daripada saluran air	Gg 2 Jl. Slamet Riyadi No. 8b RT 21 Kel. Klegen Kec. Kartoharjo Kota Madiun.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2	3	4	5
49	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	RTLH atas nama Penis (blandar patah penghuni janda)	Jl. Mastrip 26B RT/RW 06/02 Kel. Klegen Kec. Kartoharjo Kota Madiun.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
50	Perbaikan Jalan	Kondisi Aspal Jalan tersebut sudah banyak yang mengelupas dan rusak, sehingga memerlukan pengaspalan ulang di jalan tersebut, Adapun rinciannya adalah sebagai berikut: Jl. Ganed: 100 Meter, Jl. Foker: 120 Meter, Jl. Elektra: 150 Meter, Jl. Dakota: 150 Meter, Jl. Catalina: 150 Meter, Jl. Albatros: 215 Meter,	Perumahan Bumi Antariksa RW. 09-10, Kelurahan Klegen, Kecamatan Kartoharjo., Kota Madiun.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
51	Pemasangan Speed Bump / Speed Hump	Pengadaan pemasangan Speed Bump / Speed Hump di jalan Trijaya di timur rumah bu Karti	Jl. Trijaya Kel. Klegen Kec. Kartoharjo Kota Madiun.	Dinas Perhubungan
52	Perbaikan Saluran Air / Gorong - Gorong	Saluran air ini mengalami kerusakan fisik akibat ukurannya yang tidak memadai. Selain itu, kerusakan juga disebabkan oleh penyumbatan akibat banyaknya sampah yang terbuang ke saluran air. Hal ini dapat menyebabkan banjir dan berbagai masalah kesehatan lainnya.	Jl. Kantil Winongo, Kota Madiun	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
53	Pembangunan / Perbaikan Pagar Makam	Bantuan tenda untuk gali makam, 4x6 m	Makam Pagu Wareng, Kota Madiun	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
54	Perbaikan Jalan	Proses penempatan kabel jalan/kabel tanam dalam proyek tidak dilakukan dengan sempurna, sehingga sering menyebabkan kecelakaan.	Pagu, Kota Madiun	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
55	Pemasangan Speed Bump / Speed Hump	Pengadaan Speed Bump / Speed Hump karena motor kalau lewat kencang-kencang	Jl. Pendowo Gg Repelita I, Kota Madiun	Dinas Perhubungan
56	Perbaikan Jalan	Pengaspalan jalan Pendowo untuk diperbarui dan kalau hujan jalan Pendowo yang selatan depan puskesmas banjir	Jl. Pendowo Kel. Klegen Kec. Kartoharjo Kota Madiun.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
57	Sarana dan Prasarana Posyandu	Perbaikan teras untuk Posyandu IV	Jl. Nusa Tenggara No. 20 RT/RW 16/04 Kel. Klegen Kec. Kartoharjo Kota Madiun.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
58	Normalisasi Sungai atau Saluran	Perlunya Pembangunan Plengsengan/Tanggul agar luapan air jika cuaca ekstrim tidak terjadi banjir masuk ke rumah warga	Perum Bumi Winongo Indah 2 RT 34 RW 07 Manguharjo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2	3	4	5
59	Pembangunan atau Rehabilitasi Gedung Daerah	Keadaan tembok sudah banyak yang retak karena usia bangunan sudah lama di gedung pertemuan RT/RW 05/02	Jl. Thamrin Gg Perjuangan I No. 110B Kel. Klegen Kec. Kartoharjo Kota Madiun.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
60	Pembangunan RTH	Pembangunan RTH untuk tempat ramah lansia dan anak	Jl. Karya Wijaya RT/RW 28/06 Kel. Klegen Kec. Kartoharjo Kota Madiun.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
61	Perbaikan Saluran Air / Gorong - Gorong	Perbaikan saluran air di jalan Bhakti Wijaya belakang pinggir sawah -+ 300 meter	Jl. Bhakti Wijaya Kel. Klegen Kec. Kartoharjo Kota Madiun.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
62	Perbaikan Saluran Air / Gorong - Gorong	Perbaikan saluran air di Jalan Satriya Wijaya -+ 300 meter	Jl. Satriya Wijaya Kel. Klegen Kec. Kartoharjo Kota Madiun.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
63	Perbaikan Saluran Air / Gorong - Gorong	Ada beberapa kerusakan dari saluran air RT 22 RW 5 Perumahan Dumai	Perumahan Dumai RT 22 RW 5, Kota Madiun	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
64	Pavingisasi	Pavingisasi	Jl. Thamrin selatan Gg Sarean, Kota Madiun	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
65	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	RTLH atas nama Bapak Yuli karena rumahnya sudah tidak layak huni	Gg Kantil RT/RW 02/01 Kel. Klegen Kec. Kartoharjo Kota Madiun.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
66	Bantuan Sosial yang diberikan kepada Individu	Pengadaan gerobak jualan untuk Ibu Rahayu dipergunakan untuk berjualan di lapangan RTH.	Jl. Thamrin Gg. IX/12B Kel. Klegen Kec. Kartoharjo Kota Madiun.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
67	Perbaikan Jalan	Kondisi aspal di Jalan Koperasi Kelurahan Banjarejo sudah banyak yang rusak, berlubang serta tidak rata. Adapun kondisi jalan yang berlubang tersebut pernah diaspal tetapi tidak menyeluruh, dan hanya ditambal / diaspal bagian yang lubangnya saja. Mohon adanya perhatian pengaspalan jalan secara menyeluruh di lokasi tersebut.	Jalan Koperasi, Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
68	Perbaikan Jalan	Kondisi akses jalan masuk Makam Sedoro sudah banyak yang rusak dan perlu diaspal kembali. Mohon adanya pengaspalan jalan pada lokasi tersebut	Makam Sedoro, Jalan Sedoro, Kelurahan Banjarejo, Kota Madiun.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
69	Perbaikan Jalan	Kondisi aspal di Jalan Genen Kelurahan Banjarejo sudah banyak yang rusak, berlubang serta tidak rata. Mohon adanya pengaspalan jalan di lokasi tersebut.	Jalan Genen, Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2	3	4	5
70	Perbaikan Jalan	Kondisi aspal di Jalan Banjarwaru Kelurahan Banjarejo sudah banyak yang rusak dan berlubang. Mohon adanya pengaspalan jalan di lokasi tersebut.	Jalan Banjarwaru, Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
71	Pengadaan Sarpras Olahraga	Bantuan Matras untuk kegiatan olahraga para pemuda atau masyarakat di lingkungan Kelurahan Banjarejo	Kelurahan Banjarejo, Kota Madiun.	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
72	Pengajuan Alat Kesenian	Mohon bantuan seperangkat alat Gamelan Reog sebagai sarana untuk melestarikan budaya atau kesenian tradisional	Jalan Banjarwaru, Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun.	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
73	Pembangunan Saluran Air / Gorong - Gorong	Mohon adanya pembangunan saluran lanjutan di Jalan Sedoro Gg. I agar lokasi tersebut tidak banjir saat hujan	Jalan Sedoro Gg. I, Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
74	Pembangunan Saluran Air / Gorong - Gorong	Mohon adanya pengadaan saluran di Jalan Terate Gg. I agar lokasi tersebut tidak banjir jika musim penghujan	Jalan Terate Gg. I, Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
75	Pembangunan / Perbaikan Pagar Makam	Pengadaan tempat untuk kemandikan jenazah dan peralatan	Jl. Jl. Mastrip No. 26B RT/RW 06/02 Kel. Klegen Kec. Kartoharjo Kota Madiun.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
76	Sarana dan Prasarana Posyandu	Perbaikan pos kamling gang Kantil RT/RW 02/01	Gg Kantil RT/RW 02/01 Kel. Klegen Kec. Kartoharjo Kota Madiun.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
77	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	RTLH rumah Bapak Aan Kurniawan teras mau amblas	Jl. Trimulyo No. 41 Kel. Klegen Kec. Kartoharjo Kota Madiun.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
78	Penyediaan / Perbaikan Lampu Jalan	Lampu di Sepanjang jalan tanjung manis dan gang satu membutuhkan perbaikan dan penambahan tiang	jalan tanjung manis kota madiun, Kota Madiun	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
79	Pembangunan / Perbaikan Pagar Makam	Makam Nitinegoro Temboknya roboh	Jalan Makam Nitinegoro Kelurahan Demangan, Kota Madiun	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
80	Pembangunan Saluran Air / Gorong - Gorong	Perlu pembangunan saluran	Jalan Walet, Kota Madiun	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
81	Perbaikan Jalan	Belum ada zebra croos menuju masjid gading	masjid gading, Kota Madiun	Dinas Perhubungan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2	3	4	5
82	Pemeliharaan Pasar	Menyesuaikan	Pasar Pancasila Pangongangan, Kota Madiun	Dinas Perdagangan
83	Bantuan Sosial yang diberikan kepada Individu	Akses bantuan untuk anak sekolah mohon agar dipermudah	Anak Sekolah sekota madiun, Kota Madiun	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
84	Pelatihan Pengembangan UMKM	Pelatihan pelapak Sriti dan pancasoka	Lapak Sriti dan Pancasoka, Kota Madiun	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
85	Pembangunan Jalan	pengaspalan Jalan Masjid	RT 20, 21, 22 RW 5 Kanigoro, Kota Madiun	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
86	Perbaikan Jalan	pengaspalan jalan surya bakti mojorejo karena sudah rusak	jalan surya bakti kelurahan mojorejo, Kota Madiun	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
87	Perbaikan Jalan	Jalan sudah rusak perlu pengaspalan di jalan marga bakti	Jalan marga bhakti RT 36 RW 09, Kota Madiun	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
88	Perbaikan Jalan	Pengaspalan jalan salak barat 4, 5,6 dan jalan salak barat karena sudah bolong bolong	Jalan salak barat 4, 5,6 dan jalan salak barat, Kota Madiun	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
89	Pelatihan Pengembangan UMKM	Paguyuban Pedagang Lapangan Taman (Ciliwung) Meminta Agar Lapak Yang Sekarang Tidak Dipindah namun Digeser, Dirapikan, Diperbaiki dan Diperbarui berbarengan dengan konsep yang sama	Lapak Lapangan Ciliwung Kelurahan Taman, Kota Madiun	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
90	Pemeliharaan RTH atau Taman	Pembenahan dan Perbaikan area mainan dan RTH sebelah selatan Lapangan Ciliwung	Area mainan dan RTH sebelah selatan Lapangan Ciliwung Kelurahan Taman Kota Madiun.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
91	Pembangunan RTH	Penambahan pompa sibel untuk pengairan lapangan taman	Lapangan Ciliwung Kelurahan Taman, Kota Madiun	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
92	Penyediaan / Perbaikan Lampu Jalan	Penambahan Titik Lampu Di Jalan Sarean Utamanya Yang Sambung Ke Jati Jajar Karena Gelap	Jalan Sarean Kelurahan Taman, Kota Madiun	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
93	Perbaikan Jalan	Pelebaran jalan pesanggrahan 5 karena sudah semakin ramai kendaraan lalu lalang, bisa menutup selokan di sisi barat dengan box culvert	Jalan Pesanggrahan 5 RW XI Kelurahan Taman, Kota Madiun	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
94	Pembangunan Saluran Air / Gorong - Gorong	Pembuatan saluran air	Jl. Kapten Tendean Gg. Kijang, Demangan, Kota Madiun	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
95	Pavingisasi	Pavingisasi Area Gg Kijang Demangan	Jl. Kapten Tendean Gg. Kijang, Demangan, Kota Madiun	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2	3	4	5
96	Pengadaan Rambu - Rambu Jalan	Pemasangan cermin cembung	Jalan Pucang Jaya, Kota Madiun	Dinas Perhubungan
97	Pembangunan Saluran Air/ Gorong - Gorong	Pembangunan saluran air jl. Pucang anom	Jl. Pucang anom, Kota Madiun	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
98	Pembangunan Saluran Air / Gorong - Gorong	Selokan di gang.1 jl. Jatikusumo, demangan	Selokan di gang.1 Jl. Jatikusumo, demangan, Kota Madiun	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
99	Pembangunan Saluran Air / Gorong - Gorong	Selokan + Tutup	RT. 25 Jl. Jati Kusumo, Kota Madiun	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
100	Perbaikan Saluran Air / Gorong - Gorong	Tutup selokan	Jl. Jatisiwur, Kota Madiun	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
101	Penyediaan / Perbaikan Lampu Jalan	PJU di Jl. Jati Siwur dan Jl. Jati Kusumo	Jl. Jati Siwur dan Jl. Jati Kusumo, Kota Madiun	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
102	Normalisasi Sungai atau Saluran	Pendalaman selokan/parit sepanjang jalan Budo manis baik yg ada disebelah barat jalan maupun di timur jalan.	Budo Manis, Kota Madiun	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
103	Normalisasi Sungai atau Saluran	Saluran air macet perlu normalisasi	jalan pucang anom dan gang rukung; ucang anom manisrejo, Kota Madiun	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
104	Pembangunan / Perbaikan Trotoar	Trotoarisasi jalan protokal Kota Madiun sepanjang jalan Tanjung Raya antara G.J PLN s/d Pertigaan Pasar Kojop	Kanan kiri jalan Tanjung Raya, Kota Madiun	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
105	Normalisasi Sungai atau Saluran	Normalisasi Kali Kunto yang melintas di sepanjang area taman, pandean dan kejuron karena menjadi punjer banjir dan genangan di sekitar salak, pesanggrahan dan sekitarnya	kali kunto di sepanjang kelurahan taman, pandean dan kejuron, Kota Madiun	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
106	Perbaikan Saluran Air / Gorong - Gorong	saluran sepanjang jalan salak raya utara dan selatan perlu normalisasi karena sering ada genangan	Salak Raya Taman, Kota Madiun	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
107	Bantuan Bibit Ikan Budidaya	Untuk instalasi bioflok baru di P2L Taman Lestari	P2L Taman Lestari Taman Kota Madiun.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
108	Pembangunan RTH	lunturnya budaya lokal (Bersih desa) sekitaran lokasi punden tidak terurus kotor sehingga menjadikan aset terlantar dan Bpk. Walikota madiun Dr. Drs. H. MAIDI, S.H., M.M., M.Pd. di waktu kunjungan berjanji untuk membangun sendang tersebut sendang tersebut	Jl. Tanjung Manis Gg. 9 kelurahan manisrejo kecamatan taman kota madiun.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
109	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Rumah sudah tidak layak untuk hidup dan tidak sehat penghuni 2 orang lansia perempuan yang tidak punya penghasilan tetap	Jl. Tanjung manis Gg. 2 kelurahan manirejo kecamatan taman kota madiun RT. 09 Rw. 03 an. Ibu Sulam, Kota Madiun	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2	3	4	5
110	Bantuan Bibit Ikan Budidaya	Permohonan bibit ikan nila untuk pengembangan usaha di dalam kelompok budidaya ikan agar bisa mencukuppi kebutuhan pasar ikan nila di kota madiun	Perumahan manisrejo 1 kelurahan manisrejo kecamatan taman kota madiun kelompok budidaya ikan TIRTO MIGUNO, Kota Madiun	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
111	Perbaikan Saluran Air / Gorong - Gorong	Saluran air ini mengalami kerusakan fisik akibat ukurannya yang tidak memadai. Selain itu, kerusakan juga disebabkan oleh penyumbatan akibat banyaknya sampah yang terbuang ke saluran air. Hal ini dapat menyebabkan banjir dan berbagai masalah kesehatan lainnya.	Jl. Semangka, Taman, Kota Madiun.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
112	Perbaikan Saluran Air / Gorong - Gorong	Saluran air ini tidak berfungsi dengan baik karena ukurannya yang kecil dan tidak mampu menampung debit air yang besar. Selain itu, saluran air juga tersumbat oleh sampah, sehingga aliran air menjadi terhambat.	Jl. Cempedak, Kel. Taman, Kec. Taman, Kota Madiun.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
113	Perbaikan Saluran Air / Gorong - Gorong	Saluran air ini mengalami kerusakan fisik dan fungsional. Kerusakan fisik disebabkan oleh ukurannya yang tidak memadai, sehingga saluran air tidak mampu menampung debit air yang besar. Kerusakan fungsional disebabkan oleh penyumbatan akibat banyaknya sampah yang terbuang ke saluran air.	Jl. Mundu Kel. Taman, Kec. Taman, Kota Madiun.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
114	Pembangunan Saluran Air / Gorong - Gorong	Saluran sebagian sudah ambrol sehingga air menggenang sehingga menimbulkan bau yang tidak sedap dikarenakan air berasal dari limbah rumah tangga berdampak dari bau tersebut pada kententraman bermasyarakat. dan di waktu hujan air meluap dari saluran dan menggenang di jalan	Jl. Tanjungmanis Rt. 08 RW. 03 Kelurahan Manisrejo Kec. Taman Kota Madiun (Timur Jalan).	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
115	Pengajuan Beasiswa Pendidikan	Anak dari keluarga tidak mampu beberapa kali pengajuan tidak mendapatkan beasiswa	JL. Tanjung manis no 39. Rt. 08 Rw. 03 Kelurahan Manisrejo Kec. Taman Kota madiun.	Dinas Pendidikan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2	3	4	5
116	Pembangunan Saluran Air / Gorong - Gorong	Tidak saluran air di dalam lingkungan RT. 16 & 17 RW. 05 Kel. Banjarejo	Jl. Loji RT. 16 & 17 RW 05 Kelurahan Banjarejo Kecamatan Taman Kota Madiun Belum ada fasilitas umum berupa saluran air sehingga mengakibatkan air tergenang di jalan dan bermuara di halaman rumah warga sekitar, Kota Madiun	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
117	Sarana dan Prasarana Posyandu	Pembangunan Posyandu lansia dan Posyandu balita	Jl. Thamrin Gg. Perjuangan 1 No 110B RT/RW 05/02, Kota Madiun	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
118	Sarana dan Prasarana Posyandu	Pembangunan Posyandu Lansia di RW 01 Klegen	Jl. Thamrin RW 01 Kel. Klegen Kec. Kartoharjo Kota Madiun.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
119	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Atap rumahnya sudah patah di rumah Abah Kosin	Kec. Kartoharjo Kota Madiun, Kota Madiun	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
120	Pembangunan Saluran Air / Gorong - Gorong	Plengsengan Ambrol sehingga saluran air terhambat oleh matrial runtuhan plengsengan tersebut saluran tersebut adalah salah satu saluran pembuangan dari perumahan manirejo 2, ketika hukan lebat akan terjadi banjir ketiak saluran tersebut tersumbat	Jl. Grahamanis III RT. 45 RW. 10 Kel. Manirejo Kec Taman Kota Madiun.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
121	Pembangunan Saluran Air / Gorong - Gorong	Sebagian belum adanya saluran air dan Adanya musim hujan yang hampir turun tiap hari awal tahun 2024 Sehingga saluran air (selokkan) tidak dapat menampung jumlah air yang curahnya dengan volumenya sangat besar, sehingga air lari kejalan dan mencari arusnya sendiri dan mengakibatkan air tergenang di jalan dan bermuara di halaman rumah warga sekitar	Jl. Loji RT. 16 & 17 RW 05 Kelurahan Banjarejo Kecamatan Taman Kota Madiun.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
122	Pavingisasi	Pemasangan Paving 160x2,5 m di Jl. Sriwibowo Gg. Sedoro Kel. Sukosari Kec. Kartoharjo Kota Madiun	Jl. Sriwibowo Gg. Sedoro Kel. Sukosari Kec. Kartoharjo Kota Madiun.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2	3	4	5
123	Penyediaan / Perbaikan Lampu Jalan	Pemasangan lampu Penerangan di RT. 16 RW. 04 Kel. Klegen lokasi di Jl. Nusatenggara Gg. Masjid Nuzulul Jariyah RT. 16. RW.04 Kel. Klegen Kec. Kartoharjo	lokasi 1. Masuk gang masjid nuzulul jariyah. Di pertigaam gang 1 titik, lokasi 2. Ujung gang nuzulul jariyah 1 titik, lokasi 3. Depan masjid Nuzulul jariyah 1 titik, lokasi 4. Tengah2 gang ke arah masjid 1 titik, Kota Madiun	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
124	Pembangunan Saluran Air / Gorong - Gorong	Ketika hujan di jalan banjir sehingga air masuk di dalam halaman rumah warga	JL. srilangka RT. 09 RW. 02 Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
125	Pembangunan Jalan	Jalan Rusak Berlubang Sering Terjadi Kecelakaan Dikarenakan Menghindari Jalan Yang Berlubang	Jl. Suryomanis Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiuin Rt. 28 & 29 Rw. 08, Kota Madiun	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
126	Jambanisasi	Jamban Kurang Sehat Sehingga Bakteri Dan Kuman Terkontaminasi Dengan Penghuni Rumah	Jl. Tanjung Manis Rt. 07 Rw. 03 Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun, Kota Madiun	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
127	Pembangunan Saluran Air / Gorong - Gorong	Sebagian belum adanya saluran air dan Adanya musim hujan yang hampir turun tiap hari awal tahun 2024 Sehingga saluran air (selokkan) tidak dapat menampung jumlah air yang curahnya dengan volumenya sangat besar, sehingga air lari kejalan dan mencari arusnya sendiri dan mengakibatkan air tergenang di jalan dan bermuara di halaman rumah warga sekita	Jl. Loji RT. 16 & 17 RW 05 Kelurahan Banjarejo Kecamatan Taman Kota Madiun, Kota Madiun, Kota Madiun	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sebagaimana yang termuat pada Tabel 4.3 di atas, penentuan prioritas pembangunan selanjutnya di dasarkan pada hasil penelaahaan permasalahan pembangunan dan perumusan isu strategis. Isu strategis yang menjadi agenda dan prioritas pembangunan Kota Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan;
2. Peningkatan Kapabilitas, Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia;
3. Reformasi Birokrasi dan Layanan Publik yang Efisien dan Transparan; dan
4. Peningkatan Kualitas Insfrastruktur Perkotaan yang Merata.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Berikut keterkaitan isu strategis nasional, provinsi dan Kota Madiun Tahun 2025 yang digambarkan pada Gambar 4.9.



Gambar 4. 9 Isu Strategis Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kota Madiun Tahun 2025

Tabel 4. 4 Sinkronisasi Prioritas Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kota Madiun Tahun 2025

NO	NASIONAL	PROVINSI	KOTA MADIUN	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM UNGGULAN
1	2	3	4	5	6
1	membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	P4. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkualitas Berbasis Lingkungan dan Berkelanjutan	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	
				Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	
				Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	
				Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	
				Program Penanggulangan Bencana	
				Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	
				Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	
				Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	
				Program Penatagunaan Tanah	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2	3	4	5	6
				Program Perencanaan Lingkungan Hidup	
				Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Program Kampung Iklim dan Sekolah Adiwiyata
				Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	
				Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	
				Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	
				Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	
				Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	
				Program Pengelolaan Persampahan	
2	memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	P4. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkualitas Berbasis Lingkungan dan Berkelanjutan	Program Pengembangan Permukiman	
				Program Penataan Bangunan Gedung	
				Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	
				Program Penyelenggaraan Jalan	
				Program Pengembangan Jasa Konstruksi	
				Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	
				Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	
				Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
3	memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi	P1. Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	
				Program Promosi Penanaman Modal	
				Program Pelayanan Penanaman Modal	
				Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	
				Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	
				Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2	3	4	5	6
				Program Pemasaran Pariwisata	
				Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	
	memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan	P1. Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	
				Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	
				Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	
				Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	
				Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
				Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	
				Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	
				Program Perizinan Usaha Pertanian	
				Program Penyuluhan Pertanian	
	memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, BUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa	P1. Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	
				Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	
				Program Pengembangan Umkm	
				Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	
				Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	
				Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	
				Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	
				Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	
				Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	
				Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kegiatan yang dilaksanakan masyarakat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2	3	4	5	6
4	memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial	P2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	
				Program Perlindungan Perempuan	
				Program Peningkatan Kualitas Keluarga	
				Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	
				Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	
				Program Perlindungan Khusus Anak	
				Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	
				Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	
5	memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	P3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	
				Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	
				Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	
				Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
				Program Pengelolaan Keuangan Daerah	
				Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	
				Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	
				Program Kepegawaian Daerah	
				Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	
6	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	P3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
				Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	
				Program Pendaftaran Penduduk	
				Program Pencatatan Sipil	
				Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
				Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Penyediaan Wifi Gratis bagi Masyarakat
				Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengembangan Aplikasi yang terintegrasi
				Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2	3	4	5	6
				Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	
				Program Pengelolaan Arsip	
				Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	
				Program Perekonomian Dan Pembangunan	
				Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	
				Program Penyelenggaraan Pengawasan	
				Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	
				Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	
7	mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	P4. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkualitas Berbasis Lingkungan dan Berkelanjutan	Program Pengembangan Perumahan	
				Program Kawasan Permukiman	
				Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	
8	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	P2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Bantuan Beasiswa Mahasiswa
				Program Pengelolaan Pendidikan	Seragam Gratis, Pinjam Pakai Laptop Siswa SD dan SMP
				Program Pengembangan Kurikulum	
				Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	
				Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	
				Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	
				Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	
				Program Pengendalian Penduduk	
				Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	
				Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2	3	4	5	6
				Program Pembinaan Perpustakaan	
				Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	
	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial	P2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia	Program Pemberdayaan Sosial	
				Program Rehabilitasi Sosial	
				Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Bantuan Kematian
				Program Penanganan Bencana	
				Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	
				Program Penanganan Kerawanan Pangan	
				Program Pengawasan Keamanan Pangan	
				Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	
				Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	
	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi	P2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	
				Program Penempatan Tenaga Kerja	
				Program Hubungan Industrial	Jaminan Keselamatan Keselamatan Kerja pekerja Informal
9	revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	Pembangunan Karakter Masyarakat yang Berbasis nilai-nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas	P2. Peningkatan Transformasi Sosial melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia	Program Pengembangan Kebudayaan	
				Program Pengembangan Kesenian Tradisional	
				Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	
				Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	
				Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	
				Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	
				Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	

Sebagaimana data yang termuat pada gambar 4.10 di atas, secara detail berikut dijabarkan lebih lanjut isu strategis serta masalah Kota Madiun Tahun 2025, yaitu:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Tabel 4. 5 Isu Strategis dan Masalah Pembangunan Kota Madiun Tahun 2025

ISU STRATEGIS	PERMASALAHAN
1	2
Isu Strategis 1: Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan tertinggi di Jawa Timur tahun 2021, namun peningkatan tersebut belum diikuti oleh percepatan penurunan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan
	Kontribusi sektor unggulan belum optimal
	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) meningkat, namun belum dapat meningkatkan penyediaan lapangan kerja baru
	Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan integrasi system
	Masih rendahnya peningkatan PAD
	Masih rendahnya jejaring pasar perdagangan antar produsen
	Kurangnya mutu produk indutri kecil
	Rendahnya keterampilan industri kecil dalam melakukan diversifikasi dan inovasi dalam pengolahan komoditas hasil pertanian, perkebunan dan peternakan
	Masih rendahnya kesadaran yang dimiliki industri kecil untuk mendapatkan sertifikat SNI dan ISO sebagai salah satu faktor dalam peningkatan daya saing industri
	Beberapa pelaku usaha setelah mendapatkan izin usaha-nya belum mengurus izin komersial-nya, sehingga izin usahanya belum efektif dan belum dapat melakukan usaha, akibatnya nilai investasinya tidak bisa di masukkan sebagai realisasi investasi
	Masih terbatasnya pemahaman dunia usaha untuk menggunakan OSS
	Masih rendahnya konstribusi BUMD
	Masih terbatasnya kontribusi PAD
	Infrastruktur pendukung investasi belum memadai
	Kurangnya cakupan data perdagangan di Kota Madiun
	Masih terbtasnya prasarana ruang kreatif sebagai ruang ekspresi, promosi bagi masyarakat kreatif Kota Madiun
	Kurang optimalnya pengelolaan pasar yang menciptakan perbaikan dan pembaruan pasar sebagai wisata pasar rakyat di Kota Madiun
	Masih terbatasnya fasilitas sarana prasarana seni budaya untuk masyarakat seni Kota Madiun
	Masih sedikitnya destinasi wisata yang ada di Kota Madiun

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2
	Produksi, pengolahan, budaya/regenerasi petani peternak, UPJA/Unit Pelayanan Jasa Alat Mesin Pertanian, dan daya saing sektor pertanian (peternakan dan kesehatan hewan) belum optimal
	Produksi, pengolahan, budaya/regenerasi petani pembudidaya ikan, dan daya saing sektor perikanan belum optimal
Isu Strategis 2: Peningkatan kapabilitas, kualitas, dan daya saing sumberdaya manusia	Belum optimalnya SPM dan SNP. Belum terstandarnya SNP sarpras sekolah
	Masih kurangnya sarana dan prasarana pada lembaga PAUD, lembaga swasta SD dan SMP (khusunya gedung dan bangunan)
	Kurangnya kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan (sertifikasi dan kualifikasi pendidikan tenaga pendidik dan kependidikan)
	Kurangnya kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam pembelajaran abad 21 khususnya dalam penggunaan teknologi dan informasi
	Kurangnya tenaga kependidikan di jenjang pendidikan dasar, termasuk belum terpenuhinya rasio jumlah lembaga dengan jumlah pengawas sekolah. (kurangnya jumlag guru pendidikan dasar dan pengawas sekolah)
	Jumlah dan kompetensi tenaga pendidik tidak merata di setiap sekolah
	Belum banyaknya prestasi nasional yang diraih oleh peserta didik di bidang sains dan kesenian.
	Kuarangnya kualitas pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yaitu sarana prasarana, dan guru.
	Belum berkembangnya metode kurikulum daring
	Kegemaran membaca buku belum menjadi kebutuhan utama
	Perlunya penambahan ruang penunjang fungsi perpustakaan
	Jumlah tenaga pengelola perpustakaan belum memenuhi standard nasional perpustakaan
	Belum semua tenaga pengelola perpustakaan yang ada memiliki komptensi tenaga pengelola perpustakaan sesuai SNP
	Layanan berbasis TIK belum mengikuti perkembangan iptek dan kebutuhan
	Belum optimalnya Capaian Standart Pelayanan Minimal Rumah Sakit
	Keterlambatan pembayaran Klaim oleh BPJS namun pelayanan tetap harus optimal

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2
	Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM), terutama kecukupan Dokter Spesialis, Dokter Gigi, Dokter Umum dan Tenaga Fungsional seperti Apoteker, Rekam Medis, Analis Kesehatan, Elektromedik, Fisikawan Medik, Radiografer, Nutrisionis, Dietesien, Tenaga Terapi Okupasi, Tenaga Teknik Kefarmasian, Tenaga Teknis Transfusi Darah, Perawat Terampil bersertifikat keahlian khusus (Untuk kebutuhan Pelayanan Anaestesi, Hemodialisis, dan ICU) dan akuntan
	Implementasi SIMRS belum optimal, yang terkoneksi ke seluruh unit terutama billing system
	Terbatasnya jangkauan pelayanan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan perorangan
	Meningkatnya kunjungan pasien geriatri menjadi peluang rumah sakit untuk mengembangkan layanan unggulan di bidang tersebut
	Perkembangan tingkat sosial ekonomi, teknologi dan informasi mengakibatkan tingginya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di rumah sakit
	Kemajuan Teknologi dan Informasi, mengharuskan rumah sakit untuk menuju digitalisasi layanan kesehatan sehingga tidak tertinggal
	Semakin banyaknya fasilitas pelayanan kesehatan menyebabkan persaingan dalam industri kesehatan di Kota Madiun semakin tinggi
	Skor Pola Pangan Harapan belum tercapai
	Masih terdapatnya Stunting
	Masih terdapatnya kemiskinan ekstrim
	Menurunnya pengangguran terbuka akan tetapi target masih di atas yang ditetapkan provinsi
	Tidak semua perempuan mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan dalam kewirausahaan dan menurunnya pendapatan perempuan terutama perempuan sebagai kepala keluarga pada pelaku usaha Mikro akibat pandemi Covid-19
	Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
	Belum adanya pedoman dan panduan teknis berupa metode dan cara dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
	Masih terjadinya konflik yang timbul di masyarakat yang dilakukan oleh Organisasi Kemasyarakatan
	Masih terdapatnya perkawinan anak

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2
Isu Strategis 3: Reformasi birokrasi dan layanan public yang efisien dan transparan	Distribusi dan penempatan pegawai sesuai formasi berdasarkan Anjab dan ABK belum optimal Partisipasi ASN untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi masih kurang Pelayanan kepegawaian berbasis IT belum optimal
	Belum adanya dokumen evaluasi jabatan untuk jabatan administrator, pengawas dan pelaksana
	Evaluasi internal belum berjalan optimal
	Jadwal pelaksanaan Diklat dan jenis Diklat harus menyesuaikan Instansi Vertikal
	Perbedaan pemahaman terkait Permendagri 90 Tahun 2020 terkait kewenangan urusan pada perangkat daerah dalam penyusunan SOTK maupun Tata Kerja Perangkat Daerah
	Kurangnya Pengetahuan SDM Perangkat Daerah tentang kelembagaan
	Kurangnya Informasi tentang Standart Pelayanan dari penyelenggara layanan ke masyarakat
	Belum sinkronnya antar dokumen SAKIP
	Belum terintegrasinya antara aplikasi perencanaan, penganggaran dan pelaporan
	Penyusunan Anggaran belum berdasarkan Cascading maupun Proses Bisnis
	Perbedaan pemahaman terkait Permendagri 90 Tahun 2020 terkait perencanaan, penganggaran yang berpengaruh terhadap dokumen SAKIP
	Kurangnya pengetahuan SDM Perangkat Daerah tentang Anjab, ABK, Evaluasi Jabatan, dan Kompetensi Jabatan
	Masih adanya pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)
	Kurangnya sosialisasi Perda dan peraturan perundang-undangan
	SDM Satlinmas yang belum memenuhi kualifikasi sesuai Perwal Nomor 25 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat
	Akses Internet yang kurang memadai
Isi Strategis 4: Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang merata dan berkelanjutan	Kurang optimalnya penyusunan dokumen kegiatan pelaksanaan persetujuan substansi, evaluasi, konsutasi evaluasi dan penetapan RTRW kota
	Kurang optimalnya pelaksanaan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundangan-undangan bidang penataan ruang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2
	Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam penataan ruang
	Kurang optimalnya koordinasi dan singkronisasi pemanfaatan ruang untuk investasi dan pembangunan daerah
	Lemahnya koordinasi dan singkronisasi penertiban dan penegakkan hukum bidang penataan ruang
	banyaknya parkir di tepi jalan dan meningkatnya pengguna jalan dengan kendaraan pribadi membuat penurunan kinerja ruas jalan
	Permukiman kumuh di Kota Madiun yang sebelumnya 0% setelah dilakukan konversi ke 16 parameter sebagaimana ditentukan dalam Permen PUPR No.14 Tahun 2018 masih terdapat 64,2 ha yang tersebar dibeberapa kelurahan dengan status kumuh ringan dan masih terdapat beberapa area yang mendekati kumuh. Untuk mencegah berkembangnya permukiman kumuh serta untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukiman maka terhadap komponen-komponen pembentuk permukiman kumuh perlu penanganan secara terus menerus
	Rumah tinggal yang bersanitasi di Kota Madiun sampai dengan akhir tahun 2019 mencapai 99,00%. Namun demikian jika diteliti lebih jauh kondisi sanitasi rumah tinggal belum semua kondisinya layak dan memadai sesuai standar bangunan sanitasi yang sehat dan aman bagi lingkungan sekitarnya terutama pada keluarga kurang mampu yang tidak dapat memenuhi kebutuhan sanitasi yang layak dan memadai
	Masih terdapat kekurangan kebutuhan rumah baik backlog kepenghunian dan backlog kepemilikan.
	Belum optimalnya penyediaan PSU dalam lingkungan perumahan dan kawasan permukiman
	Belum optimalnya legislasi daerah terutama tataran operasional terkait urusan perumahan dan kawasan permukiman
	Belum optimalnya sarana dan prasarana 83 makam aset Pemerintah Kota Madiun
	Mash terbatasnya sarana dan prasarana perhubungan darat
	Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung dalam penanggulangan bencana
	Pemahaman masyarakat dalam kesiapsiagaan akan risiko bencana masih rendah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2
	Dokumen atau Kajian yang berhubungan dengan Kebencanaan belum tersusun
	Belum adanya SOP Penanganan Bencana
	Kurangnya SDM ASN Pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi
	Kurangnya kesadaran masyarakat sehingga faktor kelalaian manusia yang banyak menyebabkan kejadian kebakaran
	Belum adanya menajemen inspeksi peralatan proteksi kebakaran
	Jumlah pegawai penanggulangan bencana yang terbatas

Sumber: Bapppeda Kota Madiun, 2024

Sebagaimana yang termuat pada Tabel 4.4 di atas, sesuai dengan berbagai telaahan RPD, Pokir DPRD, permasalahan pembangunan dan isu strategis, diperlukan suatu langkah strategis melalui berbagai arah kebijakan. Strategi dan arah kebijakan pembangunan Kota Madiun Tahun 2025 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4. 6 Isu Strategis, Strategi, Arah kebijakan dan Prioritas Pembangunan Kota Madiun Tahun 2025

ISU STRATEGIS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2025
1	2	3	4
Isu Strategis 1: Pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan	Meningkatkan iklim berusaha yang kondusif dalam upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif terutama pada sektor unggulan daerah	Peningkatan pertumbuhan ekonomi berkualitas dan inklusif melalui pengembangan perdagangan, industri, pariwisata, ekonomi digital, dan ekonomi kreatif	Transformasi ekonomi Melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif, dan Digital
Isu Strategis 2: Peningkatan kapabilitas, kualitas, dan daya saing sumberdaya manusia	Meningkatnya pembangunan manusia di bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.	Meningkatkan kapasitas sumber daya dan aksesibilitas layanan pendidikan, kesehatan, dan sosial serta mewujudkan peran serta masyarakat dalam kehidupan sosial, keamanan, ketertiban dan pelestarian budaya	Peningkatan Transformasi Sosial Melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2	3	4
Isu Strategis 3: Reformasi birokrasi dan layanan public yang efisien dan transparan	Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui percepatan reformasi birokrasi, dan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, bersih dan profesional melalui penerapan sistem informasi dan teknologi (e-government) secara terpadu	Peningkatan Profesionalisme ASN, penyediaan data dan informasi yang valid dan mutakhir, pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel	Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik
Isi Strategis 4: Peningkatan Kualitas Infrastruktur Perkotaan yang Merata	Optimalisasi pengelolaan transportasi, Infrastruktur perkotaan dan Pengendalian lingkungan hidup	Pembangunan/ pemeliharaan Infrastruktur perkotaan, pengelolaan lingkungan hidup, manajemen dan rekayasa tranportasi	Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkualitas Berbasis Lingkungan dan Berkelanjutan

Sumber: Bapppeda Kota Madiun, 2024

Kebijakan Pembiayaan pendukung Standar Pelayanan Minimal pada Tahun 2025.

Tabel 4. 7 Rencana Pembiayaan Standart Pelayanan Minimal (SPM) Kota Madiun Tahun 2025

NO	KATEGORI	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TAHUN ANGGARAN 2025		OPD PELAKSANA
					LOKASI	ALOKASI DANA (Rp,00)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pendidikan Dasar		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni Usia 7-12 Tahun, Angka Partisipasi Murni Usia 13-15 Tahun, Angka Partisipasi Murni Usia 5-6 Tahun			Dinas Pendidikan
		Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun Yang Bertasipasi Dalam Pendidikan (APS)	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Lembaga PAUD Yang Terakreditasi			
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	Kota Madiun	133.100.000	
		Jumlah warga Negara usia 7-15 Tahun yang berpartipasi dalam pendidikan dasar (APS)	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Kota Madiun		
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik (SD)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Kota Madiun	5.973.840.000	
			Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Kota Madiun		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2	3	4	5	6	7	8
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik (SMP)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Kota Madiun	3.511.200.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni Usia 7-12 Tahun, Angka Partisipasi Murni Usia 13-15 Tahun, Angka Partisipasi Murni Usia 5-6 Tahun			
			Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase Sekolah Yang Memenuhi SNP			
			Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		1.765.500.000	
			Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Prosentase Sekolah Yang Memenuhi SNP			
			Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		1.776.500.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni Usia 7-12 Tahun, Angka Partisipasi Murni Usia 13-15 Tahun, Angka Partisipasi Murni Usia 5-6 Tahun			
			Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase Sekolah Yang Memenuhi SNP			
			Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia		-	
			Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Prosentase Sekolah Yang Memenuhi SNP			
			Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia		3.975.000.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni Usia 7-12 Tahun, Angka Partisipasi Murni Usia 13-15 Tahun, Angka Partisipasi Murni Usia 5-6 Tahun			
	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga Negara usia 7-18 Tahun yang berpartipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Prosentase Lembaga Non Formal Yang Terakreditasi			
			Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan Yang Mengelola Dana BOP	Kota Madiun	683.320.000	
	Pendidikan Dasar		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni Usia 7-12 Tahun, Angka Partisipasi Murni Usia 13-15 Tahun, Angka Partisipasi Murni Usia 5-6 Tahun			
		Iklim Keamanan SMP	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Prosentase Sekolah Yang Memenuhi SNP			
			Sub kegiatan Pembinaan Kelembagaan Dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah pertama Yang Dilaksanakan Pembinaan	Kota Madiun	70.446.000	
		Iklim Kebhinekaan SD	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase Sekolah Yang Memenuhi SNP			
			Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar Yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan Dan Manajemen Sekolah	Kota Madiun	574.986.000	
		Iklim Kebhinekaan SMP	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Prosentase Sekolah Yang Memenuhi SNP			

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2	3	4	5	6	7	8
			Sub kegiatan Pembinaan Kelembagaan Dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah pertama Yang Dilaksanakan Pembinaan	Kota Madiun	70.446.000	
		Iklim Inklusivitas SD	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase Sekolah Yang Memenuhi SNP			
			Pembinaan Kelembagaan Dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar Yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan Dan Manajemen Sekolah	Kota Madiun	574.986.000	
		Iklim Inklusivitas SMP	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Prosentase Sekolah Yang Memenuhi SNP			
			Sub kegiatan Pembinaan Kelembagaan Dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah pertama Yang Dilaksanakan Pembinaan	Kota Madiun	70.446.000	
			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Tenaga Pendidik Bersertifikasi yang Berprestasi			
		Rata-Rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional	Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Prosentase tenaga pendidik yang bersertifikasi			
			Sub Kegiatan Perhitungan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan nonformal/ kesataraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kota Madiun	1.268.000.000	
			Sub Kegiatan Penataan Pendistribusian Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, Dan Pendidikan Nonfromal/ Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kota Madiun	775.250.000	
		Rata-Rata Kemampuan Numeral SD Berdasarkan Asesmen Nasional	Sub Kegiatan Perhitungan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan nonformal/ kesataraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kota Madiun	1.268.000.000	
			Sub Kegiatan Penataan Pendistribusian Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, Dan Pendidikan Nonfromal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kota Madiun	775.500.000	
		Rata-Rata kompetensi literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Sub Kegiatan Perhitungan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan nonformal/kesataraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kota Madiun	1.268.000.000	
			Sub Kegiatan Penataan Pendistribusian Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, Dan Pendidikan Nonfromal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kota Madiun	775.500.000	
		Rata-Rata Kompetensi Numeransi SMP Berdasarkan Asesmen Nasional	Sub Kegiatan Perhitungan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan nonformal/kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kota Madiun	1.268.000.000	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2	3	4	5	6	7	8
			Sub Kegiatan Penataan Pendistribusian Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, Dan Pendidikan Nonfromal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kota Madiun	775.500.000	
	Pendidikan Anak Usia Dini		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni Usia 7-12 Tahun, Angka Partisipasi Murni Usia 13-15 Tahun, Angka Partisipasi Murni Usia 5-6 Tahun			
		Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD Yang Mendapatkan Minimal AKREDITAS B	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Lembaga PAUD yang terakreditasi			
			Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Kota Madiun	718.750.000	
		Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1/ D IV	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Lembaga PAUD Yang Terakreditasi			
			Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kota Madiun	4.032.000.000	
2		Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan Mencapai Target			Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Indikator SPM Kesehatan Rujukan mencapai Target			
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Madiun	339.891.900	
		Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Madiun	55.048.300	
		Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Madiun	77.589.500	
		Pelayanan Kesehatan Balita	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Madiun	419.713.400	
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Madiun	30.689.000	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Madiun	69.802.300	
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Madiun	43.368.200	
		Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Madiun	27.003.500	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2	3	4	5	6	7	8
		Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Madiun	207.629.500	
		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Pengelolaan Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kota Madiun	112.931.100	
		Pelayanan Kesehatan Orang Terduga tuberkulosis	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kota Madiun	783.915.200	
		Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kota Madiun	71.392.500	
3		Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Jumlah jaringan sambungan rumah yang terpasang	Kota Madiun		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase pelanggan yang terlayani kebutuhan air minum			
			Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun		-	
			Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan			598.476.100	
4		Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Kawasan Permukiman yang Tidak Kumuh			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Madiun
			Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Prosentase kawasan permukiman kumuh yang ditangani			
			Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Berlokasi tersebar di 3 Kecamatan se-Kota Madiun (Kecamatan Kartoharjo, Kecamatan Manguharjo dan Kecamatan Taman)	2.368.850.000	
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	Berlokasi tersebar di 3 Kecamatan se-Kota Madiun (Kecamatan Kartoharjo, Kecamatan Manguharjo dan Kecamatan Taman)	2.662.350.000	
		Penyediaan & Rehabiitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Pengembangan Perumahan			

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2	3	4	5	6	7	8
			Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota yang dihasilkan			
			Sub Kegiatan Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	118.950.000	
			Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program			
			Sub Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.527.900.000	
			Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persentase Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus			
			Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	146.000.000	
5		Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum (TRANTIBUM)	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kasus K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan) yang diselesaikan	Kota Madiun		Satuan Polisi Pamong Praja
			Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			
			Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Kota Madiun	294.400.000	
			Sub kegiatan Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Kota Madiun	565.870.000	
			Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Madiun	158.860.000	
			Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kota Madiun	2.562.125.500	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2	3	4	5	6	7	8
			Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kota Madiun	615.216.260	
			Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota			
			Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kota Madiun	792.428.800	
			Sub Kegiatan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Kota Madiun	900.000.000	
		Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (KEBENCANAAN)	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Kota Madiun		
			Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			
			Sub Kegiatan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Kota Madiun	1.617.195.000	
			Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Madiun	357.178.000	
			Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran				
			Sub Kegiatan Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	Kota Madiun	50.000.000	
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (DAMKAR)	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana			
			Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Kota Madiun	75.600.000	
			Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kota Madiun	36.642.000	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2	3	4	5	6	7	8
		Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Yang Ditangani			Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan informasi rawan bencana			
			Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	Kota Madiun	186.330.000	
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana			
			Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Kota Madiun	162.785.000	
			Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	Kota Madiun	48.131.000	
			Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kota Madiun	207.810.000	
			Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	Kota Madiun	60.210.000	
			Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	Kota Madiun	-	
			Sub Kegiatan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	Kota Madiun	121.110.000	
6		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	Kota Madiun		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti					
		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti					
		Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti					

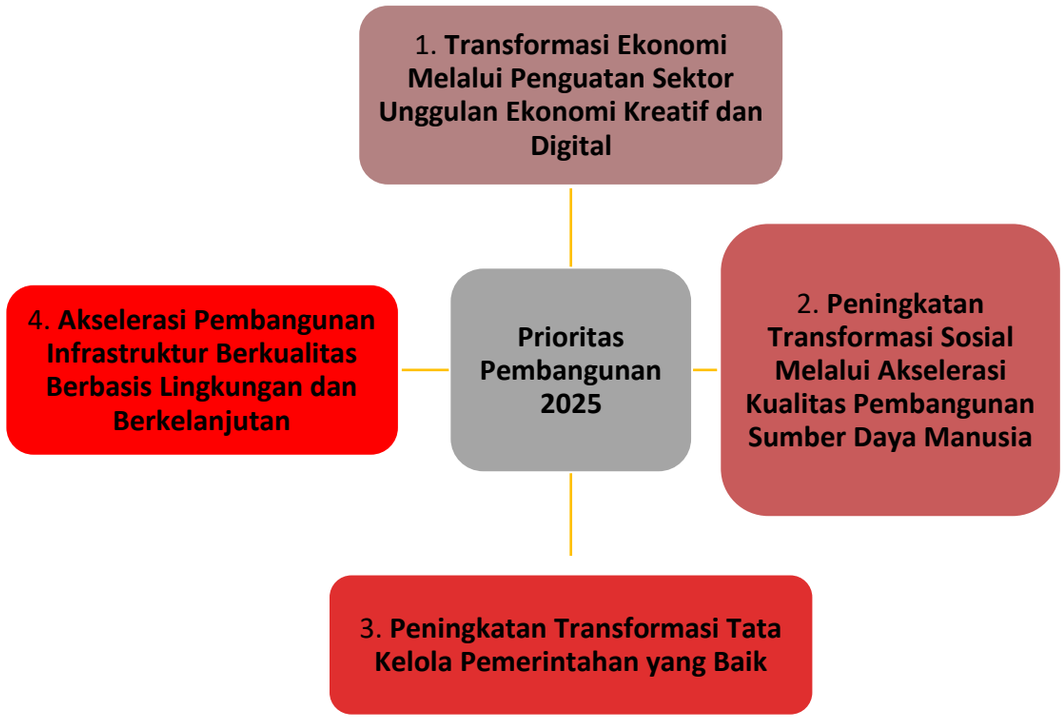
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2	3	4	5	6	7	8
			Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial	Kota Madiun		
			Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Madiun	673.425.000	
			Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Madiun	188.234.210	
			Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Madiun	25.847.000	
			Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Madiun	20.394.000	
			Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Madiun	43.515.000	
			Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Madiun	1.877.209.000	
			Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Madiun	691.389.400	
		Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase pelayanan perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana			
			Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Korban bencana yang mendapat bantuan			
			Sub Kegiatan Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Madiun	29.473.400	
			Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Madiun	15.978.400	
			Sub Kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Madiun	9.450.000	

Sumber: Bapppeda Kota Madiun, 2024

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Sebagaimana Tabel 4.6 di atas, terdapat 4 (empat) prioritas pembangunan Kota Madiun Tahun 2025 sebagaimana terlihat dalam gambar di bawah ini:



Gambar 4. 10 Prioritas Pembangunan Kota Madiun Tahun 2025

Sebagaimana yang termuat pada Gambar 4.10 di atas, empat prioritas pembangunan Kota Madiun tahun 2025 didasari oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Transformasi Ekonomi Melalui Penguatan Sektor Ekonomi Kreatif dan Digital

   Pembangunan ekonomi tidak hanya berpusat pada pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi saja namun harus mampu memberikan dampak pada pemerataan dan akses yang luas bagi seluruh masyarakat. Dengan kata lain pembangunan harus bisa mencapai kesejahteraan bersama dan inklusif. Kota Madiun dalam beberapa tahun terakhir termasuk kedalam daerah dengan tingkat pembangunan ekonomi inklusif tertinggi di Jawa Timur.

   Oleh karena itu, peningkatan pembangunan ekonomi inklusif dapat terus didorong melalui pengembangan sektor unggulan di Kota Madiun, ekonomi kreatif dan pariwisata kota, serta pengembangan ekonomi berbasis digital. Pemerintah kota Madiun berupaya meningkatkan kemandirian ekonomi inklusif melalui, yaitu:

   1. Penguatan Pengelolaan lapak;
   2. Digitalisasi transaksi UMKM;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

3. Pelatihan pemasaran dan transaksi digital UMKM;
4. Percepatan penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka;
5. Penyiapan Pasar hasil produksi UMKM melalui Lapak Kelurahan;
6. Kebijakan penggunaan produksi lokal hasil UMKM;
7. Subsidi komponen upah tenaga kerja untuk mengurangi biaya produksi (Asuransi ketenagakerjaan dan jaminan Hari Tua); dan
8. Pemberdayaan Masyarakat melalui proyek padat karya dan swakelola dengan pokmas.

2. Peningkatan Transformasi Sosial Melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia

Kualitas pembangunan sumber daya manusia di Kota Madiun termasuk kedalam salah satu daerah dengan peringkat tertinggi di Jawa Timur yang dihitung dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Kemajuan kondisi daerah sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusianya. Sumber daya manusia menjadi modal penting dalam mencapai kesejahteraan sebuah daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Madiun mendorong percepatan pada aspek kuantitas dan kualitas sumber daya manusianya. Percepatan kualitas hidup masyarakat melalui inklusivitas sosial Kota Madiun di arahkan pada:

1. Percepatan peningkatan pertumbuhan IPM Kota Madiun yang terdiri atas:
   a. Akselerasi pelaksanaan konvergensi penanggulangan stunting;
   b. Peningkatan Angka Harapan Hidup (penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi, penurunan kematian akibat Penyakit Menular dan Tidak Menular);
   c. Peningkatan Harapan Lama Sekolah melalui peningkatan sarana dan prasarana sekolah.
2. Percepatan penurunan tingkat pengangguran terbuka melalui Bantuan pelatihan dan peralatan produksi bagi UMKM;
3. Percepatan penurunan kemiskinan melalui perbaikan *database* kemiskinan dan bantuan sosial terintegrasi.

3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Pembangunan berbasis *Smart City* telah menjadi tren pembangunan perkotaan. Konsep *Smart City* yang dinamis dan memfokuskan diri pada inovasi, solusi dan pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber daya teknologi secara optimal. Pembangunan berbasis *Smart City* akan bermuara pada pencapaian pelayanan publik yang lebih efisien, efektif dan berkelanjutan. Keberhasilan pembangunan berbasis *Smart City* harus didukung oleh reformasi birokrasi secara terarah dan berkelanjutan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Dalam memperkuat penerapan reformasi birokrasi, beberapa upaya yang dilakukan, yaitu:

1. Peningkatan pelayanan publik berbasis digital/IT;
2. Peningkatan kompetensi dan profesionalitas ASN; dan
3. Akselerasi pembentukan Zona Integritas pada pelayanan publik.

4. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkualitas Berbasis Lingkungan dan Berkelanjutan

Ketersedian infrastruktur yang berkualitas menjadi salah satu faktor penting dalam mencapaia keberhasilan pembangunan. Pembangunan infrastruktur perlu memperhatikan daya dukung lingkungan hidup dan berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur berbasis lingkungan diarahkan pada pembangunan infrastruktur yang mengadopsi kondisi lingkungan dan budaya lokal, memperhatikan daya dukung lingkungan dan preservasi sumber daya, optimalisasi SDM dan SDA untuk menjaga *bio-diverisity*, dan optimalisasi partisipasi masyarakat dan mendorong inovasi teknologi.

Penguatan infrastruktur berkualitas dan berwawasan lingkungan diarahkan pada:

1. Penyelesaian infrastruktur prioritas; dan
2. Peningkataan pembangunan daerah berwawasan Kesehatan lingkungan.

Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi, dan Kota Madiun dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4. 8 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi, dan Kota Madiun Tahun 2025

Nasional	Provinsi Jawa Timur	Kota Madiun
1	2	3
Prioritas Pembangunan 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Pembangunan 1: Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata	Prioritas Pembangunan 1: Transformasi Ekonomi Melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif, dan Digital
Prioritas Pembangunan 2: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi	Prioritas Pembangunan 4:	Prioritas Pembangunan 4: Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkualitas

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2	3
Kesenjangan dan menjamain pemerataan	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkedilan	Berbasis Lingkungan dan Berkelanjutan
Prioritas Pembangunan 3: Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Prioritas Pembangunan 3: Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan	Prioritas Pembangunan 4: Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkualitas Berbasis Lingkungan dan Berkelanjutan
Prioritas Pembangunan 4: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Prioritas Pembangunan 8: Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Anti Korupsi	Prioritas Pembangunan 3: Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik
Prioritas Pembangunan 5: Memperkuat Infrastrukur untuk mendukung pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Prioritas Pembangunan 3: Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan	Prioritas Pembangunan 2: Peningkatan Transformasi Sosial Melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia
Prioritas Pembangunan 6: Membangun Lingkungan Hidup, meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Prioritas Pembangunan 6: Pengembangan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, Perkebunan berbasis Kerakyatan	Prioritas Pembangunan 3: Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkualitas Berbasis Lingkungan dan Berkelanjutan
Prioritas Pembangunan 7: Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Pembangunan 8: Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Anti Korupsi	Prioritas Pembangunan 1: Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Sumber: Bappenas RI, Bapperov Jatim dan Bapppeda Kota Madiun, 2024

Sebagaimana yang termuat pada Tabel 4.7 di atas, berdasarkan prioritas pembangunan, permasalahan dan isu strategis daerah, serta sinkroniasasi dengan prioritas Provinsi dan Nasional, maka Tema RKPD Kota Madiun Tahun 2025 adalah “Transformasi Pembangunan Ekonomi, Sosial dan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik Dalam Mencapai Kesejahteraan Masyarakat”. Adapun arti tema yang ditetapkan dalam RKPD Kota Madiun Tahun 2025 ini diharapkan dapat mencapai tujuan utama pembangunan yaitu masyarakat yang sejahtera. Selanjutnya, Perkembangan tema pembangunan dalam RKPD Kota Madiun tahun 2021-2025 dapat dilihat dalam gambar berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



Sumber: Bapppeda Kota Madiun, 2024

Gambar 4. 11 Perkembangan Tema Pembangunan dalam RKPD Kota Madiun Tahun 2021-2025

4.2.4 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kota Madiun Tahun 2025

Sasaran Pembangunan Kota Madiun Tahun 2025 disesuaikan dengan prioritas pembangunan daerah Tahun 2025. Prioritas dan sasaran pembangunan merupakan arahan bagi Organisasi Perangkat Daerah dalam menjabarkan program dan kegiatan Tahun 2025 yang berkorelasi dengan pencapaian pembangunan secara umum. Tema dan Prioritas Pembangunan Kota Madiun Tahun 2025 digambarkan dalam Gambar 4.12.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



Gambar 4. 12 Tema dan Prioritas Pembangunan Kota Madiun Tahun 2024

Sebagaimana yang termuat pada Gambar 4.12 di atas, disajikan rincian Prioritas yang menjadi Sasaran Pembangunan Tahun 2025, sebagai berikut:

Tabel 4. 9 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kota Madiun Tahun 2025

Kode	Sasaran	Indikator Kinerja	Target RPD 2025	Target RKPD 2025
1	2	3	4	5
PRIORITAS 1	TRANSFORMASI EKONOMI MELALUI PENGUATAN SEKTOR UNGGULAN, EKONOMI KREATIF, DAN DIGITAL			
	Meningkatnya Pertumbuhan PDRB Sektor Potensial	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	5,65	5,65
		Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata	6.97	6.97
	Meningkatnya Kondisi Sosial Budaya Masyarakat yang Kondusif	Indeks Ketentraman	83	83
	Menurunnya Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	4,55	4,55
PRIORITAS 2	PENINGKATAN TRANSFORMASI SOSIAL MELALUI AKSELERASI KUALITAS PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA			
	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Rata-Rata Lama Sekola)	11,83	11,83
	Meningkatnya Akses Ilmu Pengetahuan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca	3,10	3,10
	Menguatnya Karakteristik Masyarakat	Indeks Kerukunan	78,20	78,20

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2	3	4	5
	Meningkatnya Standart Kompetensi Kelulusan	Kompetensi Kelulusan sesuai SNP	100%	100%
	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	73,44	73,70
		Menurunnya Prevalensi Stunting	6,30	6,30
	Meningkatnya Ketercukupan Gizi Masyarakat	Persentase Angka Kecukupan	100%	100%
		Persentase Angka Kecukupan Protein	100%	100%
	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran Per Kapita	17,720	17,720
	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	Pendapatan Per Kapita	66,34	62,99
	Menjaga Stabilitas Harga Barang Pokok	Tingkat Inflasi	4±1	3±1
	Meningkatnya Kemampuan Masyarakat Miskin dalam Pemenuhan Kebutuhan	Indeks Kedalaman Kemiskinan	0,40-0,60	0,40-0,60
PRIORITAS 3	PENINGKATAN TRANSFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK			
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai Implementasi SAKIP Kota Madiun	80,20	80,20
		Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	sedang (3,05)	sedang (3,05)
		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Jumlah unit kerja yang mendapatkan predikat WBK/WBBM	1	1
	Meningkatnya Kualitas *E-Government*	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3	3
	Meningkatnya Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	54,30	54,30
	Penyelenggaraan *Smart City*	Persentase Program *Smart City* yang tercapai	98,81	98,81
PRIORITAS 4	AKSELERASI PEMBANGUNAN INFRATRUKTUR BERKUALITAS BERBASIS LINGKUNGAN DAN BERKELANJUTAN			
	Meningkatnya kualitas lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	57,94	57,94

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Selain itu untuk mendukung pencapaian terget serta penguatan birokrasi di kota madiun telah dilaksanakan sejumlah inovasi serta inovasi baru yang akan dilaksanakan guna menunjang pelayanan kepada masyarakat sebagaimana tabel 4.9.

Tabel 4. 10 Inovasi Daerah dalam rangka Mempercepat Pencapaian Target Kinerja

No	Judul Inovasi	PELAKSANA
1	2	3
1	Perencanaan Sistem Drainase dan Penataan Perkotaan (Ducting)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	TALI JIWO (TAMAN PEDULI JIWA WARGA ODGJ)	Kelurahan Taman Kecamatan Taman
3	JUS DIK KESI (Jum'at Sehat Pendidikan Kesehatan Reproduksi)	SMPN 2 Dinas Pendidikan
4	RUMAH IBU, LAYANAN PERUNDUNGAN DAN INKLUSI BERBASIS SMILE	SMPN 11 Dinas Pendidikan
5	IDOLA@madiunpintar.id "Information Documentation on Learning Administration With madiunpintar.id"	SMPN 10 Dinas Pendidikan
6	PENDIKAR RILEKS (Pendidikan Karakter Religius Literasi Ekstrakurikuler dan Kesehatan) Dalam Mewujudkan Profil Pelajar Pancasila	SDN 04 Manisrejo Dinas Pendidikan
7	INGKUNG SAMBEL PECEL LINGKUNGAN SEKOLAH SEBAGAI SUMBER BELAJAR PENDEKAR SAT - SET	SDN 03 Josenan Dinas Pendidikan
8	BRO SAM (BELANJA DAN PROMOSI PRODUK USAHA MIKRO)	Dinas Tenaga Kerja dan KUM
9	Sistem Informasi Operasi Pasar Kota Madiun (SIOPA OMA)	Dinas Kominfo
10	Transformasi JEBOL KIPER: Integrasi PPID Goes to School untuk Meningkatkan Komunikasi, Informasi Publik, dan Evaluasi LAPOR!	Dinas Kominfo
11	LAPIS INKLUWINDU (POLA TERAPI SISWA INKLUSI WINONGO DUA)	SDN 02 Winongo Dinas Pendidikan
12	Petis Medan (Penyiraman Tanaman Otomatis Median Jalan)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
13	Si Manpro Gesit (Aplikasi Manjemen Progres Kiat menuju Kinerja Melesat)	Dinas Kominfo
14	Ecodrain Mesi (Eco-Drainase Multifungsi)	pekerjaan umum dan penataan ruang
15	SIKAP SeBeNingMas "Sistem Informasi Komunikasi dan Administrasi Pembelajaran Sekolah Berbasis Learning Management System"	SMPN 10 Dinas Pendidikan
16	PECEL KOTA PENDIKAR (Penulisan Cerita Fabel untuk Mengkokohtangguhkan Pendidikan Karakter)	SDN 03 Nambangan Kidul Dinas Pendidikan
17	GERGAJI SAKHARAN (Gerakan Mengaji sampai Khatam Al-Quran)	SDN 03 Kanigoro Dinas Pendidikan
18	MANGSI Dan TRASI (peMANfaatan Google SIte Dalam pembelajaraN MEtode Tantangan, Refleksi dAn Kondisi)	SDN 03 Kanigoro Dinas Pendidikan
19	RATUSAN BUSI TUA "Gerakan Satu Siswa Satu Tanaman Tumbuhkan Literasi dan Tanggung Jawab"	SDN 01 Kanigoro Dinas Pendidikan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2	3
20	KENALI WATAK MAS BARJO (KENALI kegaWATAn anaK balita di puskesMAS BAnjaReJO)	Puskesmas Banjarejo
21	KITA STEPA (Kelas Bersih Karakter Diraih STEPA)	SMPN 4 Dinas Pendidikan
22	KARAMEL GULA (KenAli CaRA MeMELihara Kesehatan Gigi dan MULut Anak Balita)	Puskesmas Banjarejo
23	LIDI PEKAN GUNUNG JATI (LIterasi DIgital PErpustaKAan Gunung Jati)	SDN Pangongangan
24	EMPOK REMEN	Dinas Perpus
25	KOLAK BAPER (KOmpetisi administrasi ketataLAKsanaan BAgi PERangkat daerah)	Bag.Organisasi Sekretariat Daerah
26	WARTEK (WARUNG TEKAN INFLASI)	Disdag
27	BROKOHAN DIGITAL	Dukcapil
28	SIFA HAJU MAKAN KUNIR (Siap Mengawali Pembelajaran PAI dengan Hafalan Juz 30 menggunakan Buku Monitoring)	SDN 1 Mojorejo Dinas Pendidikan
29	GREEN SIPEDE	Dinkes KB
30	WARUNG KOPI SI QRCOD (Wahana Ruang Komunikasi Pribadi Berbasis Quick Respon Code)	SDN 2 Madiun Lor Dinas Pendidikan
31	PECELAN OMBO (PElayanan CEpat Secara Online di KeLurahAN Oro Oro OMBO)	Kel Oro2 Ombo
32	BUS PATAS	Dinsos P3A
33	E-Proteksi (Edukasi Perlindungan Data Pribadi Untuk Keamanan Informasi)	Dinas Kominfo
34	KASAN BAWA TALES	SDN 02 Tawangrejo Dinas Pendidikan
35	“TIKAR SI LANAS” TINGKATKAN KARAKTER SISWA MELALUI LAGU NASIONAL	SDN 05 Madiun Lor Dinas Pendidikan
36	"SUKMA BERKIBAR" SUKOSARI MADIUN BERLITERASI BERKREASI MELALUI KABAR-KABAR	SDN Sukosari Dinas Pendidikan
37	APRESIASI SI ANDRO (Aplikasi Presensi Digital Berbasis Website dan Android)	SMPN 12 Dinas Pendidikan
38	BERSATU PEDULI (Bersama Tingkatkan Mutu melalui Program Edukasi berLiterasi)	SDN Manguharjo
39	HOSTING GRATIS TELEXC	Dinkes KB
40	Be Smart Madiun (Beasiswa Mahasiswa Rakyat Kota Madiun)	Dinas Pendidikan
41	RAPEL TULIP	Dinkes KB
42	PPTK LASER	Dinkes KB
43	SI BUTAR ASIX (EDUKASI IBU PINTAR SUKSES ASI EKSKLUSIF)	Puskesmas Sukosari
44	PECEL SIP DOK	Dinkes KB
45	“BERBURU SOSIS AYAM DI PAGI HARI” (Berburu Soal Siswa Pengayaan di Pagi Hari)	SDN Patihan
46	PODCAST WARTA KAMPER	Kel Kanigoro
47	Si-Cakra (Sistem Informasi Rencana Kerja Kecamatan)	Kec Manguharjo
48	ROMBO PENDIGITAL BERDIKASI BISA	SDN Oro2 Ombo
49	SINDO GURU BAJA ING BANG TOHA (Sinau Dongeng Nguri-Uri Bahasa Jawa Ing Pilangbango Kartoharjo)	SDN Pilangbango
50	Gerbang abad 21 (GERakan bacA nyariNG Anak heBAD Di mulai 2021)	SMPN 7 Dinas Pendidikan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2	3
51	PORTAL GELORA (Portofolio Digital Gelar Olah Karya Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila)	SMPN 14 Dinas Pendidikan
52	ESTTETIKA (Implementasi Aplikasi dengan TTE untuk Efektivitas dan Keamanan Data)	Diskominfo
53	Sama Satopi Gemar Pilar (Satu Mata Pelajaran Satu Topik Pelatihan Mandiri Genjot Platform Merdeka Mengajar Perbaiki Pembelajaran)	SMPN 13 Dinas Pendidikan
54	BERTAHAN DI PERTIWI (Berburu Pengetahuan Di Perpustakaan Sriwijaya)	SDN 03 Madiun Lor Dinas Pendidikan
55	GARAM BU MUKIDI (Program Ibu Membaca Buku KIA dan Deteksi Dini) PUSKESMAS SUKOSARI	Puskesmas Sukosari
56	Dulang Lipstik untuk Kotak Alis (Daur Ulang Limbah Plastik untuk Kotak Alat Tulis)	SDN 02 Nambangan Kidul Dinas Pendidikan
57	PENANDU PENDEKAR OPD	Dinkes KB
58	ELENG KB LIN	Puskesmas Demangan
59	SERBU RANJANI	Dinkes KB
60	DALANG SARIBU (Daur Ulang Sampah di Hari Rabu)	SDN Pilangbango
61	NASI BU BAIK	Puskesmas Manguharjo
62	GERCEP	Puskesmas Tawangrejo
63	IKAN MAS TARJO	Puskesmas Tawangrejo
64	KELOK SEMI TIARA FILLA PANCASILA (Kearifan Lokal Sedekah Bumi Tingkatkan Karakter Profil Pelajar Pancasila)	SMPN 13 Dinas Pendidikan
65	PELAJU KAMARDIKAN (Potensi Kekayaan Lokal Sekolah Mewujudkan Karya Kreatifitas Peserta Didik Peduli dan Berbudaya Lingkungan)	SMPN 1 Dinas Pendidikan
66	SARI PATAS (Satu Hari Empat Gelas)	SDN Kuncen
67	GELIS DEN BUDI (Gemar Literasi Dengan Buku Digital Interaktif)	SDN 01 Pandean Dinas Pendidikan
68	JEMPOL TERANG (JEMPUT BOLA PELAYANAN TERA ULANG)	UPTD Meteorologi
69	BU TELAS SI LENI (Budaya Penguatan Literasi dan Numerasi Digital Berbasis Blended Learning)	SDN Rejomulyo
70	SI-PATEN (Sistem Pelayanan Administrasi Terpadu)	Kec Kartoharjo
71	BERJUMPA DENGAN JAINAL (Bersih Jum'at Pagi dengan Menu Jajanan Tradisional)	SDN Pilangbango Dinas Pendidikan
72	The Miracle Of Guntur Sakti	SDN 01 Kartoharjo Dinas Pendidikan
73	PETA JALAN MENUJU KEMATANGAN SPIP TERINTEGRASI LEVEL TERKELOLA DAN TERUKUR	Inspektorat
74	Eco Green Office Kelurahan Ngegong	Kel Ngegong (tidak d sistem)
75	DOPARI SAKATU	SDN 02 Mojorejo Dinas Pendidikan
76	*PECEL JAWARA MADIUN*	SDN Banjarejo Dinas Pendidikan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1 Program Prioritas Daerah

Rencana kerja dan pendanaan daerah mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah. Program prioritas daerah disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan dalam RKPD dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama program/kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tahun rencana yang meliputi lokasi, target capaian kinerja dan kebutuhan dana/pagu indikatif, klasifikasi program dan kegiatan.

Rencana program dan kegiatan dituangkan secara lengkap dalam matrik rencana program dan kegiatan prioritas daerah Kota Madiun. Penyusunan rencana program dan kegiatan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Program prioritas RKPD Tahun 2025 dirumuskan untuk mendukung terwujudnya capaian tujuan pembangunan jangka menengah sebagaimana tertuang dalam RPD Kota Madiun Tahun 2025-2026. Prioritas belanja daerah Kota Madiun mengacu pada prioritas pembangunan daerah Kota Madiun. Prioritas tersebut merupakan hasil sinkronisasi dengan perencanaan daerah berupa:

1) RPD Kota Madiun Tahun 2025-2026;
2) Rencana Kerja Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2025;
3) Isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah;
4) Evaluasi capaian kinerja RKPD Kota Madiun Tahun 2023; dan
5) Tema Pembangunan Kota Madiun Tahun 2025. Adapun komposisi belanja prioritas pembangunan daerah Kota Madiun dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Tabel 5. 1 Belanja Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025

NO	PRIORITAS	PAGU 2025 (Rp,00)
1	Transformasi Ekonomi Melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif, dan Digital	32.329.772.713
2	Peningkatan Transformasi Sosial Melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia	492.428.449.281
3	Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	458.401.471.190
4	Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkualitas Berbasis Lingkungan dan Berkelanjutan	158.119.831.041
Pagu Prioritas Pembangunan		1.141.279.524.225

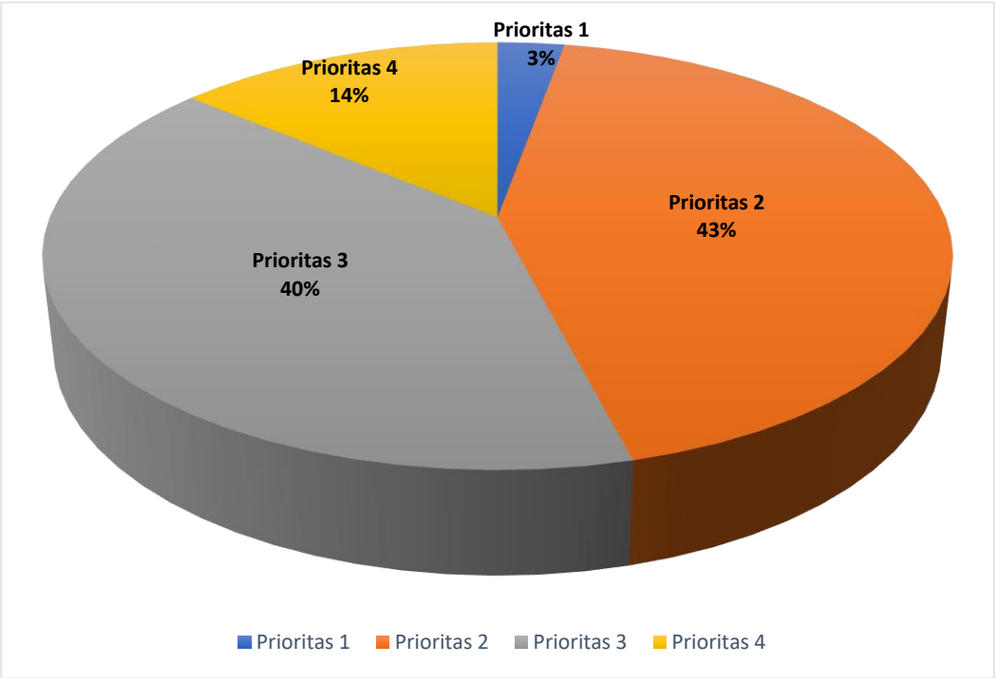
Sumber: Bapppeda Kota Madiun, 2024

Sebagaimana yang termuat pada Tabel 5.1 diatas, total belanja prioritas Kota Madiun pada tahun 2025 adalah sebesar Rp1.141.279.524.225,00 Belanja tersebut dialokasikan untuk mendukung empat prioritas pembangunan Kota Madiun Tahun 2025, alokasi anggaran terbesar hingga terkecil yang dialokasikan pada tiap prioritas yakni anggaran terbesar pertama yang diduduki Prioritas ke-2 (dua) untuk menunjang peningkatan transformasi sosial melalui akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia dengan alokasi anggaran Rp492.428.449.281,00 Setelahnya anggaran terbesar kedua yang diduduki prioritas ke-3 (tiga) untuk menunjang peningkatan transformasi tata kelola pemerintahan yang baik dengan anggaran sebesar Rp458.401.471.190,00 Selanjutnya anggaran terbesar ketiga yang diduduki prioritas ke-4 (empat) untuk menunjang akselerasi pembangunan infrastruktur berkualitas berbasis lingkungan dan berkelanjutan dengan anggaran sebesar Rp158.119.831.041,00 dan yang terakhir anggaran keempat yang diprioritaskan sebagai prioritas ke-1 (satu) untuk menunjang transformasi ekonomi melalui penguatan sektor unggulan, ekonomi kreatif dan digital dengan anggaran sebesar Rp32.329.772.713,00.

Sebagaimana urutan prioritas yang tidak selaras dengan urutan dalam penentuan anggaran, hal ini didasarkan dengan fokus pembangunan Pemerintah Kota Madiun sehingga apabila terjadi suatu hal yang mengakibatkan berkurangnya kemampuan anggaran maka urutan prioritas sebagai penentu penundaan pelaksanaan.

Gambaran lebih lengkap mengenai proporsi tersebut dapat dilihat dalam gambar berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



Gambar 5. 1 Belanja Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025

Mengacu pada belanja prioritas pembangunan daerah Tahun 2025 yang ditampilkan pada tabel 5.1, jika digambarkan dalam bentuk diagram, maka persentase belanja prioritas dapat disajikan seperti gambar 5.1 dengan penjelasan seberapa besar persentase pagu belanja prioritas pembangunan untuk mendanai belanja prioritas 1, 2, 3, dan 4 dilihat dari urutan yang terbesar menunjuk pada prioritas 2 dengan alokasi anggaran mencapai 43%, selanjutnya prioritas 3 dengan alokasi anggaran mencapai 40%, setelahnya prioritas 4 dengan alokasi anggaran mencapai 14% dan yang terakhir adalah prioritas 1 dengan alokasi anggaran mencapai 3%.

5.2 Rencana Pendanaan Daerah

Rencana pendanaan daerah dapat dilihat berdasarkan urusan, dan perangkat daerah. Berdasarkan urusan pemerintahan, terdapat 3 (tiga) urusan pemerintahan yang memiliki proporsi pendanaan terbesar. Urusan tersebut yaitu Urusan Kesehatan pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, urusan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan urusan Pekerjaan Umum Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Adapun proporsi pagu indikatif belanja berdasarkan Perangkat Daerah tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 5.2 dan rincian rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel 5.3:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Tabel 5. 2 Pagu Indikatif Belanja Berdasarkan Perangkat Daerah Tahun 2025

NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH SUB KEGIATAN	RANCANGAN RENJA OPD 2025 (Rp,00)	RANCANGAN AKHIR RENJA OPD 2025 (Rp,00)
1	Dinas Pendidikan	4	12	162	318.509.958.587	237.115.917.744
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8	23	96	260.968.050.151	259.689.306.706
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10	19	43	134.772.232.472	106.470.063.653
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	7	16	22	55.746.696.159	38.333.692.572
5	Satuan Polisi Pamong Praja	3	12	22	25.116.643.324	22.604.978.992
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	10	20	5.513.409.510	4.465.861.703
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	12	28	58	30.630.052.835	29.098.193.994
8	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	9	17	31	17.520.390.221	15.593.147.297
9	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	13	23	36	16.295.188.108	15.317.476.822
10	Dinas Lingkungan Hidup	9	17	30	27.346.500.000	26.740.036.124
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4	8	16	9.066.495.639	8.341.175.988
12	Dinas Perhubungan	2	14	21	17.520.390.221	16.293.962.906
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	5	12	29	27.444.527.340	25.248.965.153
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6	11	17	7.351.212.680	6.763.115.666
15	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	9	18	24	18.785.268.953	15.778.152.816
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5	13	20	11.026.819.020	9.041.991.596
17	Dinas Perdagangan	6	14	21	18.132.991.278	16.863.681.889
18	Sekretariat Daerah	11	49	79	49.008.084.534	49.772.821.370
19	Sekretariat DPRD	2	14	24	42.269.472.912	40.269.472.912
20	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	4	14	32	13.072.360.010	11.352.563.613
21	Badan Keuangan dan Aset Daerah	3	11	26	57.584.499.329	57.716.498.976
22	Badan Pendapatan Daerah	2	8	25	11.026.819.020	12.851.205.520
23	Badan Kepegawaian dan Sumber daya Manusia	3	12	19	10.781.778.598	12.142.686.668
24	Inspektorat	3	10	22	12.252.021.134	11.516.899.866
25	Kecamatan Kartoharjo	5	13	48	24.504.042.268	23.504.042.268
26	Kecamatan Manguharjo	5	15	47	25.729.244.381	24.729.244.381
27	Kecamatan Taman	5	14	45	25.729.244.381	24.729.244.381
28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6	11	20	26.341.845.438	18.935.122.649
	TOTAL	163	438	1055	1.300.046.238.503	1.141.279.524.225

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Tabel 5. 3 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Madiun Tahun 2025

PRIORITAS 1: Transformasi Ekonomi Melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif, dan Digital

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp,00)	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp,00)	
							Nasional	Provinsi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2 17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			1.005.447.782					883.024.868	
5	2 17 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Jumlah Koperasi yang Disetujui Permohonan Bersertifikat NIK	80 %	444.174.500				80 %	444.174.500	
	2 17 05 2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang mengajukan sertifikat NIK	35 koperasi	444.174.500		memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, BUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa	35 koperasi	444.174.500	
	2 17 05 2.01 0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi									
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	90 Orang	444.174.500	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, BUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa	150 Orang	444.174.500	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
6	2 17 06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang dibina dan jenis usahanya bertambah	2,5 %	200.586.523				2,5 %	120.000.000	
	2 17 06 2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	jumlah koperasi yang dibina dan jenis usahanya bertambah	5 koperasi	200.586.523		memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, BUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa	5koperasi	120.000.000	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	17	06	2.01	0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha									
							Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	30 Unit Usaha	200.586.523	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, BUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa	60 Unit Usaha	120.000.000	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
7	2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro dibina yang beromzet naik	7,33 %	360.686.759				7,33 %	318.850.368	
	2	17	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah pelaku usaha mikro yang dibina beromzet naik	11 Usaha Mikro	360.686.759		memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, BUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa	11 Usaha Mikro	318.850.368	
	2	17	08	2.01	0002	Pengembangan Usaha Mikro									
							Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	150 Unit Usaha	360.686.759	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, BUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa	150 Unit Usaha	318.850.368	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			1.308.134.750					1.654.591.800	
2	2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan penanaman modal	100 Persen	50.000.000				100 Persen	51.000.000	
	2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen fasilitasi/insentif di bidang penanaman modal	1 Dokumen	50.000.000		memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi	1dokumen	51.000.000	
	2	18	02	2.01	0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	1 Dokumen	50.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi	1 Dokumen	51.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Investor yang Merealisasikan Investasinya	42 %	131.919.750				42 %	316.391.800	
	2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah investor baru	50 investor	131.919.750		memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi	60investor	316.391.800	
	2	18	03	2.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	131.919.750	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi	1 Dokumen	316.391.800	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4	2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelayanan Perizinan Terselesaikan	97 %	497.740.000				97 %	619.700.000	
	2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pemohon Izin	4250 izin	497.740.000		memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi	4500izin	619.700.000	
	2	18	04	2.01	0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik									
							Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	4250 Pelaku Usaha	211.460.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi	4500 Pelaku Usaha	233.215.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	04	2.01	0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko									
							Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	23 Pelaku Usaha	101.830.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi	20 Pelaku Usaha	166.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	18	04	2.01	0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko									
							Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	300 Kegiatan Usaha	184.450.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi	325 Kegiatan Usaha	220.485.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
5	2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Perusahaan yang Melaporkan LKPM	120 Perusahaan	462.675.000				120 Perusahaan	470.000.000	
	2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang dibina	390 Pelaku Usaha	462.675.000		memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi	400 Pelaku Usaha	470.000.000	
	2	18	05	2.01	0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya									
							Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	8 Kegiatan Usaha.	29.491.000	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi	20 Kegiatan Usaha.	29.491.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	05	2.01	0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha									
							Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	390 Pelaku Usaha	385.882.500	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi	400 Pelaku Usaha	398.107.500	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	05	2.01	0006	Pengawasan Penanaman Modal									
							Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	25 Kegiatan Usaha	47.301.500	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi	8 Kegiatan Usaha	42.401.500	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Jenis Izin Yang Diproses Secara Elektronik	100 %	165.800.000				100 %	197.500.000	
	2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Izin Yang Diproses Secara Elektronik	36 jenis izin	165.800.000		memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi	36 jenis izin	197.500.000	
	2	18	06	2.01	0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik									
							Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 Dokumen	165.800.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi	1 Dokumen	197.500.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			951.974.000					775.695.000	
5	3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah total produksi perikanan budidaya	290 Ton	417.000.000				290 Ton	370.500.000	
	3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/kemitraan usaha/kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan) (RTP)	260 RTP	417.000.000		memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan	260RTP	370.500.000	
	3	25	04	2.04	0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit	205.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan	1 Unit	158.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	25	04	2.04	0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota									

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4 Unit	155.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan	4 Unit	155.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	25	04	2.04	0010	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat									
							Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	125 Unit	57.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan	130 Unit	57.500.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
6	3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah total produksi perikanan tangkap	89 Ton	70.000.000				89 Ton	70.500.000	
	3	25	05	2.01		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah nelayan/usaha perikanan tangkap yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/kemitraan usaha/kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)	435 Orang	70.000.000		memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan	435 Orang	70.500.000	
	3	25	05	2.01	0007	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota									
							Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	100 Pelaku Usaha	70.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan	100 Pelaku Usaha	70.500.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
7	3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Tingkat konsumsi ikan	33,57 kg/kapita/ tahun	464.974.000				33,57 kg/kapita/ tahun	334.695.000	
	3	25	06	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah pengolah dan pemasar ikan yang dibina	50 Orang	65.164.000		memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan	50Orang	66.150.000	
	3	25	06	2.02	0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko									

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	30 Unit Usaha	65.164.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan	30 Unit Usaha	66.150.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	25	06	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan ikan skala rumah tangga	30 Ton	399.810.000		memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan	30Ton	268.545.000	
	3	25	06	2.03	0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	14 Pelaku Usaha	399.810.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan	14 Pelaku Usaha	268.545.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			1.163.000.000					1.245.000.000	
7	3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase peningkatan wasatawan yang datang ke lokasi DTW Destinasi Pariwisata	79 %	298.000.000				79 %	325.000.000	
	3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi wisata yang dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi	3 Lokasi	298.000.000		memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi	3 Lokasi	325.000.000	
	3	26	02	2.03	0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota									
							Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	3 Lokasi	100.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi	3 Lokasi	100.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	3	26	02	2.03	0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota									

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Laporan	198.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi	1 Laporan	225.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
8	3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase peningkatan pelayanan pemasaran pariwisata	100 %	315.000.000				100 %	400.000.000	
	3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan pemasaran pariwisata	3 Event	315.000.000		memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi	4Event	400.000.000	
	3	26	03	2.01	0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota									
							Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	3 Kegiatan	315.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi	4 Kegiatan	400.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
9	3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang dibina	7 %	550.000.000				6,6 %	520.000.000	
	3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah pelatihan/ peningkatan SDM pariwisata	2 Pelatihan	550.000.000		memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi	2 Pelatihan	520.000.000	
	3	26	05	2.01	0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif									
							Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	20 Orang	550.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi	20 Orang	520.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			6.697.456.580					7.888.821.339	
8	3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Efektivitas sarana pertanian	65 %	1.102.582.080				65 %	2.396.000.000	
	3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Ketersediaan Sarana Pertanian Terhadap Kebutuhan Petani	80 %	977.582.080		memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan	80%	2.271.000.000	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3	27	02	2.01	0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi									
							Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1 Laporan	182.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan	1 Laporan	150.900.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	02	2.01	0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian									
							Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan	795.582.080	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan	1 Laporan	2.120.100.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	02	2.03		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah bibit ternak dan produk pakan yang bermutu baik	75 %	125.000.000		memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan	75%	125.000.000	
	3	27	02	2.03	0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil									
							Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	12 Laporan	125.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan	12 Laporan	125.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
9	3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase pengembangan prasarana yang berfungsi dengan baik	100 %	2.629.723.500				100 %	2.592.138.852	
	3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase pengembangan prasarana pertanian	100 %	266.427.000		memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan	100%	125.000.000	
	3	27	03	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya									
							Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1 Laporan	151.427.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan	1 Laporan	8.627.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3	27	03	2.01	0016	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota									
							Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	1 Dokumen	115.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan	1 Dokumen	116.373.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase Prasarana Pertanian yang Terbangun /Rehabilitasi/Dipelihara	25 %	2.363.296.500		memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan	25%	2.467.138.852	
	3	27	03	2.02	0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani									
							Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	500.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan	1 Unit	2.017.138.852	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	03	2.02	0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya									
							Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	485.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan	1 Unit	35.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	03	2.02	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani									
							Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	2 Unit	240.796.500	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan	2 Unit	270.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	03	2.02	0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan									
							Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	1 Unit	1.637.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan	1 Unit	145.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	10 %	337.603.000				10 %	337.603.000	
	3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keberhasilan Pelayanan Kesehatan Hewan	80 %	250.103.000		memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan	80%	250.103.000	
	3	27	04	2.01	0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	4 Laporan	250.103.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan	4 Laporan	250.103.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	04	2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Jumlah sampel Produk asal Hewan yang Aman dikonsumsi	80 %	87.500.000		memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan	80%	87.500.000	
	3	27	04	2.04	0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan									
							Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	12 Laporan	87.500.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan	12 Laporan	87.500.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
11	3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase lahan aman bencana pertanian	76 %	150.000.000				76 %	150.000.000	
	3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Luas lahan aman bencana pertanian	2000 Ha / Tahun	150.000.000		memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan	2000Ha / Tahun	150.000.000	
	3	27	05	2.01	0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan									
							Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	50 Ha	150.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan	50 Ha	150.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	3	27	06			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase kelompok tani yang memiliki izin usaha pertanian	15 %	33.600.000				15 %	33.600.000	
	3	27	06	2.01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah izin usaha Pertanian yang diterbitkan oleh otoritas kompeten	2 Jenis	33.600.000		memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan	2Jenis	33.600.000	
	3	27	06	2.01	0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian									
							Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	2 Dokumen	33.600.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan	2 Dokumen	33.600.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
13	3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase jumlah SDM pertanian terlatih	20 %	2.443.948.000				20 %	2.379.479.487	
	3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah SDM Pertanian Terlatih	200 Orang	2.443.948.000		memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan	200Orang	2.379.479.487	
	3	27	07	2.01	0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa									
							Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	38 Unit	2.443.948.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan	38 Unit	2.379.479.487	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			6.470.230.688					7.014.416.008	
2	3	30	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Legalitas Pelaku Usaha Perdagangan yang Diterbitkan atau Direkomendasikan	100 %	138.472.400				100 %	130.000.000	
	3	30	02	2.01		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah legalitas pelaku usaha perdagangan yang diterbitkan atau direkomendasikan	75 Dokumen	138.472.400		memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, BUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa	80 Dokumen	130.000.000	
	3	30	02	2.01	0002	Fasilitasi pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui SIstem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik									

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui SIstem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	12 laporan	138.472.400	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, BUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa	12 laporan	130.000.000	DINAS PERDAGANGAN
3	3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Pasar yang Dikelola Sarana Distribusinya	100 %	5.307.665.078				100 %	5.784.744.040	
	3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pasar yang dikelola sarana distribusinya	17 Pasar	887.190.278		memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, BUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa	17Pasar	1.200.145.240	
	3	30	03	2.01	0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan									
							Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	3 Unit	111.515.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, BUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa	3 Unit	300.145.240	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	03	2.01	0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan									
							Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	17 Unit	775.675.278	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, BUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa	17 Unit	900.000.000	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	03	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase Pembinaan dan Pemberdayaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	100 %	4.420.474.800		memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, BUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa	100%	4.584.598.800	
	3	30	03	2.02	0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	3 Dokumen	371.340.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, BUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa	6 Dokumen	335.000.000	DINAS PERDAGANGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3	30	03	2.02	0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	2 Dokumen	4.049.134.800	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, BUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa	1 Dokumen	4.249.598.800	DINAS PERDAGANGAN
4	3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Pemantauan Ketersedian Barang Pokok dan Penting	100 %	378.804.200				100 %	400.000.000	
	3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah pemantauan ketersedian barang pokok dan penting	3 Kali	357.771.200		memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, BUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa	3Kali	375.000.000	
	3	30	04	2.02	0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota									
							Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	3 Laporan	149.843.600	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, BUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa	3 Laporan	125.000.000	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	04	2.02	0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota									
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	4 Laporan	207.927.600	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, BUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa	4 Laporan	250.000.000	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	04	2.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase pengawasan penyaluran pupuk dan pestisida bersubsidi	100 %	21.033.000		memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, BUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa	100%	25.000.000	
	3	30	04	2.03	0002	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi									
							Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	2 Laporan	21.033.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, BUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa	2 Laporan	25.000.000	DINAS PERDAGANGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase UTTP dan BDKT yang Telah Melakukan Tera dan Pengawasan BDKT	100 %	383.030.385				100 %	364.626.943	
	3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah terlaksananya pelayanan metrologi legal, berupa tera, tera ulang dan pengawasannya	12 Bulan	383.030.385		memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, BUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa	12Bulan	364.626.943	
	3	30	06	2.01	0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang									
							Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	8186 Unit	353.927.885	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, BUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa	8186 Unit	334.626.943	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	06	2.01	0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal									
							Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	150 Orang	29.102.500	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, BUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa	150 Orang	30.000.000	DINAS PERDAGANGAN
6	3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Produk Perdagangan yang Dipromosikan	100 %	262.258.625				100 %	335.045.025	
	3	30	07	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah terlaksananya promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri	4 Kali	262.258.625		memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, BUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa	4Kali	335.045.025	
	3	30	07	2.01	0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota									
							Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	4 UMKM	262.258.625	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, BUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa	4 UMKM	335.045.025	DINAS PERDAGANGAN
	3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			1.546.477.000					2.649.738.860	
8	3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	persentase IKM yang mutu produk dan kapasitasnya meningkat	5 %	1.196.477.000				5 %	2.449.738.860	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah IKM yang mutu produk dan kapasitasnya meningkat setelah pembinaan	22 IKM	1.196.477.000		memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, BUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa	22IKM	2.449.738.860	
	3	31	02	2.01	0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota									
							Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	25.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, BUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa	1 Dokumen	20.000.000	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3	31	02	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri									
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	100.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, BUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa	1 Dokumen	75.000.000	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3	31	02	2.01	0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri									
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	2 Dokumen	85.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, BUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa	2 Dokumen	65.000.000	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3	31	02	2.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat									
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	6 Dokumen	986.477.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, BUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa	2 Dokumen	2.289.738.860	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
9	3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase IKM yang mengikuti publikasi produk	10 %	350.000.000				10 %	200.000.000	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3	31	04	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah IKM yang mengikuti publikasi	40 IKM	350.000.000		memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, BUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa	40 IKM	200.000.000	
	3	31	04	2.01	0002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas									
							Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	3 Dokumen	350.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, BUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa		200.000.000	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	7								13.187.051.913					14.261.049.436	
	7	01							13.187.051.913					14.261.049.436	
3	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100 %	227.622.600				100 %	230.000.000	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100 %	77.622.600		memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, BUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa	100%	80.000.000	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan									
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	77.622.600	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, BUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa	7 Lembaga Kemasyarakatan	80.000.000	KECAMATAN KARTOHARJO
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	jumlah lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	1 forum/ lembaga	150.000.000		memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, BUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa	1 forum/ lembaga	150.000.000	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat									
							Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan	150.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, BUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa	4 Laporan	150.000.000	KECAMATAN KARTOHARJO
7	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100 %	632.856.000				100 %	768.600.000	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100 %	632.856.000		memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, BUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa	100%	768.600.000	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	114.256.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, BUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa	2 Unit	250.000.000	KELURAHAN ORO-ORO OMBO
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	518.600.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, BUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa	1 Pokmas / Ormas	518.600.000	KELURAHAN ORO-ORO OMBO
9	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100 %	281.560.655				100 %	335.000.000	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100 %	281.560.655		memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, BUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa	100%	335.000.000	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	46.560.655	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, BUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa	2 Unit	100.000.000	KELURAHAN SUKOSARI
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	235.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, BUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa	1 Pokmas / Ormas	235.000.000	KELURAHAN SUKOSARI
11	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100 %	679.330.000				100 %	775.800.000	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100 %	679.330.000		memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, BUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa	100%	775.800.000	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	103.530.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, BUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa	2 Unit	200.000.000	KELURAHAN KLEGEN
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	575.800.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, BUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa	1 Pokmas / Ormas	575.800.000	KELURAHAN KLEGEN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100 %	632.633.000				100 %	815.000.000	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100 %	632.633.000		memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, BUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa	100%	815.000.000	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	168.763.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, BUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa	2 Unit	350.000.000	KELURAHAN REJOMULYO
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	463.870.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, BUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa	1 Pokmas / Ormas	465.000.000	KELURAHAN REJOMULYO
15	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100 %	367.241.000				100 %	478.600.000	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100 %	367.241.000		memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, BUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa	100%	478.600.000	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	88.641.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, BUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa	2 Unit	200.000.000	KELURAHAN PILANGBANGO

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	278.600.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, BUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa	1 Pokmas / Ormas	278.600.000	KELURAHAN PILANGBANGO
17	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100 %	397.311.000				100 %	502.200.000	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100 %	397.311.000		memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, BUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa	100%	502.200.000	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	96.211.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, BUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa	2 Unit	200.000.000	KELURAHAN TAWANGREJO
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	301.100.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, BUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa	1 Pokmas / Ormas	302.200.000	KELURAHAN TAWANGREJO
19	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100 %	759.550.000				100 %	898.000.000	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100 %	759.550.000		memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, BUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa	100%	898.000.000	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	136.550.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, BUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa	2 Unit	275.000.000	KELURAHAN KANIGORO
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	623.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, BUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa	1 Pokmas / Ormas	623.000.000	KELURAHAN KANIGORO
21	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100 %	540.222.000				100 %	662.600.000	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100 %	540.222.000		memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, BUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa	100%	662.600.000	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	81.332.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, BUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa	2 Unit	200.000.000	KELURAHAN KARTOHARJO
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	458.890.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, BUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa	1 Pokmas / Ormas	462.600.000	KELURAHAN KARTOHARJO

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100 %	401.820.000				100 %	524.600.000	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100 %	401.820.000		memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, BUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa	100%	524.600.000	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	78.124.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, BUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa	2 Unit	200.000.000	KELURAHAN KELUN
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	323.696.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, BUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa	1 Pokmas / Ormas	324.600.000	KELURAHAN KELUN
3	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100 %	126.619.700				100%	139.479.270	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat (Kelurahan Manguhrajo)	100 %	60.210.000		memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, BUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa	100%	74.550.000	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan									
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	60.210.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, BUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa	7 Lembaga Kemasyarakatan	74.550.000	KECAMATAN MANGUHARJO

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga kemsyarakatan Tingkat Kecamatan	2 Forum	66.409.700		memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, BUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa	2 Forum	64.929.270	
	7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat									
							Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	66.409.700	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, BUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa	1 Laporan	64.929.270	KECAMATAN MANGUHARJO
7	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100 %	346.010.000				100%	344.000.000	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100 %	346.010.000		memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, BUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa	100%	344.000.000	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	110.000.000	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, BUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa	2 Unit	110.000.000	KELURAHAN MANGUHARJO
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	236.010.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, BUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa	1 Pokmas / Ormas	234.000.000	KELURAHAN MANGUHARJO
9	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100 %	303.810.000				100%	301.800.000	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100 %	303.810.000		memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, BUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa	100%	301.800.000	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	110.000.000	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, BUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa	2 Unit	110.000.000	KELURAHAN SOGATEN
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	193.810.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, BUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa	1 Pokmas / Ormas	191.800.000	KELURAHAN SOGATEN
11	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100 %	256.810.000				100%	254.800.000	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100 %	256.810.000		memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, BUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa	100%	254.800.000	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	110.000.000	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, BUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa	2 Unit	110.000.000	KELURAHAN PATIHAN
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	146.810.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, BUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa	1 Pokmas / Ormas	144.800.000	KELURAHAN PATIHAN
13	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100 %	224.460.000				100%	222.600.000	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100 %	224.460.000		memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, BUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa	100%	222.600.000	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	110.000.000	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, BUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa	2 Unit	110.000.000	KELURAHAN NGEGONG
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	114.460.000	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, BUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa	1 Pokmas / Ormas	112.600.000	KELURAHAN NGEGONG
15	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100 %	355.810.000				100%	353.800.000	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100 %	355.810.000		memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, BUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa	100%	353.800.000	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	110.000.000	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, BUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa	2 Unit	110.000.000	KELURAHAN WINONGO
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	245.810.000	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, BUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa	1 Pokmas / Ormas	243.800.000	KELURAHAN WINONGO

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100 %	378.910.000				100%	376.200.000	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100 %	378.910.000		memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, BUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa	100%	376.200.000	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	110.000.000	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, BUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa	2 Unit	110.000.000	KELURAHAN MADIUN LOR
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	268.910.000	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, BUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa	1 Pokmas / Ormas	266.200.000	KELURAHAN MADIUN LOR
19	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100 %	285.210.000				100%	283.200.000	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100 %	285.210.000		memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, BUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa	100%	283.200.000	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	110.000.000	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, BUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa	2 Unit	110.000.000	KELURAHAN PANGONGANGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	175.210.000	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, BUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa	1 Pokmas / Ormas	173.200.000	KELURAHAN PANGONGANGAN
21	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100 %	587.610.000				100%	584.900.000	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100 %	587.610.000		memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, BUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa	100%	584.900.000	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	124.300.000	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, BUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa	2 Unit	124.300.000	KELURAHAN NAMBANGAN LOR
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	463.310.000	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, BUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa	1 Pokmas / Ormas	460.600.000	KELURAHAN NAMBANGAN LOR
23	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100 %	431.410.000				100%	428.700.000	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat (Kelurahan Manguhrajo)	100 % 100 %	431.410.000		memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, BUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa	100%	428.700.000	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	124.300.000	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, BUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa	2 Unit	124.300.000	KELURAHAN NAMBANGAN KIDUL
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	307.110.000	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, BUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa	1 Pokmas / Ormas	304.400.000	KELURAHAN NAMBANGAN KIDUL
3	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100 %	217.925.000				100 %	228.849.208	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100 %	80.990.000		memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, BUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa	100%	83.836.121	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan									
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	80.990.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, BUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa	7 Lembaga Kemasyarakatan	83.836.121	KECAMATAN TAMAN
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan	136.935.000		memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, BUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa	2Laporan	145.013.087	
	7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat									
							Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan	136.935.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, BUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa	2 Laporan	145.013.087	KECAMATAN TAMAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100 %	710.900.000				100 %	710.900.000	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100 %	710.900.000		memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, BUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa	100%	710.900.000	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	250.000.000	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, BUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa	2 Unit	250.000.000	KELURAHAN MOJOREJO
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	460.900.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, BUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa	2 Pokmas / Ormas	460.900.000	KELURAHAN MOJOREJO
9	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100 %	677.300.000				100 %	677.300.000	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100 %	677.300.000		memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, BUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa	100%	677.300.000	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	240.000.000	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, BUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa	2 Unit	240.000.000	KELURAHAN PANDEAN
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	437.300.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, BUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa	2 Pokmas / Ormas	437.300.000	KELURAHAN PANDEAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100 %	446.500.000				100 %	446.500.000	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100 %	446.500.000		memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, BUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa	100%	446.500.000	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	180.000.000	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, BUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa	2 Unit	180.000.000	KELURAHAN BANJAREJO
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	266.500.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, BUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa	2 Pokmas / Ormas	266.500.000	KELURAHAN BANJAREJO
13	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100 %	200.300.000				100 %	200.300.000	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100 %	200.300.000		memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, BUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa	100%	200.300.000	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	100.000.000	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, BUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa	2 Unit	100.000.000	KELURAHAN KUNCEN
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	100.300.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, BUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa	2 Pokmas / Ormas	100.300.000	KELURAHAN KUNCEN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100 %	665.100.000				-	665.100.000	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100 %	665.100.000		memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, BUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa	100%	665.100.000	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	240.000.000	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, BUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa	2 Unit	240.000.000	KELURAHAN MANISREJO
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	425.100.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, BUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa	2 Pokmas / Ormas	425.100.000	KELURAHAN MANISREJO
17	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100 %	576.700.000				100 %	576.700.000	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	576.700.000		memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, BUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa	100%	576.700.000	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	210.000.000	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, BUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa	2 Unit	210.000.000	KELURAHAN KEJURON
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	366.700.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, BUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa	2 Pokmas / Ormas	366.700.000	KELURAHAN KEJURON

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100 %	413.521.400				100 %	413.521.400	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100 %	413.521.400		memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, BUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa	100%	413.521.400	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	170.000.000	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, BUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa	2 Unit	170.000.000	KELURAHAN JOSENAN
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	243.521.400	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, BUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa	2 Pokmas / Ormas	243.521.400	KELURAHAN JOSENAN
21	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100 %	455.100.000				100 %	455.100.000	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100 %	455.100.000		memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, BUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa	100%	455.100.000	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	180.000.000	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, BUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa	2 Unit	180.000.000	KELURAHAN DEMANGAN
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	275.100.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, BUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa	2 Pokmas / Ormas	275.100.000	KELURAHAN DEMANGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100 %	606.899.558				100 %	606.899.558	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100 %	606.899.558		memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, BUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa	100%	606.899.558	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	230.000.000	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, BUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa	2 Unit	230.000.000	KELURAHAN TAMAN
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	376.899.558	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, BUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa	2 Pokmas / Ormas	376.899.558	KELURAHAN TAMAN
									32.329.772.713					36.372.337.311	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

PRIORITAS 2: Peningkatan Transformasi Sosial Melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Provinsi			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			237.115.917.744					245.377.158.997	
1	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85,3 Skor	11.075.235.103				A Skor	11.239.357.677	
	1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya dokumen perencanaan dan kepegawaian	100 %	7.382.980.983		meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	100%	7.328.000.000	
	1	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	7.382.980.983	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	6 Laporan	7.328.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan Umum	100 %	2.606.021.000		meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	100%	2.697.241.000	
	1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	37 Paket	2.306.021.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	38 Paket	2.306.021.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130 Laporan	300.000.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	130 Laporan	391.220.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan Umum	100 %	404.137.120		meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	100%	532.020.677	
	1	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	30 Unit	404.137.120	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	35 Unit	532.020.677	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan Umum	100 %	682.096.000		meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	100%	682.096.000	
	1	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	66 Unit	208.674.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	66 Unit	208.674.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	270.075.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	1 Unit	270.075.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	276 Unit	203.347.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	276 Unit	203.347.000	DINAS PENDIDIKAN
2	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni Usia 7-12 Tahun, Angka Partisipasi Murni Usia 13-15 Tahun, Angka Partisipasi Murni Usia 5-6 Tahun	100 %	23.750.394.320				100 %	24.172.769.320	
	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang dikelola	100 %	5.817.844.000		meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	100% PRESENTASE 100%	5.817.844.000	
	1	01	02	2.01	0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa									
							Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	106 Peserta Didik	662.788.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	106 Peserta Didik	662.788.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah									

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	68 Satuan Pendidikan	574.986.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	68 Satuan Pendidikan	574.986.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar									
							Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	16 Satuan Pendidikan	2.814.570.000	DAK NON FISIK-BOS REGULER	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	53 Satuan Pendidikan	2.814.570.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah									
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	1.765.500.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	1 Unit	1.765.500.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Satuan Pendidikan sekolah menengah pertama yang dikelola	100 %	7.407.415.000		meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	100%	7.432.415.000	
	1	01	02	2.02	0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah									
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	1.776.500.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	2 Unit	1.776.500.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah									
							Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	5850 Paket	3.975.000.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	5850 Paket	3.975.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa									
							Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	165 Peserta Didik	548.479.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	124 Peserta Didik	573.479.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah									
							Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	23 Satuan Pendidikan	70.466.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	23 Satuan Pendidikan	70.466.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama									
							Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	9 Satuan Pendidikan	1.036.970.000	DAK NON FISIK-BOS REGULER	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	15 Satuan Pendidikan	1.036.970.000	DINAS PENDIDIKAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase Satuan PAUD yang dikelola	100 %	8.966.306.320		meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	100%	8.966.306.320	
	1	01	02	2.03	0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD									
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	960 Orang	4.032.000.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	996 Orang	4.032.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.03	0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD									
							Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	153 Satuan Pendidikan	718.750.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	158 Satuan Pendidikan	718.750.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.03	0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD									
							Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	152 Satuan Pendidikan	3.878.820.000	DAK NON FISIK-BOP PAUD	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	153 Satuan Pendidikan	3.878.820.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.03	0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD									
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6 Unit	336.736.320	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	1 Unit	336.736.320	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Satuan Pendidikan nonformal/kesetaraan yang dikelola	100 %	1.558.829.000		meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	100%	1.956.204.000	
	1	01	02	2.04	0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan									
							Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	6 Satuan Pendidikan	875.509.000	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	6 Satuan Pendidikan	1.272.884.000	DINAS PENDIDIKAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	01	02	2.04	0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan									
							Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	6 Satuan Pendidikan	683.320.000	DAK NON FISIK-BOP PENDIDIKAN KESETARAAN	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	6 Satuan Pendidikan	683.320.000	DINAS PENDIDIKAN
3	1	01	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase muatan kurikulum yang dikembangkan	100 %	1.209.968.680				100 %	1.310.088.000	
	1	01	03	2.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase satuan pendidikan dasar yang menetapkan kurikulum	100 %	851.968.680		meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	100%	952.088.000	
	1	01	03	2.01	0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar									
							Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	1 Dokumen	223.000.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	1 Dokumen	223.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	03	2.01	0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar									
							Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	96 Orang	162.968.680	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	1 Orang	163.088.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	03	2.01	0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar									
							Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	1 Dokumen	466.000.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	1 Dokumen	566.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	03	2.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Persentase satuan Paud yang menetapkan kurikulum	100 %	358.000.000		meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	100%	358.000.000	
	1	01	03	2.02	0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal									
							Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	1 Dokumen	358.000.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	1 Dokumen	358.000.000	DINAS PENDIDIKAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Tenaga Pendidik yang bersertifikasi	64 %	1.486.812.000				63 %	1.968.500.000	
	1	01	04	2.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase tenaga pendidik yang berkualifikasi	100 %	1.486.812.000		meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	100%	1.968.500.000	
	1	01	04	2.01	0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan									
							Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Dokumen	941.312.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	1 Dokumen	1.268.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	04	2.01	0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan									
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2 Laporan	545.500.000	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	1 Laporan	700.500.000	DINAS PENDIDIKAN
5	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	A Skor	169.266.927.641				A Skor	176.359.864.000	
	X	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan keuangan	100 %	169.266.927.641		meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	100%	176.359.864.000	
	X	XX	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1537 Orang/ bulan	169.266.927.641	DAK NON FISIK-TPG PNSD, DAK NON FISIK-TAMSIL GURU PNSD, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	1591 Orang/ bulan	176.359.864.000	DINAS PENDIDIKAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni Usia 7-12 Tahun, Angka Partisipasi Murni Usia 13-15 Tahun, Angka Partisipasi Murni Usia 5-6 Tahun	100 %	452.340.000				100 %	452.340.000	
	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang Dikelola	100 %	452.340.000		meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	100%PRESENTASE 100%	452.340.000	
	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar									
							Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	322.740.000	DAK NON FISIK-BOS REGULER	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	53 Satuan Pendidikan	322.740.000	SDN 01 KARTOHARJO
	1	01	02	2.01	0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik									
							Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	129.600.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	52 Satuan Pendidikan	129.600.000	SDN 01 KARTOHARJO
7	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni Usia 7-12 Tahun, Angka Partisipasi Murni Usia 13-15 Tahun, Angka Partisipasi Murni Usia 5-6 Tahun	100 %	213.570.000				100 %	213.570.000	
	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang Dikelola	100 %	213.570.000		meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	100% PRESENTASE 100%	213.570.000	
	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar									
							Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	62.370.000	DAK NON FISIK-BOS REGULER	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	53 Satuan Pendidikan	62.370.000	SDN 02 KARTOHARJO
	1	01	02	2.01	0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik									
							Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	151.200.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	52 Satuan Pendidikan	151.200.000	SDN 02 KARTOHARJO
8	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni Usia 7-12 Tahun, Angka Partisipasi Murni Usia 13-15 Tahun, Angka Partisipasi Murni Usia 5-6 Tahun	100 %	477.480.000				100 %	477.480.000	
	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang Dikelola	100 %	477.480.000		meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	100% PRESENTASE 100%	477.480.000	
	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar									
							Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	328.680.000	DAK NON FISIK-BOS REGULER	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	53 Satuan Pendidikan	328.680.000	SDN 01 KLEGEN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	01	02	2.01	0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik									
							Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	148.800.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	52 Satuan Pendidikan	148.800.000	SDN 01 KLEGEN
9	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni Usia 7-12 Tahun, Angka Partisipasi Murni Usia 13-15 Tahun, Angka Partisipasi Murni Usia 5-6 Tahun	100 %	239.370.000				100 %	239.370.000	
	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang Dikelola	100 %	239.370.000		meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	100% PRESENTASE 100%	239.370.000	
	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar									
							Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	121.770.000	DAK NON FISIK-BOS REGULER	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	53 Satuan Pendidikan	121.770.000	SDN 02 KLEGEN
	1	01	02	2.01	0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik									
							Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	117.600.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	52 Satuan Pendidikan	117.600.000	SDN 02 KLEGEN
10	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni Usia 7-12 Tahun, Angka Partisipasi Murni Usia 13-15 Tahun, Angka Partisipasi Murni Usia 5-6 Tahun	100 %	479.160.000				100 %	479.160.000	
	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang Dikelola	100 %	479.160.000		meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	100% PRESENTASE 100%	479.160.000	
	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar									
							Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	320.760.000	DAK NON FISIK-BOS REGULER	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	53 Satuan Pendidikan	320.760.000	SDN 03 KLEGEN
	1	01	02	2.01	0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik									
							Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	158.400.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	52 Satuan Pendidikan	158.400.000	SDN 03 KLEGEN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni Usia 7-12 Tahun, Angka Partisipasi Murni Usia 13-15 Tahun, Angka Partisipasi Murni Usia 5-6 Tahun	100 %	175.770.000				100 %	175.770.000	
	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang Dikelola	100 %	175.770.000		meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	100%PRESENTASE 100%	175.770.000	
	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar									
							Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	82.170.000	DAK NON FISIK-BOS REGULER	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	53 Satuan Pendidikan	82.170.000	SDN 04 KLEGEN
	1	01	02	2.01	0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik									
							Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	93.600.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	52 Satuan Pendidikan	93.600.000	SDN 04 KLEGEN
12	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni Usia 7-12 Tahun, Angka Partisipasi Murni Usia 13-15 Tahun, Angka Partisipasi Murni Usia 5-6 Tahun	100 %	296.400.000				100 %	296.400.000	
	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang Dikelola	100 %	296.400.000		meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	100% PRESENTASE 100%	296.400.000	
	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar									
							Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	198.000.000	DAK NON FISIK-BOS REGULER	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	53 Satuan Pendidikan	198.000.000	SDN ORO ORO OMBO
	1	01	02	2.01	0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik									
							Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	98.400.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	52 Satuan Pendidikan	98.400.000	SDN ORO ORO OMBO
13	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni Usia 7-12 Tahun, Angka Partisipasi Murni Usia 13-15 Tahun, Angka Partisipasi Murni Usia 5-6 Tahun	100 %	273.960.000				100 %	273.960.000	
	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang Dikelola	100 %	273.960.000		meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	100% PRESENTASE 100%	273.960.000	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar									
							Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	122.760.000	DAK NON FISIK-BOS REGULER	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	53 Satuan Pendidikan	122.760.000	SDN 01 REJOMULYO
	1	01	02	2.01	0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik									
							Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	151.200.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	52 Satuan Pendidikan	151.200.000	SDN 01 REJOMULYO
14	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni Usia 7-12 Tahun, Angka Partisipasi Murni Usia 13-15 Tahun, Angka Partisipasi Murni Usia 5-6 Tahun	100 %	146.670.000				100 %	146.670.000	
	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang Dikelola	100 %	146.670.000		meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	100% PRESENTASE 100%	146.670.000	
	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar									
							Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	72.270.000	DAK NON FISIK-BOS REGULER	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	53 Satuan Pendidikan	72.270.000	SDN 01 KANIGORO
	1	01	02	2.01	0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik									
							Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	74.400.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	52 Satuan Pendidikan	74.400.000	SDN 01 KANIGORO
15	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni Usia 7-12 Tahun, Angka Partisipasi Murni Usia 13-15 Tahun, Angka Partisipasi Murni Usia 5-6 Tahun	100 %	232.800.000				100 %	232.800.000	
	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang Dikelola	100 %	232.800.000		meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	100% PRESENTASE 100%	232.800.000	
	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar									
							Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	158.400.000	DAK NON FISIK-BOS REGULER	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	53 Satuan Pendidikan	158.400.000	SDN 02 KANIGORO

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	01	02	2.01	0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik									
							Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	74.400.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	52 Satuan Pendidikan	74.400.000	SDN 02 KANIGORO
16	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni Usia 7-12 Tahun, Angka Partisipasi Murni Usia 13-15 Tahun, Angka Partisipasi Murni Usia 5-6 Tahun	100 %	251.010.000				100 %	251.010.000	
	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang Dikelola	100 %	251.010.000		meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	100% PRESENTASE 100%	251.010.000	
	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar									
							Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	157.410.000	DAK NON FISIK-BOS REGULER	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	53 Satuan Pendidikan	157.410.000	SDN 03 KANIGORO
	1	01	02	2.01	0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik									
							Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	93.600.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	52 Satuan Pendidikan	93.600.000	SDN 03 KANIGORO
17	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni Usia 7-12 Tahun, Angka Partisipasi Murni Usia 13-15 Tahun, Angka Partisipasi Murni Usia 5-6 Tahun	100 %	127.260.000				100 %	127.260.000	
	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang Dikelola	100 %	127.260.000		meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	100% PRESENTASE 100%	127.260.000	
	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar									
							Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	33.660.000	DAK NON FISIK-BOS REGULER	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	53 Satuan Pendidikan	33.660.000	SDN SUKOSARI
	1	01	02	2.01	0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik									
							Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	93.600.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	52 Satuan Pendidikan	93.600.000	SDN SUKOSARI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni Usia 7-12 Tahun, Angka Partisipasi Murni Usia 13-15 Tahun, Angka Partisipasi Murni Usia 5-6 Tahun	100 %	383.880.000				100 %	383.880.000	
	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang Dikelola	100 %	383.880.000		meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	100% PRESENTASE 100%	383.880.000	
	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar									
							Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	249.480.000	DAK NON FISIK-BOS REGULER	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	53 Satuan Pendidikan	249.480.000	SDN PILANGBANGO
	1	01	02	2.01	0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik									
							Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	134.400.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	52 Satuan Pendidikan	134.400.000	SDN PILANGBANGO
19	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni Usia 7-12 Tahun, Angka Partisipasi Murni Usia 13-15 Tahun, Angka Partisipasi Murni Usia 5-6 Tahun	100 %	243.540.000				100 %	243.540.000	
	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang Dikelola	100 %	243.540.000		meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	100% PRESENTASE 100%	243.540.000	
	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar									
							Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	164.340.000	DAK NON FISIK-BOS REGULER	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	53 Satuan Pendidikan	164.340.000	SDN 01 TAWANGREJO
	1	01	02	2.01	0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik									
							Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	79.200.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	52 Satuan Pendidikan	79.200.000	SDN 01 TAWANGREJO
20	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni Usia 7-12 Tahun, Angka Partisipasi Murni Usia 13-15 Tahun, Angka Partisipasi Murni Usia 5-6 Tahun	100 %	141.330.000				100 %	141.330.000	
	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang Dikelola	100 %	141.330.000		meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	100% PRESENTASE 100%	141.330.000	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar									
							Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	86.130.000	DAK NON FISIK-BOS REGULER	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	53 Satuan Pendidikan	86.130.000	SDN 02 TAWANGREJO
	1	01	02	2.01	0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik									
							Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	55.200.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	52 Satuan Pendidikan	55.200.000	SDN 02 TAWANGREJO
21	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni Usia 7-12 Tahun, Angka Partisipasi Murni Usia 13-15 Tahun, Angka Partisipasi Murni Usia 5-6 Tahun	100 %	242.940.000				100 %	242.940.000	
	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang Dikelola	100 %	242.940.000		meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	100% PRESENTASE 100%	242.940.000	
	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar									
							Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	144.540.000	DAK NON FISIK-BOS REGULER	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	53 Satuan Pendidikan	144.540.000	SDN KELUN
	1	01	02	2.01	0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik									
							Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	98.400.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	52 Satuan Pendidikan	98.400.000	SDN KELUN
22	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni Usia 7-12 Tahun, Angka Partisipasi Murni Usia 13-15 Tahun, Angka Partisipasi Murni Usia 5-6 Tahun	100 %	356.910.000				100 %	356.910.000	
	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang Dikelola	100 %	356.910.000		meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	100% PRESENTASE 100%	356.910.000	
	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar									
							Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	246.510.000	DAK NON FISIK-BOS REGULER	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	53 Satuan Pendidikan	246.510.000	SDN 01 MANGUHARJO
	1	01	02	2.01	0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik									
							Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	110.400.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	52 Satuan Pendidikan	110.400.000	SDN 01 MANGUHARJO

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni Usia 7-12 Tahun, Angka Partisipasi Murni Usia 13-15 Tahun, Angka Partisipasi Murni Usia 5-6 Tahun	100 %	452.970.000				100 %	452.970.000	
	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang Dikelola	100 %	452.970.000		meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	100% PRESENTASE 100%	452.970.000	
	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar									
							Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	280.170.000	DAK NON FISIK-BOS REGULER	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	53 Satuan Pendidikan	280.170.000	SDN 01 NAMBANGAN LOR
	1	01	02	2.01	0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik									
							Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	172.800.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	52 Satuan Pendidikan	172.800.000	SDN 01 NAMBANGAN LOR
24	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni Usia 7-12 Tahun, Angka Partisipasi Murni Usia 13-15 Tahun, Angka Partisipasi Murni Usia 5-6 Tahun	100 %	230.070.000				100 %	230.070.000	
	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang Dikelola	100 %	230.070.000		meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	100% PRESENTASE 100%	230.070.000	
	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar									
							Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	131.670.000	DAK NON FISIK-BOS REGULER	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	53 Satuan Pendidikan	131.670.000	SDN 02 NAMBANGAN LOR
	1	01	02	2.01	0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik									
							Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	98.400.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	52 Satuan Pendidikan	98.400.000	SDN 02 NAMBANGAN LOR
25	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni Usia 7-12 Tahun, Angka Partisipasi Murni Usia 13-15 Tahun, Angka Partisipasi Murni Usia 5-6 Tahun	100 %	181.710.000				100 %	181.710.000	
	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang Dikelola	100 %	181.710.000		meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	100% PRESENTASE 100%	181.710.000	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar									
							Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	88.110.000	DAK NON FISIK-BOS REGULER	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	53 Satuan Pendidikan	88.110.000	SDN 01 MADIUN LOR
	1	01	02	2.01	0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik									
							Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	93.600.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	52 Satuan Pendidikan	93.600.000	SDN 01 MADIUN LOR
26	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni Usia 7-12 Tahun, Angka Partisipasi Murni Usia 13-15 Tahun, Angka Partisipasi Murni Usia 5-6 Tahun	100 %	166.470.000				100 %	166.470.000	
	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang Dikelola	100 %	166.470.000		meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	100% PRESENTASE 100%	166.470.000	
	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar									
							Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	92.070.000	DAK NON FISIK-BOS REGULER	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	53 Satuan Pendidikan	92.070.000	SDN 02 MADIUN LOR
	1	01	02	2.01	0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik									
							Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	74.400.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	52 Satuan Pendidikan	74.400.000	SDN 02 MADIUN LOR
27	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni Usia 7-12 Tahun, Angka Partisipasi Murni Usia 13-15 Tahun, Angka Partisipasi Murni Usia 5-6 Tahun	100 %	747.300.000				100 %	747.300.000	
	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang Dikelola	100 %	747.300.000		meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	100% PRESENTASE 100%	747.300.000	
	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar									
							Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	504.900.000	DAK NON FISIK-BOS REGULER	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	53 Satuan Pendidikan	504.900.000	SDN 03 MADIUN LOR
	1	01	02	2.01	0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik									
							Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	242.400.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	52 Satuan Pendidikan	242.400.000	SDN 03 MADIUN LOR

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni Usia 7-12 Tahun, Angka Partisipasi Murni Usia 13-15 Tahun, Angka Partisipasi Murni Usia 5-6 Tahun	100 %	396.120.000				100 %	396.120.000	
	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang Dikelola	100 %	396.120.000		meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	100% PRESENTASE 100%	396.120.000	
	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar									
							Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	304.920.000	DAK NON FISIK-BOS REGULER	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	53 Satuan Pendidikan	304.920.000	SDN 04 MADIUN LOR
	1	01	02	2.01	0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik									
							Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	91.200.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	52 Satuan Pendidikan	91.200.000	SDN 04 MADIUN LOR
29	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni Usia 7-12 Tahun, Angka Partisipasi Murni Usia 13-15 Tahun, Angka Partisipasi Murni Usia 5-6 Tahun	100 %	687.570.000				100 %	687.570.000	
	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang Dikelola	100 %	687.570.000		meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	100% PRESENTASE 100%	687.570.000	
	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar									
							Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	497.970.000	DAK NON FISIK-BOS REGULER	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	53 Satuan Pendidikan	497.970.000	SDN 05 MADIUN LOR
	1	01	02	2.01	0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik									
							Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	189.600.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	52 Satuan Pendidikan	189.600.000	SDN 05 MADIUN LOR
30	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni Usia 7-12 Tahun, Angka Partisipasi Murni Usia 13-15 Tahun, Angka Partisipasi Murni Usia 5-6 Tahun	100 %	255.030.000				100 %	255.030.000	
	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang Dikelola	100 %	255.030.000		meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	100% PRESENTASE 100%	255.030.000	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar									
							Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	155.430.000	DAK NON FISIK-BOS REGULER	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	53 Satuan Pendidikan	155.430.000	SDN 01 NAMBANGAN KIDUL
	1	01	02	2.01	0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik									
							Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	99.600.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	52 Satuan Pendidikan	99.600.000	SDN 01 NAMBANGAN KIDUL
31	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni Usia 7-12 Tahun, Angka Partisipasi Murni Usia 13-15 Tahun, Angka Partisipasi Murni Usia 5-6 Tahun	100 %	199.140.000				100 %	199.140.000	
	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang Dikelola	100 %	199.140.000		meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	100%PRESENTASE 100%	199.140.000	
	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar									
							Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	124.740.000	DAK NON FISIK-BOS REGULER	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	53 Satuan Pendidikan	124.740.000	SDN 02 NAMBANGAN KIDUL
	1	01	02	2.01	0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik									
							Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	74.400.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	52 Satuan Pendidikan	74.400.000	SDN 02 NAMBANGAN KIDUL
32	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni Usia 7-12 Tahun, Angka Partisipasi Murni Usia 13-15 Tahun, Angka Partisipasi Murni Usia 5-6 Tahun	100 %	437.880.000				100 %	437.880.000	
	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang Dikelola	100 %	437.880.000		meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	100% PRESENTASE 100%	437.880.000	
	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar									
							Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	289.080.000	DAK NON FISIK-BOS REGULER	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	53 Satuan Pendidikan	289.080.000	SDN 03 NAMBANGAN KIDUL
	1	01	02	2.01	0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik									
							Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	148.800.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	52 Satuan Pendidikan	148.800.000	SDN 03 NAMBANGAN KIDUL

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni Usia 7-12 Tahun, Angka Partisipasi Murni Usia 13-15 Tahun, Angka Partisipasi Murni Usia 5-6 Tahun	100 %	457.680.000				100 %	457.680.000	
	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang Dikelola	100 %	457.680.000		meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	100% PRESENTASE 100%	457.680.000	
	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar									
							Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	308.880.000	DAK NON FISIK-BOS REGULER	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	53 Satuan Pendidikan	308.880.000	SDN 01 WINONGO
	1	01	02	2.01	0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik									
							Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	148.800.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	52 Satuan Pendidikan	148.800.000	SDN 01 WINONGO
34	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni Usia 7-12 Tahun, Angka Partisipasi Murni Usia 13-15 Tahun, Angka Partisipasi Murni Usia 5-6 Tahun	100 %	124.890.000				100 %	124.890.000	
	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang Dikelola	100 %	124.890.000		meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	100% PRESENTASE 100%	124.890.000	
	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar									
							Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	50.490.000	DAK NON FISIK-BOS REGULER	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	53 Satuan Pendidikan	50.490.000	SDN 02 WINONGO
	1	01	02	2.01	0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik									
							Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	74.400.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	52 Satuan Pendidikan	74.400.000	SDN 02 WINONGO
35	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni Usia 7-12 Tahun, Angka Partisipasi Murni Usia 13-15 Tahun, Angka Partisipasi Murni Usia 5-6 Tahun	100 %	255.570.000				100 %	255.570.000	
	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang Dikelola	100 %	255.570.000		meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	100% PRESENTASE 100%	255.570.000	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar									
							Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	181.170.000	DAK NON FISIK-BOS REGULER	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	53 Satuan Pendidikan	181.170.000	SDN NGEGONG
	1	01	02	2.01	0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik									
							Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	74.400.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	52 Satuan Pendidikan	74.400.000	SDN NGEGONG
36	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni Usia 7-12 Tahun, Angka Partisipasi Murni Usia 13-15 Tahun, Angka Partisipasi Murni Usia 5-6 Tahun	100 %	371.160.000				100 %	371.160.000	
	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang Dikelola	100 %	371.160.000		meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	100% PRESENTASE 100%	371.160.000	
	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar									
							Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	241.560.000	DAK NON FISIK-BOS REGULER	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	53 Satuan Pendidikan	241.560.000	SDN PATIHAN
	1	01	02	2.01	0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik									
							Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	129.600.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	52 Satuan Pendidikan	129.600.000	SDN PATIHAN
37	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni Usia 7-12 Tahun, Angka Partisipasi Murni Usia 13-15 Tahun, Angka Partisipasi Murni Usia 5-6 Tahun	100 %	510.390.000				100 %	510.390.000	
	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang Dikelola	100 %	510.390.000		meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	100% PRESENTASE 100%	510.390.000	
	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar									
							Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	297.990.000	DAK NON FISIK-BOS REGULER	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	53 Satuan Pendidikan	297.990.000	SDN 01 PANGONGANGAN
	1	01	02	2.01	0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik									
							Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	212.400.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	52 Satuan Pendidikan	212.400.000	SDN 01 PANGONGANGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni Usia 7-12 Tahun, Angka Partisipasi Murni Usia 13-15 Tahun, Angka Partisipasi Murni Usia 5-6 Tahun	100 %	240.720.000				100 %	240.720.000	
	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang Dikelola	100 %	240.720.000		meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	100% PRESENTASE 100%	240.720.000	
	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar									
							Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	166.320.000	DAK NON FISIK-BOS REGULER	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	53 Satuan Pendidikan	166.320.000	SDN SOGATEN
	1	01	02	2.01	0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik									
							Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	74.400.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	52 Satuan Pendidikan	74.400.000	SDN SOGATEN
39	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni Usia 7-12 Tahun, Angka Partisipasi Murni Usia 13-15 Tahun, Angka Partisipasi Murni Usia 5-6 Tahun	100 %	755.160.000				100 %	755.160.000	
	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang Dikelola	100 %	755.160.000		meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	100% PRESENTASE 100%	755.160.000	
	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar									
							Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	479.160.000	DAK NON FISIK-BOS REGULER	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	53 Satuan Pendidikan	479.160.000	SDN 01 TAMAN
	1	01	02	2.01	0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik									
							Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	276.000.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	52 Satuan Pendidikan	276.000.000	SDN 01 TAMAN
40	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni Usia 7-12 Tahun, Angka Partisipasi Murni Usia 13-15 Tahun, Angka Partisipasi Murni Usia 5-6 Tahun	100 %	155.970.000				100 %	155.970.000	
	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang Dikelola	100 %	155.970.000		meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	100% PRESENTASE 100%	155.970.000	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar									
							Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	62.370.000	DAK NON FISIK-BOS REGULER	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	53 Satuan Pendidikan	62.370.000	SDN 02 TAMAN
	1	01	02	2.01	0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik									
							Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	93.600.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	52 Satuan Pendidikan	93.600.000	SDN 02 TAMAN
41	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni Usia 7-12 Tahun, Angka Partisipasi Murni Usia 13-15 Tahun, Angka Partisipasi Murni Usia 5-6 Tahun	100 %	193.830.000				100 %	193.830.000	
	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang Dikelola	100 %	193.830.000		meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	100% PRESENTASE 100%	193.830.000	
	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar									
							Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	76.230.000	DAK NON FISIK-BOS REGULER	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	53 Satuan Pendidikan	76.230.000	SDN 03 TAMAN
	1	01	02	2.01	0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik									
							Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	117.600.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	52 Satuan Pendidikan	117.600.000	SDN 03 TAMAN
42	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni Usia 7-12 Tahun, Angka Partisipasi Murni Usia 13-15 Tahun, Angka Partisipasi Murni Usia 5-6 Tahun	100 %	453.180.000				100 %	453.180.000	
	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang Dikelola	100 %	453.180.000		meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	100% PRESENTASE 100%	453.180.000	
	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar									
							Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	318.780.000	DAK NON FISIK-BOS REGULER	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	53 Satuan Pendidikan	318.780.000	SDN 01 PANDEAN
	1	01	02	2.01	0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik									
							Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	134.400.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	52 Satuan Pendidikan	134.400.000	SDN 01 PANDEAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni Usia 7-12 Tahun, Angka Partisipasi Murni Usia 13-15 Tahun, Angka Partisipasi Murni Usia 5-6 Tahun	100 %	457.680.000				100 %	457.680.000	
	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang Dikelola	100 %	457.680.000		meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	100% PRESENTASE 100%	457.680.000	
	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar									
							Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	308.880.000	DAK NON FISIK-BOS REGULER	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	53 Satuan Pendidikan	308.880.000	SDN 02 PANDEAN
	1	01	02	2.01	0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik									
							Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	148.800.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	52 Satuan Pendidikan	148.800.000	SDN 02 PANDEAN
44	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni Usia 7-12 Tahun, Angka Partisipasi Murni Usia 13-15 Tahun, Angka Partisipasi Murni Usia 5-6 Tahun	100 %	583.320.000				100 %	583.320.000	
	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang Dikelola	100 %	583.320.000		meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	100% PRESENTASE 100%	583.320.000	
	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar									
							Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	423.720.000	DAK NON FISIK-BOS REGULER	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	53 Satuan Pendidikan	423.720.000	SDN BANJAREJO
	1	01	02	2.01	0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik									
							Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	159.600.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	52 Satuan Pendidikan	159.600.000	SDN BANJAREJO
45	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni Usia 7-12 Tahun, Angka Partisipasi Murni Usia 13-15 Tahun, Angka Partisipasi Murni Usia 5-6 Tahun	100 %	220.110.000				100 %	220.110.000	
	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang Dikelola	100 %	220.110.000		meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	100% PRESENTASE 100%	220.110.000	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar									
							Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	88.110.000	DAK NON FISIK-BOS REGULER	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	53 Satuan Pendidikan	88.110.000	SDN 01 MOJOREJO
	1	01	02	2.01	0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik									
							Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	132.000.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	52 Satuan Pendidikan	132.000.000	SDN 01 MOJOREJO
46	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni Usia 7-12 Tahun, Angka Partisipasi Murni Usia 13-15 Tahun, Angka Partisipasi Murni Usia 5-6 Tahun	100 %	662.970.000				100 %	662.970.000	
	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang Dikelola	100 %	662.970.000		meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	100% PRESENTASE 100%	662.970.000	
	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar									
							Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	478.170.000	DAK NON FISIK-BOS REGULER	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	53 Satuan Pendidikan	478.170.000	SDN 02 MOJOREJO
	1	01	02	2.01	0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik									
							Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	184.800.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	52 Satuan Pendidikan	184.800.000	SDN 02 MOJOREJO
47	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni Usia 7-12 Tahun, Angka Partisipasi Murni Usia 13-15 Tahun, Angka Partisipasi Murni Usia 5-6 Tahun	100 %	441.060.000				100 %	441.060.000	
	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang Dikelola	100 %	441.060.000		meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	100% PRESENTASE 100%	441.060.000	
	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar									
							Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	330.660.000	DAK NON FISIK-BOS REGULER	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	53 Satuan Pendidikan	330.660.000	SDN 01 MANISREJO
	1	01	02	2.01	0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik									
							Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	110.400.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	52 Satuan Pendidikan	110.400.000	SDN 01 MANISREJO

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni Usia 7-12 Tahun, Angka Partisipasi Murni Usia 13-15 Tahun, Angka Partisipasi Murni Usia 5-6 Tahun	100 %	433.530.000				100 %	433.530.000	
	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang Dikelola	100 %	433.530.000		meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	100% PRESENTASE 100%	433.530.000	
	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar									
							Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	303.930.000	DAK NON FISIK-BOS REGULER	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	53 Satuan Pendidikan	303.930.000	SDN 02 MANISREJO
	1	01	02	2.01	0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik									
							Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	129.600.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	52 Satuan Pendidikan	129.600.000	SDN 02 MANISREJO
49	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni Usia 7-12 Tahun, Angka Partisipasi Murni Usia 13-15 Tahun, Angka Partisipasi Murni Usia 5-6 Tahun	100 %	227.850.000				100 %	227.850.000	
	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	100 %	227.850.000		meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	100% PRESENTASE 100%	227.850.000	
	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar									
							Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	153.450.000	DAK NON FISIK-BOS REGULER	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	53 Satuan Pendidikan	153.450.000	SDN 03 MANISREJO
	1	01	02	2.01	0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik									
							Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	74.400.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	52 Satuan Pendidikan	74.400.000	SDN 03 MANISREJO
50	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni Usia 7-12 Tahun, Angka Partisipasi Murni Usia 13-15 Tahun, Angka Partisipasi Murni Usia 5-6 Tahun	100 %	288.810.000				100 %	288.810.000	
	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang Dikelola	100 %	288.810.000		meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	100% PRESENTASE 100%	288.810.000	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar									
							Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	177.210.000	DAK NON FISIK-BOS REGULER	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	53 Satuan Pendidikan	177.210.000	SDN 04 MANISREJO
	1	01	02	2.01	0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik									
							Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	111.600.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	52 Satuan Pendidikan	111.600.000	SDN 04 MANISREJO
51	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni Usia 7-12 Tahun, Angka Partisipasi Murni Usia 13-15 Tahun, Angka Partisipasi Murni Usia 5-6 Tahun	100 %	212.400.000				100 %	212.400.000	
	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang Dikelola	100 %	212.400.000		meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	100% PRESENTASE 100%	212.400.000	
	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar									
							Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	118.800.000	DAK NON FISIK-BOS REGULER	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	53 Satuan Pendidikan	118.800.000	SDN 01 DEMANGAN
	1	01	02	2.01	0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik									
							Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	93.600.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	52 Satuan Pendidikan	93.600.000	SDN 01 DEMANGAN
52	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni Usia 7-12 Tahun, Angka Partisipasi Murni Usia 13-15 Tahun, Angka Partisipasi Murni Usia 5-6 Tahun	100 %	220.920.000				100 %	220.920.000	
	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang Dikelola	100 %	220.920.000		meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	100% PRESENTASE 100%	220.920.000	
	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar									
							Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	146.520.000	DAK NON FISIK-BOS REGULER	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	53 Satuan Pendidikan	146.520.000	SDN 02 DEMANGAN
	1	01	02	2.01	0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik									
							Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	74.400.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	52 Satuan Pendidikan	74.400.000	SDN 02 DEMANGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni Usia 7-12 Tahun, Angka Partisipasi Murni Usia 13-15 Tahun, Angka Partisipasi Murni Usia 5-6 Tahun	100 %	263.730.000				100 %	263.730.000	
	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang Dikelola	100 %	263.730.000		meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	100% PRESENTASE 100%	263.730.000	
	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar									
							Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	165.330.000	DAK NON FISIK-BOS REGULER	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	53 Satuan Pendidikan	165.330.000	SDN 01 JOSENAN
	1	01	02	2.01	0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik									
							Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	98.400.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	52 Satuan Pendidikan	98.400.000	SDN 01 JOSENAN
54	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni Usia 7-12 Tahun, Angka Partisipasi Murni Usia 13-15 Tahun, Angka Partisipasi Murni Usia 5-6 Tahun	100 %	225.480.000				100 %	225.480.000	
	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang Dikelola	100 %	225.480.000		meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	100% PRESENTASE 100%	225.480.000	
	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar									
							Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	170.280.000	DAK NON FISIK-BOS REGULER	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	53 Satuan Pendidikan	170.280.000	SDN 02 JOSENAN
	1	01	02	2.01	0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik									
							Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	55.200.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	52 Satuan Pendidikan	55.200.000	SDN 02 JOSENAN
55	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni Usia 7-12 Tahun, Angka Partisipasi Murni Usia 13-15 Tahun, Angka Partisipasi Murni Usia 5-6 Tahun	100 %	164.880.000				100 %	164.880.000	
	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang Dikelola	100 %	164.880.000		meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	100% PRESENTASE 100%	164.880.000	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar									
							Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	71.280.000	DAK NON FISIK-BOS REGULER	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	53 Satuan Pendidikan	71.280.000	SDN 03 JOSENAN
	1	01	02	2.01	0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik									
							Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	93.600.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	52 Satuan Pendidikan	93.600.000	SDN 03 JOSENAN
56	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni Usia 7-12 Tahun, Angka Partisipasi Murni Usia 13-15 Tahun, Angka Partisipasi Murni Usia 5-6 Tahun	100 %	124.230.000				100 %	124.230.000	
	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang Dikelola	100 %	124.230.000		meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	100%PRESENTASE 100%	124.230.000	
	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar									
							Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	36.630.000	DAK NON FISIK-BOS REGULER	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	53 Satuan Pendidikan	36.630.000	SDN KEJURON
	1	01	02	2.01	0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik									
							Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	87.600.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	52 Satuan Pendidikan	87.600.000	SDN KEJURON
57	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni Usia 7-12 Tahun, Angka Partisipasi Murni Usia 13-15 Tahun, Angka Partisipasi Murni Usia 5-6 Tahun	100 %	175.620.000				100 %	175.620.000	
	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang Dikelola	100 %	175.620.000		meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	100%PRESENTASE 100%	175.620.000	
	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar									
							Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	77.220.000	DAK NON FISIK-BOS REGULER	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	53 Satuan Pendidikan	77.220.000	SDN KUNCEN
	1	01	02	2.01	0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik									
							Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	98.400.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	52 Satuan Pendidikan	98.400.000	SDN KUNCEN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni Usia 7-12 Tahun, Angka Partisipasi Murni Usia 13-15 Tahun, Angka Partisipasi Murni Usia 5-6 Tahun	100 %	1.226.800.000				100 %	1.226.800.000	
	1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Satuan Pendidikan sekolah menengah pertama yang dikelola	100 %	1.226.800.000		meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	100%	1.226.800.000	
	1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama									
							Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	919.600.000	DAK NON FISIK-BOS REGULER	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	15 Satuan Pendidikan	919.600.000	SMPN 1
	1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik									
							Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	307.200.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	14 Satuan Pendidikan	307.200.000	SMPN 1
59	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni Usia 7-12 Tahun, Angka Partisipasi Murni Usia 13-15 Tahun, Angka Partisipasi Murni Usia 5-6 Tahun	100 %	1.280.650.000				100 %	1.280.650.000	
	1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Satuan Pendidikan sekolah menengah pertama yang dikelola	100 %	1.280.650.000		meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	100%	1.280.650.000	
	1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama									
							Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	901.450.000	DAK NON FISIK-BOS REGULER	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	15 Satuan Pendidikan	901.450.000	SMPN 2
	1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik									
							Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	379.200.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	14 Satuan Pendidikan	379.200.000	SMPN 2
60	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni Usia 7-12 Tahun, Angka Partisipasi Murni Usia 13-15 Tahun, Angka Partisipasi Murni Usia 5-6 Tahun	100 %	857.640.000				100 %	857.640.000	
	1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Satuan Pendidikan sekolah menengah pertama yang dikelola	100 %	857.640.000		meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	100%	857.640.000	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama									
							Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	682.440.000	DAK NON FISIK-BOS REGULER	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	15 Satuan Pendidikan	682.440.000	SMPN 3
	1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik									
							Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	175.200.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	14 Satuan Pendidikan	175.200.000	SMPN 3
61	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni Usia 7-12 Tahun, Angka Partisipasi Murni Usia 13-15 Tahun, Angka Partisipasi Murni Usia 5-6 Tahun	100 %	1.272.040.000				100 %	1.272.040.000	
	1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Satuan Pendidikan sekolah menengah pertama yang dikelola	100 %	1.272.040.000		meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	100%	1.272.040.000	
	1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama									
							Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1.021.240.000	DAK NON FISIK-BOS REGULER	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	15 Satuan Pendidikan	1.021.240.000	SMPN 4
	1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik									
							Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	250.800.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	14 Satuan Pendidikan	250.800.000	SMPN 4
62	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni Usia 7-12 Tahun, Angka Partisipasi Murni Usia 13-15 Tahun, Angka Partisipasi Murni Usia 5-6 Tahun	100 %	737.460.000				100 %	737.460.000	
	1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Satuan Pendidikan sekolah menengah pertama yang dikelola	100 %	737.460.000		meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	100%	737.460.000	
	1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama									
							Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	515.460.000	DAK NON FISIK-BOS REGULER	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	15 Satuan Pendidikan	515.460.000	SMPN 5
	1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik									
							Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	222.000.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	14 Satuan Pendidikan	222.000.000	SMPN 5

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni Usia 7-12 Tahun, Angka Partisipasi Murni Usia 13-15 Tahun, Angka Partisipasi Murni Usia 5-6 Tahun	100 %	985.210.000				100 %	985.210.000	
	1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Satuan Pendidikan sekolah menengah pertama yang dikelola	100 %	985.210.000		meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	100%	985.210.000	
	1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama									
							Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	727.210.000	DAK NON FISIK-BOS REGULER	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	15 Satuan Pendidikan	727.210.000	SMPN 6
	1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik									
							Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	258.000.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	14 Satuan Pendidikan	258.000.000	SMPN 6
64	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni Usia 7-12 Tahun, Angka Partisipasi Murni Usia 13-15 Tahun, Angka Partisipasi Murni Usia 5-6 Tahun	100 %	1.255.040.000				100 %	1.255.040.000	
	1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Satuan Pendidikan sekolah menengah pertama yang dikelola	100 %	1.255.040.000		meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	100%	1.255.040.000	
	1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama									
							Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	851.840.000	DAK NON FISIK-BOS REGULER	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	15 Satuan Pendidikan	851.840.000	SMPN 7
	1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik									
							Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	403.200.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	14 Satuan Pendidikan	403.200.000	SMPN 7
65	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni Usia 7-12 Tahun, Angka Partisipasi Murni Usia 13-15 Tahun, Angka Partisipasi Murni Usia 5-6 Tahun	100 %	741.660.000				100 %	741.660.000	
	1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Satuan Pendidikan sekolah menengah pertama yang dikelola	100 %	741.660.000		meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	100%	741.660.000	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama									
							Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	588.060.000	DAK NON FISIK-BOS REGULER	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	15 Satuan Pendidikan	588.060.000	SMPN 8
	1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik									
							Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	153.600.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	14 Satuan Pendidikan	153.600.000	SMPN 8
66	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni Usia 7-12 Tahun, Angka Partisipasi Murni Usia 13-15 Tahun, Angka Partisipasi Murni Usia 5-6 Tahun	100 %	673.560.000				100 %	673.560.000	
	1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Satuan Pendidikan sekolah menengah pertama yang dikelola	100 %	673.560.000		meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	100%	673.560.000	
	1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama									
							Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	479.160.000	DAK NON FISIK-BOS REGULER	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	15 Satuan Pendidikan	479.160.000	SMPN 9
	1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik									
							Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	194.400.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	14 Satuan Pendidikan	194.400.000	SMPN 9
67	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni Usia 7-12 Tahun, Angka Partisipasi Murni Usia 13-15 Tahun, Angka Partisipasi Murni Usia 5-6 Tahun	100 %	867.760.000				100 %	867.760.000	
	1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Satuan Pendidikan sekolah menengah pertama yang dikelola	100 %	867.760.000		meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	100%	867.760.000	
	1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama									
							Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	600.160.000	DAK NON FISIK-BOS REGULER	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	15 Satuan Pendidikan	600.160.000	SMPN 10

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik									
							Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	267.600.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	14 Satuan Pendidikan	267.600.000	SMPN 10
68	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni Usia 7-12 Tahun, Angka Partisipasi Murni Usia 13-15 Tahun, Angka Partisipasi Murni Usia 5-6 Tahun	100 %	1.042.890.000				100 %	1.042.890.000	
	1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Satuan Pendidikan sekolah menengah pertama yang dikelola	100 %	1.042.890.000		meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	100%	1.042.890.000	
	1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama									
							Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	736.890.000	DAK NON FISIK-BOS REGULER	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	15 Satuan Pendidikan	736.890.000	SMPN 11
	1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik									
							Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	306.000.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	14 Satuan Pendidikan	306.000.000	SMPN 11
69	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni Usia 7-12 Tahun, Angka Partisipasi Murni Usia 13-15 Tahun, Angka Partisipasi Murni Usia 5-6 Tahun	100 %	903.230.000				100 %	903.230.000	
	1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Satuan Pendidikan sekolah menengah pertama yang dikelola	100 %	903.230.000		meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	100%	903.230.000	
	1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama									
							Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	681.230.000	DAK NON FISIK-BOS REGULER	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	15 Satuan Pendidikan	681.230.000	SMPN 12
	1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik									
							Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	222.000.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	14 Satuan Pendidikan	222.000.000	SMPN 12
70	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni Usia 7-12 Tahun, Angka Partisipasi Murni Usia 13-	100 %	1.120.680.000				100 %	1.120.680.000	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								15 Tahun, Angka Partisipasi Murni Usia 5-6 Tahun								
	1	01	02	2.02			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Satuan Pendidikan sekolah menengah pertama yang dikelola	100 %	1.120.680.000		meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	100%	1.120.680.000	
	1	01	02	2.02	0042		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama									
								Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	856.680.000	DAK NON FISIK-BOS REGULER	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	15 Satuan Pendidikan	856.680.000	SMPN 13
	1	01	02	2.02	0058		Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik									
								Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	264.000.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	14 Satuan Pendidikan	264.000.000	SMPN 13
71	1	01	02				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni Usia 7-12 Tahun, Angka Partisipasi Murni Usia 13-15 Tahun, Angka Partisipasi Murni Usia 5-6 Tahun	100 %	428.650.000				100 %	428.650.000	
	1	01	02	2.02			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Satuan Pendidikan sekolah menengah pertama yang dikelola	100 %	428.650.000		meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	100%	428.650.000	
	1	01	02	2.02	0042		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama									
								Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	320.650.000	DAK NON FISIK-BOS REGULER	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	15 Satuan Pendidikan	320.650.000	SMPN 14
	1	01	02	2.02	0058		Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik									
								Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	108.000.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	14 Satuan Pendidikan	108.000.000	SMPN 14
72	1	01	02				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni Usia 7-12 Tahun, Angka Partisipasi Murni Usia 13-15 Tahun, Angka Partisipasi Murni Usia 5-6 Tahun	100 %	223.520.000				100 %	223.520.000	
	1	01	02	2.03			Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase Satuan PAUD yang dikelola	100 %	223.520.000		meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	100%	223.520.000	
	1	01	02	2.03	0018		Pengelolaan Dana BOP PAUD									

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	1 Satuan Pendidikan	90.420.000	DAK NON FISIK-BOP PAUD	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	153 Satuan Pendidikan	90.420.000	TK PEMBINA
	1	01	02	2.03	0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD									
							Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	133.100.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	1 Satuan Pendidikan	133.100.000	TK PEMBINA
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			194.771.826.557					198.187.654.509	
2	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	75 %	40.278.832.306				75 %	45.682.086.284	
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Indikator SPM Kesehatan Rujukan Mencapai Target	90,32 %	6.749.269.134		meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	91,40%	3.769.622.760	
	1	02	02	2.01	0006	Pengembangan Puskesmas									
							Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	6 Unit	240.000.000	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan		252.000.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.01	0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya									
							Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	15 Unit	220.326.000	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan		231.342.300	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan									
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	100 Unit	1.170.083.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	108 Unit	609.074.064	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.01	0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi									

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	138 Unit	150.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	140 Unit	21.964.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan									
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	100 Unit	297.768.032	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	120 Unit	110.000.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan									
							Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	10 Paket	4.628.179.402	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT), DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	18 Paket	2.500.184.061	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.01	0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan									
							Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	12 Paket	42.912.700	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan		45.058.335	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Indikator SPM Kesehatan Dasar Mencapai Target	75 %	33.529.563.172		meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	75%	41.912.463.524	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2430 Orang	339.891.900	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	2420 Orang	737.657.666	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin									

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2318 Orang	55.048.300	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	2308 Orang	160.112.293	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir									
							Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2207 Orang	77.589.500	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	2197 Orang	115.093.020	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita									
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8981 Orang	418.713.400	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	8941 Orang	255.696.640	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	31582 Orang	30.698.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	31582 Orang	94.668.866	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif									
							Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	129950 Orang	69.802.300	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	130440 Orang	138.161.623	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut									
							Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	34490 Orang	43.368.200	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	35580 Orang	229.196.814	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi									

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	40710 Orang	27.003.500	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	41064 Orang	257.610.974	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus									
							Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8142 Orang	207.629.500	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	8213 Orang	231.849.877	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat									
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	343 Orang	112.931.100	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	346 Orang	120.190.567	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5729 Orang	783.915.200	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	6394 Orang	246.142.362	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV									
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	6051 Orang	71.392.500	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	6046 Orang	240.444.454	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3 Dokumen	206.459.600	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	21 Dokumen	1.416.196.900	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga									

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2 Dokumen	171.619.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	2 Dokumen	48.158.500	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5 Dokumen	292.075.200	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	5 Dokumen	24.473.500	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	154.252.800	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan		154.252.800	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	3 Dokumen	97.124.100	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	3 Dokumen	53.468.400	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA									
							Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	343 Orang	26.925.600	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	346 Orang	14.400.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2 Dokumen	1.016.286.200	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	8 Dokumen	422.163.600	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	36 Dokumen	27.218.762.555	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	36 Dokumen	34.754.525.821	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional									
							Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	18 Paket	29.686.000	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan		30.062.800	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat									
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	9 Dokumen	376.478.800	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	9 Dokumen	281.754.830	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya									
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	7 Dokumen	1.096.936.017	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	7 Dokumen	1.088.891.017	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota									
							Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	6 Unit	11.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	6 Unit	38.896.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)									
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	1.500.000	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan		1.500.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)									
							Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit	461.017.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	1 Unit	565.000.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis									
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1179 Orang	10.815.500	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	1184 Orang	43.266.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)									
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	575 Orang	13.400.500	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	646 Orang	31.896.200	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria									
							Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	50 Orang	27.079.300	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	50 Orang	42.570.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	2 Dokumen	80.161.600	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan		74.162.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan yang Sesuai Standar	95 %	608.824.000				95 %	719.968.500	
	1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase puskesmas yang dilakukan pembinaan dan pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	100 %	69.282.000		meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	-	69.282.000	
	1	02	03	2.02	0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	0 Dokumen	69.282.000	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan		69.282.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga Kesehatan Yang Memiliki SIP	95 %	539.542.000		meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	96%	650.686.500	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	650 Orang	539.542.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	700 Orang	650.686.500	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
4	1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Fasilitas Pelayanan Farmasi, Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) dan Depot Air Minum (DAM) sesuai Standar	89 %	466.827.000				89 %	98.421.200	
	1	02	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase fasilitas pelayanan farmasi sesuai standar	89 %	139.761.000		meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	90%	25.971.200	
	1	02	04	2.01	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	2 Dokumen	139.761.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-BOKKB-PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	2 Dokumen	25.971.200	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	04	2.04		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang mendapatkan sertifikat Laik Higiene Sanitasi, Sertifikat Produksi Pangan PIRT, dan sertifikat Depot Air Minum (DAM)	89 %	327.066.000		meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	90%	72.450.000	
	1	02	04	2.04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)									

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	2 Dokumen	327.066.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-BOKKB-PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	2 Dokumen	72.450.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
5	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	71 %	2.767.594.600				71 %	3.787.002.412	
	1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor	100 %	312.444.600		meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	100%	86.889.412	
	1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat									
							Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	312.444.600	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	1 Dokumen	86.889.412	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kota	100 %	2.455.150.000		meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	100%	3.700.113.000	
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)									
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	2.455.150.000	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	1 Dokumen	3.700.113.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
9	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	88	127.994.140.651				88 -	126.661.125.565	
	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	100 %	35.618.202.540		meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	100%	44.158.879.538	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	409 Orang/bulan	35.618.202.540	PENDAPATAN DARI BLUD, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	968 Orang/bulan	44.158.879.538	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA MADIUN
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase pencapaian kinerja Badan Layanan Umum Daerah	100 %	92.375.938.111		meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	100%	82.502.246.027	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	92.375.938.111	PENDAPATAN DARI BLUD, PENARIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	1 Unit Kerja	82.502.246.027	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA MADIUN
10	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	75 %	5.099.565.000				75 %	7.020.928.479	
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Indikator SPM Kesehatan Rujukan Mencapai Target	90,32 %	5.099.565.000		meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	91,40%	7.020.928.479	
	1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan									
							Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	6 Paket	5.099.565.000	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	18 Paket	7.020.928.479	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA MADIUN
11	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	75 %	2.853.816.000				75 %	2.375.803.662	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Indikator SPM Kesehatan Dasar Mencapai Target	75 %	2.853.816.000		meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	75%	2.375.803.662	
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3 Dokumen	405.900.000	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	21 Dokumen	381.003.000	PUSKESMAS MANGUHARJO

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	618.566.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	8 Dokumen	64.603.662	PUSKESMAS MANGUHARJO
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas									
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen	1.829.350.000	PENDAPATAN DARI BLUD	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	24 Dokumen	1.930.197.000	PUSKESMAS MANGUHARJO
12	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	75 %	2.571.015.000				75 %	2.099.924.222	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Indikator SPM Kesehatan Dasar Mencapai Target	75 %	2.571.015.000		meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	75%	2.099.924.222	
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3 Dokumen	364.976.000	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	21 Dokumen	342.402.000	PUSKESMAS NGEGONG
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	617.445.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	8 Dokumen	64.044.222	PUSKESMAS NGEGONG
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas									
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen	1.588.594.000	PENDAPATAN DARI BLUD	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	24 Dokumen	1.693.478.000	PUSKESMAS NGEGONG
13	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	75 %	2.812.153.000				75 %	2.442.221.774	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Indikator SPM Kesehatan Dasar Mencapai Target	75 %	2.812.153.000		meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	75%	2.442.221.774	
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3 Dokumen	497.260.000	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	21 Dokumen	486.450.000	PUSKESMAS SUKOSARI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	617.893.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	8 Dokumen	65.771.774	PUSKESMAS SUKOSARI
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas									
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen	1.697.000.000	PENDAPATAN DARI BLUD	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	24 Dokumen	1.890.000.000	PUSKESMAS SUKOSARI
14	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	75 %	2.733.929.000				75 %	2.046.215.281	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Indikator SPM Kesehatan Dasar Mencapai Target	75 %	2.733.929.000		meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	75%	2.046.215.281	
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3 Dokumen	335.004.000	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	21 Dokumen	296.004.000	PUSKESMAS TAWANGREJO
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	605.825.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	8 Dokumen	61.600.231	PUSKESMAS TAWANGREJO
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas									
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen	1.793.100.000	PENDAPATAN DARI BLUD	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	24 Dokumen	1.688.611.050	PUSKESMAS TAWANGREJO
15	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	75 %	3.432.429.000				75 %	2.641.609.191	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Indikator SPM Kesehatan Dasar Mencapai Target	75 %	3.432.429.000		meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	75%	2.641.609.191	
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3 Dokumen	706.200.000	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	21 Dokumen	672.959.000	PUSKESMAS BANJAREJO

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	663.229.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	8 Dokumen	68.650.191	PUSKESMAS BANJAREJO
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas									
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen	2.063.000.000	PENDAPATAN DARI BLUD	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	24 Dokumen	1.900.000.000	PUSKESMAS BANJAREJO
16	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	75 %	3.152.701.000				75 %	2.612.347.939	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Indikator SPM Kesehatan Dasar Mencapai Target	75 %	3.152.701.000		meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	75%	2.612.347.939	
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3 Dokumen	646.954.000	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	21 Dokumen	593.706.000	PUSKESMAS DEMANGAN
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	655.747.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	8 Dokumen	68.641.939	PUSKESMAS DEMANGAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas									
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen	1.850.000.000	PENDAPATAN DARI BLUD	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	24 Dokumen	1.950.000.000	PUSKESMAS DEMANGAN
	1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			18.901.028.275					19.972.641.848	
2	1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang Berperan Aktif dalam Pemberdayaan Sosial	67 %	3.086.808.012				67 %	3.387.768.395	
	1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang dibina	67 %	3.086.808.012		meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial	68%	3.387.768.395	
	1	06	02	2.03	0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota									

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	209 Orang	379.254.841	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial	209 Orang	436.499.115	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	02	2.03	0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota									
							Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Orang	47.159.440	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial	3 Orang	54.277.675	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	02	2.03	0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota									
							Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Keluarga	113.386.011	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial	7 Keluarga	130.504.978	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	02	2.03	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota									
							Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	13 Lembaga	2.547.007.720	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial	13 Lembaga	2.766.486.627	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3	1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial	100 %	3.887.602.763				100 %	4.198.791.369	
	1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	100 %	3.317.915.110		meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial	100%	3.545.916.950	
	1	06	04	2.01	0001	Penyediaan Permakanan									
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	185 Orang	523.410.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial	186 Orang	727.681.841	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	06	04	2.01	0002	Penyediaan Sandang									
							Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	70 Orang	163.228.310	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial	72 Orang	253.349.875	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	04	2.01	0003	Penyediaan Alat Bantu									
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Orang	25.847.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial	6 Orang	27.916.106	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	04	2.01	0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga									
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	13.596.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial	16 Orang	19.264.653	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	04	2.01	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial									
							Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	70 Orang	41.395.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial	75 Orang	10.095.664	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	04	2.01	0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat									
							Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	1.876.900.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial	310 Orang	2.116.977.871	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	04	2.01	0010	Pemberian Layanan Kedaruratan									
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	673.538.800	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial	77 Orang	390.630.940	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	100%	569.687.653		meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial	100%	652.874.419	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	06	04	2.02	0002	Pemberian Layanan Kedaruratan									
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	38 Orang	218.917.200	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial	40 Orang	264.711.358	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	04	2.02	0004	Penyediaan Sandang									
							Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	65 Orang	16.386.200	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial	67 Orang	24.723.574	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	04	2.02	0005	Penyediaan Alat Bantu									
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	20.280.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial	5 Orang	21.396.432	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	04	2.02	0006	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti									
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	115 Orang	20.730.253	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial	120 Orang	26.896.587	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	04	2.02	0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial									
							Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	250 Orang	164.674.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial	260 Orang	179.656.809	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	04	2.02	0010	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar									
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	90 Orang	121.902.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial	95 Orang	125.857.333	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	04	2.02	0012	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga									
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	22 Orang	6.798.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial	24 Orang	9.632.326	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan perlindungan dan jaminan sosial	100 %	11.513.773.100				100 %	11.910.457.169	
	1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data fakir miskin yang valid	100 %	11.513.773.100		meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial	100%	11.910.457.169	
	1	06	05	2.02	0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	8460 Orang	1.020.943.100	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial	8400 Orang	1.175.048.777	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	05	2.02	0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	3600 Keluarga	246.326.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial	3600 Keluarga	283.530.461	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	05	2.02	0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga									
							Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	3600 Keluarga	10.046.564.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial	3600 Keluarga	10.221.734.661	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	05	2.02	0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat									
							Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	58 Orang	199.940.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial	60 Orang	230.143.270	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
5	1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase pelayanan perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana	100 %	412.844.400				100 %	475.624.915	
	1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Korban bencana yang mendapat pelayanan	100 %	48.000.400		meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial	100%	55.361.541	
	1	06	06	2.01	0001	Penyediaan Makanan									
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	25.791.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial	300 Orang	29.689.223	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	06	06	2.01	0002	Penyediaan Sandang									
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	13.959.400	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial	300 Orang	16.108.004	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	06	2.01	0005	Pelayanan Dukungan Psikososial									
							Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	8.250.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial	15 Orang	9.564.314	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Kelurahan yang mendapatkan Sosialisasi Kampung Siaga Bencana	100 %	364.844.000		meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial	100%	420.263.374	
	1	06	06	2.02	0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana									
							Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Kampung	16.744.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial	1 Kampung	19.322.039	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	06	2.02	0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana									
							Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	26 Orang	348.100.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial	26 Orang	400.941.335	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			5.888.199.548					5.994.687.808	
2	2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	persentase jumlah peserta pelatihan yang berbasis kompetensi	30 %	2.122.380.000				30 %	2.325.458.860	
	2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah peserta pelatihan ketrampilan yang mengikuti Uji Kompetensi	150 orang	2.071.900.000		meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi	150orang	2.301.838.860	
	2	07	03	2.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi									
							Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun	210 Orang	2.071.900.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi	210 Orang	2.301.838.860	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	07	03	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Prosentase LPKS yang berijin	50 %	10.480.000		meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi	50%	10.000.000	
	2	07	03	2.02	0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta									
							Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	27 Lembaga	10.480.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi	27 Lembaga	10.000.000	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	07	03	2.05		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang mendapatkan sosialisasi Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	30 perusahaan	40.000.000		meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi	30perusahaan	13.620.000	
	2	07	03	2.05	0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	2 Dokumen	40.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi	2 Dokumen	13.620.000	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
3	2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja Yang Ditempatkan melalui informasi bursa kerja	15 %	374.590.600				15 %	220.000.000	
	2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan melalui informasi bursa kerja	200 orang	374.590.600		meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi	200orang	220.000.000	
	2	07	04	2.03	0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online									
							Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	1 Dokumen	116.306.600	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi	1 Dokumen	100.000.000	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	07	04	2.03	0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online									
							Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	150 Orang	108.284.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi	150 Orang	70.000.000	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	07	04	2.03	0003	Job Fair/Bursa Kerja									
							Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	40 Orang	150.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi	40 Orang	50.000.000	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
4	2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan Yang Mengesahkan Peraturan Perusahaan	16 %	3.391.228.948				16 %	3.449.228.948	
	2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang mendapatkan bimbingan PP dan PKB	50 perusahaan	64.223.800		meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi	50perusahaan	154.223.800	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	07	05	2.01	0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan									
							Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	20 Perusahaan	33.973.800	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi	20 Perusahaan	123.973.800	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	07	05	2.01	0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan									
							Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	1 Laporan	30.250.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi	1 Laporan	30.250.000	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase permasalahan HI yang terselesaikan	75 %	3.327.005.148		meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi	75%	3.295.005.148	
	2	07	05	2.02	0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	15 Perkara	100.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi	15 Perkara	75.000.000	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	07	05	2.02	0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja									
							Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	15.000 Orang	3.227.005.148	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi	15000 Orang	3.220.005.148	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			1.718.038.725					1.950.190.637	
7	2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Anggaran APBD yang di ARG	100 %	824.946.939				100 %	950.522.304	
	2	08	02	2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase program yang di ARG	100 %	88.311.842		memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial	100%	102.626.099	
	2	08	02	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG									
							Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	28.176.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial	1 Dokumen	32.631.206	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	02	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota									
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	60.135.842	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial	2 Dokumen	69.994.893	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Partisipasi Perempuan pada Lembaga Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi dan Pelatihan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	100 %	8.823.000		memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial	100%	10.038.231	
	2	08	02	2.02	0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi									
							Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	8.823.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial	1 Dokumen	10.038.231	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	02	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang dibina	100 %	727.812.097		memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial	100%	837.857.974	
	2	08	02	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota									

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	580 Orang	708.412.097	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial	580 Orang	815.453.478	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	02	2.03	0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota									
							Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	19.400.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial	1 Dokumen	22.404.496	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
8	2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Penanganan Pengaduan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan	100 %	264.471.348				100 %	274.957.159	
	2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga yang mendapatkan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap Perempuan	100 %	72.165.199		memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial	100%	59.010.220	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	08	03	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	19.628.986	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial	1 Dokumen	22.656.477	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	03	2.01	0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota									
							Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	34 Perangkat Daerah	52.536.213	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial	34 Perangkat Daerah	36.353.743	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase penyedia layanan yang melaksanakan rujukan lanjutan	100 %	173.472.015		memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial	100%	194.224.349	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	08	03	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota									
							Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Layanan	173.472.015	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial	1 Layanan	194.224.349	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	03	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyedia layanan perlindungan perempuan yang aktif	100 %	18.834.134		memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial	100%	21.722.590	
	2	08	03	2.03	0003	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota									
							Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	12 Orang	12.587.832	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial	12 Orang	14.500.683	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	08	03	2.03	0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota									
							Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	6.246.302	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial	1 Dokumen	7.221.907	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
9	2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase RT yang Memiliki Data Keluarga Berkualitas	40 %	195.391.263				40 %	224.943.649	
	2	08	04	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peserta yang memahami Kesetaraan Gender dan Hak Anak	100 %	135.205.863		memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial	100%	155.653.698	
	2	08	04	2.01	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota									
							Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	34 Perangkat Daerah	60.276.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial	34 Perangkat Daerah	69.409.219	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	08	04	2.01	0002	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota									
							Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	74.929.863	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial	1 Dokumen	86.244.479	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	04	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga yang aktif dalam peningkatan Kualitas Keluarga dan Hak anak	100 %	60.185.400		memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial	100%	69.289.951	
	2	08	04	2.02	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	280 Orang	60.185.400	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial	285 Orang	69.289.951	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Terpenuhinya Data Terpilah Gender dan Anak	1 Dokumen	66.662.028				1 Dokumen	76.724.422	
	2	08	05	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengumpulan data gender dan anak	100 %	66.662.028		memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial	100%	76.724.422	
	2	08	05	2.01	0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota									
							Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	66.662.028	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial	1 Dokumen	76.724.422	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
11	2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Lembaga yang Aktif Dalam Pemenuhan Hak Anak	100 %	299.951.000				100 %	346.256.175	
	2	08	06	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga yang dibina dalam rangka pemenuhan hak anak	100 %	36.924.000		memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial	100%	63.503.044	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	08	06	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota									
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	36.924.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial	1 Dokumen	63.503.044	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga yang dibina dalam rangka Peningkatan Kualitas Hidup Anak	100 %	263.027.000		memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial	100%	282.753.131	
	2	08	06	2.02	0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota									
							Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	110 Orang	8.852.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial	115 Orang	18.048.867	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	06	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	137.462.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial	1 Dokumen	146.833.201	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	06	2.02	0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	74.498.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial	1 Dokumen	75.147.359	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	06	2.02	0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	42.215.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial	1 Dokumen	42.723.704	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Anak	0,044 %	66.616.147				0,044 %	76.786.928	
	2	08	07	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sekolah yang terlibat dalam perlindungan Anak	100 %	19.554.769		memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial	100%	22.512.079	
	2	08	07	2.01	0003	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA									
							Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu	1 Kegiatan	19.554.769	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial	1 Kegiatan	22.512.079	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase anak yang mendapatkan Layanan Perlindungan Khusus	100 %	21.341.000		memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial	100%	24.659.441	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	08	07	2.02	0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK									
							Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	10 Layanan	21.341.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial	10 Layanan	24.659.441	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	07	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga yang terlibat dalam perlindungan Khusus Anak	100 %	25.720.378		memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial	100%	29.615.408	
	2	08	07	2.03	0005	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota									
							Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK	1 Kegiatan	25.720.378	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial	1 Kegiatan	29.615.408	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			623.777.634					537.486.000	
2	2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Angka Kecukupan Energi	2000 kkal/kapita	473.214.634				2000 kkal/kapita	395.923.000	
	2	09	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Prosentase ketersediaan pangan utama	100 %	230.716.634		meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial	100%	223.425.000	
	2	09	03	2.01	0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal									
							Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	1 Laporan	185.862.734	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial	1 Laporan	172.840.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	03	2.01	0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis									
							Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	6 Laporan	44.853.900	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial	6 Laporan	50.585.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Angka Kecukupan Protein / AKP	63 gram/kapita	242.498.000		meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial	63gram/kapita	172.498.000	
	2	09	03	2.04	0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun									
							Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen	51.571.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial	1 Dokumen	44.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	03	2.04	0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal									
							Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Laporan	190.927.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial	1 Laporan	128.498.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Daerah Rentan dan Rawan Pangan	22 %	63.300.000				22 %	54.300.000	
	2	09	04	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Tersedianya Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan	1 Dokumen	63.300.000		meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial	1Dokumen	54.300.000	
	2	09	04	2.01	0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan									
							Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	1 Dokumen	63.300.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial	1 Dokumen	54.300.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
4	2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar Aman yang Teruji	80 %	87.263.000				80 %	87.263.000	
	2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksanannya Pengawasan Keamanan Pangan Segar	8 Lokasi	87.263.000		meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial	8Lokasi	87.263.000	
	2	09	05	2.01	0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan									
							Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 Dokumen	87.263.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial	1 Dokumen	87.263.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			4.892.802.000					2.679.628.684	
6	2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Meningkatnya Jumlah SSK Meningkatnya Kampung KB yang Berstandar Paripurna	14 SSK 7 Kampung KB	614.587.000				15SSK 8Kampung KB	244.288.800	
	2	14	02	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah sekolah yang telah membentuk RPP SSK	6 Sekolah	71.520.000		meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	7Sekolah	24.857.400	
	2	14	02	2.01	0007	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota									
							Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	13 Dokumen	71.520.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	13 Dokumen	24.857.400	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data keluarga yang diupdating	100 %	543.067.000		meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	100%	219.431.400	
	2	14	02	2.02	0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga									
							Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	27 Laporan	494.521.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	27 Laporan	166.448.400	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	02	2.02	0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB									
							Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	27 Dokumen	48.546.000	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	27 Dokumen	52.983.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
7	2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Menurunnya Unmet Need	6,8 %	2.187.515.000				6,8 %	1.040.415.084	
	2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase pelaksanaan kegiatan KIE Pengendalian Penduduk dan KB	100 %	736.891.000		meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	100%	483.940.000	
	2	14	03	2.01	0008	Pengendalian Program KKBPK									
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	2 Laporan	140.000.000	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	2 Laporan	80.000.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.01	0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana									
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	12 Laporan	131.754.000	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	12 Laporan	192.642.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.01	0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)									

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	9 Laporan	45.000.000	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	9 Laporan	39.000.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.01	0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang									
							Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	3 Dokumen	150.000.000	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	3 Dokumen	100.298.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.01	0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja									
							Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	27 Organisasi	270.137.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	27 Organisasi	72.000.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase kader yang melakukan updating data	100 %	88.687.000		meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	100%	67.200.000	
	2	14	03	2.02	0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)									
							Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	150 Orang	88.687.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	150 Orang	67.200.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase faskes yang mendapatkan distribusi alkon	100 %	975.777.000		meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	100%	309.598.884	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	14	03	2.03	0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya									
							Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	24 Laporan	15.300.000	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	24 Laporan	13.000.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.03	0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)									
							Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	661 Orang	943.827.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	661 Orang	284.898.884	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.03	0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya									
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	4 Laporan	16.650.000	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	4 Laporan	11.700.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Poktan dan Pokja Kampung KB yang menerima pembinaan Kesertaan ber KB	100 %	386.160.000		meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	100%	179.676.200	
	2	14	03	2.04	0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB									
							Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	7 Dokumen	3.707.000	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan		3.707.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.04	0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas									

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	7 Kampung	382.453.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	7 Kampung	175.969.200	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
8	2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Kepesertaan Anggota Tribina PUS yang ber-KB	87,7 %	2.090.700.000				87,7 %	1.394.924.800	
	2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase angka kepesertaan sasaran dalam kegiatan BKB, BKR, BKL dan UPPKS	32 %	1.145.700.000		meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	32%	449.924.800	
	2	14	04	2.01	0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)									
							Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	8 Laporan / Dokumen	28.800.000	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan		28.800.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	04	2.01	0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))									
							Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	32 Laporan	711.456.500	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	32 Laporan	36.576.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	04	2.01	0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)									

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	25 Unit	302.686.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan		302.686.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	04	2.01	0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)									
							Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	210 Orang	102.757.500	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	210 Orang	81.862.800	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	04	2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase TPK Kelurahan dalam Mendampingi Keluarga Beresiko Stunting	72 %	945.000.000		meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	-	945.000.000	
	2	14	04	2.02	0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)									
							Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	10 laporan	450.000.000	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan		450.000.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	14	04	2.02	0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)									
							Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	10 laporan	495.000.000	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan		495.000.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			4.797.503.863					6.150.000.000	
1	2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Jumlah pemuda aktif berdaya saing	81 Orang	200.000.000				81 Orang	250.000.000	
	2	19	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Event Kepemudaan yang diselenggarakan	5 Event	200.000.000		memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial	5Event	250.000.000	
	2	19	02	2.01	0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota									
							Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	1 Kegiatan	200.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial	1 Kegiatan	250.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah prestasi olahraga	128 Medali	4.597.503.863				128 Medali	5.900.000.000	
	2	19	03	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase kualitas sarana prasarana olahraga yang terfasilitasi	100 %	1.811.388.863		memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial	100%	2.000.000.000	
	2	19	03	2.01	0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota									
							Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	3 Unit	1.811.388.863	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial	3 Unit	2.000.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelenggaraan event olahraga	6 Event	1.421.115.000		memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial	6Event	1.500.000.000	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	19	03	2.02	0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota									
							Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	3 Kegiatan	1.321.115.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial	3 Kegiatan	1.400.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	03	2.02	0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga									
							Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	100 Orang	100.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial	100 Orang	100.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	03	2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Prosentase pengembangan organisasi keolahragaan	100 %	1.000.000.000		memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial	100%	2.000.000.000	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	19	03	2.04	0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait									
							Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1.000.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial	1 Dokumen	2.000.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Cabang olahraga yang mendapat pembinaan	3 Cabor	365.000.000		memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial	8Cabor	400.000.000	
	2	19	03	2.05	0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional									
							Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	13 Lembaga	365.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial	1 Lembaga	400.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			2.350.127.000					2.590.000.000	
3	2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah event/kegiatan pelestarian kebudayaan	15 Kali	2.080.000.000				15 Kali	2.350.000.000	
	2	22	02	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.622.572.400		revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	Pembangunan Karakter Masyarakat yang Berbasis nilai-nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas	-	1.900.000.000	
	2	22	02	2.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan									
							Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	8 Objek	1.622.572.400	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	Pembangunan Karakter Masyarakat yang Berbasis nilai-nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas		1.900.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	22	02	2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku seni budaya yang melakukan pagelaran	162 Orang	457.427.600		revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	Pembangunan Karakter Masyarakat yang Berbasis nilai-nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas	175Orang	450.000.000	
	2	22	02	2.02	0003	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan									
							Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	25 Sertifikat	457.427.600	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	Pembangunan Karakter Masyarakat yang Berbasis nilai-nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas	30 Sertifikat	450.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
4	2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Jumlah event/kegiatan pelestarian kesenian tradisional	15 Kali	170.127.000				15 Kali	120.000.000	
	2	22	03	2.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah seni budaya yang dibina	2 Jenis	170.127.000		revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	Pembangunan Karakter Masyarakat yang Berbasis nilai-nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas	2Jenis	120.000.000	
	2	22	03	2.01	0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional									
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	40 Orang	170.127.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	Pembangunan Karakter Masyarakat yang Berbasis nilai-nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas	40 Orang	120.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah cagar budaya dan WBTB yang berpotensi jadi destinasi wisata	2 Obyek	100.000.000				2 Obyek	120.000.000	
	2	22	05	2.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah cagar budaya yang dikembangkan dalam bidang perekonomian	2 Obyek	100.000.000		revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	Pembangunan Karakter Masyarakat yang Berbasis nilai-nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas	2Obyek	120.000.000	
	2	22	05	2.02	0002	Pengembangan Cagar Budaya									
							Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	2 Objek	100.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	Pembangunan Karakter Masyarakat yang Berbasis nilai-nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas	2 Objek	120.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			8.361.844.291					6.095.256.624	
1	2	23	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82 Nilai	7.044.126.968				82 Nilai	5.199.726.321	
	2	23	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen PerencanaPersentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerahan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	57.001.532		meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	100%	31.089.855	
	2	23	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	57.001.532	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	12 Laporan	31.089.855	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan	100 %	3.898.506.810		meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	100%	4.045.291.218	
	2	23	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/bulan	3.898.506.810	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	25 Orang/bulan	4.045.291.218	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Umum	100 %	275.828.000		meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	100%	97.998.544	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	23	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45 Laporan	275.828.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	30 Laporan	97.998.544	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan pemerintah daerah	100 %	34.363.280		meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	100%	55.346.500	
	2	23	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	34.363.280	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	6 Unit	55.346.500	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya Pemenuhan Kebutuhan Jasa Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	826.192.140		meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	100%	745.000.499	
	2	23	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	826.192.140	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	12 Laporan	745.000.499	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang Layak digunakan	100 %	1.952.235.206		meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	100%	224.999.705	
	2	23	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22 Unit	210.814.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	22 Unit	88.499.855	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	1.651.551.277	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	4 Unit	71.999.850	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	72 Unit	89.869.929	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	72 Unit	64.500.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	36,79 %	1.272.717.543				36,79 %	845.530.413	
	2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketermanfaatan Perpustakaan oleh Masyarakat	4,9 %	504.085.230		meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	4,9%	405.504.000	
	2	23	02	2.01	0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan									
							Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	750 Eksemplar	180.042.110	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	750 Eksemplar	85.502.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.01	0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik									
							Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	76 Perpustakaan	324.043.120	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	76 Perpustakaan	320.002.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemasyarakatan Gemar Membaca	20 Kali	768.632.313		meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	20Kali	440.026.413	
	2	23	02	2.02	0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial									
							Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	5 Perpustakaan	98.860.792	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	5 Perpustakaan	57.500.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.02	0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat									
							Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	212 Lokus	669.771.521	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	212 Lokus	382.526.413	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
3	2	23	03			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dilestarikan	94 %	44.999.780				94 %	49.999.890	
	2	23	03	2.01		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah yang Dilestarikan	210 Eksemplar	44.999.780		meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	210Eksemplar	49.999.890	
	2	23	03	2.01	0003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno									
							Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	2 Orang	26.999.895	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	2 Orang	29.999.990	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	23	03	2.01	0004	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan									
							Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	4 Eksemplar	17.999.885	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	2 Eksemplar	19.999.900	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			13.007.383.644					19.512.099.202	
	8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			13.007.383.644					19.512.099.202	
2	8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan Pembinaan Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100 %	1.367.239.210				100 %	2.300.000.000	
	8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah jenis kegiatan	6 jenis	1.367.239.210		revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	Pembangunan Karakter Masyarakat yang Berbasis nilai-nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas	6jenis	2.300.000.000	
	8	01	02	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan									
							Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	200 Orang	581.343.210	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	Pembangunan Karakter Masyarakat yang Berbasis nilai-nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas	200 Orang	800.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	02	2.01	0007	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka									
							Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	2 Dokumen	785.896.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	Pembangunan Karakter Masyarakat yang Berbasis nilai-nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas	2 Dokumen	1.500.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3	8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Pendidikan Politik kepada Partai Politik Pemenang Pemilu	100 %	2.079.743.250				100 %	3.499.916.500	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase kegiatan pendidikan politik kepada masyarakat	80 persen	2.079.743.250		revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	Pembangunan Karakter Masyarakat yang Berbasis nilai-nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas	80persen	3.499.916.500	
	8	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah									
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	50 Orang	1.039.398.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	Pembangunan Karakter Masyarakat yang Berbasis nilai-nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas	33 Orang	1.455.563.500	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	03	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah									

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	55 Orang	534.353.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	Pembangunan Karakter Masyarakat yang Berbasis nilai-nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas	125 Orang	534.353.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	03	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah								
							Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1 Laporan	505.992.250	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	Pembangunan Karakter Masyarakat yang Berbasis nilai-nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas	1 Laporan	1.510.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4	8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Status Kelembagaan Orkesmas	100 %	337.740.500				100 %	940.000.000	
	8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase tingkat keaktifan organisasi kemasyarkatan	100 persen	337.740.500		revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	Pembangunan Karakter Masyarakat yang Berbasis nilai-nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas	100persen	940.000.000	
	8	01	04	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah								

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	300 Orang	337.740.500	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	Pembangunan Karakter Masyarakat yang Berbasis nilai-nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas	100 Orang	940.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5	8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Koordinasi yang dilakukan dengan pemangku kepentingan	100 %	6.774.769.912				100 %	8.271.316.512	
	8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah koordinasi	4 kali	6.774.769.912		meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial	4kali	8.271.316.512	
	8	01	05	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah									
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100 Orang	95.294.400	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial	100 Orang	95.294.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	05	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah									
							Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	500 Orang	6.679.475.512	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial	500 Orang	8.176.022.512	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Konflik yang Terfasilitasi	100 %	2.447.890.772				100 %	4.500.866.190	
	8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah konflik Persentase konflik yang terfasilitasi	0 konflik 100 persen	2.447.890.772		meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial	0konflik	4.500.866.190	
	8	01	06	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah									
							Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	100 Orang	1.984.515.074	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial	100 Orang	3.500.866.190	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	06	2.01	0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	463.375.698	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial	12 Dokumen	1.000.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
									492.428.449.281					509.046.804.309	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

PRIORITAS 3: Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp,00)	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp,00)	
											Nasional	Provinsi			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			60.024.678.149					63.006.488.350	
1	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	88 -	60.024.678.149				88 -	63.006.488.350	
	1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun	100 %	439.047.000		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	460.999.350	
	1	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	273.326.100	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	8 Dokumen	296.905.350	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	104.800.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	3 Laporan	107.310.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	60.920.900	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	5 Laporan	56.784.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	100 %	55.946.579.110		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	59.802.393.057	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	496 Orang/ bulan	55.946.579.110	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG KESEHATAN	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	968 Orang/ bulan	59.802.393.057	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.621.699.589		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	1.866.076.271	
	1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	936.699.589	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	1 Paket	1.216.076.271	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	685.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	155 Laporan	650.000.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	430.668.450		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	219.375.000	
	1	02	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	154.997.450	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	15 Unit	126.417.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	75 Unit	275.671.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	76 Unit	92.958.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang	100 %	867.690.000		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	33.445.372	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	867.690.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	26 Laporan	33.445.372	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	718.994.000		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	624.199.300	
	1	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	109 Unit	405.696.900	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	109 Unit	389.312.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	162.876.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	1 Unit	19.013.900	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	273 Unit	150.421.100	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	273 Unit	215.873.400	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			14.814.889.953					18.400.000.000	
1	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85 Nilai	14.814.889.953				85 Nilai	18.400.000.000	
	1	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	81 persen	294.251.670		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	81persen	175.000.000	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	140.868.950	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	8 Dokumen	100.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	153.382.720	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	12 Laporan	75.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100 persen	7.500.000.000		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100persen	7.750.000.000	
	1	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang/ bulan	7.500.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	48 Orang/ bulan	7.750.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100 persen	467.087.000		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100persen	775.000.000	
	1	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	467.087.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	12 Laporan	475.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan barang milik daerah urusan pemerintah daerah	100 persen	496.721.848		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100persen	3.400.000.000	
	1	03	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	496.721.848	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	2 Unit	650.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintah daerah	100 persen	4.200.316.799		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100persen	4.525.000.000	
	1	03	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	4.200.316.799	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	12 Laporan	4.525.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan	100 persen	1.856.512.636		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100persen	1.775.000.000	
	1	03	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	54 Unit	945.673.670	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	54 Unit	825.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	678.650.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	5 Unit	625.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	232.188.966	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi		325.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			11.077.641.051					11.394.880.000	
1	1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,85 Skor	11.077.641.051				84,85 Skor	11.394.880.000	
	1	04	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perangkat Daerah	100 %	18.050.000		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	45.000.000	
	1	04	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20 Laporan	18.050.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	20 Laporan	45.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan	100 %	5.678.750.000		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	5.511.000.000	
	1	04	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/ bulan	5.617.750.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	36 Orang/ bulan	5.450.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 Laporan	61.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	13 Laporan	61.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Kepegawaian	100 %	135.350.000		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	135.000.000	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	04	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	125.350.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	1 Paket	125.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan									
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	34 Orang	10.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	34 Orang	10.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Umum	100 %	233.880.000		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	233.880.000	
	1	04	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	233.880.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	20 Laporan	233.880.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tercukupinya Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	115.570.735		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	100.000.000	
	1	04	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	11 Unit	115.570.735	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	10 Unit	100.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya Pemenuhan Kebutuhan Jasa Pemerintahan Daerah	100 %	2.185.795.316		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	2.500.000.000	
	1	04	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.185.795.316	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	20 Laporan	2.500.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang Layak Digunakan	100 %	2.710.245.000		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	2.870.000.000	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	04	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	65 Unit	2.100.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	65 Unit	2.200.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	1 Unit	150.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	106 Unit	510.245.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	106 Unit	520.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			20.580.605.992					24.380.312.671	
1	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84 Nilai	14.541.705.432				84 Nilai	14.801.404.671	
	1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perangkat Daerah	100 %	195.425.000		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	246.067.000	
	1	05	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	195.425.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	12 Laporan	246.067.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan	100 %	9.772.101.808		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	7.472.847.000	
	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	93 Orang/ bulan	9.772.101.808	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	49 Orang/ bulan	7.472.847.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian	100 %	824.086.000		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	800.000.000	
	1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	824.086.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	1 Paket	800.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Umum	100 %	350.000.000		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	350.000.000	
	1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	350.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	20 Laporan	350.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan	100 %	1.019.255.000		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	1.281.912.271	
	1	05	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	18 Unit	59.585.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	2 Unit	205.622.271	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	810.670.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	0 Unit	806.290.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	05	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Unit	149.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	10 Unit	270.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.193.196.000		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	3.290.578.400	
	1	05	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.193.196.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	12 Laporan	3.290.578.400	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	1.187.641.624		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	1.360.000.000	
	1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	25 Unit	745.500.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	20 Unit	850.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	332.141.624	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	2 Unit	390.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	110.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	5 Unit	120.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kasus K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan) yang Diselesaikan	98 %	6.038.900.560				98 %	9.578.908.000	
	1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	200 Kasus 98 %	4.196.471.760		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	98%	5.827.166.400	
	1	05	02	2.01	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota									
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	4 Dokumen	158.860.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	4 Dokumen	198.672.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	02	2.01	0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum									
							Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4 Dokumen	2.562.125.500	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	4 Dokumen	3.765.368.400	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	02	2.01	0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia									
							Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	119 Orang	615.216.260	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	40 Orang	712.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	02	2.01	0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan									

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	12 laporan	294.400.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	12 laporan	466.019.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	02	2.01	0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa									
							Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	12 Laporan	565.870.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	12 Laporan	685.107.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	98 %	1.692.428.800		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	98%	3.601.741.600	
	1	05	02	2.02	0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah									
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	6 Laporan	792.428.800	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	12 Laporan	2.701.741.600	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	02	2.02	0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah									
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	6 Laporan	900.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	12 Laporan	900.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	02	2.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Prosentase Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota yang berkualitas	80 %	150.000.000		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	80%	150.000.000	
	1	05	02	2.03	0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS									
							Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	1 Laporan	150.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	2 Laporan	150.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			8.324.177.694					8.751.913.062	
1	1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85,50 Nilai	8.324.177.694				85,50 Nilai	8.751.913.062	
	1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100 %	162.215.000		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	195.383.514	
	1	06	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	162.215.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	10 Laporan	195.383.514	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persenatase pemenuhan dokumen administrasi keuangan daerah	100 %	6.557.938.804		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	6.381.079.229	
	1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/ bulan	6.557.938.804	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	35 Orang/ bulan	6.381.079.229	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan dokumen administrasi umum	100 %	927.288.840		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	964.192.043	
	1	06	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	612.565.840	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	12 Paket	607.821.043	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	314.723.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	12 Laporan	356.371.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya kebutuhan sarana prasarana aparatur pemerintah	100 %	256.610.000		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	612.860.000	
	1	06	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	256.610.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	12 Laporan	612.860.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan	100 %	420.125.050		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	598.398.276	
	1	06	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	198.790.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	6 Unit	200.187.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	132.843.750	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	3 Unit	256.436.670	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	110 Unit	88.491.300	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	110 Unit	141.774.606	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			7.153.022.967					8.120.716.900	
1	2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,02 Nilai	7.153.022.967				81,02 Nilai	8.120.716.900	
	2	07	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100 %	100.000.000		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	80.000.000	
	2	07	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	100.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	6 Dokumen	80.000.000	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	prosentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100 %	5.480.716.900		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	5.480.716.900	
	2	07	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/ bulan	5.480.716.900	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	36 Orang/ bulan	5.480.716.900	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	07	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	prosentase pemenuhan dokumen administrasi Kepegawaian	100 %	19.710.000		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	20.000.000	
	2	07	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan									
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	70 Orang	19.710.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	70 Orang	20.000.000	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	07	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100 %	983.548.271		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	800.000.000	
	2	07	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket	700.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	3 Paket	575.000.000	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	07	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75 Laporan	283.548.271	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	75 Laporan	225.000.000	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	07	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Tercukupinya Barang Milik Daerah	100 %	285.757.796		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	1.585.000.000	
	2	07	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	5.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	1 Unit	30.000.000	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	07	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	35.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	1 Unit	35.000.000	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	07	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	21 Unit	119.757.796	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	2 Unit	35.000.000	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	07	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	1 Unit	1.450.000.000	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	07	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	125.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	2 Unit	35.000.000	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Tercukupinya Barang Milik Daerah	100 %	283.290.000		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	155.000.000	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	07	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22 Unit	83.290.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	22 Unit	70.000.000	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	07	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	150.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	3 Unit	50.000.000	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	07	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	66 Unit	50.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	47 Unit	35.000.000	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			7.044.268.608					7.315.276.030	
1	2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,05 Nilai	7.044.268.608				81,05 Nilai	7.315.276.030	
	2	09	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100 %	75.535.000		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	75.100.000	
	2	09	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	75.535.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	6 Laporan	75.100.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi keuangan	100 %	4.995.931.000		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	5.382.457.000	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	09	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/bulan	4.995.931.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	24 Orang/bulan	5.382.457.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase perjanjian kinerja ASN yang tercapai	100 %	117.078.000		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	121.078.000	
	2	09	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	80 Paket	70.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	80 Paket	70.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian									
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	3 Dokumen	47.078.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	3 Dokumen	51.078.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Umum	100 %	1.187.137.000		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	1.212.347.430	
	2	09	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	827.137.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	12 Paket	834.347.430	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	360.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	12 Laporan	378.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan barang milik daerah urusan pemerintah daerah	100 %	119.727.000		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	82.740.000	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	09	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	30 Unit	119.727.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	30 Unit	82.740.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan	100 %	548.860.608		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	441.553.600	
	2	09	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	35 Unit	163.688.600	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	35 Unit	163.688.600	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	322.207.008	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	2 Unit	220.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	80 Unit	62.965.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	80 Unit	57.865.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			8.341.175.988					9.509.495.639	
1	2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,40 Nilai	3.023.469.246				84,40 Nilai	3.727.019.647	
	2	12	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	111.809.100		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	162.548.400	
	2	12	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	27.760.500	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	12 Laporan	48.060.500	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	84.048.600	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	12 Laporan	114.487.900	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100 %	78.890.000		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	78.890.000	
	2	12	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	78.890.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	12 Dokumen	78.890.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	237.420.000		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	378.613.000	
	2	12	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	237.420.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	12 Laporan	378.613.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	203.899.980		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	715.682.640	
	2	12	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15 Unit	203.899.980	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	15 Unit	715.682.640	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	1.692.934.963		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	1.584.184.114	
	2	12	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.692.934.963	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	12 Laporan	1.584.184.114	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah urusan pemerintah daerah	100 %	698.515.203		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	807.101.493	
	2	12	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21 Unit	95.730.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	21 Unit	116.880.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	336.510.666	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	1 Unit	372.687.050	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	75 Unit	266.274.537	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi		317.534.443	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan	94 %	151.548.850				98,30 %	213.628.060	
	2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase penerbitan dokumen kependudukan	100 %	151.548.850		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	213.628.060	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	12	02	2.01	0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk									
							Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12 Laporan	128.908.850	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	12 Laporan	160.654.060	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	02	2.01	0005	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan									
							Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	38000 Dokumen	22.640.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	38000 Dokumen	52.974.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3	2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil	99,95 %	81.909.200				99,95 %	181.765.600	
	2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase penerbitan dokumen pencatatan sipil	100 %	81.909.200		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	181.765.600	
	2	12	03	2.01	0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting									
							Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	7000 Dokumen	53.284.400	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	8600 Dokumen	103.784.400	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	03	2.01	0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil									
							Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	4 Layanan	28.624.800	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	4 Layanan	77.981.200	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4	2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah stakeholder yang memanfaatkan data kependudukan	18 stakeholder	146.033.860				35 stakeholder	248.867.500	
	2	12	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase Data Kependudukan yang terupdate	100 %	146.033.860		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	248.867.500	
	2	12	04	2.01	0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan									
							Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	2 Dokumen	98.330.500	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	2 Dokumen	162.257.500	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	12	04	2.01	0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan									
							Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	34 Dokumen	47.703.360	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	35 Dokumen	86.610.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
5	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,40 Nilai	4.938.214.832				84,40 Nilai	5.138.214.832	
	X	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100 %	4.938.214.832		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	5.138.214.832	
	X	XX	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/bulan	4.938.214.832	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	28 Orang/bulan	5.138.214.832	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			10.862.317.213					10.661.400.000	
1	2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83,70 Nilai	10.862.317.213				83,70 Nilai	10.661.400.000	
	2	15	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100 %	38.870.000		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	55.000.000	
	2	15	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	38.870.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	6 Dokumen	55.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100 %	8.060.523.969		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	7.892.200.000	
	2	15	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	8.060.523.969	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	50 Orang/bulan	7.892.200.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase perjanjian kinerja ASN yang tercapai	100 %	127.969.043		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	100.000.000	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	15	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	127.969.043	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	1 Paket	100.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi Umum	100 %	250.000.000		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	250.000.000	
	2	15	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	250.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	60 Laporan	250.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan peralatan kantor	100 %	128.259.720		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	150.000.000	
	2	15	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	19 Unit	128.259.720	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	10 Unit	150.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan perlengkapan kantor	100 %	1.022.217.951		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	1.028.200.000	
	2	15	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	1.022.217.951	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	2 Laporan	1.028.200.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang layak digunakan	100 %	1.234.476.530		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	1.186.000.000	
	2	15	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	57 Unit	704.022.530	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	57 Unit	700.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	394.454.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	2 Unit	350.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	136.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	10 Unit	136.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			24.933.965.153					27.274.370.138	
1	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82,25 Nilai	7.595.074.262				82,25 Nilai	7.502.500.000	
	2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100 %	65.000.000		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	20.000.000	
	2	16	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	65.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	5 Laporan	20.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100 %	5.600.000.000		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	5.450.000.000	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	16	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/bulan	5.600.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	32 Orang/bulan	5.450.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100 %	400.000.000		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	350.000.000	
	2	16	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	400.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	25 Laporan	350.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan pemerintahan daerah	100 %	2.500.000		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	50.000.000	
	2	16	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	2.500.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	10 Unit	25.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa penunjang perangkat daerah	100 %	1.125.348.262		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	1.150.000.000	
	2	16	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.125.348.262	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	1 Laporan	1.150.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	100 %	402.226.000		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	482.500.000	
	2	16	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	30 Unit	252.216.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	30 Unit	165.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	34.660.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	3 Unit	135.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	115.350.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	50 Unit	182.500.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase OPD yang memenuhi Standar Layanan Informasi Publik	84 %	2.836.000.000				84 %	3.743.250.000	
	2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi dan kebijakan Pemerintah Daerah	100 %	2.836.000.000		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	3.743.250.000	
	2	16	02	2.01	0014	Relasi Media									
							Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	12 Laporan	1.000.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	12 Laporan	1.650.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	02	2.01	0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat									
							Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	4 Komunitas	200.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	5 Komunitas	250.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	02	2.01	0017	Pelayanan Informasi Publik									
							Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	200 Permohonan	150.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	200 Permohonan	200.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	16	02	2.01	0018	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik									
							Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	100 Persentase	25.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100 Persentase	75.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	02	2.01	0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik									
							Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	12 Rekomendasi	10.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	12 Rekomendasi	25.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	02	2.01	0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik									
							Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	1 Media	1.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	4 Media	1.500.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	02	2.01	0023	Penyusunan Konten									
							Jumlah Konten Informasi Publik	120 Konten	1.400.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	125000 Konten	1.441.750.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	02	2.01	0024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik									
							Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	30 Orang	50.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	30 Orang	100.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3	2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100 %	14.502.890.891				100 %	16.028.620.138	
	2	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase OPD pengguna domain.id	100 %	197.550.000		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	197.550.000	
	2	16	03	2.01	0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa									

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	1 Dokumen	197.550.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi		197.550.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	03	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah daerah	100 %	14.305.340.891		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	15.831.070.138	
	2	16	03	2.02	0015	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda									
							Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	2 Laporan	97.687.078	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi		73.700.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	03	2.02	0020	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah									
							Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	2 Aplikasi	364.696.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi		370.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	03	2.02	0021	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah									
							Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	1 Aplikasi	335.400.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi		787.370.138	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	03	2.02	0023	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas									
							Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas	34 unit	890.697.193	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi		850.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	03	2.02	0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota									
							Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	34 Perangkat Daerah	896.180.620	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi		1.250.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	16	03	2.02	0030	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE									
							Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	34 Perangkat Daerah	11.720.680.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi		12.500.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			5.454.980.916					5.750.150.201	
1	2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84 Skor	5.454.980.916				84 Skor	5.750.150.201	
	2	18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100 Persen	14.410.000		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100Persen	9.000.000	
	2	18	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	14.410.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	6 Dokumen	9.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100 Persen	4.222.500.840		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100Persen	4.321.523.961	
	2	18	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/bulan	4.222.500.840	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	24 Orang/bulan	4.321.523.961	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100 Persen	245.213.819		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100Persen	274.233.794	
	2	18	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	245.213.819	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	50 Laporan	274.233.794	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	18	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	52.498.560		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100Persen	150.000.000	
	2	18	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	52.498.560	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	1 Unit	150.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	769.259.192		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100Persen	796.111.161	
	2	18	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Laporan	769.259.192	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	38 Laporan	796.111.161	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	100 Persen	151.098.505		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100Persen	199.281.285	
	2	18	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit	68.599.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	20 Unit	107.558.246	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	29.280.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	1 Unit	32.281.200	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	18	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	53.219.505	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	5 Unit	59.441.839	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			125.000.000					125.000.000	
4	2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	1 dokumen	125.000.000				1 dokumen	125.000.000	
	2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	1 Survey	125.000.000		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	1Survey	125.000.000	
	2	20	02	2.01	0008	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional									
							Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	100 Persentase	55.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100 Persentase	55.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	20	02	2.01	0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia									
							Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	2 Dokumen	50.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	2 Dokumen	50.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	20	02	2.01	0011	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar									
							Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	2 Dokumen	20.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	2 Dokumen	20.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			190.000.000					245.000.000	
5	2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Presentase informasi Daerah yang wajib diamankan dengan persandian	100 %	190.000.000				100 %	245.000.000	
	2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang menggunakan layanan persandian untuk pengamanan informasi	100 %	190.000.000		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	245.000.000	
	2	21	02	2.01	0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik									
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	4 Laporan	40.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	4 Laporan	45.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	21	02	2.01	0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	34 Perangkat Daerah	150.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	34 Perangkat Daerah	200.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			680.147.305					699.999.919	
4	2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjwaban nasional	90 Skor	553.641.250				90 Skor	570.000.930	
	2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Arsip Dinamis yang Telah Dibuatkan Daftar Arsip	100 %	315.639.770		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	279.999.945	
	2	24	02	2.01	0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis									
							Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	60000 Berkas	315.639.770	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	60000 Berkas	279.999.945	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	02	2.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Arsip Statis yang Telah Dibuatkan Sarana Temu Balik Arsip	100 %	207.999.980		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	239.999.985	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	24	02	2.02	0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis									
							Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	1500 Arsip	207.999.980	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	1500 Arsip	239.999.985	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	02	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN Melalui JIKN	3 %	30.001.500		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	3%	50.001.000	
	2	24	02	2.03	0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN									
							Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	25 Pengguna	30.001.500	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	30 Pengguna	50.001.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
5	2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat keberadaan dan Keutuhan Arsip Sebagai Bahan Pertanggungjawaban Setiap Aspek Kehidupan Berbangsa dan Bernegara untuk Kepentingan Negara, Pemerintah, Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Rakyat	8,8 Skor	126.506.055				8,8 Skor	129.998.989	
	2	24	03	2.01		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Persentase Tingkat Kesesuaian Kegiatan Pemusnahan Arsip dengan NSPK	100 %	126.506.055		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	129.998.989	
	2	24	03	2.01	0003	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun									
							Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	700 Berkas	63.605.136	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	700 Berkas	64.998.998	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	03	2.01	0004	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun									
							Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	1000 Arsip	62.900.919	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	1000 Arsip	64.999.991	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			7.467.521.953					9.050.000.000	
6	3	26	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82,6 Nilai	7.467.521.953				82,6 Nilai	9.050.000.000	
	3	26	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi implementasi sakip perangkat daerah Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	82,60 skor 100 %	19.756.000		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	30.000.000	
	3	26	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	19.756.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	6 Laporan	30.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	3	26	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100 %	5.255.053.953		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	6.000.000.000	
	3	26	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	5.255.053.953	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	25 Orang/bulan	6.000.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	3	26	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	94.500.000		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	100.000.000	
	3	26	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	94.500.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	1 Paket	100.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	3	26	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100 %	200.260.000		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	250.000.000	
	3	26	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	200.260.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	12 Laporan	250.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	3	26	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan pemerintahan daerah	100 %	163.376.000		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	220.000.000	
	3	26	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel									
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	106.181.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	3 Unit	100.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	3	26	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	57.195.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi		120.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	3	26	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	100 %	1.502.016.000		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	2.100.000.000	
	3	26	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.502.016.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	1 Laporan	2.100.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	3	26	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	100 %	232.560.000		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	350.000.000	
	3	26	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	80.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi		100.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	3	26	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	102.560.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	1 Unit	175.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	3	26	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	25 Unit	75.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			10.393.451.201					11.560.460.400	
1	3	30	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,36 Nilai	10.393.451.201				84,36 Nilai	11.560.460.400	
	3	30	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100 %	6.710.000		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	10.000.000	
	3	30	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6.710.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	6 Dokumen	10.000.000	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100` %`	8.917.000.233		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%`	9.010.000.000	
	3	30	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	67 Orang/bulan	8.917.000.233	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	70 Orang/bulan	9.010.000.000	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase perjanjian kinerja ASN yang tercapai	100 %	65.227.000		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	125.460.400	
	3	30	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	65.227.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	1 Paket	125.460.400	DINAS PERDAGANGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3	30	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100 %	243.167.895		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	380.000.000	
	3	30	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	243.167.895	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	12 Laporan	380.000.000	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan pengadaan barang milik daerah	100 %	60.321.800		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	840.000.000	
	3	30	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	38.288.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	2 Unit	750.000.000	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	22.033.800	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	4 Unit	90.000.000	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	100 %	706.780.073		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	850.000.000	
	3	30	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	706.780.073	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	12 Laporan	850.000.000	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	100 %	394.244.200		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	345.000.000	
	3	30	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	45 Unit	284.010.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	44 Unit	230.000.000	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	50.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	3 Unit	50.000.000	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	122 Unit	60.234.200	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	122 Unit	65.000.000	DINAS PERDAGANGAN
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			90.042.294.282					93.367.213.185	
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH			49.772.821.370					50.789.946.678	
1	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85 Nilai	1.586.791.023				85 Nilai	1.601.672.592	
	4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100 %	8.500.000		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	9.000.000	
	4	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	8.500.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	54 Laporan	9.000.000	BAGIAN PEMERINTAHAN
	4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan	100 %	898.410.000		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	898.410.000	
	4	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	898.410.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	187 Orang/bulan	898.410.000	BAGIAN PEMERINTAHAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Umum	100 %	176.881.023		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	200.000.000	
	4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18 Laporan	176.881.023	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	102 Laporan	200.000.000	BAGIAN PEMERINTAHAN
	4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	100 %	250.000.000		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	250.000.000	
	4	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	250.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	12 Laporan	250.000.000	BAGIAN PEMERINTAHAN
	4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan	100 %	253.000.000		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	55.000.000	
	4	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	33.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	149 Unit	30.000.000	BAGIAN PEMERINTAHAN
	4	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	210.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	6 Unit	15.000.000	BAGIAN PEMERINTAHAN
	4	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	17 Unit	10.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	274 Unit	10.000.000	BAGIAN PEMERINTAHAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Penyediaan Data Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100 %	1.940.693.939				100 %	2.060.000.000	
	4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase laporan administrasi pemerintahan yang disusun tepat waktu	100 %	1.595.693.939		memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	-	1.715.000.000	
	4	01	02	2.01	0001	Penataan Administrasi Pemerintahan									
							Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	4 Dokumen	1.075.693.939	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi		1.165.000.000	BAGIAN PEMERINTAHAN
	4	01	02	2.01	0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 Dokumen	10.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi		25.000.000	BAGIAN PEMERINTAHAN
	4	01	02	2.01	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah									
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	7 Dokumen	510.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi		525.000.000	BAGIAN PEMERINTAHAN
	4	01	02	2.04		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Fasilitasi Kerjasama daerah	100 %	345.000.000		memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	-	345.000.000	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4	01	02	2.04	0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri									
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	5 Dokumen	345.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi		345.000.000	BAGIAN PEMERINTAHAN
3	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85 nilai	3.078.135.535				-	3.207.593.092	
	4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100%	15.000.000		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	15.000.000	
	4	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	15.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	54 Laporan	15.000.000	BAGIAN ORGANISASI
	4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan	100 %	920.135.535		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	930.593.092	
	4	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	9 Orang/bulan	920.135.535	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	187 Orang/bulan	930.593.092	BAGIAN ORGANISASI
	4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Umum	100 %	180.000.000		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	190.000.000	
	4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	180.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	102 Laporan	190.000.000	BAGIAN ORGANISASI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan barang milik daerah urusan pemerintahan daerah	100 %	10.000.000		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	15.000.000	
	4	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	10.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	27 Unit	15.000.000	BAGIAN ORGANISASI
	4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	100 %	275.200.000		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	279.200.000	
	4	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	275.200.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	12 Laporan	279.200.000	BAGIAN ORGANISASI
	4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan	100 %	185.000.000		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	225.000.000	
	4	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	27.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	149 Unit	27.000.000	BAGIAN ORGANISASI
	4	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	145.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	6 Unit	185.000.000	BAGIAN ORGANISASI
	4	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	21 Unit	13.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi		13.000.000	BAGIAN ORGANISASI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4	01	01	2.13		Penataan Organisasi	Tingkat Kematangan Organisasi	46.2 nilai	1.492.800.000		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	46.3nilai 46.3nilai 46.3nilai 46.3nilai	1.552.800.000	
	4	01	01	2.13	0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan									
							Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2 Dokumen	370.800.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	2 Dokumen	390.800.000	BAGIAN ORGANISASI
	4	01	01	2.13	0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana									
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 Laporan	722.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	2 Laporan	742.000.000	BAGIAN ORGANISASI
	4	01	01	2.13	0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi									
							Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen	400.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	2 Dokumen	420.000.000	BAGIAN ORGANISASI
4	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85 Skor	2.187.129.958				85 Skor	1.940.759.062	
	4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian, dan evaluasi Perangkat Daerah	100 %	1.000.000		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	1.000.000	
	4	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	1.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	54 Laporan	1.000.000	BAGIAN HUKUM
	4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan	100 %	1.032.000.000		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	1.104.000.000	
	4	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	10 Orang/bulan	1.032.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	187 Orang/bulan	1.104.000.000	BAGIAN HUKUM

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Umum	100 %	300.000.000		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	300.000.000	
	4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	300.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	102 Laporan	300.000.000	BAGIAN HUKUM
	4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	224.979.958		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	29.259.062	
	4	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	17 Unit	184.673.646	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	1 Unit	15.000.000	BAGIAN HUKUM
	4	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7 Unit	40.306.312	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	27 Unit	14.259.062	BAGIAN HUKUM
	4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan Pemerintahan Daerah	100 %	425.000.000		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	425.000.000	
	4	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	250 Laporan	425.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	12 Laporan	425.000.000	BAGIAN HUKUM
	4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan	100 %	204.150.000		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	81.500.000	
	4	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	38.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	149 Unit	38.000.000	BAGIAN HUKUM
	4	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	126.150.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	6 Unit	3.500.000	BAGIAN HUKUM
	4	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	32 Unit	40.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	274 Unit	40.000.000	BAGIAN HUKUM
5	4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Penyediaan Data Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100 %	1.661.956.448				100 %	2.052.200.000	
	4	01	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Produk Hukum yang disusun	100 %	1.661.956.448		memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	-	2.052.200.000	
	4	01	02	2.03	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah									
							Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	24 Dokumen	755.493.400	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi		665.000.000	BAGIAN HUKUM
	4	01	02	2.03	0002	Fasilitasi Bantuan Hukum									
							Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	25 Kasus	450.237.609	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi		647.500.000	BAGIAN HUKUM

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4	01	02	2.03	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum									
							Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	400 Dokumen	456.225.439	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi		739.700.000	BAGIAN HUKUM
6	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85 Nilai	2.566.140.435				85 Nilai	2.664.697.000	
	4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100 %	1.500.000		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	16.000.000	
	4	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	1.500.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	54 Laporan	16.000.000	BAGIAN PENGADAAN BARANG / JASA DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan	100 %	1.780.000.000		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	1.800.000.000	
	4	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/bulan	1.780.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	187 Orang/bulan	1.800.000.000	BAGIAN PENGADAAN BARANG / JASA DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Umum	100 %	200.000.000		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	200.000.000	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	200.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	102 Laporan	200.000.000	BAGIAN PENGADAAN BARANG / JASA DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan barang milik daerah urusan pemerintahan daerah	100 %	200.163.650		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	150.000.000	
	4	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	200.163.650	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	27 Unit	150.000.000	BAGIAN PENGADAAN BARANG / JASA DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	100 %	300.000.000		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	320.000.000	
	4	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	300.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	12 Laporan	320.000.000	BAGIAN PENGADAAN BARANG / JASA DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan	100 %	84.476.785		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	178.697.000	
	4	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	30.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	149 Unit	35.000.000	BAGIAN PENGADAAN BARANG / JASA DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	29.476.785	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	6 Unit	115.697.000	BAGIAN PENGADAAN BARANG / JASA DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	40 Unit	25.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	274 Unit	28.000.000	BAGIAN PENGADAAN BARANG / JASA DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
7	4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Penyediaan Data Bidang Perekonomian dan Pembangunan	100 %	456.100.000				100 %	492.000.992	
	4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Perangkat Daerah yang Capaian Realisasi Fisik Keuangannya >79% dari Target	100 Persen	116.100.000		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100Persen	140.000.992	
	4	01	03	2.02	0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan									
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1 Dokumen	26.100.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	1 Dokumen	35.000.992	BAGIAN PENGADAAN BARANG / JASA DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4	01	03	2.02	0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan									
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12 Laporan	90.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	12 Laporan	105.000.000	BAGIAN PENGADAAN BARANG / JASA DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Realisasi Paket Pengadaan Barang/Jasa >79% dari Target	100 Persen	340.000.000		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100Persen	352.000.000	
	4	01	03	2.03	0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	12 Dokumen	190.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	12 Dokumen	182.000.000	BAGIAN PENGADAAN BARANG / JASA DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4	01	03	2.03	0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik									
							Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	12 Dokumen	150.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	12 Dokumen	170.000.000	BAGIAN PENGADAAN BARANG / JASA DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
8	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85 Nilai	2.191.404.810				85 Nilai	2.350.692.632	
	4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100 %	15.000.000		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	22.000.000	
	4	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	15.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	54 Laporan	22.000.000	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan	100 %	1.081.294.810		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	1.081.294.810	
	4	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 Orang/bulan	1.081.294.810	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	187 Orang/bulan	1.081.294.810	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Umum	100 %	200.000.000		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	250.000.000	
	4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	200.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	102 Laporan	250.000.000	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan barang milik daerah urusan pemerintahan daerah	100 %	177.000.000		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	70.000.000	
	4	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	2.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	7 Unit	35.000.000	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	175.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	27 Unit	35.000.000	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	100 %	467.110.000		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	613.219.636	
	4	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	467.110.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	12 Laporan	613.219.636	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan	100 %	251.000.000		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	314.178.186	
	4	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	31.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	149 Unit	77.374.586	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	200.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	6 Unit	200.000.000	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	31 Unit	20.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	274 Unit	36.803.600	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
9	4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Penyediaan Data Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100 %	2.154.187.108				100 %	3.000.000.000	
	4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Prosentase pelaksanaan kebijakan rakyat	100 %	2.154.187.108		memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	-	3.000.000.000	
	4	01	02	2.02	0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual									
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	15 Dokumen	2.154.187.108	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi		3.000.000.000	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
10	4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Penyediaan Data Bidang Perekonomian dan Pembangunan	100 %	977.210.500				100 %	835.984.960	
	4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Indeks Kepuasan Masyarakat di Bidang perekonomian dan pembangunan	87 skor	577.210.500		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	-	435.984.960	
	4	01	03	2.01	0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian									
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	2 Laporan	300.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi		235.984.960	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4	01	03	2.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD									
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	3 Dokumen	277.210.500	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi		200.000.000	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4	01	03	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Prosentase kegiatan yang telah dilaksanakan	100 %	400.000.000		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	-	400.000.000	
	4	01	03	2.04	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan									
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	2 Dokumen	400.000.000	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi		400.000.000	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
11	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85 Nilai	30.973.071.614				85 Nilai	30.584.346.348	
	4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100 %	5.000.000		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	5.000.000	
	4	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	5.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	54 Laporan	5.000.000	BAGIAN UMUM
	4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan	100 %	15.298.038.714		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	13.850.000.000	
	4	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	125 Orang/bulan	15.298.038.714	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	187 Orang/bulan	13.850.000.000	BAGIAN UMUM
	4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase perjanjian kinerja ASN yang tercapai	100 %	2.488.595.000		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	-	3.000.000.000	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	2.488.595.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi		3.000.000.000	BAGIAN UMUM
	4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100 %	1.350.000.000		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	1.375.000.000	
	4	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	100.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi		75.000.000	BAGIAN UMUM
	4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1.250.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	102 Laporan	1.300.000.000	BAGIAN UMUM
	4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.350.423.625		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	875.000.000	
	4	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	904.700.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	7 Unit	125.000.000	BAGIAN UMUM
	4	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	279.073.625	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	1 Unit	400.000.000	BAGIAN UMUM
	4	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	25 Unit	166.650.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	27 Unit	350.000.000	BAGIAN UMUM

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	3.970.514.275		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	5.019.346.348	
	4	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3.970.514.275	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	12 Laporan	5.019.346.348	BAGIAN UMUM
	4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	100 %	1.868.000.000		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	1.850.000.000	
	4	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	110 Unit	1.100.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	149 Unit	1.100.000.000	BAGIAN UMUM
	4	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	500.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	6 Unit	500.000.000	BAGIAN UMUM
	4	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	125 Unit	268.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	274 Unit	250.000.000	BAGIAN UMUM
	4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	persentase pemenuhan kebutuhan gaji kepala daerah dan wakil kepala daerah	100 %	1.000.000.000		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	-	1.000.000.000	
	4	01	01	2.11	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	320.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi		400.000.000	BAGIAN UMUM

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4	01	01	2.11	0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah									
							Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	680.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi		600.000.000	BAGIAN UMUM
	4	01	01	2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	persentase rumah tangga pimpinan dan sekretariat daerah dalam kondisi baik	100 %	1.667.500.000		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	-	1.625.000.000	
	4	01	01	2.12	0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah									
							Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	900.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi		850.000.000	BAGIAN UMUM
	4	01	01	2.12	0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah									
							Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	417.500.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi		425.000.000	BAGIAN UMUM
	4	01	01	2.12	0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah									
							Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	1 Paket	350.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi		350.000.000	BAGIAN UMUM
	4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	persentase fasilitasi keprotokolan pimpinan	100 %	1.975.000.000		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	-	1.985.000.000	
	4	01	01	2.14	0001	Fasilitasi Keprotokolan									
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 Laporan	1.975.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi		1.985.000.000	BAGIAN UMUM

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4	02				SEKRETARIAT DPRD			40.269.472.912					42.577.266.507	
1	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82 Nilai	29.526.842.794				82 Nilai	30.299.273.389	
	4	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perangkat Daerah	100 %	59.731.577		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	59.731.577	
	4	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	59.731.577	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	6 Dokumen	59.731.577	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan	100 %	3.386.604.920		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	3.366.682.326	
	4	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/bulan	3.386.604.920	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	18 Orang/bulan	3.366.682.326	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persetase Administrasi Kepegawaian sesuai Ketentuan yang Terpenuhi	100 %	164.818.894		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	189.818.894	
	4	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	64.818.894	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	1 Paket	64.818.894	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan									
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	17 Orang	100.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	18 Orang	125.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum	100 %	1.341.309.329		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	1.414.047.924	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	34 Laporan	1.341.309.329	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	44 Laporan	1.414.047.924	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi dengan Baik	100 %	8.241.750		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	8.241.750	
	4	02	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	8.241.750	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	10 Unit	8.241.750	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	2.514.226.687		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	2.655.656.282	
	4	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24 Laporan	2.514.226.687	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	24 Laporan	2.655.656.282	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana Prasarana Kantor yang Dapat Digunakan	100 %	1.001.078.460		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	1.021.078.460	
	4	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	26 Unit	298.841.290	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	26 Unit	308.841.290	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	180 Unit	238.673.550	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	180 Unit	238.673.550	SEKRETARIAT DPRD

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	463.563.620	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	6 Unit	473.563.620	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Layanan Terhadap Hak Keuangan DPRD	100 %	15.979.367.238		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	16.262.552.237	
	4	02	01	2.15	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD									
							Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	30 Orang/Bulan	15.620.388.218	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	30 Orang/Bulan	15.903.573.217	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.15	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD									
							Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	3 Paket	253.979.020	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	3 Paket	253.979.020	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.15	0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD									
							Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	30 Orang	105.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	30 Orang	105.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi DPRD	100 %	5.071.463.939		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	5.321.463.939	
	4	02	01	2.16	0002	Fasilitasi Fraksi DPRD									
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	8 Laporan	37.957.150	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	8 Laporan	37.957.150	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.16	0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD									
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	16 Laporan	5.033.506.789	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	16 Laporan	5.283.506.789	SEKRETARIAT DPRD

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Fasilitasi Trifungsi DPRD yang sesuai Standart Pelayanan	100 %	10.742.630.118				100 %	12.277.993.118	
	4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Tercapaimya Fungsi Pembentukan Perda DPRD	100 %	3.219.737.000		memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	3.819.600.000	
	4	02	02	2.01	0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah									
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	9 Dokumen	2.029.737.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	15 Dokumen	2.629.600.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.01	0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan									
							Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	4 Dokumen	1.190.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	3 Dokumen	1.190.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Tercapainya Fungsi Penganggaran DPRD	100 %	1.346.000.000		memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	1.451.500.000	
	4	02	02	2.02	0003	Pembahasan APBD									
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	5 Dokumen	1.346.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	5 Dokumen	1.451.500.000	SEKRETARIAT DPRD

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Penyelenggaraan Program-Program Pemerintah Daerah	100 %	785.088.422		memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	1.192.040.647	
	4	02	02	2.03	0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dokumen	373.933.900	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	1 Dokumen	573.933.900	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.03	0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	1 Dokumen	411.154.522	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	1 Dokumen	618.106.747	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Peningkatan SDM Anggota DPRD	100 %	4.541.197.471		memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	4.541.197.471	
	4	02	02	2.04	0002	Pendalaman Tugas DPRD									
							Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 Dokumen	1.869.304.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	6 Dokumen	2.228.340.000	SEKRETARIAT DPRD

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4	02	02	2.04	0007	Penyusunan Program Kerja DPRD									
							Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	2 Dokumen	1.387.857.225	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	2 Dokumen	1.005.070.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD									
							Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	15 Dokumen	1.284.036.246	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	15 Dokumen	1.307.787.471	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Jumlah Pokir yang Masuk RKPD	100 %	850.607.225		memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	1.273.655.000	
	4	02	02	2.05	0003	Pelaksanaan Reses									
							Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	2 Dokumen	850.607.225	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	90 Dokumen	1.273.655.000	SEKRETARIAT DPRD
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			93.671.214.777					99.319.438.069	
	5	01				PERENCANAAN			9.383.055.484					15.354.431.200	
1	5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	89 Nilai	7.381.702.859				89 Nilai	7.629.365.000	
	5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja dan anggaran yang sesuai dengan ketentuan	100 %	149.316.160		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	138.476.000	
	5	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	56.013.060	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	6 Dokumen	103.290.400	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	44.603.100	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	4 Laporan	15.000.000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	48.700.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	2 Laporan	20.185.600	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah yang sesuai dengan ketentuan	100 %	5.528.896.785		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	5.566.950.000	
	5	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/bulan	5.512.396.785	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100 Orang/bulan	5.550.950.000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	16.500.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	12 Laporan	16.000.000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan adminsitrasi pegawai yang terpenuhi	100 %	72.550.800		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	175.005.000	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	35 Orang	63.800.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	2 Orang	67.995.000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan									
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	35 Orang	8.750.800	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100 Orang	107.010.000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan administrasi umum yang terpenuhi sesuai ketentuan	100%	447.153.000		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	455.934.000	
	5	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	447.153.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	1 Laporan	455.934.000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kebutuhan sarana dan prasarana kantor terpenuhi	100 %	74.667.480		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	110.000.000	
	5	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit	74.667.480	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100 Unit	110.000.000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase pemenuhan kebutuhan jasa umum kantor	100%	848.582.204		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	850.000.000	
	5	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	848.582.204	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100 Laporan	850.000.000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik/siap digunakan	100%	260.536.430		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	333.000.000	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	33 Unit	112.310.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100 Unit	108.000.000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	75.235.865	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100 Unit	150.000.000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	72.990.565	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi		75.000.000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
2	5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase dokumen perencanaan tingkat kota yang tersusun	100 %	1.249.059.725					2.277.000.000	
	5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kota	3 Dokumen	1.045.835.625		memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	4Dokumen	2.057.000.000	
	5	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik									
							Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	145.774.500	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	1 Berita Acara	152.000.000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	02	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah									

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	156.715.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	1 Berita Acara	155.000.000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota									
							Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	324.712.100	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	1 Berita Acara	250.000.000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	02	2.01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 Dokumen	418.634.025	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	1 Dokumen	1.500.000.000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Laporan Evaluasi Pembangunan Pemda Kota Madiun	4 dokumen	203.224.100		memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	4dokumen	220.000.000	
	5	01	02	2.03	0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota									
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan	178.659.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	2 Laporan	120.000.000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5	01	02	2.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah									
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan	24.565.100	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	4 Laporan	100.000.000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
3	5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Rencana Aksi Daerah (Tematik) yang sinkron dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD)	100 %	752.292.900					4.798.066.200	
	5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	JUmlah dokumen hasil verivikasi	1 dokumen	535.992.900		memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	1dokumen	788.066.200	
	5	01	03	2.01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	72.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100 Dokumen	115.000.000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan									
							Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	110.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	1 Laporan	115.780.000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5	01	03	2.01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	347.742.900	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100 Dokumen	550.486.200	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	03	2.01	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia									
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	2 Laporan	6.250.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	1 Laporan	6.800.000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah dokumen hasil verifikasi dokumen perencanaan bidang perekonomian dan SDA	1 dokumen	216.300.000		memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	1dokumen	4.010.000.000	
	5	01	03	2.02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	103.300.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	1 Dokumen	4.000.000.000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5	01	03	2.02	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian									
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	5 Laporan	113.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	1 Laporan	10.000.000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	02				KEUANGAN			57.716.498.976					57.632.699.329	
1	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,2 Nilai	51.273.928.329				84,2 Nilai	51.273.928.329	
	5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100 %	2.000.000		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	2.000.000	
	5	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	2.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	8 Laporan	2.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100 %	34.360.000.497		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	36.510.000.497	
	5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/bulan	34.360.000.497	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	32 Orang/bulan	36.510.000.497	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum	100 %	600.000.000		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	450.000.000	
	5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	89 Laporan	600.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	89 Laporan	450.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan BMD Urusan Pemerintah Daerah	100 %	214.000.000		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	214.000.000	
	5	02	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	13 Unit	214.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	13 Unit	214.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan Pemerintahan Daerah daerah	100 %	15.804.927.832		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	13.804.927.832	
	5	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	15.804.927.832	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	12 Laporan	13.804.927.832	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	100 %	293.000.000		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	293.000.000	
	5	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	36 Unit	110.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	36 Unit	110.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	75.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	1 Unit	75.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	108.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	8 Unit	108.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2	5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Realisasi kinerja keuangan yang memenuhi target	100 %	4.476.622.647				100 %	4.392.823.000	
	5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Pengesahan Perda APBD tepat waktu	100 %	1.126.814.000		memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	1.175.014.000	
	5	02	02	2.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS									
							Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	83.421.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	2 Dokumen	85.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS									
							Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	56.819.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	2 Dokumen	56.819.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5	02	02	2.01	0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD									
							Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	34 Dokumen	16.876.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	28 Dokumen	16.876.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD									
							Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	34 Dokumen	23.640.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	28 Dokumen	23.640.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD									
							Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	113.677.400	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	2 Dokumen	154.679.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD									
							Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	195.680.600	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	2 Dokumen	198.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran									

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	4 Dokumen	636.700.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	3 Dokumen	640.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Pengelolaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundangan	100 %	55.050.000		memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	55.050.000	
	5	02	02	2.02	0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah									
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	47 Dokumen	49.950.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	47 Dokumen	49.950.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.02	0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait									
							Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	3 Dokumen	5.100.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	3 Dokumen	5.100.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Permintaan Laporan Keuangan yang terfasilitasi	100 %	1.162.759.000		memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	1.162.759.000	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5	02	02	2.03	0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran									
							Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	2 Laporan	140.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	2 Laporan	140.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD									
							Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	2 Dokumen	66.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	2 Dokumen	66.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah									
							Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	4 Dokumen	90.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	4 Dokumen	90.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	345 Orang	866.759.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	345 Orang	866.759.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	100 %	2.131.999.647		memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	2.000.000.000	
	5	02	02	2.04	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak									
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12 Laporan	2.131.999.647	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	12 Laporan	2.000.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
3	5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang tertib dan optimal	100 %	1.965.948.000				100 %	1.965.948.000	
	5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan pengelolaan BMD	22 Dokumen	1.965.948.000		memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	22Dokumen	1.965.948.000	
	5	02	03	2.01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah									
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2 Laporan	123.142.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	2 Laporan	123.142.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah									
							Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	2 Laporan	1.803.206.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	2 Laporan	1.803.206.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah									

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	18 Laporan	39.600.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	18 Laporan	39.600.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02				KEUANGAN			12.851.205.520					12.851.205.520	
1	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,5 Nilai	11.557.203.467				81,5 Nilai	11.557.203.467	
	5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	2.000.000		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	-	2.000.000	
	5	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	2.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	8 Laporan	2.000.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100 %	10.675.173.675		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	-	10.675.173.675	
	5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	10.675.173.675	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	28 Orang/bulan	10.675.173.675	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan pakaian khusus hari tertentu	100 %	80.000.000		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	-	80.000.000	
	5	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	40 Paket	30.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	36 Paket	30.000.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5	02	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan									
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	40 Orang	50.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	36 Orang	50.000.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan admistrasi umum	100 %	100.000.000		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	-	100.000.000	
	5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 Laporan	100.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	25 Laporan	100.000.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	100 %	25.080.000		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	-	25.080.000	
	5	02	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	12 Unit	80.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	12 Unit	80.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	25.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi		25.000.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang	100%	524.949.792		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	-	524.949.792	
	5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	524.949.792	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi		524.949.792	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	150.000.000		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	-	150.000.000	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	30 Unit	50.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	32 Unit	50.000.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	50.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	1 Unit	50.000.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	50.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	1 Unit	50.000.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
2	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Nilai Sakip Perangkat Daerah	81,5 %	1.294.002.053				81,5 %	1.294.002.053	
	5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	100 %	1.294.002.053		memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	-	1.294.002.053	
	5	02	04	2.01	0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah									
							Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen	25.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	2 Dokumen	25.000.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5	02	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah									
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	450 Laporan	419.002.053	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	450 Laporan	419.002.053	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah									
							Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan	200.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	1 Laporan	200.000.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah									
							Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Laporan	200.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	1 Laporan	200.000.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)									
							Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	2 Obyek Pajak	100.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	2 Obyek Pajak	100.000.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5	02	04	2.01	0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah									
							Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	1 Dokumen	50.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	1 Dokumen	50.000.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah									
							Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	300 Layanan	30.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	300 Layanan	30.000.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah									
							Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	1 Dokumen	150.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	1 Dokumen	150.000.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0011	Penagihan Pajak Daerah									
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1 Dokumen	70.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	1 Dokumen	70.000.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah									
							Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1 Dokumen	10.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	1 Dokumen	10.000.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5	02	04	2.01	0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah									
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	40.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	4 Laporan	40.000.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	03				KEPEGAWAIAN			9.120.332.220					9.121.102.020	
1	5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	86 Nilai	7.257.773.820				86 Nilai	7.327.709.177	
	5	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi	100 %	9.400.000		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	9.400.000	
	5	03	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	9.400.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	5 Laporan	9.400.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100 %	6.275.394.183		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	6.224.000.000	
	5	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan	6.275.394.183	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	45 Orang/bulan	6.224.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100 %	340.000.000		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	338.000.000	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85 Laporan	340.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	85 Laporan	338.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan BMD	100 %	50.000.000		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	111.309.177	
	5	03	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	50.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	5 Unit	111.309.177	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang	100 %	317.979.637		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	440.000.000	
	5	03	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	317.979.637	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	12 Laporan	440.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	265.000.000		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	205.000.000	
	5	03	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18 Unit	35.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	18 Unit	20.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	180.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	2 Unit	150.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	50.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	38 Unit	35.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
2	5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Terselesaikan	100 %	1.862.558.400				100 %	1.793.392.843	
	5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Realisasi Pengadaan, Pembehentian dan Informasi	100 %	1.128.590.200		memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	1.194.360.000	
	5	03	02	2.01	0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN									
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	1 Laporan	934.230.200	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	1 Laporan	1.000.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.01	0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian									
							Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	225 Dokumen	89.360.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	225 Dokumen	89.360.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5	03	02	2.01	0011	Pengelolaan Data Kepegawaian									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	3036 Dokumen	105.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	3036 Dokumen	105.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Penyelesaian Administrasi Mutasi dan Promosi	100 %	345.746.200		memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	245.746.200	
	5	03	02	2.02	0001	Pengelolaan Mutasi ASN									
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	702 Dokumen	275.116.200	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	702 Dokumen	175.116.200	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.02	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN									
							Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	455 Dokumen	70.630.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	455 Dokumen	70.630.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi	100 %	100.000.000		memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	75.314.643	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5	03	02	2.03	0002	Pengelolaan Assessment Center									
							Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	290 Dokumen	100.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	110 Dokumen	75.314.643	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Realisasi Evalusai Kinerja	100 %	288.222.000		memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	277.972.000	
	5	03	02	2.04	0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur									
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2 Dokumen	20.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	2 Dokumen	20.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.04	0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai									
							Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	200 Orang	22.850.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	200 Orang	22.850.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.04	0007	Pembinaan Disiplin ASN									
							Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	60 Orang	245.372.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	60 Orang	235.122.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			3.022.354.448					3.080.000.000	
3	5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Realisasi Pengembangan SDM	17 %	3.022.354.448				17 %	3.080.000.000	
	5	04	02	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase Realisasi Pengembangan Kompetensi Teknis	100 %	2.117.354.448		memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	2.080.000.000	
	5	04	02	2.01	0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum									
							Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	232 Orang	2.117.354.448	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	290 Orang	2.080.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase Realiasai Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	100 %	905.000.000		memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	1.000.000.000	
	5	04	02	2.02	0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan									
							Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	186 Laporan	905.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	186 Laporan	1.000.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			1.577.768.129					1.280.000.000	
4	5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil kajian/penelitian yang termanfaatkan sesuai isu strategis daerah	100 %	1.577.768.129				100 %	1.280.000.000	
	5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	jumlah dokumen pengembangan dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi	2 Dokumen	1.298.211.629		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	2Dokumen	1.030.000.000	
	5	05	02	2.01	0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum									
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	2 Laporan	1.171.780.829	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	6 Laporan	900.000.000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	05	02	2.01	0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan									
							Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	1 Laporan	126.430.800	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	1 Laporan	130.000.000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah dokumen pengembangan dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi	2 dokumen	279.556.500		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	2dokumen	250.000.000	
	5	05	02	2.04	0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi									
							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	4 Dokumen	279.556.500	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	2 Dokumen	250.000.000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			11.516.899.866					12.400.236.669	
	6	01				INSPEKTORAT DAERAH			11.516.899.866					12.400.236.669	
1	6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85 Nilai	9.612.621.866				85 Nilai	10.162.236.669	
	6	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	85 Nilai	2.000.000		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	85Nilai	2.000.000	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	2.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	10 Laporan	2.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	85 Nilai	7.600.000.000		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	85Nilai	7.700.000.000	
	6	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan	7.600.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	45 Orang/bulan	7.700.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	85 Nilai	745.536.000		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	85Nilai	850.000.000	
	6	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65 Laporan	745.536.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	65 Laporan	850.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	85 Nilai	101.066		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	85Nilai	580.236.669	
	6	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	900	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	10 Unit	300.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	21.200	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	1 Unit	30.236.669	INSPEKTORAT DAERAH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	78.966	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	3 Unit	250.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	85 Nilai	645.860.800		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	85Nilai	750.000.000	
	6	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Laporan	645.860.800	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	8 Laporan	750.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	85 Nilai	619.124.000		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	85Nilai	280.000.000	
	6	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	30 Unit	37.594.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	25 Unit	45.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	551.410.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	1 Unit	200.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25 Unit	30.120.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	25 Unit	35.000.000	INSPEKTORAT DAERAH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Temuan Hasil pengawasan yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi	94 %	846.464.000				94 %	1.118.000.000	
	6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah dokumen hasil pengawasan intern	31 Dokumen	771.064.000		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	31Dokumen	1.038.000.000	
	6	01	02	2.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah									
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	3 Laporan	65.764.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	3 Laporan	110.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	02	2.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah									
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	15 Laporan	483.049.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	15 Laporan	600.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	02	2.01	0003	Reviu Laporan Kinerja									
							Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	4 Laporan	52.981.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	4 Laporan	45.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	02	2.01	0004	Reviu Laporan Keuangan									
							Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	3 Laporan	73.940.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	3 Laporan	150.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	02	2.01	0006	Kerja Sama Pengawasan Internal									
							Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	2 Kesepakatan	70.088.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	2 Kesepakatan	100.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP									
							Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4 Dokumen	25.242.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	4 Dokumen	33.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Prosentase penyelesaian dokumen hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	100 %	75.400.000		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	80.000.000	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6	01	02	2.02	0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah									
							Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	1 Laporan	18.300.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	1 Laporan	20.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	02	2.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu									
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	1 Laporan	57.100.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	1 Laporan	60.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
3	6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Dokumen Kebijakan dan Sisdur Pengawasan serta Asistensi yang Terpenuhi	100 %	1.057.814.000				100 %	1.120.000.000	
	6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Dokumen Kebijakan dan Sisdur Pengawasan serta asistensi yang Terpenuhi	100 %	84.572.000		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	110.000.000	
	6	01	03	2.01	0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan									
							Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	2 Rekomendasi	48.461.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	2 Rekomendasi	60.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	03	2.01	0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan									
							Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	2 Rekomendasi	36.111.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	2 Rekomendasi	50.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	Jumlah dokumen hasil pendampingan dan asistensi	3 Dokumen	973.242.000		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	3Dokumen	1.010.000.000	
	6	01	03	2.02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi									
							Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	4 OPD	446.474.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	5 perangkat daerah	460.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	03	2.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi									

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	3 kegiatan	526.768.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	2 Kegiatan	550.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			59.775.479.117					62.418.182.819	
	7	01				KECAMATAN			18.583.896.013					18.736.280.402	
1	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	81 nilai	14.826.598.000				82,77 nilai	13.399.598.000	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100 %	4.000.000		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	4.000.000	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18 Dokumen	4.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	18 Dokumen	4.000.000	KECAMATAN KARTOHARJO
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100 %	11.605.840.495		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	11.532.000.000	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72 Orang/bulan	11.603.840.495	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	70 Orang/bulan	11.530.000.000	KECAMATAN KARTOHARJO
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 Laporan	2.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	13 Laporan	2.000.000	KECAMATAN KARTOHARJO
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase perjanjian kinerja ASN yang tercapai	100 %	30.000.000		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	30.000.000	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan									
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	150 Orang	30.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	70 Orang	30.000.000	KECAMATAN KARTOHARJO
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Perangkat Daerah	88,67 indeks	197.768.000		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	87,82indeks	197.768.000	
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	197.768.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	12 Laporan	197.768.000	KECAMATAN KARTOHARJO
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase barang milik daerah yang layak digunakan	100 %	352.126.690		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	500.000.000	
	7	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 Unit	65.953.190	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	2 Unit	100.000.000	KECAMATAN KARTOHARJO
	7	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	74.173.500	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	1 Unit	200.000.000	KECAMATAN KARTOHARJO
	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	212.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	10 Unit	200.000.000	KECAMATAN KARTOHARJO
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	100 %	2.451.862.815		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	950.830.000	
	7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.451.862.815	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	12 Laporan	950.830.000	KECAMATAN KARTOHARJO
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	100 %	185.000.000		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	185.000.000	
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	60.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	14 Unit	60.000.000	KECAMATAN KARTOHARJO
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	35.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	2 Unit	35.000.000	KECAMATAN KARTOHARJO
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	55.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	1 Unit	55.000.000	KECAMATAN KARTOHARJO
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	60 Unit	35.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	60 Unit	35.000.000	KECAMATAN KARTOHARJO
2	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	87,81 Indeks	57.832.400				88,67 Indeks	55.000.000	
	7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase hasil koordinasi pemeliharaan Sarpras Pelayanan Umum yang ditindaklanjuti	100 %	57.832.400		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	55.000.000	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7	01	02	2.03	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum									
							Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	3 Dokumen	57.832.400	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	3 Dokumen	55.000.000	KECAMATAN KARTOHARJO
4	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase pengkoordinasian ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	100 %	352.553.600				100 %	352.553.600	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase rekomendasi hasil penyelenggaraan ketertiban dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti	100 %	264.203.600		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100% 100%	264.203.600	
	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat									
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	16 Laporan	264.203.600	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	4 Laporan	264.203.600	KECAMATAN KARTOHARJO
	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100 %	88.350.000		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100% 100%	88.350.000	
	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia									
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4 Laporan	88.350.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	4 Laporan	88.350.000	KECAMATAN KARTOHARJO

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	persentase kewenangan yang dijalankan kecamatan (tidak dilaksanakan OPD lain)	100 %	153.655.000				100 %	158.210.000	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase himbauan Kepala Daerah yang ditindaklanjuti	100 %	153.655.000		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	158.210.000	
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia									
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 Orang	66.900.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100 Orang	66.900.000	KECAMATAN KARTOHARJO
	7	01	05	2.01	0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan									
							Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4 Laporan	78.500.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	4 Laporan	78.500.000	KECAMATAN KARTOHARJO
	7	01	05	2.01	0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal									
							Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	2 Dokumen	8.255.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	2 Dokumen	12.810.000	KECAMATAN KARTOHARJO

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	87,81 Indeks	384.317.700				88,67 indeks	605.457.000	
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	100 %	384.317.700		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	605.457.000	
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan									
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	384.317.700	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	12 Laporan	605.457.000	KELURAHAN ORO-ORO OMBO
8	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	87,81 Indeks	298.118.858				88,67 indeks	490.120.959	
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	100 %	298.118.858		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	490.120.959	
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan									
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	298.118.858	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	12 Laporan	490.120.959	KELURAHAN SUKOSARI
10	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	87,81 Indeks	421.688.043				88,67 indeks	585.446.643	
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	100 %	421.688.043		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	585.446.643	
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan									
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	421.688.043	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	12 Laporan	585.446.643	KELURAHAN KLEGEN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	87,81 Indeks	391.498.612				88,67 indeks	555.000.600	
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	100 %	391.498.612		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	555.000.600	
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan									
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	391.498.612	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	12 Laporan	555.000.600	KELURAHAN REJOMULYO
14	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	87,81 Indeks	327.693.900				88,67 indeks	479.575.700	
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	100 %	327.693.900		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	479.575.700	
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan									
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	327.693.900	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	12 Laporan	479.575.700	KELURAHAN PILANGBANGO
16	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	87,81 Indeks	296.178.600				88,67 indeks	439.759.000	
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	100 %	296.178.600		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	439.759.000	
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan									
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	296.178.600	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	12 Laporan	439.759.000	KELURAHAN TAWANGREJO

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	87,81 Indeks	420.077.200				88,67 indeks	570.829.800	
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	100 %	420.077.200		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	570.829.800	
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan									
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	420.077.200	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	12 Laporan	570.829.800	KELURAHAN KANIGORO
20	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	87,81 Indeks	351.843.600				88,67 indeks	553.126.500	
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	100 %	351.843.600		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	553.126.500	
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan									
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	351.843.600	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	12 Laporan	553.126.500	KELURAHAN KARTOHARJO
22	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	87,81 Indeks	301.840.500				88,67 indeks	491.602.600	
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	100 %	301.840.500		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	491.602.600	
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan									
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	301.840.500	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	12 Laporan	491.602.600	KELURAHAN KELUN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7	01				KECAMATAN			21.432.584.681					22.535.992.433	
1	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83,35 Nilai	16.653.342.462				83,40Nilai	15.748.542.486	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100 %	2.810.000		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	3.000.000	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20 Dokumen	2.810.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	20 Dokumen	3.000.000	KECAMATAN MANGUHARJO
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100 %	11.823.928.494		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	12.451.035.394	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang/bulan	11.821.628.494	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	70 Orang/bulan	12.448.472.894	KECAMATAN MANGUHARJO
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	26 Laporan	2.300.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	26 Laporan	2.562.500	KECAMATAN MANGUHARJO
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Perjanjian Kinerja ASN yang Tercapai	100 %	68.890.000		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	68.890.000	
	7	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan									
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	68.890.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100 Orang	68.890.000	KECAMATAN MANGUHARJO
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100 %	115.890.000		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	117.091.000	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	115.890.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	12 Laporan	117.091.000	KECAMATAN MANGUHARJO
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan barang milik daerah urusan pemerintah daerah	100 %	1.184.149.000		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	1.040.000.000	
	7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	9 Unit	398.512.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	9 Unit	400.000.000	KECAMATAN MANGUHARJO
	7	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	188.850.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	1 Unit	340.000.000	KECAMATAN MANGUHARJO
	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	596.787.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	10 Unit	300.000.000	KECAMATAN MANGUHARJO
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya kebutuhan jasa urusan pemerintah daerah	100 %	2.953.840.068		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	1.233.817.864	
	7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.953.840.068	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	12 Laporan	1.233.817.864	KECAMATAN MANGUHARJO
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persetase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan	100 %	503.834.900		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	834.708.228	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 Unit	88.680.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	15 Unit	107.625.000	KECAMATAN MANGUHARJO
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	358.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	6 Unit	666.250.000	KECAMATAN MANGUHARJO
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	60 Unit	57.154.900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	60 Unit	60.833.228	KECAMATAN MANGUHARJO
2	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	92,45 Indeks	40.060.000				92,45 Indeks	47.154.573	
	7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	persentase hasil koordinasi sarpras pelayanan umum yang ditindaklanjuti	100 %	40.060.000		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	47.154.573	
	7	01	02	2.03	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum									
							Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 Dokumen	40.060.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	1 Dokumen	47.154.573	KECAMATAN MANGUHARJO

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase pengkoordinasian ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	100 %	294.921.000				100%	275.620.000	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	192.151.000		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	180.610.000	
	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat									
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	192.151.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	1 Laporan	180.610.000	KECAMATAN MANGUHARJO
	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Prosentase Hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100 %	102.770.000		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	95.010.000	
	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia									
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	102.770.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	1 Laporan	95.010.000	KECAMATAN MANGUHARJO
5	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kewenangan yang dijalankan Kecamatan (tidak dilaksanakan OPD lain)	100 %	112.448.000				100%	115.070.000	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Himbauan Kepala daerah Yang ditindaklanjuti	100 %	112.448.000		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	115.070.000	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia								
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	350 Orang	54.858.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	350 Orang	54.950.000	KECAMATAN MANGUHARJO
	7	01	05	2.01	0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan									
							Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1 Laporan	45.080.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	1 Laporan	47.460.000	KECAMATAN MANGUHARJO
	7	01	05	2.01	0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal									
							Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	2 Dokumen	12.510.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	2 Dokumen	12.660.000	KECAMATAN MANGUHARJO
6	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	92,45 Indeks	486.984.500				92,50Indeks	694.614.390	
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	100 %	486.984.500		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	694.614.390	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan									
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	486.984.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	12 Laporan	694.614.390	KELURAHAN MANGUHARJO
8	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	92,45 Indeks	462.034.790				92,50Indeks	669.165.686	
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	100 %	462.034.790		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	669.165.686	
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan									
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	462.034.790	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	12 Laporan	669.165.686	KELURAHAN SOGATEN
10	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	92,45 Indeks	442.388.400				92,50Indeks	649.126.368	
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	100 %	442.388.400		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	649.126.368	
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan									
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	442.388.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	12 Laporan	649.126.368	KELURAHAN PATIHAN
12	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	92,45 Indeks	414.816.500				92,50Indeks	620.850.030	
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	100 %	414.816.500		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	620.850.030	
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan									

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	414.816.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	12 Laporan	620.850.030	KELURAHAN NGEGONG
14	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	92,45 Indeks	468.905.000				92,50Indeks	676.173.300	
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	100 %	468.905.000		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	676.173.300	
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan									
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	468.905.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	12 Laporan	676.173.300	KELURAHAN WINONGO
16	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	92,45 Indeks	499.542.800				92,50Indeks	708.137.856	
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	100 %	499.542.800		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	708.137.856	
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan									
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	499.542.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	12 Laporan	708.137.856	KELURAHAN MADIUN LOR
18	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	92,45 Indeks	448.993.070				92,50Indeks	629.332.931	
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	100 %	448.993.070		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	629.332.931	
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan									
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	448.993.070	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	12 Laporan	629.332.931	KELURAHAN PANGONGANGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	92,45 Indeks	609.615.400				92,50Indeks	995.097.199	
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	100 %	609.615.400		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	995.097.199	
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan									
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	609.615.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	12 Laporan	995.097.199	KELURAHAN NAMBANGAN LOR
22	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	92,45 Indeks	498.532.759				92,50Indeks	707.107.614	
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	100 %	498.532.759		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	707.107.614	
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan									
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	498.532.759	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	12 Laporan	707.107.614	KELURAHAN NAMBANGAN KIDUL
	7	01				KECAMATAN			19.758.998.423					21.145.909.984	
1	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82,92 Nilai	16.134.945.121				82,92 Nilai	17.605.542.573	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokomen Perencanaan, pengendalian, dan evaluasi perangkat daerah	100 %	2.000.000		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	2.000.000	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	2.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	12 Dokumen	2.000.000	KECAMATAN TAMAN
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100 %	12.213.718.027		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	13.533.794.923	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	78 Orang/bulan	12.213.718.027	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	80 Orang/bulan	13.533.794.923	KECAMATAN TAMAN
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administasi kepegawaian	100 %	219.110.000		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	219.110.000	
	7	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan									
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	150 Orang	219.110.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	140 Orang	219.110.000	KECAMATAN TAMAN
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100 %	362.410.000		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	120.000.000	
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	362.410.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	15 Laporan	120.000.000	KECAMATAN TAMAN
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah yang layak	100 %	330.946.374		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	879.987.610	
	7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	9 Unit	18.794	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	9 Unit	288.000.000	KECAMATAN TAMAN
	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	330.927.580	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	4 Unit	591.987.610	KECAMATAN TAMAN
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	100 %	2.283.105.210		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	2.529.914.000	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.283.105.210	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	12 Laporan	2.529.914.000	KECAMATAN TAMAN
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100 %	723.655.510		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	320.736.040	
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16 Unit	145.382.450	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	16 Unit	146.360.000	KECAMATAN TAMAN
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	457.633.560	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	6 Unit	123.168.590	KECAMATAN TAMAN
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	120.639.500	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	2 Unit	51.207.450	KECAMATAN TAMAN
2	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	92,16 Indeks	16.610.000				92,16 Indeks	19.704.300	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	persentase hasil koordinasi sarpras pelayanan umum yang ditindaklanjuti	100%	16.610.000		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	-	19.704.300	
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait									

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Laporan	16.610.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi		19.704.300	KECAMATAN TAMAN
4	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pengkoordinasian ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	100 %	375.180.000				100 %	242.002.235	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Rekomendasi hasil penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti	100 %	265.145.000		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	128.940.000	
	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat									
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 Laporan	265.145.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	12 Laporan	128.940.000	KECAMATAN TAMAN
	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100 %	110.035.000		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	113.062.235	
	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia									
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	6 Laporan	110.035.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	6 Laporan	113.062.235	KECAMATAN TAMAN
5	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kewenangan yang dijalankan Kecamatan (tidak dilaksanakan OPD lain)	100 %	120.823.000				100 %	125.021.085	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase himbauan Kepala daerah yang ditindaklanjuti	100 %	120.823.000		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	125.021.085	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia									
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	60 Orang	38.060.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	60 Orang	38.270.400	KECAMATAN TAMAN
	7	01	05	2.01	0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan									
							Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4 Laporan	66.292.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	4 Laporan	64.734.600	KECAMATAN TAMAN
	7	01	05	2.01	0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal									
							Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	4 Dokumen	16.471.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	4 Dokumen	22.016.085	KECAMATAN TAMAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	92,16 Indeks	329.948.200				92,16 Indeks	346.445.610	
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di Kelurahan sesuai ketentuan	100 %	329.948.200		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	346.445.610	
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan									
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	329.948.200	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	12 Laporan	346.445.610	KELURAHAN MOJOREJO
8	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	92,16 Indeks	340.000.000				92,16 Indeks	320.922.630	
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di Kelurahan sesuai ketentuan	100 %	340.000.000		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	320.922.630	
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan									
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	340.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	12 Laporan	320.922.630	KELURAHAN PANDEAN
10	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	92,16 Indeks	378.564.970				92,16 Indeks	397.493.219	
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di Kelurahan sesuai ketentuan	100 %	378.564.970		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	397.493.219	
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan									
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	378.564.970	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	12 Laporan	397.493.219	KELURAHAN BANJAREJO

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	92,16 Indeks	170.890.204				92,16 Indeks	179.434.714	
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di Kelurahan sesuai ketentuan	100 %	170.890.204		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	179.434.714	
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan									
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	170.890.204	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	12 Laporan	179.434.714	KELURAHAN KUNCEN
14	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	92,16 Indeks	404.927.600				92,16 Indeks	404.927.600	
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di Kelurahan sesuai ketentuan	100 %	404.927.600		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	404.927.600	
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan									
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	404.927.600	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	12 Laporan	404.927.600	KELURAHAN MANISREJO
16	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	92,16 Indeks	366.850.088				92,16 Indeks	366.850.088	
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-	366.850.088		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	366.850.088	
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan									
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	366.850.088	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	12 Laporan	366.850.088	KELURAHAN KEJURON

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	92,16 Indeks	439.975.440				92,16 Indeks	439.975.440	
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-	439.975.440		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	439.975.440	
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan									
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	439.975.440	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	12 Laporan	439.975.440	KELURAHAN JOSENAN
20	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	92,16 Indeks	355.150.000				92,16 Indeks	355.150.000	
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di Kelurahan sesuai ketentuan	100 %	355.150.000		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	355.150.000	
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan									
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	355.150.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	12 Laporan	355.150.000	KELURAHAN DEMANGAN
22	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	92,16 Indeks	325.133.800				92,16 Indeks	342.440.490	
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di Kelurahan sesuai ketentuan	100 %	325.133.800		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100%	342.440.490	
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan									
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	325.133.800	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	12 Laporan	342.440.490	KELURAHAN TAMAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			5.927.739.005					7.021.559.236	
	8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			5.927.739.005						
1	8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,75 Nilai	5.927.739.005				81,75 Nilai	7.021.559.236	
	8	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100 persen	51.910.000		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100persen	55.000.000	
	8	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	51.910.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	1 Laporan	55.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100 persen	4.147.854.594		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100persen	4.526.559.236	
	8	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/bulan	4.147.854.594	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	21 Orang/bulan	4.526.559.236	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi kepegawaian	100 persen	4.215.000		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100persen	220.000.000	
	8	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan									
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	31 Orang	4.215.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	31 Orang	220.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	891.552.446		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100persen	1.250.000.000	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	8	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	534.965.446	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	1 Paket	850.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 Laporan	356.587.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	80 Laporan	400.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan barang milik daerah	100 persen	686.353.680		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100persen	520.000.000	
	8	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	14 Unit	224.131.660	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	1 Unit	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	462.222.020	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	1 Unit	520.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan	100 persen	145.853.285		memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	100persen	450.000.000	
	8	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	17 Unit	59.891.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	1 Unit	200.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	35.479.485	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	1 Unit	150.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	8	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50.482.800	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	1 Unit	100.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
									458.401.471.190					490.772.093.288	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

PRIORITAS 4: Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkualitas Berbasis Lingkungan dan Berkelanjutan

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Provinsi			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			91.655.173.700					121.224.400.000	
2	1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase berfungsinya bangunan pengendali banjir untuk meningkatkan kawasan bebas banjir/genangan	82,66 persen	7.538.940.000				82,66 persen	14.100.000.000	
	1	03	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kawasan bebas banjir/genangan	81,67 persen	7.538.940.000		membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	81,67 persen	14.100.000.000	
	1	03	02	2.01	0028	Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir									
							Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Direhabilitasi	0 Unit	639.460.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	4 Unit	275.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.01	0085	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir									
							Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 Unit	805.260.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	1 Unit	1.225.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.01	0093	Normalisasi/Restorasi Sungai									
							Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	1 KM	6.094.220.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	1 KM	7.025.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3	1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Jumlah jaringan sambungan rumah yang terpasang Persentase Jumlah jaringan sambungan rumah yang terpasang	0,23 % 0,23 persen	598.476.100				0,23% 0,23persen	275.000.000	
	1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tangga yang belum terlayani kebutuhan jaringan air minum	100 Sambungan Rumah	598.476.100		membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	100 Sambungan Rumah	275.000.000	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	03	03	2.01	0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan									
							Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	100 SR	598.476.100	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	100 SR	275.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4	1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan IPLT	100 %	1.742.925.500				100 %	1.125.000.000	
	1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam pelayanan domestik	100 persen	1.742.925.500		membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	100persen	1.125.000.000	
	1	03	05	2.01	0037	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja									
							Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan	1 Unit	1.415.100.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan		500.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	05	2.01	0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)									
							Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	5 Unit	327.825.500	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	5 Unit	625.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5	1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase berfungsinya saluran drainase kota untuk meningkatkan kawasan bebas banjir/genangan Persentase berfungsinya saluran drainase kota untuk meningkatkan kawasan bebas banjir/genangan	82,66 % 82,66 persen	20.623.990.200				83,03 persen 83,03%	28.125.000.000	
	1	03	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kawasan bebas banjir/genangan	81,67 persen	20.623.990.200		membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	81,67 persen	28.125.000.000	
	1	03	06	2.01	0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan									
							Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	2000 M	7.632.870.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	2000 M	12.025.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	03	06	2.01	0024	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan									
							Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	1 Sistem Drainase Perkotaan	9.783.020.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	1 Sistem Drainase Perkotaan	12.025.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	06	2.01	0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan									
							Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	12 Dokumen	949.910.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan		975.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	06	2.01	0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan									
							Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	1 Sistem Drainase Perkotaan	2.258.190.200	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	1 Sistem Drainase Perkotaan	3.100.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
6	1	03	07			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase tersedianya tempat pembuangan sampah dikawasan perkotaan	22 %	231.300.000				-	2.000.000	
	1	03	07	2.01		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan sampah di wilayah kota	72 %	231.300.000		memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	-	2.000.000	
	1	03	07	2.01	0015	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota									
							Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dibangun	1 Ton/hari	231.300.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan		2.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
7	1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan gedung yang terbangun	100 %	19.291.870.000				100 %	36.050.000.000	
	1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase bangunan/gedung yang terbangun/terehabilitasi	100 persen	19.291.870.000		memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	100persen	36.050.000.000	
	1	03	08	2.01	0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota									

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	8 Bangunan Gedung	500.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	8 Bangunan Gedung	525.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	08	2.01	0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	18.541.870.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	2 Dokumen	35.250.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	08	2.01	0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG									
							Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	10 Dokumen	250.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	10 Dokumen	275.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
8	1	03	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase kawasan strategis/cagar budaya terbangun/terehab	100 persen	1.829.302.000				100 persen	1.327.400.000	
	1	03	09	2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase bangunan/gedung yang terbangun/terehabilitasi	100 persen	1.829.302.000		memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	100persen	1.327.400.000	
	1	03	09	2.01	0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan									

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya									
							Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	1 Kawasan	1.829.302.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	1 Kawasan	1.327.400.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
9	1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase kondisi jalan kota yang baik	95,80 persen	37.372.671.600				95,80 persen	37.910.000.000	
	1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Panjang jalan dalam kondisi mantab	95,80 persen	37.372.671.600		memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	95,80 persen	37.910.000.000	
	1	03	10	2.01	0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan									
							Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	5 Dokumen	221.998.400	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	5 Dokumen	325.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0031	Penggantian Jembatan									
							Jumlah Jembatan yang Diganti	2 Jembatan	23.710.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	2 Jembatan	3.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0032	Pembangunan Jalan									
							Panjang Jalan yang Dibangun	1 KM	2.216.740.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	0.5 KM	2.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0034	Pemeliharaan Berkala Jalan									
							Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	8 KM	23.288.630.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	8 KM	18.025.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	03	10	2.01	0037	Pelebaran Jalan Menuju Standar									
							Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	1 KM	929.010.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	1 KM	1.525.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan									
							Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	25 Jembatan	221.430.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	25 Jembatan	275.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0041	Pelebaran Jalan Menambah Lajur									
							Panjang Jalan yang Dilebarkan Menambah Lajur	1 KM	4.175.930.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	1 KM	6.025.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0042	Pemeliharaan Berkala Jembatan									
							Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala	2 Jembatan	243.960.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	2 Jembatan	275.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan									
							Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	3 KM	408.810.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	485,435 KM	435.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0046	Pemeliharaan Rutin Jalan									
							Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	20 KM	5.642.453.200	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	20 KM	6.025.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
10	1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase tenaga konstruksi yang tersertifikasi	22,75 persen	1.175.698.300				22,75 persen	985.000.000	
	1	03	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase tenaga jasa konstruksi yang kompeten	22,75 persen	262.795.000		memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	22,75 persen	525.000.000	
	1	03	11	2.01	0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis									

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	60 Orang	262.795.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	60 Orang	525.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	11	2.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga jasa konstruksi yang kompeten	100 persen	103.926.500		memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	100persen	125.000.000	
	1	03	11	2.02	0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota									
							Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	2 Dokumen	103.926.500	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	2 Dokumen	125.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	11	2.04		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase badan usaha konstruksi yang diawasi	100 persen	808.976.800		memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	100persen	335.000.000	
	1	03	11	2.04	0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota									
							Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	100 Paket Pekerjaan	808.976.800	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	100 Paket Pekerjaan	335.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
11	1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase ketaatan pemanfaatan tata ruang sesuai ketentuan	100 %	1.250.000.000				100 %	1.325.000.000	
	1	03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase ketaatan pemanfaatan tata ruang sesuai RTRW	100 persen	500.000.000		memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	100persen	525.000.000	
	1	03	12	2.01	0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang									
							Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	500.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	1 Dokumen	525.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketaatan pemanfaatan tata ruang sesuai RTRW	100 persen	400.000.000		memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	100persen	425.000.000	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	03	12	2.03	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang									
							Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	20 Dokumen	400.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	20 Dokumen	425.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketaatan pemanfaatan tata ruang sesuai RTRW	100 persen	350.000.000		memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	100persen	375.000.000	
	1	03	12	2.04	0008	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK									
							Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	300 Dokumen	350.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	300 Dokumen	375.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			26.370.196.521					34.589.794.176	
2	1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Pengembangan Perumahan	100 %	1.369.341.000				100 %	2.022.850.000	
	1	04	02	2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Reabilitas Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten / Kota yang Dihasilkan	1 Dokumen	66.360.000		mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	1Dokumen	118.950.000	
	1	04	02	2.01	0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus									
							Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	1 Dokumen	66.360.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	1 Dokumen	118.950.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Pembangunan dan Rehabilitas Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program	3 Unit	1.210.481.000		mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	3Unit	1.757.900.000	
	1	04	02	2.03	0006	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota									

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	3 Unit Rumah	1.210.481.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	3 Unit Rumah	1.757.900.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.05		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Presentase Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan / atau Rumah Khusus	100 %	92.500.000		mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	100%	146.000.000	
	1	04	02	2.05	0001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun									
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	1 Laporan	92.500.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	1 Laporan	146.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
3	1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Kawasan Permukiman yang Tidak Kumuh	100 %	7.139.650.000				100 %	10.516.944.176	
	1	04	03	2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Prosentase Kawasan Permukiman Kumuh yang Ditangani	0,5 %	301.000.000		mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	0,5%	220.000.000	
	1	04	03	2.02	0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh									
							Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	1 Dokumen	301.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	1 Dokumen	220.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Prosentase Kawasan Permukiman Kumuh yang Ditangani	0,5 %	6.838.650.000		mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	0,5%	10.296.944.176	
	1	04	03	2.03	0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni									
							Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	160 Unit Rumah	2.368.850.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	160 Unit Rumah	2.886.200.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	03	2.03	0009	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh									
							Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	16,41 Ha	1.412.350.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	16,41 Ha	4.410.744.176	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	04	03	2.03	0012	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha									
							Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	55 Unit	3.057.450.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	55 Unit	3.000.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
4	1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	100 %	17.861.205.521				100 %	22.050.000.000	
	1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Prosentase Penyelenggaraan PSU Perumahan yang memadai	100 %	17.861.205.521		mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	100%	22.050.000.000	
	1	04	05	2.01	0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian									
							Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	3 Lokasi	17.861.205.521	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	3 Lokasi	22.050.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			4.465.861.703					5.534.815.501	
1	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	86.00 Nilai	3.642.961.703				86.00 Nilai	4.216.769.501	
	1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100 %	2.300.000		membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	100%	3.315.000	
	1	05	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	2.300.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	6 Laporan	3.315.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100 %	1.694.600.703		membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	100%	1.756.212.000	
	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	11 Orang/ bulan	1.694.600.703	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	12 Orang/ bulan	1.756.212.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan barang milik daerah urusan pemerintahan daerah	100 %	52.498.000		membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	100%	107.319.000	
	1	05	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	52.498.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	1 Unit	107.319.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	100 %	1.559.391.000		membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	100%	1.903.087.501	
	1	05	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.559.391.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	12 Laporan	1.903.087.501	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan	100 %	334.172.000		membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	100%	446.836.000	
	1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	214.917.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	10 Unit	323.065.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	101.010.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	1 Unit	100.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	18.245.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	5 Unit	23.771.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2	1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Yang Ditangani	100 %	622.900.000				100 %	1.043.046.000	
	1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100 %	120.490.000		membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	100%	158.475.000	
	1	05	03	2.01	0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)									
							Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	450 Orang	120.490.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	900 Orang	158.475.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	209.824.000		membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	100%	627.785.000	
	1	05	03	2.02	0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota									

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	5 Unit	8.754.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	1 Unit	50.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota									
							Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	250 Orang	47.360.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	400 Orang	99.302.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam									
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	30 Keluarga	25.085.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	60 Keluarga	101.416.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana									
							Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	11 Kawasan	44.260.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	11 Kawasan	175.351.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota									
							Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	50 Orang	21.005.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	38 Orang	44.957.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota									

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	11 Kawasan	63.360.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	11 Kawasan	156.759.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 %	172.419.000		membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	100%	175.251.000	
	1	05	03	2.03	0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota									
							Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	42 Orang	34.410.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	18 Orang	58.137.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.03	0008	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Kabupaten/Kota									
							Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	70 Orang	122.209.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	150 Orang	87.114.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.03	0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota									
							Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	18 Orang	15.800.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	18 Orang	30.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase tersusunnya sistem dasar penanggulangan bencana	100 %	120.167.000		membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	100%	81.535.000	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	05	03	2.04	0008	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota									
							Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	50 Orang	49.965.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	50 Orang	57.475.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.04	0012	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota									
							Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana	1 Laporan	70.202.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	1 Laporan	24.060.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
3	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	86.00 Nilai	200.000.000				86.00 Nilai	275.000.000	
	X	XX	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100 %	200.000.000		membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	100%	275.000.000	
	X	XX	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	200.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	12 Laporan	275.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			2.024.373.000					2.024.373.000	
3	1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100 %	2.024.373.000				100 %	2.024.373.000	
	1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	100 %	1.974.373.000		membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	100%	1.974.373.000	
	1	05	04	2.01	0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	4 Dokumen	1.617.195.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	6 Dokumen	1.634.995.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	04	2.01	0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan	357.178.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	6 Laporan	339.378.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	04	2.02		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Prosentase Kegiatan Inspeksi Proteksi Kebakaran	100 %	50.000.000		membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	100%	50.000.000	
	1	05	04	2.02	0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran									
							Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	4 Dokumen	50.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	6 Dokumen	50.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			154.949.300					178.346.125	
6	1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Pengelolaan Taman makam Pahlawan dalam kondisi baik	100 %	154.949.300				100 %	178.346.125	
	1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan	100 %	154.949.300		membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	100%	178.346.125	
	1	06	07	2.01	0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota									
							Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	966 Makam	154.949.300	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	966 Makam	178.346.125	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			885.855.000					15.576.200.000	
5	2	10	05			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	100 %	145.855.000				100 %	15.036.200.000	
	2	10	05	2.01		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Penyelesaian Masalah Ganri Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 %	145.855.000		membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	100%	15.036.200.000	
	2	10	05	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	109.655.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	1 Dokumen	15.000.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	2	10	05	2.01	0007	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Laporan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	36.200.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	1 Laporan	36.200.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	2	10	10			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Perentae Penatagunaan Tanah	100 %	740.000.000				100 %	540.000.000	
	2	10	10	2.01		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Penggunaan Tanah yang Hamparannya Dalam Satu Daerah	100 %	740.000.000		membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	100%	540.000.000	
	2	10	10	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah									
							Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	10 Laporan	740.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	10 Laporan	540.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			26.740.036.124					27.061.300.000	
1	2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80,40 Nilai	13.060.357.196				80,40 Nilai	14.137.500.000	
	2	11	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100 %	22.387.373		membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	100%	100.000.000	
	2	11	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	22.387.373	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	6 Laporan	100.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100 %	9.269.540.173		membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	100%	10.200.000.000	
	2	11	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 Orang/ bulan	9.269.540.173	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	60 Orang/ bulan	10.200.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan dokumen administrasi kepegawaian	100 %	129.413.608		membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	100%	237.500.000	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	11	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	70.039.714	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	3 Paket	137.500.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	220 Orang	59.373.894	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	230 Orang	100.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100 %	250.000.000		membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	100%	200.000.000	
	2	11	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	250.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	12 Laporan	200.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase tercukupinya pemenuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	199.052.530		membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	100%	225.000.000	
	2	11	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	8 Unit	115.392.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	5 Unit	200.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	83.660.530	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan		25.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.401.347.340		membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	100%	1.575.000.000	
	2	11	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	670.382.745	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	4 Laporan	725.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	730.964.595	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	12 Laporan	850.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	100 %	1.788.616.172		membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	100%	1.600.000.000	
	2	11	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	1.399.956.192	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	6 Unit	1.400.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	124.921.480	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	15 Unit	100.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	263.738.500	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	3 Unit	100.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Data Perencanaan Lingkungan Hidup yang Tersedia	79,5 %	293.800.000				79,5 %	230.000.000	
	2	11	02	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Prosentase Data Perencanaan Lingkungan Hidup yang Tersedia	79,50% 79,50%	125.000.000		membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	79,50% 79,50% 1Dokumen	130.000.000	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	11	02	2.01	0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota									
							jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	1 Dokumen	125.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan		130.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	02	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah data dan informasi kajian LH yang tersedia	1 Dokumen	168.800.000		membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	1Dokumen	100.000.000	
	2	11	02	2.02	0006	Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup									
							Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun	1 Dokumen	168.800.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan		100.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
3	2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Titik sampel Kualitas Air dan Udara yang Memenuhi Baku Mutu	50 %	1.176.400.000				50 %	1.215.000.000	
	2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan / usaha yang dipantau pencegahan pencemarannya	78 Kegiatan/ usaha	800.000.000		membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	79 Kegiatan/ usaha	800.000.000	
	2	11	03	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim									
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	500.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	1 Dokumen	500.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	03	2.01	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut									
							Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan	1 Kegiatan	300.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan		300.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	11	03	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	jumlah usaha / kegiatan yang sudah melakukan pengolahan limbah cair	18 Kegiatan/ usaha	376.400.000		membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	18Kegiatan/usaha	415.000.000	
	2	11	03	2.02	0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat									
							Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	2 Laporan	211.400.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	2 Laporan	265.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	03	2.02	0003	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup									
							Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	2 Titik	165.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	2 Titik	150.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
4	2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Tutupan Lahan	50 %	27.000.000				50 %	35.000.000	
	2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah RTH yang di pantau	5 Lokasi	27.000.000		membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	5Lokasi	35.000.000	
	2	11	04	2.01	0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati									
							Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 Dokumen	27.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	1 Dokumen	35.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
5	2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3)	78,20 %	60.000.000				78,20 %	65.000.000	
	2	11	05	2.01		Penyimpanan sementara Limbah B3	jumlah Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang memenuhi syarat	18 Lokasi	60.000.000		membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	18Lokasi	65.000.000	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	11	05	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik									
							Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	5 Dokumen	60.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	5 Dokumen	65.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
6	2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Pelaku Usaha/ Kegiatan Taat terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	88,2 %	420.000.000				88,2 %	440.000.000	
	2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	jumlah Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	18 Perusahaan	420.000.000		membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	18 Perusahaan	440.000.000	
	2	11	06	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH									
							Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	4 Dokumen	260.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	4 Dokumen	260.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	06	2.01	0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup									

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	10 Badan Usaha	160.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	10 Badan Usaha	180.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
7	2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	persentase peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	100 %	703.750.000				100 %	750.000.000	
	2	11	08	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/Kota	15 Kegiatan	703.750.000		membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	15Kegiatan	750.000.000	
	2	11	08	2.01	0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup									
							Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	4 Dokumen	703.750.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	3 Dokumen	750.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
8	2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	100 %	260.000.000				100 %	260.000.000	
	2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	jumlah pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota yang diselesaikan	5 laporan	260.000.000		membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	5laporan	260.000.000	
	2	11	10	2.01	0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota									
							Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	5 Pengaduan	130.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	3 Pengaduan	130.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	10	2.01	0005	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota									
							Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	5 Perkara	130.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan		130.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	71 %	10.738.728.928				71 %	9.928.800.000	
	2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	Jumlah sampah yang dikelola	43.790 Ton	10.637.728.928		membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	43.790 Ton	9.828.800.000	
	2	11	11	2.01	0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan									
							Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	41 Kelompok	4.927.335.940	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	44 Kelompok	4.478.800.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	11	2.01	0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	3 Unit	2.666.792.988	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	3 Unit	3.000.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	11	2.01	0019	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah									
							Jumlah sampah yang terdaur ulang	43780 Ton	315.600.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan		250.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	11	2.01	0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional									
							jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	32280 Ton	2.728.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan		2.100.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	11	2.03		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	jumlah Pihak Swasta pengelola sampah yang dibina dan diawasi	50 Kelompok	101.000.000		membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	50 Kelompok	100.000.000	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	11	11	2.03	0002	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah									
							Jumlah Unit/Usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lembaga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja	3 Unit	101.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	3 Unit	100.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			5.431.645.693					6.681.058.436	
2	2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase perlengkapan jalan yang berfungsi baik	100 %	5.431.645.693				100 %	6.681.058.436	
	2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase sarana, prasarana dan fasilitas LLAJ yang berfungsi baik	100 %	2.054.204.767		memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	100%	2.952.854.951	
	2	15	02	2.02	0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota									
							Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	1 Unit	150.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	1 Unit	150.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota									
							Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	200 Unit	715.633.001	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	200 Unit	1.450.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.02	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan									
							Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	2 Unit	1.188.571.766	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	5 Unit	1.352.854.951	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase terminal berfungsi baik	100 %	50.000.000		memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	100%	150.000.000	
	2	15	02	2.03	0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)									

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	2 Unit	50.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	2 Unit	150.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase fasilitas terselanggaranya pelayanan parkir yang baik	100 %	846.700.500		memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	100%	881.500.000	
	2	15	02	2.04	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota									
							Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	846.700.500	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	1 Laporan	881.500.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase kendaraan lulus uji	100 %	387.415.600		memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	100%	337.800.000	
	2	15	02	2.05	0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor									
							Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	4000 Dokumen	90.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	4000 Dokumen	1.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.05	0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	12 Unit	297.415.600	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	12 Unit	336.800.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	100 %	375.758.000		memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	100%	463.303.485	
	2	15	02	2.06	0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota									

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	6 Laporan	375.758.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	6 Laporan	463.303.485	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase terlaksananya audit dan inspeksi keselamatan LLAJ	100 %	702.460.826		memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	100%	797.600.000	
	2	15	02	2.08	0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota									
							Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	1 Laporan	702.460.826	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	1 Laporan	797.600.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan angkutan umum	100 %	1.015.106.000		memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	100%	1.098.000.000	
	2	15	02	2.09	0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	37 Unit	1.015.106.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	37 Unit	1.098.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			391.740.000					650.000.000	
	5	01				PERENCANAAN			391.740.000					650.000.000	
3	5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Rencana Aksi Daerah (Tematik) yang sinkron dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD)	100 %	391.740.000				100 %	650.000.000	
	5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan kewilyahan	1 dokumen	391.740.000		memperkuat indfrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	1 dokumen	650.000.000	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5	01	03	2.03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	62.120.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat indfrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	1 Dokumen	150.000.000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	03	2.03	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur									
							jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi bidang infrastruktur	1 dokumen	138.910.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat indfrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	1 Laporan	200.000.000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	03	2.03	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	114.550.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat indfrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	1 Dokumen	150.000.000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	03	2.03	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan									
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan	76.160.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	memperkuat indfrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	1 Laporan	150.000.000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
									158.119.831.041				-	213.520.287.238	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DAERAH

6.1 Indikator Kinerja Utama

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pembangunan daerah, penetapan target indikator kinerja dapat mengindikasikan aspek keberhasilan pembangunan daerah yang ingin di capai. Indikator kinerja tersebut meliputi aspek kesejahteraan, aspek layanan, dan aspek daya saing. Penetapan indikator kinerja ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU), indikator kinerja daerah, dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Indikator Kinerja Utama menjadi salah satu tolok ukur penilaian kinerja pemerintah Kota Madiun yang memuat indikator kinerja tujuan dan atau sasaran. IKU daerah dicapai dengan dukungan pencapaian IKU perangkat daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. IKU perangkat daerah yang secara langsung mendukung pencapaian IKU daerah memiliki makna bahwa perangkat daerah tersebutlah secara tugas dan fungsi memiliki peran lebih dominan dibandingkan dengan IKU perangkat daerah lainnya dalam pencapaian indikator kinerja tujuan dan atau sasaran. IKU daerah maupun IKU perangkat daerah merupakan indikator kinerja dampak (*impact*) untuk mengukur tujuan dan atau sasaran pembangunan. Penetapan IKU Kota Madiun dalam RKPD 2025 mengacu pada penetapan IKU RPD tahun pertama dengan memperhatikan kondisi capaian tahun lalu, sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 6. 1 Prioritas Pembangunan dan Target Indikator Kinerja Utama Kota Madiun

No	Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Realisasi	Target	
			2023	2025	2026
1	Transformasi ekonomi Melalui Penguatan Sektor, Ekonomi Kreatif, dan Digital	Indeks Gini	0,416	0,385	0,370
		Persentase Pertumbuhan Ekonomi	5,80	5,92	3,11-5,95
2	Peningkatan Transformasi Sosial Melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	83,71	84,10	84,20
3	Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Akselerasi	Indeks Pembangunan Gender	95,18	94,60	94,65
4	Pembangunan Infrastruktur Berkualitas Berbasis Lingkungan dan Berkelanjutan	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	87,95 (A)	75,01 (BB)	80,01 (A)

Sumber: Bapppeda, 2023 dan BPS Kota Madiun, 2023

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Sebagaimana yang termuat pada Tabel 6.1 di atas, RKPD Kota Madiun tahun 2025 memuat empat prioritas pembangunan dengan lima indikator kinerja tujuan dan 25 indikator kinerja sasaran yang menjadi indikator kinerja utama. Prioritas kesatu yaitu Transformasi ekonomi Melalui Penguatan Sektor, Ekonomi Kreatif, dan Digital. Terdapat dua indikator kinerja dalam mengukur keberhasilan prioritas ini yaitu persentase pertumbuhan ekonomi dan indeks gini. Capaian pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, dan pada tahun 2025 dan 2026 target pertumbuhan ekonomi berada pada ring 3,08-5,75 dan 3,11-595.

Prioritas pembangunan daerah kedua yaitu Peningkatan Transformasi Sosial Melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia terdiri dari dua indikator kinerja yaitu Indeks pembangunan manusia, dan indeks pembangunan gender. Capaian Indeks pembangunan manusia tahun 2023 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya menjadi sebesar 83,71 sedangkan target yang ditetapkan pada tahun 2025 dan 2026 masing-masing sebesar 83,70 dan 84,20. Tingkat keberhasilan capaian pembangunan yang sudah mengakomodasi persoalan gender di kota madiun diindikasikan dengan indeks pembangunan gender, menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 95,18 pada tahun 2023, target indek pembangunan gender pada tahun 2025 dan 2026 masing-masing sebesar 94,60 dan 94,65.

Prioritas pembangunan daerah ketiga menekankan pada Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik. Indikator kinerja pada prioritas pembangunan tersebut adalah indeks reformasi birokrasi dengan capaian indeks pada tahun 2023 adalah sebesar 87,95 dengan katogori A. Target indikator kinerja pada tahun 2025 dan 2026 masing–masing sebesar 75,01 dan 80,01.

Prioritas pembangunan keempat adalah Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkualitas Berbasis Lingkungan dan Berkelanjutan. Prioritas tersebut didukung olah indikator bidang urusan, sehingga tidak mempunyai indikator kinerja utama yang spesifik pada RPD 2025-2026. Prioritas keempat pada RKPD 2025 akan mendukung 2 prioritas lain yaitu prioritas kesatu Transformasi ekonomi Melalui Penguatan Sektor, Ekonomi Kreatif, dan Digital dan prioritas kedua Peningkatan Transformasi Sosial Melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia.

6.2 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan menunjukkan indikator keberhasilan pembangunan di lihat dari sisi urusan baik wajib maupun pilihan. Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan dapat dilihat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

dari tiga aspek utama yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah. Aspek kesejahteraan masyarakat meliputi kinerja utama penyelenggaraan pemerintah daerah seperti indeks pembangunan manusia, angka kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, indeks gini, dan lainnya. Aspek pelayanan umum meliputi empat fokus yaitu urusan wajib layanan dasar, urusan wajib bukan layanan dasar, urusan pilihan, dan unsur penunjang urusan pemerintahan. Aspek daya saing daerah meliputi empat fokus yaitu kemampuan ekonomi daerah, iklim berinvestasi, fasilitas wilayah/infrastruktur, dan sumber daya manusia.

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan pada RKPD 2025 memuat penetapan indikator kinerja daerah tahun 2025 dan penetapan indikator penyelenggaran pemerintahan daerah tahun 2025, penetapan indikator kinerja daerah tahun 2025 memuat:

1. indikator tujuan dan sasaran kota;
2. indikator tujuan, sasaran, dan program perangkat daerah; dan
3. indikator makro.

Penetapan indikator penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2025 memuat indikator LPPD dan Indikator SPM.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Tabel 6. 2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah RKPD Tahun 2025

NO			INDIKATOR	SATUAN	REALISASI	TARGET				Label	PERIODE
						2024		2025			
					2023	RPJMD 2019-2024	RKPD 2024	RPD 2025-2026	RKPD 2025		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
I			ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
a			Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi								
	1		Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,80	3,11-5,95	5,75	3,08-5,75	5,92	Indikator makro/ Tujuan Kota	RPD 2025-2026 (Indikator Baru)
	2		Pendapatan Per Kapita (ADHK)	Juta	58,08			66,34	62,99	Indikator makro/ Sasaran Kota	
	4		Indeks Gini	Indeks	0,416	0,35	0,35	0,385	0,385	Indikator Tujuan Kota	
	5		Tingkat Kemiskinan	%	4,74	4,55	4,45	4,55	4,55	Indikator sasaran kota	
	6		Pengeluaran Per Kapita	Juta	17,115			17,72	17,72	Indikator sasaran kota	
	7		Tingkat Inflasi	%	2,35			4±1	3±1	Indikator sasaran kota	
	8		Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks	0,4			0,40-0,60	0,40-0,60	Indikator sasaran kota	
	1		Laju Pertumbuhan Ekonomi		5,80	3,11-5,95	5,75			Indikator makro	RPJMD 2019-2024 (Indikator Lama)
	2		PDRB Per Kapita (ADHB)		74,65*	70,15	80,43			Indikator makro	
	3		Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif		6,87*	6,44	6,89			Indikator Tujuan Kota	
	4		Indeks Gini		0,416	0,35	0,35			Indikator Tujuan Kota	
	5		Angka Kemiskinan		4,74	4,55	4,45			Indikator sasaran kota	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
b			Fokus Kesejahteraan Sosial								
	1		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	83,71	82,35	82,35	83,7	84,10	Indikator Tujuan Kota	RPD 2025-2026 (Indikator Baru)
	I		Urusan Pemerintahan Bidang Sosial								
		1	Jumlah Fakir Miskin yang mandiri	orang	-			400	400	Indikator Tujuan PD	RPD 2025-2026 (Indikator Baru)
		2	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	-			0,093	0,093	Indikator Tujuan PD	
		3	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks	-			4,83	4,83	Indikator Sasaran PD	
		4	Persentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	%	94,87	95%	95%	100	100	Indikator Sasaran PD	
		5	Persentase PSKS yang diberdayakan	%	91,60	92%	92%	92,01	92,01	Indikator Sasaran PD	
		6	Persentase PMKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial	%	100	21%	21%	100	100	Indikator Sasaran PD	
		7	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	-			85,5	85,5	Indikator Program PD	
		8	persentase PSKS yang berperan aktif dalam Pemberdayaan Sosial	%	58,33	66%	66%	67	76	Indikator Program PD	
		9	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan perlindungan dan jaminan sosial	%	94,87	91%	91%	100	100	Indikator Program PD	
		10	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	%	100	100%	100%	100	100	Indikator Program PD	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
		11	Persentase pelayanan perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana	%	100	100%	100%	100	100	Indikator Program PD	
		12	Persentase Pengelolaan Taman makam Pahlawan dalam kondisi baik	%	100	100%	100%	100	100	Indikator Program PD	
		1	Persentase PMKS yang dapat terpenuhi kebutuhan dasar minimal	%	97,01%	94%	94%			Indikator Tujuan PD	RPJMD 2019-2024 (Indikator Lama)
		2	Persentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	%	94,87%	95%	95%			Indikator Sasaran PD	
		3	Persentase PMKS yang diberdayakan	%	91,60%	92%	92%			Indikator Sasaran PD	
		4	Persentase PMKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial	%	-	21%	21%			Indikator Sasaran PD	
		5	persentase PSKS yang berperan aktif dalam Pemberdayaan Sosial	%	58,33%	66%	66%			Indikator Program PD	
		6	persentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	%	94,87%	91%	91%			Indikator Program PD	
		7	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	%	100%	100%	100%			Indikator Program PD	
		8	Persentase perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana	%	100%	100%	100%			Indikator Program PD	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
		9	Persentase Pengelolaan Taman makam Pahlawan dalam kondisi baik	%	100%	100%	100%			Indikator Program PD	
	II		Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
		1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	-	94,51	94,51	94,6	94,6	Indikator Tujuan Kota	RPD 2025-2026 (Indikator Baru)
		2	Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	-			0,093	0,093	Indikator Tujuan PD	
		3	Persentase pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diselesaikan	%	100	100%	100%	100	100	Indikator Sasaran PD	
		4	Persentase perempuan sebagai pengambil keputusan	%	30,22			25,02	25,02	Indikator Sasaran PD	
		5	persentase keluarga yang berkualitas	%	89,90	15%	15%	80	80	Indikator Sasaran PD	
		6	Persentase Anggaran APBD yang di ARG	%	100	100%	100%	100	100	Indikator Program PD	
		7	persentase RT yang memiliki data keluarga berkualitas	%	39,60	30%	30%	40	40	Indikator Program PD	
		8	Terpenuhinya Data terpilah gender dan anak	Dokumen	1	1 dokumen	1 dokumen	1	1	Indikator Program PD	
		9	Persentase Penanganan Pengaduan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan	%	100	100%	100%	100	100	Indikator Program PD	
		10	Persentase kasus kekerasan terhadap anak	%	0,0126	0,04%	0,04%	0,044	0,044	Indikator Program PD	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
		11	Persentase Lembaga yang aktif dalam Pemenuhan Hak Anak	%	42,20	42,20%	42,20%	100	100	Indikator Program PD	
		1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)		94,57	94,51	94,51			Indikator tujuan kota	RPJMD 2019-2024 (Indikator Lama)
		2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		78,94	77,22	77,22			Lanjutan indikator sasaran kota dan Indikator Tujuan PD	
		3	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan		13%	13,50%	13,50%			Indikator Sasaran PD	
		4	Persentase Pengaduan Tindak Kekerasan yang Diselesaikan		100%	100%	100%			Indikator Sasaran PD	
		5	persentase anggaran sub kegiatan tahun N+1 yang di ARG melalui PPRG		100%	100%	100%			Indikator Sasaran PD	
		6	persentase keluarga yang berkualitas		89,90%	15%	15%			Indikator Sasaran PD	
		7	Persentase pengaduan tindak kekerasan yang diselesaikan		100%	100%	100%			Indikator Sasaran PD	
		8	Prevalensi kekerasan terhadap anak		0,00036	0,002 nilai	0,002 nilai			Indikator Sasaran PD	
		9	persentase Alokasi Anggaran APBD yang di ARG		100%	100%	100%			Indikator Program PD	
		10	persentase RT yang memiliki data keluarga berkualitas		39,60%	30%	30%			Indikator Program PD	
		11	Jumlah dokumen Data terpilah gender dan anak		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen			Indikator Program PD	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
		12	persentase penanganan pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan		100%	100%	100%			Indikator Program PD	
		13	Prevalesi kasus kekerasan terhadap anak		0,00036	0,002	0,002			Indikator Program PD	
		14	Persentase Lembaga yang aktif dalam Pemenuhan Hak Anak		42,20%	42,20%	42,20%			Indikator Program PD	
		15	Persentase kasus kekerasan terhadap anak		0,0126	0,04%	0,04%			Indikator Program PD	
c.			Fokus Seni Budaya dan Olahraga								
	I		Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga								
		1	Persentase peningkatan prestasi kepemudaan dan olahraga	%	2,9			3	3	Indikator Tujuan PD	RPD 2025-2026 (Indikator Baru)
		2	Persentase peningkatan pemuda aktif berprestasi	%	2,5			3	3	Indikator Sasaran PD	
		3	Persentase peningkatan prestasi keolahragaan	%	5,8			6	6	Indikator Sasaran PD	
		4	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks	3,58			3,58	3,58	Indikator Sasaran PD	
		5	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	82,6			82,6	82,6	Indikator Program PD	
		6	Jumlah pemuda aktif berdaya saing	orang	50			81	81	Indikator Program PD	
		7	Jumlah Prestasi Olahraga	medali	49			128	128	Indikator Program PD	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1	Jumlah prestasi pemuda		205	18 prestasi	18 prestasi			Indikator Tujuan PD	RPJMD 2019-2024 (Indikator Lama)
		2	Jumlah pemuda/ group ditingkat kota yang memenuhi standar kompetisi tingkat provinsi		80	32 pemuda/ group	32 pemuda/ group			Indikator Sasaran PD	
		3	Persentase Kualitas Sarpras		100%	100%	100%			Indikator Sasaran PD	
		4	Persentase peningkatan pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan		111%	30%	30%			Indikator Program PD	
		5	Persentase peningkatan pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan		63%	20%	20%			Indikator Program PD	
	II		Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan								
		1	Jumlah pelaku Seni Budaya yang ada di Kota Madiun	Orang	252			252	252	Indikator Tujuan PD	RPD 2025-2026 (Indikator Baru)
		2	Jumlah pelaku Seni Budaya yang Aktif	Orang	73			75	75	Indikator Sasaran PD	
		3	Jumlah cagar budaya dan WBTB yang berpotensi jadi destinasi wisata	Obyek	2	7	7	2	2	Indikator Program PD	
		4	Jumlah event/kegiatan pelestarian kebudayaan	kali	15			15	15	Indikator Program PD	
		5	Jumlah event/kegiatan pelestarian kesenian tradisional	Kali	15			15	15	Indikator Program PD	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1	Jumlah kesenian dan kebudayaan yang terlestarikan		65	67	67			Indikator Tujuan PD	RPJMD 2019-2024 (Indikator Lama)
		2	Jumlah pelaku seni budaya yang melakukan pagelaran		231 orang / group	46 orang/ group	46 orang/ group			Indikator Sasaran PD	
		3	jumlah cagar budaya dan WBTB yang berpotensi jadi destinasi wisata		6	7	7			Indikator Sasaran PD	
		4	persentase seni budaya yang dilestarikan		200%	100%	100%			Indikator Program PD	
		5	persentase benda/bangunan cagar budaya yang dilestarikan		100%	100%	100%			Indikator Program PD	
		6	Persentase SDM, Lembaga dan pranata kesenian yang dibina		100%	100%	100%			Indikator Program PD	
II			ASPEK PELAYANAN UMUM								
a			Fokus Lelayanan Urusan Pemerintahan Wajib								
	1		Terkait Pelayanan Dasar								
	I		Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan								
		1	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	11,82	11,16	11,67	11,83	11,82	Indikator Sasaran Kota dan Indikator Tujuan PD	RPD 2025-2026 (Indikator Baru)
		2	Kompetensi Kelulusan sesuai SNP	%	100			100	100	Indikator Sasaran Kota	
		3	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,44	14,43	14,43	14,46	14,46	Indikator Tujuan PD	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4	Persentase APM PAUD, SD dan SMP	%	100	100%	100%	100	100	Indikator Sasaran	
		5	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Nilai	4,85			4,86	4,86	Indikator Sasaran PD	
		6	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	85,25			85,3	85,3	Indikator Program PD	
		7	Angka Partisipasi Murni Usia 7-12 Tahun Angka Partisipasi Murni Usia 13-15 Tahun Angka Partisipasi Murni Usia 5-6 Tahun	%	100			100	100	Indikator Program PD	
		8	Persentase muatan kurikulum yang dikembangkan	%	100			100	100	Indikator Program PD	
		9	Persentase Tenaga Pendidik yang bersertifikasi	%	62,8	25%	25%	64	64	Indikator Program PD	
		1	Rata-rata Lama Sekolah		11,82	11,16	11,67			Indikator sasaran kota	RPJMD 2019-2024 (Indikator Lama)
		2	Harapan Lama Sekolah		14,44	14,43	14,43			Indikator sasaran kota	
		3	Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan yang bersertifikat Pendidik		68%	67%	67%			Indikator Tujuan PD	
		4	Angka Partisipasi PAUD dan Pendidikan Dasar		100%	100%	100%			Indikator Tujuan PD	
		5	APM Paud, SD, dan SMP		105,48%	100%	100%			Indikator Sasaran PD	
		6	Persentase Guru, kasek dan Pengawas berkompetensi		68%	67%	67%			Indikator Sasaran PD	
		7	Persentase sekolah yang memenuhi SNP		100%	100%	100%			Indikator Sasaran PD	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
		8	Presentase Sekolah yang Berkurikulum SNP		100%	100%	100%			Indikator Sasaran PD	
		9	Wajib belajar 9 tahun		100%	100%	100%			Indikator Program PD	
		10	Presentase Sekolah yang Berkurikulum SNP		100%	100%	100%			Indikator Program PD	
		11	Persentase Tenaga Pendidik Bersertifikasi yang Berprestasi		68%	25%	25%			Indikator Program PD	
	II		Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan								
		1	Angka Harapan Hidup	Skor	73,44	72,83	73,13	73,44	73,70	Indikator Sasaran Kota	RPD 2025-2026 (Indikator Baru)
		2	Menurunnya Prevelensi Stunting	%	12,8			6,3	10,8	Indikator Sasaran Kota	
		3	Persentase Keluarga Sehat	%	57	56%	57%	57	57	Indikator Tujuan PD	
		4	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	Nilai	0,57	0,56	0,57	0,57	0,57	Indikator Sasaran PD	
		5	Rata-Rata Indeks Pelayanan Publik Puskesmas dan RSUD di Kota Madiun	Skor	4,78			4,78	4,78	Indikator Sasaran PD	
		6	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks	4,38			4,39	4,39	Indikator Sasaran PD	
		7	Nilai SAKIP Perangkat daerah	Nilai	88			88,1	88	Indikator Program PD	
		8	Persentase Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	%	71			71	71	Indikator Program PD	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
		9	Persentase Indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	%	91,67	75,00%	73,32%	75	75	Indikator Program PD	
		10	Persentase kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan yang sesuai standar	%	95,5	92%	92%	95	95	Indikator Program PD	
		11	Persentase Fasilitas Pelayanan Farmasi, Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) dan Depot Air Minum (DAM) sesuai Standar	%	88,5	89%	91,00%	89	89	Indikator Program PD	
		1	Angka Harapan Hidup		73,44	72,83	73,13			Indikator sasaran kota	RPJMD 2019-2024 (Indikator Lama)
		2	Persentase Keluarga Sehat		57%	56%	57%			Indikator tujuan PD	
		3	Persentase rumah tangga sehat		71%	72,00%	65,50%			Indikator Sasaran PD	
		4	Persentase rumah sehat		89,7%	90,00%	90,00%			Indikator Sasaran PD	
		5	Persentase rata-rata upaya kesehatan bersumber masyarakat berstrata puri		86,43%	63,00%	80,67%			Indikator Sasaran PD	
		6	Indeks Keluarga Sehat		0,57	0,56	0,57			Indikator Sasaran PD	
		7	Persentase tenaga kesehatan yang teregristrasi		95,50%	92,00%	92,00%			Indikator Sasaran PD	
		8	Persentase capaian aplikasi sarana prasarana kesehatan (ASPAK) Puskesmas		86,13%	85,00%	85,78%			Indikator Sasaran PD	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
		9	Persentase peningkatan sarana pelayanan kefarmasian yang beroperasi sesuai standart		78%	78,00%	78,00%			Indikator Sasaran PD	
		10	Persentase masyarakat Kota Madiun yang memiliki jaminan kesehatan		100,30%	100,00%	99,00%			Indikator Sasaran PD	
		11	Persentase rata-rata IKM puskesmas se-Kota Madiun		87,66%	86,60%	86,6			Indikator Sasaran PD	
		12	Rata - rata nilai PKP Puskesmas		96,71%	88,11%	97,72%			Indikator Sasaran PD	
		13	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target		91,67%	75,00%	73,32%			Indikator Program PD	
		14	Persentase kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan yang sesuai standar		95,5%	92%	92%			Indikator Program PD	
		15	Persentase Fasilitas Pelayanan Farmasi, Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) dan Depot Air Minum (DAM) sesuai Standar		88,5%	89%	91,00%			Indikator Program PD	
		16	Persentase Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang mengalami kenaikan strata		86,43%	63,00%	80,67%			Indikator Program PD	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
	III		Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat								
		1	Indeks Ketentraman	Skor	82,88	77,2	77,2	83	83	Indikator Sasaran Kota	RPD 2025-2026 (Indikator Baru)
		2	Indeks Rasa Aman	Skor	82,47	76,35	82,18	83	83	Indikator Tujuan PD	
		3	Persentase masyarakat yang taat Perda dan Perwal	%	98,95	98%	98%	98	98	Indikator Sasaran PD	
		4	Persentase Tingkat Penanganan Kejadian Kebakaran	%	100	100%	100%	100	100	Indikator Sasaran PD	
		5	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	skor	4,24			4,26	84	Indikator Sasaran PD	
		6	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	84,25			84	83	Indikator Program PD	
		7	Persentase Kasus K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan) yang diselesaikan	%	100	97%	97%	98	98	Indikator Program PD	
		8	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	%	100	100%	100%	100	100	Indikator Program PD	
		1	Indeks Resiko Bencana	Indeks	99,64	112 indeks	112 indeks	95,5	99,64	Indikator Tujuan PD	
		2	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks	4,66			4,7	4,7	Indikator Tujuan PD	
		3	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,46			0,54	0,54	Indikator sasaran PD	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Indeks	90,19			90,21	90,21	Indikator sasaran PD	
		5	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	85,75			86	86	Indikator Sasaran dan Program PD	
		6	Persentase Korban Bencana Yang Ditangani	%	100	100%	100%	100	100	Indikator Program PD	
		1	Indeks Ketentraman		81,88	77,2	77,2			Lanjutan Indikator Tujuan Kota	RPJMD 2019-2024 (Indikator Lama)
		2	Indeks Rasa Aman		82,47	76,35	82,18			Lanjutan Indikator sasaran kota	
		3	Nilai Keamanan dan Ketertiban		79,25	76,3	76,3			Indikator Tujuan PD	
		4	Persentase masyarakat yang taat Perda dan Perwal		98,95%	98%	98%			Indikator Sasaran PD	
		5	Persentase Tingkat Penanganan Kejadian Kebakaran		100%	100%	100%			Indikator Sasaran PD	
		6	Persentase Kasus K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		97%	97%	97%			Indikator Program PD	
		7	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran		100%	100%	100%			Indikator Program PD	
		1	Indeks Resiko Bencana		108.85 indeks	112 indeks	112 indeks			Indikator Tujuan PD	
		2	Persentase Korban Bencana yang tertangani		100%	100%	100%			Indikator Sasaran PD	
		3	Persentase terlatihnya masyarakat dalam penanganan bencana		100%	100%	100%			Indikator Sasaran PD	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4	Persentase bantuan bencana kepada korban bencana		100%	100%	100%			Indikator Sasaran PD	
		5	Persentase penyampaian informasi kebencanaan secara berkala		100%	100%	100%			Indikator Sasaran PD	
		6	Persentase sarana prasarana penanggulangan bencana dalam kondisi baik		100%	100%	100%			Indikator Sasaran PD	
		7	Jumlah Destana yang terbentuk		6 desa/ kelurahan	7 desa/ kelurahan	7 desa/ kelurahan			Indikator Sasaran PD	
		8	Persentase kesiapsiagaan masyarakat guna menurunkan korban dan kerugian material akibat bencana		0%	100%	100%			Indikator Sasaran PD	
		9	Persentase Korban Bencana Yang Ditangani		100%	100%	100%			Indikator Program PD	
		10	Persentase Tingkat Pemenuhan atau Kecukupan Sarana Dan Prasarana Penanggulangan Bencana		0%	0%	0%			Indikator Program PD	
	2		Tidak Terkait Pelayanan Dasar								
	I		Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja								
		1	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	skor	5.85	5	5	5,8	5,61	Indikator Tujuan PD	RPD 2025-2026 (Indikator Baru)
		2	persentase calon tenaga kerja yang ditempatkan	%	407	30%	30%	90	90	Indikator Tujuan PD	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3	persentase perselisihan hubungan industrial yang terselesaikan	%	100	100%	100%	100	100	Indikator Tujuan PD	
		4	Persentase penyerapan Tenaga Kerja	%	77,49			50	50	Indikator Sasaran PD	
		5	Persentase tenaga kerja yang terlindungi	%	100			75	75	Indikator Sasaran PD	
		6	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks	4,11			4,11	4,11	Indikator Sasaran PD	
		7	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	82			81,02	81,02	Indikator Program PD	
		8	Persentase jumlah peserta pelatihan yang berbasis kompetensi	%	100	35%	35%	30	30	Indikator Program PD	
		9	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan melalui informasi bursa kerja	%	371	15%	15%	15	15	Indikator Program PD	
		10	persentase perusahaan yang mengesahkan peraturan perusahan	%	16	16%	16%	16	16	Indikator Program PD	
		1	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)		5,85	5	5			Lanjutan Indikator sasaran kota	RPJMD 2019-2024 (Indikator Lama)
		2	persentase calon tenaga kerja yang ditempatkan		407	30%	30%			Indikator Tujuan PD	
		3	persentase perselisihan hubungan industrial yang terselesaikan		100%	100%	100%			Indikator Tujuan PD	
		4	persentase calon tenaga kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi		69,57%	50%	50%			Indikator Sasaran PD	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
		5	persentase peningkatan pemberian informasi peluang kerja kepada pencari kerja		469	25%	25%			Indikator Sasaran PD	
		6	persentase perusahaan yang menerapkan perlindungan tenaga kerja		100%	100%	100%			Indikator Sasaran PD	
		7	persentase peningkatan tenaga kerja sektor informal yang mendapatkan jaminan sosial		19%	10%	10%			Indikator Sasaran PD	
		8	Persentase jumlah peserta pelatihan yang berbasis kompetensi		100%	35%	35%			Indikator Program PD	
		9	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan melalui informasi bursa kerja		55	15%	15%			Indikator Program PD	
		10	persentase perusahaan yang mengesahkan peraturan perusahan		28,80%	16%	16%			Indikator Program PD	
	II		Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil								
		1	Persentase penduduk yang tertib administrasi kependudukan	%	88,08			87,75	88,1	Indikator Tujuan PD	RPD 2025-2026 (Indikator Baru)
		2	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	99,11	92,98%	92,98	96,75	99,13	Indikator Sasaran PD	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3	Nilai Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks	4,94			4,95	4,95	Indikator Sasaran PD	
		4	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	84,35			84,4	84,4	Indikator Program PD	
		5	Jumlah stakeholder yang memanfaatkan data kependudukan	%	34 stakeholder			17 stakeholder	35 stakeholder	Indikator Program PD	
		6	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan	%	98,16			94	98,3	Indikator Program PD	
		7	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil	%	99,83			99,5	99,95	Indikator Program PD	
		1	Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		91,5	A-87	91,5			Indikator Tujuan PD	RPJMD 2019-2024 (Indikator Lama)
		2	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil		99,11	92,98%	92,98			Indikator Sasaran PD	
		3	Persentase Pengaduan Masyarakat yang terselesaikan		100%	80,00%	100			Indikator Sasaran PD	
		4	Persentase Penerbitan Dokumen Kependudukan		100%	85%	100			Indikator Program PD	
		5	Persentase Penerbitan Dokumen Akta Pencatatan Sipil		100%	94,75%	100			Indikator Program PD	
		6	Akurasi database kependudukan		100%	99,20%	99,2			Indikator Program PD	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
	III		Urusan Pemerintahan Bidang Pangan								
		1	Persentase Angka Kecukupan Protein	%	110,5			100	100	Indikator Sasaran Kota	RPD 2025-2026 (Indikator Baru)
		2	persentase Angka Kecukupan Energi (%)	%	97			100	100	Indikator Sasaran Kota dan Indikator Program PD	
		3	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	85,32	81,04	81,04	81,04	81,04	Indikator Tujuan PD	
		4	Skor Pola Pangan Harapan	skor	96,4	95,8	95,8	95,8	95,8	Indikator Sasaran PD	
		5	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	83,75			81,05	81,05	Indikator Program PD	
		6	Persentase Pangan Segar Aman yang Teruji (%)	%	80			80	80	Indikator Program PD	
		7	Persentase Daerah Rentan dan Rawan Pangan	%	22	22%	22%	22	22	Indikator Program PD	
		1	Indeks Ketahanan Pangan		85,32	81,04	81,04			Indikator Tujuan PD	RPJMD 2019-2024 (Indikator Lama)
		2	Skor Pola Pangan Harapan		96,4	95,8	95,8			Indikator Sasaran PD	
		3	persentase Angka Kecukupan Energi (%)		97	100	100			Indikator Program PD	
		4	Persentase Pangan Segar Aman yang Teruji (%)		80	80	80			Indikator Program PD	
		5	Persentase Daerah Rentan dan Rawan Pangan		22	22%	22%			Indikator Program PD	
	IV		Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								
		1	*Contraception Prevalency Rate (CPR)* di atas rata-rata nasional	%	75,51	64,00%	73,32%	68,5	68,5	Indikator Sasaran PD	RPD 2025-2026 (Indikator Baru)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2	Menurunnya Unmet Need	%	4,73	7,00%	6,74%	6,8	6,8	Indikator Program PD	
		3	Persentase Kepesertaan Anggota Tribina PUS yang ber-KB	%	87,51	83,00%	86,16%	87,7	87,7	Indikator Program PD	
		4	Meningkatnya Jumlah SSK	SSK	13	9 SSK	11 SSK	14	14	Indikator Program PD	
		5	Meningkatnya Kampung KB yang berstandar paripurna	Kampung KB	7	6	7	7	7	Indikator Program PD	
		1	*Contraception Prevalency Rate diatas rata-rata nasional*		75,51%	64,00%	73,32%			Indikator Sasaran PD	RPJMD 2019-2024 (Indikator Lama)
		2	Menurunnya Unmet Need		4,73%	7,00%	6,74%			Indikator Program PD	
		3	Meningkatnya kepesertaan anggota Tribina PUS yang ber-KB		87,51%	83,00%	86,16%			Indikator Program PD	
		4	Meningkatnya Jumlah SSK		13 SSK	9 SSK	11 SSK			Indikator Program PD	
		5	Meningkatnya Kampung KB yang berstandar paripurna	Kampung KB	7	6	7			Indikator Program PD	
	V		Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika								
		1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	2,86	2,90 (BAIK)	2,9	3	3	Indikator Sasaran Kota	RPD 2025-2026 (Indikator Baru)
		2	Indeks Domain Layanan SPBE	indeks	2,86	3,1	3,1	3,2	3,2	Indikator Tujuan PD	
		3	Persentase layanan e-gov yg sudah terintegrasi	%	68			69	69	Indikator Sasaran PD	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	Skor	96,71	93	93	94	94	Indikator Sasaran PD	
		5	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks	4,65			4,67	4,67	Indikator Sasaran PD	
		6	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	84,1			82,25	84	Indikator Program PD	
		7	Persentase OPD yang memenuhi Standart Layanan Informasi Publik	%	86	82%	82%	84	84	Indikator Program PD	
		8	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	100%	100%	100	100	Indikator Program PD	
		1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		2,86	2,90 (BAIK)	2,9			Lanjutan Indikator Sasaran Kota	RPJMD 2019-2024 (Indikator Lama)
		2	Indeks Domain Layanan SPBE		3,37	3,1	3,1			Indikator Tujuan PD	
		3	Indeks Domain Manajemen SPBE		2,18	2,01	2,01			Indikator Tujuan PD	
		4	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik		99,25	93	93			Indikator Sasaran PD	
		5	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo		100%	100%	100%			Indikator Sasaran PD	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6	Persentase OPD yang memenuhi Standart Layanan Informasi Publik		89%	82%	82%			Indikator Program PD	
		7	Persentase perangkat daerah yang saling terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo		100%	100%	100%			Indikator Program PD	
	VI		Urusan Pemerintahan Bidang Statistik								
		1	Tingkat kematangan data statistik sektoral	Skor	2,88			2,6	2,6	Indikator Sasaran PD	RPD 2025-2026 (Indikator Baru)
		2	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	dokumen	1	1	1	1	1	Indikator Program PD	
		1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah		100%	100%	100%			Indikator Sasaran PD	RPJMD 2019-2024 (Indikator Lama)
		2	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan		20	1	1			Indikator Program PD	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
	VII		Urusan Pemerintahan Bidang Persandian								
		1	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	skor	569			560	560	Indikator Sasaran PD	RPD 2025-2026 (Indikator Baru)
		2	Presentase informasi Daerah yang wajib diamankan dengan persandian	%	100	100%	100%	100	100	Indikator Program PD	
		1	Presentase informasi Daerah yang wajib diamankan dengan persandian		100%	100%	100%			Indikator Sasaran PD	RPJMD 2019-2024 (Indikator Lama)
		2	Persentase OPD yang menggunakan layanan persandian untuk pengamanan informasi		100%	100%	100%			Indikator Program PD	
	VIII		Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan								
		1	Nilai tingkat kegemaran membaca	skor	3,095			3,1	3,1	Indikator Sasaran Kota	RPD 2025-2026 (Indikator Baru)
		2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Madiun	Indeks	18,47	9,1	9,1	18,5	18,5	Indikator Sasaran PD	
		3	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks	4,66			4,2	4,2	Indikator Sasaran PD	
		4	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	87,5			82	82	Indikator Program PD	
		5	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	%	35,84	5,95%	5,95%	36,79	36,79	Indikator Program PD	
		6	Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan	%	115	38%	38%	94	94	Indikator Program PD	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat		3,095	2,46	2,46			Indikator Tujuan PD	RPJMD 2019-2024 (Indikator Lama)
		2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Madiun		18,47	9,1	9,1			Indikator Sasaran PD	
		3	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan		35,84%	5,95%	5,95%			Indikator Program PD	
		4	Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan		115%	38%	38%			Indikator Program PD	
	IX		Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan								
		1	Indeks Penyelenggaraan Kearsipan	Indeks	87,06	59	59	75	75	Indikator Tujuan PD	RPD 2025-2026 (Indikator Baru)
		2	Persentase Perangkat Daerah yang Tertib Arsip	%	15	9%	9%	10	9	Indikator Sasaran PD	
		3	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	Skor	88,75	90%	90%	90	90	Indikator Program PD	
		4	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Skor	98,3	8,8	8,8	8,8	8,8	Indikator Program PD	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1	Indeks Penyelenggaraan Kearsipan		87,6	59	59			Indikator Tujuan PD	RPJMD 2019-2024 (Indikator Lama)
		2	Persentase Perangkat Daerah yang Tertib Arsip		15%	9%	9%			Indikator Sasaran PD	
		3	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja (alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan		88,75 skor	90%	90%			Indikator Program PD	
		4	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat		98,3 skor	8,8	8,8			Indikator Program PD	
	4		Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan								
	I		Sekretariat Daerah								
		1	Indeks Reformasi Biroktrasi Pemerintah	Nilai	(A-) 87,95	(BB) 70,01	(BB) 70,01	(A) 80,01	(A) 80,01	Indikator Tujuan Kota	RPD 2025-2026 (Indikator Baru)
		2	Nilai Implementasi SAKIP Kota Madiun	Nilai	80,08	A (80,01)	A (80,01)	80,2	80,2	Indikator Sasaran Kota	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai	2,98 (sedang)	Sangat Tinggi	3,41 (Tinggi)	3,05 (sedang)	3,05 (sedang)	Indikator Sasaran Kota	
		4	Persentase ketercapaian realisasi rencana aksi reformasi birokrasi terhadap target	%	98			91	91	Indikator Tujuan PD	
		5	Indeks Berakhlak	Indeks	63			67	67	Indikator Sasaran PD	
		6	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,3			4.5	4,5	Indikator Sasaran PD	
		7	Tingkat Kematangan Organisasi	%	46,12			46,2	46,2	Indikator Sasaran PD	
		8	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa	Indeks	73,65			71	71	Indikator Sasaran PD	
		9	Nilai Komponen Pengukuran Kinerja SAKIP	Nilai	23,89			24.5	24,5	Indikator Sasaran PD	
		10	Nilai Komponen Pelaporan Kinerja SAKIP	Nilai	12,44			12.5	12,5	Indikator Sasaran PD	
		11	Indeks Kualitas Kebijakan	Indeks	50			56	56	Indikator Sasaran PD	
		12	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	76,23			67	67	Indikator Sasaran PD	
		13	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	85,15			85	85,5	Indikator Program PD	
		14	Persentase Penyediaan Data Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	%	100%			100%	100%	Indikator Program PD	
		15	Persentase Penyediaan Data Bidang Perekonomian dan Pembangunan	%	100%			100%	100%	Indikator Program PD	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1	Nilai Indeks reformasi birokrasi		A- (87.95)	(BB) 70,01	(BB) 70,01			Lanjutan Indikator Tujuan Kota	RPJMD 2019-2024 (Indikator Lama)
		2	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah Daerah		A (80.08)	A (80,01)	A (80,01)			Lanjutan indikator sasaran kota	
		3	Persentase Penyediaan data dan informasi yang mutakhir, valid, komperehensif, aman, transparan dan cepat dalam rangka fasilitasi pengambilan keputusan		100%	100%	100%			Indikator Tujuan PD	
		4	Nilai Laporan Penyelanggaraan Pemerintah Daerah		2,98 (Sedang)	Sangat Tinggi	3,41 (Tinggi)			Lanjutan Indikator Sasaran Kota	
		5	Indeks kepuasan masyarakat (IKM) Pemerintah Kota Madiun		88,028	86 (baik)	86,964			Lanjutan Indikator Sasaran Kota	
		6	Nilai indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		34.73 Istimewa	B	B			Indikator Sasaran Rutin Semua PD dan Indikator Tujuan Kecamatan	
		7	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah		A	A	A			Indikator Program Rutin Semua PD	
		8	Persentase Indeks RB Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Madiun bernilai baik		78,57%	76%	76%			Indikator Tujuan PD	
		9	Persentase Nilai SAKIP Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Madiun yang berpredikat BB		100%	100%	100%			Indikator Sasaran PD	
		10	Persentase IKM Unit Kerja Pelayanan yang berpredikat baik		100%	100%	100%			Indikator Sasaran PD	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
		11	Persentase Penyediaan Data Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		100%	100%	100%			Indikator Program PD	
		12	Persentase Penyediaan Data Bidang Perekonomian dan Pembangunan		100%	100%	100%			Indikator Program PD	
	II		Sekretariat DPRD								
		1	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks	3,94			3,96	3,96	Indikator Tujuan PD	RPD 2025-2026 (Indikator Baru)
		2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	indeks	90,37			87	87	Indikator Sasaran PD	
		3	Persentase Fasilitasi Trifungsi DPRD yang sesuai Standar Pelayanan	%	100			100	100	Indikator Program PD	
		2	Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD		90.299	86	86			Indikator Tujuan PD	RPJMD 2019-2024 (Indikator Lama)
		4	Persentase Tertib Administrasi		100%	100%	100%			Indikator Sasaran PD	
		5	Persentase Kompetensi Sumber Daya Manusia		100%	100%	100%			Indikator Sasaran PD	
		6	Persentase Sarana dan Prasarana yang berkualitas		100%	100%	100%			Indikator Sasaran PD	
		7	Persentase Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum yang Sesuai dengan Standart Pelayanan		100%	100%	100%			Indikator Sasaran PD	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
		8	Persentase Fasilitasi Penganggaran APBD yang Sesuai Dengan Standart Pelayanan		100%	100%	100%			Indikator Sasaran PD	
		9	Persentase Fasilitasi Pengawasan Pelaksanaan APBD yang Sesuai dengan Standart Pelayanan		100%	100%	100%			Indikator Sasaran PD	
		10	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap layanan Tugas dan Fungsi		90.299	82	85			Indikator Program PD	
	5		Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan								
	III		Perencanaan								
		1	Nilai Sakip Pada Komponen Perencanaan Kinerja	Nilai	26			25,8	25,8	Indikator Tujuan PD	RPD 2025-2026 (Indikator Baru)
		2	Nilai Sakip Pada Komponen Perencanaan	Nilai	26	25,5	25,5	25,8	25,8	Indikator Sasaran PD	
		3	Nilai Pelayanan Publik Perangkat Daerah	skor	87			86	86	Indikator Sasaran PD	
		4	Persentase kinerja program yang mencapai target	%	100			94	94	Indikator Sasaran PD	
		5	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	88			89	89	Indikator Program PD	
		6	Persentase dokumen perencanaan Tingkat kota yang tersusun	%	100			100	100	Indikator Program PD	
		7	Persentase Rencana Aksi Daerah (Tematik) yang sinkron dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD)	%	100			100	100	Indikator Program PD	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1	Indeks Perencanaan		34	36	36			Indikator Tujuan PD	RPJMD 2019-2024 (Indikator Lama)
		2	Indeks Kualitas RPJMD		34	35	35			Indikator Sasaran PD	
		3	Indeks Kualitas RKPD		33	35	35			Indikator Sasaran PD	
		4	Persentase capaian kinerja program RKPD		94%	94%	94%			Indikator Sasaran PD	
		5	Nilai SAKIP pada komponen perencanaan		24	25,5	25,5			Indikator Sasaran PD	
		6	persentase program penangan covid-19 yang dilaksanakan		0	0	0			Indikator Sasaran PD	
		7	persentase sasaran Perangkat Daerah yang berbasis outcome		100%	94%	94%			Indikator Sasaran PD	
		8	Persentase Perangkat Daerah yang Dokumen Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Sesuai Ketentuan		100%	100%	100%			Indikator Program PD	
		9	Persentase Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah		100%	100%	100%			Indikator Program PD	
	IV		Keuangan								
		1	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP/ WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Indikator Sasaran Kota	RPD 2025-2026 (Indikator Baru)
		2	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	%	100			100	100	Indikator Tujuan PD	
		3	Persentase LKPD yang memenuhi asersi audit	%	100			100	100	Indikator Sasaran PD	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks	4,34			4,4	4,4	Indikator Sasaran PD	
		5	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	84,1			84,2	84,2	Indikator Program PD	
		6	Realisasi kinerja keuangan yang memenuhi target	%	100	100%	100%	100	100	Indikator Program PD	
		7	Pengelolaan Barang Milik Daerah yang tertib dan optimal	%	100			80	100	Indikator Program PD	
		1	Capaian Target Pajak Daerah	%	100	100%	100% (Rp. 110.000.000.000)	2	100	Indikator Tujuan PD	
		2	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli daerah dari sektor pajak	%	6,89			2	2	Indikator Sasaran PD	
		3	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	%	4,49			4,5	4,5	Indikator Sasaran PD	
		4	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	%	81,35			81,5	81,36	Indikator Program PD	
		5	Persentase Realisasi Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	%	100			100	100	Indikator Program PD	
		1	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan		WTP	WTP	WTP			Lanjutan Sebelumnya Indikator Sasaran Kota Menjadi Indikator Tujuan PD	RPJMD 2019-2024 (Indikator Lama)
		2	Persentase pemanfaatan aset daerah		99%	96%	96%			Indikator Sasaran PD	
		3	Persentase tersusunnya Laporan BTT		100%	100%	100%			Indikator Sasaran PD	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4	Persentase Pengelolaan kas daerah yang akuntabel		100%	100%	100%			Indikator Sasaran PD	
		5	Persentase Tersusunnya dokumen Perencanaan Pengangggaran yang tepat waktu dan berkualitas		100%	100%	100%			Indikator Sasaran PD	
		6	Persentase Laporan Keuangan OPD yang sesuai SAP		100%	100%	100%			Indikator Sasaran PD	
		7	Persentase bidang tanah pemerintah kota yang bersertifikat		92%	80%	90%			Indikator Sasaran PD	
		8	Realisasi kinerja keuangan yang memenuhi target		100%	100%	100%			Indikator Program PD	
		9	Pengelolaan Aset yang berkondisi baik		100%	100%	100%			Indikator Program PD	
		1	Capaian Target Pajak Daerah		Rp114.143. 313.127,67	100%	100% (Rp110.000. 000.000,00)			Indikator Tujuan PD	
		2	Persentase peningkatan target pajak daerah		13%	5%	5%			Indikator Tujuan PD	
		3	persentase peningkatan objek pajak yang dipantau dengan IT		10%	5%	5%			Indikator Sasaran PD	
		4	persentase peningkatan pembayaran pajak melalui transaksi elektronik		52%	5%	5%			Indikator Sasaran PD	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
		5	persentase Pencapaian Target Pajak daerah berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah		100%	100%	100%			Indikator Sasaran PD	
		6	persentase Peningkatan Data Potensi Wajib Pajak Daerah		11%	10%	10%			Indikator Program PD	
		7	Peningkatan Capaian Penagihan Pajak Daerah		45%	43%	43%			Indikator Program PD	
	IV		Kepegawaian								
		1	Nilai Indeks NSPK	Indeks	belum ada nilai dari BKN			77,5	77,5	Indikator Tujuan PD	RPD 2025-2026 (Indikator Baru)
		2	Indeks Sistem Merit	Indeks	285			285	285	Indikator Sasaran PD	
		3	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Indeks	87,86			87,85	87,85	Indikator Sasaran PD	
		4	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks	4,49			4,49	4,49	Indikator Sasaran PD	
		5	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	86			86	86	Indikator Program PD	
		6	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Terselesaikan	%	100			100	100	Indikator Program PD	
		1	Indeks Sistem Merit		285	250	250			Indikator Tujuan PD	RPJMD 2019-2024 (Indikator Lama)
		2	Prosentase Penempatan Pegawai dalam Jabatan sesuai dengan SKJ		63,22%	70%	70%			Indikator Sasaran PD	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3	Persentase kesesuaian usulan pengadaan sesuai dengan jumlah formasi yang dibutuhkan		100%	100%	100%			Indikator Sasaran PD	
		4	Persentase perencanaan ASN sesuai dengan kebutuhan		100%	100%	100%			Indikator Sasaran PD	
		5	Persentase SKP ASN yang bernilai baik (lebih dari 75)		100%	90%	90%			Indikator Sasaran PD	
		6	Persentase Pelanggaran Disiplin ASN		0,12%	0,25%	0,25%			Indikator Sasaran PD	
		7	Persentase terpenuhinya penggajian, penghargaan sesuai dengan aturan yang berlaku		100%	100%	100%			Indikator Sasaran PD	
		8	Persentase data kepegawaian yang mutakhir		100%	100%	100%			Indikator Sasaran PD	
		9	Persentase Pemberhentian ASN tepat waktu		100%	100%	100%			Indikator Sasaran PD	
		10	Nilai IKM Pelayanan Kepegawaian		87,86	87,7	87,7			Indikator Program PD	
	V		Pendidikan dan Pelatihan								
		1	Persentase Peningkatan Kualitas ASN	%	37,15			37	37,15	Indikator Sasaran PD	RPD 2025-2026 (Indikator Baru)
		2	Persentase Realisasi Pengembangan SDM	%	20	14%	14%	17	20	Indikator Program PD	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan komptenesi sesuai PP 11 Thn 2017		36,26%	37%	37%			Indikator Sasaran PD	RPJMD 2019-2024 (Indikator Lama)
		2	Persentase Realisasi Pengembangan SDM		16,10%	14%	14%			Indikator Program PD	
	VI		Penelitian dan Pengembangan								
		1	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	52,62	1950	53,96	54,3	54,3	Indikator sasaran Kota dan Indeks Sasaran PD	RPD 2025-2026 (Indikator Baru)
		2	persentase hasil kajian/ penelitian yang termanfaatkan sesuai isu strategis	%	100			100	100	Indikator Program PD	
		1	Indeks Inovasi Daerah		52,62	1950	53,96			Indikator Sasaran Kota dan Indikator Sasaran PD	RPJMD 2019-2024 (Indikator Lama)
		2	Indeks kualitas penelitian/kajian		36,6	36	36			Indikator Sasaran PD	
		3	persentase program SMART CITY yang dilaksanakan		85%	95%	95%			Indikator Sasaran PD	
		4	persentase peningkatan jumlah usulan jenis data untuk diajukan rekomendasi		95%	5%	5%			Indikator Sasaran PD	
		5	persentase hasil penelitian/kajian yang dapat dimanfaatkan		100%	100%	100%			Indikator Program PD	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
	6		Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan								
	VII		Inspektorat Daerah								
		1	Jumlah unit kerja yang mendapatkan predikat WBK/WBBM	Unit Kerja	0			1	1	Indikator Sasaran Kota	RPD 2025-2026 (Indikator Baru)
		2	Level Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Skor	3			3	3	Indikator Tujuan PD	
		3	Level Manajemen Resiko Indeks	Skor	2,856			2	2	Indikator Sasaran PD	
		4	Level Kapabilitas APIP	Skor	3			3	3	Indikator Sasaran PD	
		5	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks	4,49			4,55	4,50	Indikator Sasaran PD	
		6	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	85,75			85	84,50	Indikator Program PD	
		7	Persentase Temuan Hasil pengawasan yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi	%	94			94	94	Indikator Program PD	
		8	persentase Dokumen Kebijakan dan Sisdur Pengawasan serta Asistensi yang Terpenuhi	%	100	100%	100%	100	100	Indikator Program PD	
		1	Penilaian Mandiri SPIP		85,35	84	84			Indikator Tujuan PD	RPJMD 2019-2024 (Indikator Lama)
		2	Laporan keuangan tersampaikan tepat waktu		100%	100%	100%			Indikator Sasaran PD	
		3	Nilai IKM Inspektorat		89,4	91 indeks	91 indeks			Indikator Sasaran PD	
		4	Nilai Survey Kepuasan atas KInerja Inspektorat		4,36	4.25	4.25			Indikator Sasaran PD	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
		5	Persentase Tindak lanjut pengaduan masyarakat yang terselesaikan dengan cepat dan tepat		100%	100%	100%			Indikator Sasaran PD	
		6	Persentase tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan yang bersertifikat dan profesional		100%	100%	100%			Indikator Sasaran PD	
		7	Persentase Laporan BMD yang tersampikan secara tertib dan tepat waktu		100%	100%	100%			Indikator Sasaran PD	
		8	Persentase Rumusan Kebijakan Penyelenggaraan Pengawasan yang disusun sesuai dengan Etika dan Profesionalisme		100%	100%	100%			Indikator Sasaran PD	
		9	Persentase Laporan Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Administrasi Pengawasan yang tersampaikan secara tertib dan tepat waktu		100%	100%	100%			Indikator Sasaran PD	
		10	Persentase laporan tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal yang tersampaikan secara tertib dan tepat waktu		100%	100%	100%			Indikator Sasaran PD	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
		11	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Ketaatan yang Dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja perangkat daerah		100%	70%	70%			Indikator Sasaran PD	
		12	Persentase jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan kinerja yang dimanfaatkan untuk peningkatan kinerja perangkat daerah		100%	70%	70%			Indikator Sasaran PD	
		13	Persentase rekomendasi hasil pengawasan lainnya yang dimanfaatkan untuk peningkatan kinerja perangkat daerah		100%	70%	70%			Indikator Sasaran PD	
		14	Persentase rekomendasi hasil reviu rencana keuangan daerah yang dimanfaatkan untuk peningkatan kinerja keuangan daerah		100%	70%	70%			Indikator Sasaran PD	
		15	Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kota Madiun		83,1	81 nilai	81 nilai			Indikator Sasaran PD	
		16	Nilai rata - rata evaluasi SAKIP oleh Inspektorat minimal dalam kategori Baik pada perangkat daerah Kota Madiun		84,22	80,01	80,01			Indikator Sasaran PD	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
		17	Penilaian mandiri maturitas SPIP Terintegrasi			3.00	3.00			Indikator Sasaran PD	
		18	Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP		3	3.00	3.00			Indikator Sasaran PD	
		19	Jumlah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Madiun yang diusulkan untuk mendapatkan predikat menuju WBK		3 unit	1 unit	1 unit			Indikator Sasaran PD	
		20	Persentase rekomendasi rencana aksi hasil koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi yang dimanfaatkan untuk peningkatan kinerja perangkat daerah		94,36%	70%	70%			Indikator Sasaran PD	
		21	Persentase rekomendasi hasil reviu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dimanfaatkan untuk peningkatan kinerja perangkat daerah		100%	70%	70%			Indikator Sasaran PD	
		22	Indeks persepsi pegawai Inspektorat atas Kepuasan Kinerja Inspektorat Kota Madiun		3,51	4.00	4.00			Indikator Sasaran PD	
		23	Persentase realisasi dukungan layanan manajemen pengawasan internal		74%	80%	80%			Indikator Sasaran PD	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
		24	Persentase realisasi pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kota Madiun		100%	80%	80%			Indikator Sasaran PD	
		25	persentase OPD yang maturitas SPI nya level 3		100%	45%	45%			Indikator Program PD	
		26	persentase Dokumen Kebijakan dan Sisdur Pengawasan serta Asistensi yang Terpenuhi		100%	100%	100%			Indikator Program PD	
	7		Unsur Kewilayahan								
	VIII		Kecamatan								
		1	Indeks Pelayanan Publik di Kecamatan Manguharjo	Nilai	4,91	3,08	3,08	4,92	4,91	Indikator Tujuan PD	RPD 2025-2026 (Indikator Baru)
		2	Indeks Pelayanan Publik di Kecamatan Kartoharjo	Nilai	4,55	2,99	2,99	3	3	Indikator Tujuan PD	
		3	Indeks Pelayanan Publik di Kecamatan Taman	Nilai	4,78	3,7	3,52	4,8	4,8	Indikator Tujuan PD	
		4	Persentase Jumlah kelurahan yang terklasifikasi swasembada di Kecamatan Manguharjo	%	100	66%	66%	100	100	Indikator Sasaran PD	
		5	Persentase Jumlah kelurahan yang terklasifikasi swasembada di Kecamatan Kartoharjo	%	100	66%	66%	77	77	Indikator Sasaran PD	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6	Persentase Jumlah kelurahan yang terklasifikasi swasembada di Kecamatan Taman	%	100	55%	55%	100	100	Indikator Sasaran PD	
		7	Nilai SAKIP Kecamatan Manguharjo	Nilai	83,35			83,35	83,35	Indikator Sasaran dan Program PD	
		8	Nilai SAKIP Kecamatan Kartoharjo	Nilai	82,75			81	82,77	Indikator Sasaran dan Program PD	
		9	Nilai SAKIP Kecamatan Taman	Nilai	82,85			82,92	82,86	Indikator Sasaran dan Program PD	
		10	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Manguharjo	Indeks	92,45	90,03	90,03	92,45	92,45	Indikator Sasaran dan Program PD	
		11	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kartoharjo	Indeks	88,65	87,85	87,85	87,81	88,67	Indikator Sasaran dan Program PD	
		12	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Taman	Indeks	92,14	88,94	88,94	92,16	92,16	Indikator Sasaran dan Program PD	
		13	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah Kecamatan Manguharjo	%	100	100%	100%	100	100	Indikator Program PD	
		14	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah Kecamatan Kartoharjo	%	100	100%	100%	100	100	Indikator Program PD	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
		15	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah Kecamatan Taman	%	100	100%	100%	100	100	Indikator Program PD	
		16	Persentase kewenangan yang dijalankan Kecamatan Manguharjo (tidak dilaksanakan OPD lain)	%	100	100%	100%	100	100	Indikator Program PD	
		17	Persentase kewenangan yang dijalankan Kecamatan Kartoharjo (tidak dilaksanakan OPD lain)	%	100	100%	100%	100	100	Indikator Program PD	
		18	Persentase kewenangan yang dijalankan Kecamatan Taman (tidak dilaksanakan OPD lain)	%	100	100%	100%	100	100	Indikator Program PD	
		19	Persentase pengkoordinasian ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Manguharjo	%	100	100%	100%	100	100	Indikator Program PD	
		20	Persentase pengkoordinasian ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Kartoharjo	%	100	100%	100%	100	100	Indikator Program PD	
		21	Persentase pengkoordinasian ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Taman	%	100	100%	100%	100	100	Indikator Program PD	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1	Persentase peningkatan kelurahan yang terklasifikasi swasembada di Kecamatan Manguharjo		100%	66%	66%			Indikator Sasaran PD	RPJMD 2019-2024 (Indikator Lama)
		2	Persentase peningkatan kelurahan yang terklasifikasi swasembada di Kecamatan Kartoharjo		100%	66%	66%			Indikator Sasaran PD	
		3	Persentase peningkatan kelurahan yang terklasifikasi swasembada di Kecamatan Taman		100%	55%	55%			Indikator Sasaran PD	
		4	Nilai Indeks Pelayanan Publik di Kecamatan Manguharjo		4,91	3,08	3,08			Indikator Sasaran PD	
		5	Nilai Indeks Pelayanan Publik di Kecamatan Kartoharjo		4,55	2,99	2,99			Indikator Sasaran PD	
		6	Nilai Indeks Pelayanan Publik di Kecamatan Taman		4,78	3,7	3,52			Indikator Sasaran PD	
		7	Persentase terfasilitasi pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kecamatan Manguharjo		100%	100%	100%			Indikator Sasaran PD	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
		8	Persentase terfasilitasi pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kecamatan Kartoharjo		100%	100%	100%			Indikator Sasaran PD	
		9	Persentase terfasilitasi pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kecamatan Taman		100%	100%	100%			Indikator Sasaran PD	
		10	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah Kecamatan Manguharjo		100%	100%	100%			Indikator Program	
		11	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah Kecamatan Kartoharjo		100%	100%	100%			Indikator Program	
		12	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah Kecamatan Taman		100%	100%	100%			Indikator Program	
		13	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Manguharjo		92,45	90,03	90,03			Indikator Program	
		14	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kartoharjo		88,65	87,85	87,85			Indikator Program	
		15	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Taman		92,	88,94	88,94			Indikator Program	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
		16	Persentase kewenangan yang dijalankan Kecamatan Manguharjo dan tidak dilaksanakan OPD lain		100%	100%	100%			Indikator Program	
		17	Persentase kewenangan yang dijalankan Kecamatan Kartoharjo dan tidak dilaksanakan OPD lain		100%	100%	100%			Indikator Program	
		18	Persentase kewenangan yang dijalankan Kecamatan Taman dan tidak dilaksanakan OPD lain		100%	100%	100%			Indikator Program	
		19	Persentase pengkoordinasian ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Manguharjo		100%	100%	100%			Indikator Program	
		20	Persentase pengkoordinasian ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Kartoharjo		100%	100%	100%			Indikator Program	
		21	Persentase pengkoordinasian ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Taman		100%	100%	100%			Indikator Program	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
	8		Unsur Pemerintahan Umum								
	IX		Kesatuan Bangsa dan Politik								
		1	Indeks Kerukunan	Indeks	B (77,80) (Harmoni)	B (75,00) (Harmonis)	75,68	78,2	78,2	Indikator Sasaran Kota dan Indikator Tujuan PD	RPD 2025-2026 (Indikator Baru)
		2	persentase penanganan konflik sosial	%	100			100	100	Indikator Sasaran PD	
		3	Persentase Pembinaan Idiologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	%	100			100	100	Indikator Sasaran PD	
		4	Persentase Partai Politik pemenang Pemilu	%	100			100	100	Indikator Sasaran PD	
		5	Persentase orkemas baru yang berbadan hukum	%	100			100	100	Indikator Sasaran PD	
		6	Persentase pencegahan konflik keagamaan, kehidupan sosial dan budaya	%	100			100	100	Indikator Sasaran PD	
		7	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks	3,43			3,5	3,5	Indikator Sasaran PD	
		8	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	81,25			81,75	81,75	Indikator Program PD	
		9	Cakupan Pembinaan Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%	100	100%	100%	100	100	Indikator Program PD	
		10	Persentase Pendidikan Politik kepada Partai Politik Pemenang Pemilu	%	100	100%	100%	100	100	Indikator Program PD	
		11	Persentase Status Kelembagaan Orkesmas	%	100	70%	70%	100	100	Indikator Program PD	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
		12	Persentase Koordinasi yang dilakukan dengan pemangku kepentingan	%	100	100%	100%	100	100	Indikator Program PD	
		13	Persentase Konflik yang Terfasilitasi	%	100	100%	100%	100	100	Indikator Program PD	
		1	Indeks Kerukunan		B (77,80) (Harmoni)	B (75,00) (Harmonis)	75,68			Lanjutan Indikator Sasaran Kota dan Indikator Tujuan PD	RPJMD 2019-2024 (Indikator Lama)
		2	persentase konflik yang tertangani		100%	100%	100%			Indikator Sasaran PD	
		3	Persentase Partai Politik pemenang Pemilu yang lolos verifikasi		100%	100%	100%			Indikator Sasaran PD	
		4	Jumlah Peningkatan Orkemas yang Berbadan Hukum		2 Organisasi	1 organisasi	1 organisasi			Indikator Sasaran PD	
		5	Jumlah Konflik Keagamaan, Kehidupan Sosial dan Budaya		1	-10	-10			Indikator Sasaran PD	
		6	Cakupan pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		100%	100%	100%			Indikator Program PD	
		7	persentase pendidikan politik kepada Partai Politik Pemenang Pemilu		100%	100%	100%			Indikator Program PD	
		8	persentase Status Kelembagaan Orkemas		70%	70%	70%			Indikator Program PD	
		9	persentase koordinasi yang dilakukan dengan pemangku kepentingan		100%	100%	100%			Indikator Program PD	
		1	Persentase konflik yang terfasilitasi		100%	100%	100%			Indikator Program PD	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
III			ASPEK DAYA SAING DAERAH								
	A		Kemampuan Ekonomi								
	I		Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah								
		1	persentase peningkatan Usaha Mikro yang beromset naik	%	1,07			0,14	0,14	Indikator Tujuan PD	RPD 2025-2026 (Indikator Baru)
		2	persentase peningkatan koperasi yang berkualitas	%	0			5	5	Indikator Tujuan PD	
		3	Persentase koperasi yang berkualitas	%	78,21			75	75	Indikator Sasaran PD	
		4	Persentase usaha mikro yang beromset naik	%	0,14			1,5	1,5	Indikator Sasaran PD	
		5	Persentase Usaha Mikro dibina yang beromzet naik	%	55,4	8%	8%	7,33	7,33	Indikator Program PD	
		6	Persentase jumlah koperasi yang disetujui permohonan bersertfikat NIK	%	75	75,00%	75,00%	80	80	Indikator Program PD	
		7	Persentase koperasi yang dibina dan jenis usahanya bertambah	%	3	2,50%	2,50%	2,5	2,5	Indikator Program PD	
		1	persentase Usaha Mikro yang beromset naik		0,14%	0,12%	0,12%			Indikator Tujuan PD	RPJMD 2019-2024 (Indikator Lama)
		2	persentase koperasi yang bersertifikat NIK		85%	87%	87%			Indikator Tujuan PD	
		3	Persentase Peningkatan Jumlah Koperasi Yang Bersertifikat Nik		5%	3%	3%			Indikator Sasaran PD	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4	Persentase jumlah koperasi yang jenis usahanya bertambah		5%	2,50%	2,50%			Indikator Sasaran PD	
		5	Persentase Peningkatan Pelaku Usaha Yang Beromset Naik Setelah Dipromosikan		30%	15%	15%			Indikator Sasaran PD	
		6	Persentase peningkatan Pelaku Usaha Mikro Yang Beromset Naik Setelah Pembinaan		30%	10%	10%			Indikator Sasaran PD	
		7	Persentase Usaha Mikro dibina yang beromzet naik		55,40%	8%	8%			Indikator Program PD	
		8	Persentase jumlah koperasi yang disetujui permohonan bersertfikat NIK		75%	75,00%	75,00%			Indikator Program PD	
		9	Persentase koperasi yang dibina dan jenis usahanya bertambah		3%	2,50%	2,50%			Indikator Program PD	
	II		Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal								
		1	Nilai Realisasi Penanaman Modal	Milyar	236	195 M	195 M	198	198	Indikator Tujuan PD	RPD 2025-2026 (Indikator Baru)
		2	Nilai Indeks Pelayanan Publik	Skor	4,77			4,51	4,51	Indikator Sasaran PD	
		3	Persentase peningkatan jumlah investor	%	40			37	37	Indikator Sasaran PD	
		4	Nilai Indeks kepuasan masyarakat Perangkat Daerah	Nilai	88,35			89,5	89,5	Indikator Sasaran PD	
		5	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai	83,6			84	84	Indikator Program PD	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan penanaman modal	%	100	100%	100%	100	100	Indikator Program PD	
		7	Persentase investor yang merealisasikan investasinya	%	40	39%	39%	42	42	Indikator Program PD	
		8	Persentase Pelayanan Perizinan Terselesaikan	%	99,87	95%	95%	97	97	Indikator Program PD	
		9	Jumlah Perusahaan yang melaporkan LKPM	Perusahaan	134	100 perusahaan	115 perusahaan	120	120	Indikator Program PD	
		10	persentase Jenis Izin Yang Diproses Secara Elektronik	%	100	100%	100%	100	100	Indikator Program PD	
		1	ICOR			4,37				Indikator Tujuan PD	RPJMD 2019-2024 (Indikator Lama)
		2	Nilai Realisasi Penanaman Modal		236 M	195 M	195 M			Indikator Sasaran PD	
		3	Persentase penerbitan ijin sesuai SP		100%	85%	100%			Indikator Sasaran PD	
		4	Jumlah Rekomendasi Terhadap peraturan daerah/peraturan Wali Kota yang terkait dengan investasi		2 rekom	2 rekom	2 rekom			Indikator Sasaran PD	
		5	Persentase terpenuhinya informasi yang dibutuhkan investor		100%	100%	100%			Indikator Sasaran PD	
		6	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan penanaman modal		100%	100%	100%			Indikator Program PD	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7	Persentase investor yang merealisasikan investasinya		40%	39%	39%			Indikator Program PD	
		8	Persentase Pelayanan Perizinan Terselesaikan		99.87%	95%	95%			Indikator Program PD	
		9	Jumlah Perusahaan yang melaporkan LKPM		126	100 perusahaan	115 perusahaan			Indikator Program PD	
		10	persentase Jenis Izin Yang Diproses Secara Elektronik		100%	100%	100%			Indikator Program PD	
	III		Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan								
		1	Rasio pendapatan pelaku usaha perikanan dengan Biaya Produksi	skor	1,31			1,35	1,35	Indikator Sasaran PD	RPD 2025-2026 (Indikator Baru)
		2	Jumlah total produksi perikanan budidaya (ton)	Ton	285			290	290	Indikator Program PD	
		3	Tingkat Konsumsi Ikan (kg/kapita/tahun)	kg/ kapita/tahun	17,8			33,57	33,57	Indikator Program PD	
		4	Jumlah total produksi perikanan tangkap (ton)	ton	94,5			89	89	Indikator Program PD	
		1	Rasio pendapatan pelaku usaha perikanan dengan Biaya Produksi		1,31	1,35	1,35			Indikator Sasaran PD	RPJMD 2019-2024 (Indikator Lama)
		2	Jumlah total produksi perikanan budidaya (ton)		285	290	290			Indikator Program PD	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3	Tingkat Konsumsi Makan Ikan (kg/kapita/tahun)		17,8	15,9	15,9			Indikator Program PD	
		4	Jumlah total produksi perikanan tangkap (ton)		94,5	89	89			Indikator Program PD	
	IV		Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata								
		1	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata	%	6,93			6,97	6,97	Indikator Sasaran Kota	RPD 2025-2026 (Indikator Baru)
		2	Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap nilai PDRB	%	5,22			5,22	5,22	Indikator Tujuan PD	
		3	Persentase pendapatan sektor pariwisata terhadap PAD	%	13,08			13,08	13,08	Indikator Sasaran PD	
		4	Persentase peningkatan wasatawan yang datang ke lokasi DTW Destinasi Pariwisata	%	75,68			79	79	Indikator Program PD	
		5	Persentase peningkatan pelayanan pemasaran pariwisata	%	100			100	100	Indikator Program PD	
		6	Persentase SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang dibina	%	6,6			7	7	Indikator Program PD	
		1	Jumlah Kunjungan Wisatawan		543.207	450.000	450.000			Indikator Tujuan PD	RPJMD 2019-2024 (Indikator Lama)
		2	Jumlah destinasi wisata daerah yang berwawasan lingkungan		35	30 destinaai	30 destinaai			Indikator Sasaran PD	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3	Persentase Peningkatan Pelaku Ekonomi Kreatif yang berkualitas		111,80%	10%	10%			Indikator Sasaran PD	
		4	Persentase Peningkatan Destinasi Wisata Daerah		175%	30%	30%			Indikator Program PD	
		5	Persentase Peningkatan Pemasaran Pariwisata yang diselenggarakan		111,80%	20%	20%			Indikator Program PD	
		6	Persentase SDM pariwisata pembekalan sektor kepariwisataan		11,29%	20%	20%			Indikator Program PD	
	V		Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian								
		1	Rasio Pendapatan Pelaku Usaha Peternakan dengan biaya produksi	skor	1,4	1,221	1,221	1,22	1,22	Indikator Sasaran PD	RPD 2025-2026 (Indikator Baru)
		2	Rasio Pendapatan Petani dengan Biaya Produksi	rasio	1,14	1,16	1,16	1,16	1,16	Indikator Sasaran PD	
		3	Efektifitas Sarana Pertanian (%)	%	60	65	65	65	65	Indikator Program PD	
		4	persentase Pengembangan Prasarana yang Berfungsi dengan baik (%)	%	75	100	100	100	100	Indikator Program PD	
		5	persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular (%)	%	28	10	10	10	10	Indikator Program PD	
		6	persentase Lahan Aman Bencana Pertanian (%)	%	100	76	76	76	76	Indikator Program PD	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7	persentase kelompok tani yang memiliki Izin Usaha Pertanian (%)	%	15,7	15	15	15	15	Indikator Program PD	
		8	persentase Jumlah SDM Pertanian Terlatih (%)	%	26	20	20	20	20	Indikator Program PD	
		1	Rasio Pendapatan Pelaku Usaha Peternakan dengan biaya produksi		1,4	1,221	1,221			Indikator Sasaran PD	RPJMD 2019-2024 (Indikator Lama)
		2	Rasio Pendapatan Petani dengan Biaya Produksi		1,14	1,16	1,16			Indikator Sasaran PD	
		3	Efektifitas Sarana Pertanian (%)		55	65	65			Indikator Program PD	
		4	persentase Pengembangan Prasarana yang Berfungsi dengan baik (%)		50	100	100			Indikator Program PD	
		5	persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular (%)		10	10	10			Indikator Program PD	
		6	persentase Lahan Aman Bencana Pertanian (%)		72	76	76			Indikator Program PD	
		7	persentase kelompok tani yang memiliki Izin Usaha Pertanian (%)		10	15	15			Indikator Program PD	
		8	persentase Jumlah SDM Pertanian Terlatih (%)		20	20	20			Indikator Program PD	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
	VI		Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan								
		1	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	%	5,60	3,16	7,98	5,65	5,65	Indikator Sasaran Kota	RPD 2025-2026 (Indikator Baru)
		2	Persentase Nilai Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	26,71	24,05	24,05	25,05	25,05	Indikator Tujuan PD	
		3	Indeks Pengelolaan Perdagangan	Indeks	-			96,5	96,50	Indikator Sasaran PD	
		4	Persentase pasar rakyat yang berfungsi dengan baik	%	100			100	100	Indikator Sasaran PD	
		5	Persentase kesesuaian takaran/timbangan produk yang diperdagangkan	%	100			95	95	Indikator Sasaran PD	
		6	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks	3,96			3,97	3,98	Indikator Sasaran PD	
		7	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	84,35			84,36	84,36	Indikator Program PD	
		8	Persentase legalitas pelaku usaha perdagangan yang diterbitkan atau direkomendasikan	%	127			100	100	Indikator Program PD	
		9	Persentase pemantauan ketersedian barang pokok dan penting	%	100			100	100	Indikator Program PD	
		10	persentase UTTP dan BDKT yg telah melakukan tera dan pengawasan BDKT	%	101,6	100%	100%	100	100	Indikator Program PD	
		11	Persentase produk perdagangan yang dipromosikan	%	100	100%	100%	100	100	Indikator Program PD	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
		12	persentase pasar yang dikelola sarana distribusinya	%	100	100%	100%	100	100	Indikator Program PD	
		1	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan		5,60	3,16	7,98			Lanjutan Indikator Sasaran Kota	RPJMD 2019-2024 (Indikator Lama)
		2	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Jasa		24,7	1,02	21,57			Indikator Sasaran Kota	
		5	Persentase Nilai Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB		26,71	24,05	24,05			Indikator Tujuan PD	
		6	Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Perdagangan		4,23	0,8	0,8			Indikator Sasaran PD	
		7	Persentase Layanan UTTP dan pengawasan BDKT yang terealisasi		101,6%	100%	100%			Indikator Sasaran PD	
		8	Persentase Peningkatan Pendapatan Retribusi Pasar Rakyat		23,69%	5%	5%			Indikator Sasaran PD	
		9	persentase perusahaan yang memperbarui perijinan		100%	100%	100%			Indikator Program PD	
		11	Persentase pelaksanaan pengawasan bahan pokok dan barang penting		100%	100%	100%			Indikator Program PD	
		12	persentase UTTP dan BDKT yg telah melakukan tera dan pengawasan BDKT		100%	100%	100%			Indikator Program PD	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
		14	Persentase produk perdagangan yang dipromosikan		100%	100%	100%			Indikator Program PD	
		15	persentase pasar yang dikelola sarana distribusinya		100%	100%	100%			Indikator Program PD	
	VII		Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian								
		1	Persentase Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang tangguh	%	-			13	13	Indikator Tujuan PD	RPD 2025-2026 (Indikator Baru)
		2	Persentase IKM yang bertambah kapasitas produksinya	%	-			8	8	Indikator Sasaran PD	
		3	Persentase IKM yang mengikuti publikasi produk	%	13,40	10,00%	10,00%	10	10	Indikator Program PD	
		4	persentase IKM yang mutu produk dan kapasitasnya meningkat	%	19,17	5%	5%	5	5	Indikator Program PD	
		1	persentase IKM yang berstandarisasi		82%	45%	45%			Indikator Tujuan PD	RPJMD 2019-2024 (Indikator Lama)
		2	persentase komoditi makanan dan minuman yang memenuhi standarisasi		81,61%	85%	85%			Indikator Sasaran PD	
		3	persentase pengajuan rekomendasi permodalan yang disetujui		100,00%	90%	90%			Indikator Sasaran PD	
		4	persentase pengajuan perijinan NIB yang direkomendasi		100,00%	100%	100%			Indikator Sasaran PD	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
		5	persentase peningkatan IKM terpublikasikan		16,67%	10%	10%			Indikator Sasaran PD	
		6	Persentase IKM yang mengikuti publikasi produk		15,14%	10,00%	10,00%			Indikator Program PD	
		7	persentase IKM yang mutu produk dan kapasitasnya meningkat		9,38%	5%	5%			Indikator Program PD	
	B		Fasilitas Wilayah Infrastruktur								
		1	Livable City (Indeks Kenyamanaan Kota)		90,33	89,01	89,01			Indikator Tujuan Kota	RPJMD 2019-2024 (Indikator Lama)
	I		Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
		1	Indeks Layanan Infrastruktur	Indeks	92,54			92,49	92,49	Indikator Tujuan, PD	RPD 2025-2026 (Indikator Baru)
		2	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Indeks	3,94			3,94	3,94	Indikator Sasaran PD	
		3	Persentase ketaatan penyelenggaraan penataan ruang sesuai ketentuan	%	100			100	100	Indikator Sasaran PD	
		4	Persentase tingkat kondisi jalan kota yang mantab	%	95,52	96%	96%	98,18	95,80	Indikator Sasaran PD	
		5	Persentase bangunan gedung sesuai dengan ketentuan	%	100	100%	100%	100	100	Indikator Sasaran PD	
		6	Persentase panjang saluran drainase dalam kondisi baik	%	80,10	80,12%	80,12%	80,15	80,15	Indikator Sasaran PD	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7	Persentase kawasan rawan banjir/ genangan	%	17,91	17,34	17,34	16,97	16,97	Indikator Sasaran PD	
		8	Persentase rumah tangga yang terlayani kebutuhan air minum	%	100			100	100	Indikator Sasaran PD	
		9	Jumlah rumah tangga yang terlayani IPLT	%	100			100	100	Indikator Sasaran PD	
		10	Presentase pelaku jasa konstruksi yang kompeten	%	100			100	100	Indikator Sasaran PD	
		11	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	86			85	85	Indikator Program	
		12	Presentase berfungsinya bangunan pengendali banjir untuk meningkatkan kawasan bebas banjir/ genangan	%	82,09			82,66	83,03	Indikator Program	
		13	Persentase berfungsinya saluran drainase kota untuk meningkatkan kawasan bebas banjir/ genangan	%	82,09			82,66	83,03	Indikator Program	
		14	Persentase Jumlah jaringan sambungan rumah yang terpasang	%	73,93			0,23	75,43	Indikator Program	
		15	Persentase tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan IPLT	%	-			100	100	Indikator Program	
		16	Persentase bangunan gedung yang terbangun	%	-			100	100	Indikator Program	
		17	Persentase kawasan strategis/cagar budaya terbangun/terehab	%	-			100	100	Indikator Program	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
		18	Persentase kondisi jalan kota yang baik	%	-			95,8	95,80	Indikator Program	
		19	Persentase tenaga konstruksi yang tersertifikasi	%	-			22,75	22,75	Indikator Program	
		20	Persentase ketaatan pemanfaatan tata ruang sesuai ketentuan	%	-			100	100	Indikator Program	
		1	Indeks Infrastruktur		92,54	98,59	98,59			Lanjutan Indikator Sasaran Kota dan Indikator Tujuan PD	RPJMD 2019-2024 (Indikator Lama)
		2	Persentase kawasan bebas banjir/genangan		82,09%	82,82%	82,82%			Indikator Sasaran PD	
		3	Persentase bangunan gedung sesuai dengan ketentuan		100%	100%	100%			Indikator Sasaran dan Indikator Program PD	
		4	Persentase Ketaatan Pemanfaatan ruang sesuai RTRW		100%	100%	100%			Indikator Sasaran PD	
		5	Persentase Rumah tangga yang terlayani kebutuhan air minum		100%	100%	100%			Indikator Sasaran PD	
		6	Persentase tingkat kondisi jalan kota yang mantab		95,52%	96%	96%			Indikator Sasaran PD	
		7	Persentase jalan dalam kondisi mantab		95,52%	96%	96%			Indikator Program PD	
		8	Persentase rawan banjir/genangan		17,91	17,34	17,34			Indikator Program PD	
		9	Persentase pelaku jasa kontruksi yang memenuhi standar kompetensi		81,01%	94,95%	94,95%			Indikator Program PD	
		10	Persentase Rumah Tangga yang terlayani kebutuhan air minum		100%	100%	100%			Indikator Program PD	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
		11	Presentase panjang drainase dalam kondisi baik		80,10%	80,12%	80,12%			Indikator Program PD	
		12	Ketaatan terhadap RTRW		100%	100%	100%			Indikator Program PD	
		13	Persentase bangunan sesuai dengan ketentuan		100%	100%	100%			Indikator Program PD	
	II		Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman								
		1	Indeks Sarana Prasarana Permukiman	Indeks	94,05	92,19	92,19	97,31	97,31	Indikator Tujuan PD	RPD 2025-2026 (Indikator Baru)
			Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks	4,15			4,15	4,15	Indikator Sasaran PD	
		2	Indeks Perumahan Permukiman	Indeks	99,86	99,9	99,9	99,77	99,77	Indikator Sasaran PD	
		3	Indeks Pengelolaan PSU, RTH, PJU dan Permakaman	Indeks	86,94	82,76	82,76	94,3	94,3	Indikator Sasaran PD	
		4	persentase Pengembangan Perumahan	%	100	100%	100%	100	100	Indikator Program PD	
		5	persentase kawasan permukiman yang tidak kumuh	%	100	100%	100%	100	100	Indikator Program PD	
		6	persentase Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	%	100	100%	100%	100	100	Indikator Program PD	
		1	Indeks Sarana Prasarana Permukiman		94,05	92,19	92,19			Sebelumnya Indikator Sasaran Kota Menjadi Indikator Tujuan PD	RPJMD 2019-2024

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2	Indeks Perumahan Permukiman		99,86	99,9	99,9			Lanjutan Indikator Sasaran PD	(Indikator Lama)
		3	Indeks Pengelolaan PSU, RTH, PJU dan Permakaman		86,94	82,76	82,76			Lanjutan Indikator Sasaran PD	
		4	persentase Pengembangan Perumahan		100%	100%	100%			Indikator Program PD	
		5	persentase kawasan permukiman yang tidak kumuh		6,81%	100%	100%			Indikator Program PD	
		6	persentase Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)		100%	100%	100%			Indikator Program PD	
	III		Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan								
		1	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	%	100			100	100	Indikator Program PD	RPD 2025-2026 (Indikator Baru)
		2	Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan	%	100	100%	100%	100	100	Indikator Program PD	
		3	Persentase Penatagunaan Tanah	%	100	100%	100%	100	100	Indikator Program PD	
		1	persentase Pengelolaan Izin Lokasi		100%	100%	100%			Indikator Program PD	RPJMD 2019-2024 (Indikator Lama)
		2	Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan		100%	100%	100%			Indikator Program PD	
		3	persentase Penatagunaan Tanah		100%	100%	100%			Indikator Program PD	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
	IV		Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup								
		1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	60,24	57,93	57,93	57,94	57,94	Indikator Sasaran Kota dan Indikator Tujuan PD	RPD 2025-2026 (Indikator Baru)
		2	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	51,43	51,32	50	50	50	Indikator Sasaran PD	
		3	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	87,43	83,26	84,17	86,15	86,15	Indikator Sasaran PD	
		4	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Indeks	24,16	23	23	24,17	24,17	Indikator Sasaran PD	
		5	persentase pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	%	99,26	99,00%	99,00%	99,20	99,20	Indikator Sasaran PD	
		6	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks	3,95			3,3	3,3	Indikator Sasaran PD	
		7	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	85			84	85,01	Indikator Sasaran PD	
		8	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	83,60			80,4	80,4	Indikator Sasaran PD	
		9	persentase data Perencanaan Lingkungan Hidup yang tersedia	%	79,49	79,50%	87,18%	79,5	79,5	Indikator Program PD	
		10	Persentase titik sampel kualitas air dan udara yang memenuhi baku mutu	%	52,67	50,10%	50%	50,1	50,1	Indikator Program PD	
		11	Persentase Tutupan Lahan	%	50			50	50	Indikator Program PD	
		10	persentase pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)	%	76	78%	78%	78,2	78,2	Indikator Program PD	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
		11	persentase pelaku usaha / kegiatan yang taat terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	%	76,76	88,20%	88,20%	88,2	80,2	Indikator Program PD	
		12	persentase Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	%	100	100%	100%	100	100	Indikator Program PD	
		13	persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	%	160	100%	100%	100	100	Indikator Program PD	
		14	persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	%	72,41	71%	71%	71	71	Indikator Program PD	
		1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		60,24	57,93	57,93			Lanjutan indikator Sasaran Kota dan Indikator Tujuan PD	RPJMD 2019-2024 (Indikator Lama)
		2	Indeks Kualitas Air (IKA)		51,43	51,32	50			Indikator sasaran PD	
		3	Indeks Kualitas Udara (IKU)		87,43	83,26	84,17			Indikator sasaran PD	
		4	persentase pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga		99,26%	99,00%	99,00%			Indikator sasaran PD	
		5	persentase data Perencanaan LH yang tersedia		79,49%	79,50%	87,18%			Indikator Program PD	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6	persentase titik sampel kualitas air dan udara yang memenuhi baku mutu		52,67%	50,10%	50%			Indikator Program PD	
		7	persentase jumlah spesies KEHATI Lokal Daerah		100%	100%	100,00%			Indikator Program PD	
		8	persentase pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)		76%	78%	78%			Indikator Program PD	
		9	persentase pelaku usaha / kegiatan yang taat terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)		76,76%	88,20%	88,20%			Indikator Program PD	
		10	persentase Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat		100%	100%	100%			Indikator Program PD	
		11	persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup		160%	100%	100%			Indikator Program PD	
		12	persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga		72,41%	71%	71%			Indikator Program PD	
		13	Indeks Kualitas Lahan (IKL)		24,16	23	23			Indikator sasaran PD	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
	V		Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan								
		1	Indeks Fatalitas	%	8,58			8	8	Indikator Tujuan PD	RPD 2025-2026 (Indikator Baru)
		2	Tingkat Kecelakaan	JPKP	42			40	40	Indikator Sasaran PD	
		3	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana, serta Fasilitas Perlengkapan Lalu Lintas	%	100	96%	96%	100	100	Indikator Sasaran PD	
		4	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks	4,58			4,6	4,6	Indikator Sasaran PD	
		5	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	83,55			83,7	83,7	Indikator Program PD	
		6	Persentase perlengkapan jalan yang berfungsi baik	%	100			100	100	Indikator Program PD	
		1	Kinerja ruas jalan		0,33	0,4	0,4			Indikator Tujuan PD	RPJMD 2019-2024 (Indikator Lama)
		2	Kecepatan lalu lintas		41 km/jam	41 km/jam	41 km/jam			Indikator Sasaran PD	
		3	Kinerja Angkutan Umum		70%	43%	71%			Indikator Sasaran PD	
		4	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana, serta fasilitas perlengkapan lalu lintas		100%	96%	96%			Indikator Program PD	

Sumber: Bapppeda Kota Madiun, 2023, BPS Kota Madiun, 2023, dan Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kota madiun, 2023

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Tabel 6.3
Penetapan Indikator Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah RKPD Tahun 2025

NO			INDIKATOR	SATUAN	REALIASI	TARGET 2024		TARGET 2025		Label
					2023	RPJMD 2019-2024	RKPD 2024	RPD 2025-2026	RKPD 2025	
1			2	3	4	5	6	7	8	9
I			ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
	I		Urusan Pemerintahan Bidang Sosial							
		1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemisyang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	%	100	100%	100%	100	100	Lppd
		2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100	100%	100%	100	100	Lppd
		3	Jumlah layanan data dan pengaduaan yang dimiliki	layanan	3	3	3	4	3	Lppd
		4	Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjur usia terlantar dan gepeng yang untuk masuk dalam data terpadu FM dan OTM	orang	1205	840	840	1100	1100	Lppd
		5	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	tim	4 (PPT PPPA, SLRT, PKSAI dan LK3)	1 (PPT, SLRT)	1 (PPT, SLRT)	4	4	Lppd
		6	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	orang	1205	840	840	1100	1000	Lppd
		7	Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	unit	5	4	4	5	5	Lppd

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5	6	7	8	9
		8	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	orang	1205	170	170	1100	1000	Lppd
		9	Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	unit	2	2	2	2	2	Lppd
		10	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	orang	195	60	60	145	145	Lppd
		11	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	orang	29	20	20	2	2	Lppd
		12	Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter	unit	18	11	11	18	18	Lppd
		13	Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia	paket	1	1	1	1	1	Lppd
		14	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	orang	195	175	175	145	145	Lppd
		15	Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah	orang	3	1	1	1	5	Lppd
		16	Jumlah pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	orang	255 (Peksos Profesional 2, TKSK 3, TKS 15, PSM 209, TAGANA 26)	175 (Peksos Profesional 2, TKSK 3, TKS 13, PSM 135, TAGANA 23)	175 (Peksos Profesional 2, TKSK 3, TKS 13, PSM 135, TAGANA 23)	255	255	Lppd

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5	6	7	8	9
		17	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan social	orang	421	70	70	200	200	Lppd
		18	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	kali	4	2	2	3	4	Lppd
		19	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	orang	12	5	5	3	3	Lppd
		20	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar	orang	195	111	111	145	145	Lppd
		21	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	orang	195	226	226	145	145	Lppd
		22	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	orang	195	20	20	145	145	Lppd
		23	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	orang	43	66	66	10	10	Lppd
		24	Jumlah korban bencana yang mendapat makanan	orang	58	3.300	3.300	20	9	Lppd
		25	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	orang	58	1.000	1.000	9	9	Lppd

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5	6	7	8	9
		26	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	tempat	-	0	0	-	-	Lppd
		27	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	paket	58	0	0	9	9	Lppd
		28	Jumlah korban bencana yang meneriman pelayanan dukungan psikososial	orang	58	300	300	9	9	Lppd
		29	Jumlah Pekerja Sosial Profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	Orang	255 (Peksos Profesional 2, TKSK 3, TKS 15, PSM 209, TAGANA 26)	175 (Peksos Profesional 2, TKSK 3, TKS 13, PSM 135, TAGANA 23)	175 (Peksos Profesional 2, TKSK 3, TKS 13, PSM 135, TAGANA 23)	255	255	Lppd
		30	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	orang	117	100	100	450	450	Spm
		31	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	anak	613	470	470	40	40	Spm
		32	Jumlah Warga Negara lanjut Usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Orang	251	140	140	475	475	Spm
		33	Jumlah warga negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	orang	105	96	96	15	25	Spm
		34	Jumlah Warga Negara Korban Bencana Kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	orang	58	36	36	9	9	Spm
	II		Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
		1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	32,88	30%	30%	32	32	Lppd
		2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%	0,0326	0,00%	0,00%	0,04	0,04	Lppd

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5	6	7	8	9
		3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per100.000 penduduk perempuan)	%	14,53	0,00%	0,00%	14,58	14,55	Lppd
		4	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	lembaga	34	70	70	34	34	Lppd
		5	Jumlah program PUG ada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	program	34	129	129	34	34	Lppd
		6	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	Media	2 media massa (Madiun Today, Radio Suara Madiun)	4 (Madiun Today, RRI, Radar Madiun, Radio Suara Madiun)	4 (Madiun Today, RRI, Radar Madiun, Radio Suara Madiun)	2	2	Lppd
		7	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	lembaga	15	15	15	15	15	Lppd
		8	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	%	100	100%	100%	100	100	Lppd
		9	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	lembaga	15	15	15	15	15	Lppd
		10	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)	lembaga	13	15	15	15	13	Lppd
		11	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	lembaga	1	30	30	1	1	Lppd
		12	Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih	Orang	45	45	45	45	45	Lppd
		13	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	lembaga	1	20	20	1	1	Lppd

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5	6	7	8	9
		14	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	Lembaga	20	20	20	20	20	Lppd
		15	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	Kebijakan/ Program	3	2	2	3	3	Lppd
		16	Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandardisasi	Lembaga	1	1	1	1	1	Lppd
		17	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	%	100	100%	100%	100	100	Lppd
c.			Fokus Seni Budaya dan Olahraga							
	I		Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga							
		1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	44,54	40,81%	40,81%	44,57	44,57	Lppd
		2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	47,45	45,49%	45,49%	47,46	47,46	Lppd
		3	Peningkatan prestasi olahraga	medali	6	36	36	6	6	Lppd
		4	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	orang	78	100	100	80	80	Lppd
		5	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan Kewirausahaan	orang	0	100	100	0	0	Lppd
		6	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kaderpengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukaelawanan dan kepeloporan pemuda	orang	78	100	100	80	80	Lppd
		7	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	orang	5	5 orang	5 orang	5	5	Lppd

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5	6	7	8	9
		8	Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	orang	158	158	158	158	158	Lppd
		9	Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	event	6	4	4	6	6	Lppd
	II		Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan							
		1	Terlestarikannya Cagar Budaya	obyek	20	20	20	20	20	Lppd
		2	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	obyek	32	366	366	32	32	Lppd
		3	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yangdikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	obyek	32	366	366	32	32	Lppd
		4	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	obyek	32	366	366	32	32	Lppd
		5	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatankompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	orang	100	100	100	100	100	Lppd
		6	Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	obyek	148	148	148	148	148	Lppd
		7	Perlindungan cagar budaya kabupaten/kota (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	obyek	20	20	20	20	20	Lppd

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5	6	7	8	9
		8	Layanan perijzinan membawa cagar budaya kabupaten/kota ke luar provinsi dengan dukungan data	layanan	0	0	0	0	0	Lppd
		9	Pengembangan cagar budaya kabupaten/kota (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	obyek	2	2	2	2	2	Lppd
		10	Pemanfaatan cagar budaya kabupaten/kota (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	obyek	20	20	20	20	20	Lppd
		11	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum		0	0	0	0	0	Lppd
		12	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan		0	0	0	0	0	Lppd
		13	Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum kabupaten/kota		0	0	0	0	0	Lppd
		14	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	orang	6	6	6	6	6	Lppd
		15	Pembentukan tim ahli cagar budaya kabupaten/kota	orang	0	11	11	0	0	Lppd
		16	Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budya	orang	0	0	0	0	0	Lppd
		17	Pemetaan sdm cagar budayadan permuseuman	orang	0	0	0	0	0	Lppd
		18	Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan pemuseuman kabupaten/kota	orang	0	0	0	0	0	Lppd
		19	Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman		0	0	0	0	0	Lppd
		20	Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat		0	0	0	0	0	Lppd

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5	6	7	8	9
II			ASPEK PELAYANAN UMUM							
a			Fokus Lelayanan Urusan Pemerintahan Wajib							
	1		Terkait Pelayanan Dasar							
	I		Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan							
		1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Peserta didik	5.395	3.750	3.750	5.395	5.395	Lppd
		2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Peserta didik	18.943	16.000	16.000	18.928	18.943	Lppd
		3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Peserta didik	9.489	7.250	7.250	9.489	9.489	Lppd
		4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Peserta didik	320	170	170	273	273	Lppd
		5	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi	lembaga	99	16	16	91	91	Lppd
		6	Jumlah peserta didik PAUD yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Peserta didik	137	50	50	137	137	Lppd
		7	Jumlah peserta didik PAUD yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Peserta didik	137	90	90	137	137	Lppd
		8	Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD	Rasio	01:12	01.13	01.13	01:12	01:12	Lppd
		9	Jumlah pendidik pada PAUD	Orang	429	460	460	439	439	Lppd

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5	6	7	8	9
		10	Jumlah pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	Orang	401	455	455	415	415	Lppd
		11	Jumlah kepala sekolah PAUD yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pemerintah yang berwenang	Orang	99	12	12	91	91	Lppd
		12	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	lembaga	66	70	70	66	66	Lppd
		13	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	anak	2750	2.658	2.658	2750	2.750	Lppd
		14	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	anak	3200	3.284	3.284	3200	3.200	Lppd
		15	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	anak	10766	11.000	11.000	10766	10.766	Lppd
		16	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan	anak	8201	10.000	10.000	8201	8.201	Lppd
		17	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar	rasio	01:17	01.20	01.20	01:17	01:17	Lppd
		18	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	rasio	01:14	01.27	01.27	01:14	01:14	Lppd

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5	6	7	8	9
		19	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	orang	1210	674	674	1210	1.210	Lppd
		20	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	orang	739	513	513	739	739	Lppd
		21	jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	rasio	01:64	01.04	01.04	194	01:65	Lppd
		22	jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	rasio	01:63	01.05	01.05	129	01:63	Lppd
		23	jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	orang	196	161	161	194	194	Lppd
		24	jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	orang	129	68	68	129	129	Lppd
		25	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	orang	1207	668	668	1207	1.207	Lppd
		26	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	orang	735	696	696	735	735	Lppd
		27	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	orang	85	73	73	84	84	Lppd
		28	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	orang	27	23	23	27	27	Lppd
		29	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/sederajat	orang	77	165	165	76	76	Lppd

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5	6	7	8	9
		30	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazahSMA/sederajat	orang	33	70	70	33	33	Lppd
		31	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi	lembaga	3	1	1	3	3	Lppd
		32	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Peserta didik	580	0	0	0	0	Lppd
		33	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Peserta didik	580	0	0	0	0	Lppd
		34	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan	Orang	01:15	01.30	01.30	01:15	01:15	Lppd
		35	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan	Orang	40	30	30	40	40	Lppd
		36	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	Orang	39	30	30	39	39	Lppd
		37	Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah D-IV atau S1	Orang	7	6	6	6	6	Lppd
		38	jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar(SD/MI, SMP/MTs)	Orang	28.432	26.301	26.301	28417	28.432	spm
		39	jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Orang	320	230	230	273	273	spm
		40	jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Orang	5.395	3.750	3.750	5395	5.395	spm

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5	6	7	8	9
		41	Rata-Rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional	Nilai	89,06	1	1	89,56	89,56	spm
		42	Rata-Rata Kemampuan Numerasi SD Berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	72,29			72,69	72,79	spm
		43	Iklim Keamanan SD	Nilai	74,97			75,13	75,13	spm
		44	Iklim Kebhinekaan SD	Nilai	72,73			72,83	72,83	spm
		45	Iklim Inklusivitas SD	Nilai	58,94			60,14	60,14	spm
		46	Rata-Rata kemampuan Literasi SMP berdasarkan asesmen nasional	Nilai	92,37			92,48	92,48	spm
		47	Rata-Rata Kemampuan Numerasi SMP Berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	73,74			73,84	73,84	spm
		48	Iklim Keamanan SMP	Nilai	73,31			73,41	73,41	spm
		49	Iklim Kebhinekaan SMP	Nilai	70,88			70,98	70,98	spm
		50	Iklim Inklusivitas SMP	Nilai	58,26			58,46	58,46	spm
		51	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD Yang Mendapatkan Minimal AKREDITAS B	Nilai	-			94,6	94,6	spm
		52	Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1/ D IV	Nilai	94,71			94,81	94,81	spm
	II		Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan							
		1	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	2.450	2.450 Orang	2.450 Orang	2410	2.410	Lppd/ Spm
		2	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	2.338	2.338 Orang	2.338 Orang	2300	2300	Lppd/ Spm
		3	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	2.227	2.227 Orang	2.227 Orang	2207	2.207	Lppd/ Spm
		4	Jumlah Balita yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	9.081	9.081 orang	9.081 orang	8981	8.981	Lppd/ Spm

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5	6	7	8	9
		5	Jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	orang	31.582	31.855 Orang	31.855 Orang	31582	31.582	Lppd/ Spm
		6	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	orang	114.664	114.664 Orang	114.664 Orang	129950	129.950	Lppd/ Spm
		7	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	orang	30.573	30.573 Orang	30.573 Orang	34490	34.490	Lppd/ Spm
		8	Jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	orang	42.970	68.973 Orang	68.973 Orang	40710	40.710	Lppd/ Spm
		9	Jumlah warga negara penderita diabetes melitus yang mendapatkan layanan kesehatan	orang	7.741	8.143 Orang	8.143 Orang	8142	8.142	Lppd/ Spm
		10	Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	orang	339	339 Orang	339 Orang	343	343	Lppd/ Spm
		11	Jumlah warga negara terduga tuberculusis yang mendapatkan layanan kesehatan	orang	1.032	5.044 Orang	5.044 Orang	5729	5.729	Lppd/ Spm
		12	Jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodefiviency virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	5.828	5.780 Orang	5.780 Orang	6051	6.051	Lppd/ Spm
		13	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	Rasio	5,81	0.48%	0.48%	4,91	4,91	Lppd
		14	Jumlah RS Rujukan Kabupaten/Kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	Unit	9	8	8	9	9	Lppd
		15	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	%	100	100%	100%	88,8	88,8	Lppd
		16	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	Unit	9	8	8	9	9	Lppd

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5	6	7	8	9
		17	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan Kesehatan ibu hamil	%	100	100%	100%	100	100	Lppd
		18	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jenis	5	5 Jenis	5 Jenis	5	5	Lppd
		19	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	Orang	497	330	330	497	497	Lppd
		20	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100	100%	100%	100	100	Lppd
		21	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jenis	3	3 jenis	3 Jenis	3	3	Lppd
		22	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	Orang	459	291	291	459	459	Lppd
		23	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100	100%	100%	100	100	Lppd
		24	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jenis	6	6 Jenis	6 Jenis	6	6	Lppd
		25	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	Orang	458	289	289	458	458	Lppd
		26	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100	100%	100%	100	100	Lppd
		27	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jenis	9	9 Jenis	9 Jenis	9	9	Lppd
		28	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Orang	1.315	571	571	1241	1.241	Lppd
		29	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100%	100%	100	100	Lppd
		30	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jenis	5	5 jenis	5 Jenis	5	5	Lppd

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5	6	7	8	9
		31	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	Orang	3.240	371	371	3240	3.240	Lppd
		32	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	100%	100%	100	100	Lppd
		33	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jenis	4	3 Jenis	3 Jenis	4	4	Lppd
		34	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	617	578	578	617	617	Lppd
		35	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	100%	100%	100	100	Lppd
		36	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jenis	3	3 Jenis	3 Jenis	3	3	Lppd
		37	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	1.201	1286	1286	1201	1201	Lppd
		38	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100%	100%	60	60	Lppd
		39	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jenis	3	3 jenis	3 Jenis	3	3	Lppd
		40	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	204	156	156	204	204	Lppd
		41	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100%	100%	100	100	Lppd
		42	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jenis	3	3 Jenis	3 Jenis	3	3	Lppd

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5	6	7	8	9
		43	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	218	169	169	218	218	Lppd
		44	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100	100%	100%	100	100	Lppd
		45	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jenis	4	4 Jenis	4 Jenis	4	4	Lppd
		46	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	64	30	30	64	64	Lppd
		47	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100	100%	100%	100	100	Lppd
		48	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jenis	7	7 Jenis	7 Jenis	7	7	Lppd
		49	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	665	748	748	665	665	Lppd
		50	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100	100%	100%	100	100	Lppd
		51	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	jenis	4	4 jenis	4 Jenis	4	4	Lppd
		52	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	%	375	376	376	375	375	Lppd
	III		Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat							
		1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	97%	97	98	98	Lppd

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5	6	7	8	9
		2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	100%	100%	100	100	Lppd
		3	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100%	100%	100	100	Lppd
		4	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	menit	11	15 menit	15 menit	15	15	Lppd
		5	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	Pelanggar	2.102	2.000	2.000	2000	2.000	Lppd
		6	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	Orang	1.300	1.300 orang	1.300 orang	1348	1.300	Lppd
		7	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	peraturan	79	76	76	76	76	Lppd
		8	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	Orang	3	5 orang	5 orang	5	3	Lppd
		9	Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	SOP	35	35 SOP	35 SOP	4	4	Lppd
		10	Tersedianya sarana prasarana minimal	Jenis	12 bidang barang (685 barang)	12 bidang barang (685 barang)	12 bidang barang (685 barang)	93	12	Lppd
		11	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota	Jenis	5	5 jenis	5 jenis	5	5	Lppd
		12	Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	Lokasi	1	1 pos garasi Damkar	1 pos garasi Damkar	1	1	Lppd
		13	Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	Shift	ada 3 shift selama 24 jam di garasi Damkar	ada 3 shift selama 24 jam di garasi Damkar	ada 3 shift selama 24 jam di garasi Damkar	3	3	Lppd

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5	6	7	8	9
		14	Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa	Pos	ada 1 pos garasi damkar	ada 1 pos garasi damkar	ada 1 pos garasi damkar	1	1	Lppd
		15	Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	jenis	34 Jenis (187 buah)	34 Jenis (187 buah)	34 Jenis (187 buah)	33	34	Lppd
		16	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	orang	9	9 orang	9 orang	9	9	Lppd
		17	Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	orang	22	22 orang	22 orang	45	22	Lppd
		18	Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	jenis	4	4 Jenis	4 Jenis	4	4	Lppd
		19	Pelayanan Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan Perkada	%	100	100%	100%	100	100	Spm
		20	Pelayanan warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100%	100%	100	100	Spm
		21	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Orang	141.874	845 orang	153,367 orang	140.035	141.874	Lppd

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5	6	7	8	9
		22	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	905	50 orang	2,395 orang	260	511	Lppd
		23	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	orang	42	400 orang	156 orang	42	42	Lppd
		24	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	%	100	100%	100%	100	100	Lppd
		25	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	%	100	100%	100%	100	100	Lppd
		26	Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	%	100	100%	100%	100	100	Lppd
		27	Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	%	100	100%	100%	100	100	Lppd
		28	Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	%	34,3	5%	67,34%	34,3	24,76	Lppd
		29	Persentase warga negara yang ikut pelatihan	%	30,84	5%	58,67%	30,84	21,59	Lppd
		30	Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	%	100	100%	100%	100	100	Lppd
		31	Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan		0	0	0	0	0	Lppd
		32	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB		0	0	0	0	0	Lppd

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5	6	7	8	9
		33	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	%	100	100%	0%	100	100	Lppd
		34	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	%	100	100%	100%	100	100	Lppd
		35	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	%	100	100%	100%	100	100	Lppd
		36	Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	%	100	100%	100%	100	100	Spm
		37	Jumlah Warga Negara yang memperolah Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	%	100	100%	100%	100	100	Spm
		38	Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	%	100	100%	100%	100	100	Spm
	2		Tidak Terkait Pelayanan Dasar							
	I		Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja							
		1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	69,23	76,92%	76,92%	76	76	Lppd
		2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	69,03	68%	68%	68	68	Lppd
		3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja		11,764,400,00	13.000.000.000	13.000.000.000	10,748,101,01	10,748,101,01	Lppd
		4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	%	100	75,00%	75,00%	75	75	Lppd

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5	6	7	8	9
		5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	%	55,98	53%	53%	53	53	Lppd
		6	Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota.	Do kumen	Ada	1	1	1	1	Lppd
		7	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja.	%	0	0	0			Lppd
		8	Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota.	Perusahaan	0	15	15	15	15	Lppd
		9	Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	%	100	30%	30%	30	30	Lppd
		10	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	%	73	30%	30%	30	30	Lppd
		11	Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	%	11,74	50%	50%	50	50	Lppd
		12	Persentase LPK yang terakreditasi	%	35,71	40%	40%	30	30	Lppd
		13	Persentase LPK yang memiliki perizinan	%	41	100%	100%	90	90	Lppd
		14	Jumlah penganggur yang dilatih	Orang	237	230	230	200	200	Lppd
		15	Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	%	100	100%	100%	100	100	Lppd
		16	Persentase penyerapan lulusan	%	73	20%	20%	50	50	Lppd
		17	Lulusan bersertifikat kompetensi	%	100	20%	20%	90	90	Lppd
		18	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	%	0	25%	25%	0	0	Lppd
		19	Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	%	0	25%	25%	0	0	Lppd

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5	6	7	8	9
		20	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	%	5%	2%	2%	1	1	Lppd
		21	Data tingkat produktivitas total	%	tidak ada	65,00%	65,00%	0	0	Lppd
		22	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	%	28,8	30%	30%	28	28	Lppd
		23	Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	%	61,9	30%	30%	62	62	Lppd
		24	Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	Tercatat	21 SP/SB	23	23	21	21	Lppd
		25	Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah.	%	12,73	100%	100%	14	14	Lppd
		26	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	%	100	75%	75%	100	100	Lppd
		27	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	%	2,1	3%	3%	2	2	Lppd
		28	Jumlah mogok kerja	Pekerja	0	4	4	0	0	Lppd
		29	Jumlah penutupan perusahaan	Perusahaan	0	9	9	0	0	Lppd
		30	Jumlah perselisihan kepentingan	kasus	0	13	13	0	0	Lppd
		31	Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja / Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	Kasus	0	1	1	0	0	Lppd
		32	Jumlah perselisihan PHK	Kasus	15	13	13	10	10	Lppd
		33	Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	Orang	98	40	40	50	50	Lppd
		34	Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	Kasus	15	50	50	12	12	Lppd

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5	6	7	8	9
		35	Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan	Lembaga	tidak ada	1	1	0	0	Lppd
		36	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	%	100	70%	70%	90	90	Lppd
		37	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota	Lowongan	469	125	125	250	250	Lppd
		38	Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota	orang	727	375	375	400	400	Lppd
		39	Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota	BKK	22	19	19	22	22	Lppd
		40	Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota	orang	0	0	0	0	0	Lppd
		41	Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	orang	2	1	1	2	2	Lppd
		42	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota	Lembaga	0	0	0	0	0	Lppd
		43	Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota.	Perjanjian kerja	183	50	50	100	100	Lppd
		44	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	penempatan	0	0	0	0	0	Lppd
		45	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	%	0	10%	10%	0	0	Lppd
		46	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	Orang	183	50	50	150	150	Lppd

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5	6	7	8	9
		47	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan	Orang	0	0	0	0	0	Lppd
		48	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	Orang	0	0	0	0	0	Lppd
		49	Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	data	0	0	0	0	0	Lppd
		50	Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentukan	layanan	0	0	0	0	0	Lppd
	II		Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
		1	Perekaman KTP elektronik	%	93,1	99,00%	99,00%	97	97	Lppd
		2	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	88,33	94,00%	94,00%	91	91	Lppd
		3	Kepemilikan akta kelahiran	%	99,14	99,20%	99,20%	100	100	Lppd
		4	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	%	47,06	90,90%	90,90%	50	50	Lppd
		5	Penerbitan akta perkawinan	%	100	99,30%	99,30%	100	100	Lppd
		6	Penerbitan akta perceraian	%	100	99,30%	99,30%	100	100	Lppd
		7	Penerbitan akta kematian	%	100	99,25%	99,25%	100	100	Lppd
		8	Penyajian data kependudukan	%	100	100%	100%	100	100	Lppd
	III		Urusan Pemerintahan Bidang Pangan							

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5	6	7	8	9
		1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	%	100	100	100	100	100	Lppd
		2	Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	Ada/ tidak	tidak	tidak	tidak	tidak	tidak	Lppd
		3	Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	Ada/ tidak	tidak	tidak	tidak	tidak	tidak	Lppd
		4	Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	Ada/ tidak	tidak	tidak	tidak	tidak	tidak	Lppd
		5	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	Ada/ tidak	ada	ada	ada	ada	ada	Lppd
		6	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	unit	1	1	1	1	1	Lppd
		7	Tertanganinya kerawanan pangan	Ada/ tidak	ada	ada	ada	ada	ada	Lppd
		8	Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	Ada/ tidak	tidak	tidak	tidak	tidak	tidak	Lppd
		9	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	Ada/ tidak	ada	ada	ada	ada	ada	Lppd
	IV		Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							
		1	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	4,74	<7.7%	6,74%	6,8	6,8	Lppd
		2	TFR (Angka Kelahiran Total)		1,85			1,93	1,93	Lppd
		3	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang diPerdakan	Ada/ tidak	Ada	-	-	Ada	Ada	Lppd

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5	6	7	8	9
		4	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	tahun	28	Wanita >21 tahun	Wanita >21 tahun	> 21	> 21	Lppd
		5	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	skor	7,23	0,51	0,51	< 7,21	< 7,21	Lppd
		6	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	%	100	100%	100%	100	100	Lppd
		7	Jumlah stakeholders/ pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	Stake holders	27	16	16	27	28	Lppd
		8	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	76,27	72,80%	73,32%	68,5	68,5	Lppd
		9	Persentase Fasilitasi Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	%	100	97,78%	97,78%	100	100	Lppd
		10	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	40,02	53,00%	53%	40,2	40,2	Lppd
		11	Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	Kelompok Kerja	243	56	56	243	243	Lppd
		12	Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	%	78,8	45,03%	45,03%	53	53	Lppd
		13	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	4,74			6,8	6,8	
		14	Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	%	3,7	64,96%	64,96%	3,7	3,7	Lppd
		15	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	%	100	100%	100%	100	100	Lppd

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5	6	7	8	9
	V		Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika							
		1	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	100	75%	75%	100	100	Lppd
		2	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	100	81,95%	80,00%	75	80	Lppd
		3	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	%	93,35	100%	100%	92	923	Lppd
		4	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	%	100	100%	100%	100	100	Lppd
		5	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	100%	100%	100	100	Lppd
		6	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	%	100	100%	100%	100	100	Lppd
		7	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan	Ada/ tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Lppd

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5	6	7	8	9
		8	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuaidengan PM Kominfo No.5/2015	%	100	100%	100%	100	100	Lppd
		9	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	%	100	100%	100%	100	100	Lppd
		10	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	%	100	100%	100%	100	100	Lppd
		11	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yangtelah diimplementasikan secara elektronik	%	100	100%	100%	100	100	Lppd
		12	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	%	85,7	25%	25%	25	80	Lppd
		13	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	%	100	100%	100%	100	100	Lppd
		14	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	%	85	86%	86%	83	85	Lppd
		15	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	%	100	100%	100%	100	100	Lppd

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5	6	7	8	9
		16	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	%	100	100%	100%	100	100	Lppd
		17	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	%	100	100%	100%	100	100	Lppd
		18	Persentase data yang dapat berbagi pakai	%	100	100%	100%	100	100	Lppd
		19	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	%	100	100%	100%	100	100	Lppd
		20	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi dibawah pengelolaan Dinas Kominfo	%	100	100%	100%	100	100	Lppd
		21	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	Ada/ tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Lppd
		22	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kabupaten/ kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota	%	100	100%	100%	100	100	Lppd
		23	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	%	100	100%	100%	100	100	Lppd
		24	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	%	100	100%	100%	100	100	Lppd

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5	6	7	8	9
	VI		Urusan Pemerintahan Bidang Statistik							
		1	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100%	100%	100	100	Lppd
		2	Tersedianya buku profil daerah	Ada/ tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Lppd
		3	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	Kali	5	1	1	1	1	Lppd
		4	Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	Kali	5	1	1	1	1	Lppd
		5	Jumlah kompilasi stastik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	kali	20	1	1	1	1	Lppd
		6	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik	%	100	100%	100%	75	100	Lppd
		7	Persentase kelengkapan metadata variabel dari kegiatan statistik	%	100	100%	100%	75	100	Lppd
	VII		Urusan Pemerintahan Bidang Persandian							
		1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	96	70%	70%	86	95	Lppd
		2	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumah kegiatan strategis yang harus diamankan	%	0	0	0	0	0	Lppd
		3	Persentase system elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip2 manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	%	100	100%	100%	100	100	Lppd

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5	6	7	8	9
		4	Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	%	100	85%	85%	100	100	Lppd
		5	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan PolaHubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan	%	100	89,50%	89,50%	100	100	Lppd
	VIII		Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan							
		1	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	%	4,49	1 penduduk : 3 Buku	1 penduduk : 3 Buku	4,49	4,49	Lppd
		2	Persentase ketermanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat	%	4,6	4,90%	4,90%	4,6	4,6	Lppd
		3	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	%	0,37	5 tenaga perpustakaan : 369 penduduk	5 tenaga perpustakaan : 369 penduduk	0,37	0,37	Lppd
		4	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	orang	74.268	59%	59%	74300	74.300	Lppd
		5	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/ dialih media (digitalisasi)/ terdaftar yang ada di wilayahnya	eksemplar	83	10 eksemplar	10 eksemplar	92	92	Lppd
		6	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	naskah	NIHIL	NIHIL	NIHIL	1	1	Lppd
		7	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	koleksi	199	NIHIL	NIHIL	210	210	Lppd
	IX		Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan							
		1	persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	%	100	9%	9%	100	100	Lppd

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5	6	7	8	9
		2	persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	%	100	9%	9%	100	100	Lppd
		3	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	%	100	6%	6%	100	100	Lppd
		4	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	%	55	belum dilaksanakan	belum dilaksanakan	60	60	Lppd
		5	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	kali	5	1 kali	1 kali	1	1	Lppd
		6	Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	Daftar arsip	29	34 daftar arsip yang diselamatkan	34 daftar arsip yang diselamatkan	1	1	Lppd
		7	Penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/ kota yang sesuai NSPK di provinsi		1	belum dilaksanakan	belum dilaksanakan	1	1	Lppd
		8	Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan provinsi yang sesuai NSPK	arsip	19	30 arsip hasil alih media	30 arsip hasil alih media	1	1	Lppd
		9	Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah provinsi yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	Daftar arsip	4	belum dilaksanakan	belum dilaksanakan	1	1	Lppd
		10	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah provinsi yang sesuai NSPK	Aturan	1	belum dilaksanakan	belum dilaksanakan	1	1	Lppd

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5	6	7	8	9
	4		Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan							
	I		Sekretariat Daerah							
		1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. Yang ditandatangani pada kuartal pertama	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	LPPD
		2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	34,51%	14,00%	14,00%	13,63%	15,00%	LPPD
		3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	36,95%	30,00%	30,00%	29,93%	30,00%	LPPD
	5		Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan							
	IV		Keuangan							
		1	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	%	16,09	21,30%	15,00%	17,80%	18,73%	Lppd
		2	Rasio PAD terhadap PDRB NonMigas	%	2,17	2,50%	1,50%	1,67%	1,95%	Lppd
		3	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (expenditures)	%	76,29	63%	83,83%	75,11%	76,24%	Lppd
		4	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	-6,65	80%	-23,70%	-11,08%	7,50%	Lppd
		5	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	-2,39	103%	-73,96%	-73,96%	1,00%	Lppd
		6	Manajemen Aset	Ya/ tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Lppd
		7	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	%	9	18%	10%	115%	8%	Lppd

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5	6	7	8	9
	V		Kepegawaian							
		1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	71,02	339%	223%	65	71,02	LPPD
		2	Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	23,86	18%	18%	26	23,86	LPPD
		3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	100	87%	87%	100	100	LPPD
	6		Inspektorat Daerah							
		1	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	3	3	3	3	3	Lppd
		2	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	3	3	3	3	3	Lppd
III			ASPEK DAYA SAING DAERAH							
	A		Kemampuan Ekonomi							
	I		Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah							
		1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	88,57	80,65%	80,65%	85	85	Lppd
		2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	%	34,29	0,45%	0,45%	30	30	Lppd
		3	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	0	80%	80%	0	0	Lppd

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5	6	7	8	9
		4	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kasusaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	0	0	0	0	0	Lppd
		5	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	33,97	16,13%	16,13%	30	30	Lppd
		6	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	33,97	19,35%	19,35%	30	30	Lppd
		7	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	42,95	96,77%	96,77%	40	40	Lppd
		8	Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota	%	1,68	2,35%	2,35%	1,5	1,5	Lppd
		9	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasianuntuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerahkabupaten/kota	%	1,28	22,58%	22,58%	1	1	Lppd
		10	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	%	0	1,29%	1,29%	0	0	Lppd

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5	6	7	8	9
		11	Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	84,62	81,29%	81,29%	85,26	85,26	Lppd
		12	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	0	80,65%	80,65%	55	55	Lppd
		13	Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	1,92	1,29%	1,29%	1,29	1,29	Lppd
		14	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	84,62	78,71%	78,71%	74,36	74,36	Lppd
		15	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi denganwilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	1,92	1,29%	1,29%	1,29	1,29	Lppd
		16	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	%	0,45	0,42%	0,42%	0,5	0,5	Lppd
		17	Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	%	100	100%	100%	100	100	Lppd
		18	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	%	0,15	0,14%	0,14%	0,16	0,16	Lppd
		19	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	%	0,09	0,07%	0,07%	0,09	0,09	Lppd
		20	Persentase jumlah usahamikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	%	2,15	0,28%	0,28%	2	2	Lppd

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5	6	7	8	9
		21	Rasio usaha mikroyang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	%	0,48	0,84%	0,84%	0,47	0,47	Lppd
		22	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan	%	0,48	0,12%	0,12%	0,47	0,47	Lppd
	II		Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal							
		1	Persentase peningkatan investasi dikabupaten/ kota	%	2	0,52%	113,00%	2	2	Lppd
		2	PERDA mengenai pemberian fasilitas/ intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Perda	1	1 dokumen	1 dokumen	1	1	Lppd
		3	Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas insentif penanaman modal	Do kumen	1	0	1 dokumen	1	1	Lppd
		4	Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	Do kumen	1	1 dokumen	1 dokumen	1	1	Lppd
		5	Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	Kali	1	1 kali	1 kali	1	1	Lppd
		6	Kegiatan pameran penanaman modal	Kali	1	1 kali	1 kali	1	1	Lppd
		7	Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	Kali	1	1 kali	1 kali	1	1	Lppd
		8	Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	Orang	30	285	285 konsultasi	23	23	Lppd
		9	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	Izin	4.000	1800	4000	4250	4.250	Lppd
		10	Laporan realisasi penanaman modal	Milyar	236	195 M	195 M	198	198	Lppd
		11	Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota	Orang	4	15 orang	15 orang	5	5	Lppd

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5	6	7	8	9
		12	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	Per usahaan	350	100 perusahaan	115 perusahaan	390	390	Lppd
		13	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan kabupaten/kota	Buah	1	1 buah	1 buah	1	1	Lppd
	III		Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan							
		1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	Ton	379,5	381	381	381	381	Lppd
		2	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	RTP	437	435 RTP	435 RTP	435	435	Lppd
		3	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	Ada/ tidak	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	Lppd
		4	Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan	Ada/ tidak	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	Lppd
		5	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)	orang	254	260	260	260	260	Lppd
		6	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang diproduksi	ekor	340	537.406 ekor	537.406 ekor	517.400	517.400	Lppd

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5	6	7	8	9
	IV		Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata							
		1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	31,1	3%	3%	32	32	Lppd
		2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	%	75,68	10%	10%	79	79	Lppd
		3	Tingkat hunian akomodasi	%	100	100%	100%	100	100	Lppd
		4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	3,7	5,20%	5,20%	3,7	3,7	Lppd
		5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	55	266,10%	266,10%	56	56	Lppd
		6	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata		0	0	0	0	0	Lppd
		7	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota	Orang	704	704	704	704	704	Lppd
		8	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	orang	4556	950	950	4738	4738	Lppd
		9	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	kali	5	5	5	5	5	Lppd
		10	Jumlah event luar negeri yang diikuti provinsi		0	0	0	0	0	Lppd
		11	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	kali	Belum ada	2 kali	2 kali	2	2	Lppd
		12	Persentase tenaga kerja di sektor parwisata yang disertifikasi	%	18,68	20%	20%	18,68	18,68	Lppd
		13	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	Lokasi	0	3	3	3	3	Lppd

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5	6	7	8	9
	V		Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian							
		1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Ton/ ha	6,95	-	-	6	6	Lppd
		2	Sarana pertanian yang diberikan	Jenis	6	2	2	2	2	Lppd
		3	Prasarana pertanian yang digunakan	Jenis	3	3 jenis	3 jenis	3	3	Lppd
		4	Penerbitan izin usaha pertanian	Kali	2	2	2	2	2	Lppd
		5	Persentase prasarana yang digunakan	%	100	75	75	75	75	Lppd
		6	Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian dikab/kota	%	100	50	50	50	50	Lppd
		7	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana (%)	%	50	50	50	50	50	Lppd
	VI		Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan							
		1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan	%	52	100%	30%	52,5	52,5	Lppd
		2	Persentase Kinerja Realisasi Pupuk	%	98,34	100%	50%	49	49	Lppd
		3	Persentase alat–alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	100	100%	100%	100	100	Lppd
		4	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin:							
			a. Pusat perbelanjaan	%	100	100%	100%	100	100	Lppd
			b. Toko swalayan	%	100	100%	100%	100	100	Lppd
		5	Persentase penerbitan TDG	%	100	100%	60%	100	100	Lppd
		6	Persentase gudang yang tidak mempunyai TDG	%	61,17	100%	60%	61,2	61,2	Lppd

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5	6	7	8	9
		7	Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk:	%	100	100%	100%	100	100	Lppd
		8	Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbaya di tingkat daerah Kab/Kota	%	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	Lppd
		9	Persentase penerbitan SPKA yang tepat waktu	Ada/ tidak	Tidak ada	Tidak ada	tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Lppd
		10	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	%	100	50%	100%	100	100	Lppd
		11	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	Ada/ tidak	Tidak ada	Tidak ada	tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Lppd
		12	Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	%	98,34	100%	50%	49	49	Lppd
		13	Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	%	100	100%	100%	100	100	Lppd
	VII		Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian							
		1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	%	279,25	0,03%	0,03%	150	150	Lppd
		2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	%	0	0,02%	0,02%	0	0	Lppd

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5	6	7	8	9
		3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	100	25%	25%	100	100	Lppd
		4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	0	0%	0%	0	0	Lppd
		5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/ Kota	%	0	0%	0%	0	0	Lppd
		6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Jumlah	4240	45%	45%	4240	4240	Lppd
		7	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/ kota	%	0	0%	0%	0	0	Lppd
		8	Persentase terselesaikannya dokumen RIPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA	%	75	100%	100%	100	100	Lppd
		9	Persentase jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	%	0,96	50%	50%	90	90	Lppd
		10	Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri kecil dan menengah yang diterbitkan	%	tidak ada	0%	0%	0	0	Lppd

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5	6	7	8	9
		11	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/ kota yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota	%	3,56	1,20%	1,20%	3	3	Lppd
	B		Fasilitas Wilayah Infrastruktur							
	I		Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
		1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	%	0,78	79.47%	100%	100	100	Lppd
		2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	%	1	0	0	0	0	Lppd
		3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	1	0	0	0	0	Lppd
		4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	46,201	100%	100%	100	100	Lppd
		5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	46,141	99%	99%	99,74	99,74	Lppd
		6	Rasio kepatuhan IMB kab/kota	%	306	72,7	72,7	100	100	Lppd

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5	6	7	8	9
		7	Tingkat kemantaban Jalan Kabupaten/ Kota	%	426,018	94,08%	94,08%	95,03	95,03	Lppd
		8	Rasio tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	104	59%	59%	22,75	22,75	Lppd
		9	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	Km	612 ha	3,2 Km	3,2 Km	5,63	5,63	Lppd
		10	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	M	72,776	19.334 M	72,776	72,776	72,776	Lppd
		11	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (HA)	Ha	0	0	0	0	0	Lppd
		12	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kab/kota (ha)	Ha	0	0	0	0	0	Lppd
		13	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/[oa pengelolaan SD Air WS Kewenangan kabupaten/kota	Ada/ tidak	Ada (1 dokumen)	Tidak Ada	Tidak Ada	ada	ada	Lppd
		14	Rencana teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	Ada/ tidak	Ada (18 dokumen)	Tidak Ada	Tidak Ada	ada	ada	Lppd
		15	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kab/kota	jumlah	77 (23 pintu air BBWS, 39 pintu air Kota, 15 pompa)	0	0	62	62	Lppd
		16	Persentase panjang jaringan irigasi primer kondisi baik	%	0	0	0	0	0	Lppd
		17	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	%	0	0	0	0	0	Lppd
		18	Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	%	0	0	0	0	0	Lppd

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5	6	7	8	9
		19	Penetapan dokumen RISPAM kabupaten/kota (Ada /Tidak)	Ada/ tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Lppd
		20	Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota (Ada/Tidak)	Ada/ tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Lppd
		21	Jumlah BUMD dan/atau UPTD Kab/Kota Penyelenggara SPAM (Ada/Tidak)	Unit	1	1	1	1	1	Lppd
		22	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan Penyelenggaraan SPAM	Izin	0	0	0	0	0	Lppd
		23	Jumlah kerjasama penyelenggaraan SPAM dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain.	Kerja sama	0	0	0	0	0	Lppd
		24	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	rumah	0	0	0	0	0	Lppd
		25	Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	rumah	0	0	0	0	0	Lppd
		26	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	rumah	0	0	0	0	0	Lppd
		27	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	rumah	0	0	0	0	0	Lppd
		28	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	rumah	0	0	0	0	0	Lppd
		29	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	rumah	0	0	0	0	0	Lppd

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5	6	7	8	9
		30	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	%	0	100	100	100	100	Lppd
		31	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	%	0	0	0	0	0	Lppd
		32	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	%	0	0	0	0	0	Lppd
		33	Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	%	0	0	0	0	0	Lppd
		34	Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	%	0	0	0	0	0	Lppd
		35	Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	%	0	0	0	0	0	Lppd
		36	Kinerja penyediaan sambungana rumah yang tersambung ke IPALD	%	0	0	0	0	0	Lppd
		37	Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	%	0	0	0	0	0	Lppd
		38	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	%	100	100%	100%	100	100	Lppd
		39	Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting	Buah	255	425	250	275	275	Lppd
		40	Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/ Gedung (ada/tidak)	Ada/ tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Lppd
		41	Penetapan Keputusan Bupati/ Wali Kota tentang Tim Ahli Bangunan/ Gedung (Ada/tidak)	Ada/ tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Lppd
		42	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota untuk dilindungi dan dilestarikan	unit	20	20 Unit	20 Unit	20	20	Lppd
		43	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota untuk kepentingan strategis daerah	unit	20	20 Unit	20 Unit	20	20	Lppd

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5	6	7	8	9
		44	Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota	unit	230	230	230	230	230	Lppd
		45	Jumlah bangunan gedung negara milik peerintah kabupaten/kota yang dipelihara/ dirawat	unit	13	5 Unit	5 Unit	8	8	Lppd
		46	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan Kepala Daerah dalam SK Jalan Kewenangan Kab/Kota	km	433,485	433,095 Km	433,095 Km	433,485	433,485	Lppd
		47	Panjang jalan yang dibangun	km	2	0,4 km	0,4 km	2	2	Lppd
		48	Panjang jembatan yang dibangun	m	-	10 m	10 m	-	-	Lppd
		49	Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	km	-	3,5 km	3,5 km	-	-	Lppd
		50	Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	m	5	0	0	5	5	Lppd
		51	Panjang jalan yang direkonstruksi/ direhabilitasi	km	14,9	5 km	5 km	14,9	14,9	Lppd
		52	Panjang jembatan yang direhabilitasi	m	0	0	0	0	0	Lppd
		53	Panjang jalan yang dipelihara	km	53	40 km	40 km	52	52	Lppd
		54	Panjang jembatan yang dipelihara	km	4,05	3,8 km	3,8 km	3,95	3,95	Lppd
		55	Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah kabupaten/kota	kali	0	3	3	0	0	Lppd
		56	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota	Orang	264	130	80	284	284	Lppd
		57	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah kabupaten/kota	Orang	264	30	80	270	270	Lppd
		58	Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir	Ada/ tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Lppd

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5	6	7	8	9
		59	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/kota	Ada/ tidak	Tidak Ada	Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Lppd
		60	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD	Ada/ tidak	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Lppd
		61	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	Ada/ tidak	Tidak Ada	Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Lppd
		62	Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaskanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	Ada/ tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Lppd
		63	Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	Ada/ tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Lppd
		64	Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analis konstruksi di wilayah kabuapten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya	Ada/ tidak	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Ada	Lppd

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5	6	7	8	9
		65	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analis	Ada/ tidak	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Ada	Lppd
		66	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analis di wilayah kab/kota	Ada/ tidak	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Ada	Lppd
		67	Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota	Ada/ tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Lppd
		68	Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	Ada/ tidak	Tidak	Ada	Ada	Tidak	Tidak	Lppd
		69	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Ada/ tidak	Tidak	Ada	Ada	Tidak	Tidak	Lppd
		70	Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Ada/ tidak	Tidak	Ada	Ada	Tidak	Tidak	Lppd
		71	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Ada/ tidak	Tidak	Ada	Ada	Tidak	Tidak	Lppd

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5	6	7	8	9
		72	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota	Badan usaha	100	115	100	100	100	Lppd
		73	Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP diwilayah kabupaten/kota	usaha	0	0	0	0	0	Lppd
		74	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota	Badan usaha	70	50	50	70	70	Lppd
		75	Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota	Badan usaha	100	100	100	100	100	Lppd
		76	Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	Komit men	0	30	30	0	0	Lppd
		77	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	pengawasan	0	50	50	0	0	Lppd
		78	Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Kejadi an	0	0	0	0	0	Lppd
		79	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	%	0	100	100	0	0	Lppd
		80	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	%	100	100	100	100	100	SPM

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5	6	7	8	9
		81	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	99,87	90	90	99,74	99,74	SPM
	II		Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman							
		1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	rumah	0	0	0	0	0	lppd
		2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	KK	105	105 KK	105 KK	105	105	lppd
		3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	%	6,81	100%	100%	94,28	94,28	lppd
		4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Unit	110	100 unit	100 unit	130	130	lppd
		5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Unit	41	50	50	55	55	lppd
		6	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	rumah	0	0	0	0	0	lppd
		7	Jumlah rumah yang terkena bencana alam	rumah	0	0	0	0	0	lppd
		8	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam		0	0	0	0	0	lppd
		9	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	unit	0	0	0	0	0	lppd

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5	6	7	8	9
		10	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	unit	0	0	0	0	0	lppd
		11	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	unit	0	0	0	0	0	lppd
		12	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	unit	0	0	0	0	0	lppd
		13	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	orang	0	0	0	0	0	lppd
		14	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	rumah	0	0	0	0	0	lppd
		15	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	rumah	0	0	0	0	0	lppd
		16	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	rumah	0	0	0	0	0	lppd
		17	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	KK	105	105 KK	105 KK	145	145	lppd
		18	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	rumah	0	0	0	0	0	lppd

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5	6	7	8	9
		19	Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	Ha	0	0	0	0	0	lppd
		20	Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	Ha	199,81	0 ha	0 ha	190	190	lppd
		21	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	Unit	110	100 unit	100 unit	130	130	lppd
		22	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	ha	14,62	0 ha	0 ha	24	24	lppd
		23	Jumlah rumah di kab/kota	unit	46.201	42.479	42.479	46201	46201	lppd
		24	Jumlah unit PK RTLH	unit	110	100 unit	100 unit	130	130	lppd
		25	Jumlah rumah tidak layak huni	unit	130	40 unit	40 unit	200	200	lppd
		26	Jumlah rumah yang tidak dihuni	unit	0	0	0	0	0	lppd
		27	Rasio rumah dan KK	%	116,03	170%	170%	119,08	119,08	lppd
		28	Jumlah rumah pembangunan baru	unit	158	50	50	145	145	lppd
		29	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	Unit perumahan	41	50	50	55	55	lppd
		30	Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	unit	6.821	5948 unit	5948 unit	6516	6516	lppd
		31	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	unit	6.821	5948 unit	5948 unit	6516	6516	lppd
		32	Jumlah unit rumah yang terfasiltasi akses sanitasi (on site / off site)	unit	6.821	5948 unit	5948 unit	6516	6516	lppd
		33	Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	Unit perumahan	41	5948 unit	5948 unit	55	55	lppd
		34	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	Unit	6.821	5948 unit	5948 unit	6516	6516	lppd
		35	Jumlah pengembang yang tersertifikasi	pengembang	41	50	50	55	55	lppd
		36	Jumlah pengembang yang terregistrasi	pengembang	41	50	50	55	55	lppd

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5	6	7	8	9
		37	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	pengembang	41	50	50	55	55	lppd
		38	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	0	0	0	100	100	Spm
		39	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	0	0	0	100	100	spm
	III		Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan							
		1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	100	100%	100%	100	100	Lppd
		2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	ha	4.196,02	30,52 ha	30,52 ha	30,52	30,52	Lppd
		3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	lokasi	0	0	0	0	0	Lppd
		4	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee		0	0	0	0	0	Lppd
		5	Tersedianya tanah untuk masyarakat.		0	0	0	0	0	Lppd
		6	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	kali	5	2	2	5	5	Lppd
		7	SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota	Do kumen	0	1	1	0	0	Lppd

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5	6	7	8	9
		8	SK Bupati/Wali Kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek		0	0	0	0	0	Lppd
		9	SK Bupati/Wali Kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee.		0	0	0	0	0	Lppd
		10	Dokumen Izin membuka tanah		0	0	0	0	0	Lppd
		11	Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota		0	0	0	0	0	Lppd
	IV		Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup							
		1	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	%	99	99,00%	99,00%	99	99	Lppd
		2	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	%	100	100%	100%	100	100	Lppd
		3	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota	Ada/ tidak ada	ada	ada	ada	ada	ada	Lppd
		4	Tersedianya informasi terkait rasio angkutan pengelolaan sampah terhadap volume timbulan sampah	%	1,603	1,602	1,603	1,603	1,603	Lppd
		5	Tersedianya informasi terkait kapasitas TPA terhadap volume timbulan sampah	%	6,25	5,98	5,98	6,25	6,25	Lppd
		6	Tersedianya informasi terkait jumlah TPST dibagi jumlah sampah pada masing - masing lingkungan	Ada/ tidak ada	belum memiliki	belum memiliki	belum memiliki	belum memiliki	belum memiliki	Lppd

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5	6	7	8	9
		7	Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	%	100	88,20%	88,20%	100	100	Lppd
		8	Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di provinsi terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	Ada/ tidak ada	ada	belum ada PPLHD	belum ada PPLHD	ada	ada	Lppd
		9	Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/ kota	Ada/ tidak ada	tidak ada MHA	tidak ada MHA	tidak ada MHA	tidak ada MHA	tidak ada MHA	Lppd
		10	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	Ada/ tidak ada	tidak ada MHA	tidak ada MHA	tidak ada MHA	tidak ada MHA	tidak ada MHA	Lppd
		11	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	%	100	100%	100%	100	100	Lppd
		12	Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten/kota yang ditangani.	%	100	100%	100%	100	100	Lppd
	V		Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan							
		1	Rasio konektivitas kabupaten/kota	%	1	-	-	100	1	Lppd
		2	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	%	0,33	0,4	0,4	0,35	0,35	Lppd
		3	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C	%	100	100%	100%	100	100	Lppd
		4	Terlaksananya pelayanan uji berkala	%	100	100%	100%	100	100	Lppd

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5	6	7	8	9
		5	Penetapan tarif fangkutan orang antar kota dalam kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	%	100	100%	100%	100	100	Lppd
		6	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	%	100	100%	100%	100	100	Lppd

Sumber: Bapppeda Kota Madiun, 2024 dan Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kota Madiun, 2024

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

BAB VII
PENUTUP

Sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun, RKPD digunakan sebagai acuan dalam penyusunan KUA, PPAS, RAPBD dan dasar-dasar pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah. RKPD berperan menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat prioritas pembangunan daerah, rencana kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian daerah secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program perangkat daerah dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Sesuai amanat Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RKPD Kota Madiun Tahun 2025 merupakan pedoman untuk penyusunan rancangan APBD Kota Madiun Tahun 2025.

Pada proses penyusunan dokumen rencana pembangunan dilakukan koordinasi antar lintas instansi pemerintah dengan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk menyerap aspirasi masyarakat dan pelaku pembangunan tentang rancangan arah dan kebijakan pembangunan. Selain itu, Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan terutama sinkronisasi rencana kegiatan, penyelarasan program dan kegiatan yang tercantum dalam agenda provinsi dan nasional.

Penyusunan RKPD 2025 telah mengikuti berbagai pendekatan yaitu: pendekatan politik, pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif, pendekatan atas-bawah dan bawah-atas (*top down* dan *bottom up*). Hal ini menunjukkan bahwa semua ruang yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan telah digunakan semua pihak untuk menyampaikan aspirasinya dalam penyusunan dokumen RKPD Kota Madiun Tahun 2025. Dalam penyusunan RKPD Kota Madiun Tahun 2025 ini senantiasa memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Hal ini dalam upaya untuk menjamin adanya keselarasan, sinergi dan harmonisasi antar dokumen perencanaan pembangunan tingkat pemerintahan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Dalam pelaksanaan tahun berjalan RKPD Kota Madiun Tahun 2025 terdapat ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan atau tidak sesuai dengan kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, maka akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk RKPD Perubahan Kota Madiun Tahun 2025 dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pj. WALI KOTA MADIUN,

ttd

EDDY SUPRIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,

Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN